



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

LAPORAN KEUANGAN

AUDITED
TAHUN ANGGARAN 2024





DAFTAR ISI

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	
LAPORAN REALISASI ANGGARAN	
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH NERACA	
LAPORAN OPERASIONAL	
LAPORAN ARUS KAS	
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR SINGKATAN	xv
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2024	1
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN	1
1.1.1 MAKSUD PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN	1
1.1.2 TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN	2
1.2 SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	4
1.3 DASAR HUKUM	5
BAB II EKONOMI MAKRO	7
2.1 GAMBARAN EKONOMI MAKRO	7
2.1.1 BESARAN PDRB	10
2.1.2 PERTUMBUHAN EKONOMI	11
2.1.3 STRUKTUR EKONOMI	12
2.1.4 PDRB PER KAPITA DAN PENDAPATAN PER KAPITA	13
2.1.5 EKSPOR IMPOR, NERACA PERDAGANGAN DAN INFLASI	14
2.1.6 EKSPOR	15
2.1.7 IMPOR	15
2.1.8 INFLASI / DEFLASI	15
BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN	20
3.1. IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN SECARA UMUM	20
3.2 PENDAPATAN DAERAH	24
3.3 BELANJA DAERAH	26
BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI	34
BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN	71
5.1 PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA	71



5.1.1	PENDAPATAN	72
5.1.1.1	Pendapatan Asli Daerah	73
5.1.1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	74
5.1.1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	76
5.1.1.1.3	PENDAPATAN HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	98
5.1.1.1.4	Lain-Lain PAD yang Sah	99
5.1.1.2	Pendapatan Transfer	101
5.1.1.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – DANA PERIMBANGAN	102
5.1.1.2.2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - lainnya	109
5.1.1.2.3	Transfer Pemerintah Provinsi	110
5.1.1.2.3.1	Pendapatan Bagi hasil pajak	111
5.1.1.2.3.2	pendapatan bagi hasil lainnya	113
5.1.1.3	LAIN – LAIN PENDAPATAN YANG SAH	113
5.1.2	BELANJA DAERAH	114
5.1.2.2	Belanja Operasi	115
5.1.2.1.1	Belanja Pegawai	117
5.1.2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	119
5.1.2.1.3	Belanja Hibah	122
5.1.2.1.4	Belanja Bantuan Sosial	125
5.1.2.2.	Belanja Modal	126
5.1.2.2.1	Belanja Modal Tanah	129
5.1.2.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	130
5.1.2.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	132
5.1.2.2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi Dan Jaringan	134
5.1.2.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	135
5.1.2.2.6	Belanja Aset LAINNYA	137
5.1.2.3	Belanja Tidak Terduga	138
5.1.3	SURPLUS (DEFISIT) REALISASI ANGGARAN	140
5.1.4	PEMBIAYAAN	141
5.1.4.1	Penerimaan Pembiayaan	141
5.1.4.2	Pengeluaran Pembiayaan	142
5.1.4.3	Pembiayaan Netto	142
5.1.5	SISA LEBIH PEMBIAYAAN APBD (SiLPA).....	143
5.2	PENJELASAN AKUN-AKUN LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH.....	144
5.2.1	SALDO ANGGARAN LEBIH AWAL	144
5.2.2	PENGUNAAN SAL SEBAGAI PENERIMAAN PEMBIAYAAN TAHUN BERJALAN	145



5.2.3	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN ANGGARAN (SiLPA/SiKPA).....	145
5.2.4	KOREKSI KESALAHAN PEMBUKUAN TAHUN SEBELUMNYA.....	146
5.2.5	SALDO ANGGARAN LEBIH AKHIR	147
5.3	PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA	148
5.3.1	ASET.....	148
5.3.1.1	Aset Lancar	148
5.3.1.1.1	Kas	149
5.3.1.1.2	Piutang	157
5.3.1.1.3	Penyisihan Piutang	173
5.3.1.1.4	Beban Dibayar Dimuka	187
5.3.1.1.5	Persediaan	189
5.3.1.2	Investasi Jangka Panjang	194
5.3.1.2.1	Investasi Jangka Panjang Non Permanen-Dana Bergulir	194
5.3.1.2.2	Investasi Jangka Panjang Permanen-Penyertaan Modal	195
5.3.1.3	Aset Tetap	198
5.3.1.3.1	Tanah	200
5.3.1.3.2	Peralatan dan Mesin	200
5.3.1.3.3	Gedung dan Bangunan	206
5.3.1.3.4	Jalan, Jaringan dan Irigasi	209
5.3.1.3.5	Aset Tetap Lainnya	211
5.3.1.3.6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	213
5.3.1.3.7	Akumulasi Penyusutan	214
5.3.1.4	Properti Investasi	217
5.3.1.4.1	Properti Investasi	217
5.3.1.4.2	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	220
5.3.1.5	Aset Lainnya	220
5.3.1.5.1	Tagihan Jangka Panjang	220
5.3.1.5.2	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	221
5.3.1.5.3	Aset Tidak Berwujud	223
5.3.1.5.4	Aset Lain-lain	225
5.3.1.5.5	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	229
5.3.1.5.6	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	231
5.3.2	KEWAJIBAN	233
5.3.2.1	Kewajiban Jangka Pendek	233
5.3.2.1.1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	234
5.3.2.1.2	Pendapatan Diterima Dimuka	234
5.3.2.1.3	Utang Belanja	235



5.3.2.1.4	Utang Jangka Pendek Lainnya	238
5.3.2.2	Kewajiban Jangka Panjang	239
5.3.2.2.1	Utang Kepada Masyarakat	239
5.3.3	EKUITAS.....	244
5.4	PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL (LO).....	245
5.4.1	PENDAPATAN	245
5.4.1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	245
5.4.1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	246
5.4.1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	249
5.4.1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	259
5.4.1.1.4	Lain-Lain Pad Yang Sah	261
5.4.1.2	Pendapatan Transfer	265
5.4.1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan	265
5.4.1.2.2	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	273
5.4.1.2.3	Transfer Pemerintah Provinsi	275
5.4.1.2.4	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	278
5.4.2	BEBAN	282
5.4.2.2	Beban Pegawai	283
5.4.2.3	Beban Persediaan	287
5.4.2.3	Beban Jasa	297
5.4.2.4	Beban Pemeliharaan	302
5.4.2.5	Beban Perjalanan Dinas	305
5.4.2.6	Beban Barang Dan Jasa Lainnya	308
5.4.2.7	Beban Hibah	314
5.4.2.8	Beban Bantuan Sosial	315
5.4.2.9	Beban Penyisihan Piutang	316
5.4.2.10	Beban Penyusutan Dan Amortisasi	318
5.4.3	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI.....	320
5.4.4	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL.....	321
5.4.4.1	Surplus Penjualan Aset Non Lancar	321
5.4.4.2	Defisit Penjualan Aset Non Lancar	321
5.4.4.3	Defisit DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA	322
5.4.5	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	322
5.4.6	POS LUAR BIASA	322
5.4.6.1	Beban Luar Biasa	323
5.4.7	SURPLUS/DEFISIT-LO	323
5.4	PENJELASAN ATAS POS – POS LAPORAN ARUS KAS.....	324



5.5.1	ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	324
5.5.1.1	Arus Masuk Kas	324
5.5.1.2	Arus Keluar Kas	330
5.5.1.3	Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi	331
5.5.2	ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI ASET NONKEUANGAN	332
5.5.2.1	Arus Masuk Kas	332
5.5.2.2	Arus Keluar Kas	332
5.5.2.3	Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi Nonkeuangan	333
5.5.3	ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN	334
5.5.4	ARUS KAS DARI AKTIVITAS NONANGGARAN	334
5.5.4.1	Arus Masuk Kas	334
5.5.4.2	Arus Keluar Kas	335
5.5.5	KENAIKAN/PENURUNAN KAS	336
5.5.6	SALDO AWAL KAS	337
5.5.7	KOREKSI SILPA	337
5.5.8	SALDO AKHIR KAS	338
5.5	PENJELASAN POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	340
5.6.1	EKUITAS AWAL	340
5.6.2	SURPLUS/DEFISIT	340
5.6.3	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	341
5.6.4	EKUITAS AKHIR	342
	BAB VI PENGUNGKAPAN LAINNYA	343
6.1.	INFORMASI KASUS HUKUM PEMERINTAH KOTA SAMARINDA	343
	BAB VII PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN	350
	BAB VIII PENUTUP	352
	LAMPIRAN	L1-1
	LAMPIRAN 1 IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN DAERAH TAHUN 2024	L1-1



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. 1 Persentase Penduduk Miskin Kota Samarinda	7
Tabel 2.1. 2 Tingkat Kedalam Kemiskinan Kota Samarinda	8
Tabel 2.1. 3 . Tingkat Keparahan Kemiskinan Kota Samarinda.....	8
Tabel 2.1. 4 Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Samarinda	8
Tabel 2.1. 5 Indeks Pembangunan Manusia	9
Tabel 2.1. 6 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Samarinda	9
Tabel 2.1. 7 Tingkat Inflasi Kota Samarinda.....	10
Tabel 2.1. 8 Perkembangan PDRB dan Laju Pertumbuhan PDRB Kota Samarinda Tahun 2018-2021 (Juta Rupiah)	11
Tabel 2.1. 9 Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2023 (Persen).....	12
Tabel 2.1. Struktur Ekonomi Kota Samarinda 2019-2023 (Persentase)	13
Tabel 2.1. PDRB Per Kapita Kota Samarinda Tahun 2019-2023.....	14
Tabel 2.1. 12 Perkembangan Laju Inflasi/Deflasi Kota Samarinda Menurut Kelompok Pengeluaran Tahun 2024 (Persen).....	16
Tabel 5.1. 1 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Kota Samarinda TA 2024	72
Tabel 5.1. 2 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda TA 2024	73
Tabel 5.1. 3 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Kota Samarinda TA 2024.....	75
Tabel 5.1. 4 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Per SKPD Kota Samarinda TA 2024.....	77
Tabel 5.1. 5 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Kota Samarinda TA 2024	77
Tabel 5.1. 6 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Jasa Umum Kota Samarinda Per SKPD TA 2024	79
Tabel 5.1. 7 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Jasa Umum Kota Samarinda TA 2024	79
Tabel 5.1. 8 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Jasa Usaha Kota Samarinda Per SKPD TA 2024	86
Tabel 5.1. 9 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Jasa Usaha Kota Samarinda tahun 2024.....	86
Tabel 5.1. 10 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Jasa Usaha Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda tahun 2024.....	87
Tabel 5.1. 11 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Jasa Usaha Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Daerah Kota Samarinda tahun 2024	87
Tabel 5.1. 12 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Jasa Usaha Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Kota Samarinda tahun 2024.....	88
Tabel 5.1. 13 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Jasa Usaha Sekretariat Daerah	89
Tabel 5.1. 14 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Jasa Usaha Dinas Perdagangan	89
Tabel 5.1. 15 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Jasa Usaha Dinas Perhubungan.....	91
Tabel 5.1. 16 Tabel Tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhan tahun 2024.....	93



Tabel 5.1. 17 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu Kota Samarinda Per SKPD TA 2024	96
Tabel 5.1. 18 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu Kota Samarinda TA 2024.....	96
Tabel 5.1. 19 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Kota Samarinda TA 2024.....	98
Tabel 5.1. 20 Rincian Realisasi Bagian Laba Penyertaan Modal tahun 2024	99
Tabel 5.1. 21 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah Kota Samarinda TA 2024.....	100
Tabel 5.1. 22 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Kota Samarinda TA 2024.....	101
Tabel 5.1. 23 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan Kota Samarinda TA 2024.....	103
Tabel 5.1. 24 Rincian Treasury Deposit Facility TA 2024.....	104
Tabel 5.1. 25 Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat –Dana Perimbangan Dana Bagi Hasil Pajak TA 2024	105
Tabel 5.1. 26 Tabel Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat –Dana Perimbangan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam TA 2024.....	106
Tabel 5.1. 27 Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) TA 2024.....	106
Tabel 5.1. 28 Tabel Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) TA 2024.....	107
Tabel 5.1. 29 Rincian Anggaran dan Realisasi Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik TA 2024	107
Tabel 5.1. 30 Rincian Anggaran dan Realisasi Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik TA 2024	108
Tabel 5.1. 31 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya.....	109
Tabel 5.1. 32 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi Kota Samarinda TA 2024.....	110
Tabel 5.1. 33 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Antar Daerah Pendapatan Bagi Hasil Kota Samarinda TA 2024.....	111
Tabel 5.1. 34 Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Antar Daerah Pendapatan Bagi Hasil Kota Samarinda TA 2024	112
Tabel 5.1. 35 Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Kota Samarinda TA 2024.....	113
Tabel 5.1. 36 Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Kota Samarinda TA 2024.....	113
Tabel 5.1. 37 Anggaran dan Realisasi Belanja Kota Samarinda TA 2024	114
Tabel 5.1. 38 Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Kota Samarinda TA 2024.....	115
Tabel 5.1. 39 Rincian Realisasi Belanja Operasi Per SKPD Kota Samarinda TA 2024.....	116
Tabel 5.1. 40 Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Kota Samarinda TA 2024.....	118
Tabel 5.1. 41 Rincian Realisasi Belanja Pegawai per SKPD Kota Samarinda TA 2024.....	118
Tabel 5.1. 42 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Kota Samarinda TA 2024.....	120
Tabel 5.1. 43 Rincian Realisasi Belanja Barang dan Jasa per SKPD Kota Samarinda TA 2024	121



Tabel 5.1. 44 Rincian Realisasi Belanja Hibah Kota Samarinda TA 2024.....	122
Tabel 5.1. 45 Rincian Realisasi Belanja Hibah Per SKPD Kota Samarinda TA 2024	123
Tabel 5.1. 46 Rincian Anggaran dan Realisasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik di Kota Samarinda TA 2024	125
Tabel 5.1. 47 Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Kota Samarinda TA 2024 ..	126
Tabel 5.1. 48 Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Kota Samarinda TA 2024 ..	126
Tabel 5.1. 49 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Kota Samarinda TA 2024.....	127
Tabel 5.1. 50 Rincian Realisasi Belanja Modal per SKPD Kota Samarinda TA 2024.....	128
Tabel 5.1. 51 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tanah Kota Samarinda TA 2024	129
Tabel 5.1. 52 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tanah Kota Samarinda TA 2024	130
Tabel 5.1. 53 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Kota Samarinda TA 2024	130
Tabel 5.1. 54 Rincian Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per SKPD Kota Samarinda TA 2024.....	131
Tabel 5.1. 55 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Kota Samarinda TA 2024.....	133
Tabel 5.1. 56 Rincian Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Kota Samarinda TA 2024	133
Tabel 5.1. 57 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi TA 2024	134
Tabel 5.1. 58 Rincian Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan per SKPD TA 2024....	135
Tabel 5.1. 59 Anggaran dan Realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya Kota Samarinda TA 2024.....	136
Tabel 5.1. 60 Rincian Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya per SKPD TA 2024	136
Tabel 5.1. 61 Anggaran dan Realisasi Belanja Aset Lainnya Kota Samarinda TA 2024	137
Tabel 5.1. 62 Rincian Realisasi Belanja Aset Lainnya per SKPD TA 2024.....	138
Tabel 5.1. 63 Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Terduga Kota Samarinda TA 2024.....	138
Tabel 5.1. 64 Rekap Belanja Tidak Terduga Restitusi Pajak Daerah (Pengembalian Pajak Hiburan)	139
Tabel 5.1. 65 Rekap Belanja Tidak Terduga Restitusi Pajak Daerah (Pengembalian BPHTB)	139
Tabel 5.1. 66 Rekap Belanja Tidak Terduga Restitusi Pajak Daerah (Pengembalian Pajak Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah) Kota Samarinda TA 2024.....	140
Tabel 5.1. 67 Rincian Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan Kota Samarinda TA 2024	141
Tabel 5.1. 68 Rincian Anggaran dan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Kota Samarinda TA 2024	142
Tabel 5.2. 1 Rincian SAL Awal 2024 dan 2023 Pemerintah Kota Samarinda	144
Tabel 5.2. 2 Rincian SAL Awal 2024 dan 2023 Pemerintah Kota Samarinda	145
Tabel 5.2. 3 Rincian SiLPA Kota Samarinda TA 2024	145
Tabel 5.2. 4 Rincian Saldo Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun Sebelumnya	146
Tabel 5.2. 5 Rincian Saldo Anggaran Lebih Akhir Kota Samarinda TA 2024.....	147
Tabel 5.3. 1 Perbandingan Nilai Aset	148
Tabel 5.3. 2 Rincian Aset	148



Tabel 5.3. 3 Rincian Aset Lancar	149
Tabel 5.3. 4 Rincian Kas	150
Tabel 5.3. 5 Rincian Kas di Bendahara Penerimaan.....	151
Tabel 5.3. 6 Rincian Kas di BLUD.....	151
Tabel 5.3. 7 Rincian Kas Dana BOS	153
Tabel 5.3. 8 Rincian Kas Dana Kapitasi pada FKTP.....	154
Tabel 5.3. 9 Rincian Kas Dana Kapitasi Pada FKTP.....	154
Tabel 5.3. 10 Rincian Kas JKN dan BOK	155
Tabel 5.3. 11 Rincian Kas Lainnya.....	156
Tabel 5.3. 12 Rincian Kas Lainnya pada SKPD.....	156
Tabel 5.3. 13 Perbandingan Nilai Piutang	157
Tabel 5.3. 14 Tabel Piutang Pajak Daerah.....	158
Tabel 5.3. 15 Tabel Piutang Pajak berdasarkan kriteria kualitas	161
Tabel 5.3. 16 Piutang Retribusi Daerah.....	165
Tabel 5.3. 17 Piutang Retribusi berdasarkan Kriteria kualitas.....	167
Tabel 5.3. 18 Piutang lain-lain PAD yang Sah	168
Tabel 5.3. 19 Rincian Piutang lain-lain PAD yang Sah.....	168
Tabel 5.3. 20 Rincian Piutang Transfer Antar Daerah.....	170
Tabel 5.3. 21 Piutang Lainnya.....	171
Tabel 5.3. 22 Rincian Piutang Lainnya.....	171
Tabel 5.3. 23 Rincian Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	172
Tabel 5.3. 24 Rincian Mutasi dari Tagihan Penjualan Angsuran	173
Tabel 5.3. 25 Rincian Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi.....	173
Tabel 5.3. 26 Tabel Perbandingan Penyisihan Piutang Pajak.....	174
Tabel 5.3. 27 Tabel Penyisihan Piutang Pajak Daerah	174
Tabel 5.3. 28 Tabel Penyisihan Piutang Pajak Daerah Berdasarkan Kriteria Kualitas.....	176
Tabel 5.3. 29 Rincian Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	178
Tabel 5.3. 30 Rincian Penyisihan Piutang Retribusi Daerah Berdasarkan Kriteria kualitas.....	180
Tabel 5.3. 31 Tabel Penyisihan Piutang Lain- lain PAD yang Sah	182
Tabel 5.3. 32 Tabel Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah berdasarkan Kriteria Kualitas ..	183
Tabel 5.3. 33 Tabel Penyisihan Piutang Lainnya	185
Tabel 5.3. 34 Tabel Penyisihan Piutang Lainnya berdasarkan Kriteria Kualitas.....	186
Tabel 5.3. 35 Rekap Beban Dibayar Dimuka	188
Tabel 5.3. 36 Rincian Beban Dibayar Dimuka Jasa Konversi Aplikasi / Sistem Informasi	188
Tabel 5.3. 37 Rincian Beban Dibayar Dimuka Telepon Hotline	188
Tabel 5.3. 38 Rincian Beban Dibayar Dimuka Premi Asuransi	188
Tabel 5.3. 39 Rincian Beban Dibayar Dimuka Sewa Kendaraan Dinas	188
Tabel 5.3. 40 Rincian Beban Dibayar Dimuka Sewa Gedung Kantor.....	189



Tabel 5.3. 41 Rincian Beban Dibayar Dimuka Sewa Asrama	189
Tabel 5.3. 42 Rincian Beban Dibayar Dimuka Lainnya	189
Tabel 5.3. 43 Rincian Persediaan per SKPD Per 31 Desember 2023	190
Tabel 5.3. 44 Rincian Persediaan APBD dan Non APBD Menurut Jenis Per 31 Desember 2024 ...	191
Tabel 5.3. 45 Rincian Investasi Jangka Panjang	194
Tabel 5.3. 46 Rincian Saldo Dana Bergulir	195
Tabel 5.3. 47 Rincian Penyertaan Investasi Jangka Panjang Permanen-Penyertaan Modal	196
Tabel 5.3. 48 Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023	198
Tabel 5.3. 49 Rincian Mutasi Aset	199
Tabel 5.3. 50 Tanah	200
Tabel 5.3. 51 Rincian Peralatan dan Mesin	201
Tabel 5.3. 52 Rincian Gedung dan Bangunan	206
Tabel 5.3. 53 Rincian Konstruksi dalam Pengerjaan	213
Tabel 5.3. 54 Daftar Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024	215
Tabel 5.3. 55 Properti Investasi	217
Tabel 5.3. 56 Daftar Lahan dan Gedung Milik Pemerintah Kota Samarinda yang dapat dimanfaatkan sebagai Proverti Investasi	218
Tabel 5.3. 57 Rincian Aset Lainnya	220
Tabel 5.3. 58 Rincian Tagihan Jangka Panjang	221
Tabel 5.3. 59 Rincian Saldo Kemitraan dengan Pihak Ketiga	222
Tabel 5.3. 60 Rincian Kepemilikan Aset Tidak Berwujud per SKPD	223
Tabel 5.3. 61 Rincian Aset lain-lain	225
Tabel 5.3. 62 Rincian Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	229
Tabel 5.3. 63 Rincian Saldo Kewajiban	233
Tabel 5.3. 64 Rincian Kewajiban Jangka Pendek	233
Tabel 5.3. 65 Rincian Pendapatan Diterima dimuka	234
Tabel 5.3. 66 Rincian Utang Belanja	235
Tabel 5.3. 67 Rincian Utang Pegawai	236
Tabel 5.3. 68 Rincian Utang Belanja Barang dan Jasa, Utang Belanja Modal berdasarkan SKPD ..	236
Tabel 5.3. 69 Rincian Utang Belanja Barang dan Jasa, Utang Belanja Modal berdasarkan Kelompok	237
Tabel 5.3. 70 Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya	238
Tabel 5.3. 71 Rincian Utang Jangka Panjang	239
Tabel 5.3. 72 Utang Kepada Masyarakat Kota Samarinda Per 31 Desember 2024	239
Tabel 5.3. 73 Tabel Perbandingan Ekuitas	244
Tabel 5.4 1 Pendapatan	245
Tabel 5.4 2 Pendapatan Asli Daerah	246
Tabel 5.4 3 Pendapatan Pajak Daerah	246



Tabel 5.4 4 Mutasi Pendapatan Pajak Daerah	248
Tabel 5.4 5 Pendapatan Retribusi Daerah.....	249
Tabel 5.4 6 Pendapatan Retribusi Daerah per Jenis.....	251
Tabel 5.4 7 Pendapatan Retribusi Jasa Umum.....	251
Tabel 5.4 8 Pendapatan Retribusi Jasa Usaha.....	251
Tabel 5.4 9 Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu.....	252
Tabel 5.4 10 Mutasi Pendapatan Retribusi Daerah.....	254
Tabel 5.4 11 Pendapatan Retribusi Jasa Umum.....	255
Tabel 5.4 12 Pendapatan Retribusi Jasa Usaha.....	257
Tabel 5.4 13 Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu.....	258
Tabel 5.4 14 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.....	260
Tabel 5.4 15 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan per SKPD.....	260
Tabel 5.4 16 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.....	261
Tabel 5.4 17 Lain-lain PAD yang Sah.....	261
Tabel 5.4 18 Lain-lain PAD yang sah Lainnya per SKPD	262
Tabel 5.4 19 Mutasi Lain-lain PAD yang Sah.....	264
Tabel 5.4 20 Pendapatan Transfer	265
Tabel 5.4 21 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan	265
Tabel 5.4 22 Mutasi Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan.....	267
Tabel 5.4 23 Dana bagi Hasil Pajak.....	267
Tabel 5.4 24 Mutasi Dana Bagi Hasil Pajak	268
Tabel 5.4 25 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	268
Tabel 5.4 26 Mutasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	269
Tabel 5.4 27 Dana Alokasi Umum	270
Tabel 5.4 28 Mutasi Dana Alokasi Umum	270
Tabel 5.4 29 Dana Alokasi Khusus	270
Tabel 5.4 30 Mutasi Dana Alokasi Khusus	272
Tabel 5.4 31 Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	274
Tabel 5.4 32 Tabel Dana Insentif Daerah	274
Tabel 5.4 33 Tabel Insentif Fiskal	275
Tabel 5.4 34 Transfer Pemerintah Provinsi	275
Tabel 5.4 35 Mutasi Transfer Pemerintah Provinsi	275
Tabel 5.4 36 Pendapatan Bagi Hasil Pajak.....	277
Tabel 5.4 37 Mutasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak.....	277
Tabel 5.4 38 Bantuan Keuangan.....	278
Tabel 5.4 39 Mutasi Bantuan Keuangan.....	278
Tabel 5.4 40 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	278
Tabel 5.4 41 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah per SKPD.....	279



Tabel 5.4 42 Mutasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	281
Tabel 5.4 43 Pendapatan Hibah	281
Tabel 5.4 44 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	282
Tabel 5.4 45 Beban	282
Tabel 5.4 46 Tabel Beban Pegawai per SKPD	283
Tabel 5.4 47 Mutasi Beban Pegawai	287
Tabel 5.4 48 Tabel Beban Persediaan.....	287
Tabel 5.4 49 Tabel Beban Persediaan per SKPD	290
Tabel 5.4 50 Tabel Mutasi Beban Persediaan.....	294
Tabel 5.4 51 Tabel Beban Jasa	297
Tabel 5.4 52 Tabel Beban Jasa per SKPD	298
Tabel 5.4 53 Tabel Mutasi Beban Jasa	301
Tabel 5.4 54 Tabel Beban Pemeliharaan	302
Tabel 5.4 55 Tabel Beban Pemeliharaan per SKPD	302
Tabel 5.4 56 Tabel Mutasi Beban Pemeliharaan	305
Tabel 5.4 57 Tabel Beban Perjalanan Dinas.....	305
Tabel 5.4 58 Tabel Beban Perjalanan Dinas per SKPD.....	306
Tabel 5.4 59 Tabel Mutasi Beban Perjalanan Dinas.....	308
Tabel 5.4 60 Tabel Beban Barang dan Jasa Lainnya	308
Tabel 5.4 61 Tabel Beban Barang dan Jasa Lainnya per SKPD	309
Tabel 5.4 62 Tabel Mutasi Beban Barang dan Jasa Lainnya	313
Tabel 5.4 63 Tabel Beban Hibah	314
Tabel 5.4 64 Tabel Beban Hibah per SKPD	314
Tabel 5.4 65 Tabel Mutasi Beban Hibah	315
Tabel 5.4 66 Tabel Beban Bantuan Sosial	316
Tabel 5.4 67 Tabel Beban Bantuan Sosial per SKPD	316
Tabel 5.4 68 Tabel Beban Penyisihan Piutang	316
Tabel 5.4 69 Tabel Beban Penyisihan Piutang per SKPD	317
Tabel 5.4 70 Tabel Beban Penyusutan dan Amortisasi	318
Tabel 5.4 71 Tabel Beban Penyusutan dan Amortisasi per SKPD	319
Tabel 5.4 72 Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional.....	321
5.5. 1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi TA 2024 dan 2023	324
5.5. 2 Realisasi Pendapatan Pajak Daerah sampai dengan 31 Desember	325
5.5. 3 Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah	326
5.5. 4 Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.....	326
5.5. 5 Realisasi Lain-lain PAD yang Sah.....	326
5.5. 6 Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak 2024.....	327
5.5. 7 Realisasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	328



5.5. 8 Realisasi Dana Alokasi Umum	328
5.5. 9 Realisasi Dana Alokasi Khusus	328
5.5. 10 Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Pemerintah TA 2024 s.d 2023	329
5.5. 11 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi TA 2024 dan 2023	330
5.5. 12 Aktivitas Operasi	331
5.5. 13 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi Aset Nonkeuangan TA 2024 dan 2023	332
5.5. 14 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi Aset Nonkeuangan TA 2024 dan 2023	333
5.5. 15 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Nonkeuangan.....	334
5.5. 16 Arus Kas dari Aktivitas Nonanggaran	334
5.5. 17 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Nonanggaran TA 2024 dan 2023	335
5.5. 18 Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga.....	335
5.5. 19 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Nonanggaran	336
5.5. 20 Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga.....	336
5.5. 21 Kenaikan dan Penurunan Kas	337
5.5. 22 Saldo Awal Kas	337
5.5. 23 Koreksi Silpa	338
5.5. 24 Saldo Akhir Kas.....	338
5.5. 25 Rincian Saldo Akhir Kas 2024 dan 2023.....	338
5.6. 1 Saldo Ekuitas Awal.....	340
5.6. 2 Saldo Surplus/Defisit – LO.....	340
5.6. 3 Saldo Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	341
5.6. 4 Ekuitas Akhir	342

P.



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin	17
Gambar 2. 2 Indeks Pembangunan Manusia.....	18
Gambar 2. 3 Tingkat Pengangguran Terbuka.....	18
Gambar 5.1. 1 Diagram Pendapatan Daerah tahun 2024.....	73
Gambar 5.1. 2 Diagram Perbandingan realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun 2024 dan tahun 2023	74
Gambar 5.1. 3 Diagram Pendapatan Pajak Daerah tahun 2024	75
Gambar 5.1. 4 Diagram Perbandingan Retribusi Daerah tahun 2024 dan 2023	78
Gambar 5.1. 5 Diagram Perbandingan Retribusi Jasa Umum tahun 2024 dan 2023	80
Gambar 5.1. 6 Diagram Perbandingan Retribusi Jasa Usaha tahun 2024 dan 2023	85
Gambar 5.1. 7 Diagramerizinan Tertentu tahun 2024 dan 2023.....	95
Gambar 5.1. 8 Diagram Perbandingan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Kota Samarinda tahun 2024 dan 2023	98
Gambar 5.1. 9 Diagram Proporsi Lain-lain PAD yang Sah tahun 2024	101
Gambar 5.1. 10 Diagram Perbandingan Pendapatan Transfer Kota Samarinda tahun 2024 dan 2023	102
Gambar 5.1. 11 Diagram Perbandingan Pendapatan Dana Perimbangan tahun 2024 dan 2023.....	103
Gambar 5.1. 12 Diagram Perbandingan Dana Insentif Daerah tahun 2024 dan 2023	109
Gambar 5.1. 13 Diagram Perbandingan Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah Tahun 2024 dan 2023	111
Gambar 5.1. 14 Diagram Perbandingan Pendapatan Bagi Hasil tahun 2024 dan 2023.....	112
Gambar 5.1. 15 Diagram Perbandingan Realisasi Belanja Daerah TA 2024 dan 2023.....	114
Gambar 5.1. 16 Diagram Perbandingan Belanja Operasi TA 2024 dan 2023	115
Gambar 5.1. 17 Diagram Perbandingan Belanja Pegawai Tahun 2024 dan 2023	117
Gambar 5.1. 18 Diagram Perbandingan Belanja Barang dan Jasa Tahun 2024 dan 2023	120
Gambar 5.1. 19 Diagram Perbandingan Belanja Hibah Tahun 2024 dan 2023	122
Gambar 5.1. 20 Diagram Proporsi Belanja Bantuan Sosial.....	125
Gambar 5.1. 21 Diagram Belanja Modal	127
Gambar 5.1. 22 Diagram Perbandingan Belanja Modal Tanah tahun 2024 dan 2023.....	129
Gambar 5.1. 23 Diagram Proporsi Belanja Modal Peralatan dan Mesin	130
Gambar 5.1. 24 Diagram Proporsi Belanja Modal Gedung dan Bangunan	132
Gambar 5.1. 25 Diagram Proporsi Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	134
Gambar 5.1. 26 Diagram Proporsi Belanja Modal Aset Tetap lainnya.....	135
Gambar 5.1. 27 Diagram Perbandingan Belanja Aset Lainnya tahun 2024 dan 2023.....	137
Gambar 5.1. 28 Diagram Perbandingan Belanja Tidak Terduga tahun 2024 dan 2023.....	138



DAFTAR SINGKATAN

A		
AP	:	Air Permukaan
APAR	:	Alat Pemadam Api Ringan
APBD	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APD	:	Alat Pelindung Diri
ASN	:	Aparatur Sipil Negara
ATK	:	Alat Tulis Kantor
B		
BANKEU	:	Bantuan Keuangan
BANSOS	:	Bantuan Sosial
BAPENDA	:	Badan Pendapatan Daerah
BARJAS	:	Barang dan Jasa
BBM	:	Bahan Bakar Minyak
BBNKB	:	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
BKP2D	:	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah
BL TGR	:	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi
BL TPA	:	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran
BLT	:	Bantuan Langsung Tunai
BLUD	:	Badan Layanan Umum Daerah
BM	:	Belanja Modal
BMD	:	Barang Milik Daerah
BOKB	:	Bantuan Operasional Keluarga Berencana
BOKKB	:	Bantuan Operasional Kesehatan dan Keluarga Berencana
BOP PAUD	:	Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
BOS	:	Bantuan Operasional Sekolah
BOSDA	:	Bantuan Operasional Sekolah Daerah
BOSNAS	:	Bantuan Operasional Sekolah Nasional
BPBD	:	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
BPD Kaltimara	:	Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur Utara
BPHTB	:	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
BPJS	:	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
BPKAD	:	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
BPR	:	Bank Perkreditan Rakyat
BTT	:	Belanja Tidak Terduga
BUD	:	Bendahara Umum Daerah
BUMD	:	Badan Usaha Milik Daerah
C		
CaLK	:	Catatan Atas Laporan Keuangan
CHT	:	Cukai Hasil Tembakau
Covid 19	:	Corona Viruses Disease 19
D		



DAK	:	Dana Alokasi Khusus
DAK-DBH	:	Dana Alokasi Khusus-Dana Bagi Hasil
DAU	:	Dana Alokasi Umum
DBH	:	Dana Bagi Hasil
DENPOM	:	Detasemen Polisi Militer
DID	:	Dana Insentif Daerah
DIF	:	Dana Insentif Fiskal
DINAS PUPR	:	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
DISDUKCAPIL	:	Dinas Penduduk dan Catatan Sipil
DISKOMINFO	:	Dinas Komunikasi dan Informasi
DISPORA	:	Dinas Pemuda dan Olahraga
DJKN	:	Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
DP3A	:	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
DPMPK	:	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Kampung
DPRD	:	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
F		
FKTP	:	Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
G		
GOR	:	Gelanggang Olahraga
H		
HGB	:	Hak Guna Bangunan
I		
IMB	:	Ijin Mendirikan Bangunan
IMTA	:	Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing
IPM	:	Indeks Pembangunan Manusia
J		
JAMPERSAL	:	Jaminan Persalinan
JKN	:	Jaminan Kesehatan Nasional
K		
KDH	:	Kepala Daerah
KDP	:	Kontruksi Dalam Pengerjaan
KESBANGPOL	:	Kesatuan Bangsa dan Politik
KIB	:	Kartu Inventaris Barang
KJPP	:	Kantor Jasa Penilai Publik
KMK	:	Keputusan Menteri Keuangan
KPKNL	:	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang
L		
LAK	:	Laporan Arus Kas
LHP	:	Laporan Hasil Pemeriksaan
LKPD	:	Laporan Keuangann Pemerintah Daerah
LO	:	Laporan Operasional
LP SAL	:	Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
LPE	:	Laporan Perubahan Ekuitas
LRA	:	Laporan Realisasi Anggaran



M		
MIKOL	:	Minuman Beralkohol
N		
NJOP	:	Nilai Jual Objek Pajak
O		
OPD	:	Organisasi Perangkat Daerah
P		
P3D	:	Personel, Peralatan, Pembiayaan dan Dokumentasi
PAD	:	Pendapatan Asli Daerah
PARPOL	:	Partai Politik
PAUD	:	Pendidikan Anak Usia Dini
PBB-P2	:	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
PBG	:	Persetujuan Bangunan Gedung
PD PAU	:	Perusahaan Daerah Perdagangan Aneka Usaha
PDAM	:	Perusahaan Daerah Air Minum
PDRB	:	Pendapatan Domestik Regional Bruto
PERDA	:	Peraturan Daerah
PERUMDA	:	Perusahaan Umum Daerah
PERUMDAM	:	Perusahaan Daerah Air Minum
PERWALI	:	Peraturan Wali Kota
PFK	:	Pinjaman Pihak Ketiga
PKM	:	Puskesmas
PMD	:	Penyertaan Modal Daerah
PMK	:	Peraturan Menteri Keuangan
PNB	:	Pendapatan Nasional bruto
PNSD	:	Pegawai Negeri Sipil Daerah
POLRESTA	:	Kepolisian Resor Kota
PP	:	Peraturan Pemerintah
PPh	:	Pajak Penghasilan
PPKD	:	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
PPN	:	Pajak Pertambahan Nilai
PPPK	:	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
Pro-Bebaya	:	Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
PSAP	:	Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan
PT	:	Perseroan Terbatas
Q		
QRIS	:	Quick Reponse Code Indonesian Standard
R		
RKB	:	Rencana Kebutuhan Belanja
RKUD	:	Rekening Kas Umum Daerah
RPH	:	Rumah Potong Hewan
RS	:	Rumah Sakit
RT	:	Rukun Tetangga
RTRW	:	Rencana Tata Ruang Wilayah



S		
SAL	:	Saldo Anggaran Lebih
SAP	:	Standar Akuntansi Pemerintahan
SDM	:	Sumber Daya Manusia
SDN	:	Sekolah Dasar Negeri
SET DPRD	:	Sekretariat Dewan Permusyawaratan Rakyat Daerah
SiLPA	:	Selisih Lebih Perhitungan Anggaran
SIMDA BMD	:	Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah
SITU	:	Surat Izin Tempat Usaha
SK	:	Surat Keputusan
SKPD	:	Satuan Kerja Perangkat Daerah
SKPD	:	Surat Ketetapan Pajak Daerah
SKPDKB	:	Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar
SKPDKBT	:	Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan
SKPKD	:	Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah
SKRD	:	Surat Ketetapan Retribusi Daerah
SMP	:	Sekolah Menengah Pertama
SP2D	:	Surat Perintah Pencairan Dana
SP2D - LS	:	Surat Perintah Pencairan Dana Langsung
SP2D - TU	:	Surat Perintah Pencairan Dana Tambah Uang
STPD	:	Surat Tagihan Pajak Daerah
T		
TA	:	Tahun Anggaran
TASPEN	:	Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri
TDF	:	Treasury Deposit Facility
TGR	:	Tuntutan Ganti Rugi
TKA	:	Tenaga Kerja Asing
TKD	:	Transfer Ke Daerah
TP	:	Tuntutan Perbendaharaan
TPA	:	Tagihan Penjualan Angsuran
TPI	:	Tempat Pelelangan Ikan
TPT	:	Tingkat Pengangguran Terbuka
TU	:	Tambah Uang
U		
UKM	:	Usaha Kecil Menengah
ULP	:	Unit Layanan Pengadaan
UPTD	:	Unit Pelaksana Teknis Dinas
W		
WKDH	:	Wakil Kepala Daerah

f.



BAB 1

PENDAHULUAN

LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2024



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2024

BAB I PENDAHULUAN

Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2024. CaLK dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pemakai informasi laporan keuangan secara luas tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu. Laporan keuangan mempunyai potensi kesalahpahaman diantara pembacanya, untuk menghindari kesalahpahaman, laporan keuangan dilengkapi dengan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang berisi informasi untuk memudahkan pengguna dalam memahami laporan keuangan.

Kesalahpahaman dapat saja disebabkan oleh persepsi dari pembaca laporan keuangan. Pembaca yang terbiasa orientasi anggaran mempunyai potensi kesalahpahaman dalam memahami konsep akuntansi akrual. Pembaca yang terbiasa dengan laporan keuangan sektor komersil cenderung melihat laporan keuangan pemerintah seperti laporan keuangan perusahaan. Karena hal-hal tersebut catatan atas laporan keuangan menjadi sangat penting bagi pengguna laporan keuangan pemerintah. Selain itu, pengungkapan basis akuntansi dan kebijakan akuntansi yang diterapkan akan membantu pengguna laporan keuangan untuk dapat menghindari kesalahpahaman dalam membaca laporan keuangan.

1.1 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

1.1.1 MAKSUD PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan keuangan disusun dan disajikan dalam rangka pemenuhan kebutuhan informasi bagi berbagai pengguna. Informasi yang disajikan berupa posisi keuangan yang terjadi dalam satu periode pelaporan. Laporan keuangan digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang telah dimanfaatkan dalam melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai keuangan, mengevaluasi kinerja suatu entitas dan oleh karena itu dibutuhkan laporan keuangan yang akuntabel.

Untuk merespon kebutuhan terhadap sistem pelaporan yang akuntabel dan transparan kepada semua pihak maka ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Menurut SAP, laporan keuangan sebagai dasar pengambilan keputusan harus disajikan secara tepat waktu dan dapat diandalkan serta dilengkapi dengan pengungkapan yang memadai yang dapat mempengaruhi keputusan.

Pemerintah Kota Samarinda sebagai Entitas Pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang telah dicapai dalam periode tertentu, sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas manajemen dan keseimbangan kecukupan penerimaan, guna membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:

a. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.



b. Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

c. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

d. Keseimbangan Antar generasi

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

Berbagai upaya telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Samarinda dalam meningkatkan kualitas layanan pengelolaan setiap tahunnya. Selain tata kelola keuangan yang telah diatur secara rigit dalam berbagai peraturan perundang-undangan, pemerintah diharapkan dapat melakukan terobosan yang inovatif guna mempercepat pelaksanaan anggaran untuk kepentingan masyarakat. Termasuk pada penyelenggaraan akuntabilitas pengelolaan keuangan yang terus menjadi perhatian dari berbagai pemangku kepentingan agar dapat memberikan gambaran secara konkrit tentang seluruh aktifitas pemerintah baik yang terkait langsung dengan penyediaan pelayanan kebutuhan dasar, pemberdayaan masyarakat maupun tata kelola pemerintahan. Menyadari hal tersebut Pemerintah Kota Samarinda telah berkomitmen untuk terus dan selalu meningkatkan kualitas akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Salah satu bentuk komitmen Pemerintah Kota Samarinda khususnya dalam pelaporan keuangan daerah yaitu dengan menerapkan prinsip-prinsip penyajian laporan keuangan secara paripurna dengan juga memperhatikan kaidah-kaidah pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah yang telah menggunakan basis akrual. Penerapan basis akrual ini merupakan upaya Pemerintah Kota Samarinda dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan yang ditujukan agar pengukuran terhadap kinerja dapat dilakukan dengan lebih baik. Akuntabilitas pengelolaan keuangan diperlukan dalam rangka membangun *trust* publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang menunjang kelancaran pelaksanaan pembangunan. Semua upaya tersebut diharapkan mampu mendorong efisiensi dan mendorong terwujudnya *good governance and clean government* untuk mencapai tujuan pembangunan yaitu kemakmuran bagi masyarakat.

1.1.2 TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Samarinda dimaksudkan untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh entitas pelaporan selama satu periode laporan. Laporan Keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, serta membantu menentukan ketaatannya



terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai upaya perwujudan *good governance* and *clean government*, maka pelaporan keuangan Pemerintah Kota Samarinda menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pemangku kepentingan khususnya *stakeholder*, seperti Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Pemerintah Pusat, masyarakat, wakil rakyat, aparat pengawas, maupun calon investor yang akan menanamkan modalnya di Kota Samarinda. Hal ini diharapkan dapat membantu *stakeholder* dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Laporan Keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk melaksanakan suatu kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Selain itu, mengingat arti penting LKPD bagi keberlangsungan seluruh aktivitas pemerintahan, selain memenuhi amanat perundang-undangan, penyampaian LKPD yang tepat waktu dapat menumbuhkan kepercayaan stakeholder dan publik kepada pemerintah daerah sehingga pemerintah daerah dapat menjalankan perannya sebagai pelaksana pembangunan dan penyedia layanan publik dengan baik.

Tujuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2023 yang disusun dengan menggunakan basis akrual adalah untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, serta kinerja keuangan yang secara spesifik tidak hanya bermanfaat bagi para pengguna (*user*) dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya tapi juga berguna dalam pengambilan keputusan serta menunjukkan akuntabilitas pemerintah daerah dengan cara:

- a. Menyediakan informasi mengenai gambaran utuh atas posisi keuangan Pemerintah Daerah;
- b. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- c. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian antara cara perolehan sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
- d. Menyediakan informasi mengenai mekanisme Pemerintah Daerah beserta hasil-hasil yang telah dicapai;
- e. Menyediakan informasi mengenai mekanisme Pemerintah Daerah dalam mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
- f. Menyediakan informasi tentang posisi keuangan dan Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
- g. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Pemerintah Daerah baik pada saat mengalami kenaikan maupun penurunan, sebagai akibat dari kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan;
- h. Menyediakan informasi untuk bahan evaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya; dan
- i. Menyajikan informasi yang relevan terkait hak dan kewajiban Pemerintah.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, transfer, dana cadangan, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dana, dan arus kas Pemerintah Kota Samarinda sebagai suatu entitas pelaporan.

f.



1.2 SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2023 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Memuat penjelasan mengenai maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, peraturan perundangan-undangan yang berlaku sebagai landasan hukum penyusunan laporan keuangan, dan sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan.

BAB II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD

Memuat informasi tentang asumsi makro ekonomi dan kebijakan keuangan yang mendasari penyusunan laporan keuangan serta pencapaian target kinerja APBD berupa indikator program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun pelaporan.

BAB III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Memuat informasi tentang ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan serta hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

BAB IV Kebijakan Akuntansi

Memuat informasi tentang entitas akuntansi dan entitas pelaporan keuangan daerah, basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan, basis pengukuran yang mendasari penyusunan pos-pos laporan keuangan dan penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Kota Samarinda.

BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan

Memuat informasi tentang rincian dari penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan pemerintah daerah diantaranya: rincian dan penjelasan pos-pos Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas serta pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja.

BAB VI Pengungkapan Lainnya

Memuat informasi tentang penanganan Covid-19 pasca dicabutnya status Pandemi dan kejadian tanggap darurat lainnya sampai dengan Desember 2023 dan kasus hukum atas aset yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Samarinda yang memungkinkan terjadinya utang terhadap pihak ketiga.

BAB VII Penjelasan Atas Informasi Non Keuangan

Memuat informasi tentang penjelasan tambahan atas informasi non keuangan serta hal-hal yang belum diinformasikan dalam bagian manapun dari Laporan Keuangan

4



BAB VIII Penutup

Memuat uraian penutup yang berupa kesimpulan akhir atas penyusunan Laporan Keuangan.

1.3 DASAR HUKUM

Landasan hukum yang dijadikan dasar dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Samarinda yaitu:

1. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
13. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2021 Nomor 30);
15. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2024 ;
16. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran



- Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2024;
17. Peraturan Wali Kota Nomor 76 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
 18. Peraturan Wali Kota Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
 19. Peraturan Wali Kota Nomor 69 Tahun 2022 Tentang tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
 20. Peraturan Wali Kota Nomor 74 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;
 21. Peraturan Wali Kota Nomor 50 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 78 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.

P.



BAB 2

EKONOMI MAKRO

LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2024

BAB II EKONOMI MAKRO

2.1 GAMBARAN EKONOMI MAKRO

Ekonomi makro merupakan gambaran perubahan ekonomi yang mempengaruhi banyak masyarakat, perusahaan dan pasar. Ekonomi makro dapat difungsikan sebagai alat bagi Pemerintah Daerah untuk menganalisa dan merancang serangkaian target kebijakan yang berkaitan dengan inflasi, tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi, dan keseimbangan neraca pembayaran yang berkelanjutan dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Asumsi makro ekonomi yang digunakan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) Tahun Anggaran 2024 mengacu pada indikator sosial ekonomi Pemerintah Kota Tahun 2024 atau tahun sebelumnya menurut data Badan Pusat Statistik Kota Samarinda yaitu:

- a) Tingkat Kemiskinan sebesar 4,3%;
- b) Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,75%;
- c) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 83,11%; dan
- d) Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 8,62% (tahun 2023).

A. Tingkat Kemiskinan

Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan - kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan dalam persentase penduduk miskin Provinsi/Kabupaten/Kota periode tertentu. Namun memetakan kemiskinan tidak cukup hanya berfokus pada seberapa besar atau kecil angka kemiskinan. Tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di wilayah-wilayah Indonesia juga perlu mendapat perhatian sekaligus pemahaman yang memadai dari pemerintah. Kedalaman kemiskinan, menggambarkan seberapa jauh beda pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Sedangkan keparahan kemiskinan adalah seberapa jauh jarak pengeluaran orang termiskin di satu wilayah tertentu relatif terhadap pengeluaran rata-rata kelompok miskin di daerah bersangkutan. Makin tinggi angkanya, makin parah kemiskinannya.

Tabel 2.1. 1 Persentase Penduduk Miskin Kota Samarinda

No	Tingkat Kemiskinan	Tahun 2023	Tahun 2024	Naik/turun (%)
1	Kota (%)	4,81	4,30	(0,51)
2	Kota (Ribu Orang)	41,89	37,80	(4,09)
3	Provinsi (%)	6,11	5,78	(0,33)
4	Nasional (%)	9,36	9,03	(0,33)

Sumber Dokumen: BPS Prov/Kab/Kota

Persentase penduduk miskin Kota Samarinda pada Tahun 2023 sebesar 4,81%, mengalami penurunan pada Tahun 2024 sebesar 4,30% dan diharapkan pada Tahun 2025 terus menurun. Persentase penduduk miskin Kota Samarinda lebih baik dari provinsi dan nasional, dalam perencanaan penganggaran tahun mendatang tetap harus mendapat prioritas untuk semakin menekan angka kemiskinan.

f.



Tabel 2.1. 2 Tingkat Kedalam Kemiskinan Kota Samarinda

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2024	Naik/Turun (%)
1	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kab/Kota	0,75	0,54	(0,21)
2	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Provinsi	0,77	0,80	0,03
3	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Nasional	1,53	1,46	(0,07)

Sumber Dokumen: BPS Prov/Kab/Kota

Tabel 2.1. 3 . Tingkat Keparahan Kemiskinan Kota Samarinda

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2024	Naik/Turun (%)
1	Tingkat Keparahan Kemiskinan Kab/Kota	0,16	0,11	(0,05)
2	Tingkat Keparahan Kemiskinan Provinsi	0,14	0,15	0,01
3	Tingkat Keparahan Kemiskinan Nasional	0,38	0,35	(0,03)

Sumber Dokumen: BPS Prov/Kab/Kota

B. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Penganggur terbuka, terdiri dari : (i) Mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan. (ii) Mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha. (iii) Mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan (iv) Mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kota Samarinda Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Samarinda Tahun 2024 adalah sebesar 5,75%, sebagaimana dijelaskan tabel di bawah ini.

Tabel 2.1. 4 Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Samarinda

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2024	Naik/Turun (%)
1	Tingkat Pengangguran Terbuka Kab/Kota (%)	5,92	5,75	(0,17)
2	Tingkat Pengangguran Provinsi (%)	5,31	5,14	(0,17)
3	Tingkat Pengangguran Nasional (%)	5,32	4,91	(0,41)

Sumber Dokumen: BPS Prov/Kab/Kota

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Samarinda Tahun 2024 menurut data BPS menunjukkan angka sebesar 5,75%, sedangkan TPT pada Tahun 2023 adalah sebesar 5,92% atau lebih rendah dibandingkan dengan angka TPT pada Tahun 2023. Perlu diperhatikan bahwa TPT Kota Samarinda Tahun 2024 masih lebih tinggi dibandingkan TPT Provinsi Kalimantan Timur sebesar 5,14% dan Nasional sebesar 4,91%.

C. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM mencerminkan capaian kemajuan di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Kecepatan pembangunan manusia diukur dengan pertumbuhan IPM yang dibentuk oleh 3 dimensi dasar yaitu harapan hidup/ umur panjang dan sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), standar hidup layak (*decent standard of living*) dan jenis



kelamin (*gender*). Sesuai dengan UNDP Indeks tersebut dikategorikan menjadi empat, yaitu:

- Rendah (< 60);
- Sedang ($60 \leq IPM < 70$);
- Tinggi ($70 \leq IPM < 80$); dan
- Sangat Tinggi (> 80).

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kota Samarinda, realisasi pencapaian IPM Kota Samarinda Tahun 2024 adalah sebesar 83,11 poin dan termasuk ke dalam kategori sangat tinggi sebagaimana dijelaskan dalam Tabel di bawah ini.

Tabel 2.1. 5 Indeks Pembangunan Manusia

No	IPM (Tingkat)	Tahun 2023	Tahun 2024	Naik/turun(%)
1	Kabupaten/Kota	82,61	83,11	0,50
2	Provinsi	78,20	78,79	0,59

Sumber Dokumen BPS Kota Samarinda

Realisasi pencapaian IPM Kota Samarinda tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 0,50% dibandingkan dengan capaian tahun 2023 yaitu sebesar 82,61 poin. Peningkatan capaian IPM ini tidak lepas dari peningkatan setiap komponen penyusunnya. Penurunan IPM tersebut disebabkan menurunnya umur harapan hidup saat lahir (AHH), harapan lama sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), standar hidup dan jenis kelamin penduduk yang berkaitan dengan PNB per kapita.

D. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menggambarkan sejauh mana aktivitas perekonomian suatu wilayah dalam menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu. Sedangkan aktivitas perekonomian merupakan suatu proses penggunaan faktor produksi untuk menghasilkan output. Proses penggunaan faktor produksi akan menghasilkan balas jasa. Oleh karenanya dengan adanya pertumbuhan ekonomi diharapkan pendapatan masyarakat meningkat, sebab masyarakat pemilik faktor produksi. Pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan 2010.

Tabel 2.1. 6 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Samarinda

No	Uraian	Kabupaten/Kota			Provinsi	
		Tahun 2022*	Tahun 2023*	Tahun 2024**	Tahun 2022	Tahun 2023
1	PDRB (harga konstan 2010) (miliar rupiah)	49.349,59	53.604,33		506.158,91	537.630,01
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,60	8,62		4,48	6,22
3	Peringkat (laju pertumbuhan)Provinsi	2	2			

Sumber Dokumen: BPS Kota Samarinda

E. Tingkat Inflasi

Selain ditinjau dari pertumbuhan ekonomi, perekonomian Kota Samarinda dapat dilihat melalui tingkat inflasi yang terjadi. Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang mengukur fluktuasi harga beberapa komoditas pokok yang menyangkut

kebutuhan hidup masyarakat. Inflasi yang terlalu tinggi merupakan gejala buruk bagi suatu perekonomian namun apabila besaran inflasi dapat dikendalikan melalui berbagai kebijakan harga serta distribusi barang dan jasa maka inflasi dapat menjadi pendorong bagi pembangunan. Berdasarkan sifatnya inflasi terbagi 4 kategori yang meliputi, (i) inflasi ringan (*creeping inflation*) Inflasi ringan ditandai dengan peningkatan laju inflasi yang tergolong rendah. Biasanya, persentasenya pun hanya kurang dari 10% dalam satu tahun. (ii) Inflasi Sedang (*Galloping Inflation*) Inflasi ini sedikit lebih tinggi dibandingkan inflasi ringan. Lajunya berkisar antara 10-30% setahun, (iii) Inflasi Berat (*High Inflation*) kategori inflasi ini termasuk yang berat. Mencakup hitungan mulai dari 30-100% setahun. Pada tingkat ini, harga kebutuhan masyarakat naik secara signifikan dan sulit dikendalikan. Dan (iv) Hiperinflasi (*Hyperinflation*) Jenis inflasi ini sangat dirasakan pengaruhnya karena terjadi secara besar-besaran dan mencapai lebih dari 100% setahun.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kota Samarinda Tingkat Inflasi Kota Samarinda Tahun 2024 adalah sebesar 1,50% dengan kategori ringan sebagaimana dijelaskan dalam Tabel di bawah ini.

Tabel 2.1. 7 Tingkat Inflasi Kota Samarinda

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Naik/(Turun) (%)
1	Tingkat Inflasi Kab/Kota (%)	5,22	3,37	1,50	(1,87)
2	Tingkat Inflasi Provinsi (%)	5,35	3,46	1,47	(1,99)

Sumber Dokumen: BPS Kota Samarinda

Tingkat inflasi di Kota Samarinda tahun 2024 menurut data BPS menunjukkan angka sebesar 1,50%, sedangkan tingkat inflasi pada tahun 2023 adalah sebesar 3,37% atau turun dibandingkan dengan angka inflasi pada tahun 2023. Namun dengan demikian inflasi Kota Samarinda lebih tinggi dibandingkan tingkat inflasi Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024 yang sebesar 1,47 % (yoy).

Perekonomian Kota Samarinda telah mencapai tahap stabilitas dan mulai memasuki tahap pengembangan ekonomi. Hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita dan struktur ekonomi Kota Samarinda.

2.1.1 BESARAN PDRB

Salah satu indikator ekonomi makro yang digunakan untuk melihat hasil pembangunan di suatu daerah adalah PDRB (Produk Domestik Regional Bruto). Hal ini yang memberi gambaran totalitas nilai tambah yang tercipta dari seluruh barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha di suatu daerah dalam satu tahun.

Dua jenis pendekatan PDRB, yaitu atas dasar harga berlaku (*current price*) dan atas dasar harga konstan (*constant price*). Dari besaran PDRB yang digunakan sebagai indikator untuk menilai kinerja perekonomian suatu wilayah Kabupaten/Kota, terutama dikaitkan dengan kemampuan suatu daerah dalam mengelola sumber daya yang dimiliki. Kenaikan jumlah produksi dan harga barang/jasa merupakan faktor utama pendorong kenaikan nilai PDRB Kota Samarinda, terlebih berjalannya otonomi daerah.

Perkembangan PDRB atas dasar harga berlaku selama kurun waktu 2020-2023 di Kota Samarinda menunjukkan trend yang fluktuatif dan secara umum mengalami kenaikan.



**Tabel 2.1. 8 Perkembangan PDRB dan Laju Pertumbuhan PDRB Kota Samarinda
 Tahun 2018-2022 (Juta Rupiah)**

Tahun	PDRB (Rupiah)		Pertumbuhan (%)	
	Berlaku	Konstan	Berlaku	Konstan 2010
		2010		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2018*)	63.564.686,76	43.323.568,68	100,00	4,96
2019**)	67.604.540,75	45.491.361,79	100,00	5,00
2020*)	66.526.911,43	45.041.329,12	100,00	(0,99)
2021**)	71.170.574,80	46.294.409,08	100,00	2,78
2022	83.335.592,94	49.342.390,41	100,00	6,58

Keterangan:) Angka Revisi *) Angka Sementara **) Angka Sangat Sementara

Sumber: PDRB Kota Samarinda Menurut Lapangan Usaha

Nilai PDRB di atas dihitung atas dasar harga berlaku (adhb), sehingga nilai yang dihasilkan maupun pertumbuhan PDRB masih bersifat semu, hal ini disebabkan oleh pengaruh faktor inflasi yang belum dikeluarkan komponen penyusunnya. Gambaran riil ekonomi dapat dilihat dari nilai dan pertumbuhan PDRB yang dihitung atas dasar harga konstan (adhk) yang telah diperbaharui menjadi tahun 2012 dari tahun sebelumnya 2000 (adhk 2000). Penetapan tahun dasar baru ini bertujuan untuk lebih menyesuaikan dengan kondisi perekonomian. Dalam penetapannya ditentukan antara lain oleh stabilitas ekonomi, nilai tukar, dan stabilitas harga/ kondisi inflasi yang cukup baik.

Sebagaimana PDRB adhb, PDRB adhk 2010 (selanjutnya disebut PDRB) pun mengalami tren peningkatan. Pada tahun 2018 PDRB yang dihasilkan mencapai 63.564.686.76 rupiah dengan tingkat pertumbuhan sebesar 4.96 persen. Selanjutnya pada Tahun 2019 nilai nominal bertambah tipis menjadi 67.604.540.75 rupiah. Sedangkan di Tahun 2020 nilai PDRB kembali naik sebanyak 66.526.911.43 rupiah. Nilai PDRB kembali bertambah di Tahun 2021 menjadi 71.170.574.80 rupiah dan PDRB pada tahun 2022 mengalami kenaikan yang signifikan menjadi 83.335.592.94.

2.1.2 PERTUMBUHAN EKONOMI

Sebagai ibukota provinsi pertumbuhan ekonomi di Kota Samarinda menjadi sebuah tolak ukur bagi perkembangan perekonomian Provinsi Kalimantan Timur sekaligus menjadi barometer pembangunan provinsi. Pertumbuhan ekonomi Kota Samarinda dapat dikatakan tumbuh konstan dan positif dalam kurun waktu 2018-2019. Pada tahun 2020 perekonomian tumbuh negatif yang disebabkan oleh mewabahnya virus COVID-19, sehingga membuat hampir semua lapangan usaha terdampak pengaruhnya. Hal tersebut menyebabkan pada tahun 2020 terjadi kontraksi ekonomi sebesar 0,99 persen karena adanya pembatasan dan penurunan aktivitas bisnis akibat pandemi. Meskipun masih dalam masa pandemi, baik Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Pemerintah Kota Samarinda terus berupaya memperbaiki kondisi tersebut. Pada tahun 2021, terlihat tanda-tanda pemulihan dengan pertumbuhan ekonomi mencapai 2,78 persen. Trend positif ini terus berlanjut pada tahun 2022 dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,60 persen dan pada tahun 2023 kembali meningkat menjadi 8,62 persen. Peningkatan laju pertumbuhan ekonomi Kota Samarinda pada tahun 2022 dan 2023 bahkan bisa melebihi laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Timur



dan Nasional, dimana untuk tahun 2023 pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur hanya sebesar 6,22 persen dan nasional pada tahun yang sama hanya sebesar 5,05 persen. Capaian yang terus meningkat dalam kurun waktu tersebut menunjukkan bahwa kebijakan dan langkah-langkah strategis yang diambil telah berhasil merangsang pertumbuhan sektor-sektor ekonomi utama di Kota Samarinda. Gambaran makro ekonomi pada Tahun 2017 yang mengalami kenaikan sebesar 3,85 persen merupakan gabungan dari semua sektor. Berarti telah terjadi kenaikan harga barang dan jasa ditingkat produsen untuk wilayah Samarinda.

Tabel 2.1. 9 Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2023 (Persen)

Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kota Samarinda Menurut Lapangan Usaha (persen), 2019-2023
 Growth Rate of Gross Regional Domestic Product of Samarinda Municipality at 2010 Constant Market Prices by Industry (percent), 2019-2023

Lapangan Usaha Industry	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ Agriculture, Forestry and Fishing	1,11	0,75	0,41	1,36	1,61
B Pertambangan dan Penggalian/Mining and Quarrying	5,65	-3,82	3,15	2,28	3,13
C Industri Pengolahan/Manufacturing	4,27	-3,97	1,48	4,98	2,96
D Pengadaan Listrik dan Gas/Electricity and Gas	8,75	14,55	2,25	1,95	16,32
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang/Water supply, Sewerage, Waste Management and Remediation Activities	3,77	6,94	5,33	6,52	5,85
F Konstruksi/Construction	4,12	-4,50	1,85	7,93	15,57
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles	5,36	1,85	3,59	6,82	8,20
H Transportasi dan Pergudangan/ Transportation and Storage	7,98	-0,40	3,22	9,51	8,77
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ Accommodation and Food Service Activities	7,66	-3,74	2,00	9,59	9,13
J Informasi dan Komunikasi/ Information and Communication	6,39	7,31	7,98	8,39	6,88
K Jasa Keuangan dan Asuransi/ Financial and Insurance Activities	2,52	2,73	2,16	10,28	14,12
L Real Estat/Real Estate Activities	3,01	1,96	-2,04	2,61	4,13
M,N Jasa Perusahaan/Business Activities	1,70	-3,49	1,49	5,31	4,39
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib/Public Administration and Defence; Compulsory Social Security	4,32	-3,75	2,68	8,96	7,57
P Jasa Pendidikan/Education	4,70	1,81	1,19	2,28	4,75
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ Human Health and Social Work Activities	6,40	18,20	13,66	4,31	5,96
R,S,T,U Jasa lainnya/Other Services Activities	7,94	-2,98	0,61	7,36	8,89
Produk Domestik Regional Bruto/ Gross Regional Domestic Product	5,00	-0,99	2,78	6,60	8,62

* Angka sementara/Preliminary Figures

** Angka sangat sementara/Very Preliminary Figures

Keterangan: *) Angka Sementara **) Angka Sangat Sementara

Sumber: BPS Kota Samarinda

2.1.3 STRUKTUR EKONOMI

Struktur ekonomi yang dinyatakan dalam persentase menunjukkan besarnya peranan masing-masing sektor ekonomi dalam menciptakan nilai tambah. Hal ini menggambarkan ketergantungan daerah terhadap kemampuan produksi masing-masing sektor ekonomi. Struktur ekonomi yang disajikan dari waktu ke waktu memperlihatkan perubahan dan pergeseran sebagai indikator adanya proses pembangunan.

Struktur Ekonomi menurut Lapangan Usaha dirinci menjadi 17 kategori Lapangan Usaha dan sebagian besar kategori dirinci lagi menjadi sub kategori. Pemecahan menjadi



sub kategori atau Lapangan Usaha ini disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2010. Uraian berikut menjelaskan perkembangan setiap kategori Lapangan Usaha pada setiap tahunnya. Struktur perekonomian Kota Samarinda pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan pada tahun 2023 didominasi oleh 3 (tiga) lapangan usaha, lapangan usaha pertama yaitu Konstruksi yang memberikan kontribusi sebesar 23,10 persen atau mengalami kenaikan dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2022 yang tercatat sebesar 20,53 persen, dominasi lapangan usaha ke dua yaitu sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor yang memberikan kontribusi sebesar 16,85 persen, dan lapangan usaha ke tiga yaitu pertambangan dan penggalian yang memberikan kontribusi sebesar 10,66 persen. Kondisi ini menandakan bahwa ketergantungan Kota Samarinda dengan Pertambangan sudah mulai bergeser kepada Konstruksi dan Perdagangan, yang semakin menguatkan Samarinda sebagai kota jasa dan perdagangan.

Pada tahun 2023, lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas memiliki pertumbuhan ekonomi tertinggi sebesar 16,32 persen. Kemudian disusul oleh lapangan usaha Konstruksi sebesar 15,57 persen, kemudian lapangan usaha Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 14,12 persen.

Tabel 2.1. 10 Struktur Ekonomi Kota Samarinda 2019-2023 (Persentase)

Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022**	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,75	1,83	1,74	1,55	1,52
B Pertambangan dan Penggalian	12,71	10,98	12,51	15,66	10,66
C Industri Pengolahan	7,72	7,72	7,47	6,92	6,83
D Pengadaan Listrik dan Gas	0,14	0,17	0,16	0,14	0,16
E Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,15	0,16	0,17	0,15	0,15
F Konstruksi	21,61	20,98	20,76	20,53	23,10
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	16,32	17,12	16,62	16,07	16,85
H Transportasi dan Pergudangan	7,20	7,28	7,40	7,54	8,22
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,08	4,04	3,92	3,79	3,99
J Informasi dan Komunikasi	3,34	3,68	3,78	3,52	3,53
K Jasa Keuangan dan Asuransi	7,00	7,32	7,32	7,54	8,20
L Real Estate	2,38	2,48	2,28	2,03	2,01
M,N Jasa Perusahaan	0,81	0,80	0,76	0,69	0,70
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial Wajib	6,32	6,27	6,08	5,66	5,70
P Jasa Pendidikan	4,11	4,53	4,34	3,79	3,74
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,41	1,71	1,87	1,71	1,74
R,S,T,U Jasa lainnya	2,97	2,94	2,84	2,71	2,89
Produk Domestik Regional Bruto	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Keterangan : *) Angka Sementara **) Angka Sangat Sementara
 Sumber : PDRB Kota Samarinda Menurut Lapangan Usaha

Keterangan: Angka Sementara **) Angka Sangat Sementara
 Sumber: PDRB Kota Samarinda Menurut Lapangan Usaha 2018-2023

2.1.4 PDRB PER KAPITA DAN PENDAPATAN PER KAPITA

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan turut mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Nilai PDRB per kapita Kota Samarinda atas dasar harga berlaku sejak tahun 2019 hingga 2023 memiliki trend yang meningkat. Pada tahun 2019 PDRB per kapita Kota Samarinda sebesar 79,95 juta rupiah

terus mengalami kenaikan hingga tahun 2023 mencapai 104,96 juta rupiah. Pertumbuhan PDRB per kapita tertinggi selama periode 2019-2023 terjadi pada tahun 2023 yakni sebesar 7,65 persen. Namun, pertumbuhan PDRB per kapita pada tahun 2019 juga terbilang tinggi bahkan lebih dari lima persen yaitu sebesar 6,56 persen.

PDRB perkapita merupakan salah satu indikator yang diturunkan dari angka PDRB. Angka tersebut di dapat dengan cara membagi angka PDRB suatu tahun dengan jumlah penduduk pertengahan tahun yang ada di di daerah itu. PDRB Per kapita yang menunjukkan nilai PDRB perkepala atau per satu orang penduduk, bukanlah alat untuk mengukur kesejahteraan karena nilai PDRB tersebut belum tentu dimiliki oleh penduduk wilayah tersebut.

Pada Tahun 2022, PDRB perkapita ADHK Kota Samarinda mencapai 55,43 juta rupiah dengan pertumbuhan PDRB per Kapita ADHK sebesar 5,61 persen terus mengalami kenaikan hingga tahun 2023 mencapai 58,54 juta rupiah. Pertumbuhan PDRB per kapita tertinggi selama periode 2019-2023 terjadi pada tahun 2023 yakni sebesar 7,65 persen. Namun, pertumbuhan PDRB per kapita pada tahun 2022 juga terbilang tinggi bahkan lebih dari lima persen yaitu sebesar 6,15 persen. PDRB perkapita merupakan salah satu indikator yang diturunkan dari angka PDRB. Angka tersebut didapat dengan cara membagi angka PDRB suatu tahun dengan jumlah penduduk pertengahan tahun yang ada di di daerah itu. PDRB Perkapita yang menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk, bukanlah alat untuk mengukur kesejahteraan karena nilai PDRB tersebut belum tentu dimiliki oleh penduduk wilayah tersebut.

Tabel 2.1. 11 PDRB Per Kapita Kota Samarinda Tahun 2019-2023

No.	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	PDRB Per kapita ADHB (Ribu Rp)	79.950,97	80.363,21	85.218,57	98.876,87	104.968,73
2	PDRB Per kapita ADHK (Ribu Rp)	53.799,32	54.409,04	55.432,25	58.540,09	63.017,29
3	Pertumbuhan PDRB per Kapita ADHK 2010 (%)	6,56	1,13	1,88	5,61	7,65

Sumber: BPS Kota Samarinda

2.1.5 EKSPOR IMPOR, NERACA PERDAGANGAN DAN INFLASI

Sebagai Ibu kota Propinsi Kalimantan Timur yang merupakan pusat kegiatan administrasi bisnis dan pemerintahan, memiliki pelabuhan laut dan bandara udara yang mendukung kelancaran moda angkutan air dan udara. Selain mempunyai potensi, jasa-jasa, industri pengolahan dan perdagangan, Kota Samarinda terus menunjukkan adanya perkembangan, sehingga volume dan nilai ekspor mampu terus ditingkatkan. Perdagangan sebagai salah satu instrumen untuk memperoleh devisa, semakin vital bagi perkembangan suatu negara pada umumnya, dan regional pada khususnya.

Perolehan devisa merupakan sumber dana yang penting untuk mendukung kelangsungan dan aktivitas ekonomi nasional maupun regional suatu daerah, dalam kaitannya dengan perdagangan luar negeri, karena sebagian besar dari devisa tersebut diperoleh dari perdagangan luar negeri. Dalam konteks globalisasi perdagangan, ekspor sangat digalakkan dengan sedikit mungkin mengurangi kebutuhan terhadap barang impor. Karena besaran ekspor dan impor yang dilakukan oleh suatu negara atau daerah akan berpengaruh secara langsung terhadap neraca perdagangan.



Bila Selisih antara ekspor dan impor positif, berarti perdagangan luar negeri mengalami surplus, suatu negara atau daerah memperoleh tambahan devisa yang akan sangat berguna bagi pembayaran luar negeri. Sebaliknya, apabila selisihnya negatif, berarti perdagangan luar negeri tersebut mengalami defisit, negara atau daerah tersebut kehilangan sebagian cadangan devisanya, sehingga dalam volume tertentu akan sangat riskan untuk membiayai pembayaran luar negeri. Karena itu, para pelaku ekspor berupaya untuk selalu meningkatkan eksportnya, dengan cara meningkatkan daya saing, perluasan pasar, penyebaran informasi serta pengembangan dan penganeekaragaman produk.

2.1.6 EKSPOR

Ekspor dapat didefinisikan sebagai kegiatan menjual komoditas yang berasal dari Kota Samarinda ke luar negeri. Dalam hal ini, ekspor tidak seperti yang dimaksud dalam kerangka pembentukan PDRB, yaitu kegiatan menjual barang dan jasa dari suatu daerah ke daerah lain, termasuk ke luar negeri. Faktor pendorong naiknya harga komoditas ekspor Kota Samarinda adalah selisih kurs cukup tinggi terhadap dollar AS.

2.1.7 IMPOR

Seiring dengan makin dinamisnya kondisi perekonomian Indonesia yang berdampak juga pada stabilitas nilai tukar rupiah terhadap Dollar Amerika, didukung dengan meningkatnya kemampuan produksi dalam negeri, ketergantungan terhadap komoditas impor dapat perlahan-lahan berkurang.

2.1.8 INFLASI / DEFLASI

Inflasi merupakan salah satu indikator penting yang dapat memberikan informasi tentang dinamika perkembangan harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat. Perkembangan harga barang dan jasa ini berdampak langsung terhadap tingkat daya beli dan biaya hidup masyarakat, perubahan nilai aset dan kewajiban serta nilai kontrak atau transaksi bisnis. Inflasi merupakan indikator pergerakan antara permintaan dan penawaran di pasar riil juga terkait erat dengan perubahan tingkat suku bunga, produktivitas ekonomi, nilai tukar rupiah dengan valuta asing, indeksasi anggaran dan parameter ekonomi makro lain. Oleh karena itu masyarakat, pelaku bisnis, kalangan perbankan dan pemerintah sangat berkepentingan terhadap perkembangan inflasi. Angka inflasi/deflasi merupakan turunan dari angka indeks harga, baik Indeks Harga Konsumen (IHK) maupun Indeks Harga Produsen (IHP). Perkembangan indeks tersebut itulah yang sering kita istilahkan dengan sebutan laju inflasi.

Dilihat dari laju inflasi selama kurun waktu Tahun 2024, terdapat beberapa kelompok pengeluaran mengalami inflasi, masing-masing sebagai berikut: kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 0,37 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,13 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,19 persen; kelompok kesehatan sebesar 0,17 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,03 persen; kelompok pendidikan sebesar 0,08 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,37 persen; kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,38 persen. Sedangkan kelompok pengeluaran yang mengalami deflasi yaitu kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar -0,01 persen; kelompok transportasi sebesar -0,16 persen; kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar -0,05 persen.



Tabel 2.1. 12 Perkembangan Laju Inflasi/Deflasi Kota Samarinda Menurut Kelompok Pengeluaran Tahun 2024 (Persen)

Tabel 1 IHK dan Tingkat Inflasi *Month-to-Month (m-to-m)*, *Year-to-Date (y-to-d)*, dan *Year-on-Year (y-on-y)* Kota Samarinda Menurut Kelompok Pengeluaran (2022=100), Desember 2024

Kelompok Pengeluaran	IHK Desember 2023	IHK Desember 2024	Tingkat Inflasi m-to-m Desember 2024 ¹⁾ (%)	Tingkat Inflasi y-to-d Desember 2024 ²⁾ (%)	Tingkat Inflasi y-on-y Desember 2024 ³⁾ (%)	Andil Inflasi m-to-m Desember 2024 (%)	Andil Inflasi y-on-y Desember 2024 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Umum (<i>Headline</i>)	105,08	106,66	0,28	1,50	1,50	0,28	1,50
Makanan, Minuman, dan Tembakau	109,44	110,87	0,84	1,31	1,31	0,21	0,37
Pakaian dan Alas Kaki	101,55	104,84	0,18	3,24	3,24	0,01	0,13
Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga	101,18	102,27	0,14	1,08	1,08	0,03	0,19
Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	99,90	99,72	0,24	-0,18	-0,18	0,01	-0,01
Kesehatan	101,87	106,95	0,18	4,99	4,99	0,01	0,17
Transportasi	111,69	110,43	-0,28	-1,13	-1,13	-0,04	-0,16
Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	99,90	98,98	-0	-0,92	-0,92	-0	-0,05
Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	103,34	105,34	-0	1,94	1,94	-0	0,03
Pendidikan	101,39	103,29	-0	1,87	1,87	-0	0,08
Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	103,87	107,25	0,02	3,25	3,25	-0	0,37
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	102,90	108,78	0,68	5,71	5,71	0,05	0,38

Keterangan:

¹⁾ Persentase perubahan IHK Desember 2024 terhadap IHK November 2024.

²⁾ Persentase perubahan IHK Desember 2024 terhadap IHK Desember 2023.

³⁾ Persentase perubahan IHK Desember 2024 terhadap IHK Desember 2023.

-0: Data sangat kecil/mendekati nol

Sumber: BPS Kota Samarinda

Laju inflasi Kota Samarinda pada Tahun 2024 lebih tinggi jika dibandingkan dengan laju inflasi Kalimantan Timur (Gabungan Samarinda, Balikpapan, Berau dan Penajam Paser Utara), dan lebih rendah jika dibandingkan dengan laju inflasi Nasional. Tercatat laju inflasi untuk Samarinda yaitu sebesar 1,50 persen, sedangkan untuk Kalimantan Timur dan Nasional yaitu 1,47 persen dan 1,57 persen. Dampak laju inflasi tinggi disuatu wilayah, akan sangat berpengaruh terhadap kebijakan dan perencanaan pembangunan terutama pada penyediaan dana, sehingga angka inflasi sangat diperlukan dalam setiap menyusun perencanaan dan kebijakan pembangunan agar lebih realistis dan tajam.

Perubahan inflasi/deflasi sangat dipengaruhi oleh keragaman perekonomian antara lain; pertama faktor jumlah persediaan barang/jasa tetap, sedangkan permintaan naik, kedua jumlah persediaan barang/jasa berkurang tetapi pada waktu yang sama jumlah permintaan naik, ketiga jumlah barang/jasa naik karena adanya kebijakan dibidang keuangan dan dampak kebijakan pemerintah terhadap harga barang/jasa. Inflasi tinggi dapat terjadi, apabila kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan dan lebih percaya disimpan dalam bentuk barang (dibeli barang). Sehingga berpengaruh terhadap harga barang/jasa yang terbatas menjadi naik, apabila hal ini Sehingga berpengaruh terhadap



harga barang/jasa yang terbatas menjadi naik, apabila hal ini terjadi sangat berpengaruh terhadap perekonomian daerah.

Gambar 2. 1 Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin

Jumlah Penduduk Miskin menurut Kabupaten/Kota (Ribu Jiwa), 2021-2023

« back | xlsx

Data series subyek Kemiskinan dan Ketimpangan juga dapat diakses melalui [FTIR Tabel Dinamis](#).

Data Series : 2021-2023 | 2018-2020 | 2015-2017

Search:

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Miskin menurut Kabupaten/Kota (Ribu Jiwa)		
	2021	2022	2023
Paser	27,56	27,02	26,39
Kutai Barat	15,38	15,38	14,69
Kutai Kartanegara	62,36	62,87	60,86
Kutai Timur	37,78	36,84	37,04
Berau	13,62	13,31	13,26
Penajam Paser Utara	12,13	11,56	11,19
Mahekam Ulu	3,18	3,10	3,06
Balikpapan	16,53	15,83	14,99
Samarinda	42,84	41,95	41,89
Bontang	6,41	6,39	7,71
Kalimantan Timur	241,77	236,25	231,08

Referensi waktu adalah bulan Maret.
Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional, Badan Pusat Statistik

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional, Badan Pusat Statistik

Melihat tren 4 tahun terakhir penurunan kemiskinan Kota Samarinda cenderung melambat hal ini disebabkan karena angka kemiskinan yang cenderung rendah relatif sulit diturunkan secara signifikan disebabkan kemiskinan yang tersisa bersifat kronis, absolut, tersebar sehingga memerlukan penanganan secara terpadu dan menyeluruh dalam menyelesaikan hal ini. Belanja daerah untuk ekonomi perlu ditingkatkan. Pada Tahun 2022 jumlah penduduk miskin di Kota Samarinda sebanyak 41,95 ribu jiwa, dan mengalami penurunan pada tahun 2023 menjadi 41,89 ribu jiwa.

Pemberian program bantuan terhadap warga miskin dengan tepat sasaran dengan program utama:

1. Perlindungan sosial.
2. Pemberdayaan.
3. Ekonomi.

Fokus utama kepada program kegiatan yang meningkatkan pendapatan masyarakat seperti KUR, pendampingan usaha sektoral KUBE, pengembangan ekonomi lokal dana desa perlu menjadi perhatian serius.

f.

Gambar 2. 2 Indeks Pembangunan Manusia

Kabupaten/Kota	[Metode Baru] Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Hasil Long Form SP2020	
	2023	2024
Paser	74,56	75,13
Kutai Barat	73,97	74,76
Kutai Kartanegara	75,95	76,57
Kutai Timur	75,33	75,90
Berau	76,71	77,17
Penajam Paser Utara	74,33	74,94
Mahakam Ulu	70,02	70,79
Balikpapan	82,03	82,62
Samarinda	82,61	83,11
Bontang	81,63	82,49
Kalimantan Timur	78,20	78,79

IPM Kota Samarinda mengalami peningkatan setiap tahunnya karena indikator seperti harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, usia harapan hidup meningkat. Besarnya pengeluaran pemerintah terhadap sektor pendidikan, kesehatan agar seluruh warga mendapatkan pelayanan berjalan efektif. Namun yang menjadi perhatian adalah meningkatkan kualitas agar mampu bersaing pada tingkat nasional bahkan internasional. Pemerataan sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan pada seluruh pelosok Kota Samarinda menjadi perhatian.

Gambar 2. 3 Tingkat Pengangguran Terbuka

Lampiran 2 Tingkat Pengangguran Terbuka dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur, Agustus 2023- Agustus 2024

Kabupaten/Kota	Agustus 2023		Agustus 2024		Perubahan Ags 2023-Ags 2024	
	TPT (persen)	TPAK (persen)	TPT (persen)	TPAK (persen)	TPT (persen)	TPAK (persen)
(1)	(2)	(3)	(5)	(5)	(6)	(7)
Paser	4,72	62,95	4,53	68,75	-0,19	5,80
Kutai Barat	6,16	70,51	5,58	70,28	-0,58	-0,23
Kutai Kartanegara	4,05	65,32	4,11	65,19	0,06	-0,13
Kutai Timur	5,93	66,22	5,76	66,78	-0,17	0,56
Berau	4,95	66,91	5,15	67,73	0,20	0,82
Penajam Paser Utara	2,07	66,25	2,05	73,10	-0,02	6,85
Mahakam Ulu	2,09	75,00	2,51	70,01	0,42	-4,99
Balikpapan	6,09	63,48	6,22	66,80	0,13	3,32
Samarinda	5,92	65,49	5,75	65,50	-0,17	0,01
Bontang	7,74	68,35	7,06	67,75	-0,68	-0,60
Kalimantan Timur	5,31	65,57	5,14	67,07	-0,17	1,50

Keterangan: Penghitungan dengan menggunakan penimbang Proyeksi Penduduk Hasil Sensus Penduduk 2020
 Sumber: Diolah dari data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2022, Agustus 2023, dan Agustus 2024

Terjadi penurunan pada tahun terakhir dengan persentase yang terbilang kecil, menandakan angka pengangguran menjadi perhatian yang tidak boleh dilupakan. Pada Tahun 2023 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,92 persen dan mengalami

f



penurunan pada tahun 2024 menjadi 5,75 persen. Peningkatan kualitas lulusan sekolah/Universitas yang mampu bersaing dalam dunia kerja, Revitalisasi SMK terhadap jurusan yang siap untuk diterima di pasar kerja, menanamkan jiwa kewirausahaan kepada pemuda pemudi agar mampu membuka lapangan kerja sendiri, mengembangkan sektor usaha mikro agar mampu membuka lapangan kerja yang lebih banyak, pengembangan jaringan infrastruktur, konektivitas, maupun kemudahan utang sehingga mampu menarik investasi yang lebih besar.

f.



BAB 3

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

**LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**



BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN SECARA UMUM

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada hakekatnya merupakan instrument kebijakan yang dipakai sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat dilakukan apabila terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum pada APBD.

Dalam rangka menjaga konsistensi pelaksanaan APBD Kota Samarinda Tahun Anggaran 2024 sebagai instrument dalam pencapaian berbagai target pembangunan daerah, penyesuaian berbagai besaran komponen APBD mendesak untuk dilakukan penyesuaian sejalan dengan dinamika yang terus berkembang.

Perubahan APBD Kota Samarinda TA 2024 merupakan langkah untuk menyesuaikan perubahan asumsi dasar ekonomi makro, menampung perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal dalam rangka mengamankan pelaksanaan APBD TA 2024 serta tetap menjaga pencapaian berbagai sasaran pembangunan daerah.

Perubahan APBD dilakukan secara menyeluruh guna menampung seluruh perubahan dalam pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang terjadi karena perubahan asumsi makro yang berimbas pada struktur APBD Kota Samarinda TA 2024 maupun untuk menampung tambahan belanja prioritas yang belum diakomodir dalam APBD murni Kota Samarinda TA 2024.

Beberapa hal yang menyebabkan pergeseran dan perubahan target pendapatan daerah pada Perubahan APBD Kota Samarinda TA 2024 antara lain:

1. Penyesuaian target PAD pada perubahan Anggaran tahun 2024 khususnya untuk komponen pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain – lain PAD.
2. Penyesuaian pendapatan transfer dari pemerintah pusat dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan tentang Transfer ke Daerah untuk TA 2024.
3. Penyesuaian pendapatan bagi hasil dari Pemerintah Provinsi terkait dana kurang salur pada tahun sebelumnya.

Adapun beberapa hal yang menyebabkan pergeseran dan perubahan anggaran belanja daerah Kota Samarinda antara lain:

1. Penyesuaian atau pergeseran anggaran kegiatan – kegiatan yang bersifat *earmarking* baik dari pemerintah pusat seperti kegiatan DAK dikarenakan bahwa petunjuk teknis yang dikeluarkan dari Kementerian dan Lembaga Teknis yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan kegiatan DAK dimaksud diterbitkan setelah ditetapkan Peraturan Daerah tentang APBD TA 2024 dan kegiatan bantuan keuangan provinsi yang pelaksanaannya disesuaikan dengan surat yang diterbitkan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur tentang Alokasi Bantuan Keuangan Provinsi TA 2024.
2. Terdapat keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran maupun perbuatan anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja pada tahun anggaran berkenaan.
3. Keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan.
4. Mengkoordinir dana transfer pusat dalam bentuk dana insentif fiskal untuk kegiatan penanganan *stunting* dan kemiskinan ekstrim.



Adapun rincian Ringkasan Penjabaran Pergeseran dan Perubahan APBD TA 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1. 1 Ringkasan Penjabaran APBD Murni, Perubahan dan Pergeseran Setelah Perubahan TA 2024

Nomor Urut	URAIAN	APBD Murni PERDA No. 9 Tahun 2023	Perubahan PERDA No. 3 Tahun 2024	Pergeseran Setelah Perubahan No. 49 Tahun 2024
1	2	3	4	5
4	PENDAPATAN	4.271.590.000.000,00	5.140.941.701.000,00	5.140.941.701.000,00
04.01	PENDAPATAN ASLI DAERAH	771.072.268.674,00	875.018.892.674,00	875.018.892.674,00
04.01.01	Pendapatan Pajak Daerah	554.860.000.000,00	612.300.000.000,00	612.300.000.000,00
04.01.02	Hasil Retribusi Daerah	150.557.778.000,00	161.004.202.000,00	161.004.202.000,00
04.01.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	20.290.129.000,00	22.672.018.000,00	22.672.018.000,00
04.01.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	45.364.361.674,00	79.042.672.674,00	79.042.672.674,00
04.02	PENDAPATAN TRANSFER	3.440.517.731.326,00	4.205.922.808.326,00	4.205.922.808.326,00
04.02.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.288.257.908.000,00	3.007.580.139.000,00	3.007.580.139.000,00
04.02.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	1.152.259.823.326,00	1.198.342.669.326,00	1.198.342.669.326,00
01.03.00	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	60.000.000.000,00	60.000.000.000,00	60.000.000.000,00
01.03.01	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00
01.03.03	Lain - lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	60.000.000.000,00	60.000.000.000,00	60.000.000.000,00
5	BELANJA	5.797.973.000.000,00	5.726.586.379.700,00	5.726.586.379.700,00
05.01	BELANJA OPERASI	2.971.077.284.822,00	2.964.287.945.540,00	2.968.120.496.296,00
05.01.01	Belanja Pegawai	1.146.171.490.119,00	1.156.553.303.261,72	1.162.928.724.581,72
05.01.02	Belanja Barang dan Jasa	1.443.333.567.816,00	1.546.843.762.393,28	1.544.300.891.829,28
05.01.04	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00
05.01.05	Belanja Hibah	375.800.326.887,00	255.592.979.885,00	255.592.979.885,00
05.01.06	Belanja Bantuan Sosial	5.771.900.000,00	5.297.900.000,00	5.297.900.000,00
05.02	BELANJA MODAL	2.802.895.715.178,00	2.760.798.434.160,00	2.756.965.883.404,00
05.02.01	Belanja Modal Tanah	76.296.898.950,00	107.881.038.826,00	101.948.488.070,00
05.02.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	157.860.195.789,00	188.780.010.339,00	190.880.010.339,00
05.02.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.020.882.737.634,00	965.516.577.576,00	965.516.577.576,00
05.02.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.535.734.028.805,00	1.464.582.915.419,00	1.464.582.915.419,00
05.02.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.860.854.000,00	31.899.092.000,00	31.899.092.000,00
05.02.06	Belanja Modal Aset Lainnya	10.261.000.000,00	2.138.800.000,00	2.138.800.000,00
05.03	BELANJA TIDAK TERDUGA	24.000.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00
05.03.01	Belanja Tak Terduga	24.000.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(1.526.383.000.000,00)	(585.644.678.700,00)	(585.644.678.700,00)
6	PEMBIAYAAN			
06.01	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	1.526.383.000.000,00	585.644.678.700,00	585.644.678.700,00



Nomor Urut	URAIAN	APBD Murni PERDA No. 9 Tahun 2023	Perubahan PERDA No. 3 Tahun 2024	Pergeseran Setelah Perubahan No. 49 Tahun 2024
06.01.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	1.526.383.000.000,00	585.644.678.700,00	585.644.678.700,00
06.02	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0,00	0,00	0,00
06.02.02	Pernyataan Modal Daerah	0,00	0,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	1.526.383.000.000,00	585.644.678.700,00	585.644.678.700,00
06.03	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	0,00	0,00	0,00

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka pada tahun 2024 Pemerintah Kota Samarinda melakukan perubahan kebijakan dalam perubahan APBD TA 2024 dengan rincian perubahan anggaran sebagai berikut:

1. Pendapatan Kota Samarinda dalam Anggaran Pergeseran Setelah Perubahan APBD TA 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp869.351.701.000,00 atau sebesar 20,35% menjadi Rp5.140.941.701.000,00 dari sebelumnya anggaran murni sebesar Rp4.271.590.000.000,00. Pendapatan Asli Daerah mengalami kenaikan sebesar Rp103.946.624.000,00 atau 13,48% menjadi Rp875.018.892.674,00 dari anggaran murni sebesar Rp771.072.268.674,00. Pendapatan Transfer mengalami kenaikan sebesar Rp765.405.077.000,00 atau 22,25% menjadi Rp4.205.922.808.326,00 dari anggaran murni sebesar Rp3.440.517.731.326,00. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah dalam Pergeseran Setelah Perubahan sebesar Rp60.000.000.000,00 sama dengan nilai dari anggaran murni sebesar Rp60.000.000.000,00 atau 0,00%.

Tabel 3.1. 2 Anggaran APBD Murni dan Pergeseran Setelah Perubahan Anggaran Pendapatan Daerah tahun 2024

No	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		SEBELUM PERGESERAN	SESUDAH PERGESERAN	(Rp)	%
	PENDAPATAN	4.271.590.000.000,00	5.140.941.701.000,00	869.351.701.000,00	20,35
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	771.072.268.674,00	875.018.892.674,00	103.946.624.000,00	13,48
	Pendapatan Pajak Daerah	554.860.000.000,00	612.300.000.000,00	57.440.000.000,00	10,35
	Hasil Retribusi Daerah	150.557.778.000,00	161.004.202.000,00	10.446.424.000,00	6,94
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	20.290.129.000,00	22.672.018.000,00	2.381.889.000,00	11,74
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	45.364.361.674,00	79.042.672.674,00	33.678.311.000,00	74,24
2	PENDAPATAN TRANSFER	3.440.517.731.326,00	4.205.922.808.326,00	765.405.077.000,00	22,25
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.288.257.908.000,00	3.007.580.139.000,00	719.322.231.000,00	31,44
	Pendapatan Transfer Antar Daerah	1.152.259.823.326,00	1.198.342.669.326,00	46.082.846.000,00	4,00
3	LAIN - LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	60.000.000.000,00	60.000.000.000,00	0,00	0,00
	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lain - lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	60.000.000.000,00	60.000.000.000,00	0,00	0,00



2. Belanja Kota Samarinda dalam Anggaran Pergeseran Setelah Perubahan APBD TA 2024 mengalami penurunan sebesar Rp71.386.620.300,00 atau sebesar 1,23% dari anggaran murni Rp5.797.973.000.000,00 menjadi Rp5.726.586.379.700,00 di Anggaran Pergeseran Setelah Perubahan tahun 2024. Belanja Operasi mengalami penurunan sebesar Rp2.956.788.526,00 atau sebesar 0,10% dari Rp2.971.077.284.822,00 di anggaran murni, menjadi Rp2.986.120.496.296,00 di Anggaran Pergeseran Setelah Perubahan tahun 2024. Belanja Modal mengalami penurunan sebesar Rp45.929.831.774,00 atau sebesar 1,64% dari Rp2.802.895.715.178,00 di anggaran murni, menjadi Rp2.756.965.883.404,00 di Anggaran Pergeseran Setelah Perubahan tahun 2024. Belanja Tidak Terduga mengalami penurunan sebesar Rp22.500.000.000,00 atau sebesar 93,75% dari Rp24.000.000.000,00 di anggaran murni, menjadi Rp1.500.000.000,00 di Anggaran Pergeseran Setelah Perubahan tahun 2024.

Tabel 3.1. 3 Anggaran APBD Murni dan Pergeseran Setelah Perubahan Anggaran Belanja Daerah tahun 2024

No	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		SEBELUM PERGESERAN	SESUDAH PERUBAHAN	(Rp)	%
	BELANJA	5.797.973.000.000,00	5.726.586.379.700,00	(71.386.620.300,00)	(1,23)
1	BELANJA OPERASI	2.971.077.284.822,00	2.968.120.496.296,00	(2.956.788.526,00)	(0,10)
	Belanja Pegawai	1.146.171.490.119,00	1.162.928.724.581,72	16.757.234.462,72	1,46
	Belanja Barang dan Jasa	1.443.333.567.816,00	1.544.300.891.829,28	100.967.324.013,28	7,00
	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
	Belanja Hibah	375.800.326.887,00	255.592.979.885,00	(120.207.347.002,00)	(31,99)
	Belanja Bantuan Sosial	5.771.900.000,00	5.297.900.000,00	(474.000.000,00)	(8,21)
2	BELANJA MODAL	2.802.895.715.178,00	2.756.965.883.404,00	(45.929.831.774,00)	(1,64)
	Belanja Modal Tanah	76.296.898.950,00	101.948.488.070,00	25.651.589.120,00	33,62
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	157.860.195.789,00	190.880.010.339,00	33.019.814.550,00	20,92
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.020.882.737.634,00	965.516.577.576,00	(55.366.160.058,00)	(5,42)
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.535.734.028.805,00	1.464.582.915.419,00	(71.151.113.386,00)	(4,63)
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.860.854.000,00	31.899.092.000,00	30.038.238.000,00	1.614,22
	Belanja Modal Aset Lainnya	10.261.000.000,00	2.138.800.000,00	(8.122.200.000,00)	(79,16)
3	BELANJA TIDAK TERDUGA	24.000.000.000,00	1.500.000.000,00	(22.500.000.000,00)	(93,75)
	Belanja Tidak Terduga	24.000.000.000,00	1.500.000.000,00	(22.500.000.000,00)	(93,75)
	SURPLUS / (DEFISIT)	(1.526.383.000.000,00)	(585.644.678.700,00)	940.738.321.300,00	(61,63)

3. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dianggarkan dan dicatat secara definitif berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2024 sesuai dengan hasil audit atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Samarinda tahun 2023 sebesar Rp585.644.678.700,00 mengalami penurunan sebesar Rp940.738.321.300,00 atau sebesar 61,63% dari sebelumnya sebesar



Rp1.526.383.000.000,00 pada anggaran murni. Selisih lebih atas proyeksi SiLPA tersebut sebagian besar merupakan anggaran yang harus dijadwalkan kembali untuk dipergunakan melaksanakan kegiatan yang bersifat specific grant, bersifat wajib dan mengikat seperti program kegiatan yang bersumber dari Dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Dana BOSNAS, Dana BLUD yang belum dapat dilaksanakan pada tahun anggaran berkenaan. Anggaran sesuai alokasi yang terdapat dalam SiLPA, sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku harus dianggarkan kembali dengan menggunakan petunjuk teknis yang berlaku pada tahun anggaran yang berkenaan.

Tabel 3.1. 4 Anggaran APBD Murni dan Pergeseran Setelah Perubahan Anggaran Pembiayaan Daerah tahun 2023

No	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		SEBELUM PERGESERAN	SESUDAH PERGESERAN	(Rp)	%
1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	1.526.383.000.000,00	585.644.678.700,00	(940.738.321.300,00)	(61,63)
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	1.526.383.000.000,00	585.644.678.700,00	(940.738.321.300,00)	(61,63)
2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pembiayaan Netto	1.526.383.000.000,00	585.644.678.700,00	(940.738.321.300,00)	(61,63)

3.2 PENDAPATAN DAERAH

Target Pendapatan Kota Samarinda TA 2024 sejumlah Rp5.140.941.701.000,00 terealisasi sejumlah Rp5.177.088.647.963,90 atau 100,70% dari target, mengalami kenaikan sejumlah Rp1.150.119.356.692,97 atau 28,56% dibandingkan dengan realisasi pendapatan daerah TA 2023 sejumlah Rp4.026.969.291.270,93.

Realisasi pendapatan tersebut merupakan bagian dari kontribusi PAD sebesar Rp973.231.612.768,21 Pendapatan Transfer sebesar Rp4.138.073.600.326,00 dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp65.783.434.869,69.

Target Pendapatan Asli Daerah TA 2024 sejumlah Rp875.018.892.674,00 terealisasi sejumlah Rp973.231.612.768,21 atau 111,22%. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar Rp 857.839.919.067,93 maka realisasi PAD mengalami kenaikan sejumlah Rp115.391.693.700,28 atau 13,45%.

Rincian penyumbang PAD terdiri dari Pajak Daerah sebesar Rp683.041.335.375,94, Pendapatan Retribusi Daerah Rp52.892.908.387,00, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Rp22.082.018.474,03 dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Rp215.215.350.531,24.

Secara keseluruhan pencapaian kinerja PAD sebagai sumber kemampuan fiskal Pemerintah Kota Samarinda selama TA 2024 maupun 2023 sumber utama PAD adalah dari Pendapatan Pajak Daerah. Realisasi Pendapatan Pajak Daerah pada TA 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp74.280.154.015,96 atau 12,20% dibandingkan pada Realisasi TA 2023 sebesar Rp608.761.181.359,98. Target Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp612.300.000.000,00 terealisasi TA 2024 sebesar Rp683.041.335.375,94 atau 111,55%.



Pendapatan Retribusi Daerah TA 2024 terealisasi sebesar Rp52.892.908.387,00 atau sebesar 32,85% dari target sebesar Rp161.004.202.000,00. Realisasi pendapatan retribusi tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp1.403.214.622,00 dibandingkan TA 2023 sebesar Rp51.489.693.765,00 atau sebesar 2,73%.

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2024 sebesar Rp22.082.018.474,03 atau sebesar 97,40% dari target sebesar Rp22.672.018.000,00, bila dibandingkan TA 2023 sebesar Rp13.337.956.568,25 mengalami kenaikan sebesar Rp8.744.061.905,78 atau sebesar 65,56%.

Sedangkan realisasi Lain-lain PAD yang Sah TA 2024 dibandingkan TA 2023 sebesar Rp215.215.350.531,24 atau sebesar 272,28% dari target sebesar Rp79.042.672.674,00, bila dibandingkan TA 2023 sebesar Rp184.251.087.374,70 mengalami kenaikan sebesar Rp30.964.263.156,54 atau sebesar 16,81%.

Pendapatan Transfer Kota Samarinda di tahun 2024 telah dianggarkan sebesar Rp4.205.922.808.326,00 dan telah terealisasi TA 2024 sebesar Rp4.138.073.600.326,00 atau 98,39%. Dibandingkan dengan realisasi di tahun 2023 sebesar Rp3.168.703.081.359,00 mengalami kenaikan sebesar Rp969.370.518.967,00 atau sebesar 30,59%.

Proporsi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat pada TA 2024, yakni sebagai berikut: Dana Perimbangan sebesar Rp2.971.848.290.765,00, Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp0,00, Insentif Fiskal sebesar Rp20.758.998.000,00.

Realisasi Dana Perimbangan pada TA 2024 telah menganggarkan sebesar Rp2.986.821.141.000,00 dan telah terealisasi TA 2024 sebesar Rp2.971.848.290.765,00 atau 99,50%. Jika dibandingkan dengan realisasi di tahun 2023 sebesar Rp2.172.401.743.615,00 mengalami kenaikan sebesar Rp799.446.547.150,00 atau 36,80%.

Sedangkan Dana Insentif Daerah (DID) pada TA 2024 untuk anggaran dan realisasi sebesar Rp0,00 mengalami penurunan sebesar Rp16.333.666.000,00 atau 100,00% dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar Rp16.333.666.000,00.

Realisasi Insentif Fiskal pada TA 2024 telah menganggarkan sebesar Rp20.758.998.000,00 dan telah terealisasi TA 2024 sebesar Rp20.758.998.000,00 atau 100,00% dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar Rp0,00 atau 0,00%.

Proporsi Pendapatan Transfer Antar Daerah pada TA 2024, yakni sebagai berikut: Pendapatan Bagi Hasil sebesar Rp557.097.679.235,00 dan Bantuan Keuangan sebesar Rp588.368.632.326,00.

Realisasi Pendapatan Bagi Hasil pada TA 2024 telah menganggarkan sebesar Rp609.974.037.000,00 dan telah terealisasi TA 2024 sebesar Rp557.097.679.235,00 atau 91,33% dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar Rp625.517.671.744,00 mengalami penurunan sebesar Rp68.419.992.509,00 atau 10,94%.

Realisasi Bantuan Keuangan pada TA 2024 telah menganggarkan sebesar Rp588.368.632.326,00 dan telah terealisasi TA 2024 sebesar Rp588.368.632.326,00 atau 100,00% dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar Rp354.450.000.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp233.918.632.326,00 atau 65,99%.

Pemerintah Kota Samarinda telah menganggarkan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan tahun 2024 adalah sebesar Rp60.000.000.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp65.783.434.869,69 atau 109,64% mengalami kenaikan sebesar Rp65.357.144.025,69 atau 15.331,59% jika dibandingkan dengan realisasi di tahun 2023 sebesar Rp426.290.844,00.

f.



3.3 BELANJA DAERAH

Target anggaran belanja Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp5.726.586.379.700,00 atau 95,67% dari realisasi TA 2024 sebesar Rp5.478.480.866.415,92. Proporsi terbesar realisasi belanja adalah Belanja Operasi sebesar Rp2.882.020.078.602,92 atau 97,10% dari target sebesar Rp2.968.120.496.296,00. Realisasi Belanja Modal sebesar Rp2.595.851.534.346,00 atau 94,16% dari target sebesar Rp2.756.965.883.404,00. Realisasi Belanja Tidak Terduga sebesar Rp609.253.467,00 atau 40,62% dari target sebesar Rp1.500.000.000,00.

Realisasi Belanja Pegawai TA 2024 sebesar Rp1.134.351.571.605,57. Realisasi tersebut terdiri dari belanja murni sebesar Rp1.129.371.171.402,57 dan pembayaran utang sebesar Rp4.980.400.203,00. bila dibandingkan realisasi TA 2023 sebesar Rp974.299.843.648,33 mengalami kenaikan sebesar Rp160.051.727.957,24 atau sebesar 16,43%.

Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2024 sebesar Rp1.467.796.117.633,35 atau 95,05% dari anggaran sebesar Rp1.544.305.891.829,28. Realisasi terdiri dari belanja murni sebesar Rp1.436.857.574.465,91 dan pembayaran utang sebesar Rp30.979.551.467,44. Dibandingkan realisasi TA 2023 sebesar Rp1.358.181.894.105,16 telah mengalami kenaikan sebesar Rp109.655.231.828,19 atau 8,07%.

Anggaran Belanja Hibah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp255.592.979.885,00 dan telah terealisasi sebesar Rp274.570.433.806,00 atau 107,42%. Jika dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp159.288.078.635,00 mengalami kenaikan sebesar Rp115.282.355.171,00 atau 72,37%.

Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2024 sebesar Rp5.260.947.258,00 atau 99,30% dari anggaran sebesar Rp5.297.900.000,00. Dibandingkan realisasi TA 2023 sebesar Rp368.750.000,00 telah mengalami kenaikan sebesar Rp4.892.197.258,00 atau 1.326,70%.

Pemerintah Kota Samarinda menganggarkan Belanja Modal Tanah sebesar Rp101.948.488.070,00 dan telah terealisasi sebesar Rp68.288.983.726,00 atau 66,98%. Jika dibanding tahun 2023 realisasi belanja modal tanah sebesar Rp96.919.196.734,00 mengalami penurunan sebesar Rp28.630.213.008,00 atau 29,54%.

Pemerintah Kota Samarinda telah menganggarkan Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp190.880.010.339,00 dan telah terealisasi sebesar Rp179.766.693.810,00 atau 94,18%. Realisasi tersebut terdiri dari belanja murni sebesar Rp179.687.043.810,00 dan pembayaran utang sebesar Rp79.650.000,00. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar Rp216.628.835.493,00 mengalami penurunan sebesar Rp36.862.141.683,00 atau 17,02%.

Pemerintah Kota Samarinda tahun 2024 telah menganggarkan Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp965.516.577.576,00 dan terealisasi sebesar Rp912.425.268.299,00 atau 94,50%, telah mengalami kenaikan sebesar Rp419.746.822.454,94 atau 85,20%, Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar Rp492.678.445.844,06.

Pemerintah Kota Samarinda tahun 2024 telah menganggarkan Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp1.464.582.915.419,00 dan telah terealisasi sebesar Rp1.415.682.927.225,00 atau sebesar 96,66%. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp303.892.285.625,85 atau 27,33% dari realisasi sebesar Rp1.111.790.641.599,15.

Pemerintah Kota Samarinda tahun 2024 telah menganggarkan Belanja Modal Aset Tetap lainnya sebesar Rp31.899.092.000,00 dan telah terealisasi sebesar



Rp19.363.811.286,00 atau 60,70%. Jika dibandingkan dengan realisasi di tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp892.179.255,00 atau 4,83% dari realisasi sebesar Rp18.471.632.031,00.

Pemerintah Kota Samarinda tahun 2024 telah menganggarkan Belanja Modal Aset Lainnya sebesar Rp2.138.800.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp323.850.000,00 atau 15,14%. Jika dibandingkan dengan realisasi di tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp174.000.000,00 atau 116,12% dari realisasi sebesar Rp149.850.000,00.

Pemerintah Kota Samarinda tahun 2024 telah menganggarkan Belanja Tidak Terduga untuk TA 2024 dianggarkan Rp1.500.000.000,00 terealisasi sebesar Rp609.253.467,00 atau 40,62%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar Rp1.182.636.207,98 mengalami Penurunan sebesar Rp573.382.740,98 atau 48,48%.

Dalam anggaran belanja daerah tahun 2024 terdapat kategori pengeluaran yang telah diatur sesuai amanat Undang-Undang yaitu *Mandatory Spending*, *Mandatory Spending* merupakan belanja atau pengeluaran negara yang sudah diatur oleh Undang-Undang dengan tujuan untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah. *Mandatory Spending* dalam tata kelola keuangan pemerintah daerah meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% (dua puluh persen) dari APBD sesuai amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4) dan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1);
2. Besar anggaran kesehatan pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diluar gaji sesuai UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Dana Transfer Umum (DTU) diarahkan penggunaannya, yaitu paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.07/2020 untuk belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antardaerah (UU APBN);
4. Alokasi anggaran pengawasan paling sedikit sebesar 0,50% (nol koma lima puluh persen) dari total belanja daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2024.
5. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2024 Pemerintah Daerah harus mengalokasikan anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah dimaksud, paling sedikit 0,34% (nol koma tiga puluh empat persen) dari total belanja daerah bagi pemerintah provinsi dan paling sedikit 0,16% (nol koma enam belas persen) dari total belanja daerah bagi pemerintah kabupaten/kota, yang dianggarkan pada SKPD yang secara fungsional menangani pengembangan sumber daya manusia, yaitu Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) atau Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Provinsi/Kabupaten/Kota atau sebutan lain.



Pemerintah Kota Samarinda telah mengatur besaran anggaran belanja untuk *Mandatory Spending* dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2024 sesuai Nomor 3 Tahun 2024 Tanggal 4 Oktober Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

Tabel 3.1. 5 Rekap Alokasi Anggaran Mandatory Spending TA 2024

(dalam satuan Rupiah)

No	Uraian	% Sesuai Regulasi	Jumlah Belanja Pada APBD	% Dalam APBD	Realisasi	% Realisasi
1	2	3	4	5	6	7
A	Belanja Fungsi Pendidikan	20	1.012.967.162.337,00	18,14%	993.520.496.145,00	98,08
B	Belanja Fungsi Kesehatan	10	615.786.883.401,00	9,98%	546.831.012.280,00	88,80
C	Belanja Alokasi Dana Kelurahan	25	232.274.764.624,00	4,22%	231.209.419.662,00	99,54
D	Belanja Fungsi Infrastruktur	25	2.944.170.746.057,00	0,48%	2.628.553.424.346,00	89,28
E	Belanja Fungsi Pengawasan	0,5	23.766.131.924,00	0,42%	23.247.481.368,00	97,82
F	Belanja Fungsi Pendidikan Dan Pelatihan, Bimbingan Teknis Atau Sejenisnya	0,16	60.602.581.790,00	0,78%	42.555.359.385,00	70,22
TOTAL			4.889.568.270.133,00		4.465.917.193.186,00	91,34

Tabel 3.1. 6 Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Pendidikan TA 2024

(dalam satuan Rupiah)

No	Komponen Perhitungan	Anggaran	Realisasi
1	Belanja Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Samarinda	909.630.504.995,00	815.953.633.314,40
2	Belanja Di Luar Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Yang Menunjang Pendidikan, Antara Lain:		
	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	10.246.768.750,00	7.316.005.341,00
	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	10.849.678.725,00	10.641.100.274,00
	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.828.767.780,00	1.064.771.018,00
	Dinas Perdagangan	655.101.700,00	608.585.464,00
	Dinas Lingkungan Hidup	665.000.000,00	662.740.261,00
	Dinas Perhubungan	125.000.000,00	107.175.850,00
	Dinas Perikanan	697.768.000,00	705.975.585,00
	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	78.268.572.387,00	75.629.652.506,00
3	Anggaran Fungsi Pendidikan	1.012.967.162.337,00	912.689.639.613,40
4	Total Belanja Daerah	5.726.586.379.700,00	5.477.751.130.831,92
5	Rasio Anggaran Pendidikan	17,69%	16,66%



Tabel 3.1. 7 Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Kesehatan TA 2024

(dalam satuan Rupiah)

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	ANGGARAN	REALISASI
1	Belanja Pada Dinas Kesehatan Kota Samarinda	500.516.866.923,00	505.875.550.578,00
2	Belanja Di Luar Dinas Kesehatan Yang Menunjang Kesehatan, Antara Lain:		
	Dinas Lingkungan Hidup	4.405.094.250,00	3.958.831.121,00
	Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata	3.986.000.000,00	4.158.428.867,00
	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	8.905.501.832,00	8.307.888.899,00
	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	72.563.130.000,00	0,00
	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	25.410.290.396,00	24.530.312.815,00
3	Anggaran Fungsi Kesehatan	615.786.883.401,00	546.831.012.280,00
4	Total Belanja Daerah	5.726.586.379.700,00	5.477.751.130.831,92
5	Rasio Anggaran Kesehatan	10,75%	9,98%

Dalam rangka mendukung upaya pencegahan dan penanggulangan *stunting* yang merupakan salah satu program prioritas nasional, Pada APBD TA 2024 Pemerintah Kota Samarinda mengalokasikan Rp18.290.954.955,00 pada Program Kegiatan Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat di Dinas Kesehatan. Realisasi untuk kegiatan tersebut adalah sebesar Rp16.967.458.955,00 atau 92,76%.

Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka kegiatan *stunting* antara lain:

- ❖ Pertemuan pembinaan kader;
- ❖ Pertemuan *stunting* terkait pemegang program gizi puskesmas;
- ❖ Pertemuan input aksi 2 dan persiapan rembuk *stunting*;
- ❖ Pertemuan desiminasi dan publikasi hasil pengukuran data *stunting*;
- ❖ Sosialisasi terkait kelurahan lokus *stunting*;
- ❖ Pertemuan reviu tahunan;
- ❖ Pertemuan rembuk *stunting*;
- ❖ Konvergensi, koordinasi, konsolidasi TPPS Kota Samarinda;
- ❖ Pertemuan penyusunan regulasi terkait *stunting*.

Capaian Program Stunting Tahun 2024 memiliki beberapa sasaran antara lain :

1. Pemeriksaan Anemia pada Remaja Puteri melalui skrining Kesehatan di sekolah-sekolah yang dilakukan oleh Puskesmas berdasarkan sekolah-sekolah diwilayah kerja Puskesmas.
2. Pemberian Makanan Tambahan bagi Ibu hamil dan Balita berbahan pangan lokal.
3. Pemberian Suplementasi Gizi bagi Balita berupa Vipalbumin.
4. Pemberian Tablet tambah darah bagi Remaja Putri, ibu hamil dan Calon pengantin.
5. Skrining Kesehatan pada Anak Usia Sekolah di wilayah kerja Puskesmas sasaran SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA.

Tabel 3.1. 8 Alokasi Anggaran Belanja Alokasi Dana Kelurahan TA 2024

(dalam satuan Rupiah)

No	Komponen Perhitungan	Anggaran	Realisasi
1	Dana Kelurahan, Antara Lain :		
	Kecamatan Palaran	20.021.671.056,00	19.943.989.347,00
	Kecamatan Samarinda Ilir	22.152.844.300,00	22.127.279.832,00



No	Komponen Perhitungan	Anggaran	Realisasi
	Kecamatan Samarinda Seberang	14.374.240.700,00	14.345.923.600,00
	Kecamatan Samarinda Utara	28.730.230.800,00	28.607.579.290,00
	Kecamatan Samarinda Ulu	37.326.666.100,00	37.324.675.021,00
	Kecamatan Sungai Kunjang	35.952.544.468,00	35.644.778.255,00
	Kecamatan Sambutan	13.340.296.900,00	13.339.102.672,00
	Kecamatan Sungai Pinang	28.754.511.500,00	28.747.628.329,00
	Kecamatan Samarinda Kota	14.798.869.000,00	14.342.929.833,00
	Kecamatan Loa Janan Ilir	16.822.889.800,00	16.785.533.483,00
2	Anggaran Dana Kelurahan	232.274.764.624,00	231.209.419.662,00
3	Total Belanja Daerah	5.726.586.379.700,00	5.477.751.130.831,92
4	Rasio Anggaran Kelurahan	4,06%	4,22%

Tabel 3.1. 9 Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Infrastruktur TA 2024

(dalam satuan Rupiah)

No	Komponen Perhitungan	Anggaran	Realisasi
1	Belanja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Samarinda	2.389.063.422.381,00	2.178.634.471.032,00
2	Belanja pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Samarinda	70.632.757.000,00	64.413.464.667,00
3	Belanja di luar Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Samarinda, antara lain:		
4	Dinas Pendidikan	352.712.211.600,00	291.216.566.107,00
5	Dinas Kesehatan	122.119.169.900,00	83.694.237.098,00
6	Dinas Perhubungan	9.643.185.176,00	10.594.685.442,00
7	Anggaran Fungsi Infrastruktur	2.944.170.746.057,00	2.628.553.424.346,00
8	Total Belanja Daerah	5.726.586.379.700,00	5.477.751.130.831,92
9	Rasio Anggaran Pendidikan dan Pelatihan, Bimbingan Teknis atau Sejenisnya	0,51	0,48

Tabel 3.1. 10 Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Pengawasan TA 2024

(dalam satuan Rupiah)

No	Komponen Perhitungan	Anggaran	Realisasi
1	Belanja pada Inspektorat Daerah	23.766.131.924,00	23.247.481.368,00
2	Anggaran Fungsi Pengawasan	23.766.131.924,00	23.247.481.368,00
3	Total Belanja Daerah	5.726.586.379.700,00	5.477.751.130.831,92
4	Rasio Anggaran Pengawasan	0,42%	0,42%



Tabel 3.1. 11 Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Pendidikan dan Pelatihan, Bimbingan Teknis atau Sejenisnya TA 2024

(dalam satuan Rupiah)

No	Komponen Perhitungan	Anggaran	Realisasi
1	Belanja Yang Menunjang Pendidikan Dan Pelatihan, Bimbingan Teknis Atau Sejenisnya, Antara Lain:		
	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	45.894.989.584,00	29.557.334.814,00
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	617.600.000,00	426.314.979,00
	Dinas Tenaga Kerja	1.540.000.000,00	988.647.306,00
	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.380.487.500,00	2.322.526.047,00
	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	250.786.000,00	247.789.000,00
	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	2.791.863.100,00	2.784.707.127,00
	Dinas Perikanan	398.087.000,00	372.693.684,00
	Sekretariat Daerah	464.000.000,00	553.596.130,00
	Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP)	1.464.522.500,00	550.530.500,00
	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Samarinda	338.000.000,00	306.528.075,00
	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	72.100.000,00	43.545.591,00
	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	275.000.000,00	274.996.750,00
	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	100.000.000,00	98.924.760,00
	Dinas Perdagangan	500.000.000,00	240.469.138,00
	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	949.410.500,00	852.546.400,00
	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	2.565.735.606,00	2.934.209.084,00
2	Anggaran Pendidikan dan Pelatihan, Bimbingan Teknis atau Sejenisnya	60.602.581.790,00	42.555.359.385,00
3	Total Belanja Daerah	5.726.586.379.700,00	5.477.751.130.831,92
4	Rasio Anggaran Pendidikan dan Pelatihan, Bimbingan Teknis atau Sejenisnya	1,06%	0,78%

Pemerintah Kota Samarinda memiliki 10 program unggulan sebagai penjabaran dari visi dan misi Pemerintah Kota Samarinda selama periode 2021-2026.

Tabel 3.1. 12 Rekap Realisasi Berdasarkan 10 Program Unggulan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Samarinda

f

No.	Program Unggulan	OPD Pelaksana (Unit / Sub Unit)	Pagu (Rp)		Fisik (%)	Realisasi Keuangan	
			Murni	Perubahan		(Rp)	(%)
1	2	3	5	6	7	8	9
1	Program Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat (PRO-BEBAYA)	Kecamatan	228.043.099.324,00	227.758.648.524,00	90,81%	225.896.177.895,00	99,18%
2	Program pengendalian banjir dan pembangunan sistem drainase modern 2024	Dinas PUPR, SATPOL-PP, DLH, Kecamatan, PERKIM	718.694.035.248,00	710.611.935.558,00	99,52%	690.059.803.623,00	97,11%
3	Program Pembangunan Sistem Transportasi Massal modern dan ramah lingkungan (Subway dan Skytrain-Monorail)	Dinas Perhubungan, Dinas PUPR	785.090.396.335,00	728.581.943.325,00	90,81%	698.366.980.215,00	95,85%



No.	Program Unggulan	OPD Pelaksana (Unit / Sub Unit)	Pagu (Rp)		Fisik (%)	Realisasi Keuangan	
			Murni	Perubahan		(Rp)	(%)
4	Program <i>Social Security Number</i> (Satu Kartu Untuk Semua Layanan)	DISDUKCAPIL, DISKOMINFO, DINSO S	10.417.463.200,00	9.565.263.200,00	99,80%	9.523.212.751,00	99,56%
5	Program <i>Smart City Plus</i>	DISKOMINFO, DPMPSTP, BAPPEDA, PERPUSTAKAAN, DPPPA	30.201.924.500,00	29.466.093.820,00	99,50%	28.921.602.395,00	98,15%
6	Program " <i>Doctor On Call</i> " untuk kondisi darurat, lansia dan balita	Dinas Kesehatan	5.013.629.777,00	10.867.740.000,00	90,44%	9.777.377.432,00	89,97%
7	Program bantuan peralatan dan sarana pendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun	DISDIKBUD, Kecamatan	361.752.674.850,00	364.714.954.450,00	99,72%	360.029.554.356,00	98,72%
8	Pengembangan Badan Usaha Milik RT (Berbasis Kelurahan)		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9	Program Pengembangan Ruang Terbuka Hijau, Taman Rekreasi dan 1 Kelurahan 1 Playground	PUPR, DISPERKIM, DLH	75.450.594.250,00	71.252.391.088,00	99,78%	69.829.576.285,00	98,00%
10	Program penciptaan 10.000 Wira Usaha Baru (<i>Start Up</i>)	DINSOS, DISNAKER, KETAPANGTANI, DIKOPUKM, DISPORAPAR, DISKAN, DISDAG, SEKKOT	52.188.129.889,00	44.102.370.898,00	94,74%	40.983.284.576,00	92,93%

1. Program Pemberdayaan RT yang lebih dikenal dengan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Pro-Bebaya) merupakan upaya percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat berbasis kewilayahan. Tujuannya agar masalah di masyarakat cepat dan tepat tertangani. Kemudian pembangunan berdasarkan kebutuhan masyarakat, tepat sasaran dan tepat waktu, dengan konsep dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat. Dari masyarakat dalam arti program yang dibutuhkan masyarakat, diperuntukkan kepada masyarakat dan dikerjakan oleh masyarakat itu sendiri. Dengan harapan pembangunan dapat merata di segala sektor serta wilayah.
2. Program pengendalian banjir dan pembangunan sistem drainase modern. Program ini dilakukan dengan pembenahan sistem Daerah Aliran Sungai berdasarkan atas faktor penyebab banjir dan menjadi sebuah gerakan bersama membangun samarinda bebas banjir dengan prioritas kawasan banjir Jl. D.I Panjaitan, Simpang 4 Sempaja, Simpang Lembuswana dan Simpang Air Putih. Rencana pengendalian banjir selanjutnya adalah dengan membangun kolam retensi atau bantuan bendungan pengendali (Bendali) banjir yang diawali di dua lokasi. Bendali pertama akan dibangun di kelurahan Sungai Siring yang berada di alur Sungai Lubang Putang yang terletak di Kampung Pampang Dalam. Selanjutnya akan dibangun di Kelurahan Sempaja Selatan dan kolam retensi di depan Pasar Bengkuring. Keduanya akan dilaksanakan dengan skema *multiyear*.
3. Program Pembangunan sistem transportasi masal modern dan ramah lingkungan. Untuk menjawab permasalahan kemacetan yang setiap hari menjadi penghambat aktivitas masyarakat Kota Samarinda. Wali Kota Samarinda telah menyiapkan gagasan inovasi berupa program pembangunan Sistem Transportasi Massal Modern dan Ramah Lingkungan, yaitu pembuatan fasilitas *subway* dan *skytrain* atau *monorail*. Dengan rencana awal dari Stadion Madya Sempaja menuju Bandara APT Pranoto. Inti jalurnya adalah dari dan menuju bandara, jadi jarak terpendeknya 15 sampai 20 kilometer dari stadion Sempaja. Untuk transportasi massal modern menggunakan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
4. Program *Social Security Number* (satu kartu untuk semua layanan). Data Terpadu Kesejahteraan Sosial merupakan data primer yang diverifikasi dan segera digunakan untuk merealisasikan penerbitan "*Samarinda Social Security Number*" yang berfungsi



- sebagai layanan satu kartu untuk semua, baik layanan bantuan Pendidikan, Kesehatan, penyaluran sembako, jaminan Kesehatan dan lain sebagainya.
5. Program *Smart City Plus*, merupakan inovasi kota dengan memanfaatkan dan mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi dalam tata kelola kota, dengan tujuan menunjang kinerja pemerintah dalam memberikan keamanan, kenyamanan, memperbaiki pelayanan publik dan meningkatkan kesejahteraan warga.
 6. Program *Doctor On Call* untuk kondisi darurat, lansia dan balita. Merupakan program pelayanan cepat di bidang kesehatan khusus untuk lansia, anak, ibu melahirkan dan warga yang dalam keadaan darurat. Program layanan kesehatan ini diperlukan, karena masyarakat yang tersebar di 2000 RT di 59 kelurahan. Mengantisipasi kejadian warga meninggal, hanya karena lambannya penanganan pasien. *Emergency call* 112 tetap berjalan, hanya menambah layanan cepat berbasis di puskesmas. Armada ambulan dilengkapi dengan dokter, paramedis dan perlengkapan yang cukup siap untuk datang ke rumah melayani warga yang menghadapi kedaruratan kesehatan.
 7. Program bantuan peralatan sarana dan prasarana Pendidikan untuk menunjang Pendidikan gratis 12 tahun. Program ini dilakukan untuk meningkatkan fasilitas belajar yang nyaman bagi peserta didik dan juga akan mencakup peningkatan kualitas dan kesejahteraan guru.
 8. Pengembangan badan usaha milik RT (berbasis kelurahan). BUM RT adalah entitas ekonomi untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan dengan memanfaatkan potensi sumberdaya ekonomi lokal di lingkungan RT. Program pengembangan BUM RT ini diarahkan kepada kelompok masyarakat yang memiliki potensi berusaha besar. Program BUM RT akan dikembangkan berbasis di tingkat kelurahan. Program pemberdayaan ini pada dasarnya mendorong warga untuk merencanakan, melaksanakan dan mengawasi kegiatan yang diperlukan warga untuk mengangkat derajat kesejahteraan dan usaha produktifnya.
 9. Program pengembangan ruang terbuka hijau, taman rekreasi satu kelurahan satu *Playground*. Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah lahan dalam kota dengan peruntukan taman, hutan kota. Program pengembangan RTH ini sekaligus diarahkan untuk membangun taman rekreasi dan paling tidak setiap kelurahan memiliki satu taman bermain (*Playground*).
 10. Program Penciptaan 10.000 wirausaha baru (*start-up*). Program ini diperuntukan bagi individu atau kelompok masyarakat yang memiliki usaha yang cukup untuk membiayai kebutuhan dasarnya dan berpotensi untuk dikembangkan. Program *start-up* ini penting untuk menciptakan lapangan kerja. Usaha kecil mikro dan menengah didorong untuk memajukan usaha melalui bantuan permodalan dan pelatihan teknologi/manajemen.

f



BAB 4

KEBIJAKAN AKUNTANSI

LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2024



BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

Pada tahun 2024 Pemerintah Kota Samarinda memiliki 40 (empat puluh) entitas akuntansi, 19 (sembilan belas) entitas BLUD Puskesmas, 1 (satu) entitas BLUD Laboratorium Kesehatan Daerah, 1 (satu) entitas BLUD Rumah Sakit Umum Daerah RSUD I.A Moeis dan 1 (satu) entitas pelaporan, Laporan Keuangan Pemerintah Kota Samarinda tahun 2024 ini merupakan hasil konsolidasi laporan keuangan seluruh entitas akuntansi dan BLUD tahun 2024.

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh entitas pelaporan sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, antar periode maupun entitas. Kebijakan akuntansi ini juga dipedomani oleh fungsi-fungsi di Pemerintah Daerah, antara lain fungsi perencanaan, fungsi penyusunan APBD, dan fungsi pelaksanaan APBD. Dengan demikian akan terjadi keselarasan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan daerah.

Pemerintah Kota Samarinda memiliki kebijakan akuntansi yang sudah ditetapkan secara formal terkait dengan perlakuan akuntansi dalam sistem pencatatan administrasi pengelolaan keuangan daerah berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah dan Peraturan Wali Kota Nomor 55 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 69 Tahun 2022 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan. Pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan transaksi-transaksi spesifik dan peristiwa-peristiwa yang lain, diatur dalam kebijakan akuntansi yang khusus.

Pelaporan keuangan harus menyajikan secara wajar dan mengungkapkan secara penuh kegiatan Pemerintah Daerah dan sumber daya ekonomis yang dipercayakan, serta menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Laporan keuangan disusun berdasarkan konsep harga perolehan kecuali terhadap aktiva tetap apabila tidak diperoleh harga perolehan digunakan harga perolehan yang diestimasi.

Transaksi dan kejadian diakui atas dasar akrual. Periode akuntansi adalah sama dengan periode anggaran.

ENTITAS PELAPORAN

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Entitas pelaporan keuangan adalah Pemerintah Kota Samarinda secara keseluruhan yang dipimpin oleh Wali Kota. Dalam pelaksanaannya Wali Kota sebagai penanggungjawab entitas pelaporan melimpahkan wewenangnya kepada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang dalam hal ini adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) yang mempunyai

f



tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD). Entitas pelaporan berkewajiban menyajikan laporan keuangan kepada pihak eksternal yang berkepentingan (*stakeholders*) dengan cara melakukan konsolidasi atas laporan keuangan yang dihasilkan oleh entitas akuntansi.

Entitas akuntansi adalah pusat-pusat pertanggungjawaban yang terdapat pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selaku pengguna anggaran, Bendahara Umum Daerah (BUD) atau Kuasa Bendahara Umum Daerah, dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Entitas Akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan.

Entitas akuntansi Bendahara Umum Daerah (BUD) berkewajiban menyelenggarakan akuntansi di lingkungannya untuk menghasilkan Laporan Arus Kas yang dilaksanakan oleh Kuasa BUD atau pejabat yang ditunjuk.

BASIS AKUNTANSI

Basis Akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Samarinda yaitu basis akrual untuk pengakuan pos-pos Pendapatan-LO, Beban, Transfer, Kegiatan Non Operasional, Pos-pos Luar Biasa, Kenaikan Penurunan Ekuitas, Aset, Kewajiban dan Ekuitas. Untuk pengakuan basis kas pada Pos-pos Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Aktivitas Operasional, Aktivitas Investasi, Aktivitas Pendanaan, Aktivitas Transitoris dan Kenaikan Penurunan SAL. Entitas pelaporan menyelenggarakan akuntansi dan penyajian laporan keuangan dengan menggunakan basis akrual baik dalam pengakuan pendapatan dan beban, maupun pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas.

BASIS PENGUKURAN

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis.

NERACA

Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai posisi keuangan daerah pada saat tertentu. Posisi keuangan daerah adalah aktiva, utang, dan ekuitas yang dimiliki pemerintah daerah. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai posisi keuangan daerah pada saat tertentu. Posisi keuangan daerah adalah aktiva, utang, dan ekuitas yang dimiliki pemerintah daerah pada akhir periode akuntansi.

Neraca SKPD dan PPKD sebagai entitas Akuntansi dan neraca Pemerintah Daerah sebagai entitas pelaporan disajikan dengan format Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

KAS DAN SETARA KAS

Kas dan Setara Kas dicatat sebesar nilai nominal atau sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Jumlah kas dan

f.



setara kas dicatat berdasarkan perhitungan saldo rekening koran, saldo rekening kas di bendahara pengeluaran termasuk deposito berjangka kurang dari 3 (tiga) bulan yang diperpanjang secara otomatis.

KAS DI KAS DAERAH

Kas di Kas Daerah dicatat sebesar nilai nominal atau sebesar nilai rupiahnya. Penyajian berdasarkan perhitungan administratif.

KAS DI BENDAHARA PENERIMAAN

Kas di Bendahara Penerimaan dicatat sebesar nilai nominal atau sebesar nilai rupiahnya. Penyajian berdasarkan perhitungan administratif.

KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN

Kas di Bendahara Pengeluaran/Pemegang Kas dicatat sebesar nilai nominal atau sebesar nilai rupiahnya. Kas dalam valuta asing dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca. Jumlah yang dicatat berdasarkan perhitungan administratif.

KAS DI BLUD

Kas di BLUD dicatat sebesar nilai nominal atau sebesar nilai rupiahnya. Penyajian berdasarkan perhitungan administratif.

KAS LAINNYA

Kas Lainnya dicatat sebesar nilai nominal atau sebesar nilai rupiahnya. Penyajian berdasarkan perhitungan administratif.

INVESTASI JANGKA PENDEK

DEPOSITO JANGKA PENDEK

Deposito jangka pendek merupakan investasi jangka pendek dalam bentuk deposito yang jatuh temponya antara 3 (tiga) sampai dengan 12 (dua belas) bulan.

Deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut. Jumlah yang dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik serta penelitian administratif.

INVESTASI JANGKA PENDEK LAINNYA

Investasi jangka pendek lainnya adalah investasi yang dilakukan oleh pemerintah dalam bentuk selain dari deposito dan obligasi yang berjangka waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan.

Investasi jangka pendek ini dicatat sebesar nilai perolehan. Jumlah yang dicatat berdasarkan penelitian administratif.

PIUTANG

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai

f.



akibat perjanjian/atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah. Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Piutang diakui pada saat penyusunan laporan keuangan ketika timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas. Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa yang diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca.

BAGIAN LANCAR TAGIHAN PENJUALAN ANGSURAN

Merupakan reklasifikasi tagihan penjualan angsuran jangka panjang menjadi piutang jangka pendek karena adanya tagihan angsuran jangka panjang yang akan jatuh tempo kurang dari 12 (dua belas) bulan pada tahun mendatang.

Jumlah yang dicatat berdasarkan perhitungan administratif.

BAGIAN LANCAR PINJAMAN KEPADA BUMD

Bagian lancar pinjaman kepada BUMD merupakan reklasifikasi piutang Pinjaman kepada BUMD yang akan jatuh tempo dalam tahun berikutnya. Bagian lancar pinjaman kepada BUMD dicatat sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai rupiah yang akan jatuh tempo tahun berikutnya. Jumlah yang dicatat berdasarkan perhitungan administratif.

BAGIAN LANCAR TUNTUTAN PERBENDAHARAAN (TP) DAN TUNTUTAN GANTI RUGI (TGR)

Akun ini merupakan reklasifikasi TP/TGR disebabkan adanya TP/TGR jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam tahun berikutnya. Akun ini dicatat sebesar nilai nominal yaitu sejumlah rupiah TP/TGR yang akan diterima dalam waktu 1 (satu) tahun.

Jumlah yang dicatat berdasarkan perhitungan administratif. Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus didukung dengan bukti SK Pembebanan/Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K)/Surat Ketetapan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM)/Dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah terdapat surat ketetapan dan telah diterbitkan surat penagihan.

PIUTANG PAJAK DAN RETRIBUSI

Piutang pajak dan retribusi dicatat berdasarkan Surat Ketetapan Pajak atau Retribusi Daerah yang telah diterbitkan tetapi belum diterima pembayarannya. Saldo akun ini disajikan sebesar nilai rupiah pajak-pajak atau retribusi yang belum dilunasi.

f



PIUTANG LAIN-LAIN PAD YANG SAH

Akun Piutang Lain-Lain PAD yang Sah digunakan untuk mencatat transaksi yang berkaitan dengan piutang atas penerimaan Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah. Saldo akun ini disajikan sebesar nilai nominal yaitu nilai rupiah piutang yang belum dilunasi.

PIUTANG LAINNYA

Akun Piutang Lainnya digunakan untuk mencatat transaksi yang berkaitan dengan piutang selain yang telah disebutkan diatas. Saldo akun ini disajikan sebesar nilai nominal yaitu nilai rupiah piutang yang belum dilunasi.

KRITERIA KUALITAS PIUTANG

Dalam rangka melaksanakan prinsip kehati-hatian pemerintah daerah wajib menilai kualitas piutang agar dapat memantau dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar hasil penagihan piutang yang telah disisihkan senantiasa dapat direalisasikan. penilaian kualitas piutang dilakukan berdasarkan kondisi piutang pada tanggal laporan keuangan dengan langkah-langkah:

- a. Penilaian Kualitas Piutang dilakukan dengan mempertimbangkan sekurang-kurangnya:
 - 1) Jatuh tempo piutang; dan/atau
 - 2) Upaya penagihan.
- b. Menetapkan kualitas piutang dalam 4 (empat) golongan, yaitu:
 - 1) kualitas lancar;
 - 2) kualitas kurang lancar;
 - 3) kualitas diragukan; dan
 - 4) kualitas macet

Penilaian kualitas piutang dilakukan berdasarkan kondisi piutang pada tanggal laporan keuangan

Kualitas piutang berdasarkan penggolongan jenis piutang:

1. Pajak Daerah

Penggolongan kriteria kualitas piutang pajak daerah dapat dipilah berdasarkan cara pemungutan:

- a. Penggolongan Kualitas Pajak yang Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (*self assessment*) dilakukan dengan ketentuan:
 - 1) Kualitas lancar, dengan kriteria:
 - a) Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
 - b) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/atau
 - c) Wajib Pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
 - d) Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
 - e) Wajib Pajak likuid; dan/atau



- f) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
- 2) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
 - a) Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau
 - b) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - c) Wajib Pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - d) Wajib Pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau
 - e) Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
- 3) Kualitas Diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - a) Umur piutang lebih dari 2 sampai dengan 5 tahun; dan/atau
 - b) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - c) Wajib Pajak tidak kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - d) Wajib Pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
 - e) Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
- 4) Kualitas Macet, dengan kriteria:
 - a) Umur piutang lebih dari 5 tahun; dan/atau
 - b) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - c) Wajib Pajak tidak diketahui keberadaannya / tidak ditemukan; dan/atau
 - d) Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - e) Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*).
- b. Penggolongan kualitas piutang pajak yang pemungutannya ditetapkan oleh Kepala Daerah (*official assessment*) dilakukan dengan ketentuan:
 - 1) Kualitas Lancar, dengan kriteria:
 - a) Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
 - b) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/atau
 - c) Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
 - d) Wajib Pajak likuid; dan/atau
 - e) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
 - 2) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
 - a) Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau

f.



- b) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - c) Wajib Pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - d) Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
- 3) Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
- a) Umur piutang lebih dari 2 tahun sampai dengan 5 tahun; dan/atau
 - b) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - c) Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau
 - d) Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
- 4) Kualitas Macet, dengan kriteria:
- a) Umur piutang lebih dari 5 tahun; dan/atau
 - b) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - c) Wajib pajak tidak diketahui keberadaannya; dan/atau
 - d) Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - e) Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*).
2. Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak Khusus untuk objek Retribusi, dapat dipilah berdasarkan karakteristik sebagai berikut:
- a. Kualitas Lancar
 - 1) Umur piutang 0 sampai dengan 1 (satu) bulan; dan/atau
 - 2) Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.
 - b. Kualitas Kurang Lancar
 - 1) Umur piutang 1 (satu) bulan sampai dengan 3 (tiga)
 - 2) Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.
 - c. Kualitas Diragukan
 - 1) Umur piutang 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan; dan atau
 - 2) Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.

F.



- d. Kualitas Macet
 - 1) Umur piutang lebih dari 12 (dua belas) bulan; dan/atau
 - 2) Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan atau Piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani pengelolaan piutang negara.
3. Penggolongan Kriteria Kualitas Piutang Selain Pajak dan Retribusi:
 - a. Kualitas Lancar
 - 1) Umur piutang 0 sampai dengan 1 (satu) bulan; dan/atau
 - 2) Apabila belum melakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.
 - b. Kualitas Kurang Lancar
Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) bulan melakukan pelunasan.
 - c. Kualitas Diragukan
Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan melakukan pelunasan.
 - d. Kualitas Macet
Apabila dalam jangka waktu lebih dari 3 (tiga) bulan tidak dilakukan pelunasan atau Piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani pengelolaan piutang negara.

Tata cara penagihan piutang diatur sesuai dengan kebijakan pengelolaan piutang di daerah.

PENYISIHAN PIUTANG TAK TERTAGIH

Besaran Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada setiap akhir tahun (periode pelaporan) ditentukan pada Kualitas Bagian lancar, sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari piutang. Kurang lancar, sebesar 10% (sepuluh persen) dari piutang. Diragukan, sebesar 50% (lima puluh persen) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan jika macet, sebesar 100% (seratus persen) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

Penyisihan piutang tidak tertagih tidak diberlakukan terhadap piutang transfer. Pencatatan transaksi penyisihan Piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya.

Apabila kualitas piutang masih sama pada tanggal pelaporan, maka tidak perlu dilakukan jurnal penyesuaian cukup diungkapkan di dalam CaLK, namun bila kualitas piutang menurun, maka dilakukan penambahan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal. Sebaliknya, apabila



kualitas piutang meningkat misalnya akibat restrukturisasi, maka dilakukan pengurangan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal.

PEMBERHENTIAN PENGAKUAN

Pemberhentian pengakuan atas piutang dilakukan berdasarkan sifat dan bentuk yang ditempuh dalam penyelesaian piutang dimaksud. Secara umum penghentian pengakuan piutang dengan cara membayar tunai (pelunasan) atau melaksanakan sesuatu sehingga tagihan tersebut selesai/lunas.

Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara penghapustagihan (*write-off*) dan penghapusbukuan (*write down*).

Penghapusbukuan piutang adalah kebijakan intern manajemen, merupakan proses dan keputusan akuntansi yang berlaku agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan *net realizable value*-nya.

Penghapusbukuan piutang tidak secara otomatis menghapus kegiatan penagihan piutang dan hanya dimaksudkan berarti pengalihan pencatatan dari intrakomptabel menjadi ekstrakomptabel.

Penghapusbukuan piutang merupakan konsekuensi penghapustagihan piutang. Penghapusbukuan piutang dibuat berdasarkan berita acara atau keputusan pejabat yang berwenang untuk menghapustagih piutang. Keputusan dan/atau Berita Acara merupakan dokumen yang sah untuk bukti akuntansi penghapusbukuan

Kriteria penghapusbukuan piutang, adalah sebagai berikut:

- a. Penghapusbukuan harus memberi manfaat, yang lebih besar daripada kerugian penghapusbukuan.
 - 1) Memberi gambaran obyektif tentang kemampuan keuangan entitas akuntansi dan entitas pelaporan.
 - 2) Memberi gambaran ekuitas lebih obyektif, tentang penurunan ekuitas.
 - 3) Mengurangi beban administrasi/akuntansi, untuk mencatat hal-hal yang tak mungkin terealisasi tagihannya.
- b. Perlu kajian yang mendalam tentang dampak hukum dari penghapusbukuan pada neraca pemerintah daerah, apabila perlu, sebelum difinalisasi dan diajukan kepada pengambil keputusan penghapusbukuan.
- c. Penghapusbukuan berdasarkan keputusan formal otoritas tertinggi yang berwenang menyatakan hapus tagih perdata dan atau hapus buku (*write off*). Pengambil keputusan penghapusbukuan melakukan keputusan reaktif (tidak berinisiatif), berdasar suatu sistem nominasi untuk dihapusbukukan atas usulan berjenjang yang bertugas melakukan analisis dan usulan penghapusbukuan tersebut.

Penghapustagihan suatu piutang harus berdasarkan berbagai kriteria, prosedur dan kebijakan yang menghasilkan keputusan hapus tagih yang defensif bagi pemerintah secara hukum dan ekonomik.

Penghapustagihan piutang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

f.



Kewenangan penghapusan piutang sampai dengan Rp 5 miliar oleh Wali Kota, sedangkan kewenangan di atas Rp 5 miliar oleh Wali Kota dengan persetujuan DPRD.

Kriteria Penghapustagihan Piutang sebagian atau seluruhnya adalah sebagai berikut:

- Penghapustagihan karena mengingat jasa-jasa pihak yang berutang kepada negara, untuk menolong pihak berutang dari keterpurukan yang lebih dalam. Misalnya kredit UKM yang tidak mampu membayar.
- Penghapustagihan sebagai suatu sikap menyejukkan, membuat citra penagih menjadi lebih baik, memperoleh dukungan moril lebih luas menghadapi tugas masa depan.
- Penghapustagihan sebagai sikap berhenti menagih, menggambarkan situasi takmungkin tertagih melihat kondisi pihak tertagih.
- Penghapustagihan untuk restrukturisasi penyehatan utang, misalnya penghapusan denda, tunggakan bunga dikapitalisasi menjadi pokok kredit baru, *rescheduling* dan penurunan tarif bunga kredit.
- Penghapustagihan setelah semua anjakan dan cara lain gagal atau tidak mungkin diterapkan. Misalnya, kredit macet dikonversi menjadi saham/ekuitas/penyertaan, dijual (anjak piutang), jaminan dilelang.
- Penghapustagihan sesuai hukum perdata umumnya, hukum kepailitan, hukum industry (misalnya industri keuangan dunia, industri perbankan), hukum pasar modal, hukum pajak, melakukan *benchmarking* kebijakan/peraturan *write off* di negara lain.
- Penghapustagihan secara hukum sulit atau tidak mungkin dibatalkan, apabila telah diputuskan dan diberlakukan, kecuali cacat hukum. Penghapusbukuan (*writedown* maupun *write off*) masuk *eskrakomptabel* dengan beberapa sebab misalnya kesalahan administrasi, kondisi misalnya debitur menunjukkan gejala mulai mencicil teratur dan alasan misalnya dialihkan kepada pihak lain dengan *haircut* mungkin kan dicatat kembali menjadi rekening aktif *intrakomtabel*.

PERSEDIAAN

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam waktu 12 (dua belas) bulan dari tanggal pelaporan.

Persediaan diklasifikasikan sebagaimana diatur dalam Bagan Akun Standar merupakan aset yang berwujud.

Persediaan dicatat sebesar biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian dan nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik setiap akhir tahun dan/atau penelitian administratif dengan menggunakan harga perolehan terakhir/harga pokok produksi terakhir/nilai wajar.

Persediaan dan beban pemakaian persediaan dinilai dengan menggunakan metode FIFO (*First in first out*).

f.



INVESTASI JANGKA PANJANG

Investasi jangka panjang yang bersifat permanen dicatat sebesar biaya perolehannya, meliputi harga transaksi investasi ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi berkenaan.

Investasi jangka panjang merupakan kelompok aset nonlancar yang terdiri dari Investasi Dalam Saham, Investasi Dalam Obligasi dan Pinjaman kepada Pihak BUMN/D dan Pemerintah Pusat/Daerah.

INVESTASI NON PERMANEN

Investasi Non Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Merupakan investasi dalam bentuk Kredit Pemberdayaan Ekonomi Rakyat bagi pengusaha golongan ekonomi menengah kebawah yang tergabung dalam kelompok usaha/tani yang bertujuan untuk mengembangkan usaha sehingga dapat meningkatkan penghasilan masyarakat.

Nilai investasi dalam bentuk dana bergulir dinilai sejumlah nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) yaitu sebesar nilai kas yang dipegang ditambah saldo yang dapat tertagih.

INVESTASI PERMANEN

Investasi Permanen yang dilakukan Pemerintah adalah investasi yang tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan, tetapi untuk mendapatkan dividen dan atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan atau menjaga hubungan kelembagaan.

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Kepemilikan saham/penyertaan modal Pemerintah Kota pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kencana, Perusahaan Umum Daerah Varia Niaga dan PT. BPR Bank Samarinda (Perseroda) Kota Samarinda lebih dari 20% atau tepatnya 100%. Oleh karenanya, nilai penyertaan dicatat secara proporsional dari nilai ekuitas yang tercantum dalam laporan keuangan perusahaan/lembaga yang dimaksud atau metode ekuitas. Nilai penyertaan modal dihitung dari nilai ekuitas yang ada di laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan dikalikan dengan persentase kepemilikan.

Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode

- (a) Metode biaya
- (b) Metode ekuitas
- (c) Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan

Penggunaan metode-metode tersebut diatas didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

- (a) Kepemilikan kurang dari 20 % menggunakan metode biaya

f.



- (b) Kepemilikan 20 % sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas
- (c) Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas
- (d) Kepemilikan atas investasi jangka panjang bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.

Investasi Permanen Lainnya

Investasi permanen yang tidak dapat dimasukkan kedalam kategori Penyertaan Modal Pemerintah diklasifikasikan sebagai Investasi Permanen Lainnya.

Akun ini dicatat sebesar harga perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperolehnya.

Properti Investasi

1. Pemerintah daerah dapat memiliki properti investasi yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan sewa dan/atau untuk peningkatan nilai dengan keadaan sebagai berikut:
 - a. Pemerintah daerah mengelola portofolio properti berdasarkan basis komersial; atau
 - b. Pemerintah daerah memiliki properti untuk disewakan atau untuk mendapatkan peningkatan nilai, dan menggunakan hasil yang diperoleh tersebut untuk membiayai kegiatannya.
2. Pemerintah daerah dapat memiliki aset berwujud berbentuk properti yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Apabila pemerintah daerah mengelola aset properti untuk menghasilkan pendapatan sewa dan/atau memperoleh kenaikan nilai, maka aset tersebut termasuk dalam definisi properti investasi.
3. Properti investasi menghasilkan arus kas yang sebagian besar tidak bergantung pada aset lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah.
4. Berikut ini adalah aset yang merupakan properti investasi dan termasuk dalam ruang lingkup pernyataan ini:
 - a. tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki dalam jangka panjang dengan tujuan untuk memperoleh kenaikan nilai dan bukan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau kepada entitas pemerintah yang lain dalam jangka pendek;
 - b. tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki namun belum ditentukan penggunaannya di masa depan. Jika pemerintah daerah belum menentukan penggunaan tanah sebagai properti yang digunakan sendiri atau akan dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau kepada pemerintah yang lain dalam jangka pendek,



- tanah tersebut diakui sebagai tanah yang dimiliki dalam rangka kenaikan nilai;
- c. bangunan yang dimiliki oleh pemerintah daerah (atau dikuasai oleh pemerintah daerah melalui sewa pembiayaan) dan disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi;
 - d. bangunan yang belum terpakai yang dikuasai dan/ atau dimiliki tetapi tersedia untuk disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi;
 - e. properti dalam proses pembangunan atau pengembangan yang di masa depan digunakan sebagai properti investasi.
5. Berikut adalah aset yang bukan merupakan properti investasi dan dengan demikian tidak termasuk dalam ruang lingkup pernyataan ini:
- a. properti yang dimaksudkan untuk dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau sedang dalam proses pembangunan atau pengembangan untuk dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, misalnya properti yang diperoleh secara eksklusif dengan maksud diserahkan dalam waktu dekat atau untuk pengembangan dan diserahkan kembali;
 - b. properti yang masih dalam proses pembangunan atau pengembangan atas nama pihak ketiga;
 - c. properti yang digunakan sendiri, termasuk (di antaranya) properti yang dikuasai untuk digunakan di masa depan sebagai properti yang digunakan sendiri, properti yang dimiliki untuk pengembangan di masa depan dan penggunaan selanjutnya sebagai properti yang digunakan sendiri, dan properti yang digunakan sendiri yang menunggu untuk dijual;
 - d. properti yang disewakan kepada entitas lain dengan cara sewa pembiayaan;
 - e. Properti yang dimiliki dalam rangka bantuan sosial yang menghasilkan tingkat pendapatan sewa di bawah harga pasar, misalnya pemerintah memiliki perumahan atau apartemen yang disediakan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan mengenakan sewa di bawah harga pasar;
 - f. properti yang dimiliki untuk tujuan strategis yang dicatat sesuai dengan kebijakan akuntansi yang mengatur aset tetap.
 - g. properti yang tidak ditujukan untuk menghasilkan pendapatan sewa dan peningkatan nilai, namun sesekali disewakan kepada pihak lain.
6. Dalam hal pemerintah daerah memiliki aset yang digunakan secara sebagian untuk menghasilkan pendapatan sewa atau kenaikan nilai dan sebagian lain digunakan untuk kegiatan



- operasional pemerintah, penentuan klasifikasi asetnya sebagai berikut:
- a. apabila masing-masing bagian aset tersebut dapat dijual terpisah, pemerintah daerah mempertanggungjawabkannya secara terpisah;
 - b. apabila masing-masing bagian aset tersebut tidak dapat dijual secara terpisah, maka aset tersebut dikatakan sebagai properti investasi hanya jika bagian yang tidak signifikan (kurang dari atau sama dengan 20% aset tetap) digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah.
7. Dalam hal pemerintah daerah menyediakan tambahan layanan kepada para penyewa properti yang dimilikinya, pemerintah daerah memperlakukan aset sebagai properti investasi apabila tambahan biaya jasa layanan kepada para penyewa properti dalam jumlah yang tidak signifikan atas nilai keseluruhan perjanjian.
 8. Untuk tujuan konsolidasi laporan keuangan pemerintah daerah, transaksi properti investasi terjadi antara entitas pelaporan dan entitas akuntansi tidak memenuhi definisi properti investasi karena kepemilikan properti investasi tersebut berada dalam satu kesatuan ekonomi. Pesewa menyajikan aset tersebut sebagai properti investasi jika pola penyewaan dilakukan secara komersial, namun demikian untuk keperluan penyajian laporan keuangan konsolidasian aset tersebut disajikan sebagai aset tetap sebagaimana diatur dalam kebijakan akuntansi aset.
 9. Properti investasi yang disewakan kepada entitas pemerintah lainnya maka bagian properti investasi yang disewakan kepada pemerintah lainnya tersebut harus diungkapkan dalam laporan keuangan kedua pemerintah tersebut.

Pengakuan

1. Properti investasi diakui pada saat diperoleh berdasarkan kontrak/perjanjian kerjasama atau berita acara serah terima (BAST) atau surat ketetapan Kepala Daerah/Sekretaris Daerah. Untuk dapat diakui sebagai properti investasi, suatu aset harus memenuhi kriteria:
 - a. besar kemungkinan terdapat manfaat ekonomi yang akan mengalir ke pemerintah daerah di masa yang akan datang dari aset properti investasi; dan
 - b. biaya perolehan atau nilai wajar properti investasi dapat diukur dengan andal.
2. Dalam menentukan apakah suatu properti investasi memenuhi kriteria pertama pengakuan, pemerintah daerah perlu menilai tingkat kepastian yang melekat atas aliran manfaat ekonomi masa depan berdasarkan bukti yang tersedia pada waktu pengakuan awal.
3. Kriteria kedua pengakuan properti investasi biasanya telah terpenuhi dari bukti perolehan aset properti investasi

f



- tersebut. Apabila suatu properti investasi diperoleh bukan dari pembelian maka nilai perolehannya disajikan sebesar nilai wajar pada tanggal perolehan.
4. Pemerintah daerah mengevaluasi semua biaya properti investasi pada saat terjadinya berdasarkan prinsip pengakuan. Biaya-biaya tersebut, termasuk biaya yang dikeluarkan pada awal perolehan properti investasi, dan biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal yang digunakan untuk penambahan, penggantian, atau perbaikan properti investasi.
 5. Berdasarkan prinsip pengakuan dalam paragraf 15, pemerintah daerah tidak mengakui biaya dari perawatan sehari-hari properti tersebut sebagai jumlah tercatat properti investasi, melainkan sebagai biaya perbaikan dan pemeliharaan properti pada saat terjadinya. Biaya perawatan sehari-hari tersebut terutama mencakup biaya tenaga kerja dan barang habis pakai, dan dapat berupa bagian kecil dari biaya perolehan.
 6. Bagian dari properti investasi dapat diperoleh melalui penggantian. Berdasarkan prinsip pengakuan, pemerintah daerah mengakui dalam jumlah tercatat properti investasi atas biaya penggantian bagian properti investasi pada saat terjadinya biaya, jika kriteria pengakuan dipenuhi. Jumlah tercatat bagian yang digantikan dihentikan pengakuannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengukuran Saat Pengakuan Awal

1. Properti investasi diukur pada awalnya sebesar biaya perolehan.
2. Apabila properti investasi diperoleh dari transaksi non pertukaran, properti investasi tersebut dinilai dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal perolehan.
3. Biaya perolehan dari properti investasi yang dibeli meliputi harga pembelian dan semua pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung. Pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung antara lain biaya jasa hukum, pajak, dan biaya transaksi lainnya.
4. Biaya perolehan properti investasi tidak bertambah atas biaya-biaya di bawah ini:
 - a. Biaya perintisan (kecuali biaya-biaya yang diperlukan untuk membawa properti investasi ke kondisi siap digunakan);
 - b. Kerugian operasional yang terjadi sebelum properti investasi mencapai tingkat penggunaan yang direncanakan; atau
 - c. Pemborosan bahan baku, tenaga kerja atau sumber daya lain yang terjadi selama masa pembangunan atau



- pengembangan properti investasi.
5. Jika pembayaran atas properti investasi ditangguhkan, maka biaya perolehan adalah setara harga tunai. Perbedaan antara jumlah tersebut dan pembayaran diakui sebagai beban bunga selama periode kredit.
 6. Biaya perolehan awal hak atas properti yang dikuasai dengan cara sewa dan diklasifikasikan sebagai properti investasi yang dicatat sebagai sewa pembiayaan, dalam hal ini aset diakui pada jumlah mana yang lebih rendah antara nilai wajar dan nilai kini dari pembayaran sewa minimum. Jumlah yang setara diakui sebagai liabilitas.
 7. Premium yang dibayarkan untuk sewa diperlakukan sebagai bagian dari pembayaran sewa minimum, dan karena itu dimasukkan dalam biaya perolehan aset, tetapi dikeluarkan dari liabilitas. Jika hak atas properti yang dikuasai dengan cara sewa diklasifikasikan sebagai properti investasi, maka hak atas properti tersebut dicatat sebesar nilai wajar dari hak tersebut dan bukan dari properti yang mendasarinya.
 8. Properti investasi mungkin diperoleh dari hasil pertukaran dengan aset moneter atau aset non-moneter atau kombinasi aset moneter dan non- moneter. Nilai perolehan properti investasi tersebut dihitung dari nilai wajar kecuali (a) transaksi pertukaran tersebut tidak memiliki substansi komersial, atau (b) nilai wajar aset yang diterima maupun aset yang diserahkan tidak dapat diukur secara andal. Jika aset yang diperoleh tidak dapat diukur dengan nilai wajar, biaya perolehannya diukur dengan jumlah tercatat aset yang diserahkan.
 9. Dalam menentukan suatu transaksi pertukaran memiliki substansi komersial atau tidak, pemerintah daerah mempertimbangkan apakah arus kas atau potensi jasa di masa yang akan datang diharapkan dapat berubah sebagai akibat dari transaksi tersebut. Suatu transaksi pertukaran memiliki substansi komersial jika:
 - a. konfigurasi (risiko, waktu, dan jumlah) dari arus kas atau potensi jasa atas aset yang diterima berbeda dari konfigurasi arus kas atau potensi jasa atas aset yang diserahkan; atau
 - b. nilai khusus entitas dari bagian operasi entitas dipengaruhi oleh perubahan transaksi yang diakibatkan dari pertukaran tersebut; dan
 - c. selisih antara (a) atau (b) adalah signifikan terhadap nilai wajar dari aset yang dipertukarkan.

Untuk tujuan penentuan apakah transaksi pertukaran memiliki substansi komersial, nilai khusus entitas dari porsi (bagian) operasi entitas dipengaruhi oleh transaksi yang akan

F.



menggambarkan arus kas sesudah pajak. Hasil analisis ini akan jelas tanpa entitas menyajikan perhitungan yang rinci.

1. Nilai wajar suatu aset di mana transaksi pasar yang serupa tidak tersedia, dapat diukur secara andal jika:
 - a. variabilitas dalam rentang estimasi nilai wajar yang rasional untuk aset tersebut tidak signifikan; atau
 - b. probabilitas dari beragam estimasi dalam kisaran dapat dinilai secara rasional dan digunakan dalam mengestimasi nilai wajar. Jika pemerintah daerah dapat menentukan nilai wajar secara andal, baik dari aset yang diterima atau diserahkan, maka nilai wajar dari aset yang diserahkan digunakan untuk mengukur biaya perolehan dari aset yang diterima kecuali jika nilai wajar aset yang diterima lebih jelas.
2. Properti investasi yang diperoleh dari entitas akuntansi lainnya dalam satu entitas pelaporan dinilai dengan menggunakan nilai buku. Sedangkan properti investasi yang diperoleh dari entitas akuntansi lainnya di luar entitas pelaporan, dinilai dengan menggunakan nilai wajar.

Pengukuran Setelah Pengakuan Awal

1. Properti investasi dinilai dengan metode biaya, yaitu sebesar nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.
2. Properti investasi, kecuali tanah, disusutkan dengan metode penyusutan sesuai dengan kebijakan akuntansi yang mengatur Aset Tetap yang berlaku.
3. Penilaian kembali atau revaluasi properti investasi pada umumnya tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi Pemerintahan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran.
4. Revaluasi atas properti investasi dapat dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.
5. Dalam hal proses revaluasi dilakukan secara bertahap, hasil revaluasi atas properti investasi diperoleh diakui dalam laporan keuangan periode revaluasi dilaksanakan, jika dan hanya jika, properti investasi telah direvaluasi seluruhnya.
6. Properti investasi direvaluasi secara simultan untuk menghindari revaluasi aset secara selektif dan pelaporan jumlah dalam laporan keuangan yang merupakan campuran antara biaya dan nilai (*costs and values*) pada tanggal yang berbeda. Namun, properti investasi dapat dinilai kembali secara bertahap (*rolling basis*) asalkan penilaian kembali tersebut diselesaikan dalam waktu singkat dan nilai revaluasi tetap diperbarui.
7. Pada saat revaluasi, properti investasi dinilai sebesar nilai wajar berdasarkan hasil revaluasi. Selisih antara nilai

f.



- revaluasi dengan nilai tercatat properti investasi diakui pada akun ekuitas pada periode dilakukannya revaluasi. Setelah revaluasi, properti investasi dinilai sebesar nilai wajar dikurangi akumulasi penyusutan. Pemerintah daerah dapat menyesuaikan masa manfaat atas properti investasi yang direvaluasi berdasarkan kondisi fisik properti investasi tersebut.
8. Jika jumlah tercatat properti investasi meningkat/menurun akibat revaluasi, maka kenaikan tersebut diakui sebagai peningkatan/penurunan dalam ekuitas.
 9. Pedoman nilai wajar terbaik mengacu pada harga kini dalam pasar aktif untuk properti serupa dalam lokasi dan kondisi yang sama dan berdasarkan pada sewa dan kontrak lain yang serupa. Pemerintah daerah harus memperhatikan adanya perbedaan dalam sifat, lokasi, atau kondisi properti, atau ketentuan yang disepakati dalam sewa dan kontrak lain yang berhubungan dengan properti.
 10. Tidak tersedianya harga kini dalam pasar aktif yang sejenis seperti yang diuraikan pada paragraf 40, pemerintah daerah harus mempertimbangkan informasi dari berbagai sumber, termasuk:
 - a. harga kini dalam pasar aktif untuk properti yang memiliki sifat, kondisi dan lokasi berbeda (atau berdasarkan pada sewa atau kontrak lain yang berbeda), disesuaikan untuk mencerminkan perbedaan tersebut;
 - b. harga terakhir properti serupa dalam pasar yang kurang aktif, dengan penyesuaian untuk mencerminkan adanya perubahan dalam kondisi ekonomi sejak tanggal transaksi terjadi pada harga tersebut, dan
 - c. proyeksi arus kas diskontoan berdasarkan estimasi arus kas di masa depan yang dapat diandalkan, didukung dengan syarat/klausul yang terdapat dalam sewa dan kontrak lain yang ada dan (jika mungkin) dengan bukti eksternal seperti pasar kini rental untuk properti serupa dalam lokasi dan kondisi yang sama, dan penggunaan tarif diskonto yang mencerminkan penilaian pasar kini dari ketidakpastian dalam jumlah atau waktu arus kas.
 11. Dalam melakukan revaluasi pemerintah daerah dapat menggunakan penilaian secara internal ataupun penilai secara independen.

Penyajian Properti Investasi

1. Properti investasi disajikan sebagai aset non lancar pada neraca dalam mata uang rupiah.
2. Properti investasi disajikan terpisah dari kelompok aset tetap dan aset lainnya.
3. Karena sifat dari pengklasifikasian properti investasi

f.



adalah untuk memperoleh pendapatan sewa atau kenaikan nilai, pemerintah daerah dapat saja memiliki niat untuk menjual apabila kenaikan nilai atas properti investasi menguntungkan dan pemerintah daerah tidak akan memanfaatkan properti tersebut di masa mendatang. Pengklasifikasian properti investasi tidak mempertimbangkan maksud pemilihan aset properti investasi secara berkelanjutan atau tidak berkelanjutan.

Pengungkapan

1. Hal-hal yang diungkapkan sehubungan dengan properti investasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) antara lain:
 - a. dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
 - b. metode penyusutan yang digunakan;
 - c. masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
 - d. jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan (agregat dengan akumulasi rugi penurunan nilai) pada awal dan akhir periode;
 - e. rekonsiliasi jumlah tercatat properti investasi pada awal dan akhir periode, yang menunjukkan:
 - 1) penambahan, pengungkapan terpisah untuk penambahan yang dihasilkan dari penggabungan dan penambahan pengeluaran setelah perolehan yang diakui sebagai aset;
 - 2) penambahan yang dihasilkan melalui penggabungan;
 - 3) pelepasan;
 - 4) penyusutan;
 - 5) alih guna ke dan dari persediaan dan properti yang digunakan sendiri; dan
 - 6) perubahan lain.
 - f. apabila pemerintah daerah melakukan revaluasi atas properti investasi, nilai wajar dari properti investasi yang menunjukkan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) uraian properti investasi yang dilakukan revaluasi;
 - 2) dasar peraturan untuk menilai kembali properti investasi;
 - 3) tanggal efektif penilaian kembali;
 - 4) nilai tercatat sebelum revaluasi
 - 5) jumlah penyesuaian atas nilai wajar;
 - 6) nilai tercatat properti investasi setelah revaluasi.
 - g. apabila penilaian dilakukan secara bertahap, mengungkapkan hasil revaluasi properti investasi;
 - h. apabila pengklasifikasian atas properti investasi sulit dilakukan, kriteria yang digunakan untuk membedakan properti investasi dengan properti yang digunakan



- sendiri dan dengan properti yang dimiliki untuk dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari.;
- i. metode dan asumsi signifikan yang diterapkan dalam menentukan nilai wajar apabila pemerintah daerah melakukan revaluasi dari properti investasi, yang mencakup pernyataan apakah penentuan nilai wajar tersebut didukung oleh bukti pasar atau lebih banyak berdasarkan faktor lain (yang harus diungkapkan oleh entitas tersebut) karena sifat properti tersebut dan keterbatasan data pasar yang dapat diperbandingkan;
 - j. apabila pemerintah daerah melakukan revaluasi dengan menggunakan penilai independen, sejauh mana kualifikasi profesional yang relevan serta pengalaman mutakhir di lokasi dari penilai;
 - k. jumlah yang diakui dalam surplus/defisit untuk:
 - 1) penghasilan sewa menyewa biasa dari properti investasi;
 - 2) beban operasi langsung (mencakup perbaikan dan pemeliharaan) yang timbul dari properti investasi yang menghasilkan penghasilan rental selama periode tersebut;
 - 3) beban operasi langsung (mencakup perbaikan dan pemeliharaan) yang timbul dari properti investasi yang tidak menghasilkan pendapatan sewa menyewa biasa selama periode tersebut.
 - l. kewajiban kontraktual untuk membeli, membangun atau mengembangkan properti investasi atau untuk perbaikan, pemeliharaan atau peningkatan;
 - m. properti investasi yang disewa oleh entitas pemerintah lain; dan
 - n. informasi lain terkait dengan properti investasi.

Alih Guna

1. Alih guna ke atau dari properti investasi dilakukan jika, dan hanya jika, terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan:
 - a. dimulainya penggunaan properti investasi oleh pemerintah daerah, dialih gunakan dari properti investasi menjadi aset tetap;
 - b. dimulainya pengembangan property investasi untuk dijual, dialihgunakan dari properti investasi menjadi persediaan;
 - c. berakhirnya pemakaian aset oleh entitas akuntansi dan/atau entitas pelaporan, dialih gunakan dari aset tetap menjadi properti investasi;
 - d. dimulainya sewa operasi ke pihak lain, ditransfer dari persediaan menjadi properti investasi.
2. Pemerintah daerah mengalih gunakan property dari



- property investasi menjadi persediaan dengan perlakuan sebagai berikut:
- a. pemerintah daerah mulai mengembangkan properti investasi dan akan tetap menggunakannya di masa depan sebagai properti investasi, maka properti investasi tersebut tidak dialihgunakan dan tetap diakui sebagai properti;
 - b. terdapat perubahan penggunaan, yang ditunjukkan dengan dimulainya pengembangan dengan tujuan untuk dijual maka pemerintah daerah mereklasifikasi aset properti investasi menjadi persediaan; dan
 - c. terdapat keputusan untuk melepas properti investasi tanpa dikembangkan, maka pemerintah daerah tetap memperlakukan properti sebagai properti investasi hingga dihentikan pengakuannya dan dihapuskan dari laporan posisi keuangan serta tidak memperlakukannya sebagai persediaan.
3. Pemerintah daerah secara teratur mengevaluasi pemanfaatan gedung- gedung untuk menentukan apakah memenuhi syarat sebagai properti investasi. Jika pemerintah memutuskan untuk menahan bangunan tersebut untuk kemampuannya dalam menghasilkan pendapatan sewa dan potensi kenaikan nilai maka bangunan tersebut diklasifikasikan sebagai properti investasi pada permulaan berlakunya sewa.
 4. Alih guna antara properti investasi, properti yang digunakan sendiri, dan persediaan tidak mengubah jumlah tercatat properti yang dialihgunakan serta tidak mengubah biaya properti untuk tujuan pengukuran dan pengungkapan.
 5. Alih guna aset properti investasi menggunakan nilai tercatat pada saat dilakukannya alih guna.

Pelepasan

1. Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat:
 - a. pelepasan; atau
 - b. ketika properti investasi tersebut tidak digunakan lagi secara permanen; atau
 - c. tidak memiliki manfaat ekonomi di masa depan yang dapat diharapkan pada saat pelepasan.
2. Pelepasan properti investasi dapat dilakukan dengan cara dijual, ditukar, dihapuskan atau dihentikan pengakuannya.
3. Pemerintah daerah mengakui biaya penggantian untuk bagian tertentu dari suatu properti investasi di dalam jumlah tercatat suatu aset tersebut dan jumlah tercatat dari bagian aset yang diganti tidak diakui lagi.
4. Pemerintah daerah dapat menggunakan biaya penggantian sebagai indikasi untuk menentukan berapa jumlah biaya bagian yang diganti pada saat diperoleh atau dibangun

f.



- apabila jumlah tercatat dari bagian yang diganti tersebut tidak dapat ditentukan secara praktis.
5. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian atau pelepasan properti investasi ditentukan dari selisih antara hasil neto dari pelepasan dan jumlah tercatat aset, dan diakui dalam Surplus/Defisit Non Operasional-LO dalam periode terjadinya penghentian atau pelepasan tersebut.
 6. Imbalan yang diterima atas pelepasan properti investasi pada awalnya diakui sebesar nilai wajar. Jika pembayaran atas properti investasi ditangguhkan, imbalan yang diterima pada awalnya diakui sebesar setara harga tunai. Selisih antara jumlah nominal dari imbalan dan nilai yang setara dengan harga tunai diakui sebagai pendapatan bunga.
 7. Pemerintah daerah mencatat kewajiban yang masih ada sehubungan dengan properti investasi setelah pelepasan tersebut.
 8. Kompensasi dari pihak ketiga yang diberikan sehubungan dengan penurunan nilai, kehilangan atau pengembalian properti investasi diakui sebagai surplus/defisit ketika kompensasi tersebut diakui sebagai piutang.

Ketentuan Transisi

1. Pemerintah daerah menerapkan kebijakan ini dengan mengklasifikasikan asetnya ke dalam properti investasi pada saat pertama kali dengan menggunakan nilai tercatat aset sebagai nilai perolehannya.
2. Pemerintah daerah menerapkan kebijakan akuntansi ini secara prospektif.

PENGHAPUS BUKUAN

Penghapusbukuan investasi jangka panjang adalah kebijakan intern pemerintah kota samarinda, merupakan proses dan keputusan akuntansi yang berlaku agar nilai investasi jangka panjang dapat dipertahankan sesuai dengan *net realizable value*-nya.

Usulan penghapusbukuan investasi jangka panjang dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) teknis kepada Inspektorat Kota Samarinda untuk dilakukan analisis dan usulan penghapusbukuan atas investasi jangka panjang tersebut. Inspektorat Kota Samarinda akan menerbitkan rekomendasi mengenai usulan penghapusbukuan investasi jangka panjang tersebut dan akan melaporkan kepada Wali Kota Samarinda untuk diterbitkan keputusan Kepala Daerah.

Ketentuan mengenai penghapusan tagihan investasi jangka panjang diatur terpisah dengan Peraturan Wali Kota.

Untuk investasi non permanen yang sedang dalam proses penghapusbukuan akan dipindahkan ke Kelompok Aset Lainnya dengan rincian Aset Lain-lain.

f



ASET TETAP

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum serta dapat diukur secara andal dalam satuan uang. Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasi biayanya.

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah Kota Samarinda dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk di jual

Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah

TANAH

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah Kota Samarinda dan dalam kondisi siap di pakai. Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehannya. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya administrasi dan umum lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan. Biaya yang timbul atas sengketa tanah seperti biaya pengadilan dan pengacara, tidak dikapitalisasi menjadi biaya perolehan tanah.

Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap adalah nilai per unitnya.

No	Uraian	Jumlah Harga Lusin/Set/Satuan (Rp)
1.3.1	Tanah	1,00

PERALATAN DAN MESIN

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya administrasi dan umum lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.



Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap adalah nilai per unitnya

No	Uraian	Jumlah Harga
		Lusin/Set/Satuan (Rp)
1.3.2	Peralatan dan Mesin, terdiri atas:	
1.3.2.01	Alat Besar	1.000.000,00
1.3.2.02	Alat Angkutan	1.000.000,00
1.3.2.03	Alat bengkel dan Alat Ukur	1.000.000,00
1.3.2.04	Alat Pertanian	300.000,00
1.3.2.05	Alat Kantor dan Rumah Tangga	300.000,00
1.3.2.06	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	300.000,00
1.3.2.07	Alat kedokteran dan Kesehatan	1.000.000,00
1.3.2.08	Alat Laboratorium	1.000.000,00
1.3.2.09	Alat Persenjataan	1.000.000,00
1.3.2.10	Komputer	1.000.000,00
1.3.2.11	Alat Eksplorasi	1.000.000,00
1.3.2.12	Alat Pengeboran	1.000.000,00
1.3.2.13	Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian	1.000.000,00
1.3.2.14	Alat bantu Eksplorasi	1.000.000,00
1.3.2.15	Alat Bantu Keselamatan Kerja	300.000,00
1.3.2.16	Alat Peraga	300.000,00
1.3.2.17	Peralatan Proses/Produksi	1.000.000,00
1.3.2.18	Rambu-Rambu	1.000.000,00
1.3.2.19	Peralatan Olah Raga	300.000,00

GEDUNG DAN BANGUNAN

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk di pakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah Kota Samarinda dan dalam kondisi siap di pakai. Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, pajak dan biaya administrasi dan umum lainnya.

Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap adalah nilai per unitnya

No	Uraian	Jumlah Harga
		Lusin/Set/Satuan (Rp)
1.3.3	Gedung dan Bangunan, terdiri atas:	
1.3.2.01	Bangunan Gedung	20.000.000,00
1.3.2.02	Monumen	20.000.000,00
1.3.2.03	Bangunan Menara	20.000.000,00



No	Uraian	Jumlah Harga
		Lusin/Set/Satuan (Rp)
1.3.2.04	Tugu Titik Kontrol/Pasti	20.000.000,00

JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN

Biaya perolehan jalan, jaringan, dan instalasi menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, jaringan, dan instalasi sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya administrasi dan umum lain yang dikeluarkan sampai jalan, jaringan, dan instalasi tersebut siap pakai.

Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap adalah nilai perunitnya

No	Uraian	Jumlah Harga
		Lusin/Set/Satuan (Rp)
1.3.4	Jalan, Irigasi dan Jaringan, terdiri atas:	
1.3.2.01	Jalan dan Jembatan	20.000.000,00
1.3.2.02	Bangunan Air	20.000.000,00
1.3.2.03	Instalasi	10.000.000,00
1.3.2.04	Jaringan	10.000.000,00

ASET TETAP LAINNYA

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap digunakan. Aset ini meliputi koleksi perpustakaan/buku dan barang bercorak seni, budaya dan olahraga. Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.

Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap adalah nilai per unitnya

No	Uraian	Jumlah Harga
		Lusin/Set/Satuan (Rp)
1.3.5	Aset Tetap Lainnya, terdiri atas:	
1.3.2.01	Bahan Perpustakaan	150.000,00
1.3.2.02	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	300.000,00
1.3.2.03	Hewan	1.000.000,00
1.3.2.04	Biodata Perairan	1.000.000,00
1.3.2.05	Tanaman	Persediaan
1.3.2.06	Barang Koleksi Non Budaya	1.000.000,00
1.3.2.07	Aset Tetap Dalam Renovasi	1.000.000,00



KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup pengadaan aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, tetapi belum selesai dibangun seluruhnya pada tanggal neraca.

Konstruksi dalam pengerjaan dicatat sebesar seluruh biaya yang diakumulasikan sampai dengan tanggal neraca dari semua jenis aset tetap dalam pengerjaan yang belum selesai dibangun.

Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap adalah nilai per unitnya

No	Uraian	Jumlah Harga Lusin/Set/Satuan (Rp)
1.3.6	Konstruksi dalam Pengerjaan	1,00

ASET LAINNYA

Aset lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.

TAGIHAN PIUTANG PENJUALAN ANGSURAN

Tagihan piutang penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah daerah.

Tagihan piutang penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas umum daerah atau berdasarkan daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI (TP/TGR)

Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap Bendahara/ pegawai negeri Non Bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh daerah sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

Tuntutan Perbendaharaan dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keputusan Pembebanan setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh bendahara yang bersangkutan ke kas umum daerah. Tuntutan Ganti Rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM) setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas umum daerah.

f.

KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA

Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset/atau hak usaha yang dimiliki. Dokumen sumber yang dapat digunakan untuk membukukan kemitraan dengan pihak ketiga dapat berbentuk kontrak kerjasama dengan pihak ketiga yang bersangkutan. Termasuk dalam kemitraan adalah:

1. Bangun, Guna, Serah (BGS) adalah suatu bentuk Kerjasama berupa pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu, untuk kemudian menyerahkannya kembali bangunan dan atau saran lain berikut fasilitasnya kepada pemerintah daerah setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi).
2. Bangun, Serah, Guna (BSG) adalah pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada pemerintah daerah untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut.
3. Kerjasama Pemanfaatan (KSP) adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah.
Kemitraan dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah kepada pihak ketiga/investor.

ASET TIDAK BERWUJUD

Aset tidak berwujud adalah aset tetap yang secara fisik tidak dapat dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset tidak berwujud dapat diperoleh melalui pembelian atau dapat dikembangkan sendiri oleh pemerintah daerah. Aset tidak berwujud antara lain meliputi:

- 1) *Software*
- 2) Lisensi
- 3) Hak cipta (*copyright*) dan hak paten
- 4) Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang
- 5) Aset tak berwujud dalam pengembangan

ASET LAIN-LAIN

Akun ini digunakan untuk mencatat Aset Lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Tak Berwujud, Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi dan Kemitraan dengan Pihak Ketiga.

f



Akun ini digunakan untuk mencatat aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah, namun belum dilakukan penghapusan yang ditunjukkan dengan Surat Keputusan Penghapusan.

Aset Tak Berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas untuk memperoleh suatu Aset Tak Berwujud hingga siap untuk digunakan dan Aset Tak Berwujud tersebut mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk ke dalam entitas tersebut. Aset Tak Berwujud disajikan di neraca berdasarkan nilai bruto setelah dikurangi amortisasi. Perhitungan amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus dengan masa manfaat selama 10 (sepuluh) tahun. Aset lain-lain disajikan dalam neraca sebesar nilai bukunya.

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Kewajiban Jangka Pendek adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumberdaya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur secara andal.

UTANG KEPADA PIHAK KETIGA

Akun Utang kepada Pihak Ketiga berasal dari kontrak atau perolehan barang/jasa yang belum dibayar sampai dengan saat neraca awal satuan kerja pengguna anggaran.

Akun ini dicatat berdasarkan hasil inventarisasi utang kepada pihak ketiga pada satuan pengguna anggaran.

Nilai utang yang akan diselesaikan adalah sebesar yang tercantum dalam Neraca Audited SKPD dan keterlambatan pembayaran utang tidak mengakibatkan timbulnya bunga dan / atau denda.

UTANG PERHITUNGAN PIHAK KETIGA (PFK)

Utang PFK, diakui pada saat dilakukan pemotongan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) atas pengeluaran dari Kas Daerah untuk pembayaran tertentu.

Utang PFK merupakan utang yang timbul akibat pemerintah belum menyetor kepada pihak lain atas pungutan/potongan PFK dari Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atau dokumen yang dipersamakan. Akun ini dicatat sebesar saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain sampai dengan tanggal neraca.

KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

Kewajiban jangka panjang merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

Nilai yang disajikan dalam neraca adalah sebesar jumlah yang belum dibayar pemerintah yang akan jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 (dua

f.



belas) bulan setelah tanggal neraca pada setiap akhir periode akuntansi, kecuali bagian lancar utang jangka panjang yang akan didanai kembali. Termasuk dalam Bagian Lancar Utang Jangka Panjang adalah utang jangka panjang yang persyaratan tertentu telah dilanggar sehingga kewajiban itu menjadi kewajiban jangka pendek.

EKUITAS

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara asset dan kewajiban pemerintah. Saldo ekuitas di neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan realisasi anggaran adalah laporan yang menyajikan perbandingan antara anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan dengan realisasinya dalam suatu periode akuntansi.

PENDAPATAN

Pendapatan menurut basis kas diakui pada saat diterima di Rekening Kas Umum Daerah. Pengembalian/koreksi atas penerimaan pendapatan (pengembalian pendapatan yang terjadi pada periode berjalan dicatat sebagai pengurangan pendapatan. Apabila pengembalian terjadi pada periode akuntansi berikutnya dicatat sebagai pengurangan ekuitas).

BELANJA

Belanja diakui berdasarkan jumlah kas yang dikeluarkan dari kas daerah. Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode berjalan dicatat sebagai pengurangan belanja.

Belanja pada pemerintah Kota Samarinda diakui pada saat terbitnya SP2D. Pengukuran belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah. Nilai nominal bruto yang dimaksud yaitu jumlah sebelum dikurangi dengan potongan-potongan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) seperti PPh, PPN, Iuran Taspen, Askes dan potongan sejenis lainnya.

PEMBIAYAAN

Pengakuan pembiayaan dalam periode berjalan pada saat kas diterima dari sumber pembiayaan yang berupa penerimaan daerah atau pada saat kas dikeluarkan untuk sumber pembiayaan yang berupa pengeluaran daerah. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.

Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat diterbitkannya SP2D

Pengukuran akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran)

Akuntansi pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto.

f.



LAPORAN ARUS KAS

Laporan arus kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan, dan transitoris.

Klasifikasi arus kas menurut aktifitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan, dan transitoris memberikan informasi yang memungkinkan para pengguna laporan untuk menilai pengaruh dari aktivitas tersebut terhadap posisi kas dan setara kas pemerintah daerah. Informasi tersebut juga dapat digunakan untuk mengevaluasi hubungan antar aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan, dan transitoris.

Satu transaksi tertentu dapat mempengaruhi arus kas dari beberapa aktivitas, misalnya transaksi pelunasan utang yang terdiri dari pelunasan pokok utang dan bunga utang. Pembayaran Pokok utang akan diklasifikasikan kedalam aktivitas pembiayaan sedangkan pembayaran bunga utang akan diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi.

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

Arus kas bersih aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.

Arus masuk kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari antara lain:

- (a) Pendapatan Asli Daerah
- (b) Dana Perimbangan
- (c) Lain-lain Pendapatan yang Sah

Arus keluar kas untuk aktivitas operasi terutama digunakan untuk pengeluaran, antara lain:

- (a) Belanja Pegawai
- (b) Belanja barang
- (c) Bunga
- (d) Subsidi
- (e) Hibah
- (f) Bantuan Sosial
- (g) Belanja Lain-lain/Tak Terduga
- (h) Transfer Keluar

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI ASET NON KEUANGAN

Arus kas dari aktivitas investasi aset non keuangan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang.

Arus masuk kas dari aktivitas investasi aset non keuangan terdiri dari:

- (a) Penjualan Aset Tetap

f.



(b) Penjualan Aset Lainnya

Arus keluar kas dari aktivitas investasi aset non keuangan terdiri dari:

- (a) Perolehan Aset Tetap
- (b) Perolehan Aset Lainnya

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN

Arus kas dari aktivitas pembiayaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan pendanaan defisit atau PSAP. Penggunaan surplus anggaran yang bertujuan untuk memprediksi klaim pihak lain terhadap arus kas pemerintah dan klaim pemerintah terhadap pihak lain di masa yang akan datang. Arus masuk kas dari aktivitas pembiayaan antara lain:

- (a) Penerimaan Pinjaman
- (b) Penerimaan Hasil Penjualan Surat Utang/Obligasi Pemerintah
- (c) Penerimaan hasil Divestasi
- (d) Penerimaan Penjualan Investasi Jangka Panjang Lainnya
- (e) Pencairan Dana cadangan

Arus keluar kas dari aktivitas pembiayaan antara lain

- (a) Pembayaran Pokok Utang
- (b) Pembayaran atas Pembelian Surat utang/Obligasi Pemerintah
- (c) Penyertaan Modal pemerintah
- (d) Pemberian Pinjaman Jangka Panjang
- (e) Pembentukan Dana Cadangan

ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS

Aktivitas transitoris adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

Arus kas dari aktivitas non anggaran mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan pemerintah. Arus kas dari aktivitas non anggaran antara lain Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan kiriman uang. PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Pencairan Dana atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga misalnya potongan Taspen dan Askes. Kiriman uang menggambarkan mutasi kas antar rekening kas umum negara/daerah.

Arus masuk kas dari aktivitas transitoris meliputi penerimaan PFK dan penerimaan transitoris seperti kiriman uang masuk dan penerimaan kembali uang persediaan dari bendahara pengeluaran.

LAPORAN OPERASIONAL

Laporan operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar secara komparatif. Laporan Operasional dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan yang memuat hal-hal yang berhubungan dengan aktivitas keuangan selama satu tahun seperti kebijakan

f.



fiskal dan moneter, serta daftardaftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan. Dalam Laporan Operasional harus diidentifikasi secara jelas dan jika dianggap perlu ditambahkan pos, judul dan sub jumlah lainnya apabila diwajibkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah atau apabila penyajian tersebut diperlukan untuk menyajikan Laporan Operasional secara wajar.

PENDAPATAN

- a. Pendapatan-LO diakui pada saat hak telah diterima oleh Pemerintah Kota Samarinda.
- b. Pendapatan-LO diakui pada saat penyusunan laporan keuangan
- c. Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas

Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas dilakukan apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah (misalnya SKP-D/SKRD yang diterbitkan dengan metode *official assesment* atau Perpres/Permenkeu/Pergub) dimana hingga akhir tahun belum dilakukan pembayaran oleh pihak ketiga atau belum diterima oleh pemerintah daerah. Hal ini merupakan tagihan (piutang) bagi pemerintah daerah dan utang bagi wajib bayar atau pihak yang menerbitkan keputusan/peraturan.

- d. Pendapatan-LO diakui setelah penerimaan kas

Apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan antara jumlah kas yang diterima dibandingkan barang/jasa yang belum seluruhnya diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain, atau kas telah diterima terlebih dahulu. Atas Pendapatan-LO yang telah diakui saat kas diterima dilakukan penyesuaian dengan pasangan akun pendapatan diterima dimuka.

BEBAN

Beban diakui pada:

- a. Saat timbulnya kewajiban;

Saat timbulnya kewajiban artinya beban diakui pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang sudah ada tagihannya belum dibayar pemerintah dapat diakui sebagai beban.

- b. Saat terjadinya konsumsi aset;

Saat terjadinya konsumsi aset artinya beban diakui pada saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah.

- c. Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa artinya beban diakui pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan

f.



aset bersangkutan/berlaluanya waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.

- d. Dalam hal badan layanan umum, beban diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

Beban diukur sesuai dengan:

- Harga perolehan atas barang /jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi asset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan mata uang rupiah.
- Menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL

Surplus dari kegiatan operasional adalah selisih lebih antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan.

Defisit dari kegiatan operasional adalah selisih kurang antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan.

Selisih lebih/kurang antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional.

SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

Pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional.

Termasuk dalam pendapatan/beban dari kegiatan non operasional antara lain surplus/defisit penjualan aset non lancar, surplus/defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang, dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional lainnya.

Selisih lebih/kurang antara surplus/defisit dari kegiatan operasional dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional merupakan surplus/defisit sebelum pos luar biasa.

POS LUAR BIASA

Pos luar biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam Laporan Operasional dan disajikan sesudah Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa. Pos Luar Biasa memuat kejadian luar biasa yang mempunyai karakteristik sebagai berikut:

- kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran;
- tidak diharapkan terjadi berulang-ulang; dan
- kejadian diluar kendali entitas pemerintah.

Sifat dan jumlah rupiah kejadian luar biasa harus diungkapkan pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

SURPLUS/DEFISIT-LO

Surplus/Defisit-LO adalah penjumlahan selisih lebih/kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.

f.



Saldo Surplus/Defisit-LO pada akhir periode pelaporan dipindahkan ke Laporan Perubahan Ekuitas.

TRANSAKSI PENDAPATAN-LO DAN BEBAN BERBENTUK BARANG/JASA

Transaksi pendapatan-LO dan beban dalam bentuk barang/jasa harus dilaporkan dalam Laporan Operasional dengan cara menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi. Disamping itu, transaksi semacam ini juga harus diungkapkan sedemikian rupa pada Catatan atas Laporan Keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari pendapatan dan beban.

Transaksi pendapatan dan beban dalam bentuk barang/jasa antara lain hibah dalam wujud barang, barang rampasan, dan jasa konsultansi.

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Saldo Surplus/Defisit-LO adalah penjumlahan selisih lebih/kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa, yang merupakan pindahkan dari Laporan Operasional.

Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas adalah berbagai koreksi yang disebabkan karena kesalahan mendasar atau perubahan kebijakan akuntansi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas dalam tahun berjalan, misalnya: koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya dan perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.

TRANSAKSI DALAM MATA UANG ASING

Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah. Dalam hal tersedia dan dalam mata uang asing yang sama dengan yang digunakan dalam transaksi, maka transaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat dengan menjabarkannya ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.

Dalam hal tidak tersedia dan dalam mata uang asing yang digunakan dalam transaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan rupiah, maka transaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat dalam rupiah berdasarkan kurs transaksi, yaitu sebesar rupiah yang digunakan untuk memperoleh valuta asing tersebut.

Dalam hal tidak tersedia dan dalam mata uang asing yang digunakan untuk bertransaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan mata uang asing lainnya, maka:

- Transaksi mata uang asing ke mata uang asing lainnya dijabarkan dengan menggunakan kurs transaksi.
- Transaksi dalam mata uang asing lainnya tersebut dicatat dalam rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.

LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

Laporan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi mengenai perubahan gunggung saldo SiLPA atau SiKPA pada tahun pelaporan dibandingkan tahun sebelumnya.

f.

Laporan Perubahan Saldo Anggaran lebih menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:

- a. Saldo Anggaran Lebih Awal;
- b. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan;
- d. Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya;
- e. Lain-lain dan;
- f. Saldo anggaran lebih awal.

Disamping itu, menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

KOREKSI KESALAHAN

1. Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau beberapa periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan mungkin timbul dari adanya keterlambatan penyampaian bukti transaksi anggaran oleh pengguna anggaran, kesalahan perhitungan matematis, kesalahan dalam penerapan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, kecurangan atau kelalaian.
2. Dalam situasi tertentu, suatu kesalahan mempunyai pengaruh signifikan bagi satu atau lebih laporan keuangan periode sebelumnya sehingga laporan-laporan keuangan tersebut tidak dapat diandalkan lagi.
3. Kesalahan ditinjau dari sifat kejadiannya dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:
 - a. Kesalahan yang tidak berulang; dan
 - b. Kesalahan yang berulang dan sistemik;
4. Kesalahan yang tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali yang dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:
 - a. Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan; dan
 - b. Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya;
5. Kesalahan yang berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan oleh sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi berulang. Kesalahan berulang dan sistemik tidak memerlukan koreksi, melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan.
6. Terhadap setiap kesalahan dilakukan koreksi segera setelah diketahui.
7. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.
8. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.
9. Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah posisi kas, setelah akhir tahun pelaporan, dilakukan dengan pembetulan



- pada akun pendapatan lain-lain-LRA tahun berikutnya. Dalam hal mengakibatkan pengurangan kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Saldo Anggaran Lebih.
10. Koreksi kesalahan atas perolehan aset selain kas yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, setelah akhir tahun pelaporan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun aset bersangkutan.
 11. Koreksi kesalahan atas beban yang tidak berulang, sehingga mengakibatkan pengurangan beban, yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, setelah akhir tahun pelaporan, dilakukan dengan pembetulan pada akun Pendapatan Dari Pengembalian-LO tahun berikutnya. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.
 12. Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LRA yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, setelah akhir tahun pelaporan, tidak dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun pendapatan- LRA atau akun belanja, jika koreksi tersebut mengakibatkan pengeluaran kas maka diakui sebagai Belanja Tidak Terduga tahun berikutnya, namun untuk koreksi yang menambah posisi kas akan menambah Pendapatan Lain-Lain LRA tahun Berikutnya.
 13. Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LO yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, setelah akhir tahun pelaporan, tidak dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun pendapatan- LO atau akun belanja, jika koreksi tersebut mengakibatkan pengeluaran kas maka diakui sebagai beban luar biasa tahun berikutnya, namun untuk koreksi yang menambah posisi kas akan menambah Pendapatan Lain-Lain LO tahun Berikutnya.
 14. Koreksi kesalahan atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, setelah akhir tahun pelaporan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.
 15. Koreksi kesalahan yang tidak berulang atas pencatatan kewajiban yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, setelah akhir tahun pelaporan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun kewajiban bersangkutan
 16. Koreksi kesalahan sebagaimana dimaksud pada poin 14 dan 15 tersebut diatas tidak berpengaruh terhadap pagu anggaran atau belanja entitas yang bersangkutan dalam periode dilakukannya koreksi kesalahan.
 17. Koreksi kesalahan sebagaimana dimaksud pada poin 14 dan 15 tersebut di atas tidak berpengaruh terhadap beban entitas yang bersangkutan dalam periode dilakukannya koreksi kesalahan.
 18. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum maupun setelah laporan keuangan periode tersebut diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pos-pos neraca terkait pada periode ditemukannya kesalahan.
 19. Koreksi kesalahan yang berhubungan dengan periode-periode yang lalu terhadap posisi kas dilaporkan dalam Laporan Arus Kas tahun berjalan pada aktivitas yang bersangkutan.
 20. Koreksi kesalahan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

f.



21. Koreksi kesalahan atas audit eksternal dilakukan pada akun yang bersangkutan

PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

1. Para pengguna Laporan Keuangan perlu membandingkan laporan keuangan dari suatu entitas pelaporan dari waktu ke waktu untuk mengetahui tren posisi keuangan, kinerja, dan arus kas. Oleh karena itu, kebijakan akuntansi yang digunakan diterapkan secara konsisten pada setiap periode.
2. Perubahan di dalam perlakuan, pengakuan, atau pengukuran akuntansi sebagai akibat dari perubahan atas basis akuntansi, kriteria kapitalisasi, metode, dan estimasi, merupakan contoh perubahan kebijakan akuntansi.
3. Suatu perubahan kebijakan akuntansi dilakukan hanya apabila penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundangan atau kebijakan akuntansi pemerintahan yang berlaku, atau apabila diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas yang lebih relevan dan lebih andal dalam penyajian laporan keuangan entitas.
4. Perubahan kebijakan akuntansi tidak mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - a. adopsi suatu kebijakan akuntansi pada peristiwa atau kejadian yang secara substansi berbeda dari peristiwa atau kejadian sebelumnya;
 - b. adopsi suatu kebijakan akuntansi baru untuk kejadian atau transaksi yang sebelumnya tidak ada atau yang tidak material; dan
 - c. Timbulnya suatu kebijakan untuk merevaluasi aset merupakan suatu perubahan kebijakan akuntansi. Namun demikian, perubahan tersebut harus sesuai dengan standar akuntansi terkait yang telah menerapkan persyaratan-persyaratan sehubungan dengan revaluasi.
5. Perubahan kebijakan akuntansi harus disajikan pada Laporan Perubahan Ekuitas dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
6. Dalam rangka implementasi pertama kali kebijakan akuntansi yang baru dari semula basis Kas Menuju Akrua menjadi basis Akrua penuh, dilakukan:
 - a. Penyajian Kembali (*restatement*) atas pos-pos dalam Neraca yang perlu dilakukan penyajian kembali pada awal periode.
 - b. Agar Laporan Keuangan disajikan secara komparatif perlu dilakukan penyesuaian penyajian LRA tahun sebelumnya sesuai klasifikasi akun pada kebijakan akuntansi yang baru.

f.



BAB 5

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

**LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**



BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyajikan informasi terkait realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode pelaporan. LRA mengungkapkan ketaatan pemerintah daerah dalam penggunaan sumber daya keuangan terhadap APBD. Pos-pos yang tercakup dalam LRA meliputi Pendapatan-LRA, Belanja-LRA, Transfer, Surplus/Defisit-LRA, Penerimaan Pembiayaan, Pengeluaran Pembiayaan, Pembiayaan Neto, dan Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2024 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tanggal 28 Desember 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, dan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 76 Tahun 2023 Tanggal 29 Desember 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Pergeseran Pertama ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Nomor 20 Tahun 2024 Tanggal 7 Mei 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 76 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Pergeseran Kedua ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Nomor 21 Tahun 2024 Tanggal 28 Mei 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 76 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 Tanggal 4 Oktober Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Penjabaran Perubahan Anggaran ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 42 Tahun 2024 Tanggal 4 Oktober 2024 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Pergeseran setelah perubahan ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Nomor 49 Tahun 2024 Tanggal 25 November 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Samarinda tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Anggaran Pendapatan Daerah sebesar Rp5.140.941.701.000,00.
2. Anggaran Penerimaan PAD sebesar Rp875.018.892.674,00.
3. Anggaran Pendapatan Transfer sebesar Rp4.205.922.808.326,00.
4. Anggaran Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp60.000.000.000,00.
5. Anggaran Belanja Daerah sebesar Rp5.726.586.379.700,00.
6. Anggaran Belanja Operasi Rp2.968.120.496.296,00.
7. Anggaran Belanja Modal sebesar Rp2.756.965.883.404,00.
8. Anggaran Belanja Tidak Terduga sebesar Rp1.500.000.000,00.
9. Anggaran Penerimaan Pembiayaan Rp585.644.678.700,00.
10. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan Rp0,00.
11. Anggaran Pembiayaan Netto sebesar Rp585.644.678.700,00.

f.



Untuk mendapat gambaran secara keseluruhan tentang rencana dan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Samarinda TA 2024 dapat diuraikan sebagai berikut:

5.1.1 PENDAPATAN

31-12-2024

31-12-2023

Rp5.177.088.647.963,90

Rp4.026.969.291.270,93

Pendapatan LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), Bendahara Penerimaan, BLUD dan Penerimaan Non RKUD yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Pendapatan merupakan sumber pendanaan bagi pemerintah, demikian pula bagi Pemerintah Kota Samarinda, pendapatan dapat berasal dari potensi daerah yang bersangkutan maupun dari provinsi dan pusat. Pendapatan dapat dibagi menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Anggaran dan realisasi pendapatan serta realisasi TA 2024 disajikan dalam Tabel 5.1.1. berikut.

Tabel 5.1. 1 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Kota Samarinda TA 2024

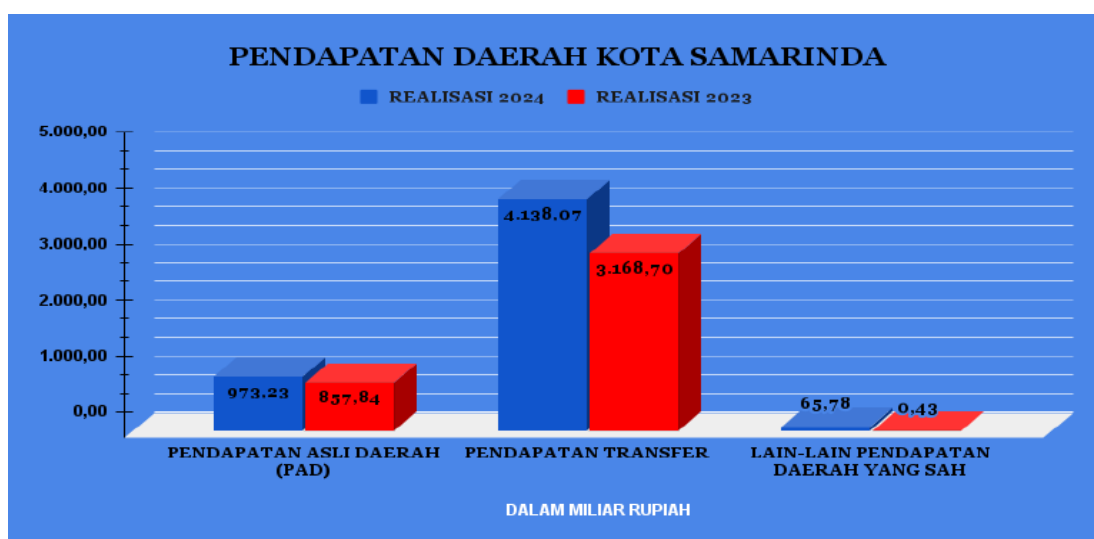
(dalam satuan rupiah)

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	LEBIH/KURANG	REALISASI 2023
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	875.018.892.674,00	973.231.612.768,21	111,22	98.212.720.094,21	857.839.919.067,93
2	Pendapatan Transfer	4.205.922.808.326,00	4.138.073.600.326,00	98,39	(67.849.208.000,00)	3.168.703.081.359,00
3	Lain – lain Pendapatan yang Sah	60.000.000.000,00	65.783.434.869,69	109,64	5.783.434.869,69	426.290.844,00
JUMLAH		5.140.941.701.000,00	5.177.088.647.963,90	100,70	36.146.946.963,90	4.026.969.291.270,93

Gambaran dari tabel diatas menunjukkan bahwa Anggaran Pendapatan Daerah TA 2024 sebesar Rp5.140.941.701.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp5.177.088.647.963,90 atau sebesar 100,70%. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp4.026.969.291.270,93 telah mengalami kenaikan sebesar Rp1.150.119.356.692,97 atau sebesar 28,56%.

f.

Gambar 5.1. 1 Diagram Pendapatan Daerah tahun 2024



Gambar diatas adalah grafik diagram batang yang menunjukkan perbandingan antara realisasi Pendapatan Daerah tahun 2024 dan realisasi tahun 2023 dalam milyar. Grafik tersebut menunjukkan proporsi dari Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer. Realisasi masing masing kelompok pendapatan daerah dapat diuraikan sebagai berikut:

5.1.1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH

31-12-2024

31-12-2023

Rp973.231.612.768,21

Rp857.839.919.067,93

Realisasi Pendapatan Asli Daerah periode TA 2024 dan 2023 dengan rincian disajikan dalam tabel 5.1.2 berikut.

Tabel 5.1. 2 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda TA 2024

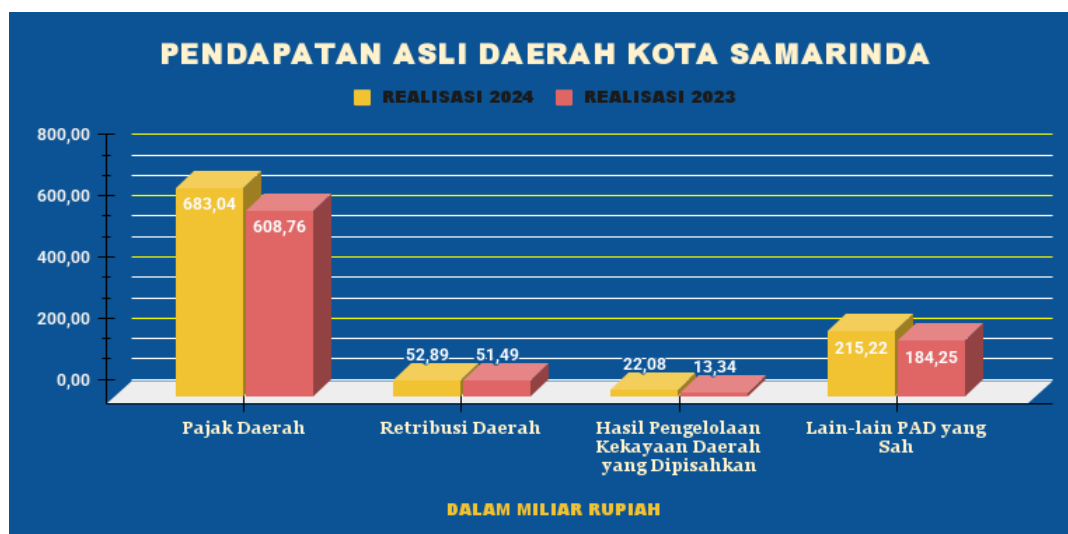
(dalam satuan rupiah)

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	2024	LEBIH/KURANG	REALISASI 2023
1	Pajak Daerah	612.300.000.000,00	683.041.335.375,94	111,55	70.741.335.375,94	608.761.181.359,98
2	Retribusi Daerah	161.004.202.000,00	52.892.908.387,00	32,85	(108.111.293.613,00)	51.489.693.765,00
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	22.672.018.000,00	22.082.018.474,03	97,40	(589.999.525,97)	13.337.956.568,25
4	Lain-lain PAD yang Sah	79.042.672.674,00	215.215.350.531,24	272,28	136.172.677.857,24	184.251.087.374,70
JUMLAH		875.018.892.674,00	973.231.612.768,21	111,22	98.212.720.094,21	857.839.919.067,93

Tahun 2024 Pemerintah Kota Samarinda mengalokasikan Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp875.018.892.674,00 dan terealisasi sebesar Rp973.231.612.768,21 atau 111,22% dan jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar Rp857.839.919.067,93 mengalami kenaikan sebesar 13,45% atau sebesar Rp115.391.693.700,28.

Dibawah ini adalah grafik diagram perbandingan realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun 2024 dan tahun 2023.

Gambar 5.1. 2 Diagram Perbandingan realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun 2024 dan tahun 2023



Realisasi masing masing jenis PAD TA 2024 dan 2023 dapat dirinci dan dijelaskan sebagai berikut:

5.1.1.1.1 PENDAPATAN PAJAK DAERAH

31-12-2024

31-12-2023

Rp683.041.335.375,94

Rp608.761.181.359,98

Pendapatan Pajak Daerah merupakan pendapatan yang bersumber dari kontribusi wajib pajak kepada daerah, yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah guna kemakmuran rakyat.

Pemerintah Kota Samarinda memungut Pajak Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Sistem dan Prosedur Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda selaku instansi pemungut dan pengelola pajak daerah selalu melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi serta menetapkan tarif berdasarkan dengan Peraturan Daerah Kota Samarinda.

Tahun 2024 Pemerintah Kota Samarinda telah mencapai target pendapatan pajak daerah sebesar Rp683.041.335.375,94 atau 111,55% dari anggaran sebesar Rp612.300.000.000,00. Realisasi tersebut terdiri dari pembayaran murni sebesar Rp645.519.331.794,88 yang merupakan pembayaran atas jumlah pajak yang terutang sesuai dengan SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah) yang terbit di tahun 2024, kelebihan pembayaran pajak sebesar Rp2.035.141.337,01 dan mutasi yang merupakan pembayaran piutang tahun sebelumnya sebesar Rp35.486.862.244,05. Bila dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp608.761.181.359,98 pendapatan pajak daerah mengalami kenaikan sebesar Rp74.280.154.015,96 atau 12,20%.

Anggaran dan realisasi tahun 2024 dan 2023 disajikan dalam tabel 5.1.3 berikut:



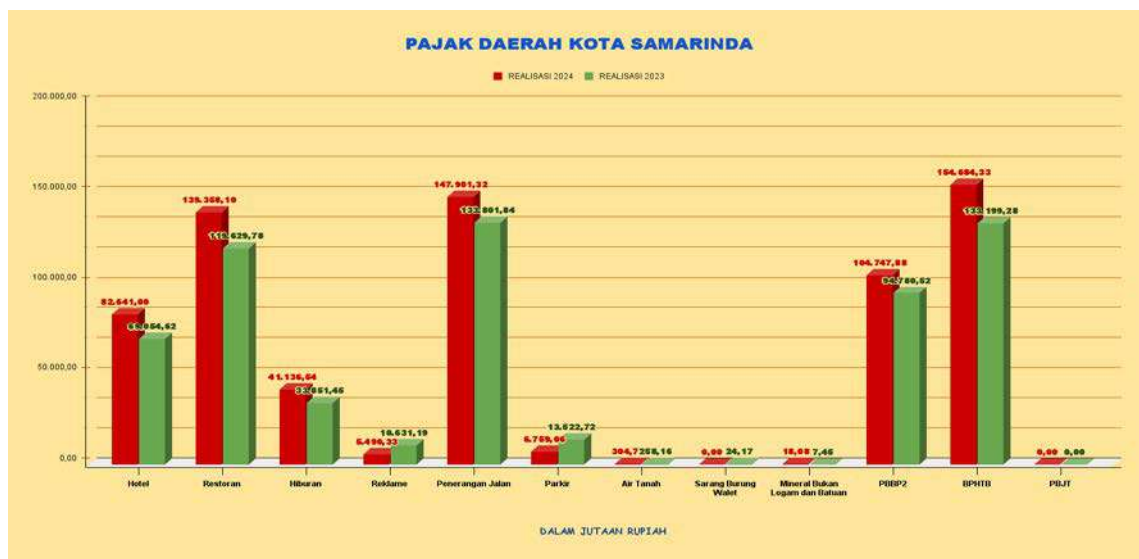
Tabel 5.1. 3 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Kota Samarinda TA 2024

(dalam satuan rupiah)

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024				%	LEBIH/KURANG	REALISASI 2023
			MURNI	LEBIH BAYAR	MUTASI	JUMLAH			
1	Pajak Hotel	65.000.000.000,00	80.758.808.710,72	0,01	1.882.188.318,00	82.640.997.028,73	127,14	17.640.997.028,73	69.054.616.118,43
2	Pajak Restoran	120.000.000.000,00	135.998.053.797,33	442.714.335,00	2.917.327.397,71	139.358.095.530,04	116,13	19.358.095.530,04	119.629.781.799,17
3	Pajak Hiburan	34.000.000.000,00	39.017.998.608,03	0,00	2.118.538.506,12	41.136.537.114,15	120,99	7.136.537.114,15	33.851.445.961,98
4	Pajak Reklame	10.000.000.000,00	4.556.469.171,00	14.289.814,00	919.568.472,00	5.490.327.457,00	54,90	(4.509.672.543,00)	10.631.194.621,00
5	Pajak Penerangan Jalan	143.000.000.000,00	147.898.411.928,00	0,00	2.905.280,00	147.901.317.208,00	103,43	4.901.317.208,00	133.801.836.162,00
6	Pajak Parkir	6.000.000.000,00	6.111.995.351,00	0,00	647.063.915,00	6.759.059.266,00	112,65	759.059.266,00	13.522.723.135,00
7	Pajak Air Tanah	280.000.000,00	304.705.980,00	0,00	0,00	304.705.980,00	108,82	24.705.980,00	258.159.775,00
8	Pajak Sarang Burung Walet	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(10.000.000,00)	24.174.900,00
9	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	10.000.000,00	18.081.617,00	0,00	0,00	18.081.617,00	180,82	8.081.617,00	7.452.050,00
10	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	99.000.000.000,00	77.759.064.412,80	0,00	26.988.820.354,22	104.747.884.767,02	105,81	5.747.884.767,02	94.780.520.812,00
11	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	135.000.000.000,00	153.095.742.219,00	1.578.137.188,00	10.450.001,00	154.684.329.408,00	114,58	19.684.329.408,00	133.199.276.025,40
12	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH		612.300.000.000,00	645.519.331.794,88	2.035.141.337,01	35.486.862.244,05	683.041.335.375,94	111,55	70.741.335.375,94	608.761.181.359,98

Pajak Daerah dapat dilihat dengan diagram perbandingan untuk realisasi tahun 2024 dan tahun 2023:

Gambar 5.1. 3 Diagram Pendapatan Pajak Daerah tahun 2024



Langkah-langkah yang telah dilakukan atas tercapainya target beberapa pajak daerah antara lain:

- Melakukan pendaftaran dan pendataan Pajak Daerah;
- Melakukan analisa dan pengembangan Pajak Daerah serta penyusunan kebijakan;
- Melakukan kegiatan penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan Pajak Daerah;

f.



- d) Melakukan kegiatan penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan serta BPHTB;
- e) Melakukan kegiatan penagihan Pajak Daerah;
- f) Melakukan kegiatan Monitoring dan Evaluasi serta verifikasi pelaporan dan pembayaran wajib pajak;
- g) Kegiatan penagihan Pajak Daerah;
- h) Melakukan pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan Pajak Daerah.

Di tahun 2024 ada beberapa pajak yang tidak tercapai targetnya yaitu Pajak Parkir dan Pajak Sarang Burung Walet dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, adapun penyebabnya adalah sebagai berikut:

1) Pajak Parkir

Penerimaan Pajak Parkir tahun 2024 lebih kecil dari tahun 2023, hal ini terjadi karena adanya perubahan regulasi terhadap tarif untuk Pajak Parkir dari 30% menjadi 10% sesuai Perda Kota Samarinda Nomor 01 tahun 2024 selain itu hilangnya kantong-kantong parkir seperti parkir cuma-cuma yang tidak dipungut lagi karena tidak sesuai dengan regulasi.

2) Pajak Sarang Burung Walet

Pajak Sarang Burung Walet tidak ada realisasi, hal ini dikarenakan adanya kendala yang ditemukan dalam pemungutan Pajak Sarang Burung Walet, petugas tidak dapat menemukan subjek pajaknya meskipun objeknya ada dan terkendala dengan perijinan.

3) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan tidak maksimal penerimaannya karena kesulitan dalam mendata dan memungut pada mulut tambang dan kurangnya kesadaran wajib pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (pemilik tambang) dalam membayar Pajak.

5.1.1.1.2 PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH

31-12-2024

31-12-2023

Rp52.892.908.387,00

Rp51.489.693.765,00

Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Pemungutan dan Pengelolaan Pendapatan Retribusi Daerah dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Perdagangan, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, BPKAD, Dinas Perikanan, Dinas Tenaga kerja, Sekretariat Daerah Kota Samarinda sebagai SKPD pemungut retribusi. Pendapatan Retribusi dapat dirinci pada tabel 5.1.4 berikut.

f.



**Tabel 5.1. 4 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah per SKPD Kota Samarinda
TA 2024**

(dalam satuan rupiah)

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024			% 2024	LEBIH/KURANG	REALISASI 2023
			MURNI	PEMBAYARAN PIUTANG	JUMLAH			
1	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda	7.600.000.000,00	669.009.827,00	210.000.000,00	879.009.827,00	11,57	(6.720.990.173,00)	1.022.418.136,00
2	Dinas Kesehatan Kota Samarinda	105.470.000.000,00	366.721.500,00	0,00	366.721.500,00	0,35	(105.103.278.500,00)	517.604.800,00
3	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda	449.960.000,00	606.785.880,00	0,00	606.785.880,00	134,85	156.825.880,00	323.819.340,00
4	Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda	30.000.000.000,00	31.676.822.000,00	0,00	31.676.822.000,00	105,59	1.676.822.000,00	28.988.323.050,00
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda	173.000.000,00	190.403.000,00	0,00	190.403.000,00	110,06	17.403.000,00	1.312.775.110,00
6	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Samarinda	0,00	0,00	3.470.000,00	3.470.000,00	0,00	3.470.000,00	395.380.000,00
7	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda	233.350.000,00	958.290.309,00	256.000.000,00	1.214.290.309,00	520,37	980.940.309,00	1.833.672.885,00
8	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda	4.000.000.000,00	5.333.797.623,00	0,00	5.333.797.623,00	133,34	1.333.797.623,00	2.666.241.503,00
9	Dinas Perdagangan Kota Samarinda	5.634.315.000,00	5.759.399.563,00	366.262.204,00	6.125.661.767,00	108,72	491.346.767,00	8.436.398.621,00
10	Dinas Perhubungan Kota Samarinda	6.547.041.000,00	5.102.883.366,00	0,00	5.102.883.366,00	77,94	(1.444.157.634,00)	5.173.897.720,00
11	Dinas Perikanan Kota Samarinda	706.536.000,00	830.196.515,00	0,00	830.196.515,00	117,50	123.660.515,00	514.827.000,00
12	Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda	100.000.000,00	478.866.600,00	0,00	478.866.600,00	478,87	378.866.600,00	182.085.600,00
13	Sekretariat Daerah Kota Samarinda	90.000.000,00	84.000.000,00	0,00	84.000.000,00	93,33	(6.000.000,00)	122.250.000,00
JUMLAH		161.004.202.000,00	52.057.176.183,00	835.732.204,00	52.892.908.387,00	32,85	(108.111.293.613,00)	51.489.693.765,00

Retribusi berdasarkan jenis dapat di jelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.1. 5 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Kota Samarinda TA 2024

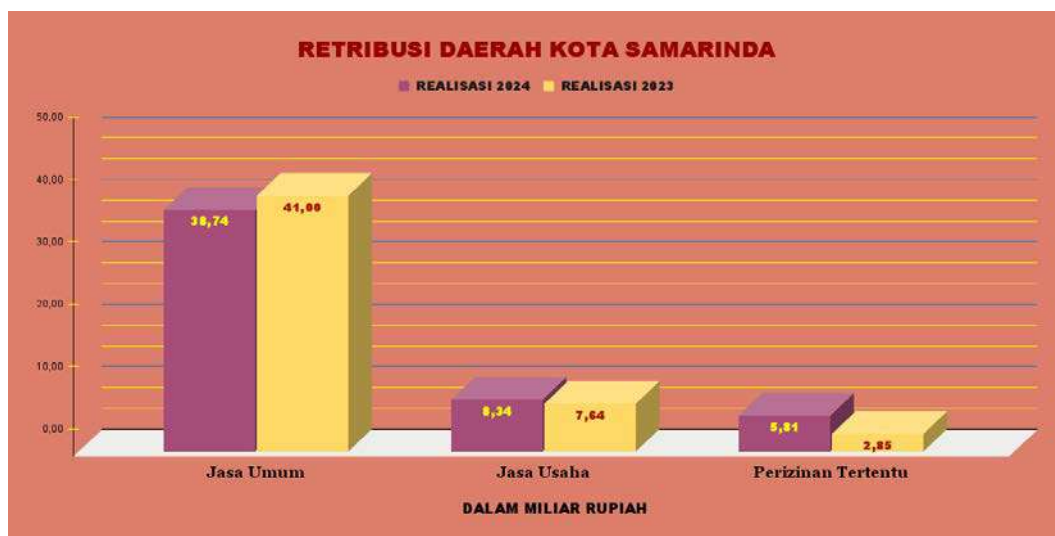
(dalam satuan rupiah)

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024			% 2024	LEBIH/KURANG	REALISASI 2023
			MURNI	PEMBAYARAN PIUTANG	JUMLAH			
1	Retribusi Jasa Umum	143.797.615.000,00	38.738.922.862,00	3.470.000,00	38.742.392.862,00	26,94	(105.055.222.138,00)	40.995.918.833,00
2	Retribusi Jasa Usaha	13.106.587.000,00	7.505.239.098,00	832.262.204,00	8.337.501.302,00	63,61	(4.769.085.698,00)	7.641.097.829,00
3	Retribusi Perizinan Tertentu	4.100.000.000,00	5.813.014.223,00	0,00	5.813.014.223,00	141,78	1.713.014.223,00	2.852.677.103,00
JUMLAH		161.004.202.000,00	52.057.176.183,00	835.732.204,00	52.892.908.387,00	32,85	(108.111.293.613,00)	51.489.693.765,00

Tabel diatas menunjukkan Anggaran Pendapatan Retribusi Daerah TA 2024 sebesar Rp161.004.202.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp52.892.908.387,00 atau 32,85%. Realisasi tersebut terdiri dari penerimaan murni sebesar Rp52.057.176.183,00 yang merupakan pembayaran atas jumlah pajak yang terutang sesuai dengan SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah) dan pembayaran piutang tahun sebelumnya sebesar Rp835.732.204,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar Rp51.489.693.765,00 mengalami kenaikan sebesar Rp1.403.214.622,00 atau sebesar 2,73%.

Dibawah ini adalah grafik diagram area yang menggambarkan Retribusi Daerah Kota Samarinda secara proporsi antara Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perijinan Tertentu antara angka realisasi tahun 2024 dengan angka realisasi tahun 2023.

Gambar 5.1. 4 Diagram Perbandingan Retribusi Daerah tahun 2024 dan 2023



Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah TA 2024 dan 2023 dapat diuraikan sebagai berikut:

5.1.1.1.2.1 RETRIBUSI JASA UMUM

31-12-2024

31-12-2023

Rp38.742.392.862,00

Rp40.995.918.833,00

Retribusi Jasa Umum adalah retribusi yang dipungut atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum. Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Subjek Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum.

Retribusi umum yang dipungut oleh Pemerintah kota Samarinda berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 59 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah.

SKPD Pemungut berdasarkan Jenis Retribusi Jasa Umum adalah sebagai berikut:

1. Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut oleh Dinas Kesehatan dan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda;
2. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda;
3. Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum dipungut oleh Dinas Perhubungan Kota Samarinda;
4. Retribusi Pelayanan Pasar dipungut oleh Dinas Perdagangan Kota Samarinda;
5. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut oleh Dinas Perhubungan Kota Samarinda;
6. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dipungut oleh Dinas Pemadam Kebakaran Kota Samarinda;
7. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dipungut oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda;
8. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kaskus dipungut oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda;



9. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dipungut oleh Dinas Perdagangan Kota Samarinda;
10. Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Komunikasi dipungut oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda.

Retribusi Jasa Umum Pemerintah Kota Samarinda per SKPD TA 2024 dapat dirinci pada tabel 5.1.6 berikut:

Tabel 5.1. 6 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Jasa Umum Kota Samarinda per SKPD TA 2024

(dalam satuan rupiah)

(dalam satuan Rupiah)

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024			% 2024	LEBIH/KURANG	REALISASI 2023
			MURNI	PEMBAYARAN PIUTANG	JUMLAH			
1	Dinas Kesehatan Kota Samarinda	105.470.000.000,00	366.721.500,00	0,00	366.721.500,00	0,35	(105.103.278.500,00)	517.604.800,00
2	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda	0,00	104.805.000,00	0,00	104.805.000,00	0,00	104.805.000,00	98.136.000,00
3	Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda	30.000.000.000,00	31.676.822.000,00	0,00	31.676.822.000,00	105,59	1.676.822.000,00	28.988.323.050,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda	148.000.000,00	161.975.000,00	0,00	161.975.000,00	109,44	13.975.000,00	1.285.391.110,00
5	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Samarinda	0,00	0,00	3.470.000,00	3.470.000,00	0,00	3.470.000,00	395.380.000,00
6	Dinas Perdagangan Kota Samarinda	4.179.615.000,00	4.046.685.065,00	0,00	4.046.685.065,00	96,82	(132.929.935,00)	6.175.569.201,00
7	Dinas Perhubungan Kota Samarinda	4.000.000.000,00	2.381.914.297,00	0,00	2.381.914.297,00	59,55	(1.618.085.703,00)	3.535.514.672,00
JUMLAH		143.797.615.000,00	38.738.922.862,00	3.470.000,00	38.742.392.862,00	26,94	(105.055.222.138,00)	40.995.918.833,00

Retribusi Jasa Umum Kota Samarinda berdasarkan objek dapat di jelaskan sebagai berikut:

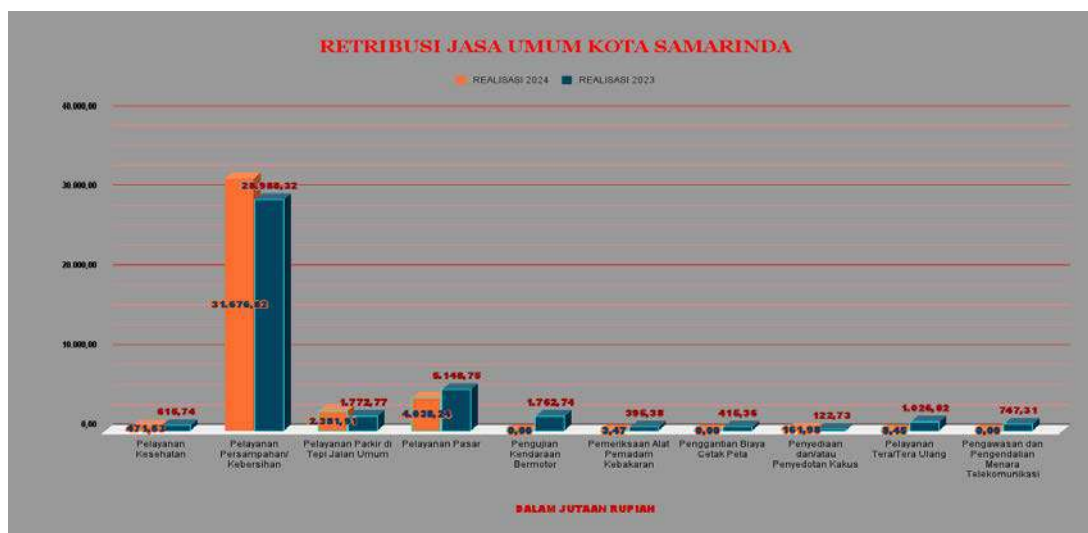
Tabel 5.1. 7 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Jasa Umum Kota Samarinda TA 2024

(dalam satuan rupiah)

(dalam satuan Rupiah)								
NO	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024			%	LEBIH/KURANG	REALISASI 2023
			MURNI	PEMBAYARAN PIUTANG	JUMLAH			
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	105.470.000.000,00	471.526.500,00	0,00	471.526.500,00	0,45	(104.998.473.500,00)	615.740.800,00
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	30.000.000.000,00	31.676.822.000,00	0,00	31.676.822.000,00	105,59	1.676.822.000,00	28.988.323.050,00
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	4.000.000.000,00	2.381.914.297,00	0,00	2.381.914.297,00	59,55	(1.618.085.703,00)	1.772.774.672,00
4	Retribusi Pelayanan Pasar	4.179.615.000,00	4.038.239.465,00	0,00	4.038.239.465,00	96,62	(141.375.535,00)	5.148.753.201,00
5	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.762.740.000,00
6	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	0,00	0,00	3.470.000,00	3.470.000,00	0,00	3.470.000,00	395.380.000,00
7	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415.360.110,00
8	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	148.000.000,00	161.975.000,00	0,00	161.975.000,00	109,44	13.975.000,00	122.725.000,00
9	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	0,00	8.445.600,00	0,00	8.445.600,00	0,00	8.445.600,00	1.026.816.000,00
10	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747.306.000,00
JUMLAH		143.797.615.000,00	38.738.922.862,00	3.470.000,00	38.742.392.862,00	26,94	(105.055.222.138,00)	40.995.918.833,00

Data pada tabel diatas menunjukkan anggaran pendapatan Retribusi Jasa Umum tahun 2024 sebesar Rp 143.797.615.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp38.742.392.862,00. Realisasi ini terdiri dari pendapatan dari retribusi murni tahun 2024 sebesar Rp38.738.922.862,00 dan pendapatan retribusi atas piutang tahun sebelumnya sebesar Rp3.470.000,00. Jika dibandingkan dengan pendapatan Retribusi Jasa Umum tahun 2023 sebesar Rp40.995.918.833,00 mengalami penurunan sebesar Rp 2.253.525.971,00 atau sebesar 5,50%.

Gambar 5.1. 5 Diagram Perbandingan Retribusi Jasa Umum tahun 2024 dan 2023



Tercapainya target Pendapatan Retribusi Jasa Umum Kota Samarinda di tahun 2024 disebabkan oleh karena beberapa sebab antara lain:

1. Retribusi Pelayanan Kesehatan:

Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan yang dipungut oleh Dinas Kesehatan dan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda tahun 2024 realisasi sebesar Rp471.526.500,00 dari anggaran sebesar Rp105.470.000.000,00 atau 0,45% terdiri dari Dinas Kesehatan tahun 2024 dengan realisasi sebesar Rp366.721.500,00 dan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian tahun 2024 realisasi sebesar Rp104.805.000,00.

Terdapat koreksi tambah senilai Rp3.745.000,00 antara lain:

1. Retribusi Pelayanan Kesehatan 2025 yang disetorkan di 2025 atas Pelayanan Puskesmas Sambutan Desember 2024 sebesar Rp3.720.000,00;
2. Selisih antara rekapitulasi penerimaan retribusi Pelayanan kesehatan Rekam Medis pada Puskesmas Sambutan Rp10.000,00;
3. Kurang pembayaran pasien yang menggunakan QRIS tanggal 28 September 2024 pada Puskesmas Loa bakung sebesar Rp15.000,00.

Terdapat koreksi kurang Senilai Rp39.122.700,00 sebagai berikut:

1. Reklas atas penerimaan Biaya Magang di Puskesmas Remaja, dari Pendapatan Retribusi ke Lain2 PAD yang Sah senilai Rp3.250.000,00;
2. Reklas atas penerimaan Non Kapitasi atas penerimaan PKM Non BLUD, dari Pendapatan Retribusi ke Lain2 PAD yang Sah senilai Rp35.872.700,00.

f.



Upaya yang telah dilakukan dalam Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah:

- ❖ Membuat target retribusi sesuai dengan analisa usaha, kondisi dan kendala yang dihadapi pelaku usaha.
- ❖ Menggiatkan sosialisasi para pelaku usaha.
- ❖ Melakukan pendekatan dan komunikasi dan pelayanan yang baik dengan pelaku usaha.
- ❖ Memperbaiki Sistem Pelayanan dengan menyiapkan ruang khusus pelayanan.
- ❖ Melakukan proses administrasi terkait retribusi dengan cepat dan tepat.
- ❖ Melakukan pelayanan yang ramah.
- ❖ Melakukan monitoring terhadap jalannya proses tagihan dan pembayaran non tunai yang dilakukan pengguna Jasa.
- ❖ Dinas Kesehatan Membuat usulan perubahan Perda terkait kenaikan Retribusi pada tahun anggaran 2025.

2. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Pendapatan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang dipungut oleh Dinas Lingkungan Hidup tahun 2024 dengan realisasi sebesar Rp31.676.822.000,00 dari anggaran sebesar Rp30.000.000.000,00 atau 105,59%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar Rp28.988.323.050,00 mengalami kenaikan sebesar Rp2.688.498.950,00 atau 9,27%.

Upaya yang telah dilakukan sehingga Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan mengalami peningkatan antara lain:

- a. Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda melakukan kerjasama dengan Perumdam Tirta Kencana dalam pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
- b. Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan Elektronisasi penagihan retribusi pelayan persampahan/kebersihan Non PDAM dengan alat digital menggunakan aplikasi QRIS yang bekerja sama dengan Bankaltimtar.
- c. Penerapan tarif sesuai PERDA No.1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dimana didalam PERDA No 1 tarif mengalami perubahan dan mengalami kenaikan untuk pelanggan Perusahaan Umum Daerah Air minum Tirta Kencana dan Non Pelanggan. Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan tersebut pada golongan P1 dengan rincian sebagai berikut:

Pelanggan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kencana Kota Samarinda dengan rincian sebagai berikut:

1. Golongan D1 Tarif Rp7.500,00.
2. Golongan D2 Tarif Rp10.000,00.
3. Golongan D3 Tarif Rp30.000,00.
4. Golongan P1 Tarif awal Rp30.000 tarif baru menjadi Rp50.000,00.
5. Golongan P2 Tarif Rp50.000,00.
6. Golongan P3 Tarif Rp150.000,00.
7. Golongan P4 Tarif Rp750.000,00.
8. Golongan SS Tarif Rp 20.000,00
9. Golongan KH Tarif Rp2.500.000,00.

f.



- d. Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda telah melakukan penarikan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan pada pihak ketiga seperti: Indomaret, swalayan, Kantor-kantor Bank di wilayah Samarinda dan tempat-tempat usaha seperti kafe, angkringan yang sedang menjamur saat ini di Kota Samarinda.

3. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Pendapatan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum yang dipungut oleh Dinas Perhubungan Kota Samarinda tahun 2024 dengan realisasi sebesar Rp2.381.914.297,00 dari anggaran sebesar Rp4.000.000.000,00 atau 59,55%.

Penyebab tidak tercapainya realisasi terhadap anggaran antara lain:

- a. Adanya kawasan yang biasa digunakan lahan parkir ditutup karena adanya pembangunan dan renovasi yang dilakukan Pemerintah Kota Samarinda.
- b. Adanya wilayah tepi jalan yang dijadikan Kawasan Tertib Lalu lintas (KTL).
- c. Pada kawasan Tertib Lalu Lintas (KTL) tidak ada pungutan retribusi parkir.
- d. Gangguan aplikasi sistem elektronik dan pembayaran non tunai.
- e. Pelaksanaan kerja sama dengan pihak ke-3 belum selesai di Bagian Kerjasama Sekretariat Kota Samarinda.
- f. Pelaksanaan pembayaran non tunai kartu uang elektronik dan QRIS dinamis juga belum terdukung karena kerjasama dengan perbankan juga belum selesai di Bagian Kerja sama Sekretariat Kota Samarinda.

Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar Rp1.772.774.672,00 mengalami kenaikan sebesar Rp609.139.625,00 atau 34,36% hal ini disebabkan oleh:

- a. Karena adanya penambahan lokasi parkir khusus bekerjasama dengan pihak-pihak OPD Kota Samarinda dan pihak swasta.
- b. Mulai adanya kesadaran dan kepercayaan masyarakat mau menggunakan Pembayaran dengan non tunai sehingga mengurangi kebocoran PAD Kota Samarinda.
- c. Mulai adanya pendekatan petugas pengawasan parkir tepi jalan kepada Juru Parkir agar para juru parkir mau membantu untuk meningkatkan PAD kota Samarinda.

4. Retribusi Pelayanan Pasar

Pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar yang dipungut oleh Dinas Perdagangan tahun 2024 realisasi sebesar Rp4.038.239.465,00 dari anggaran sebesar Rp4.179.615.000,00 atau 96,62%.

Penyebab tidak tercapainya Retribusi Pelayanan Pasar tahun 2024 antara lain:

- a. Adanya revitalisasi pasar;
- b. Masih adanya pedagang yang tidak mematuhi tata tertib dalam melakukan pembayaran retribusi;
- c. Masih adanya pedagang liar yang berjualan bedekatan dengan wilayah pasar;
- d. Kurangnya penerapan sanksi kepada pedagang pasar yang tidak mengindahkan peraturan yang ada;
- e. Faktor cuaca seperti hujan dan hari besar keagamaan sehingga banyak pedagang yang tidak berjualan.

f.



Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar Rp5.148.753.201,00 mengalami penurunan sebesar Rp1.110.513.736,00 atau 21,57% hal ini disebabkan adanya revitalisasi pasar sehingga berpengaruh terhadap pendapatan dan masih ada pedagang tidak tertib atas pembayaran retribusi.

5. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Pada tahun 2024 tidak terdapat anggaran dan realisasi atas Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang dipungut oleh Dinas Perhubungan. Hal ini dikarenakan implementasi dari Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Wali Kota Nomor 59 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar Rp1.762.740.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp1.762.740.000,00 atau 100%.

6. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

Pada tahun 2024 tidak terdapat anggaran dan realisasi atas Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran yang dipungut oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Hal ini dikarenakan implementasi dari Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Wali Kota Nomor 59 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah. Realisasi tersebut terdiri dari realisasi murni sebesar Rp0,00 dan pembayaran piutang sebesar Rp3.470.000,00.

Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran di tahun 2024 tidak lagi dipungut oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dan hanya melaksanakan pemungutan Piutang dari tahun 2014 sampai dengan 2024.

Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar Rp395.380.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp391.910.000,00 atau 99,12% hal ini disebabkan karena di tahun 2024 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan hanya menagih Piutang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.

7. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta

Pada tahun 2024 tidak terdapat anggaran dan realisasi atas Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta yang dipungut oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Hal ini dikarenakan implementasi dari Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Wali Kota Nomor 59 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah.

Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar Rp415.360.110,00 Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta mengalami penurunan sebesar Rp415.360.110,00 atau 100%.

8. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus

Pendapatan Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda tahun 2024 realisasi sebesar Rp161.975.000,00 dari anggaran sebesar Rp148.000.000,00 atau 109,44%.

Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus mencapai target karena:

- Masyarakat telah mengetahui adanya retribusi penyedotan kakus pada Dinas PUPR, dan memulai menggunakannya dengan menerapkan sistem pembayaran QRIS, maka pembayaran menjadi lebih mudah dan lancar.
- Banyak Perusahaan yang telah dan rutin menggunakan jasa penyedotan kakus pada Dinas PUPR.

f.



- c. Jasa Penyedotan Kaskus pada Dinas PUPR dapat dilakukan melalui kontak telpon yang dapat dihubungkan melalui *Website* dan *Email* sehingga pemakai jasa dengan mudah menghubungi.

Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar Rp122.725.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp39.250.000,00 atau 31,98%. Hal ini dikarenakan adanya penyampaian informasi yang baik, dan membuat masyarakat mengetahui akan adanya Retribusi Jasa Penyedotan Kakus pada Dinas PUPR.

9. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

Pada tahun 2024 tidak terdapat anggaran dan realisasi atas Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang yang dipungut oleh Dinas Perdagangan. Hal ini dikarenakan implementasi dari Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Wali Kota Nomor 59 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah. Jika dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar 1.026.816.000,00 Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang mengalami penurunan sebesar Rp1.018.370.400,00 atau 99,18%.

10. Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi

Pada tahun 2024 tidak terdapat anggaran dan realisasi atas Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi yang dipungut oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Hal ini dikarenakan implementasi dari Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Wali Kota Nomor 59 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah.

Jika dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp747.306.000,00 Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi mengalami penurunan sebesar Rp747.306.000,00 atau 100% hal ini disebabkan karena sudah tidak ada penganggaran Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta sesuai Perwali No 59 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah.

5.1.1.1.2.2 RETRIBUSI JASA USAHA

31-12-2024

31-12-2023

Rp8.337.501.302,00

Rp7.641.097.829,00

Pendapatan Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi yang dipungut atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi:

- A. Pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau
B. Pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

Subjek Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha. Pemerintah Kota Samarinda memungut Retribusi Jasa Usaha berdasarkan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2024

P.

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Peraturan Wali Kota Nomor 59 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah.

Adapun SKPD Pemungut berdasarkan Retribusi Jasa Usaha adalah sebagai berikut:

- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda, Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda, Sekretariat Daerah Kota Samarinda dan Dinas Perdagangan.
- Retribusi Tempat Pelelangan dipungut oleh Dinas Perikanan Kota Samarinda.
- Retribusi Terminal dipungut oleh Dinas Perhubungan.
- Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut oleh Dinas Perdagangan Kota Samarinda
- Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa dipungut oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda.
- Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda.
- Retribusi Pelayanan Kepelabuhan dipungut oleh Dinas Perhubungan Kota Samarinda.
- Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Samarinda.
- Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan dipungut oleh Dinas Perdagangan Kota Samarinda.
- Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak.

Gambar 5.1. 6 Diagram Perbandingan Retribusi Jasa Usaha tahun 2024 dan 2023



Retribusi Jasa Usaha Pemerintah Kota Samarinda per SKPD TA 2024 dirinci pada tabel 5.1.8 berikut:

f.



Tabel 5.1. 8 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Jasa Usaha Kota Samarinda per SKPD TA 2024

(dalam satuan rupiah)

REALISASI 2024								
NO	URAIAN	ANGGARAN	MURNI	PEMBAYARAN PIUTANG	JUMLAH	% 2024	LEBIH/KURANG	REALISASI 2023
1	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda	7.600.000.000,00	669.009.827,00	210.000.000,00	879.009.827,00	11,57	(6.720.990.173,00)	1.022.418.136,00
2	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda	449.960.000,00	501.980.880,00	0,00	501.980.880,00	111,56	52.020.880,00	225.683.340,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda	25.000.000,00	28.428.000,00	0,00	28.428.000,00	113,71	3.428.000,00	27.384.000,00
4	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda	233.350.000,00	958.290.309,00	256.000.000,00	1.214.290.309,00	520,37	980.940.309,00	1.833.672.885,00
5	Dinas Perdagangan Kota Samarinda	1.454.700.000,00	1.712.714.498,00	366.262.204,00	2.078.976.702,00	142,91	624.276.702,00	2.260.829.420,00
6	Dinas Perhubungan Kota Samarinda	2.547.041.000,00	2.720.619.069,00	0,00	2.720.619.069,00	106,81	173.578.069,00	1.634.033.048,00
7	Dinas Perikanan Kota Samarinda	706.536.000,00	830.196.515,00	0,00	830.196.515,00	117,50	123.660.515,00	514.827.000,00
8	Sekretariat Daerah Kota Samarinda	90.000.000,00	84.000.000,00	0,00	84.000.000,00	93,33	(6.000.000,00)	122.250.000,00
JUMLAH		13.106.587.000,00	7.505.239.098,00	832.262.204,00	8.337.501.302,00	63,61	(4.769.085.698,00)	7.641.097.829,00

Retribusi Jasa Usaha Kota Samarinda berdasarkan objek dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.1. 9 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Jasa Usaha Kota Samarinda tahun 2024

(dalam satuan rupiah)

REALISASI 2024								
NO	URAIAN	ANGGARAN 2024	MURNI	PEMBAYARAN PIUTANG	JUMLAH	% 2024	LEBIH/KURANG	REALISASI 2023
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	8.197.081.000,00	1.391.401.090,00	832.262.204,00	2.223.663.294,00	27,13	(5.973.417.706,00)	4.303.074.190,00
2	Retribusi Tempat Pelelangan	706.536.000,00	830.196.515,00	0,00	830.196.515,00	117,50	123.660.515,00	514.827.000,00
3	Retribusi Terminal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00
4	Retribusi Tempat Khusus Parkir	1.815.660.000,00	1.939.595.841,00	0,00	1.939.595.841,00	106,83	123.935.841,00	1.349.677.814,00
5	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	0,00	11.750.000,00	0,00	11.750.000,00	0,00	11.750.000,00	0,00
6	Retribusi Rumah Potong Hewan	395.000.000,00	501.980.880,00	0,00	501.980.880,00	127,08	106.980.880,00	225.683.340,00
7	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	1.200.000.000,00	1.277.817.000,00	0,00	1.277.817.000,00	106,48	77.817.000,00	974.544.700,00
8	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	87.350.000,00	235.290.309,00	0,00	235.290.309,00	269,36	147.940.309,00	271.190.785,00
9	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	650.000.000,00	1.317.207.463,00	0,00	1.317.207.463,00	202,65	667.207.463,00	0,00
10	Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak	54.960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(54.960.000,00)	0,00
JUMLAH		13.106.587.000,00	7.505.239.098,00	832.262.204,00	8.337.501.302,00	63,61	(4.769.085.698,00)	7.641.097.829,00

Memperhatikan data tabel diatas, menunjukkan bahwa anggaran penerimaan Retribusi Jasa Usaha sebesar Rp13.106.587.000,00 telah terealisasi sebesar Rp8.337.501.302,00 atau 63,61%.

Realisasi tersebut terdiri dari pendapatan retribusi murni tahun 2024 sebesar Rp7.505.239.098,00 dan pendapatan retribusi atas piutang tahun sebelumnya sebesar Rp832.262.204,00 yang merupakan pembayaran Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah tahun sebelumnya. Jika dibandingkan dengan realisasi di tahun 2023 sebesar Rp7.641.097.829,00 Retribusi Jasa Usaha tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp96.403.473,00 atau 9,11%.

Retribusi Jasa Usaha Pemerintah Kota Samarinda TA 2024 dirinci sebagai berikut:

f.



1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah direalisasikan oleh beberapa SKPD berikut:

a) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Tabel 5.1. 10 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Jasa Usaha Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda tahun 2024

(dalam satuan rupiah)

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024				%	LEBIH /KURANG	REALISASI 2023
			MURNI	PEMBAYARAN PIUTANG	JUMLAH				
1	Retribusi Penyewaan Tanah dan bangunan	0,00	373.459.120,00	0,00	373.459.120,00	0,00		373.459.120,00	1.022.418.136,00
	BPKAD	0,00	373.459.120,00	0,00	373.459.120,00	0,00		373.459.120,00	1.022.418.136,00
2	Retribusi Penyewaan Tanah	7.400.000.000,00	283.800.707,00	210.000.000,00	493.800.707,00	6,67		(6.906.199.293,00)	0,00
	BPKAD	7.400.000.000,00	283.800.707,00	210.000.000,00	493.800.707,00	6,67		(6.906.199.293,00)	0,00
3	Retribusi Penyewaan Bangunan	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		(200.000.000,00)	0,00
	BPKAD	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		(200.000.000,00)	0,00
4	Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesangrahan/Vila	0,00	11.750.000,00	0,00	11.750.000,00	0,00		11.750.000,00	0,00
	BPKAD	0,00	11.750.000,00	0,00	11.750.000,00	0,00		11.750.000,00	0,00
Jumlah		7.600.000.000,00	669.009.827,00	210.000.000,00	879.009.827,00	11,57		(6.720.990.173,00)	1.022.418.136,00

Realisasi Retribusi Jasa Usaha pada tahun 2024 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp879.009.827,00 atau 11,88%. Realisasi tersebut terdiri dari pendapatan murni sebesar Rp669.009.827,00 dan pembayaran piutang tahun sebelumnya sebesar Rp210.000.000,00. Jika dibandingkan dengan tahun 2023 terealisasi sebesar Rp1.022.418.136,00 telah mengalami penurunan sebesar Rp143.408.309,00 atau 14,03%.

Faktor Penghambat tercapainya target pendapatan pada BPKAD Kota Samarinda, antara lain sebagai berikut:

- ❖ Karena masih adanya calon penyewa yang keberatan dengan ukuran yang diberikan.
- ❖ Pembatasan makanan yang dijual karena adanya ketentuan kantin sehat.
- ❖ Penentuan zona yang dianggap tidak sesuai.
- ❖ Tarif sewa yang dianggap mahal.

b) Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata

Tabel 5.1. 11 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Jasa Usaha Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Daerah Kota Samarinda tahun 2024

(dalam satuan rupiah)

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024				%	LEBIH /KURANG	REALISASI 2023
			MURNI	PEMBAYARAN PIUTANG	JUMLAH				
1	Retribusi Penyewaan Tanah dan bangunan	0,00	0,00	256.000.000,00	256.000.000,00	0,00		256.000.000,00	1.331.000.000,00
	DISPORA	0,00	0,00	256.000.000,00	256.000.000,00	0,00		256.000.000,00	1.331.000.000,00
2	Retribusi Penyewaan Tanah	0,00	158.000.000,00	0,00	158.000.000,00	0,00		158.000.000,00	168.000.000,00



NO	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024				LEBIH /KURANG	REALISASI 2023
			MURNI	PEMBAYARAN PIUTANG	JUMLAH	%		
	DISPORA	0,00	158.000.000,00	0,00	158.000.000,00	0,00	158.000.000,00	168.000.000,00
3	Retribusi Penyewaan Bangunan	146.000.000,00	445.000.000,00	0,00	445.000.000,00	304,79	299.000.000,00	20.000.000,00
	DISPORA	146.000.000,00	445.000.000,00	0,00	445.000.000,00	304,79	299.000.000,00	20.000.000,00
4	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	0,00	120.000.000,00	0,00	120.000.000,00	0,00	120.000.000,00	36.000.000,00
	Dispota	0,00	120.000.000,00	0,00	120.000.000,00	0,00	120.000.000,00	36.000.000,00
5	Retribusi Tempat Khusus Parkir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.482.100,00
	Dispota	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.482.100,00
6	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	87.350.000,00	235.290.309,00	0,00	235.290.309,00	269,36	147.940.309,00	271.190.785,00
	Dispota	87.350.000,00	235.290.309,00	0,00	235.290.309,00	269,36	147.940.309,00	271.190.785,00
Jumlah		233.350.000,00	958.290.309,00	256.000.000,00	1.214.290.309,00	520,37	980.940.309,00	1.833.672.885,00

Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata dalam melakukan pungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di tahun 2024 telah terealisasi sebesar Rp1.214.290.309,00 dari anggaran sebesar Rp233.350.000,00 atau 520,37%. Realisasi tersebut terdiri dari pendapatan murni sebesar Rp958.290.309,00 dan pembayaran piutang tahun sebelumnya sebesar Rp256.000.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar Rp1.833.672.885,00 mengalami penurunan sebesar Rp619.382.576,00 atau 33,78%.

Penyebab tercapainya target retribusi antara lain:

- ❖ Penggunaan Gedung Gedung Sarana Olahraga/Kepemudaan/Folder Air Hitam untuk kegiatan Pemusatan Latihan Daerah KONI Kaltim.
- ❖ Penggunaan Sirkuit Kalan yang digunakan untuk kegiatan balap motor Klub dan kejuaraan di tahun 2024.
- ❖ Diadakannya kegiatan wisata Ramadhan dan beberapa acara di lapangan parkir GOR Segiri.
- ❖ Penerimaan yang berasal dari pembayaran piutang atas sewa lapangan sepak bola dan piutang ruko Stadion Segiri.

c) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Tabel 5.1. 12 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Jasa Usaha Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Kota Samarinda tahun 2024

(dalam satuan rupiah)

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024			%	LEBIH /KURANG	REALISASI 2023
			MURNI	PEMBAYARAN PIUTANG	JUMLAH			
1	Retribusi Pemakaian Alat	25.000.000,00	28.428.000,00	0,00	28.428.000,00	113,712	3.428.000,00	27.384.000,00
	Dinas PUPR	25.000.000,00	28.428.000,00	0,00	28.428.000,00	113,712	3.428.000,00	27.384.000,00
Jumlah		25.000.000,00	28.428.000,00	0,00	28.428.000,00	113,712	3.428.000,00	27.384.000,00

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang telah merealisasikan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebesar Rp28.428.000,00 dari anggaran sebesar Rp25.000.000,00 atau 113,712%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023

f.



sebesar Rp27.384.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp1.044.000,00 atau 3,81%.

Tercapainya target realisasi tahun 2024 untuk retribusi pemakaian alat-alat berat dikarenakan:

- ❖ Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan alat berat yang terbatas, petugas lapangan bisa dengan efisien memaksimalkan pengelolaan alat berat yang terbatas.
- ❖ Harga sewa yang murah dibandingkan dengan harga sewa dari kontraktor atau pihak ketiga sehingga masih ada masyarakat yang menggunakan jasa alat-alat berat yang ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda.
- ❖ Terpenuhinya Tenaga/Petugas sebagai Operator Alat Berat pada masing-masing Alat Berat.

d) Sekretariat Daerah Kota Samarinda

Tabel 5.1. 13 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Jasa Usaha Sekretariat Daerah

(dalam satuan rupiah)

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024			%	LEBIH /KURANG	REALISASI 2023
			MURNI	PEMBAYARAN PIUTANG	JUMLAH			
1	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor Sekretariat Daerah	90.000.000,00	84.000.000,00	0,00	84.000.000,00	93,33	(6.000.000,00)	122.250.000,00
		90.000.000,00	84.000.000,00	0,00	84.000.000,00	93,33	(6.000.000,00)	122.250.000,00
Jumlah		90.000.000,00	84.000.000,00	0,00	84.000.000,00	93,33	(6.000.000,00)	122.250.000,00

Sekretariat Daerah Kota Samarinda telah merealisasikan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di tahun 2024 sebesar Rp84.000.000,00 dari anggaran sebesar Rp90.000.000,00 atau 93,33%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar Rp122.250.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp38.250.000,00 atau 31,29%.

Tidak tercapainya realisasi dikarenakan bus yang beroperasi dengan baik hanya 1 (satu) unit, selain itu kondisi kendaraan yang ada sudah tua sehingga minat penyewa kurang dan frekuensi penggunaan bis menjadi terbatas.

e) Dinas Perdagangan

Tabel 5.1. 14 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Jasa Usaha Dinas Perdagangan

(dalam satuan rupiah)

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024			%	LEBIH /KURANG	REALISASI 2023
			MURNI	PEMBAYARAN PIUTANG	JUMLAH			
1	Retribusi Penyewaan Bangunan	274.540.000,00	205.604.239,00	0,00	205.604.239,00	74,89	(68.935.761,00)	0,00
	Dinas Perdagangan	274.540.000,00	205.604.239,00	0,00	205.604.239,00	74,89	(68.935.761,00)	0,00
2	Retribusi Pemakaian Ruangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.501.501.420,00
	Dinas Perdagangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.501.501.420,00
3	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	530.160.000,00	556.165.000,00	0,00	556.165.000,00	104,91	26.005.000,00	759.328.000,00
	Dinas Perdagangan	530.160.000,00	556.165.000,00	0,00	556.165.000,00	104,91	26.005.000,00	759.328.000,00



NO	URAIAN	ANGGARAN 2024	MURNI	REALISASI 2024		%	LEBIH /KURANG	REALISASI 2023
				PEMBAYARAN PIUTANG	JUMLAH			
4	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	650.000.000,00	950.945.259,00	366.262.204,00	1.317.207.463,00	202,65	667.207.463,00	0,00
	Dinas Perdagangan	650.000.000,00	950.945.259,00	366.262.204,00	1.317.207.463,00	202,65	667.207.463,00	0,00
Jumlah		1.454.700.000,00	1.712.714.498,00	366.262.204,00	2.078.976.702,00	142,91	624.276.702,00	2.260.829.420,00

Salah satu objek retribusi dari Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah tempat berjualan di lingkungan pasar rakyat yang dikelola oleh Dinas Perdagangan. Dinas Perdagangan memungut Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah atas pemakaian sewa petak/los/kios dari pedagang yang berjualan di pasar. Dinas Perdagangan memiliki 12 pasar yang dikelola dua Unit Pelayanan Teknis (UPT) yaitu UPT Pasar Segiri dan UPT Pasar Pagi. UPT Pasar Segiri mengelola Pasar Segiri, Pasar Ijabah, Pasar Merdeka, Pasar Kedondong, Pasar Bengkuring, dan Pasar Lok Bahu. UPT Pasar Pagi mengelola Pasar Pagi, Pasar Sungai Dama, Pasar Kemuning, Pasar Baqa, Pasar Citra Niaga, dan Pasar Palaran. Setiap pasar tersebut dipimpin oleh seorang Koordinator Pengelola Pasar.

Selama tahun 2024, realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Dinas Perdagangan adalah sebesar Rp205.604.239,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pasar Segiri : Rp115.450.900,00.
2. Pasar Merdeka : Rp87.273.339,00.
3. Pasar Palaran : Rp2.880.000,00.
- Total : Rp 205.604.239,00.

Selama tahun 2024, realisasi Retribusi Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya Dinas Perdagangan adalah sebesar Rp1.317.207.463,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pasar Segiri : Rp156.817.821,00,00
2. Pasar Merdeka : Rp79.627.000,00
3. Pasar Ijabah : Rp111.180.000,00
4. Pasar Kedondong : Rp160.951.000,00
5. Pasar Bengkuring : Rp13.956.000,00
6. Pasar Lok Bahu : Rp7.368.000,00
7. Pasar Pagi : Rp551.124.642,00
8. Citra Niaga : Rp69.256.000,00
9. Sungai Dama : Rp42.024.000,00
10. Baqa : Rp72.000.000,00
11. Pasar Palaran : Rp42.384.000,00
12. Kemuning : Rp10.519.000,00
- Total : Rp 1.317.207.463,00

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah baru dipungut oleh Dinas Perdagangan mulai tahun 2022. Hal tersebut karena baru diterbitkannya Peraturan Wali Kota nomor 27 Tahun 2022 tentang Penetapan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah untuk Pemakaian Tempat Berjualan di Lingkungan Pasar Rakyat.

f.



f) Dinas Perhubungan

Tabel 5.1. 15 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Jasa Usaha Dinas Perhubungan

(dalam satuan rupiah)

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024	MURNI	REALISASI 2024		%	LEBIH /KURANG	REALISASI 2023
				PEMBAYARAN PIUTANG	JUMLAH			
1	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	61.541.000,00	59.371.228,00	0,00	59.371.228,00	96,47	(2,169,772.00)	74.520.634,00
	Dinas Perhubungan	61.541.000,00	59.371.228,00	0,00	59.371.228,00	96,47	(2,169,772.00)	74.520.634,00
	Jumlah	61.541.000,00	59.371.228,00	0.00	59.371.228,00	96,47	(2,169,772.00)	74.520.634,00

Dinas Perhubungan Daerah Kota Samarinda telah merealisasikan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di tahun 2024 sebesar Rp59.371.228,00 dari anggaran sebesar Rp61.541.000,00 atau 96,47%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar Rp74.520.634,00 mengalami penurunan sebesar Rp15.149.406,00 atau 20,33%. Penurunan tersebut disebabkan terdapat beberapa lokasi penyewaan yang dibongkar dan sementara tidak dapat disewakan karena lokasinya sedang dilakukan revitaliasi, seperti di dermaga Mahakam Ilir.

2. Retribusi Tempat Pelelangan dipungut oleh Dinas Perikanan

Pendapatan Retribusi Retribusi Tempat Pelelangan tahun 2024 realisasi sebesar Rp830.196.515,00 dari anggaran sebesar Rp706.536.000,00 atau 117,50%. Usaha-usaha yang telah dilakukan Dinas Perikanan antara lain:

- ❖ Meningkatkan Pelayanan dan selalu membangun komunikasi yang baik kepada wajib retribusi yang beraktifitas di TPI sesuai dengan ketentuan dan memaksimalkan tempat pemasaran ikan sesuai dengan kewenangan.
- ❖ Mempromosikan kepada para nelayan, pembudidaya ikan, serta para *supplier* ikan untuk mendaratkan ikannya di TPI.
- ❖ Pelayanan yang baik seperti menjaga kebersihan, keamanan, keindahan, ketertiban serta kenyamanan dalam beraktifitas di TPI Selili.
- ❖ Memaksimalkan fasilitas TPI serta penggunaan sistem digital dalam penarikan retribusi.

Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar Rp514.827.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp315.369.515,00 atau 61,26% hal ini disebabkan oleh adanya perubahan Perda Pajak dan Retribusi dimana ada kenaikan tarif retribusi penyediaan tempat pelelangan dan diberlakukannya penerapan sistem digitalisasi pembayaran retribusi penyediaan tempat pelelangan.

3. Retribusi Terminal

Pada tahun 2024 tidak terdapat anggaran dan realisasi atas Retribusi Terminal yang dipungut oleh Dinas Perhubungan. Hal ini dikarenakan implementasi dari Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Wali Kota Nomor 59 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar Rp2.100.000,00,00 mengalami penurunan sebesar Rp2.100.000,00 atau 100,00%.

f.



4. Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut oleh:

a) Dinas Perdagangan

Pendapatan Retribusi Tempat Khusus Parkir tahun 2024 terealisasi sebesar Rp556.165.000,00 dari anggaran sebesar Rp530.160.000,00 atau 104,91%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar Rp759.328.000,00, Retribusi Tempat Khusus Parkir yang di pungut oleh Dinas Perdagangan mengalami penurunan sebesar Rp203.163.000,00 atau 26,76%. Penyebab menurunnya realisasi dibanding tahun 2023 karena adanya peralihan parkir khusus dalam pasar ke Dinas Perhubungan.

b) Dinas Perhubungan

Anggaran Pendapatan retribusi tempat khusus parkir tahun 2024 sebesar sebesar Rp1.285.500.000,00 telah terealisasi sebesar Rp1.383.430.841,00 atau 107,62%, jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar Rp 582.867.714,00 mengalami kenaikan sebesar Rp800.563.127,00 atau 137,35%. Hal-hal yang telah dilakukan antara lain:

- ❖ Penambahan lokasi parkir khusus bekerjasama dengan pihak-pihak OPD Kota Samarinda dan pihak swasta.
- ❖ Mulai adanya kesadaran dan kepercayaan masyarakat dengan mau menggunakan pembayaran dengan non tunai sehingga mengurangi kebocoran PAD Kota Samarinda.
- ❖ Pendekatan petugas pengawasan parkir tepi jalan kepada juru parkir agar para juru parkir mau membantu untuk meningkatkan PAD Kota Samarinda.
- ❖ Bantuan kerjasama dari pihak pengusaha dalam partisipasinya terkait pembayaran retribusi parkir di tempat usahanya.

c) Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata

Pendapatan retribusi tempat khusus parkir tahun 2024 sebesar Rp0,00 yang di pungut oleh Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata jika dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp7.482.100,00 mengalami penurunan sebesar Rp7.482.100,00 atau 100,00% hal ini dikarenakan adanya aktivitas revitalisasi gedung Gelanggang Olah Raga Segiri dan Penerimaan parkir dikelola langsung oleh Dinas Perhubungan.

5. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa dipungut oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Pendapatan Retribusi Penginapan/Pesanggrahan/Villa dalam hal ini Mess Pemerintah Kota yang berlokasi di Kota Jakarta tahun 2024 terealisasi sebesar Rp11.750.000,00 dari anggaran sebesar Rp0,00 atau 0,00%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp11.750.000,00 atau 100,00%.

Perbandingan dari tahun 2023 dan 2024 terjadi kenaikan dikarenakan dioperasikannya kembali Penginapan/Pesanggrahan Villa (Mess Pemkot) yang ada di Jakarta setelah dilakukan rehabilitasi bangunan.

6. Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda

Pendapatan Retribusi Rumah Potong Hewan tahun 2024 terealisasi sebesar Rp501.980.880,00 dari anggaran sebesar Rp395.000.000,00 atau 127,08% hal ini disebabkan:

f.



- ❖ Melakukan penagihan Retribusi dengan tepat waktu sesuai dengan tanggal pembayaran agar tidak jatuh tempo.
- ❖ Pemantauan rutin bagi yang belum membayar tagihan retribusi.
- ❖ Konsumen daging babi lebih memilih daging babi segar dibanding daging yang beku sehingga pemotongan di RPH babi cukup stabil.

Realisasi tahun 2024 dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar Rp225.683.340,00 Retribusi Rumah Potong Hewan mengalami kenaikan Rp.276.297.540,00 atau 122,43% hal ini disebabkan:

- ❖ Tarif Retribusi sesuai dengan Perda No. 1 Tahun 2024 mengalami kenaikan.
 - ❖ Dengan adanya penambahan tenaga keamanan (*Security*) untuk mengawasi keluar masuknya Hewan & Produk Hewan RPH.
 - ❖ Harga sapi potong hidup yang meningkat dengan harga daging yang masih normal sehingga membuat pemasok dan pembeli mengurangi jumlah pasokannya sambil melihat harga di daerah lain yang lebih murah.
 - ❖ Adanya Perbaikan Sarana dan Prasarana yang menunjang Operasional di RPH.
7. Retribusi Kepelabuhanan dipungut oleh Dinas Perhubungan

Pendapatan Retribusi Kepelabuhanan tahun 2024 terealisasi sebesar Rp1.277.817.000,00 dari anggaran sebesar Rp1.200.000.000,00 atau 106,48%.

Penyebab tercapainya realisasi terhadap target Pendapatan Retribusi Kepelabuhanan tahun 2024 dikarenakan:

- ❖ Meningkatnya Sumber Daya Manusia (SDM) juru parkir tepi jalan umum dan Tempat parkir Khusus.
- ❖ Kunjungan kapal wisata yang meningkat.
- ❖ Pelayanan dermaga yang teratur.
- ❖ Banyak masyarakat yang menggunakan transportasi sungai karena transportasi darat yang kurang memadai.

Realiasi tahun 2024 jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar Rp974.544.700,00 mengalami kenaikan sebesar Rp303.272.300,00 atau 31,12% hal ini dikarenakan adanya Perda Kota Samarinda No. 01 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk kenaikan tarif atas Pelayanan Jasa Kepelabuhanan.

Tabel 5.1. 16 Tabel Tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan tahun 2024

Ret. Pelayanan Kepelabuhanan	Tarif lama (Rp)	Tarif Baru (Rp)
*)Tambat kapal		
Perahu, tambangan, ketinting dan sejenisnya	2.000,00	5.000,00
Kapal penumpang, penyeberangan, nelayan	2.000,00	5.000,00
Kapal penumpang, barang antar kota & kab	5.000,00	100.000,00
Kapal khusus tarik tugboat LCT	20.000,00	100.000,00
Ponton dan sejenisnya	25.000,00	200.000,00
Kapal BBM		500.000,00
Kapal Tarik Tipe sungai		50.000,00
Speed boat jurusan Hulu Mahakam		35.000,00
Speed boat jarak pendek (per trip)		4.000,00
Kapal pinisi/tipe laut		25.000,00



Ret. Pelayanan Kepelabuhan	Tarif lama (Rp)	Tarif Baru (Rp)
Kapal wisata		35.000,00
*) Masuk dermaga		
Penumpang	1.000,00	2.000,00
Sepeda Motor	2.000,00	3.000,00
jeep/sedan	2.500,00	5.000,00
Truck/Bus	5.000,00	10.000,00

8. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut oleh Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Samarinda.

Realisasi Pendapatan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga tahun 2024 sebesar Rp235.290.309,00 dari anggaran sebesar Rp87.350.000,00 atau 269,36%. Tercapainya target dikarenakan:

- 1) Retribusi Stadion Segiri dan Lapangan Tennis:
 - ❖ Pembayaran piutang pemakaian 5 pertandingan sepak bola Rp150.000.000,00 dan pembayaran piutang ruko stadion segiri Rp106.000.000,00.
 - ❖ Penggunaan Lapangan Tennis untuk kegiatan Pelatda Koni Kaltim.
- 2) Retribusi Sirkuit Kalan:
 - ❖ Pengguna Sirkuit Kalan (Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor) untuk kegiatan balap motor klub dan kejuaraan yang terlaksana sepanjang tahun 2024.
- 3) Retribusi Lapangan Bulutangkis (*Indoor*) KNPI:

Lapangan Bulutangkis (*Indoor*) KNPI tercapai anggaran tahun 2024 karena antusiasme warga untuk memakai lapangan bulutangkis.

5.1.1.1.2.3 RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

31-12-2024

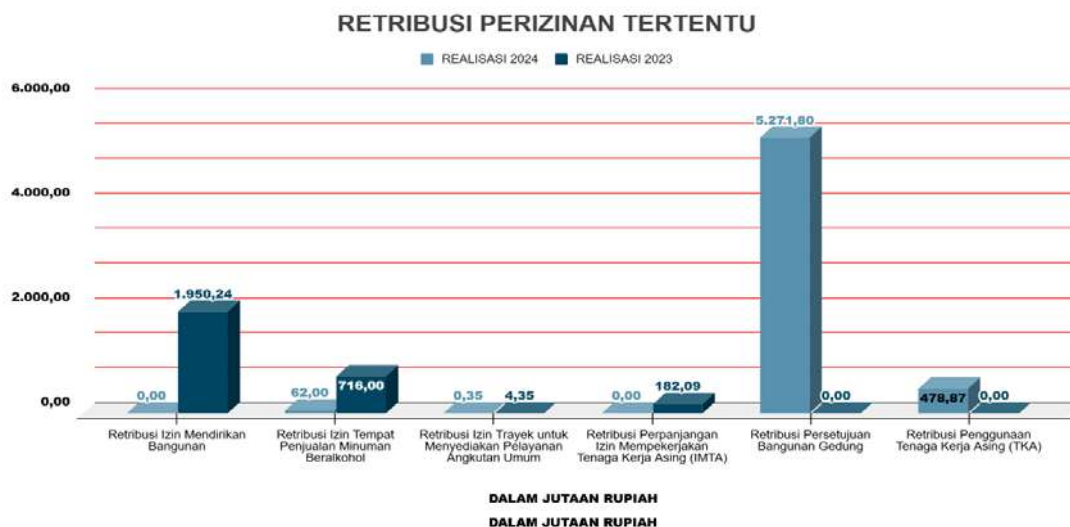
Rp5.813.014.233,00

31-12-2023

Rp2.852.677.103,00

f.

Gambar 5.1. 7 Diagram Perizinan Tertentu tahun 2024 dan 2023



Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi yang dipungut atas kegiatan Pemerintah Daerah dalam pemberian izin tertentu. Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Subjek Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin tertentu dari Pemerintah Daerah.

Pemerintah Kota Samarinda memungut Retribusi Perizinan Tertentu berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2019 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

Adapun SKPD Pemungut berdasarkan Retribusi Perizinan Tertentu adalah sebagai berikut:

1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut oleh Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Tertentu Satu Pintu.
2. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dipungut oleh Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Tertentu Satu Pintu.
3. Retribusi Izin Trayek dipungut oleh Dinas Perhubungan.
4. Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dipungut oleh Dinas Tenaga Kerja.
5. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung dipungut oleh Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Tertentu Satu Pintu.
6. Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) dipungut oleh Dinas Tenaga Kerja.

Retribusi Perizinan tertentu merupakan sumber PAD dapat dirinci per SKPD pada tabel berikut.



Tabel 5.1. 17 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu Kota Samarinda per SKPD TA 2024

(dalam satuan rupiah)

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024			% 2024	LEBIH/KURANG	REALISASI 2023
			MURNI	PEMBAYARAN PIUTANG	JUMLAH			
1	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda	4.000.000.000,00	5.333.797.623,00	0,00	5.333.797.623,00	133,34	1.333.797.623,00	2.666.241.503,00
2	Dinas Perhubungan Kota Samarinda	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	4.350.000,00
3	Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda	100.000.000,00	478.866.600,00	0,00	478.866.600,00	478,87	378.866.600,00	182.085.600,00
JUMLAH		4.100.000.000,00	5.813.014.223,00	0,00	5.813.014.223,00	141,78	1.713.014.223,00	2.852.677.103,00

Retribusi Perizinan Tertentu Kota Samarinda berdasarkan objek dapat di jelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.1. 18 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu Kota Samarinda TA 2024

(dalam satuan rupiah)

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	LEBIH /KURANG	REALISASI 2023
1	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950.241.503,00
2	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	0,00	62.000.000,00	0,00	62.000.000,00	716.000.000,00
3	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	4.350.000,00
4	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	0,00	0,00	0,00	0,00	182.085.600,00
5	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	4.000.000.000,00	5.271.797.623,00	131,79	1.271.797.623,00	0,00
6	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	100.000.000,00	478.866.600,00	478,87	378.866.600,00	0,00
JUMLAH		4.100.000.000,00	5.813.014.223,00	141,78	1.713.014.223,00	2.852.677.103,00

Data tabel diatas menunjukkan anggaran penerimaan Retribusi Perizinan Tertentu TA 2024 sebesar Rp4.100.000.000,00 dan telah terealisasi Rp5.813.014.223,00 atau 141,78%. Dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp2.852.677.103,00 mengalami kenaikan sebesar Rp2.960.337.120,00 atau 103,77%.

Beberapa penyebab kenaikan realisasi tahun 2024 jika dibanding tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Perubahan retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menjadi Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) terjadi sebagai dampak dari Undang-Undang Cipta Kerja (UU 11/2020) pasal 114 angka 1 huruf A menyatakan bahwa retribusi perizinan tertentu yang sebelumnya terkait dengan IMB kini diubah menjadi retribusi PBG. Berdasarkan perubahan ini, Izin Mendirikan Bangunan (IMB) telah diubah menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). PBG sendiri merupakan izin yang dikeluarkan oleh pemerintah kepada pemilik bangunan gedung atau perwakilannya untuk memulai pembangunan, merenovasi, merawat, atau mengubah bangunan gedung sesuai dengan rencana teknis yang telah diajukan.

f.



Realisasi PAD Retribusi PBG tahun 2024 sebesar Rp0,00 dari anggaran sebesar Rp0,00 atau 0,00%. Ditahun 2024 tidak ada realisasi untuk Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) karena telah digantikan dengan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung sesuai dengan Perda No 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

Jika dibanding dengan realisasi PAD Retribusi PBG tahun 2023 menurun sebesar Rp1.950.241.503,00 atau 100,00%.

2. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol

Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol realisasi tahun 2024 sebesar Rp62.000.000,00 dari anggaran sebesar Rp0,00 atau 0,00%. Jika dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp716.000.000,00 realisasi penurunan sebesar Rp654.000.000,00 atau 91,34%. Penurunan Pendapatan Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (Mikol) ini disebabkan tahun 2024 sudah tidak ada Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.

3. Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum oleh Dinas Perhubungan Kota Samarinda.

Retribusi Izin Trayek realisasi tahun 2024 sebesar Rp350.000,00 dari anggaran tahun 2024 sebesar Rp0,00 atau 0,00%. Jika dibandingkan target tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp4.000.000,00 atau 91,95%. Penurunan realisasi terhadap anggaran dikarenakan sudah tidak ada lagi Retribusi Izin Trayek 2024 sesuai Perda No 1 Tahun 2024 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah. Pendapatan yang masuk merupakan tagihan pembayaran tahun 2023.

4. Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dipungut oleh Dinas Tenaga Kerja. Retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing TA 2024 terealisasi sebesar Rp0,00 dari anggaran sebesar Rp0,00 atau 0,00%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar Rp182.085.600,00 target mengalami penurunan sebesar Rp182.085.600,00 atau 100,00%.

Penyebab penurunan di tahun 2024 disebabkan retribusi perpanjangan izin sudah digantikan dengan Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA).

5. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)

Realisasi PAD Retribusi PBG tahun 2024 sebesar Rp5.271.797.623,00 dari anggaran sebesar Rp4.000.000.000,00 atau 131,79%. Ditahun 2024 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) telah digantikan dengan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung sesuai dengan Perda No 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

Realisasi 2023 Rp0,00 dibanding dengan realisasi Retribusi PBG tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp5.271.797.623,00 atau 100,00%.

6. Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)

Realisasi Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) merupakan dana kompensasi penggunaan tenaga kerja asing atas pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing. Dana Kompensasi Penggunaan TKA yang selanjutnya disingkat DKPTKA tahun 2024 sebesar Rp478.866.600,00 dari anggaran sebesar Rp100.000.000,00 atau 478,87%. Realisasi tahun 2023 sebesar Rp0,00 Jika dibanding dengan tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp478.866.600,00 atau 100,00%.

f.



5.1.1.1.3 PENDAPATAN HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN

31-12-2024

31-12-2023

Rp22.082.018.474,03

Rp13.337.956.568,25

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pendapatannya diterima dan dikelola oleh Pemerintah Kota Samarinda yang berupa PAD dari pembagian laba atas penyertaan modal Pemerintah Kota Samarinda pada Perusahaan daerah atau Badan Usaha Milik Daerah. Realisasi TA 2024 dapat dirinci pada tabel berikut.

Tabel 5.1. 19 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Kota Samarinda TA 2024

(dalam satuan rupiah)

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	LEBIH/KURANG	REALISASI 2023
1	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	22.672.018.000,00	22.082.018.474,03	97,40	(589.999.525,97)	13.337.956.568,25
	JUMLAH	22.672.018.000,00	22.082.018.474,03	97,40	(589.999.525,97)	13.337.956.568,25

Pada tabel diatas menggambarkan anggaran pembagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah tahun 2024 sebesar Rp22.672.018.000,00 terealisasi sebesar Rp22.082.018.474,03 atau 97,40%. Dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp13.337.956.568,25 mengalami kenaikan sebesar Rp8.744.061.905,78 atau 65,56%.

Gambar 5.1. 8 Diagram Perbandingan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Kota Samarinda tahun 2024 dan 2023





Diatas ini adalah diagram yang menggambarkan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Perbandingan antara Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) dan Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD (Bidang Air Minum) dan Penyertaan Modal pada Perumda Varia Niaga Samarinda realisasi tahun 2024 dan tahun 2023.

Realisasi tahun 2024 dapat dijabarkan pada tabel berikut:

Tabel 5.1. 20 Rincian Realisasi Bagian Laba Penyertaan Modal tahun 2024

(dalam satuan rupiah)

NO	TANGGAL	URAIAN	NILAI
1	03 April 2024	PT. Bank Pembangunan Daerah Kaltimara	3.197.750.628,03
2	27 Juni 2024	Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kencana	18.474.267.846,00
3	12 Februari 2024	Perumda Varia Niaga	40.000.000,00
4	5 Maret 2024	Perumda Varia Niaga	40.000.000,00
5	28 Maret 2024	Perumda Varia Niaga	40.000.000,00
6	7 Mei 2024	Perumda Varia Niaga	40.000.000,00
7	31 Mei 2024	Perumda Varia Niaga	40.000.000,00
8	24 Juli 2024	Perumda Varia Niaga	40.000.000,00
9	28 Agustus 2024	Perumda Varia Niaga	40.000.000,00
10	30 September 2024	Perumda Varia Niaga	40.000.000,00
11	28 November 2024	Perumda Varia Niaga	50.000.000,00
12	6 Desember 2024	Perumda Varia Niaga	40.000.000,00
JUMLAH			22.082.018.474,03

Tabel diatas menggambarkan rincian dari pembagian dividen atas penyertaan modal Pemerintah Kota Samarinda di tahun 2024 pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kencana sebesar Rp10.799.494.723,00 dan PT. Bank Pembangunan Daerah Kaltimara sebesar Rp2.538.461.845,25.

5.1.1.1.4 LAIN-LAIN PAD YANG SAH

31-12-2024

31-12-2023

Rp215.215.350.531,24

Rp184.251.087.374,70

Lain-lain PAD yang Sah merupakan Pendapatan Asli Daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak, retribusi, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Untuk periode TA 2024 dan 2023 dapat dirinci pada table 5.1.21 berikut.

f.



**Tabel 5.1. 21 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah Kota Samarinda
TA 2024**

(dalam satuan rupiah)

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	LEBIH/KURANG	REALISASI 2023
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	1.500.000.000,00	1.810.107.440,00	120,67	310.107.440,00	520.785.371,00
2	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000.000,00
3	Hasil Kerja Sama Daerah	23.752.849.107,00	24.793.953.851,75	104,38	1.041.104.744,75	20.670.273.803,74
4	Jasa Giro	10.000.000.000,00	10.643.835.354,44	106,44	643.835.354,44	21.816.026.280,59
5	Pendapatan Bunga	25.500.000.000,00	41.125.100.075,27	161,27	15.625.100.075,27	14.389.730.255,82
6	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	2.999.361.674,00	6.965.341.288,86	232,23	3.965.979.614,86	10.404.893.884,98
7	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	1.000.000.000,00	481.762.693,50	48,18	(518.237.306,50)	989.028.991,52
8	Pendapatan Denda Pajak Daerah	5.676.811.893,00	10.454.636.355,57	184,16	4.777.824.462,57	3.693.893.723,01
9	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	600.000.000,00	97.205.226,00	16,20	(502.794.774,00)	1.927.331.250,00
10	Pendapatan dari Pengembalian	1.000.000.000,00	356.569.275,40	35,66	(643.430.724,60)	464.471.923,19
11	Pendapatan BLUD	7.000.000.000,00	111.328.569.004,45	1.590,41	104.328.569.004,45	98.580.708.246,85
12	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	0,00	7.125.419.966,00	0,00	7.125.419.966,00	10.655.693.644,00
13	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	13.650.000,00	32.850.000,00	240,66	19.200.000,00	13.250.000,00
JUMLAH		79.042.672.674,00	215.215.350.531,24	272,28	136.172.677.857,24	184.251.087.374,70

Data tabel diatas menunjukkan Anggaran Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah TA 2024 sebesar Rp79.042.672.674,00 terealisasi sebesar Rp215.215.350.531,24 atau 272,28%. Dibandingkan dengan realisasi 2023 sebesar Rp184.251.087.374,70 mengalami kenaikan sebesar Rp30.964.263.156,54 atau 16,81%.

Terdapat koreksi tambah dari BPK senilai Rp83.325.100,00 antara lain:

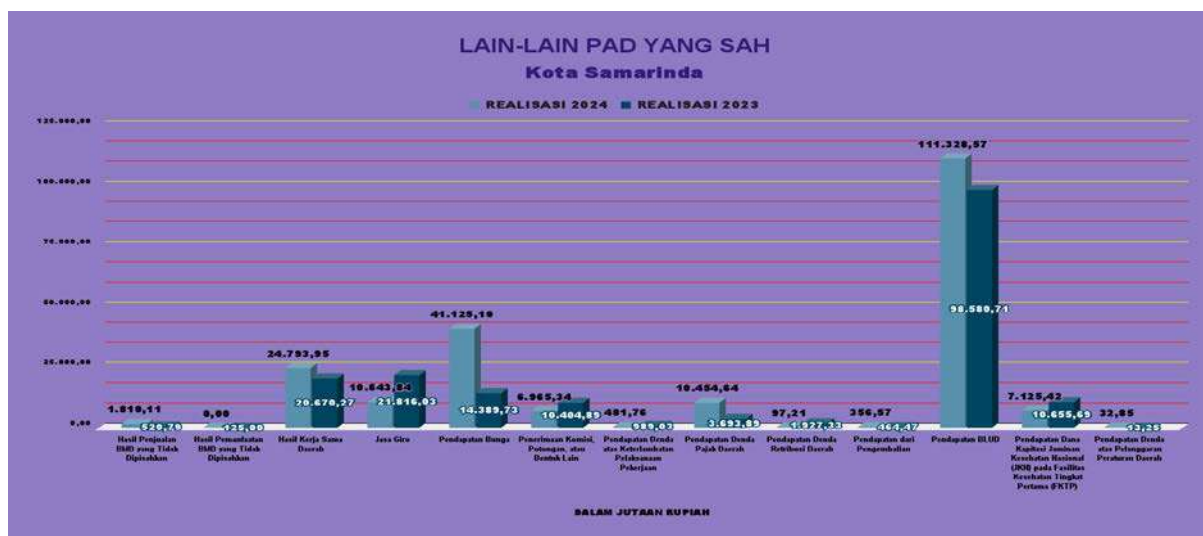
1. Koreksi atas kurang catat pendapatan BLUD PKM Lok Bahu per 31 Desember 2024 senilai Rp2.250.000,00;
2. Koreksi atas Kurang catat pendapatan dana Prolanis pada 5 Puskesmas BLUD senilai Rp41.952.400,00;
3. Reklas atas penerimaan Biaya Magang di Puskesmas Remaja, dari Pendapatan Retribusi ke Lain2 PAD yang Sah senilai Rp3.250.000,00;
4. Reklas atas penerimaan Non Kapitasi atas penerimaan PKM Non BLUD, dari Pendapatan Retribusi ke Lain2 PAD yang Sah senilai Rp35.872.700,00.

Terdapat koreksi kurang senilai Rp3.900.000,00 atas penyeteroran dana BOS PAUD swasta Noble Kidz ke Kas Daerah pada tanggal 15 November 2024.

f.



Gambar 5.1. 9 Diagram Proporsi Lain-lain PAD yang Sah tahun 2024



Diatas ini adalah diagram yang menggambarkan angka realisasi 2024 dengan angka realisasi tahun 2023 dengan berbagai jenis Lain-lain PAD yang Sah tahun 2024.

5.1.1.2 PENDAPATAN TRANSFER

31-12-2024

31-12-2023

Rp4.138.073.600.326,00

Rp3.168.703.081.359,00

Pendapatan transfer merupakan pendapatan yang bersumber dari APBN dan Pemerintah Daerah Lainnya yang dialokasikan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Tahun 2024 APBD ditetapkan dengan Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Untuk Kota Samarinda di tahun 2024 komposisi Pendapatan Transfer dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.1. 22 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Kota Samarinda TA 2024

(dalam satuan rupiah)

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024			% 2024	LEBIH/KURANG	REALISASI 2023
			MURNI	PEMBAYARAN PIUTANG	REALISASI 2024			
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	2.986.821.141.000,00	2.971.848.070.765,00	220.000,00	2.971.848.290.765,00	99,50	(14.972.850.235,00)	2.172.401.743.615,00
2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	20.758.998.000,00	20.758.998.000,00	0,00	20.758.998.000,00	100,00	0,00	16.333.666.000,00
3	Transfer Pemerintah Provinsi	1.198.342.669.326,00	1.145.466.311.561,00	0,00	1.145.466.311.561,00	95,59	(52.876.357.765,00)	979.967.671.744,00
JUMLAH		4.205.922.808.326,00	4.138.073.380.326,00	220.000,00	4.138.073.600.326,00	98,39	(67.849.208.000,00)	3.168.703.081.359,00

Dari tabel di atas Pendapatan Transfer Kota Samarinda di tahun 2024 telah dianggarkan sebesar Rp4.205.922.808.326,00 dan telah terealisasi sebesar Rp4.138.073.600.326,00 atau 98,39%. Dibandingkan dengan realisasi di tahun 2023 sebesar Rp3.168.703.081.359,00 mengalami kenaikan sebesar Rp969.370.518.967,00 atau sebesar 30,59%.

Dari gambar grafik dibawah ini dapat dilihat data perbandingan antara realisasi tahun 2024 dengan realisasi tahun 2023 dari beberapa jenis pendapatan transfer antara lain Dana Perimbangan, Pendapatan Transfer pusat lainnya dan pendapatan transfer Provinsi sebagai berikut:

Gambar 5.1. 10 Diagram Perbandingan Pendapatan Transfer Kota Samarinda tahun 2024 dan 2023



5.1.1.2.1 PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT – DANA PERIMBANGAN

31-12-2024

31-12-2023

Rp2.971.848.290.765,00

Rp2.172.401.743.615,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat merupakan dana yang bersumber dari pendapatan dalam APBN yang dialokasikan untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Perimbangan ditetapkan setiap tahun anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dana Bagi Hasil (DBH) dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DBH bersumber dari DBH Pajak dan DBH Sumber Daya Alam atau DBH Bukan Pajak. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik.

Dari gambar grafik diagram garis dibawah ini perbandingan realisasi pendapatan Dana Perimbangan tahun 2024 dan realisasi pendapatan daerah tahun 2023 dari rincian pendapatan transfer Pusat antara lain Pendapatan Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Transfer Umum (DAU), Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK), dan Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebagai berikut:



Gambar 5.1. 11 Diagram Perbandingan Pendapatan Dana Perimbangan tahun 2024 dan 2023



Dana perimbangan Pemerintah Kota Samarinda untuk periode TA 2024 dapat dirinci pada tabel berikut:

Tabel 5.1. 23 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan Kota Samarinda TA 2024

(dalam satuan rupiah)

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024			% 2024	LEBIH/KURANG	REALISASI 2023
			MURNI	PEMBAYARAN PIUTANG	REALISASI 2024			
1	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	1.844.216.952.000,00	1.844.216.952.000,00	220.000,00	1.844.217.172.000,00	100,00	220.000,00	1.164.914.989.154,00
2	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	843.060.860.000,00	841.775.200.055,00	0,00	841.775.200.055,00	99,85	(1.285.659.945,00)	677.722.969.133,00
3	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	19.620.025.000,00	19.158.878.212,00	0,00	19.158.878.212,00	97,65	(461.146.788,00)	21.190.912.335,00
4	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	279.923.304.000,00	266.697.040.498,00	0,00	266.697.040.498,00	95,28	(13.226.263.502,00)	308.572.872.993,00
JUMLAH		2.986.821.141.000,00	2.971.848.070.765,00	220.000,00	2.971.848.290.765,00	99,50	(14.972.850.235,00)	2.172.401.743.615,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan sebagaimana tampak pada tabel anggaran sebesar Rp2.986.821.141.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp2.971.848.290.765,00 atau 99,50% terdiri dari murni sebesar 2.971.848.070.765,00 dan pembayaran piutang sebesar Rp220.000,00. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar Rp2.172.401.743.615,00 mengalami kenaikan sebesar Rp799.446.547.150,00 atau 36,80%.

Treasury Deposit Facility (TDF) adalah sebuah skema penyaluran dana pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang dilakukan secara nontunai melalui Bank Indonesia. TDF bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan dana transfer ke daerah, serta mengurangi risiko penyalahgunaan dana.



Dengan TDF, pemerintah daerah dapat menyimpan dana bagi hasil dan/atau dana alokasi umum yang belum digunakan di rekening bendahara umum negara di Bank Indonesia. Dana tersebut dapat diambil kembali oleh pemerintah daerah sesuai dengan kebutuhan anggaran dan rencana kerja. Pemerintah daerah juga berhak mendapatkan bunga dari dana yang disimpan di TDF.

Saldo awal dana TDF pada awal tahun 2024 adalah sebesar Rp713.036.591.000,00. Dana tersebut disalurkan ke rekening Kas Daerah Pemerintah Kota Samarinda dalam beberapa tahap yaitu:

1. Pemerintah Pusat melalui Kementerian Keuangan RI - Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menerbitkan Surat nomor 54/PK/PK.2/2024 Tgl 26 Maret 2024 perihal Penyaluran Dana *Treasury Deposit Facility (TDF)* ke RKUD dalam rangka Mendukung Kebutuhan Belanja Daerah TA 2024 dengan nilai yang disalurkan ke rekening Kas Daerah Kota Samarinda sebesar Rp66.009.903.262,00. Sehingga sisa Dana TDF Pemerintah Kota Samarinda menjadi Rp647.026.687.738,00.
2. Pemerintah Pusat melalui Kementerian Keuangan RI - Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 267 Tahun 2024 tentang Penarikan Dana TDF dalam Rangka Mendukung Kebutuhan Pendanaan Gaji Ketiga Belas di Daerah Tahun Anggaran 2024 tanggal 6 Juni 2024 Perihal Penyaluran Dana *Treasury Deposit Facility* ke RKUD dalam rangka Mendukung Kebutuhan Belanja Daerah TA 2024 dengan nilai yang disalurkan ke rekening KASDA Kota Samarinda sebesar Rp66.199.019.724,00, sehingga sisa dana TDF menjadi sejumlah Rp580.827.668.014,00.
3. Pada Tanggal 11 November 2024 disalurkan dana TDF ke rekening Kas Daerah Pemerintah Kota Samarinda sejumlah Rp290.413.834.007,00 Berdasarkan Surat permohonan Penyaluran Dana TDF Pemerintah Kota Samarinda tahap 1.
4. Pada Tanggal 23 Desember disalurkan dana TDF ke rekening Kas Daerah sejumlah Rp290.413.834.007,00 Pemerintah Kota Samarinda berdasarkan Surat permohonan Penyaluran Dana TDF Pemerintah Kota Samarinda tahap 2.

Tabel 5.1. 24 Rincian Treasury Deposit Facility TA 2024

(dalam satuan rupiah)

REKENING	TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV	JUMLAH
4.2.1.01.01.0001 DBH Pajak Bumi dan Bangunan	561.621.578,00	563.230.607,00	0,00	4.941.763.814,00	6.066.615.999,00
4.2.1.01.01.0002 DBH PPh Pasal 21	1.004.759.793,00	1.007.638.401,00	0,00	8.840.980.806,00	10.853.379.000,00
4.2.1.01.01.0003 DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	16.705.388,00	16.753.249,00	0,00	146.992.364,00	180.451.001,00
4.2.1.01.01.0004 DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.01.01.0005 DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	194.340.679,00	194.897.460,00	0,00	1.710.022.862,00	2.099.261.001,00
4.2.1.01.01.0006 DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi		0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.01.01.0008 DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	20.258.909,00	20.316.950,00	0,00	178.260.140,00	218.835.999,00
4.2.1.01.01.0009 Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	64.212.216.915,00	64.396.183.057,00	0,00	565.009.648.028,00	693.618.048.000,00
4.2.1.01.01.0010 DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



REKENING	TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV	JUMLAH
4.2.01.01.01.0011 DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-luran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IUUPH)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.01.01.0013 DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.01.01.0001 DBH Sawit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH	66.009.903.262,00	66.199.019.724,00	0,00	580.827.668.014,00	713.036.591.000,00

5.1.1.2.1.1 DANA BAGI HASIL PAJAK

31-12-2024

31-12-2023

Rp144.122.432.000,00

Rp121.089.658.309,00

Tabel 5.1. 25 Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat –Dana Perimbangan Dana Bagi Hasil Pajak TA 2024

(dalam satuan rupiah)

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024				LEBIH /KURANG	REALISASI 2023
			MURNI	PEMBAYARAN PIUTANG	JUMLAH	%		
1	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	71.319.574.000,00	71.319.573.999,00	0,00	71.319.573.999,00	100,00	(1,00)	113.994.675.983,00
2	DBH PPh Pasal 21	69.314.631.000,00	69.314.631.000,00	0,00	69.314.631.000,00	100,00	0,00	6.443.231.133,00
3	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WOPDN	3.488.007.000,00	3.488.007.001,00	0,00	3.488.007.001,00	100,00	1,00	650.874.458,00
4	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00	220.000,00	876.735,00
JUMLAH		144.122.212.000,00	144.122.212.000,00	220.000,00	144.122.432.000,00	100,00	220.000,00	121.089.658.309,00

Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan Dana Bagi Hasil Pajak TA 2024 sebesar Rp144.122.212.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp144.122.432.000,00 atau 100,00% terdiri dari murni sebesar Rp144.122.212.000,00 dan pembayaran piutang sebesar Rp220.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar Rp121.089.658.309,00 telah mengalami kenaikan sebesar Rp23.032.773.691,00 atau 19,02%.

DBH Cukai Hasil Tembakau tidak ada realisasi di tahun 2024 tetapi ada pembayaran piutang sebesar Rp220.000,00. DJPK menjelaskan hal tersebut karena adanya penghentian Penyaluran DBH Cukai Hasil Tembakau TA 2024 yang ditetapkan dalam KMK 41/KM.7/2023.

5.1.1.2.1.2 DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM

31-12-2024

31-12-2023

Rp1.700.094.740.000,00

Rp1.043.825.330.845,00



Tabel 5.1. 26 Tabel Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam TA 2024

NO	URAIAN	ANGGARAN	MURNI	REALISASI 2024		% 2024	LEBIH/KURANG	REALISASI 2023
				PEMBAYARAN PIUTANG	REALISASI 2024			
1	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	19.667.449.000,00	19.667.449.001,00	0,00	19.667.449.001,00	100,00	1,00	38.154.813.954,00
2	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	48.241.959.000,00	48.241.959.000,00	0,00	48.241.959.000,00	100,00	0,00	66.599.571.519,00
3	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	1.070.925.000,00	1.070.924.999,00	0,00	1.070.924.999,00	100,00	(1,00)	2.184.437.851,00
4	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	1.617.315.495.000,00	1.617.315.495.000,00	0,00	1.617.315.495.000,00	100,00	0,00	932.476.512.524,00
5	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	2.244.604.000,00	2.244.604.000,00	0,00	2.244.604.000,00	100,00	0,00	2.964.397.586,00
6	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-luran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IUUPH)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.200,00
7	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.074.331.000,00	1.074.331.000,00	0,00	1.074.331.000,00	100,00	0,00	1.445.488.211,00
8	DBH Sawit	10.479.977.000,00	10.479.977.000,00	0,00	10.479.977.000,00	100,00	0,00	0,00
JUMLAH		1.700.094.740.000,00	1.700.094.740.000,00	0,00	1.700.094.740.000,00	100,00	0,00	1.043.825.330.845,00

Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan - Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam TA 2024 sebesar Rp1.700.094.740.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp1.700.094.740.000,00 atau 100,00%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar Rp1.043.825.330.845,00 telah mengalami kenaikan sebesar Rp656.269.409.155,00 atau 62,87%.

5.1.1.2.1.3 DANA ALOKASI UMUM

31-12-2024

31-12-2023

Rp841.775.200.055,00

Rp677.722.969.133,00

Tabel 5.1. 27 Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) TA 2024

(dalam satuan rupiah)

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	LEBIH /KURANG	REALISASI 2023
1	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	843.060.860.000,00	841.775.200.055,00	99,85	(1.285.659.945,00)	621.005.911.133,00
2	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	0,00	0,00	0,00	0,00	56.717.058.000,00
JUMLAH		843.060.860.000,00	841.775.200.055,00	99,85	(1.285.659.945,00)	677.722.969.133,00

Dana Alokasi Umum yang diterima pada TA 2024 sebesar Rp841.775.200.055,00 dengan anggaran sebesar Rp843.060.860.000,00 atau 99,85%. Jika dibandingkan dengan



tahun 2023 sebesar 677.722.969.133,00 mengalami kenaikan sebesar Rp164.052.230.922,00 atau 24,21%. Tahun 2024 terdapat reklas atas kesalahan input pendapatan DAU tahap 3 (tiga) bidang kesehatan yang di input di DAK Fisik Bidang Kesehatan dan KB senilai 4.560.440.000,00.

5.1.1.2.1.4 DANA ALOKASI KHUSUS

31-12-2024

31-12-2023

Rp285.855.918.710,00

Rp329.763.785.328,00

Dana Transfer khusus Dana Alokasi Khusus (DAK) terbagi menjadi dua yaitu Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik.

Tabel 5.1. 28 Tabel Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) TA 2024

(dalam satuan rupiah)

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	LEBIH /KURANG	REALISASI 2023
1	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	19.620.025.000,00	19.158.878.212,00	97,65	(461.146.788),00	21.190.912.335,00
2	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	279.923.304.000,00	266.697.040.498,00	95,28	(13.226.263.502,00)	308.572.872.993,00
JUMLAH		299.543.329.000,00	285.855.918.710,00	95,43	(13.687.410.290,00)	329.763.785.328,00

Dana Transfer Khusus Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2024 sebesar Rp285.855.918.710,00 dari anggaran sebesar Rp299.543.329.000,00 atau sebesar 95,43 % bila dibandingkan dengan tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp43.907.866.618,00 atau 13,31%.

Tahun 2024 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik terealisasi sebesar Rp19.158.878.212,00 dari anggaran sebesar Rp19.620.025.000,00 atau 97,65%. Bila dibandingkan dengan tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp2.032.034.123,00 atau 9,59%.

Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik terealisasi sebesar Rp266.697.040.498,00 dari anggaran sebesar Rp279.923.304.000,00 atau sebesar 95,28% bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp41.875.832.495,00 atau 13,57%.

Pendapatan dan realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik tahun 2024 dan 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.1. 29 Rincian Anggaran dan Realisasi Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik TA 2024

(dalam satuan rupiah)

No	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	LEBIH /KURANG	REALISASI 2023
1	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	323.928.000,00	319.931.712,00	98,77	(3.996.288,00)	4.978.050.374,00
2	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	2.968.359.000,00	3.155.865.000,00	106,32	187.506.000,00	1.706.922.900,00
3	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	7.761.325.000,00	7.647.389.000,00	98,53	(113.936.000,00)	3.241.272.200,00
4	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	474.576.751,00
5	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB	0,00	0,00	0,00	0,00	740.930.000,00



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
CATATAN UNTUK LAPORAN KEUANGAN
UNTUK YANG TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2024



No	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	LEBIH /KURANG	REALISASI 2023
6	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting	113.971.000,00	103.000.000,00	90,37	(10.971.000,00)	0,00
7	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Reguler-Penyediaan Rumah Swadaya	0,00	0,00	0,00	0,00	2.950.702.300,00
8	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	0,00	0,00	0,00	0,00	544.399.000,00
9	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	0,00	0,00	0,00	0,00	837.900.000,00
10	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Keluarga Berencana	112.097.000,00	111.866.000,00	99,79	(231.000,00)	2.915.553.500,00
11	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengendalian Penyakit	0,00	0,00	0,00	0,00	957.376.620,00
12	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	8.340.345.000,00	7.820.826.500,00	93,77	(519.518.500,00)	1.843.228.690,00
13	DAK Fisik-Bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah-Penugasan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH		19.620.025.000,00	19.158.878.212,00	97,65	(461.146.788,00)	21.190.912.335,00

Pendapatan dan realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik tahun 2024 dan 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.1. 30 Rincian Anggaran dan Realisasi Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik TA 2024

(dalam satuan rupiah)

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	LEBIH /KURANG	REALISASI 2023
1	DAK Non Fisik-BOS Reguler	114.978.820.000,00	114.621.078.783,00	99,69	(357.741.217,00)	125.413.839.564,00
2	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	3.162.500.000,00	3.105.000.000,00	98,18	(57.500.000,00)	0,00
3	DAK Non Fisik-TPG PNSD	108.236.204.000,00	100.122.748.084,00	92,50	(8.113.455.916,00)	103.749.938.355,00
4	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	2.676.282.000,00	2.676.282.000,00	100,00	0,00	1.585.750.304,00
5	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesenjangan	0,00	0,00	0,00	0,00	6.087.193.800,00
6	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	0,00	0,00	0,00	0,00	10.265.082.800,00
7	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	0,00	0,00	0,00	0,00	60.275.522.270,00
8	DAK Non Fisik-PK2UKM	0,00	0,00	0,00	0,00	348.625.900,00
9	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	390.100.000,00	132.836.000,00	34,05	(257.264.000,00)	294.820.000,00
10	DAK Non Fisik-BOKB-KB	5.736.971.000,00	5.585.814.748,00	97,37	(151.156.252,00)	0,00
11	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	406.000.000,00	406.000.000,00	100,00	0,00	0,00
12	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	0,00	0,00	0,00	0,00	552.100.000,00
13	DAK Non Fisik-PK2UMK	392.881.000,00	385.331.100,00	98,08	(7.549.900,00)	0,00
14	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler	7.779.850.000,00	7.116.169.066,00	91,47	(663.680.934,00)	0,00
15	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja	360.000.000,00	360.000.000,00	100,00	0,00	0,00
16	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesenjangan Reguler	6.118.320.000,00	5.932.200.000,00	96,96	(186.120.000,00)	0,00
17	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesenjangan Kinerja	180.000.000,00	180.000.000,00	100,00	0,00	0,00
18	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	9.420.309.000,00	7.468.784.072,00	79,28	(1.951.524.928,00)	0,00
19	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan Makanan	608.131.000,00	0,00	0,00	(608.131.000,00)	0,00
20	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	19.476.936.000,00	18.604.796.645,00	95,52	(872.139.355,00)	0,00
21	DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tunjangan Profesi Guru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH		279.923.304.000,00	266.697.040.498,00	95,28	(13.226.263.502,00)	308.572.872.993,00



5.1.1.2.2 PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA

31-12-2024

31-12-2023

Rp 20.758.998.000,00

Rp16.333.666.000,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya dalam hal ini Dana Insentif Daerah dan Insentif Fiskal adalah bagian dari dana transfer ke daerah dan dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria dan kategori tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan atau pencapaian kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik dan kesejahteraan masyarakat.

Dana Insentif Daerah dan Insentif Fiskal untuk periode TA 2024 dan 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.1. 31 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya

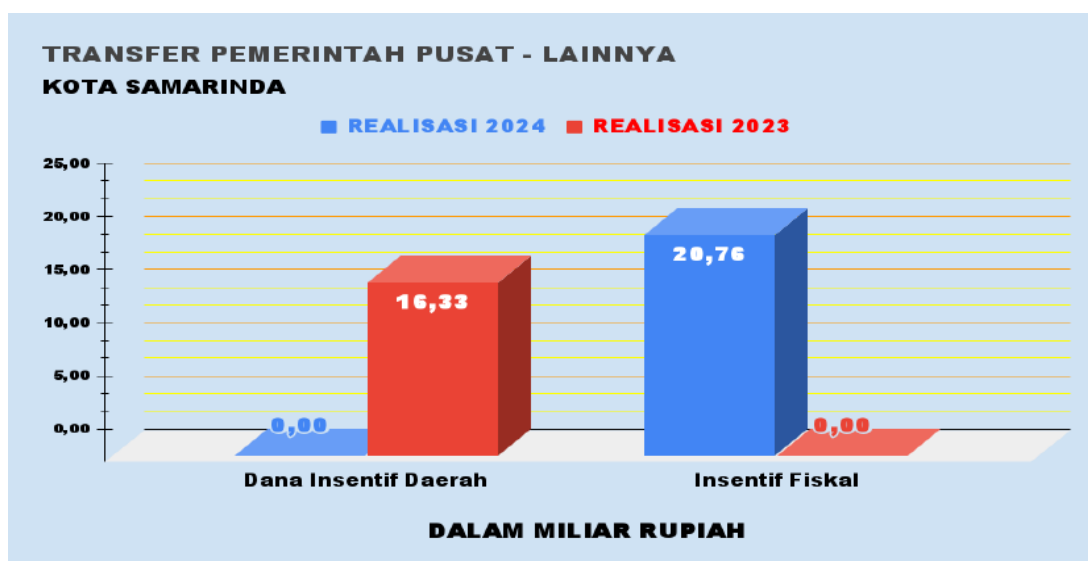
(dalam satuan rupiah)

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	LEBIH/KURANG	REALISASI 2023
1	Dana Insentif Daerah (DID)	0,00	0,00	0,00	0,00	16.333.666.000,00
2	Insentif Fiskal	20.758.998.000,00	20.758.998.000,00	100,00	0,00	0,00
JUMLAH		20.758.998.000,00	20.758.998.000,00	100,00	0,00	16.333.666.000,00

Pemerintah Kota Samarinda di tahun 2024 telah mendapatkan Dana Insentif Daerah sebesar Rp0,00 dari anggaran sebesar Rp0,00 atau 100%. Jika dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp16.333.666.000,00 Dana Insentif Daerah mengalami penurunan sebesar Rp16.333.666.000,00 atau 100,00%.

Pemerintah Kota Samarinda di tahun 2024 telah mendapatkan Insentif Fiskal sebesar Rp20.758.998.000,00 dari anggaran sebesar Rp20.758.998.000,00 atau 100%. Jika dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp0,00 Dana Insentif Fiskal mengalami kenaikan sebesar Rp20.758.998.000,00 atau 100,00%.

Gambar 5.1. 12 Diagram Perbandingan Dana Insentif Daerah tahun 2024 dan 2023



Dari gambar grafik diagram diatas ini dapat dilihat data perbandingan antara realisasi tahun 2024 dengan tahun 2023 dari Pendapatan Transfer Pusat Dana Insentif



Daerah dan Insentif Fiskal. Pendapatan dana insentif daerah tahun 2024 telah terealisasi Rp0,00 atau 0,00% dari alokasi. Insentif Fiskal telah terealisasi sebesar Rp20.758.998.000,00 dari anggaran sebesar Rp20.758.998.000,00 atau 100,00% sesuai dengan alokasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Insentif Fiskal TA 2024 untuk penghargaan kinerja tahun berjalan, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Insentif Fiskal Atas Pencapaian Kinerja Daerah, Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 353 Tahun 2024 tentang Rincian Alokasi Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024 Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Kelompok Kategori Kesejahteraan Masyarakat Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota.

5.1.1.2.3 TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI

31-12-2024

31-12-2023

Rp1.145.466.311.561,00

Rp979.967.671.744,00

Transfer Pemerintah Provinsi adalah Pendapatan yang bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Provinsi Kalimantan Timur yang ditujukan untuk melaksanakan kegiatan kewenangan Pemerintah Kota serta menunjang program strategis pembangunan daerah dan nasional. Pendapatan tersebut di tahun 2024 terdiri dari Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan di alokasikan sebagai berikut:

Tabel 5.1. 32 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi Kota Samarinda TA 2024

(dalam satuan rupiah)

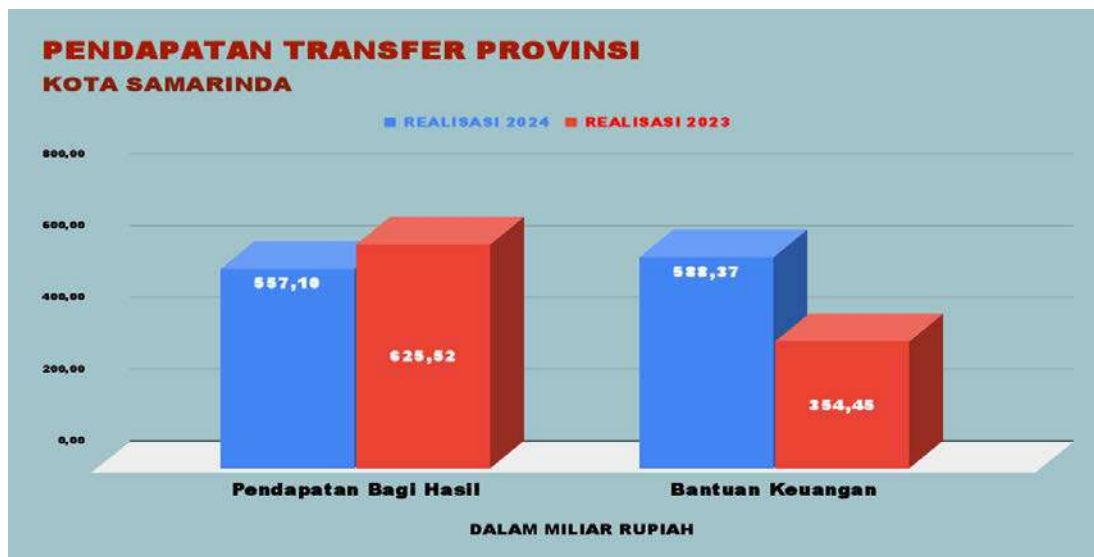
NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	LEBIH/KURANG	REALISASI 2023
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	609.974.037.000,00	557.097.679.235,00	91,33	(52.876.357.765,00)	625.517.671.744,00
2	Pendapatan Bagi Hasil lainnya	588.368.632.326,00	588.368.632.326,00	100,00	0,00	354.450.000.000,00
JUMLAH		1.198.342.669.326,00	1.145.466.311.561,00	95,59	(52.876.357.765,00)	979.967.671.744,00

Data tabel diatas menunjukkan target anggaran Penerimaan Transfer Pemerintah Provinsi TA 2024 sebesar Rp1.198.342.669.326,00 terealisasi sebesar Rp1.145.466.311.561,00 atau 95,59%. Dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp979.967.671.744,00 realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Antar Daerah tahun 2023 telah mengalami kenaikan sebesar Rp165.498.639.817,00 atau 16,89%.

Transfer Pemerintah Provinsi bila dibandingkan antara Realisasi tahun 2024 dengan tahun 2023 akan terlihat seperti diagram dibawah ini:



Gambar 5.1. 13 Diagram Perbandingan Realisasi Penerimaan Transfer Pemerintah Provinsi Tahun 2024 dan 2023



5.1.1.2.3.1 PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK

31-12-2024

31-12-2023

Rp557.097.679.235,00

Rp625.517.671.744,00

Realisasi pendapatan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2024 adalah sebesar Rp557.097.679.235.00. Realisasi pendapatan tersebut terdiri dari realisasi atas alokasi murni tahun 2024 sebesar Rp534.834.510.235,00 serta alokasi kurang salur sebesar Rp22.263.169.000,00. Realisasi pendapatan Bagi Hasil dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berasal dari bagi hasil atas pungutan pajak kendaraan atas bulan Januari sampai dengan bulan November. Realisasi kurang salur berasal dari realisasi kurang salur atas pungutan pajak kendaraan bulan Desember tahun 2023.

Pendapatan tersebut dapat dirinci pada tabel berikut:

Tabel 5.1. 33 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Antar Daerah Pendapatan Bagi Hasil Kota Samarinda TA 2024

(dalam satuan rupiah)

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024			% 2024	LEBIH/KURANG	REALISASI 2023
			MURNI	PEMBAYARAN PIUTANG	JUMLAH			
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	609.974.037.000,00	534.834.510.235,00	22.263.169.000,00	557.097.679.235,00	91,33	(52.876.357.765,00)	625.517.671.744,00
JUMLAH		609.974.037.000,00	534.834.510.235,00	22.263.169.000,00	557.097.679.235,00	91,33	(52.876.357.765,00)	625.517.671.744,00

Dari data diatas di tahun 2024 Pemerintah Kota Samarinda telah menganggarkan Pendapatan Bagi Hasil sebesar Rp609.974.037.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp557.097.679.235,00 atau sebesar 91,33% terdiri dari murni sebesar Rp534.834.510.235,00 dan pembayaran piutang sebesar Rp22.263.169.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi



di tahun 2023 sebesar Rp625.517.671.744,00 mengalami penurunan sebesar Rp68.419.992.509,00 atau 10,94%.

Gambar 5.1. 14 Diagram Perbandingan Pendapatan Bagi Hasil tahun 2024 dan 2023



**Tabel 5.1. 34 Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Antar Daerah
Pendapatan Bagi Hasil Kota Samarinda TA 2024**

(dalam satuan rupiah)

(dalam satuan Rupiah)								
NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024			% 2024	LEBIH/KURANG	REALISASI 2023
			MURNI	KURANG SALUR	JUMLAH			
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	102.486.457.000,00	76.451.863.000,00	8.640.624.000,00	85.092.487.000,00	83,03	(17.393.970.000,00)	111.339.386.000,00
2	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	87.295.000.000,00	71.357.057.000,00	7.052.322.000,00	78.409.379.000,00	89,82	(8.885.621.000,00)	82.704.283.000,00
3	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	377.593.076.000,00	347.267.512.000,00	6.505.887.000,00	353.773.399.000,00	93,69	(23.819.677.000,00)	392.777.768.000,00
4	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	1.148.301.000,00	731.186.000,00	64.336.000,00	795.522.000,00	69,28	(352.779.000,00)	729.030.000,00
5	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	41.451.203.000,00	39.026.892.235,00	0,00	39.026.892.235,00	94,15	(2.424.310.765,00)	37.967.204.744,00
JUMLAH		609.974.037.000,00	534.834.510.235,00	22.263.169.000,00	557.097.679.235,00	91,33	(52.876.357.765,00)	625.517.671.744,00

Realisasi pendapatan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2024 adalah sebesar Rp557.097.679.235.00. Realisasi pendapatan tersebut terdiri dari realisasi atas alokasi murni tahun 2024 sebesar Rp534.834,510.235,00 serta alokasi kurang salur sebesar Rp22.263.169.000,00. Realisasi pendapatan Bagi Hasil dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berasal dari bagi hasil atas pungutan pajak kendaraan atas bulan Januari sampai dengan bulan November. Realisasi kurang salur berasal dari realisasi kurang salur atas pungutan pajak kendaraan bulan Desember tahun 2023.

Tidak tercapainya realisasi dari pendapatan bagi hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bagi Hasil BBNKB dan Pajak Air Permukaan karena belum disalurkan nya bagi hasil atas realisasi bulan Desember tahun 2024 sehingga akan menjadi nilai kurang salur atas realisasi 2024. Bagi Hasil PBB KB tercapai namun realisasi tersebut belum termasuk realisasi bulan Oktober dan November 2024 yang belum disalurkan dan akan menjadi kurang salur atas 2024.

f.



Alokasi untuk murni tahun 2024 ditetapkan pada Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 100.3.3.1/K.34/2024 Tanggal 23 Februari 2024. Sedangkan alokasi kurang salur ditetapkan berdasarkan surat keputusan Sekretaris Daerah Nomor 900.1.14.3/15882/BPKAD-III tanggal 11 September 2024.

5.1.1.2.3.2 PENDAPATAN BAGI HASIL LAINNYA

31-12-2024

31-12-2023

Rp588.368.632.326,00

Rp354.450.000.000,00

Pendapatan Bagi Hasil Lainnya diberikan sebagai bentuk dukungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Pemerintah Kota Samarinda berdasarkan mekanisme bantuan keuangan dimana penetapan besaran, kriteria dan penggunaannya ditetapkan melalui Keputusan Gubernur. Pendapatan tersebut dapat dirinci pada tabel berikut.

Tabel 5.1. 35 Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Kota Samarinda TA 2024

(dalam satuan rupiah)

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	LEBIH/KURANG	REALISASI 2023
1	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	588.368.632.326,00	588.368.632.326,00	100,00	0,00	354.450.000.000,00
JUMLAH		588.368.632.326,00	588.368.632.326,00	100,00	0,00	354.450.000.000,00

Tahun 2024 Pemerintah Kota Samarinda telah menganggarkan Pendapatan Bagi Hasil Lainnya sebesar Rp588.368.632.326,00 dan telah terealisasi sebesar Rp588.368.632.326,00 atau sebesar 100,00%. Jika dibandingkan dengan realisasi di tahun 2023 sebesar Rp354.450.000.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp233.918.632.326,00 atau 65,99%.

5.1.1.3 LAIN – LAIN PENDAPATAN YANG SAH

31-12-2024

31-12-2023

Rp65.783.434.869,69

Rp426.290.844,00

Lain-lain Pendapatan Yang Sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah) yang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.1. 36 Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Kota Samarinda TA 2024

(dalam satuan rupiah)

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	LEBIH/KURANG	REALISASI 2023
1	Pendapatan Lainnya	60.000.000.000,00	65.783.434.869,69	109,64	5.783.434.869,69	426.290.844,00
JUMLAH		60.000.000.000,00	65.783.434.869,69	109,64	5.783.434.869,69	426.290.844,00



Tahun 2024 Pemerintah Kota Samarinda telah menganggarkan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp60.000.000.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp65.783.434.869,69. Jika dibandingkan dengan realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah di tahun 2023 sebesar Rp426.290.844,00.

5.1.2 BELANJA DAERAH

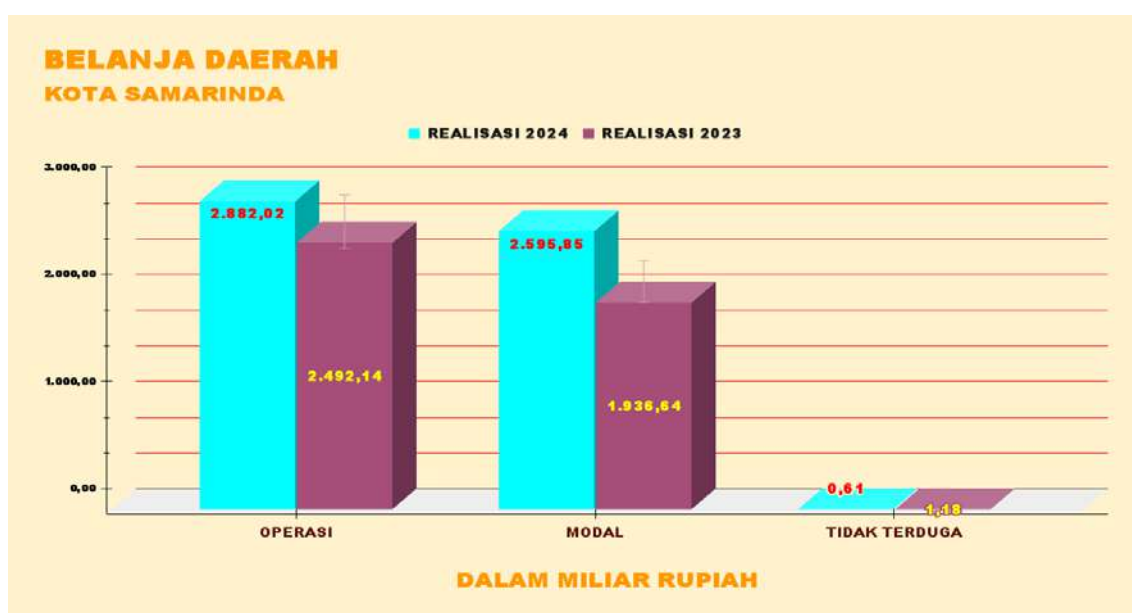
31-12-2024

31-12-2023

Rp5.478.480.866.415,92

Rp4.429.959.804.297,68

Gambar 5.1. 15 Diagram Perbandingan Realisasi Belanja Daerah TA 2024 dan 2023



Belanja Daerah Pemerintah Kota Samarinda tahun 2024 telah dianggarkan sebesar Rp5.726.586.379.700,00 dan direalisasikan sebesar Rp5.478.480.866.415,92. Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah TA 2024 serta realisasi TA 2023 diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 5.1. 37 Anggaran dan Realisasi Belanja Kota Samarinda TA 2024

(dalam satuan rupiah)

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024			% 2024	LEBIH/KURANG	REALISASI 2023
			MURNI	PEMBAYARAN UTANG	JUMLAH			
1	BELANJA OPERASI	2.968.120.496.296,00	2.846.060.126.932,48	35.959.951.670,44	2.882.020.078.602,92	97,10	(86.100.417.693,08)	2.492.138.566.388,49
2	BELANJA MODAL	2.756.965.883.404,00	2.595.771.884.346,00	79.650.000,00	2.595.851.534.346,00	94,16	(161.114.349.058,00)	1.936.638.601.701,21
3	BELANJA TIDAK TERDUGA	1.500.000.000,00	609.253.467,00	0,00	609.253.467,00	40,62	(890.746.533,00)	1.182.636.207,98
JUMLAH		5.726.586.379.700,00	5.442.441.264.745,48	36.039.601.670,44	5.478.480.866.415,92	95,67	(248.105.513.284,08)	4.429.959.804.297,68

Data tabel diatas menunjukkan anggaran belanja daerah TA 2024 sebesar Rp5.726.586.379.700,00 terealisasi sebesar Rp5.478.480.866.415,92 atau 95,67%, realisasi ini terdiri dari belanja murni tahun 2024 sebesar Rp5.441.572.606.864,77 dan pembayaran



utang sebesar Rp36.908.259.551,15. Dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp4.429.959.804.297,68 mengalami kenaikan sebesar Rp1.048.521.062.118,24 atau 23,67%.

5.1.2.2 BELANJA OPERASI

31-12-2024

31-12-2023

Rp2.882.020.078.602,92

Rp2.492.138.566.388,49

Gambar 5.1. 16 Diagram Perbandingan Belanja Operasi TA 2024 dan 2023



Belanja Operasi dibagi ke dalam Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial dengan target anggaran dan realisasi TA 2024 dan tahun 2023 dapat dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 5.1. 38 Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Kota Samarinda TA 2024

(dalam satuan rupiah)

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024			%	LEBIH /KURANG	REALISASI 2023
			MURNI	PEMBAYARAN UTANG	JUMLAH			
1	Belanja Pegawai	1.162.923.724.581,72	1.129.371.171.402,57	4.980.400.203,00	1.134.351.571.605,57	97,54	(28.572.152.976,15)	974.299.843.648,33
2	Belanja Barang dan Jasa	1.544.305.891.829,28	1.436.857.574.465,91	30.979.551.467,44	1.467.837.125.933,35	95,05	(76.468.765.895,93)	1.358.181.894.105,16
3	Belanja Hibah	255.592.979.885,00	274.570.433.806,00	0,00	274.570.433.806,00	107,42	18.977.453.921,00	159.288.078.635,00
4	Belanja Bantuan Sosial	5.297.900.000,00	5.260.947.258,00	0,00	5.260.947.258,00	99,30	(36.952.742,00)	368.750.000,00
JUMLAH		2.968.120.496.296,00	2.846.060.126.932,48	35.959.951.670,44	2.882.020.078.602,92	97,10	(86.100.417.693,08)	2.492.138.566.388,49

Data tabel diatas menunjukkan anggaran Belanja Operasi TA 2024 sebesar Rp2.968.120.496.296,00 terealisasi sebesar Rp2.882.020.078.602,92 atau 97,10%. Realisasi tersebut merupakan pembayaran utang sebesar Rp36.853.509.551,15 dan belanja murni sebesar Rp2.845.166.569.051,77. Realisasi dibandingkan dengan TA 2023 sebesar



Rp2.492.138.566.388,49 mengalami kenaikan sebesar Rp389.881.512.214,43 atau 15,64%, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1. 39 Rincian Realisasi Belanja Operasi per SKPD Kota Samarinda TA 2024

(dalam satuan rupiah)

No	NAMA SKPD	BELANJA OPERASI	
		REALISASI 2024	REALISASI 2023
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	671.515.130.406,40	602.595.553.548,61
2	Dinas Kesehatan	422.222.321.780,52	359.376.064.519,65
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	175.870.278.708,00	115.387.317.402,00
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	53.419.131.778,00	31.492.675.136,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja	27.451.848.558,00	29.025.020.281,00
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	13.038.522.786,00	10.657.237.218,00
7	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	26.326.478.139,00	23.704.555.177,00
8	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	21.700.818.320,00	14.737.495.858,00
9	Dinas Tenaga Kerja	14.106.760.596,00	10.314.602.217,00
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	11.364.118.294,00	8.446.607.789,38
11	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	35.553.061.608,00	33.693.167.428,00
12	Dinas Lingkungan Hidup	91.981.362.037,00	85.176.516.410,00
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	17.978.291.517,00	15.581.417.335,00
14	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	21.373.276.415,00	16.494.034.535,00
15	Dinas Perhubungan	95.131.252.563,00	63.969.970.462,00
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	32.041.900.107,00	36.205.856.954,00
17	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	20.723.536.127,00	16.634.995.513,00
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	19.224.031.927,00	20.924.493.855,00
19	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	54.477.214.325,00	73.688.434.161,00
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	13.134.572.666,00	12.578.923.473,00
21	Dinas Perikanan	11.809.083.958,00	11.088.214.243,00
22	Dinas Perdagangan	35.652.677.428,00	27.357.204.620,00
23	Sekretariat Daerah	115.589.702.395,00	124.814.793.488,85
24	Inspektorat Daerah	21.987.430.318,00	17.743.661.743,00
25	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	36.145.589.156,00	30.644.513.010,00
26	Badan Pendapatan Daerah	65.848.374.257,00	49.520.091.401,00
27	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	93.208.957.898,00	78.521.695.678,00
28	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	28.769.534.814,00	27.863.793.571,00
29	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	119.205.609.771,00	121.351.373.260,00
30	Kecamatan Palaran	34.735.528.360,00	30.549.796.574,00
31	Kecamatan Samarinda Ilir	37.040.251.043,00	33.966.808.386,00
32	Kecamatan Samarinda Seberang	31.260.912.952,00	27.854.299.509,00
33	Kecamatan Samarinda Utara	51.388.497.623,00	46.213.751.386,00
34	Kecamatan Samarinda Ulu	61.899.077.458,00	55.478.743.516,00
35	Kecamatan Sungai Kunjang	56.994.218.639,00	52.641.794.201,00



No	NAMA SKPD	BELANJA OPERASI	
		REALISASI 2024	REALISASI 2023
36	Kecamatan Sambutan	29.052.273.556,00	26.240.795.429,00
37	Kecamatan Sungai Pinang	46.180.902.905,00	42.224.105.853,00
38	Kecamatan Samarinda Kota	29.223.742.739,00	26.665.906.922,00
39	Kecamatan Loa Janan Ilir	32.280.657.337,00	28.997.728.128,00
40	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	105.113.147.338,00	51.714.556.197,00
JUMLAH		2.882.020.078.602,92	2.492.138.566.388,49

Penjelasan lebih lanjut mengenai Belanja Operasi sebagai berikut:

5.1.2.1.1 BELANJA PEGAWAI

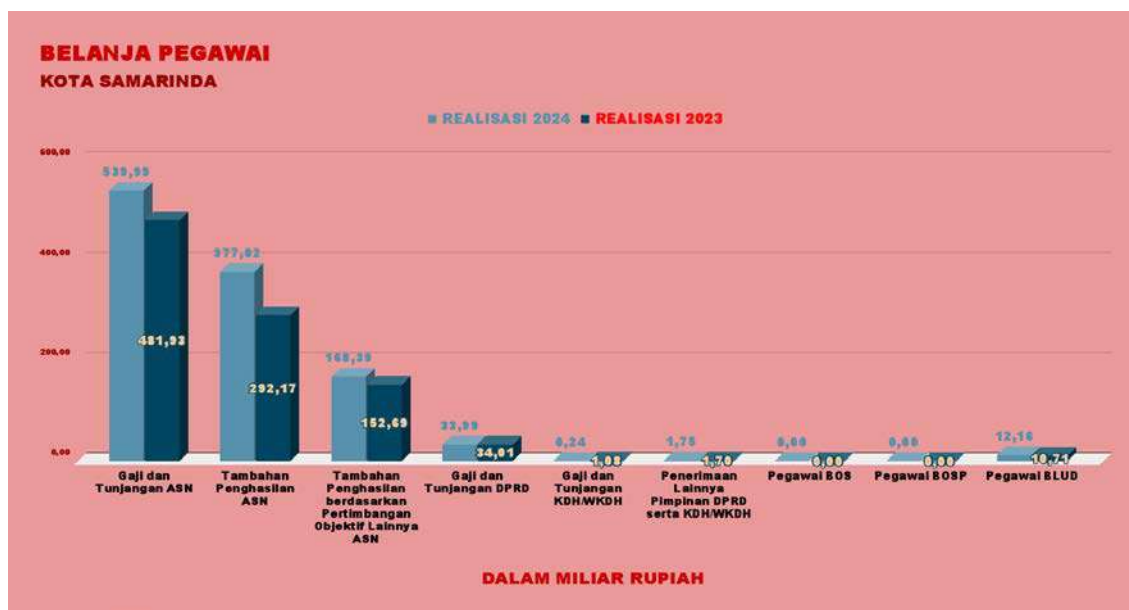
31-12-2024

31-12-2023

Rp1.134.351.571.605,57

Rp974.299.843.648,33

Gambar 5.1. 17 Diagram Perbandingan Belanja Pegawai Tahun 2024 dan 2023



Belanja Pegawai adalah kompensasi dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada pegawai negeri, pejabat negara, dan pensiunan serta pegawai honorer yang akan diangkat sebagai pegawai lingkup pemerintahan baik yang bertugas di dalam maupun di luar negeri sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi unit organisasi pemerintah.

Berikut tabel dan penjelasan atas anggaran Belanja Operasi Pegawai Pemerintah Kota Samarinda yang dapat dirinci pada tabel berikut:



Tabel 5.1. 40 Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Kota Samarinda TA 2024

(dalam satuan rupiah)

[dalam Satuan Rupiah]								
NO	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024				LEBIH /KURANG	REALISASI 2023
			MURNI	PEMBAYARAN UTANG	JUMLAH	%		
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	549.485.593.999,00	539.934.682.928,40	54.185.210,00	539.988.868.138,40	98,27	(9.496.725.860,60)	481.931.952.029,04
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	384.998.723.335,00	377.814.886.652,00	8.985.076,00	377.823.871.728,00	98,14	(7.174.851.607,00)	292.173.180.579,00
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	177.348.476.357,00	163.474.119.093,00	4.917.229.917,00	168.391.349.010,00	94,95	(8.957.127.347,00)	152.692.174.114,00
4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	34.024.262.687,00	33.994.788.137,00	0,00	33.994.788.137,00	99,91	(29.474.550,00)	34.009.436.903,00
5	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.118.206.848,00	244.523.624,00	0,00	244.523.624,00	21,87	(873.683.224,00)	1.081.769.965,00
6	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	1.748.005.198,00	1.747.976.000,00	0,00	1.747.976.000,00	100,00	(29.198,00)	1.701.925.600,00
7	Belanja Pegawai BOS	603.330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(603.330.000,00)	0,00
8	Belanja Pegawai BOSP	164.915.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(164.915.000,00)	0,00
9	Belanja Pegawai BLUD	13.432.211.157,72	12.160.194.968,17	0,00	12.160.194.968,17	90,53	(1.272.016.189,55)	10.709.404.458,29
JUMLAH		1.162.923.724.581,72	1.129.371.171.402,57	4.980.400.203,00	1.134.351.571.605,57	97,54	(28.572.152.976,15)	974.299.843.648,33

Data tabel diatas menunjukkan anggaran Belanja Pegawai TA 2024 sebesar Rp1.162.923.724.581,72 terealisasi sebesar Rp1.134.351.571.605,57 atau 97,54%. Realisasi tersebut terdiri dari belanja murni sebesar Rp1.129.268.495.661,57 dan pembayaran utang sebesar Rp5.083.075.944,00. Dibandingkan realisasi TA 2023 sebesar Rp974.299.843.648,33 mengalami kenaikan sebesar Rp160.051.727.957,24 atau 16,43%. Adapun untuk realisasi Belanja Pegawai Kota Samarinda tahun 2024 dapat dirincikan sebagai berikut:

Tabel 5.1. 41 Rincian Realisasi Belanja Pegawai per SKPD Kota Samarinda TA 2024

(dalam satuan rupiah)

No	NAMA SKPD	BELANJA PEGAWAI	
		REALISASI 2024	REALISASI 2023
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	447.141.233.160,40	374.504.627.041,61
2	Dinas Kesehatan	170.263.761.541,17	138.445.984.543,34
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	19.519.648.508,00	17.329.463.006,00
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	8.302.515.868,00	7.400.027.245,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja	10.517.235.331,00	9.180.508.500,00
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6.055.348.967,00	5.197.327.389,00
7	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	17.180.912.544,00	14.600.379.923,00
8	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	6.183.143.432,00	6.297.664.459,00
9	Dinas Tenaga Kerja	6.405.441.716,00	5.606.795.228,00
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	5.570.535.019,00	4.593.152.479,38
11	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	20.369.700.707,00	18.719.292.440,00
12	Dinas Lingkungan Hidup	13.089.580.727,00	11.438.426.015,00
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	8.792.579.355,00	8.362.883.559,00
14	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	5.158.334.988,00	4.919.387.629,00
15	Dinas Perhubungan	13.567.164.819,00	12.046.262.042,00



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
CATATAN UNTUK LAPORAN KEUANGAN
UNTUK YANG TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2024



No	NAMA SKPD	BELANJA PEGAWAI	
		REALISASI 2024	REALISASI 2023
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	7.846.931.636,00	7.142.950.488,00
17	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	10.240.057.249,00	8.869.939.241,00
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	10.127.095.527,00	10.596.102.734,00
19	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	11.474.518.444,00	10.222.732.408,00
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	7.221.028.804,00	6.635.292.792,00
21	Dinas Perikanan	5.655.475.198,00	4.705.902.520,00
22	Dinas Perdagangan	11.736.938.553,00	10.542.476.983,00
23	Sekretariat Daerah	33.021.985.713,00	29.941.404.970,00
24	Inspektorat	11.917.110.327,00	10.472.679.239,00
25	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	13.138.738.990,00	11.110.281.828,00
26	Badan Pendapatan Daerah	37.231.178.682,00	32.288.219.803,00
27	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	36.501.719.411,00	35.790.341.040,00
28	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	11.765.815.965,00	9.703.884.264,00
29	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	42.649.998.872,00	41.142.465.748,00
30	Kecamatan Palaran	8.937.659.201,00	7.581.928.924,00
31	Kecamatan Samarinda Ilir	9.948.238.879,00	8.182.730.922,00
32	Kecamatan Samarinda Seberang	11.030.719.553,00	9.304.053.495,00
33	Kecamatan Samarinda Utara	15.782.872.242,00	13.254.209.142,00
34	Kecamatan Samarinda Ulu	16.809.147.478,00	13.815.917.984,00
35	Kecamatan Sungai Kunjang	14.189.386.845,00	12.220.818.769,00
36	Kecamatan Sambutan	10.812.816.339,00	9.222.074.893,00
37	Kecamatan Sungai Pinang	11.237.200.833,00	9.310.040.868,00
38	Kecamatan Samarinda Kota	10.117.734.309,00	8.908.361.394,00
39	Kecamatan Loa Janan Ilir	10.669.680.897,00	8.937.102.971,00
40	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	6.170.384.976,00	5.755.748.729,00
JUMLAH		1.134.351.571.605,57	974.299.843.648,33

5.1.2.1.2 BELANJA BARANG DAN JASA

31-12-2024

31-12-2023

Rp1.467.837.125.933,35

Rp1.358.181.894.105,16

P.



Gambar 5.1. 18 Diagram Perbandingan Belanja Barang dan Jasa Tahun 2024 dan 2023



Belanja Barang dan Jasa Pemerintah Kota Samarinda tahun 2024 dapat dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 5.1. 42 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Kota Samarinda TA 2024

(dalam satuan rupiah)

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024	MURNI	REALISASI 2024 PEMBAYARAN UTANG	JUMLAH	%	LEBIH /KURANG	REALISASI 2023
1	Belanja Barang	440.006.373.302,50	424.336.140.606,00	0,00	424.336.140.606,00	96,44	(15.670.232.696,50)	397.830.004.731,00
2	Belanja Jasa	675.423.543.495,50	633.403.766.818,90	2.922.351.671,00	636.326.118.489,90	94,21	(39.097.425.005,60)	588.920.110.522,59
3	Belanja Pemeliharaan	97.294.710.639,00	94.925.452.786,00	0,00	94.925.452.786,00	97,56	(2.369.257.853,00)	63.061.968.863,00
4	Belanja Perjalanan Dinas	133.174.553.903,00	121.585.070.561,00	24.900.000,00	121.609.970.561,00	91,32	(11.564.583.342,00)	96.572.306.447,00
5	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	31.412.810.000,00	24.638.464.427,00	6.085.859.500,00	30.724.323.927,00	97,81	(688.486.073,00)	50.009.619.766,14
6	Belanja Barang dan Jasa BOS	67.587.275.000,00	62.868.669.251,00	0,00	62.868.669.251,00	93,02	(4.718.605.749,00)	66.602.722.053,00
7	Belanja Barang dan Jasa BLUD	99.406.625.489,28	75.100.010.016,01	21.946.440.296,44	97.046.450.312,45	97,63	(2.360.175.176,83)	95.185.161.722,43
JUMLAH		1.544.305.891.829,28	1.436.857.574.465,91	30.979.551.467,44	1.467.837.125.933,35	95,05	(76.468.765.895,93)	1.358.181.894.105,16

Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2024 sebesar Rp1.467.837.125.933,35 atau 95,05% dari anggaran sebesar Rp1.544.305.891.829,28. Realisasi belanja tersebut terdiri dari belanja murni sebesar Rp1.436.066.692.326,20 dan pembayaran utang sebesar Rp31.770.433.607,15. Dibandingkan realisasi TA 2023 sebesar Rp1.358.181.894.105,16 telah mengalami kenaikan sebesar Rp109.655.231.828,19 atau 8,07%, dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 5.1. 43 Rincian Realisasi Belanja Barang dan Jasa per SKPD Kota Samarinda TA 2024

(dalam satuan rupiah)

NO	NAMA SKPD	BELANJA BARANG DAN JASA	
		REALISASI 2024	REALISASI 2023
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	150.310.489.286,00	155.368.343.789,00
2	Dinas Kesehatan	251.958.560.239,35	220.930.079.976,31
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	43.083.863.558,00	43.999.451.424,00
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	37.906.222.910,00	22.394.277.891,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja	16.934.613.227,00	19.844.511.781,00
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6.983.173.819,00	5.459.909.829,00
7	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	9.145.565.595,00	9.104.175.254,00
8	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	11.772.277.880,00	8.071.081.399,00
9	Dinas Tenaga Kerja	7.701.318.880,00	4.707.806.989,00
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	5.793.583.275,00	3.853.455.310,00
11	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	15.183.360.901,00	14.973.874.988,00
12	Dinas Lingkungan Hidup	78.891.781.310,00	73.738.090.395,00
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	8.676.612.162,00	7.218.533.776,00
14	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	16.214.941.427,00	11.574.646.906,00
15	Dinas Perhubungan	81.564.087.744,00	51.923.708.420,00
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	24.194.968.471,00	29.062.906.466,00
17	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	10.483.478.878,00	7.765.056.272,00
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	9.096.936.400,00	10.328.391.121,00
19	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	43.002.695.881,00	63.465.701.753,00
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	5.913.543.862,00	5.943.630.681,00
21	Dinas Perikanan	6.153.608.760,00	6.382.311.723,00
22	Dinas Perdagangan	23.915.738.875,00	16.814.727.637,00
23	Sekretariat Daerah	77.891.592.682,00	94.873.388.518,85
24	Inspektorat	10.070.319.991,00	7.270.982.504,00
25	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	23.006.850.166,00	19.534.231.182,00
26	Badan Pendapatan Daerah	28.617.195.575,00	17.231.871.598,00
27	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	56.707.238.487,00	42.731.354.638,00
28	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	17.003.718.849,00	18.159.909.307,00
29	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	76.555.610.899,00	80.208.907.512,00
30	Kecamatan Palaran	25.797.869.159,00	22.967.867.650,00
31	Kecamatan Samarinda Ilir	27.092.012.164,00	25.784.077.464,00
32	Kecamatan Samarinda Seberang	20.230.193.399,00	18.550.246.014,00
33	Kecamatan Samarinda Utara	35.605.625.381,00	32.959.542.244,00
34	Kecamatan Samarinda Ulu	45.089.929.980,00	41.662.825.532,00
35	Kecamatan Sungai Kunjang	42.804.831.794,00	40.420.975.432,00
36	Kecamatan Sambutan	18.239.457.217,00	17.018.720.536,00
37	Kecamatan Sungai Pinang	34.943.702.072,00	32.914.064.985,00
38	Kecamatan Samarinda Kota	19.106.008.430,00	17.757.545.528,00
39	Kecamatan Loa Janan Ilir	21.610.976.440,00	20.060.625.157,00
40	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	22.582.569.908,00	15.150.084.523,00
JUMLAH		1.467.837.125.933,35	1.358.181.894.105,16

Belanja barang dan jasa BLUD terdapat koreksi atas kurang catat belanja dana Prolanis pada 5 (Lima) Puskesmas BLUD sebesar Rp41.008.300,00, antara lain:

- Puskesmas Air Putih sebesar Rp4.269.900,00.
- Puskesmas Makroman sebesar Rp3.815.400,00.
- Puskesmas Lok Bahu sebesar Rp705.100,00.
- Puskesmas Sungai Siring sebesar Rp17.093.000,00.
- Puskesmas Lempake sebesar Rp15.124.900,00.

f.



5.1.2.1.3 BELANJA HIBAH

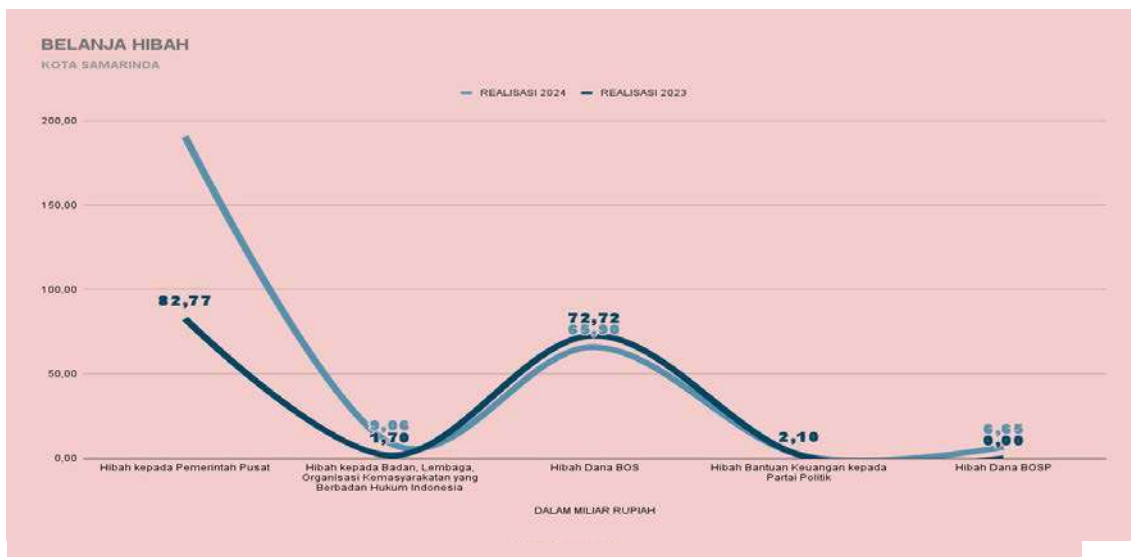
31-12-2024

31-12-2023

Rp274.570.433.806,00

Rp159.288.078.635,00

Gambar 5.1. 19 Diagram Perbandingan Belanja Hibah Tahun 2024 dan 2023



Belanja Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

Realisasi Belanja Hibah Pemerintah Kota Samarinda di tahun 2024 dapat dirincikan pada tabel berikut.

Tabel 5.1. 44 Rincian Realisasi Belanja Hibah Kota Samarinda TA 2024

(dalam satuan rupiah)						
NO	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	LEBIH /KURANG	REALISASI 2023
1	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	193.687.862.591,00	190.786.735.571,00	98,50	(2.901.127.020,00)	82.768.480.582,00
2	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	9.467.701.998,00	9.056.243.000,00	95,65	(411.458.998,00)	1.698.370.000,00
3	Belanja Hibah Dana BOS	49.749.380.000,00	65.898.529.142,00	132,46	16.149.149.142,00	72.722.582.718,00
4	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	2.343.035.296,00	2.179.597.525,00	93,02	(163.437.771,00)	2.098.645.335,00
5	Belanja Hibah Dana BOSP	345.000.000,00	6.649.328.568,00	1.927,34	6.304.328.568,00	0,00
JUMLAH		255.592.979.885,00	274.570.433.806,00	107,42	18.977.453.921,00	159.288.078.635,00

Anggaran Belanja Hibah TA 2024 sebesar Rp255.592.979.885,00 dan telah terealisasi sebesar Rp274.570.433.806,00 atau 107,42%. Jika dibandingkan dengan tahun



2023 sebesar Rp159.288.078.635,00 mengalami kenaikan sebesar Rp115.282.355.171,00 atau 72,37%, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1. 45 Rincian Realisasi Belanja Hibah per SKPD Kota Samarinda TA 2024

(dalam satuan rupiah)

NO	NAMA SKPD	BELANJA HIBAH	
		REALISASI 2024	REALISASI 2023
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	72.547.857.710,00	72.722.582.718,00
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	113.266.766.642,00	54.058.402.972,00
3	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	7.210.393.000,00	1.698.370.000,00
4	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	509.100.000,00	0,00
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	76.360.192.454,00	30.808.722.945,00
6	Sekretariat Daerah Kota Samarinda	4.676.124.000,00	0,00
JUMLAH		274.570.433.806,00	159.288.078.635,00

Belanja hibah tahun 2024 dilakukan oleh:

- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp72.547.857.710,00 terdiri dari:
 - ❖ Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri sebesar Rp29.467.974.207,00.
 - ❖ Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta sebesar Rp36.430.554.935,00.
 - ❖ Belanja Hibah Uang Dana BOSP – BOP PAUD sebesar Rp6.649.328.568,00 di dalam nya terdapat koreksi BPK atas penambahan BOSNAS PAUD swasta 2024 yang belum tercatat pada laporan unaudited tahun 2024 senilai Rp688.727.284,00.
- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang merupakan Belanja Hibah Jasa kepada Pemerintah Pusat sebesar Rp113.266.766.642,00 terdiri dari:
 - Kampus UNTAG 1945 sebesar Rp594.215.000,00.
 - KORAMIL sebesar Rp14.762.564.582,00.
 - Rumah Sakit Bhayangkara Rp2.961.451.000,00.
 - DENZIPUR sebesar Rp2.476.746.000,00.
 - Masyarakat sebesar Rp34.089.573.300,00.
 - Wisma Bhayangkari Rp8.906.671.000,00.
 - BRIMOB sebesar Rp1.636.730.400,00.
 - KOREM sebesar Rp4.995.060.760,00.
 - DENPOM sebesar Rp9.978.089.000,00.
 - Mako Detasemen TNI AU sebesar Rp8.751.882.000,00.
 - DANRAMIL sebesar Rp655.218.000,00.
 - POLSEK sebesar Rp3.897.728.000,00.
 - BNN sebesar Rp99.661.000,00.
 - KODIM sebesar Rp1.864.698.000,00.
 - KAJATI sebesar Rp2.574.006.000,00.
 - POLRESTA sebesar Rp8.381.957.000,00.
 - BRIMOB sebesar Rp3.918.925.600,00.
 - BAZNAZ sebesar Rp228.552.000,00.
 - Taman PKK sebesar Rp998.000.000,00.
 - LAPAS sebesar Rp214.598.000,00.
 - Asrama Polisi Rp1.280.440.000,00.



3. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp7.210.393.000,00 terdiri dari:
 - ❖ Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebesar Rp4.380.119.000,00, terdiri dari:
 - Masjid Babussalam Kec. Sungai Kunjang sebesar Rp870.870.600,00.
 - Masjid Al-Azhar Jl. Jati 2 Blok C RT.27 Kel.harapan Baru sebesar Rp92.916.000,00.
 - TPA Yayasan Mutiara Hati Jl. Rapak Indah 2 sebesar Rp186.057.000,00.
 - TPQ Arroyan Jl.Padat Karya Kel. Loa bakung sebesar Rp186.033.000,00.
 - Langgar At Taqwa Jl.DI. Panjaitan RT.33 Kel.Temindung Permai sebesar Rp186.034.000,00.
 - Toilet At Taqqarub Jl. Anang Hasyim Kel. Air Hitam sebesar Rp186.043.000,00.
 - Gedung TPQ Jl. Barito KM 1 RT.19 Kel.Simpang Tiga sebesar Rp186.036.000,00.
 - Ruang Kelas TPA Nurrahman Jl. Mas Penghulu Gg. Mandala RT.08 Samarinda Seberang sebesar Rp185.952.000,00.
 - Masjid Babussalam Kec. Sungai Kunjang sebesar Rp2.032.031.400,00.
 - Mushola Al Ikhlas Kel. Lok Bahu sebesar Rp186.060.000,00.
 - Rumah Tahfiz Qur'an Nur Ashabul Qur'an Jalan Joyo Mulyo Kel.Lempake sebesar Rp82.086.000,00.
 - ❖ Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat (Kejaksanaan Tinggi) sebesar Rp2.830.274.000,00, terdiri dari:
 - Termin Ke-I 35% sebesar Rp990.595.900,00.
 - Termin Ke-II 50% sebesar Rp424.541.100,00.
 - Termin Ke III 75% sebesar Rp1.415.137.000,00.
4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang merupakan Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat sebesar Rp509.100.000,00.
5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari:
 - ❖ Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat sebesar Rp74.180.594.929,00.
 - Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur sebesar Rp15.000.000.000,00 .
 - BPJS Ketenagakerjaan Pemilu 2024 Kepesertaan Badan Pengawas Pemilu sebesar Rp47.514.994,00.
 - BPJS Ketenagakerjaan Pemilu 2024 Kepesertaan Komisi Pemilihan Umum sebesar Rp414.691.020,00.
 - Pengamanan Pemilihan Kepala Daerah kepada KODIM 0901 Kota Samarinda sebesar Rp4.240.337.500,00.
 - Pengamanan Pemilihan Kepala Daerah kepada POLRESTA Kota Samarinda sebesar Rp12.019.087.500,00
 - Komisi Pemilihan Umum sebesar Rp32.494.207.215,00.
 - Badan Pengawas Pemilu sebesar Rp10.570.909.200,00.
 - Pengembalian Kelebihan Dana Pemilihan Kepala Daerah 2024 POLRESTA Kota Samarinda sebesar Rp606.152.500,00.
 - ❖ Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penghitungan Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik Pemerintah Kota



Samarinda telah menganggarkan Belanja Hibah Bantuan Kepada Partai Politik sebesar Rp2.343.035.296,00 dan terealisasi sebesar Rp2.179.597.525,00 atau sebesar 93,02%.

Berikut daftar nama partai yang menerima bantuan keuangan partai politik berdasarkan Keputusan Wali Kota Samarinda Nomor 200.1.1/093/HK-KS/III/2024 tentang Daftar Penerima Bantuan Keuangan Partai Politik Kota Samarinda TA 2024 dan Keputusan Wali Kota Nomor 200.2.1/373/HK-KS/IX/2024 tentang Daftar Perubahan Penerima Bantuan Keuangan Partai Politik Kota Samarinda Tahun Anggaran 2024 Masa Bakti 2024-2029:

Tabel 5.1. 46 Rincian Anggaran dan Realisasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik di Kota Samarinda TA 2024

(dalam satuan rupiah)

NO	NAMA PARPOL	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023
1	DEMOKRAT	197.775.790,00	197.775.790,00	203.305.515,00	203.305.515,00
2	PDIP	356.891.995,00	356.891.995,00	387.442.560,00	387.442.560,00
3	PKS	216.390.335,00	216.390.355,00	221.315.820,00	221.315.820,00
4	PAN	185.875.225,00	185.875.225,00	186.470.160,00	186.470.160,00
5	HANURA	46.833.880,00	46.833.880,00	70.250.820,00	70.250.820,00
6	GERINDRA	420.287.075,00	420.287.075,00	367.239.015,00	367.239.015,00
7	NASDEM	222.880.555,00	222.880.555,00	207.915.795,00	207.915.795,00
8	GELORA	193.117.401,00	29.679.610,00	0,00	0,00
9	GOLKAR	274.983.060,00	274.983.060,00	223.184.550,00	223.184.550,00
10	PPP	103.578.370,00	103.578.370,00	112.224.510,00	112.224.510,00
11	PKB	124.421.610,00	124.421.610,00	119.296.590,00	119.296.590,00
JUMLAH		2.343.035.296,00	2.179.597.525,00	2.098.645.335,00	2.098.645.335,00

5.1.2.1.4 BELANJA BANTUAN SOSIAL

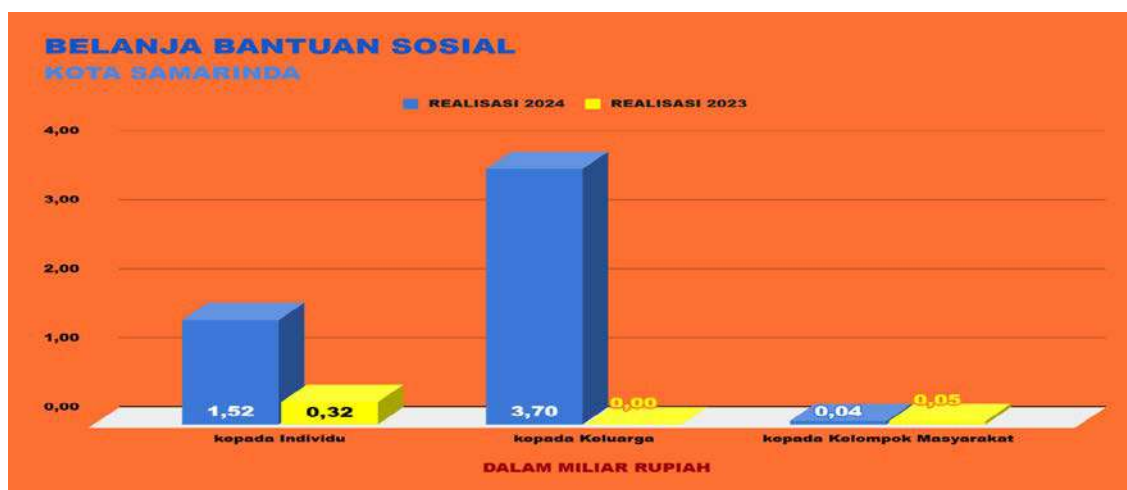
31-12-2024

31-12-2023

Rp5.260.947.258,00

Rp368.750.000,00

Gambar 5.1. 20 Diagram Proporsi Belanja Bantuan Sosial





Belanja Bantuan Sosial adalah pengeluaran berupa transfer uang, barang atau jasa yang diberikan oleh Pemerintah Pusat/Daerah kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Realisasi Belanja Bantuan Sosial Pemerintah Kota Samarinda dapat dirinci pada tabel berikut:

Tabel 5.1. 47 Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Kota Samarinda TA 2024

(dalam satuan rupiah)

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	LEBIH /KURANG	REALISASI 2023
1	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	1.515.900.000,00	1.515.550.250,00	99,98	(349.750,00)	323.000.000,00
2	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	3.726.000.000,00	3.701.397.008,00	99,34	(24.602.992,00)	0,00
3	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	56.000.000,00	44.000.000,00	78,57	(12.000.000,00)	45.750.000,00
JUMLAH		5.297.900.000,00	5.260.947.258,00	99,30	(36.952.742,00)	368.750.000,00

Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2024 sebesar Rp5.260.947.258,00 atau 99,30% dari anggaran sebesar Rp5.297.900.000,00. Dibandingkan realisasi TA 2023 sebesar Rp368.750.000,00 telah mengalami kenaikan sebesar Rp4.892.197.258,00 atau 1.326,70%, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1. 48 Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Kota Samarinda TA 2024

(dalam satuan rupiah)

NO	NAMA SKPD	BELANJA BANTUAN SOSIAL	
		REALISASI 2024	REALISASI 2023
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.515.550.250,00	0,00
2	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	3.745.397.008,00	368.750.000,00
JUMLAH		5.260.947.258,00	368.750.000,00

6.1.2.2. BELANJA MODAL

31-12-2024

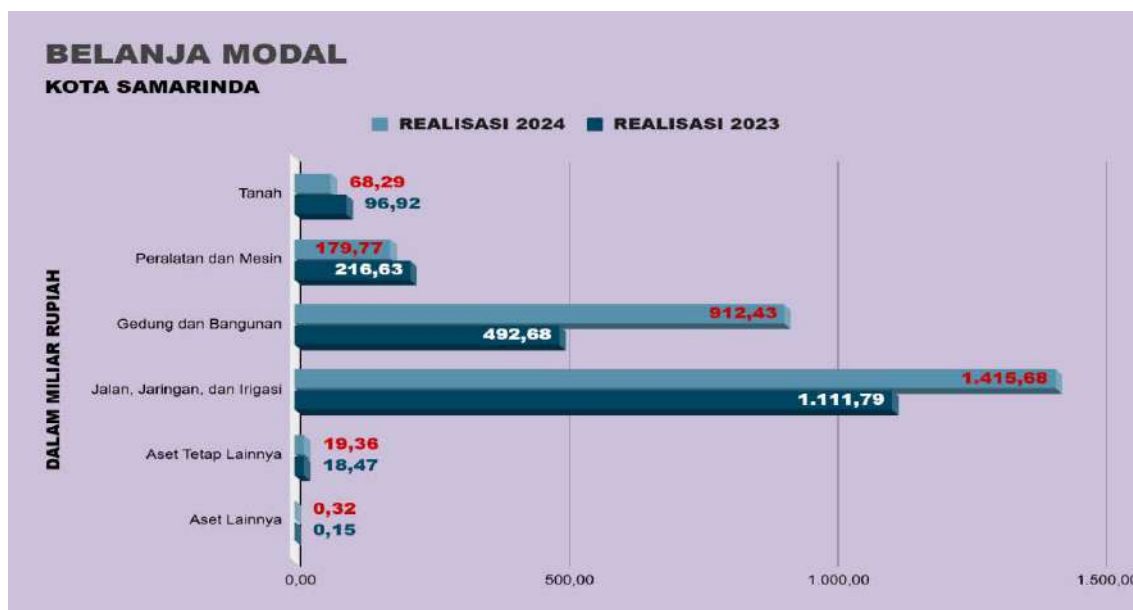
31-12-2023

Rp2.595.851.534.346,00

Rp1.936.638.601.701,21

f.

Gambar 5.1. 21 Diagram Belanja Modal



Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan, Belanja Modal merupakan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk didalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat serta meningkatkan kapasitas dan kualitas. Akun Belanja Modal merupakan pelaksanaan kegiatan berkaitan dengan pengadaan barang dalam rangka penambahan aset tetap daerah. Belanja Modal tersebut meliputi Pengadaan Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya dan Aset Lainnya. Berikut adalah Belanja Modal Pemerintah Kota Samarinda di tahun 2024 yang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.1. 49 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Kota Samarinda TA 2024

(dalam satuan rupiah)

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024				LEBIH /KURANG	REALISASI 2023
			MURNI	PEMBAYARAN UTANG	JUMLAH	%		
1	Belanja Modal Tanah	101.948.488.070,00	68.288.983.726,00	0,00	68.288.983.726,00	66,98	(33.659.504.344,00)	96.919.196.734,00
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	190.880.010.339,00	179.687.043.810,00	79.650.000,00	179.766.693.810,00	94,18	(11.113.316.529,00)	216.628.835.493,00
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	965.516.577.576,00	912.425.268.299,00	0,00	912.425.268.299,00	94,50	(53.091.309.277,00)	492.678.445.844,06
4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.464.582.915.419,00	1.415.682.927.225,00	0,00	1.415.682.927.225,00	96,66	(48.899.988.194,00)	1.111.790.641.599,15
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	31.899.092.000,00	19.363.811.286,00	0,00	19.363.811.286,00	60,70	(12.535.280.714,00)	18.471.632.031,00
6	Belanja Modal Aset Lainnya	2.138.800.000,00	323.850.000,00	0,00	323.850.000,00	15,14	(1.814.950.000,00)	149.850.000,00
JUMLAH		2.756.965.883.404,00	2.595.771.884.346,00	79.650.000,00	2.595.851.534.346,00	94,16	(161.114.349.058,00)	1.936.638.601.701,21

Dari tabel diatas terlihat di tahun 2024 Pemerintah Kota Samarinda telah menganggarkan Belanja Modal sebesar Rp2.756.965.883.404,00 dan telah terealisasi sebesar Rp2.595.851.534.346,00 atau 94,16%. Realisasi tersebut terdiri dari belanja murni sebesar Rp2.595.796.784.346,00 dan pembayaran utang sebesar Rp54.750.000,00. Dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal di tahun 2023 sebesar Rp1.936.638.601.701,21 mengalami kenaikan sebesar Rp659.212.932.644,79 atau 34,04%, dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 5.1. 50 Rincian Realisasi Belanja Modal per SKPD Kota Samarinda TA 2024

(dalam satuan rupiah)

NO	NAMA SKPD	BELANJA MODAL	
		REALISASI 2024	REALISASI 2023
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	219.357.435.681,00	75.797.838.057,00
2	Dinas Kesehatan	83.694.237.098,00	43.368.262.276,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.065.367.704.390,00	1.504.587.392.873,60
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	57.203.071.667,00	56.853.825.953,61
5	Satuan Polisi Pamong Praja	2.467.502.200,00	2.360.192.752,00
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.922.262.158,00	6.331.616.343,00
7	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	3.162.124.600,00	8.186.898.560,00
8	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	1.249.456.000,00	230.939.800,00
9	Dinas Tenaga Kerja	1.083.274.200,00	651.807.800,00
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	335.225.000,00	389.541.835,00
11	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	820.656.148,00	3.318.676.963,00
12	Dinas Lingkungan Hidup	1.741.564.300,00	5.159.858.925,00
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.402.425.000,00	711.180.000,00
14	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	3.157.036.400,00	2.073.442.195,00
15	Dinas Perhubungan	10.594.684.772,00	52.413.847.389,00
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	3.225.368.000,00	8.391.841.970,00
17	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	592.266.000,00	654.695.642,00
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	964.519.800,00	5.820.958.132,00
19	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	5.579.420.000,00	9.292.268.500,00
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.318.369.800,00	2.362.900.251,00
21	Dinas Perikanan	9.979.417.500,00	1.558.573.985,00
22	Dinas Perdagangan	8.827.526.000,00	45.310.731.213,00
23	Sekretariat Daerah	33.975.327.315,00	16.906.347.136,00
24	Inspektorat	1.260.051.050,00	1.676.481.100,00
25	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	1.868.494.100,00	2.076.378.000,00
26	Badan Pendapatan Daerah	3.120.863.500,00	1.696.571.859,00
27	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	54.902.464.800,00	67.785.520.415,00
28	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	787.800.000,00	2.177.677.500,00
29	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	2.458.924.500,00	1.297.363.000,00
30	Kecamatan Palaran	849.815.000,00	512.340.000,00
31	Kecamatan Samarinda Ilir	1.286.600.000,00	371.468.000,00
32	Kecamatan Samarinda Seberang	1.302.118.250,00	578.985.690,00
33	Kecamatan Samarinda Utara	1.159.330.000,00	649.117.800,00
34	Kecamatan Samarinda Ulu	1.215.644.100,00	1.028.999.000,00
35	Kecamatan Sungai Kunjang	944.385.200,00	322.663.000,00
36	Kecamatan Sambutan	882.720.917,00	487.996.000,00
37	Kecamatan Sungai Pinang	1.310.095.000,00	840.827.264,00
38	Kecamatan Samarinda Kota	1.015.634.200,00	943.813.228,00



NO	NAMA SKPD	BELANJA MODAL	
		REALISASI 2024	REALISASI 2023
39	Kecamatan Loa Janan Ilir	1.105.669.700,00	419.775.000,00
40	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	360.050.000,00	1.038.986.294,00
JUMLAH		2.595.851.534.346,00	1.936.638.601.701,21

5.1.2.2.1 BELANJA MODAL TANAH

31-12-2024

31-12-2023

Rp68.288.983.726,00

Rp96.919.196.734,00

Gambar 5.1. 22 Diagram Perbandingan Belanja Modal Tanah tahun 2024 dan 2023



Belanja Modal Tanah adalah pengeluaran yang dilakukan untuk pengadaan/pembelian/pembebasan, balik nama pematangan tanah sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan sampai tanah yang dimaksud dalam kondisi siap pakai. Belanja Modal Tanah Pemerintah Kota Samarinda TA 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.1. 51 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tanah Kota Samarinda TA 2024

(dalam satuan rupiah)

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024			%	LEBIH /KURANG	REALISASI 2023
			MURNI	PEMBAYARAN UTANG	JUMLAH			
1	Belanja Modal Tanah	101.948.488.070,00	68.288.983.726,00	0,00	68.288.983.726,00	66,98	(33.659.504.344,00)	96.919.196.734,00
	JUMLAH	101.948.488.070,00	68.288.983.726,00	0,00	68.288.983.726,00	66,98	(33.659.504.344,00)	96.919.196.734,00

Dari tabel diatas dapat dilihat tahun 2024 Pemerintah Kota Samarinda menganggarkan Belanja Modal Tanah sebesar Rp101.948.488.070,00 dan telah terealisasi sebesar Rp68.288.983.726,00 atau 66,98%. Realisasi tersebut terdiri dari belanja murni sebesar Rp68.288.983.726,00 dan pembayaran utang sebesar Rp0,00. Jika dibanding tahun 2023 realisasi belanja modal tanah sebesar Rp96.919.196.734,00 mengalami penurunan sebesar Rp28.630.213.008,00 atau 29,54%, dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 5.1. 52 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tanah Kota Samarinda TA 2024

(dalam satuan rupiah)

NO	NAMA SKPD	BELANJA MODAL TANAH	
		REALISASI 2024	REALISASI 2023
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	33.019.983.726,00	72.157.526.734,00
2	Sekretariat Daerah	28.519.000.000,00	0,00
3	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	6.750.000.000,00	24.761.670.000,00
JUMLAH		68.288.983.726,00	96.919.196.734,00

5.1.2.2.2 BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN

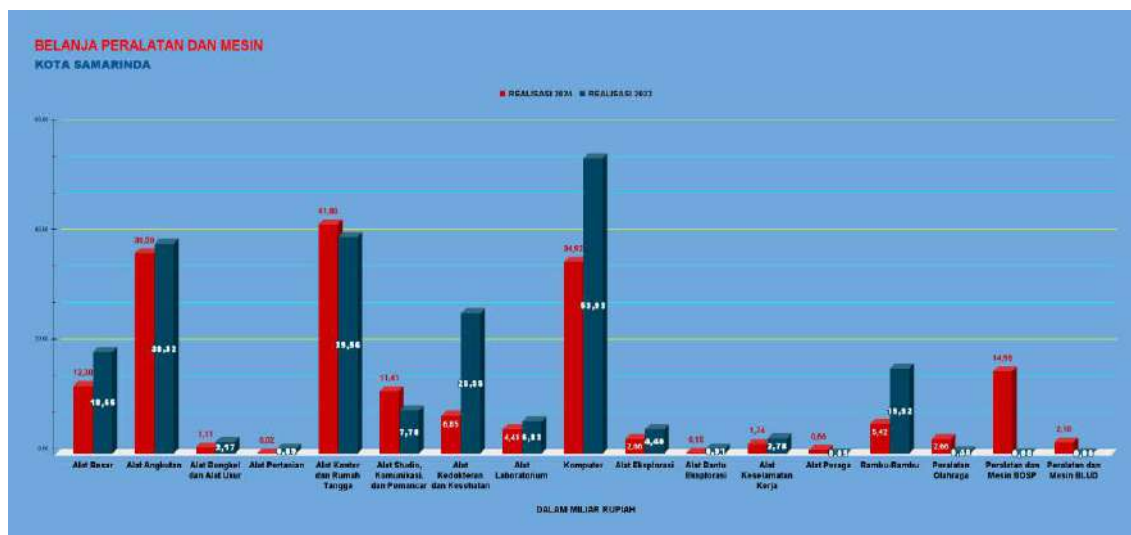
31-12-2024

31-12-2023

Rp179.766.693.810,00

Rp216.628.835.493,00

Gambar 5.1. 23 Diagram Proporsi Belanja Modal Peralatan dan Mesin



Belanja Modal Peralatan dan Mesin adalah pengeluaran untuk pengadaan peralatan dan mesin yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan antara lain biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan. Berikut rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Samarinda yang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.1. 53 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Kota Samarinda TA 2024

(dalam satuan rupiah)

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024		JUMLAH	%	LEBIH /KURANG	REALISASI 2023
			MURNI	PEMBAYARAN UTANG				
1	Belanja Modal Alat Besar	12.599.199.200,00	12.303.338.400,00	0,00	12.303.338.400,00	97,65	(295.860.800,00)	18.549.225.204,00
2	Belanja Modal Alat Angkutan	37.318.791.277,00	36.564.605.535,00	0,00	36.564.605.535,00	97,98	(754.185.742,00)	38.320.180.895,00
3	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	1.289.654.800,00	1.107.384.200,00	0,00	1.107.384.200,00	85,87	(182.270.600,00)	2.166.522.150,00
4	Belanja Modal Alat Pertanian	18.175.000,00	17.650.600,00	0,00	17.650.600,00	97,11	(524.400,00)	888.083.700,00
5	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	43.104.572.819,00	41.776.334.930,00	24.900.000,00	41.801.234.930,00	96,98	(1.303.337.889,00)	39.559.555.516,00
6	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	12.117.616.300,00	11.412.732.400,00	0,00	11.412.732.400,00	94,18	(704.883.900,00)	7.780.203.475,00



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
CATATAN UNTUK LAPORAN KEUANGAN
UNTUK YANG TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2024



NO	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024				LEBIH /KURANG	REALISASI 2023
			MURNI	PEMBAYARAN UTANG	JUMLAH	%		
7	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	7.128.753.000,00	6.854.992.398,00	0,00	6.854.992.398,00	96,16	(273.760.602,00)	25.547.831.341,00
8	Belanja Modal Alat Laboratorium	4.544.270.000,00	4.406.501.940,00	0,00	4.406.501.940,00	96,97	(137.768.060,00)	5.829.175.030,00
9	Belanja Modal Komputer	35.863.726.622,00	34.867.721.920,00	54.750.000,00	34.922.471.920,00	97,38	(941.254.702,00)	53.925.845.001,00
10	Belanja Modal Alat Eksplorasi	2.747.145.750,00	2.655.541.800,00	0,00	2.655.541.800,00	96,67	(91.603.950,00)	4.398.382.182,00
11	Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi	150.000.000,00	149.483.700,00	0,00	149.483.700,00	99,66	(516.300,00)	913.080.200,00
12	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	1.804.980.000,00	1.743.369.000,00	0,00	1.743.369.000,00	96,59	(61.611.000,00)	2.775.410.200,00
13	Belanja Modal Alat Peraga	671.100.000,00	663.265.400,00	0,00	663.265.400,00	98,83	(7.834.600,00)	54.478.500,00
14	Belanja Modal Rambu-Rambu	5.442.553.571,00	5.420.949.530,00	0,00	5.420.949.530,00	99,60	(21.604.041,00)	15.519.805.499,00
15	Belanja Modal Peralatan Olahraga	2.686.430.000,00	2.661.812.000,00	0,00	2.661.812.000,00	99,08	(24.618.000,00)	401.056.600,00
16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP	21.580.847.000,00	14.981.721.481,00	0,00	14.981.721.481,00	69,42	(6.599.125.519,00)	0,00
17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	1.812.195.000,00	2.099.638.576,00	0,00	2.099.638.576,00	115,86	287.443.576,00	0,00
JUMLAH		190.880.010.339,00	179.687.043.810,00	79.650.000,00	179.766.693.810,00	94,18	(11.113.316.529,00)	216.628.835.493,00

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2024 Pemerintah Kota Samarinda telah menganggarkan Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp190.880.010.339,00 dan telah terealisasi sebesar Rp179.766.693.810,00 atau 94,18%. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar Rp216.628.835.493,00 mengalami penurunan sebesar Rp36.862.141.683,00 atau 17,02% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1. 54 Rincian Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per SKPD Kota Samarinda TA 2024

(dalam satuan rupiah)

NO	NAMA SKPD	BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	
		REALISASI 2024	REALISASI 2023
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	28.999.918.401,00	30.020.496.322,00
2	Dinas Kesehatan	16.652.136.514,00	30.141.420.076,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	16.304.750.050,00	19.992.999.875,00
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.842.135.000,00	1.927.124.400,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja	2.421.212.200,00	2.360.192.752,00
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.919.862.158,00	6.256.616.343,00
7	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	3.162.124.600,00	8.186.898.560,00
8	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	1.204.186.000,00	230.939.800,00
9	Dinas Tenaga Kerja	1.083.274.200,00	651.807.800,00
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	335.225.000,00	389.541.835,00
11	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	711.729.400,00	1.609.462.460,00
12	Dinas Lingkungan Hidup	1.069.507.800,00	4.503.620.925,00
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.402.425.000,00	711.180.000,00
14	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	3.008.581.400,00	2.025.942.195,00
15	Dinas Perhubungan	7.713.403.230,00	25.720.514.759,00
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	3.219.968.000,00	8.391.841.970,00
17	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	592.266.000,00	644.070.642,00
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	964.519.800,00	5.721.671.632,00
19	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	4.869.800.000,00	1.118.894.000,00
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	985.559.800,00	1.142.702.500,00



NO	NAMA SKPD	BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	
		REALISASI 2024	REALISASI 2023
21	Dinas Perikanan	945.582.500,00	1.215.265.485,00
22	Dinas Perdagangan	4.531.505.000,00	7.668.953.513,00
23	Sekretariat Daerah	5.082.461.440,00	15.970.433.485,00
24	Inspektorat	1.260.051.050,00	1.519.742.100,00
25	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	1.868.494.100,00	1.876.378.000,00
26	Badan Pendapatan Daerah	3.120.863.500,00	1.696.571.859,00
27	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	47.957.614.800,00	24.611.440.429,00
28	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	646.550.000,00	1.875.677.500,00
29	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	2.458.924.500,00	1.297.363.000,00
30	Kecamatan Palaran	849.815.000,00	512.340.000,00
31	Kecamatan Samarinda Ilir	1.286.600.000,00	370.568.000,00
32	Kecamatan Samarinda Seberang	1.302.118.250,00	578.985.690,00
33	Kecamatan Samarinda Utara	1.159.330.000,00	649.117.800,00
34	Kecamatan Samarinda Ulu	1.215.644.100,00	1.028.999.000,00
35	Kecamatan Sungai Kunjang	944.385.200,00	322.663.000,00
36	Kecamatan Sambutan	882.720.917,00	477.996.000,00
37	Kecamatan Sungai Pinang	1.310.095.000,00	805.827.264,00
38	Kecamatan Samarinda Kota	1.015.634.200,00	943.813.228,00
39	Kecamatan Loa Janan Ilir	1.105.669.700,00	419.775.000,00
40	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	360.050.000,00	1.038.986.294,00
JUMLAH		179.766.693.810,00	216.628.835.493,00

5.1.2.2.3 BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN

31-12-2024

31-12-2023

Rp912.425.268.299,00

Rp492.678.445.844,06

Gambar 5.1. 24 Diagram Proporsi Belanja Modal Gedung dan Bangunan





Belanja Modal Gedung dan Bangunan adalah pengeluaran yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian gedung dan bangunan sampai dengan bangunan dan gedung dimaksud dalam kondisi siap digunakan.

Di tahun 2024 Pemerintah Kota Samarinda telah merealisasikan Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp912.425.268.299,00. Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan Pemerintah Kota Samarinda tahun 2024 diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 5.1. 55 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Kota Samarinda TA 2024

(dalam satuan rupiah)

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024			%	LEBIH /KURANG	REALISASI 2023
			MURNI	PEMBAYARAN UTANG	JUMLAH			
1	Belanja Modal Bangunan Gedung	961.492.484.576,00	908.435.608.904,00	0,00	908.435.608.904,00	94,48	(53.056.875.672,00)	463.832.609.058,06
2	Belanja Modal Monumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.600.000,00
3	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	4.024.093.000,00	3.989.659.395,00	0,00	3.989.659.395,00	99,14	(34.433.605,00)	28.796.236.786,00
	JUMLAH	965.516.577.576,00	912.425.268.299,00	0,00	912.425.268.299,00	94,50	(53.091.309.277,00)	492.678.445.844,06

Pemerintah Kota Samarinda tahun 2024 telah menganggarkan Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp965.516.577.576,00 dan terealisasi sebesar Rp912.425.268.299,00 atau 94,50%, realisasi tersebut merupakan belanja murni sebesar Rp912.425.268.299,00 dan pembayaran utang sebesar Rp0,00. Belanja Modal Gedung dan Bangunan telah mengalami kenaikan sebesar Rp419.746.822.454,94 atau 85,20%, Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar Rp492.678.455.844,06 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1. 56 Rincian Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Kota Samarinda TA 2024

(dalam satuan rupiah)

NO	NAMA SKPD	BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN	
		REALISASI 2024	REALISASI 2023
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	171.136.994.379,00	28.167.894.455,00
2	Dinas Kesehatan	63.142.195.876,00	13.176.842.200,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	640.061.156.593,00	370.274.126.884,00
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	20.398.361.786,00	11.233.317.787,06
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	75.000.000,00
6	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	108.926.748,00	476.774.050,00
7	Dinas Lingkungan Hidup	305.327.500,00	49.700.000,00
8	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	135.615.000,00	47.500.000,00
9	Dinas Perhubungan	2.864.081.542,00	3.559.180.031,00
10	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	492.560.000,00	7.734.411.500,00
11	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	687.044.000,00
12	Dinas Perikanan	8.927.512.000,00	184.218.100,00
13	Dinas Perdagangan	4.296.021.000,00	37.616.817.700,00
14	Sekretariat Daerah	343.865.875,00	789.218.651,00
15	Inspektorat	0,00	156.739.000,00
16	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	66.000.000,00	18.112.661.486,00
17	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	141.250.000,00	302.000.000,00
18	Kecamatan Sungai Pinang	0,00	35.000.000,00
19	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	0,00
20	Dinas Komunikasi dan Informatika	5.400.000,00	0,00
	JUMLAH	912.425.268.299,00	492.678.445.844,06



5.1.2.2.4 BELANJA MODAL JALAN, IIRIGASI DAN JARINGAN

31-12-2024

31-12-2023

Rp1.415.682.927.225,00

Rp1.111.790.641.599,15

Gambar 5.1. 25 Diagram Proporsi Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi



Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah pengeluaran untuk memperoleh jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan sampai siap pakai meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai. Dalam belanja ini termasuk biaya untuk penambahan dan penggantian yang meningkatkan masa manfaat, menambah nilai aset, dan diatas batas minimal nilai kapitalisasi jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan.

Tahun 2024 Pemerintah Kota Samarinda telah merealisasikan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp1.415.682.927.225,00. Rincian Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi Pemerintah Kota Samarinda tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.1. 57 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi TA 2024

(dalam satuan rupiah)

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024				LEBIH /KURANG	REALISASI 2023
			MURNI	PEMBAYARAN UTANG	JUMLAH	%		
1	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	692.020.876.485,00	662.119.494.107,00	0,00	662.119.494.107,00	95,68	(29.901.382.378,00)	616.462.032.927,15
2	Belanja Modal Bangunan Air	672.326.020.034,00	655.212.480.571,00	0,00	655.212.480.571,00	97,45	(17.113.539.463,00)	421.460.770.335,00
3	Belanja Modal Instalasi	89.017.692.900,00	87.149.561.547,00	0,00	87.149.561.547,00	97,90	(1.868.131.353,00)	67.533.797.937,00
4	Belanja Modal Jaringan	11.218.326.000,00	11.201.391.000,00	0,00	11.201.391.000,00	99,85	(16.935.000,00)	6.334.040.400,00
	Jumlah	1.464.582.915.419,00	1.415.682.927.225,00	0,00	1.415.682.927.225,00	96,66	(48.899.988.194,00)	1.111.790.641.599,15

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Pemerintah Kota Samarinda telah menganggarkan Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp1.464.582.915.419,00 dan telah terealisasi sebesar 96,66% atau Rp1.415.682.927.225,00. Realisasi tersebut terdiri dari belanja murni sebesar Rp1.415.682.927.225,00 dan pembayaran utang sebesar Rp0,00 jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar



Rp303.892.285.625,85 atau 27,33% dari realisasi sebesar Rp1.111.790.641.599,15 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1. 58 Rincian Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan per SKPD TA 2024

(dalam satuan rupiah)

NO	NAMA SKPD	BELANJA MODAL JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	
		REALISASI 2024	REALISASI 2023
1	Dinas Kesehatan	3.899.904.708,00	0,00
2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	365.581.615,00	335.404.000,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.375.981.814.021,00	1.042.162.739.380,60
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	34.962.574.881,00	43.693.383.766,55
5	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	0,00	1.232.440.453,00
6	Dinas Lingkungan Hidup	366.729.000,00	599.738.000,00
7	Dinas Perhubungan	0,00	23.124.152.599,00
8	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	44.730.000,00
9	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	0,00	438.963.000,00
10	Dinas Perikanan	106.323.000,00	159.090.400,00
JUMLAH		1.415.682.927.225,00	1.111.790.641.599,15

5.1.2.2.5 BELANJA MODAL ASET TETAP LAINNYA

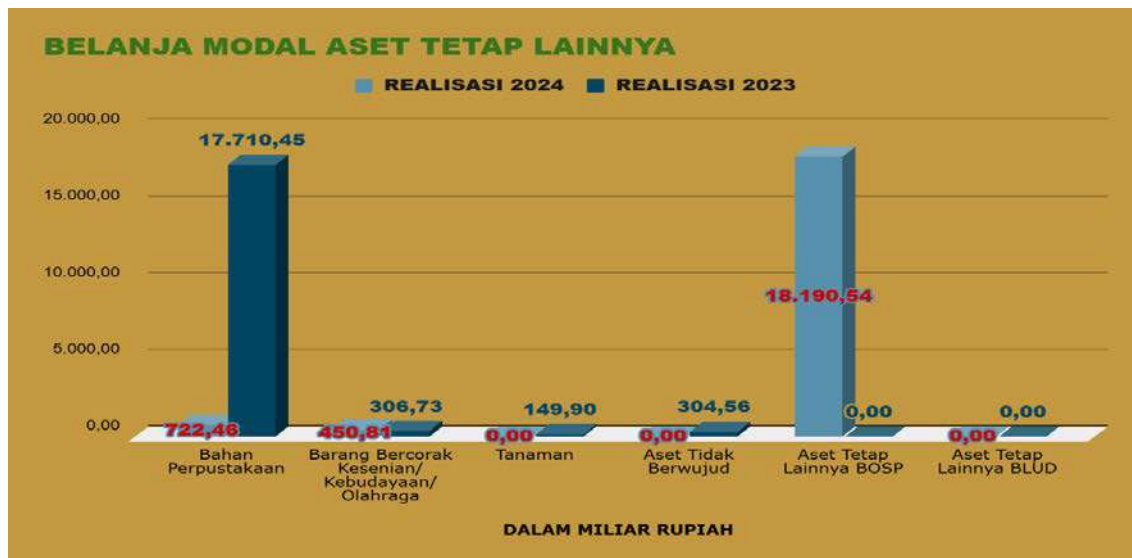
31-12-2024

31-12-2023

Rp19.363.811.286,00

Rp18.471.632.031,00

Gambar 5.1. 26 Diagram Proporsi Belanja Modal Aset Tetap lainnya



Belanja Modal Aset Tetap Lainnya adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian/peningkatan pembangunan/pembuatan serta perawatan terhadap fisik lainnya yang tidak dapat dikategorikan kedalam kriteria Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, dan Belanja



Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi. Tahun 2024 Pemerintah Kota Samarinda telah merealisasikan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp19.363.811.286,00 yang dapat diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 5.1. 59 Anggaran dan Realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya Kota Samarinda TA 2024

(dalam satuan rupiah)

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	LEBIH /KURANG	REALISASI 2023
1	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	790.440.000,00	722.456.596,00	91,40	(67.983.404,00)	17.710.451.231,00
2	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	457.524.000,00	450.810.000,00	98,53	(6.714.000,00)	306.725.800,00
3	Belanja Modal Tanaman	0,00	0,00	0,00	0,00	149.898.500,00
4	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	0,00	304.556.500,00
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP	30.551.128.000,00	18.190.544.690,00	59,54	(12.360.583.310,00)	0,00
6	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	100.000.000,00	0,00	0,00	(100.000.000,00)	0,00
	Jumlah	31.899.092.000,00	19.363.811.286,00	60,70	(12.535.280.714,00)	18.471.632.031,00

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Pemerintah Kota Samarinda telah menganggarkan Belanja Modal Aset Tetap lainnya sebesar Rp31.899.092.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp19.363.811.286,00 atau 60,70%. Jika dibandingkan dengan realisasi di tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp892.179.255,00 atau 4,83% dari realisasi sebesar Rp18.471.632.031,00.

Rincian realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya per SKPD dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.1. 60 Rincian Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya per SKPD TA 2024

(dalam satuan rupiah)

NO	NAMA SKPD	BELANJA MODAL ASET TETAP LAINNYA	
		REALISASI 2024	REALISASI 2023
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	18.854.941.286,00	17.274.043.280,00
2	Dinas Kesehatan	0,00	50.000.000,00
3	Satuan Polisi Pamong Praja	46.290.000,00	0,00
4	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	45.270.000,00	0,00
5	Dinas Lingkungan Hidup	0,00	6.800.000,00
6	Dinas Perhubungan	17.200.000,00	10.000.000,00
7	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	0,00	10.625.000,00
8	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	54.556.500,00
9	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	137.810.000,00	533.153.751,00
10	Dinas Perdagangan	0,00	24.960.000,00
11	Sekretariat Daerah	30.000.000,00	146.695.000,00
12	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	0,00	200.000.000,00
13	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	0,00	149.898.500,00
14	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.400.000,00	0,00
15	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	217.060.000,00	0,00
16	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	12.840.000,00	0,00



NO	NAMA SKPD	BELANJA MODAL ASET TETAP LAINNYA	
		REALISASI 2024	REALISASI 2023
17	Kecamatan Samarinda Ilir	0,00	900.000,00
18	Kecamatan Sambutan	0,00	10.000.000,00
JUMLAH		19.363.811.286,00	18.471.632.031,00

5.1.2.2.6 BELANJA ASET LAINNYA

31-12-2024

31-12-2023

Rp323.850.000,00

Rp149.850.000,00

Gambar 5.1. 27 Diagram Perbandingan Belanja Aset Lainnya tahun 2024 dan 2023



Belanja Aset Lainnya adalah aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Tahun 2024 Pemerintah Kota Samarinda telah merealisasikan Belanja Aset Lainnya sebesar Rp323.850.000,00 yang dapat diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 5.1. 61 Anggaran dan Realisasi Belanja Aset Lainnya Kota Samarinda TA 2024

(dalam satuan rupiah)

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	LEBIH /KURANG	REALISASI 2023
1	Belanja Modal Aset Lainnya- Aset Tidak Berwujud	326.000.000,00	323.850.000,00	99,34	(2.150.000,00)	149.850.000,00
2	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	1.812.800.000,00	0,00	0,00	(1.812.800.000,00)	0,00
Jumlah		2.138.800.000,00	323.850.000,00	15,14	(1.814.950.000,00)	149.850.000,00

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Pemerintah Kota Samarinda telah menganggarkan Belanja Aset Lainnya sebesar Rp2.138.800.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp323.850.000,00 atau 15,14%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023



mengalami kenaikan sebesar Rp174.000.000,00 atau 116,12% dari realisasi sebesar Rp149.850.000,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1. 62 Rincian Realisasi Belanja Aset Lainnya per SKPD TA 2024

(dalam satuan rupiah)

NO	NAMA SKPD	BELANJA ASSET LAINNYA	
		REALISASI 2024	REALISASI 2023
1	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	128.850.000,00	149.850.000,00
2	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	195.000.000,00	0,00
JUMLAH		323.850.000,00	149.850.000,00

5.1.2.3 BELANJA TIDAK TERDUGA

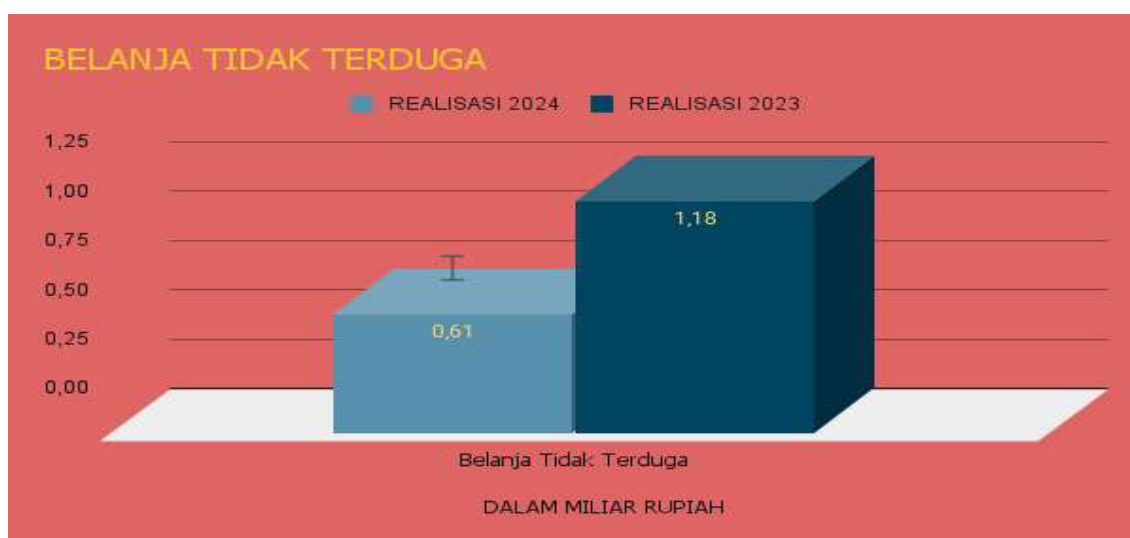
31-12-2024

31-12-2023

Rp609.253.467,00

Rp1.182.636.207,98

Gambar 5.1. 28 Diagram Perbandingan Belanja Tidak Terduga tahun 2024 dan 2023



Belanja Tidak Terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang bersifat tidak biasa atau tidak diharapkan akan terjadi seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup adapun pengaturan dan penetapan besaran santunan/bantuan.

Belanja Tidak Terduga Pemerintah Kota Samarinda untuk periode TA 2024 dapat dirinci pada tabel berikut.

Tabel 5.1. 63 Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Terduga Kota Samarinda TA 2024

(dalam satuan rupiah)

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	LEBIH /KURANG	REALISASI 2023
1	Belanja Tidak Terduga	1.500.000.000,00	609.253.467,00	40,62	(890.746.533,00)	1.182.636.207,98
Jumlah		1.500.000.000,00	609.253.467,00	40,62	(890.746.533,00)	1.182.636.207,98



Belanja Tidak Terduga untuk TA 2024 dianggarkan Rp1.500.000.000,00 terealisasi sebesar Rp609.253.467,00 atau 40,62%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar Rp1.182.636.207,98 mengalami penurunan sebesar Rp573.382.740,98 atau 48,48%.

Belanja Tidak Terduga Restitusi Pajak Daerah sebesar Rp609.253.467,00. Tabel Penjelasan Terkait Belanja Tidak Terduga Restitusi Pajak Daerah (Pengembalian Pajak Hiburan) Kota Samarinda TA 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1. 64 Rekap Belanja Tidak Terduga Restitusi Pajak Daerah (Pengembalian Pajak Hiburan)

(dalam satuan rupiah)

NO	TANGGAL	NO SP2D	URAIAN	NILAI
1	3/19/2024	64.72/04.0/000247/LS/5.02.0.00.0.00.02.0000/M/3/2024	Pengembalian Kelebihan Pembayaran pajak Hiburan atas nama KHAIRUL BASARI (SMAN 10 SAMARINDA) sesuai SK Kepala Bapenda Kota Samarinda NO: 067/439/300.03	4.014.000,00
JUMLAH				4.014.000,00

Tabel Penjelasan Terkait Belanja Tidak Terduga Restitusi Pajak Daerah (Pengembalian BPHTB) Kota Samarinda TA 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1. 65 Rekap Belanja Tidak Terduga Restitusi Pajak Daerah (Pengembalian BPHTB)

(dalam satuan rupiah)

NO	TANGGAL	NO SP2D	URAIAN	NILAI
1	23/04/2024	64.72/04.0/000418/LS/5.02.0.00.0.00.02.0000/M/4/2024	Pengembalian Kelebihan Pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) atas nama HARTATI Berdasarkan SK Kepala Bapenda Kota Samarinda No : 067/825/300.03	3.723.720,00
2	23/04/2024	64.72/04.0/000417/LS/5.02.0.00.0.00.02.0000/M/4/2024	Pengembalian Kelebihan Pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) atas nama FAISAL RIZAL Berdasarkan SK Kepala Bapenda Kota Samarinda No : 067/756/300.03	1.000.000,00
3	23/04/2024	64.72/04.0/000419/LS/5.02.0.00.0.00.02.0000/M/4/2024	Pengembalian Kelebihan Pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) atas nama SUANTO Berdasarkan SK Kepala Bapenda Kota Samarinda No : 067/700/300.03	12.000.000,00
4	22/05/2024	64.72/04.0/000555/LS/5.02.0.00.0.00.02.0000/M/5/2024	Pengembalian Kelebihan Pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) atas nama KUSRIYA BACHTIAR Berdasarkan SK Kepala Bapenda Kota Samarinda No : 067/1021/300.03	522.500,00
5	22/05/2024	64.72/04.0/000554/LS/5.02.0.00.0.00.02.0000/M/5/2024	Pengembalian Kelebihan Pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) atas nama MULIADI Berdasarkan SK Kepala Bapenda Kota Samarinda No : 067/1040/300.03	21.250.000,00
6	22/05/2024	64.72/04.0/000552/LS/5.02.0.00.0.00.02.0000/M/5/2024	Pengembalian Kelebihan Pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) atas nama CHAIRUL ANAM Berdasarkan SK Kepala Bapenda Kota Samarinda No : 067/1027/300.03	8.319.250,00
7	22/05/2024	64.72/04.0/000553/LS/5.02.0.00.0.00.02.0000/M/5/2024	Pengembalian Kelebihan Pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) atas nama MULIADI Berdasarkan SK Kepala Bapenda Kota Samarinda No : 067/1041/300.03	27.000.000,00
8	3/7/2024	64.72/04.0/000727/LS/5.02.0.00.0.00.02.0000/M/7/2024	Pengembalian Kelebihan Pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) atas nama LISTYAWATI Berdasarkan SK Kepala Bapenda Kota Samarinda No : 067/1221/300.03	5.000.000,00
9	5/9/2024	64.72/04.0/001015/LS/5.02.0.00.0.00.02.0000/P4/9/2024	Pengembalian Kelebihan Pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) atas nama SADIRIN Berdasarkan SK Kepala Bapenda Kota Samarinda No : 067 / 2013 / 300.03	1.570.000,00



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
CATATAN UNTUK LAPORAN KEUANGAN
UNTUK YANG TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2024



NO	TANGGAL	NO SP2D	URAIAN	NILAI
10	5/9/2024	64.72/04.0/001008/LS/5.02.0.00.0.00.02.0000/P4/9/2024	Pengembalian Kelebihan Pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) atas nama SUYANTO Berdasarkan SK Kepala Bapenda Kota Samarinda No : 067 / 1878 / 300.03	3.000.000,00
11	5/9/2024	64.72/04.0/001014/LS/5.02.0.00.0.00.02.0000/P4/9/2024	Pengembalian Kelebihan Pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) atas nama Tahun 2023 atas nama PT. BESI KALIMANTAN ABADI Sesuai SK Walikota Kota Samarinda No : 900.1.13 / 302 / HK - KS / VII / 2024	351.150.525,00
12	18/09/2024	64.72/04.0/001060/LS/5.02.0.00.0.00.02.0000/P4/9/2024	Pengembalian Kelebihan Pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) atas nama ADAWIYAH ARISA PUTRI SESUAI Berdasarkan SK Kepala Bapenda Kota Samarinda No : 900.1.13.1 / 1085 / E.III-SK / VI / 300.03 / 2024	1.422.600,00
13	18/09/2024	64.72/04.0/001056/LS/5.02.0.00.0.00.02.0000/P4/9/2024	Pengembalian Kelebihan Pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) atas nama IRAWAN HADINATA Berdasarkan SK Kepala Bapenda Kota Samarinda No : 067 / 1609 / 300.03	6.000.000,00
JUMLAH				441.958.595,00

Tabel Penjelasan Terkait Belanja Tidak Terduga Restitusi Pajak Daerah (Pengembalian Pajak Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah) Kota Samarinda TA 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1. 66 Rekap Belanja Tidak Terduga Restitusi Pajak Daerah (Pengembalian Pajak Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah) Kota Samarinda TA 2024

(dalam satuan rupiah)

NO	TANGGAL	NO SP2D	URAIAN	NILAI
1	13/05/2024	64.72/04.0/000496/LS/5.02.0.00.0.00.02.0000/M/5/2024	Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pemakaian Kekayaan Daerah atas nama BAKSO ANUGRAH Sesuai SK Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Samarinda No : 900.1.3.10/45/100.06.7/IV/2024	14.583.333,00
2	13/05/2024	64.72/04.0/000494/LS/5.02.0.00.0.00.02.0000/M/5/2024	Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pemakaian Kekayaan Daerah atas nama RR JERSEY Sesuai SK Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Samarinda No : 900.1.3.10/48/100.06.7/IV/2024	14.583.333,00
3	13/05/2024	64.72/04.0/000495/LS/5.02.0.00.0.00.02.0000/M/5/2024	Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pemakaian Kekayaan Daerah atas nama BUSAM.ID Sesuai SK Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Samarinda No : 900.1.3.10/44/100.06.7/IV/2024	12.500.000,00
4	13/05/2024	64.72/04.0/000493/LS/5.02.0.00.0.00.02.0000/M/5/2024	Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pemakaian Kekayaan Daerah atas nama CAFE & EATRY BUSAM AREA Sesuai SK Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Samarinda No : 900.1.3.10/42/100.06.7/IV/2024	12.500.000,00
5	13/05/2024	64.72/04.0/000491/LS/5.02.0.00.0.00.02.0000/M/5/2024	Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pemakaian Kekayaan Daerah atas nama RR JERSEY Sesuai SK Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Samarinda No : 900.1.3.10/49/100.06.7/IV/2024	11.666.667,00
6	13/05/2024	64.72/04.0/000492/LS/5.02.0.00.0.00.02.0000/M/5/2024	Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pemakaian Kekayaan Daerah atas nama CAFE & EATRY BUSAM AREA Sesuai SK Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Samarinda No : 900.1.3.10/43/100.06.7/IV/2024	12.500.000,00
7	13/05/2024	64.72/04.0/000490/LS/5.02.0.00.0.00.02.0000/M/5/2024	Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pemakaian Kekayaan Daerah atas nama MAHAKARYA WEDDING ORGANIZER Sesuai SK Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Samarinda No : 900.1.3.10/46/100.06.7/IV/2024	8.750.000,00
8	13/05/2024	64.72/04.0/000489/LS/5.02.0.00.0.00.02.0000/M/5/2024	Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pemakaian Kekayaan Daerah atas nama MAHAKARYA WEDDING ORGANIZER Sesuai SK Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Samarinda No : 900.1.3.10/47/100.06.7/IV/2024	35.000.000,00
JUMLAH				122.083.333,00



5.1.3 SURPLUS (DEFISIT) REALISASI ANGGARAN

Surplus (Defisit) APBD merupakan selisih lebih (kurang) antara pendapatan daerah dan belanja daerah pada tahun anggaran yang sama. Tahun 2024 realisasi pendapatan daerah sebesar Rp5.177.088.647.963,90 dan Belanja daerah sebesar Rp5.478.480.866.415,92 dihasilkan Defisit sebesar Rp301.392.218.452,02. Tahun 2023 mengalami defisit sebesar Rp402.990.513.026,75 mengalami kenaikan sebesar Rp101.598.294.574,73 atau 25,21%.

5.1.4 PEMBIAYAAN

Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksud untuk menutup selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Pembiayaan Pemerintah Kota Samarinda meliputi Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah, dengan anggaran dan realisasi TA 2024, realisasi TA 2024 dapat dirinci sebagai berikut:

5.1.4.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN

Penerimaan Pembiayaan merupakan semua penerimaan rekening kas umum daerah yang bersifat sementara dan akan dibayar kembali atau diterima kembali pada tahun anggaran yang sama atau tahun anggaran berikutnya. Penerimaan pembiayaan daerah bersumber dari:

1. SiLPA, yaitu sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya.
2. Pencairan dana cadangan, yaitu dana yang disisihkan untuk mengatasi risiko fiskal.
3. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, yaitu aset daerah yang dijual untuk mendapatkan pendapatan.
4. Penerimaan pinjaman daerah, yaitu dana yang dipinjam dari pihak lain dengan syarat dan jangka waktu tertentu.
5. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah, yaitu dana yang dikembalikan oleh pihak yang menerima pinjaman dari daerah.
6. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yaitu sumber-sumber lain yang tidak termasuk dalam kategori diatas.

Penerimaan pembiayaan daerah digunakan untuk menutup defisit anggaran atau mengalokasikan surplus anggaran. Adapun anggaran dan realisasi TA 2024 dan realisasi 2023 dapat dirinci pada tabel berikut.

Tabel 5.1. 67 Rincian Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan Kota Samarinda TA 2024

(dalam satuan rupiah)

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	LEBIH /KURANG	REALISASI 2023
1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	585.644.678.700,00	585.740.067.685,58	100,02	95.388.985,58	998.635.191.776,33
	Jumlah	585.644.678.700,00	585.740.067.685,58	100,02	95.388.985,58	998.635.191.776,33

Tabel diatas menunjukkan realisasi pembiayaan APBD tahun 2024 sebesar Rp585.740.067.685,58 atau 100,02% dari anggaran sebesar Rp585.644.678.700,00 mengalami penurunan sebesar Rp412.895.124.090,75 atau 41,35% dibanding realisasi tahun 2023 sebesar Rp998.635.191.776,33.



Realisasi tersebut terdiri dari:

- Pelampauan Penerimaan PAD sebesar Rp104.417.906.067,93.
- Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer sebesar Rp71.505.781.359,00.
- Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp426.290.844,00.
- Penghematan Belanja sebesar Rp409.256.716.702,32.
- Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp37.983.776,33.
- Sisa Belanja Lainnya sebesar Rp95.388.936,00.

5.1.4.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran rekening kas umum daerah yang bersifat sementara dan akan diterima kembali pada tahun anggaran yang sama atau tahun anggaran berikutnya. Pengeluaran pembiayaan daerah meliputi:

- Pemberian pinjaman daerah, yaitu dana yang diberikan kepada pihak lain dengan syarat dan jangka waktu tertentu.
- Pembayaran pokok utang, yaitu dana yang digunakan untuk melunasi kewajiban pokok pinjaman daerah.
- Penyertaan modal, yaitu dana yang digunakan untuk membeli saham atau modal perusahaan yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah daerah.
- Pembentukan dana cadangan, yaitu dana yang disisihkan untuk mengatasi risiko fiskal.
- Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yaitu sumber-sumber lain yang tidak termasuk dalam kategori diatas.

Pengeluaran pembiayaan daerah digunakan untuk mengalokasikan surplus anggaran atau menutup defisit anggaran. Adapun anggaran dan realisasi TA 2024 dan realisasi 2023 dapat dirinci pada tabel berikut.

Tabel 5.1. 68 Rincian Anggaran dan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Kota Samarinda TA 2024

(dalam satuan rupiah)

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	LEBIH /KURANG	REALISASI 2023
1	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000.000,00
	Jumlah	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000.000,00

Tabel diatas menunjukkan realisasi penyertaan modal daerah tahun 2024 sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari anggaran sebesar Rp0,00 mengalami penurunan sebesar Rp10.000.000.000,00 atau 100,00% dibanding realisasi tahun 2023 sebesar Rp10.000.000.000,00.

5.1.4.3 PEMBIAYAAN NETTO

Pembiayaan Netto merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan yang dikeluarkan selama kurun waktu tertentu. Tahun 2024 pembiayaan netto dianggarkan sebesar Rp585.644.678.700,00 dan direalisasikan sebesar Rp585.740.067.685,58 atau 100,02%, jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar Rp988.635.191.776,33 mengalami penurunan sebesar Rp402.895.124.090,75 atau 40,75%.



5.1.5 SISA LEBIH PEMBIAYAAN APBD (SILPA)

Sisa Perhitungan Anggaran merupakan Sisa Lebih Pembiayaan APBD (SiLPA) atau Sisa Kurang Pembiayaan APBD (SiKPA), yang menunjukkan selisih lebih atau kurang pendapatan dan penerimaan dibanding belanja dan pengeluaran daerah, dapat dijelaskan sebagai berikut:

PENDAPATAN		5.177.088.647.963,90
Pendapatan Asli Daerah	973.231.612.768,21	
Pendapatan Transfer	4.138.073.600.326,00	
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	65.783.434.869,69	
BELANJA		5.478.480.866.415,92
PEMBIAYAAN NETTO		585.740.067.685,58
SiLPA 2024	284.347.849.233,56	

f.



5.2 PENJELASAN AKUN-AKUN LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada suatu tahun anggaran dapat terjadi keadaan realisasi keuangan yang lebih atau kurang dan menyebabkan terjadinya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) atau Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SiKPA). Saldo Anggaran Lebih (SAL) merupakan akumulasi SiLPA atau SiKPA tahun anggaran yang lalu dan tahun anggaran yang bersangkutan, setelah ditutup ditambah/dikurangi dengan koreksi pembukuan tahun sebelumnya.

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL) menyajikan pos – pos berikut yaitu: Saldo Anggaran Lebih Awal (saldo tahun sebelumnya), Penggunaan Saldo Anggaran Lebih, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) tahun berjalan, Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun Sebelumnya, Lain-lain dan Saldo Anggaran Lebih Akhir untuk periode berjalan. Pos-pos tersebut disajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya. LP-SAL dimaksudkan untuk memberikan ringkasan atas pemanfaatan saldo anggaran dan pembiayaan pemerintah, sehingga suatu entitas pelaporan harus menyajikan rinci lebih lanjut dari unsur – unsur yang terdapat di LP-SAL dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

Laporan Perubahan SAL Kota Samarinda TA 2024 terlihat dalam tabel 5.2.1 berikut:

Tabel 5.2. 1 Laporan Perubahan SAL 2024 dan 2023 Pemerintah Kota Samarinda

(dalam satuan rupiah)

URAIAN	2024	2023
Saldo Anggaran Lebih Awal	585.644.678.749,58	998.597.208.979,33
Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	585.740.067.685,58	998.635.191.776,33
Sub Total	(95.388.936,00)	(37.982.797,00)
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran(SiLPA/SiKPA)	284.347.849.233,56	585.644.678.749,58
Sub Total	284.252.460.297,56	585.606.695.952,58
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	95.388.936,00	37.982.797,00
Lain-lain	0,00	0,00
Saldo Anggaran Lebih Akhir	284.347.849.233,56	585.644.678.749,58

5.2.1 SALDO ANGGARAN LEBIH AWAL

Saldo Anggaran Lebih adalah gunggung saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan. Saldo tersebut merupakan penerimaan pembiayaan tahun berjalan yang digunakan untuk menutup defisit anggaran tahun 2023.

Saldo Anggaran Lebih Awal per 31 Desember 2024 Pemerintah Kota Samarinda yang merupakan nilai akhir tahun sebelumnya sebesar Rp585.644.678.749,58 yang bersumber dari:



Tabel 5.2. 2 Rincian SAL Awal 2024 dan 2023 Pemerintah Kota Samarinda

(dalam satuan rupiah)

NO	URAIAN	2024	2023
1	Kas di Kas Daerah	323.019.812.517,12	968.565.793.892,26
2	Kas di Bendahara Penerimaan	7.167.000,00	0,00
3	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	895.840.628,60	420.792.826,17
4	Kas Dana BOS	79.000.439,00	71.114.765,00
5	Kas di BLUD	11.642.858.164,86	29.539.507.495,90
6	Setara Kas	250.000.000.000,00	0,00
JUMLAH		585.644.678.749,58	998.597.208.979,33

5.2.2 PENGGUNAAN SAL SEBAGAI PENERIMAAN PEMBIAYAAN TAHUN BERJALAN

Saldo Penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan awal per 31 Desember 2024 Pemerintah Kota Samarinda sebesar Rp585.740.067.685,58. Jumlah tersebut merupakan Saldo Penggunaan SAL yang berasal dari Rekening Pembiayaan Penerimaan Daerah Atas Penggunaan SiLPA tahun berjalan.

Saldo tersebut adalah SiLPA Pemerintah Kota Samarinda pada TA 2023 yang dialokasikan sebagai penerimaan pembiayaan pada TA 2024 dan digunakan seluruhnya dalam kegiatan operasional serta pembiayaan Pemerintah Kota Samarinda selama TA 2024.

Untuk saldo SiLPA TA 2024, penggunaannya sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan mengalami perbedaan dengan saldo SiLPA dalam LRA TA 2023 dikarenakan adanya koreksi penyajian atas kesalahan pengakuan SiLPA Pemerintah Kota Samarinda sebagaimana diungkapkan dalam tabel 5.2.4 dibawah.

5.2.3 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN ANGGARAN (SiLPA/SIKPA)

SiLPA adalah selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan atau selisih lebih antara realisasi Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan dengan Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan Pada LRA selama satu periode pelaporan.

Saldo SiLPA Pemerintah Kota Samarinda tahun 2024 sebesar Rp284.347.849.233,56 diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 5.2. 3 Rincian SiLPA Kota Samarinda TA 2024

(dalam satuan rupiah)

URAIAN	2024	2023
Pendapatan	5.177.088.647.963,90	4.026.969.291.270,93
Belanja	5.478.480.866.415,92	4.429.959.804.297,68
Surplus/(Defisit)	(301.392.218.452,02)	(402.990.513.026,75)
Pembiayaan Netto	585.740.067.685,58	988.635.191.776,33
JUMLAH	284.347.849.233,56	585.644.678.749,58



Penjelasan atas tabel diatas sebagai berikut:

1. Pendapatan Pemerintah Kota Samarinda tahun 2024 sebesar Rp5.177.088.647.963,90 terdiri dari:
 - a. Pendapatan Asli Daerah Rp973.231.612.768,21.
 - b. Pendapatan Transfer Rp4.138.073.600.326,00.
 - c. Lain-lain Pendapatan yang Sah Rp65.783.434.869,69.
2. Belanja Pemerintah Kota Samarinda tahun 2024 sebesar Rp5.478.480.866.415,92 terdiri dari:
 - a. Belanja Operasi Rp2.882.020.078.602,92.
 - b. Belanja Modal Rp2.595.851.534.346,00
 - c. Belanja Tidak Terduga Rp609.253.467,00.
3. Surplus/defisit sebesar Rp301.392.218.452,02 yang merupakan hasil pengurangan antara Pendapatan Rp5.177.088.647.963,90 dan Belanja Rp5.478.480.866.415,92.
4. Penerimaan Pembiayaan Pemerintah Kota Samarinda tahun 2024 sebesar Rp585.740.067.685,58 yang terdiri:
 - a. Pelampauan Penerimaan PAD Rp104.417.906.067,93.
 - b. Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer Rp71.505.781.359,00
 - c. Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp426.290.844,00
 - d. Penghematan Belanja sebesar Rp409.256.716.702,32.
 - e. Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp37.983.776,33.
 - f. Sisa Belanja Lainnya sebesar Rp95.388.936,00
5. Pembiayaan Netto tahun 2024 sebesar Rp585.740.067.685,58.
6. SiLPA tahun 2024 sebesar Rp284.347.849.233,56.

5.2.4 KOREKSI KESALAHAN PEMBUKUAN TAHUN SEBELUMNYA

Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya mencerminkan penyesuaian atas kesalahan pencatatan yang terjadi pada periode sebelumnya yang baru ditemukan pada tahun berjalan. Koreksi ini dilakukan untuk menyajikan informasi keuangan yang lebih andal dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Tahun 2024, dilakukan koreksi terhadap kesalahan pembukuan yang terjadi pada tahun sebelumnya yang dirincikan sebagai berikut:

Tabel 5.2. 4 Rincian Saldo Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun Sebelumnya

(dalam satuan rupiah)

NO	URAIAN	2024	2023
1	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	95.388.936,00	37.982.797,00
JUMLAH		95.388.936,00	37.982.797,00



Koreksi tersebut terdiri dari:

1. Sisa Saldo BOS Rp66.972.015,00.
2. Sisa Kas di BLUD Rp6.008.920,00.
3. Sisa Kas BOSNAS PAUD Swasta Rp22.408.001,00.

5.2.5 SALDO ANGGARAN LEBIH AKHIR

SAL akhir merupakan akumulasi SiLPA tahun anggaran yang lalu dan tahun anggaran yang bersangkutan setelah ditutup ditambah/dikurangi dengan lain-lain. Nilai akumulatif SAL akhir sampai dengan tahun 2024 adalah sebesar Rp284.347.849.233,56. Jika dibandingkan dengan SAL Akhir tahun 2023 sebesar Rp585.644.678.749,58 mengalami penurunan sebesar Rp301.296.829.516,02 atau 51,45%.

Tabel 5.2. 5 Rincian Saldo Anggaran Lebih Akhir Kota Samarinda TA 2024

(dalam satuan rupiah)

NO	URAIAN	2024	2023
1	Kas di Kas Daerah	269.101.732.918,17	323.019.812.517,12
2	Kas di Bendahara Penerimaan	3.990.000,00	7.167.000,00
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	22.790.530,00	0,00
4	Kas di BLUD	13.872.667.628,14	11.642.858.164,86
5	Kas Dana BOS	355.149.379,00	79.000.439,00
6	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	991.518.778,25	895.840.628,60
7	Setara Kas	0,00	250.000.000.000,00
JUMLAH		284.347.849.233,56	585.644.678.749,58



5.3 PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Neraca Pemerintah Daerah Kota Samarinda dapat menggambarkan kondisi keuangan mengenai Harta atau Aset, Kewajiban dan Ekuitas.

5.3.1 ASET

Posisi Aset per 31 Desember 2024 dengan nilai Rp21.014.643.214.971,11 mengalami penurunan sebesar Rp884.870.479.738,45 atau sebesar 4,40% dibandingkan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp20.129.772.735.232,66 yang dirinci pada tabel berikut:

Tabel 5.3. 1 Perbandingan Nilai Aset

(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	2024	2023	Kenaikan / (Penurunan)	%
1	Aset	21.014.643.214.971,11	20.129.772.735.232,66	884.870.479.738,45	4,40
	Jumlah	21.014.643.214.971,11	20.129.772.735.232,66	884.870.479.738,45	4,40

Jumlah Aset terdiri atas Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap dan Aset Lainnya dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3. 2 Rincian Aset

(dalam satuan Rupiah)

No	Uraian	2024	2023	Kenaikan / (Penurunan)	%
1	Aset Lancar	711.369.602.730,33	920.883.397.708,79	(209.513.794.978,46)	(22,75)
2	Investasi Jangka Panjang	652.436.557.819,19	614.557.680.115,22	37.878.877.703,97	6,16
3	Aset Tetap	18.250.901.905.883,98	16.638.462.114.744,70	1.612.439.791.139,28	9,69
4	Properti Investasi	539.600.794.717,81	522.205.886.500,00	17.394.908.217,81	3,33
5	Aset Lainnya	860.334.353.819,80	1.433.663.656.163,95	(573.329.302.344,15)	(39,99)
	Jumlah	21.014.643.214.971,11	20.129.772.735.232,66	884.870.479.738,45	4,40

5.3.1.1 ASET LANCAR

Aset diklasifikasikan sebagai Aset Lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Nilai Aset Lancar per 31 Desember 2024 sebesar Rp711.369.602.730,33 dan mengalami penurunan sebesar Rp209.513.794.978,46 atau sebesar 22,75% dibandingkan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp920.883.397.708,79, dengan komposisi sebagai berikut:



Tabel 5.3. 3 Rincian Aset Lancar

(dalam satuan Rupiah)

No	Uraian	2024	2023	Kenaikan / (Penurunan)	%
1	Kas di Kas Daerah	269.101.732.918,17	323.019.812.517,12	(53.918.079.598,95)	(16,69)
2	Kas di Bendahara Penerimaan	3.990.000,00	7.167.000,00	(3.177.000,00)	(44,33)
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	22.790.530,00	0,00	22.790.530,00	100,00
4	Kas di BLUD	13.872.667.628,14	11.642.858.164,86	2.229.809.463,28	19,15
5	Kas Dana BOS	355.149.379,00	79.000.439,00	276.148.940,00	349,55
6	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	991.518.778,25	895.840.628,60	95.678.149,65	10,68
7	Kas Lainnya	1.956.189,00	540.102,00	1.416.087,00	262,19
8	Setara Kas	0,00	250.000.000.000,00	(250.000.000.000,00)	(100,00)
9	Piutang Pajak Daerah	330.321.076.289,48	281.135.272.868,01	49.185.803.421,47	17,50
10	Piutang Retribusi Daerah	25.755.169.654,50	27.160.446.858,50	(1.405.277.204,00)	(5,17)
11	Piutang Lain-lain PAD yang sah	10.748.124.284,25	4.547.156.266,86	6.200.968.017,39	136,37
12	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	0,00	220.000,00	(220.000,00)	(100,00)
13	Piutang Transfer Antar Daerah	143.034.789.000,00	46.082.846.000,00	96.951.943.000,00	210,39
14	Piutang Lainnya	3.773.237.691,29	51.958.076.168,68	(48.184.838.477,39)	(92,74)
15	Penyisihan Piutang	(156.497.541.368,44)	(165.748.901.991,19)	(9.251.360.622,75)	(5,58)
16	Beban Dibayar Dimuka	7.493.603.953,67	34.102.495.895,06	(26.608.891.941,39)	(78,03)
17	Persediaan	62.391.337.803,02	56.000.566.791,29	6.390.771.011,73	11,41
Jumlah		711.369.602.730,33	920.883.397.708,79	(209.513.794.978,46)	(22,75)

5.3.1.1.1 KAS

Kas merupakan pos neraca yang paling likuid, pos ini menunjukkan saldo Kas dan Setara Kas Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 yang dikuasai oleh Bendahara Umum Daerah (BUD), Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di BLUD, Kas Dana BOS dan Kas Dana Kapitasi pada FKTP, Kas Lainnya, serta Setara Kas. Saldo Kas per 31 Desember 2024 sebesar Rp284.349.805.422,56. Mengalami penurunan sebesar Rp301.295.413.429,02 atau



51,45% jika dibandingkan per 31 Desember 2023 sebesar Rp585.645.218.851,58 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3. 4 Rincian Kas

(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	2024	2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Kas di Kas Daerah	269.101.732.918,17	323.019.812.517,12	(53.918.079.598,95)	(16,69)
2	Kas di Bendahara Penerimaan	3.990.000,00	7.167.000,00	(3.177.000,00)	(44,33)
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	22.790.530,00	0,00	22.790.530,00	100,00
4	Kas di BLUD	13.872.667.628,14	11.642.858.164,86	2.229.809.463,28	19,15
5	Kas Dana Bos	355.149.379,00	79.000.439,00	276.148.940,00	349,55
6	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	991.518.778,25	895.840.628,60	95.678.149,65	10,68
7	Kas Lainnya	1.956.189,00	540.102,00	1.416.087,00	262,19
8	Setara Kas	0,00	250.000.000.000,00	(250.000.000.000,00)	(100,00)
	Jumlah	284.349.805.422,56	585.645.218.851,58	(301.295.413.429,02)	(51,45)

5.3.1.1.1.1 KAS DI KAS DAERAH

31-12-2024

31-12-2023

Rp269.101.732.918,17

Rp323.019.812.517,12

Kas di Kas Daerah merupakan saldo Kas Daerah yang tersimpan dalam rekening Kas Daerah Pemerintah Kota Samarinda pada Bank Kaltimtara dengan Nomor Rekening 0011300114 a/n RKUD Kota Samarinda per 31 Desember 2024 sebesar Rp269.101.732.918,17. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp53.918.079.598,95 atau sebesar 16,69% dibandingkan saldo tahun 2023 sebesar Rp323.019.812.517,12.

5.3.1.1.1.2 KAS DI BENDAHARA PENERIMAAN

31-12-2024

31-12-2023

Rp 3.990.000,00

Rp7.167.000,00

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan Per 31 Desember 2024 sebesar Rp3.990.000,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp3.177.000,00 atau sebesar 44,33% jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp7.167.000,00 merupakan saldo kas yang dikelola oleh Bendahara Penerimaan untuk tujuan pelaksanaan penerimaan di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan disetorkan pada tanggal 23 Januari 2025. Berikut ini adalah rincian nilai Kas di Bendahara Penerimaan:



Tabel 5.3. 5 Rincian Kas di Bendahara Penerimaan

(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	2024	2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Dinas Kesehatan	3.990.000,00	245.000,00	3.745.000,00	1.528,57
2	Dinas Perhubungan	0,00	6.922.000,00	(6.922.000,00)	(100,00)
Jumlah		3.990.000,00	7.167.000,00	(3.177.000,00)	(44,33)

5.3.1.1.1.3 KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN

31-12-2024

31-12-2023

Rp22.790.530,00

Rp0,00

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Per 31 Desember 2024 sebesar Rp22.790.530,00 yang merupakan setoran sisa Uang Persediaan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda tahun 2024 yang di setorkan pada tanggal 04 Januari 2025.

5.3.1.1.1.4 KAS DI BLUD

31-12-2024

31-12-2023

Rp13.872.667.628,14

Rp11.642.858.164,86

Saldo ini merupakan saldo kas yang terdapat di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Kota Samarinda. Untuk tahun 2024 total BLUD bertambah menjadi 21 BLUD yang terdiri dari 1 (satu) RSUD, 19 (Sembilan belas) Puskesmas dan 1 (satu) Laboratorium Kesehatan Daerah. Pada tahun 2023 BLUD Kota Samarinda yang terdiri dari 1 (satu) RSUD, 15 (Lima belas) Puskesmas dan 1 (satu) Laboratorium Kesehatan Daerah. Saldo kas di BLUD per tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp13.872.667.628,14 dan mengalami kenaikan sebesar Rp2.229.809.463,28 atau 19,15% dibandingkan dengan saldo kas per 31 Desember 2023 sebesar Rp11.642.858.164,86 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3. 6 Rincian Kas di BLUD

(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	2024	2023	Kenaikan / (Penurunan)	%
1	Kas Di Rekening BLUD	11.312.212.268,26	10.976.830.709,58	335.381.558,68	3,06
2	Kas di Bendahara Penerimaan	27.874.167,16	61.475.185,70	(33.601.018,54)	(54,66)
3	Kas dana BOK	2.450.700.707,01	524.839.306,00	1.925.861.401,01	366,94
4	Kas di Bendahara Pengeluaran	81.880.485,71	79.712.963,58	2.167.522,13	2,72
Jumlah		13.872.667.628,14	11.642.858.164,86	2.229.809.463,28	19,15



Berikut ini merupakan rincian Saldo Kas di BLUD yaitu:

(dalam satuan Rupiah)

Saldo Kas Per 31 Desember 2024						
No	Uraian	Kas di Rekening BLUD	Kas di Bendahara Penerimaan	Kas di BOK	Kas di Bendahara Pengeluaran	Jumlah Kas
1	RSUD I.A Moeis	5.851.166.997,35	18.664.537,16	0,00	49.264.782,00	5.919.096.316,51
2	LABKESDA Kota Samarinda	642.753.199,50	540.000,00	0,00	12.282,20	643.305.481,70
3	Puskesmas Kampung Baqa	92.755.567,14	0,00	71.093.113,00	642.735,00	164.491.415,14
4	Puskesmas Segiri	222.281.873,93	0,00	260.780.111,00	0,00	483.061.984,93
5	Puskesmas Sungai Siring	68.758.490,24	0,00	17.375.194,00	0,00	86.133.684,24
6	Puskesmas Trauma Center	858.523.339,64	35.700,00	188.192.119,00	0,00	1.046.751.158,64
7	Puskesmas Temindung	241.001.453,06	0,00	159.196.427,00	271.457,87	400.469.337,93
8	Puskesmas Wonorejo	386.985.947,22	0,00	136.737.506,00	0,00	523.723.453,22
9	Puskesmas Bantuas	61.611.245,70	0,00	100.907.837,00	2.411.135,00	164.930.217,70
10	Puskesmas Lempake	300.697.348,85	0,00	175.181.700,00	12.718.256,00	488.597.304,85
11	Puskesmas Air Putih	140.082.755,42	0,00	202.828.122,00	3.520.218,58	346.431.096,00
12	Puskesmas Palaran	336.390.548,12	4.969.000,00	73.595.129,00	0,00	414.954.677,12
13	Puskesmas Samarinda Kota	256.972.724,03	0,00	15.487.554,00	0,00	272.460.278,03
14	Puskesmas Bengkuring	171.041.510,40	0,00	265.446.405,00	2.330.395,00	438.818.310,40
15	Puskesmas Karang Asam	289.090.105,75	0,00	13.011.659,00	0,00	302.101.764,75
16	Puskesmas Sidomulyo	381.106.561,00	3.225.000,00	254.831.160,00	1.155.307,00	640.318.028,00
17	Puskesmas Lok bahu	128.711.758,30	0,00	58.693.985,00	0,00	187.405.743,30
18	Puskesmas Makroman	151.391.157,89	0,00	19.465.664,00	139.974,00	170.996.795,89
19	Puskesmas Juanda	181.366.433,00	439.930,00	327.388.086,01	9.347.861,06	518.542.310,07
20	Puskesmas Bukuan	305.817.814,72	0,00	32.661.520,00	0,00	338.479.334,72
21	Puskesmas Harapan Baru	243.705.437,00	0,00	77.827.416,00	66.082,00	321.598.935,00
TOTAL		11.312.212.268,26	27.874.167,16	2.450.700.707,01	81.880.485,71	13.872.667.628,14

5.3.1.1.1.5 KAS DANA BOS

31-12-2024

31-12-2023

Rp355.149.379,00

Rp79.000.439,00

Saldo ini merupakan saldo Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang terdapat pada Kas Dana BOS per 31 Desember 2024 sebesar Rp355.149.379,00 mengalami kenaikan sebesar Rp276.148.940,00 atau sebesar 349,55% dibandingkan dengan saldo Kas Dana BOS per 31 Desember 2023 sebesar Rp79.000.439,00 dengan rincian sebagai berikut:

f.



Tabel 5.3. 7 Rincian Kas Dana BOS

(dalam satuan Rupiah)

No.	SKPD	2024	2023	Kenaikan / (Penurunan)	%
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan				
1	Pendidikan Anak Usia Dini Negeri	7.063.700,00	27,00	7.063.673,00	26.161.751,85
2	Pendidikan Anak Usia Dini Swasta	106.250.229,00	0,00	106.250.229,00	100,00
3	Kesetaraan Negeri	581.978,00	0,00	581.978,00	100,00
4	Kesetaraan Swasta	29.777.471,00	0,00	29.777.471,00	100,00
5	Sekolah Dasar Negeri	40.909.636,00	65.962.287,00	(25.052.651,00)	(37,98)
6	Sekolah Dasar Swasta	91.863.351,00	0,00	91.863.351,00	100,00
7	Sekolah Menengah Pertama Negeri	25.899.264,00	13.038.125,00	12.861.139,00	98,64
8	Sekolah Menengah Pertama Swasta	52.803.750,00	0,00	52.803.750,00	100,00
Jumlah		355.149.379,00	79.000.439,00	276.148.940,00	349,55

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa:

1. Pendidikan Anak Usia Dini Negeri
Saldo per 31 Desember 2024 senilai Rp7.063.700,00 mengalami kenaikan sebesar Rp7.063.673,00 atau 26.161.751,85% dari saldo per 31 Desember 2023 yaitu Rp27,00.
2. Pendidikan Anak Usia Dini Swasta
Saldo per 31 Desember 2024 senilai Rp106.250.229,00 mengalami kenaikan sebesar Rp106.250.229,00 atau 100% dari saldo per 31 Desember 2023 yaitu Rp0,00.
3. Kesetaraan Negeri
Saldo per 31 Desember 2024 senilai Rp581.978,00 mengalami kenaikan sebesar Rp581.978,00 atau 100% dari saldo per 31 Desember 2023 yaitu Rp0,00.
4. Kesetaraan Swasta
Saldo per 31 Desember 2024 senilai Rp29.777.471,00 mengalami kenaikan sebesar Rp29.777.471,00 atau 100% dari saldo per 31 Desember 2023 yaitu Rp0,00.
5. Sekolah Dasar Negeri
Saldo per 31 Desember 2024 senilai Rp40.909.636,00 mengalami penurunan sebesar Rp25.052.651,00 atau 37,98% dari saldo per 31 Desember 2023 yaitu Rp65.962.287,00.
6. Sekolah Dasar Swasta
Saldo per 31 Desember 2024 senilai Rp91.863.351,00 mengalami kenaikan sebesar Rp91.863.351,00 atau 100% dari saldo per 31 Desember 2023 yaitu Rp0,00.
7. Sekolah Menengah Pertama Negeri
Saldo per 31 Desember 2024 senilai Rp25.899.264,00 mengalami kenaikan sebesar Rp12.861.139,00 atau 98,64% dari saldo per 31 Desember 2023 yaitu Rp13.038.125,00.
8. Sekolah Menengah Pertama Swasta
Saldo per 31 Desember 2024 senilai Rp52.803.750,00 mengalami kenaikan sebesar Rp52.803.750,00 atau 100% dari saldo per 31 Desember 2023 yaitu Rp0,00.



Berikut ini merupakan rincian dari Saldo Kas Dana BOS tahun 2024:

(dalam satuan Rupiah)

Kas Dana BOS		2024
	Saldo Audited 2023	79.000.439,00
+	Koreksi Tambah Kas Bosnas Swasta TA. 2024	89.380.016,00
+	Pendapatan BOSNAS TA. 2024	131.314.447.849,00
-	Realisasi Belanja BOSNAS TA.2024	131.112.078.925,00
-	Pengembalian Dana Bos ke RKUD TA. 2024	15.600.000,00
Jumlah Kas dana BOS		355.149.379,00

5.3.1.1.1.6 KAS DANA KAPITASI PADA FKTP

31-12-2024

31-12-2023

Rp991.518.778,25

Rp895.840.628,60

Saldo ini merupakan saldo Kas Dana Kapitasi FKTP per 31 Desember 2024 sebesar Rp991.518.778,25 dan mengalami kenaikan sebesar Rp95.678.149,65 atau sebesar 10,68% jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp895.840.628,60. Berikut rincian Kas Dana Kapitasi pada FKTP:

Tabel 5.3. 8 Rincian Kas Dana Kapitasi pada FKTP

(dalam satuan Rupiah)

No.	SKPD	2024	2023	Kenaikan / (Penurunan)	%
1	Dinas Kesehatan	991.518.778,25	895.840.628,60	95.678.149,65	10,68
Jumlah		991.518.778,25	895.840.628,60	95.678.149,65	10,68

Berikut ini merupakan rincian dari Saldo Kas Dana Kapitasi pada FKTP yaitu:

Tabel 5.3. 9 Rincian Kas Dana Kapitasi Pada FKTP

(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	2024	2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Puskesmas Sidomulyo (BLUD di 2024)	0,00	216.869.872,00	(216.869.872,00)	(100,00)
2	Puskesmas Sempaja	128.960.781,00	45.768.147,00	83.192.634,00	181,77
3	Puskesmas Sambutan	73.216.368,83	37.640.027,83	35.576.341,00	94,52
4	Puskesmas Remaja	126.129.936,00	75.152.828,00	50.977.108,00	67,83
5	Puskesmas Sungai Kapih	121.181.076,00	62.504.315,00	58.676.761,00	93,88
6	Puskesmas Pasundan	91.572.700,32	80.638.223,32	10.934.477,00	13,56
7	Puskesmas Karang Asam (BLUD di 2024)	0,00	40.945.883,45	(40.945.883,45)	(100,00)
8	Puskesmas Juanda (BLUD di 2024)	0,00	84.239.735,00	(84.239.735,00)	(100,00)
9	Puskesmas Loa Bakung	211.108.928,00	42.702.770,00	168.406.158,00	394,37
10	Puskesmas Mangkupalas	239.348.988,10	157.013.414,00	82.335.574,10	52,44



No.	Uraian	2024	2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
11	Puskesmas Harapan Baru (BLUD di 2024)	0,00	52.365.413,00	(52.365.413,00)	(100,00)
Jumlah		991.518.778,25	895.840.628,60	95.678.149,65	10,68

Berikut ini merupakan rincian dari Saldo Kas Dana Kapitasi pada FKTP yaitu:

Tabel 5.3. 10 Rincian Kas JKN dan BOK

No.	Uraian	JKN	BOK	Saldo
1	Puskesmas Sempaja	36.066.255,00	92.894.526,00	128.960.781,00
2	Puskesmas Sambutan	50.574.254,83	22.642.114,00	73.216.368,83
3	Puskesmas Remaja	63.902.824,00	62.227.112,00	126.129.936,00
4	Puskesmas Sungai Kapih	29.001.831,00	92.179.245,00	121.181.076,00
5	Puskesmas Pasundan	36.075.398,32	55.497.302,00	91.572.700,32
6	Puskesmas Loa Bakung	38.679.517,00	172.429.411,00	211.108.928,00
7	Puskesmas Mangkupalas	39.515.564,10	199.833.424,00	239.348.988,10
Jumlah		293.815.644,25	697.703.134,00	991.518.778,25

Saldo Kas JKN tersebut disimpan pada rekening Bank Kaltimtara masing-masing puskesmas. Rincian saldo buku Kas di Bendahara Penerimaan JKN per 31 Desember 2024 dengan rincian sebagai berikut:

(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	No Rekening	Saldo Kas JKN		Jumlah
			Bank	Tunai	
1	Puskesmas Sempaja	0011458734	36.066.255,00	0,00	36.066.255,00
2	Puskesmas Sambutan	0011457916	50.113.754,83	460.500,00	50.574.254,83
3	Puskesmas Remaja	0011451004	63.894.378,00	8.446,00	63.902.824,00
4	Puskesmas Sungai Kapih	0011457860	28.756.508,00	245.323,00	29.001.831,00
5	Puskesmas Pasundan	0011457932	35.726.659,32	348.739,00	36.075.398,32
6	Puskesmas Loa Bakung	0011457975	38.637.490,00	42.027,00	38.679.517,00
7	Puskesmas Mangkupalas	0011457835	39.515.564,10	0,00	39.515.564,10
Jumlah			292.710.609,25	1.105.035,00	293.815.644,25

Saldo Kas BOK tersebut disimpan pada rekening Bank Negara Indonesia masing-masing puskesmas. Rincian saldo buku Kas di Bendahara Penerimaan BOK per 31 Desember 2024 dengan rincian sebagai berikut.

(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	No Rekening	Saldo Kas BOK
1	Puskesmas Sempaja	1590082630	92.894.526,00
2	Puskesmas Sambutan	1590082607	22.642.114,00
3	Puskesmas Remaja	1590082743	62.227.112,00
4	Puskesmas Sungai Kapih	1590082618	92.179.245,00
5	Puskesmas Pasundan	1590082710	55.497.302,00
6	Puskesmas Loa Bakung	1590082709	172.429.411,00
7	Puskesmas Mangkupalas	1590082618	199.833.424,00
Jumlah			697.703.134,00



5.3.1.1.1.7 KAS LAINNYA

31-12-2024

31-12-2023

Rp1.956.189,00

Rp540.102,00

Saldo ini merupakan saldo yang terdapat pada Kas Lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.956.189,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp1.416.087,00 atau sebesar 262,19% jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp540.102,00. Berikut rincian Kas Lainnya:

Tabel 5.3. 11 Rincian Kas Lainnya

(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	2024	2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Kas di Bendahara BLUD	0,00	43.200,00	(43.200,00)	(100,00)
2	Kas di Bendahara Pengeluaran SKPD	1.956.189,00	496.902,00	1.459.287,00	293,68
Jumlah		1.956.189,00	540.102,00	1.416.087,00	262,19

Berikut ini merupakan rincian dari Saldo Kas Lainnya pada SKPD yaitu:

Tabel 5.3. 12 Rincian Kas Lainnya pada SKPD

(dalam satuan Rupiah)

No.	SKPD	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	Kecamatan Samarinda Ulu	50.007,00	
	Jumlah	50.007,00	
2	Kecamatan Palaran		
	Kelurahan Handil Bhakti	1.000.000,00	Utang Belanja Jasa Kantor-Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia
	Jumlah	1.000.000,00	
3	Kecamatan Samarinda Utara		
	Kelurahan Sempaja Utara	806.182,00	Utang Belanja - Uang Pokmas
	Kelurahan Sempaja Timur	100.000,00	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-Barang Pakai Habis-Barang Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat
	Jumlah	906.182,00	
	Jumlah Kas lainnya	1.956.189,00	

5.3.1.1.1.8 SETARA KAS

31-12-2024

31-12-2023

Rp0,00

Rp250.000.000.000,00

Saldo ini merupakan saldo yang terdapat pada Setara Kas per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp250.000.000.000,00 atau sebesar 100% jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2023 sebesar



Rp250.000.000.000,00, Karena telah dilakukan pencairan atas seluruh deposito yang dimiliki Pemerintah Kota Samarinda tahun 2024.

5.3.1.1.2 PIUTANG

31-12-2024

31-12-2023

Rp357.134.855.551,08

Rp245.135.116.170,86

Piutang Daerah merupakan hak Pemerintah Kota Samarinda yang berupa penerimaan kas, baik yang berasal dari pendapatan yang belum diterima secara kas maupun tagihan-tagihan lain, saldo Piutang per 31 Desember 2024 dan 2023 sebagai berikut:

Tabel 5.3. 13 Perbandingan Nilai Piutang

(dalam satuan Rupiah)

Piutang	2024	2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Piutang Pajak Daerah	330.321.076.289,48	281.135.272.868,01	49.185.803.421,47	17,50
Piutang Retribusi Daerah	25.755.169.654,50	27.160.446.858,50	(1.405.277.204,00)	(5,17)
Piutang Lain-lain PAD yang sah	10.748.124.284,25	4.547.156.266,86	6.200.968.017,39	136,37
Piutang Transfer Pemerintah Pusat	0,00	220.000,00	(220.000,00)	(100,00)
Piutang Transfer Antar Daerah	143.034.789.000,00	46.082.846.000,00	96.951.943.000,00	210,39
Piutang Lainnya	3.773.237.691,29	51.958.076.168,68	(48.184.838.477,39)	(92,74)
Penyisihan Piutang	(156.497.541.368,44)	(165.748.901.991,19)	(9.251.360.622,75)	(5,58)
Jumlah Piutang	357.134.855.551,08	245.135.116.170,86	111.999.739.380,22	45,69

5.3.1.1.2.1 PIUTANG PAJAK DAERAH

31-12-2024

31-12-2023

Rp330.321.076.289,48

Rp281.135.272.868,01

Saldo Piutang Pajak adalah piutang pendapatan pajak, baik yang berasal dari perikatan ataupun perundang-undangan yang belum dilunasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2024. Ditetapkan berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Terutang (SPPDT), Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD), SK Pembetulan, SK Keberatan dan SK Pengurangan. Saldo Piutang Pajak Pemerintah Kota Samarinda yang dipungut melalui Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda Per 31 Desember 2024 sebesar Rp330.321.076.289,48 mengalami kenaikan sebesar Rp49.185.803.421,47 atau 17,50% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp281.135.272.868,01. Berikut ini adalah rincian nilai Piutang Pajak:



Tabel 5.3. 14 Tabel Piutang Pajak Daerah

(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	2024	2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Pajak Hotel:	1.432.175.402,51	2.673.401.714,73	(1.241.226.312,22)	(46,43)
	Pajak Hotel	1.221.521.571,51	2.588.439.435,73	(1.366.917.864,22)	(52,81)
	Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pajak Losmen	172.224.731,00	58.153.179,00	114.071.552,00	196,16
	Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	38.429.100,00	26.809.100,00	11.620.000,00	43,34
2	Pajak Restoran:	14.165.215.541,24	10.477.018.377,98	3.688.197.163,26	35,20
	Pajak Restoran dan sejenisnya	3.564.181.308,16	1.549.811.428,80	2.014.369.879,36	129,98
	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	8.230.887.370,08	6.873.369.229,18	1.357.518.140,90	19,75
	Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	964.403.955,00	671.783.126,00	292.620.829,00	43,56
	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	1.395.902.558,00	1.378.307.044,00	17.595.514,00	1,28
	Pajak Warung dan Sejenisnya	7.968.500,00	2.596.900,00	5.371.600,00	206,85
	Pajak Kantin dan Sejenisnya	1.871.850,00	1.150.650,00	721.200,00	62,68
3	Pajak Hiburan:	3.196.090.776,25	3.149.725.884,80	46.364.891,45	1,47
	Pajak Tontonan Film	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/T ari/ Busana	314.329.755,00	9.977.000,00	304.352.755,00	3.050,54
	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	431.463.195,68	2.368.906.072,00	(1.937.442.876,32)	(81,79)
	Pajak Permainan Biliar dan Bowling	245.660.892,00	133.492.972,00	112.167.920,00	84,03
	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	366.526.165,97	124.327.147,80	242.199.018,17	194,81
	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa, dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	1.737.734.767,60	412.646.693,00	1.325.088.074,60	321,12
	Pajak Pertandingan Olahraga	100.376.000,00	100.376.000,00	0,00	0,00
4	Pajak Reklame:	2.736.007.399,50	3.280.441.443,50	(544.434.044,00)	(16,60)
	Pajak Reklame Papan/Billboard/ Videotron/Megatr on	2.545.222.473,50	3.097.969.183,50	(552.746.710,00)	(17,84)
	Pajak Reklame Kain	182.534.926,00	121.222.260,00	61.312.666,00	50,58
	Pajak Reklame Berjalan	8.250.000,00	61.250.000,00	(53.000.000,00)	(86,53)
5	Pajak Penerangan Jalan:	920.627.528,00	920.697.368,00	(69.840,00)	(0,01)



No.	Uraian	2024	2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	920.627.528,00	920.697.368,00	(69.840,00)	(0,01)
6	Pajak Air Bawah Tanah:	15.875.125,00	20.947.005,00	(5.071.880,00)	(24,21)
7	PBB-P2	307.171.065.776,98	259.862.778.058,00	47.308.287.718,98	18,21
8	Pajak Parkir	651.331.740,00	719.113.015,00	(67.781.275,00)	(9,43)
9	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya	31.487.000,00	19.500.000,00	11.987.000,00	61,47
10	Pajak Sarang Burung Walet	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
11	BPHTB	0,00	10.450.001,00	(10.450.001,00)	(100,00)
	Jumlah	330.321.076.289,48	281.135.272.868,01	49.185.803.421,47	17,50

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa:

1. Piutang Pajak Hotel
Saldo per 31 Desember 2024 senilai Rp1.432.175.402,51 mengalami penurunan sebesar Rp1.241.226.312,22 atau 46,43% dari saldo per 31 Desember 2023 yaitu Rp2.673.401.714,73.
2. Piutang Pajak Restoran
Saldo per 31 Desember 2024 senilai Rp14.165.215.541,24 mengalami kenaikan sebesar Rp3.688.197.163,26 atau 35,20% dari saldo per 31 Desember 2023 yaitu Rp10.477.018.377,98.
3. Piutang Pajak Hiburan
Saldo per 31 Desember 2024 senilai Rp3.196.090.776,25 mengalami kenaikan sebesar Rp46.364.891,45 atau 1,47% dari saldo per 31 Desember 2023 yaitu Rp3.149.725.884,80.
4. Piutang Pajak Reklame
Saldo per 31 Desember 2024 senilai Rp2.736.007.399,50 mengalami penurunan sebesar Rp544.434.044,00 atau 16,60% dari saldo per 31 Desember 2023 yaitu Rp3.280.441.443,50.
5. Piutang Pajak Penerangan Jalan
Saldo per 31 Desember 2024 senilai Rp920.627.528,00 mengalami penurunan sebesar Rp69.840,00 atau 0,01% dari saldo per 31 Desember 2023 yaitu Rp920.697.368,00.
6. Piutang Pajak Air Tanah
Saldo per 31 Desember 2024 senilai Rp15.875.125,00 mengalami penurunan sebesar Rp5.071.880,00 atau 24,21% dari saldo per 31 Desember 2023 yaitu Rp20.947.005,00.
7. Piutang Pajak Bumi Bangunan
Saldo per 31 Desember 2024 senilai Rp307.171.065.776,98 mengalami kenaikan sebesar Rp47.308.287.718,98 atau 18,21% dari saldo per 31 Desember 2023 yaitu Rp259.862.778.058,00.
8. Piutang Pajak Parkir
Saldo per 31 Desember 2024 senilai Rp651.331.740,00 mengalami penurunan sebesar Rp67.781.275,00 atau 9,43% dari saldo per 31 Desember 2023 yaitu Rp719.113.015,00.



9. Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya
Saldo per 31 Desember 2024 senilai Rp 31.487.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp 11.987.000,00 atau 61,47% dari Saldo Tahun 2023 yaitu Rp19.500.000,00.
10. Piutang Pajak Sarang Burung Walet
Saldo per 31 Desember 2024 senilai Rp1.200.000,00 tidak mengalami perubahan dari Saldo Tahun 2023 yaitu Rp1.200.000,00.
11. Piutang Pajak BPHTB
Saldo per 31 Desember 2024 senilai Rp0,00 mengalami penurunan sebesar Rp10.450.001,00 atau 100,00% dari saldo per 31 Desember 2023 yaitu Rp10.450.001,00.

f.



Tabel 5.3. 15 Tabel Piutang Pajak berdasarkan kriteria kualitas

(dalam satuan Rupiah)

No.	Jenis Pajak	Piutang Per Tahun 2024				Saldo Piutang Pajak Per 31 Desember 2024
		< Tahun 2019 (>5 Tahun)	Tahun 2019 - 2021 (3 < 5 Tahun)	Tahun 2022 (1<2 Tahun)	Tahun 2023 (0 < 12 Bulan)	
		Macet	Diragukan	Kurang Lancar	Lancar	
1	Pajak Hotel	247.302.767,73	414.260.379,00	135.115.682,00	635.496.573,78	1.432.175.402,51
	Pajak Hotel	244.490.280,73	393.647.379,00	133.230.582,00	450.153.329,78	1.221.521.571,51
	Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya	0,00	0,00	0,00		0,00
	Pajak Losmen	2.812.487,00	1.332.500,00	0,00	168.079.744,00	172.224.731,00
	Pajak Pesanggrahan	0,00	0,00	0,00		0,00
	Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	0,00	19.280.500,00	1.885.100,00	17.263.500,00	38.429.100,00
2	Pajak Restoran	798.883.902,38	3.917.497.516,17	2.616.045.011,71	6.832.789.110,97	14.165.215.541,24
	Pajak Restoran dan sejenisnya	42.646.328,80	107.055.343,00	186.815.774,00	2.835.652.152,36	3.172.169.598,16
	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	381.526.679,58	1.364.281.146,21	390.684.757,00	3.239.837.274,61	5.376.329.857,40
	Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	205.902.239,00	1.733.270.636,96	1.875.310.690,71	396.489.611,00	4.210.973.177,67
	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	168.808.655,00	711.886.390,00	161.486.340,00	353.721.173,00	1.395.902.558,00
	Pajak Warung dan Sejenisnya	0,00	804.000,00	796.800,00	6.367.700,00	7.968.500,00
	Pajak Kantin dan Sejenisnya	0,00	200.000,00	950.650,00	721.200,00	1.871.850,00
3	Pajak Hiburan	137.447.390,00	55.814.713,00	837.925.275,68	2.164.903.397,57	3.196.090.776,25
	Pajak Tontonan Film		0,00	0,00	0,00	0,00
	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	5.280.000,00	0,00	4.697.000,00	304.352.755,00	314.329.755,00
	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	20.797.640,00	3.547.889,00	388.527.066,68	18.590.600,00	431.463.195,68
	Sirkus / Akrobat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pajak Permainan Biliar dan Bowling	2.604.000,00	31.513.110,00	23.222.409,00	188.321.373,00	245.660.892,00
	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	7.278.000,00	0,00	55.396.050,00	303.852.115,97	366.526.165,97
	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa, dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	1.111.750,00	20.753.714,00	366.082.750,00	1.349.786.553,60	1.737.734.767,60
	Pajak Pertandingan Olahraga	100.376.000,00	0,00	0,00	0,00	100.376.000,00
4	Pajak Reklame	730.504.415,50	921.381.898,00	542.358.879,00	541.762.207,00	2.736.007.399,50
	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	701.507.330,50	907.801.288,00	484.278.204,00	451.635.651,00	2.545.222.473,50



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
CATATAN UNTUK LAPORAN KEUANGAN
UNTUK YANG TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2024



No.	Jenis Pajak	Piutang Per Tahun 2024				Saldo Piutang Pajak Per 31 Desember 2024
		< Tahun 2019 (>5 Tahun)	Tahun 2019 - 2021 (3 < 5 Tahun)	Tahun 2022 (1<2 Tahun)	Tahun 2023 (0 < 12 Bulan)	
		Macet	Diragukan	Kurang Lancar	Lancar	
	Pajak Reklame Kain	23.747.085,00	12.080.610,00	58.080.675,00	88.626.556,00	182.534.926,00
	Pajak Reklame Berjalan	5.250.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	8.250.000,00
5	Pajak Penerangan Jalan	8.434.593,00	276.705.617,00	635.202.018,00	285.300,00	920.627.528,00
	Pajak Penerangan Dihasilkan Sendiri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	8.434.593,00	276.705.617,00	635.202.018,00	285.300,00	920.627.528,00
6	Pajak Air Tanah	0,00	118.560,00	9.854.705,00	5.901.860,00	15.875.125,00
7	PBBP2	51.210.921.717,00	120.831.468.341,00	61.820.549.570,78	73.308.126.148,20	307.171.065.776,98
8	Pajak Parkir	0,00	7.945.800,00	64.103.300,00	579.282.640,00	651.331.740,00
9	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya	19.500.000,00	0,00	0,00	11.987.000,00	31.487.000,00
10	Pajak Sarang Burung Walet	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
11	BPHTB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	53.154.194.785,61	126.425.192.824,17	66.661.154.442,17	84.080.534.237,52	330.321.076.289,48

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN ADALAH BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI LAPORAN KEUANGAN



magnificent
SAMARINDA



Mutasi Piutang Pajak Tahun 2024 dapat dirincikan sebagai berikut:

(dalam satuan Rupiah)

1	Piutang Pajak Hotel	
	Saldo <i>Audited</i> 2023	2.673.401.714,73
+	Koreksi Piutang Penambahan	0,00
-	Koreksi Piutang (Pengurangan)	(15.246.264,00)
-	Pengurangan & Penghapusan	0,00
+	Ketetapan 2024	81.394.305.284,50
-	Kompensasi Pembayaran	0,00
-	Penerimaan Murni	(80.758.808.710,72)
-	Pembayaran Piutang	(1.882.188.318,00)
+	Koreksi atas Penambahan Piutang piutang pajak Hotel	20.711.696,00
	Jumlah Piutang Pajak Hotel	1.432.175.402,51
2	Piutang Pajak Restoran	
	Saldo <i>Audited</i> 2023	10.477.018.377,98
-	Pengurangan & Penghapusan	(100.000.000,00)
+	Ketetapan 2024	142.862.644.263,30
	Kompensasi Pembayaran	(30.351.310,00)
-	Penerimaan Murni	(135.998.053.797,33)
-	Pembayaran Piutang	(2.917.327.397,71)
-	Koreksi atas Pengurangan Piutang piutang pajak Restoran	(128.714.595,00)
	Jumlah Piutang Pajak Restoran	14.165.215.541,24
3	Piutang Pajak Hiburan	
	Saldo <i>Audited</i> 2023	3.149.725.884,80
-	Pengurangan & Penghapusan	0,00
+	Ketetapan 2024	41.183.489.505,60
-	Koreksi Piutang (Pengurangan)	0,00
-	Penerimaan Murni	(39.018.586.108,03)
-	Pembayaran Piutang	(2.118.538.506,12)
	Jumlah Piutang Pajak Hiburan	3.196.090.776,25
4	Piutang Pajak Reklame	
	Saldo <i>Audited</i> 2023	3.280.441.443,50
-	Pengurangan & Penghapusan	(166.627.779,00)
+	Ketetapan 2024	5.098.231.378,00
-	Penerimaan Murni	(4.556.469.171,00)
-	Pembayaran Piutang	(919.568.472,00)
	Jumlah Piutang Pajak Reklame	2.736.007.399,50
5	Piutang Pajak Penerangan Jalan	
	Saldo <i>Audited</i> 2023	920.697.368,00
-	Pengurang & Penghapusan	(355.140,00)
+	Ketetapan 2024	147.901.602.508,00
-	Penerimaan Murni	(147.901.317.208,00)
-	Pembayaran Piutang	0,00
	Jumlah Piutang Pajak Penerangan Jalan	920.627.528,00
6	Piutang Pajak Air Tanah	
	Saldo <i>Audited</i> 2023	20.947.005,00
-	Pengurangan & Penghapusan	(8.068.460,00)
+	Ketetapan 2024	307.702.560,00
-	Penerimaan Murni	(301.800.700,00)
-	Pembayaran Piutang	(2.905.280,00)



	Jumlah Piutang Pajak Air Bawah Tanah	15.875.125,00
7	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBBP2)	
	Saldo <i>Audited</i> 2023	259.862.778.058,00
+	Koreksi Piutang Penambahan	651.287.208,00
-	Koreksi Piutang (Pengurangan)	(2.344.094.280,00)
-	Pengurangan & Penghapusan	0,00
-	Kompensasi Pembayaran	0,00
+	Ketetapan 2024	151.035.095.044,00
-	Penerimaan Murni	(77.760.862.239,80)
-	Pembayaran Piutang	(24.311.322.529,22)
+	Penyesuaian Murni PBB	33.893.344,00
+	Penyesuaian Mutasi PBB	4.291.172,00
	Jumlah Piutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBBP2)	307.171.065.776,98
8	Piutang Pajak Parkir	
	Saldo <i>Audited</i> 2023	719.113.015,00
+	Ketetapan 2024	6.691.277.991,00
-	Penerimaan Murni	(6.111.995.351,00)
-	Pembayaran Piutang	(647.063.915,00)
	Jumlah Piutang Pajak Parkir	651.331.740,00
9	Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya	
	Saldo <i>Audited</i> 2023	19.500.000,00
+	Ketetapan 2024	30.068.617,00
-	Penerimaan Murni	(18.081.617,00)
-	Pembayaran Piutang	0,00
	Jumlah Piutang Pajak Mineral Bukan Logam	31.487.000,00
10	Piutang Pajak Sarang Walet	
	Saldo <i>Audited</i> 2023	1.200.000,00
+	Ketetapan 2024	0,00
-	Penerimaan Murni	0,00
-	Pembayaran Piutang	0,00
	Jumlah Piutang Pajak Sarang Walet	1.200.000,00
11	Piutang Pajak BPHTB	
	Saldo <i>Audited</i> 2023	10.450.001,00
+	Ketetapan 2024	153.182.596.094,00
-	Penerimaan	(153.182.596.094,00)
-	Pembayaran Piutang	(10.450.001,00)
	Jumlah Piutang BPHTB	0,00
	Jumlah Piutang Pajak	330.321.076.289,48

5.3.1.1.2.2 PIUTANG RETRIBUSI DAERAH

31-12-2024

31-12-2023

Rp25.755.169.654,50

Rp27.160.446.858,50

f.



Saldo Piutang Retribusi adalah kewajiban wajib retribusi dimana Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) telah diterbitkan namun sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 belum dilakukan pembayaran oleh wajib retribusi. Saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp25.755.169.654,50 dan mengalami penurunan sebesar Rp1.405.277.204,00 atau sebesar 5,17% dibandingkan dengan saldo 31 Desember 2023 sebesar Rp27.160.446.858,50, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3. 16 Piutang Retribusi Daerah

(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	2024	2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - SITU	28.678.000,00	28.678.000,00	0,00	0,00
	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - IMB	557.806.135,00	557.806.135,00	0,00	0,00
	Jumlah	586.484.135,00	586.484.135,00	0,00	0,00
2	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah - Retribusi Hak Guna Bangunan	4.717.475.356,00	5.609.135.356,00	(891.660.000,00)	(15,90)
	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah - Retribusi Sewa Lahan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
	Jumlah	4.727.475.356,00	5.619.135.356,00	(891.660.000,00)	(15,87)
3	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata - Retribusi Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	6.489.699.000,00	6.745.699.000,00	(256.000.000,00)	(3,80)
	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata - Retribusi Penyewaan Bangunan	492.200.000,00	492.200.000,00	0,00	0,00
	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata - Retribusi Penyewaan Bangunan	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00
	Jumlah	7.005.899.000,00	7.261.899.000,00	(256.000.000,00)	(3,53)
	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan - Retribusi Alat Pemadam Kebakaran	446.913.000,00	450.383.000,00	(3.470.000,00)	(0,77)
4	Jumlah	446.913.000,00	450.383.000,00	(3.470.000,00)	(0,77)
	Dinas Lingkungan Hidup - Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	12.491.133.000,00	12.491.133.000,00	0,00	0,00
5	Jumlah	12.491.133.000,00	12.491.133.000,00	0,00	0,00
	Dinas Perdagangan - Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	385.150.163,50	751.412.367,50	(366.262.204,00)	(48,74)
6	Jumlah	385.150.163,50	751.412.367,50	(366.262.204,00)	(48,74)
	Dinas Perhubungan - Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum	112.115.000,00	0,00	112.115.000,00	100,00
7	Jumlah	112.115.000,00	0,00	112.115.000,00	100,00
Jumlah Keseluruhan		25.755.169.654,50	27.160.446.858,50	(1.405.277.204,00)	(5,17)

Penjelasan Tabel di atas, adalah sebagai berikut:

- Saldo pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, terdapat piutang tahun 2024 sebesar Rp586.484.135,00 dan saldo piutang tahun 2023 Rp586.484.135,00, tidak ada penambahan dan pembayaran piutang yang terjadi di tahun 2024.
- Saldo pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, terdapat saldo piutang tahun 2024 Piutang Retribusi Atas Pemakaian Kekayaan Daerah (Hak



- Guna Bangunan dan Sewa Tanah dan Lahan) sebesar Rp4.727.475.356,00 dan saldo piutang tahun 2023 Rp5.619.135.356,00, dibandingkan tahun 2023 Piutang Retribusi mengalami penurunan sebesar Rp891.660.000,00 atau sebesar 15,87%..
3. Saldo pada Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata, terdapat saldo piutang tahun 2024 sebesar Rp7.005.899.000,00 dan saldo piutang tahun 2023 Rp7.261.899.000,00, dibandingkan tahun 2023 Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah mengalami penurunan sebesar Rp256.000.000,00 atau sebesar 3,53%.
 4. Saldo pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, terdapat saldo piutang tahun 2024 sebesar Rp446.913.000,00 dan saldo piutang tahun 2023 Rp450.383.000,00, dibandingkan tahun 2023 Piutang Retribusi Alat Pemadam Kebakaran mengalami penurunan sebesar Rp3.470.000,00 atau sebesar 0,77%.
 5. Saldo pada Dinas Lingkungan Hidup, Piutang Retribusi Pelayanan Kebersihan/Persampahan terdapat saldo piutang tahun 2024 sebesar Rp12.491.133.000,00 dan saldo piutang tahun 2023 Rp12.491.133.000,00, tidak ada penambahan dan pembayaran piutang yang terjadi di tahun 2024.
 6. Saldo pada Dinas Perdagangan, Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Lapak, Kios, Petak terdapat saldo piutang tahun 2024 sebesar Rp385.150.163,50 dan saldo piutang tahun 2023 Rp751.412.367,50 dibandingkan tahun 2023 Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah mengalami penurunan sebesar Rp366.262.204,00 atau sebesar 48,74%.
 7. Saldo pada Dinas Perhubungan, Piutang Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum terdapat saldo piutang tahun 2024 sebesar Rp112.115.000,00 dan saldo piutang tahun 2023 Rp0,00 dibandingkan tahun 2023 Piutang Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum mengalami kenaikan sebesar Rp112.115.000,00 atau sebesar 100,00%.

f.



Tabel 5.3. 17 Piutang Retribusi Daerah berdasarkan Kriteria kualitas

(dalam satuan Rupiah)

No.	SKPD	Uraian	Piutang Retribusi Daerah Per Tahun 2024				Piutang per 31 Desember 2024
			>12 bulan	>3 S/D 12 bulan	>1 S/D 3 bulan	<1 bulan	
			Macet (100%)	Diragukan (50%)	Kurang Lancar (10%)	Lancar (0,50%)	
1	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Retribusi - SITU	28.678.000,00	0,00	0,00	0,00	28.678.000,00
		Retribusi - IMB	557.806.135,00	0,00	0,00	0,00	557.806.135,00
	Jumlah Piutang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		586.484.135,00	0,00	0,00	0,00	586.484.135,00
2	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Retribusi - HGB	4.717.475.356,00	0,00	0,00	0,00	4.717.475.356,00
		Retribusi - Sewa Lahan	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
	Jumlah Piutang Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		4.727.475.356,00	0,00	0,00	0,00	4.727.475.356,00
3	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	6.489.699.000,00	0,00	0,00	0,00	6.489.699.000,00
		Retribusi Penyewaan Bangunan	492.200.000,00	0,00	0,00	0,00	492.200.000,00
		Retribusi Penyewaan Bangunan	24.000.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000.000,00
	Jumlah Piutang Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata		7.005.899.000,00	0,00	0,00	0,00	7.005.899.000,00
4	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Retribusi - APAR	446.913.000,00	0,00	0,00	0,00	446.913.000,00
	Jumlah Piutang Dinas Pemadam Kebakaran Penyelamatan		446.913.000,00	0,00	0,00	0,00	446.913.000,00
5	Dinas Lingkungan Hidup	Retribusi - Persampahan	12.491.133.000,00	0,00	0,00	0,00	12.491.133.000,00
	Jumlah Piutang Dinas Lingkungan Hidup		12.491.133.000,00	0,00	0,00	0,00	12.491.133.000,00
6	Dinas Perdagangan	Retribusi Pemakaian Ruangan	385.150.163,50	0,00	0,00	0,00	385.150.163,50
	Jumlah Piutang Dinas Perdagangan		385.150.163,50	0,00	0,00	0,00	385.150.163,50
7	Dinas Perhubungan	Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum		0,00	0,00	112.115.000,00	112.115.000,00
	Jumlah Piutang Dinas Perhubungan		0,00	0,00	0,00	112.115.000,00	112.115.000,00
Jumlah			25.643.054.654,50	0,00	0,00	112.115.000,00	25.755.169.654,50

f.



5.3.1.1.2.3 PIUTANG LAIN-LAIN PAD YANG SAH

31-12-2024

31-12-2023

Rp10.748.124.284,25

Rp4.547.156.266,86

Saldo Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2024 Rp10.748.124.284,25 dan mengalami kenaikan sebesar Rp6.200.968.017,39 atau 136,37% jika dibandingkan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp4.547.156.266,86 terdapat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.3. 18 Piutang lain-lain PAD yang Sah

(dalam satuan Rupiah)

No.	Nama SKPD	2024	2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	74.953.134,00	74.953.134,00	0,00	0,00
2	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	854.938.583,64	29.700.000,00	825.238.583,64	2.778,58
3	Sekretariat DPRD	1.346.376.055,00	1.346.376.055,00	0,00	0,00
4	Dinas Kesehatan	6.731.528.929,07	1.491.774.967,07	5.239.753.962,00	351,24
5	Dinas Perdagangan	541.027.789,54	448.416.343,79	92.611.445,75	20,65
6	BPKAD - PPKD	0,00	1.155.935.767,00	(1.155.935.767,00)	(100,00)
7	BAPENDA	1.199.299.793,00	0,00	1.199.299.793,00	100,00
Jumlah		10.748.124.284,25	4.547.156.266,86	6.200.968.017,39	136,37

Adapun rincian Piutang Lain-lain PAD yang Sah terdapat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.3. 19 Rincian Piutang lain-lain PAD yang Sah

(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	2024	2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Denda SITU - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	74.953.134,00	3.611.760,00	71.341.374,00	1.975,25
2	Denda IMB - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	71.341.374,00	(71.341.374,00)	0,00
	Jumlah	74.953.134,00	74.953.134,00	0,00	0,00
3	Denda Keterlambatan Pemakaian Kekayaan Daerah - Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	29.700.000,00	29.700.000,00	0,00	0,00
4	PT SAMCO/Lampion Garden – Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	825.238.583,64	0,00	825.238.583,64	100,00
	Jumlah	854.938.583,64	29.700.000,00	825.238.583,64	2.778,58
5	Sekretariat DPRD - Tunjangan Komunikasi Insentif	948.250.000,00	948.250.000,00	0,00	0,00
6	Belanja Operasional Pimpinan DPRD	128.520.000,00	128.520.000,00	0,00	0,00
7	Piutang Upah Kerja DPRD	269.606.055,00	269.606.055,00	0,00	0,00
	Jumlah	1.346.376.055,00	1.346.376.055,00	0,00	0,00
8	INHEALTH	1.864.268,00	12.078.365,00	(10.214.097,00)	(84,57)
9	Rumah Sakit Umum AW Sjahranie	0,00	170.000,00	(170.000,00)	(100,00)
10	Piutang Jasa Layanan -BLUD Laboratorium Kesehatan Kota Samarinda	152.600.000,00	294.200.000,00	(141.600.000,00)	(48,13)



No.	Uraian	2024	2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
11	Piutang Perusahaan RSUD Moeis	613.017.747,07	695.013.633,07	(81.995.886,00)	(11,80)
12	Piutang Jamkesda Kukar RSUD Moeis	41.352.435,00	41.352.435,00	0,00	0,00
13	Piutang BPJS Kesehatan	3.398.311.000,00	0,00	3.398.311.000,00	100,00
14	Piutang BPJS Ketenagakerjaan	104.635.415,00	342.555.334,00	(237.919.919,00)	(69,45)
15	Piutang Kemenkes RI	2.236.903.400,00	0,00	2.236.903.400,00	100,00
16	Piutang BPJS - BLUD Puskesmas Segiri	3.255.000,00	8.020.000,00	(4.765.000,00)	(59,41)
17	Piutang Jasa Layanan - BLUD Trauma Center	63.421.000,00	71.660.200,00	(8.239.200,00)	(11,50)
18	Piutang Jasa Layanan – BLUD Puskesmas Palaran	24.845.000,00	10.625.000,00	14.220.000,00	133,84
19	Piutang Jasa Raharja	44.198.521,00	0,00	44.198.521,00	100,00
20	Piutang BPJS -BLUD Puskesmas Bantuas	16.063.043,00	16.100.000,00	(36.957,00)	(0,23)
21	Puskesmas Samarinda Kota	5.562.100,00	0,00	5.562.100,00	100,00
22	Puskesmas Harapan Baru	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	100,00
23	Puskesmas Wonorejo	4.750.000,00	0,00	4.750.000,00	100,00
24	Puskesmas Temindung	5.770.000,00	0,00	5.770.000,00	100,00
25	Puskesmas Air Putih	13.680.000,00	0,00	13.680.000,00	100,00
	Jumlah	6.731.528.929,07	1.491.774.967,07	5.239.753.962,00	351,24
26	PT.Buluh Perindu - Dinas Perdagangan	378.767.123,29	378.767.123,29	0,00	0,00
27	Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Pemakaian Pelataran/Los/Kios - Dinas Perdagangan	37.260.666,25	69.649.220,50	(32.388.554,25)	(46,50)
28	Kerjasama Pengelolaan Pasar PT Yudha Kios - Dinas Perdagangan	125.000.000,00	0,00	125.000.000,00	100,00
	Jumlah	541.027.789,54	448.416.343,79	92.611.445,75	20,65
29	PPKD -BPKAD Piutang atas Pendapatan Hasil Kerjasama Pelabuhan Samudera Palaran	0,00	1.155.935.767,00	(1.155.935.767,00)	(100,00)
	Jumlah	0,00	1.155.935.767,00	(1.155.935.767,00)	(100,00)
30	BAPENDA-Terminal Peti Kemas Palaran	1.199.299.793,00	0,00	1.199.299.793,00	100,00
	Jumlah	1.199.299.793,00	0,00	1.199.299.793,00	100,00
	Jumlah	10.748.124.284,25	4.547.156.266,86	6.200.968.017,39	136,37

Kenaikan pada piutang Lain-lain PAD yang sah berasal dari reklasifikasi piutang kerjasama pengelolaan PT.SAMACO dari Piutang lainnya ke Piutang Lain-lain PAD yang Sah. Selain itu, terdapat penambahan piutang dari PT.SAMACO atas pengelolaan Lampion Garden senilai Rp237.069.309,00 yang merupakan piutang tahun 2023 dan senilai Rp237.069.309,00 yang merupakan piutang tahun 2024.

Pada Dinas Perdagangan terdapat koreksi kurang catat atas pendapatan atas kerjasama pengelolaan pasar segiri dengan PT Yudha Putra Kaltim tahun 2025 dengan kontribusi pertahun sebesar Rp125.000.000,00.

f.



5.3.1.1.2.4 PIUTANG TRANSFER PEMERINTAH PUSAT

31-12-2024

31-12-2023

Rp0,00

Rp220.000,00

Saldo Piutang Transfer Pemerintah Pusat adalah Piutang dari Pemerintah Pusat yang merupakan Saldo Piutang Cukai Hasil Tembakau yang merupakan hak Pemerintah Kota Samarinda. Penetapan nilai piutang Transfer Pemerintah Pusat – Cukai Hasil Tembakau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 3/PMK.07/2023 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 159 tahun 2023 tentang Perubahan Rincian Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2024. Saldo Piutang Transfer Pemerintah Pusat pada tahun 2024 adalah sebesar Rp0,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp220.000,00 atau 100% jika dibandingkan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp220.000,00.

5.3.1.1.2.5 PIUTANG TRANSFER ANTAR DAERAH

31-12-2024

31-12-2023

Rp143.034.789.000,00

Rp46.082.846.000,00

Saldo Piutang Transfer Antar Daerah adalah Piutang dari Pemerintah Provinsi yang merupakan Saldo Piutang Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Bagi Hasil dari Pajak Air Permukaan yang merupakan hak Pemerintah Kota Samarinda. Penetapan nilai Piutang Transfer Antar Daerah berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 100.3.3.1/0419-V/BPKAD tentang Penetapan Nilai Kurang Salur Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Kepada Kabupaten/Kota Se Kalimantan Timur Tahun 2024. Saldo Piutang Transfer Pemerintah Provinsi pada tahun 2024 adalah sebesar Rp143.034.789.000,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp96.951.943.000,00 atau 210,39% jika dibandingkan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp46.082.846.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3. 20 Rincian Piutang Transfer Antar Daerah

(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	2024	2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	8.698.344.000,00	8.640.624.000,00	57.720.000,00	0,67
2	Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	7.943.710.000,00	7.052.322.000,00	891.388.000,00	12,64
3	Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	126.321.100.000,00	30.325.564.000,00	95.995.536.000,00	316,55
4	Bagi Hasil Dari Pajak Air Permukaan	71.635.000,00	64.336.000,00	7.299.000,00	11,35
	Jumlah	143.034.789.000,00	46.082.846.000,00	96.951.943.000,00	210,39



5.3.1.1.2.6 PIUTANG LAINNYA

31-12-2024

31-12-2023

Rp3.773.237.691,29

Rp51.958.076.168,68

Saldo Piutang Lainnya per 31 Desember 2024 Rp3.773.237.691,29 dan mengalami penurunan sebesar Rp48.184.838.477,39 atau 92,74% jika dibandingkan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp51.958.076.168,68. Rincian Piutang Lainnya per SKPD adalah sebagai berikut:

Tabel 5.3. 21 Piutang Lainnya

(dalam satuan Rupiah)

No.	Nama SKPD	2024	2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.760.207.005,96	2.760.207.005,96	0,00	0,00
2	Badan Pendapatan Daerah	2.757.890,00	47.580.740.210,00	(47.577.982.320,00)	(99,99)
3	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	0,00	528.901.965,39	(528.901.965,39)	(100,00)
4	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	560.272.795,33	638.226.987,33	(77.954.192,00)	(12,21)
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	450.000.000,00	450.000.000,00	0,00	0,00
Jumlah		3.773.237.691,29	51.958.076.168,68	(48.184.838.477,39)	(92,74)

Tabel 5.3. 22 Rincian Piutang Lainnya

(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	2024	2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Piutang Retribusi IMB RSUD AWS	2.760.207.005,96	2.760.207.005,96	0,00	0,00
2	Retribusi Pencucian Kendaraan Bermotor	2.757.890,00	2.757.890,00	0,00	0,00
3	Piutang Kemitraan Lampion Garden PT. Samaco	0,00	528.901.965,39	(528.901.965,39)	(100,00)
4	Piutang Dana Pensiun Pegawai	9.444.289,00	12.444.289,00	(3.000.000,00)	(24,11)
5	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	474.514.805,01	549.468.997,01	(74.954.192,00)	(13,64)
6	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	76.313.701,32	76.313.701,32	0,00	0,00
7	Uang Muka Pengadaan Barang/Jasa CV. Puja Kontruksi PUPR	450.000.000,00	450.000.000,00	0,00	0,00
8	IUPK PT. Kaltim Prima Coal	0,00	47.577.982.320,00	(47.577.982.320,00)	(100,00)
Jumlah		3.773.237.691,29	51.958.076.168,68	(48.184.838.477,39)	(92,74)



Adapun penjelasan dari rincian Piutang Lainnya adalah sebagai berikut:

1. Piutang Retribusi IMB RSUD AWS pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dari Piutang lainnya selama periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp2.760.207.005,96 sama dengan tahun 2023 sebesar Rp2.760.207.005,96. Piutang tersebut menjadi temuan pada pemeriksaan BPK-RI karena tidak terkonfirmasi dengan pihak RSUD AWS. Pihak RSUD AWS tidak mencatat utang atas retribusi IMB tersebut karena terdapat aturan mengenai bangunan pemerintah bukan merupakan objek retribusi IMB. Atas permasalahan tersebut DPMPTSP akan mengusulkan penghapusan atas piutang tersebut.
2. Retribusi Pencucian Kendaraan Bermotor pada Badan Pendapatan Daerah selama periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp2.757.890,00 sama dengan tahun 2023 sebesar Rp2.757.890,00.
3. Piutang Kemitraan Lampion Garden PT. Samaco pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata. Saldo Piutang tahun 2024 sebesar 0,00 mengalami penurunan sebesar Rp528.901.965,39 atau 100,00% dibandingkan dengan saldo tahun 2023 sebesar Rp528.901.965,39. Dikarenakan reklasifikasi piutang Kemitraan Lampion Garden PT. SAMACO dari piutang lainnya ke Piutang Lain-lain PAD yang Sah.
4. Piutang Dana Pensiun Pegawai selama periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp9.444.289,00 mengalami penurunan sebesar Rp3.000.000,00 atau 24,11% dibandingkan dengan saldo tahun 2023 sebesar Rp12.444.289,00.
5. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran merupakan reklasifikasi tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo sampai dengan 31 Desember 2024 yang belum diterima pembayarannya dengan saldo sebesar Rp474.514.805,01. Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran per 31 Desember 2024 mengalami penurunan sebesar Rp74.954.192,00 atau sebesar 13,64% jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp549.468.997,01. Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran tahun 2024 dirincikan sebagai berikut:

Tabel 5.3. 23 Rincian Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Jenis Angsuran	2024	2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	260/ HK-KS / 2005	Rumah Dinas	30.592.419,65	47.503.859,65	(16.911.440,00)	(35,60)
2	028/356/HK-KS/2008	Rumah Dinas	209.483.896,00	209.483.896,00	0,00	0,00
3	Ada 4 Surat Perjanjian	Rumah Susun	17.437.248,00	75.480.000,00	(58.042.752,00)	(76,90)
4	024/076/HUK-KS/2005	Roda Empat	147.678.517,00	147.678.517,00	0,00	0,00
5	028/273.HK-KS/IV/2009	Roda Empat	4.426.400,00	4.426.400,00	0,00	0,00
6	024/077/HUK-KS/2005	Roda Dua	30.640.934,36	30.640.934,36	0,00	0,00
7	028/273/HK-KS/2009	Roda Dua	34.255.390,00	34.255.390,00	0,00	0,00
8	973/0852/E/DPD/VII/2003	Rumah Sewa	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah			474.514.805,01	549.468.997,01	(74.954.192,00)	(13,64)



Tabel 5.3. 24 Rincian Mutasi dari Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Jenis Angsuran	2023	Mutasi Dari TPA	Angsuran 2023	2024
1	260/ HK-KS / 2005	Rumah Dinas	47.503.859,65	0,00	16.911.440,00	30.592.419,65
2	028/356/HK-KS/2008	Rumah Dinas	209.483.896,00	0,00	0,00	209.483.896,00
3	Ada 4 Surat Perjanjian	Rumah Susun	75.480.000,00	(58.042.752,00)	0,00	17.437.248,00
4	024/076/HUK-KS/2005	Roda Empat	147.678.517,00	0,00	0,00	147.678.517,00
5	028/273.HK-KS/IV/2009	Roda Empat	4.426.400,00	0,00		4.426.400,00
6	024/077/HUK-KS/2005	Roda Dua	30.640.934,36	0,00	0,00	30.640.934,36
7	028/273/HK-KS/2009	Roda Dua	34.255.390,00	0,00	0,00	34.255.390,00
8	973/0852/E/DPD/VII/2003	Rumah Sewa	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah			549.468.997,01	(58.042.752,00)	16.911.440,00	474.514.805,01

6. Saldo Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi sebesar Rp76.313.701,32 merupakan tuntutan ganti rugi yang belum dapat diselesaikan sampai dengan 31 Desember 2024. Saldo Piutang tahun 2023 dan tahun 2024 sebesar Rp76.313.701,32 dirincikan sebagai berikut:

Tabel 5.3. 25 Rincian Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi

(dalam satuan Rupiah)

No.	Nomor Ketetapan	Tanggal Penetapan	2024	2023	Kenaikan/ (Penurunan)
1.	LAP-96/PW17/2/2004	19-Mar-04	1.340.400,00	1.340.400,00	0,00
2.	LAP-133/PW17/2/2003	18-Jun-03	5.448.301,32	5.448.301,32	0,00
3.	LAP-02-277/PW17/IINPRES/99	23-Sep-99	69.525.000,00	69.525.000,00	0,00
Jumlah			76.313.701,32	76.313.701,32	0,00

7. Uang Muka Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Saldo Piutang tahun 2024 sebesar Rp450.000.000,00 sama dengan tahun 2023 sebesar Rp450.000.000,00.
8. Piutang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) PT. Kaltim Prima Coal pada tahun 2024 adalah sebesar Rp0,00 atau mengalami penurunan 100,00% dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp47.577.982.320,00.

5.3.1.1.3 PENYISIHAN PIUTANG

31-12-2024

31-12-2023

(Rp156.497.541.368,44)

(Rp165.748.901.991,19)

Penyisihan Piutang adalah saldo Piutang Pajak Daerah, Piutang Retribusi Daerah, Piutang Lain-lain PAD yang Sah dan Piutang Lainnya yang tidak tertagih dalam waktu tertentu yang dibentuk berdasarkan kualitas atau umur Piutang. Jumlah Penyisihan Piutang

f



per 31 Desember 2024 sebesar Rp156.497.541.368,44 dan mengalami penurunan sebesar Rp9.251.360.622,75 atau 5,58% jika dibandingkan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp165.748.901.991,19. Saldo Penyisihan Piutang per 31 Desember 2024 dan 2023 sebagai berikut:

Tabel 5.3. 26 Tabel Perbandingan Penyisihan Piutang Pajak

(dalam satuan Rupiah)

No.	Penyisihan Piutang	2024	2023	Kenaikan / Penurunan	%
1	Penyisihan Piutang Pajak Daerah	(123.450.378.028,00)	(88.188.216.074,91)	35.262.161.953,09	(39,99)
2	Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	(25.643.615.229,50)	(22.736.043.908,50)	2.907.571.321,00	(12,79)
3	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang sah	(3.279.210.454,01)	(2.866.565.839,10)	412.644.614,91	(14,40)
4	Piutang Transfer Antar Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Penyisihan Piutang Lainnya	(4.124.337.656,93)	(51.958.076.168,68)	(47.833.738.511,75)	92,06
Total Penyisihan Piutang		(156.497.541.368,44)	(165.748.901.991,19)	(9.251.360.622,75)	5,58

5.3.1.1.3.1 PENYISIHAN PIUTANG PAJAK DAERAH

31-12-2024

31-12-2023

(123.450.378.028,00)

(Rp88.188.216.074,91)

Penyisihan Piutang Pajak Daerah adalah saldo Piutang Pajak Daerah tidak tertagih dalam waktu tertentu yang dibentuk berdasarkan kualitas atau umur Piutang pada Badan Pendapatan Kota Samarinda. Jumlah Penyisihan Piutang Pajak per 31 Desember 2024 sebesar Rp123.450.378.028,00 adapun rincian Penyisihan Piutang Pajak Daerah per jenis pajak tahun 2024 dan tahun 2023 disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5.3. 27 Tabel Penyisihan Piutang Pajak Daerah

(dalam satuan Rupiah)

No.	Jenis Pajak	2024	2023	Kenaikan / (Penurunan)	%
1	Pajak Hotel	469.154.397,18	2.034.610.768,58	(1.565.456.371,40)	(76,94)
2	Pajak Restoran	3.052.437.433,20	2.060.850.357,55	991.587.075,65	48,12
	Pajak Restoran dan sejenisnya	128.070.164,46	190.888.004,55	(62.817.840,09)	(32,91)
	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	1.118.934.914,76	1.330.561.003,37	(211.626.088,61)	(15,91)
	Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	1.262.051.074,61	197.542.985,38	1.064.508.089,23	538,87
	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	542.669.089,87	341.704.246,50	200.964.843,37	58,81
	Pajak Warung dan Sejenisnya	513.518,50	89.364,50	424.154,00	474,63
	Pajak Kantin dan Sejenisnya	198.671,00	64.753,25	133.917,75	206,81
3	Pajak Hiburan	259.971.791,06	165.456.901,47	94.514.889,59	57,12



No.	Jenis Pajak	2024	2023	Kenaikan / (Penurunan)	%
	Pajak Tontonan Film	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	7.271.463,78	5.303.485,00	1.967.978,78	37,11
	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	61.517.244,17	34.200.597,98	27.316.646,19	79,87
	Sirkus / Akrobat	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pajak Permainan Biliar dan Bowling	21.624.402,76	6.252.190,31	15.372.212,45	245,87
	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	14.336.865,58	12.138.540,03	2.198.325,55	18,11
	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa, dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	54.845.814,77	7.186.088,15	47.659.726,62	663,22
	Pajak Pertandingan Olahraga	100.376.000,00	100.376.000,00	0,00	0,00
4	Pajak Reklame	1.248.140.063,43	948.114.037,28	300.026.026,15	31,64
	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	1.206.093.973,15	918.842.324,45	287.251.648,70	31,26
	Pajak Reklame Kain	36.038.590,28	25.174.212,83	10.864.377,45	43,16
	Pajak Reklame Berjalan	6.007.500,00	4.097.500,00	1.910.000,00	46,61
5	Pajak Penerangan Jalan	210.309.029,80	118.307.034,29	92.001.995,51	77,77
	Pajak Penerangan Dihasilkan Sendiri	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	210.309.029,80	118.307.034,29	92.001.995,51	77,77
6	Pajak Air Tanah	1.074.259,80	115.998,23	958.261,57	826,10
7	PBBP2	118.175.251.475,32	82.835.274.631,42	35.339.976.843,90	42,66
8	Pajak Parkir	13.279.643,20	4.734.096,08	8.545.547,12	180,51
9	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya	19.559.935,00	19.500.000,00	59.935,00	0,31
10	Pajak Sarang Burung Walet	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
11	BPHTB	0,00	52.250,01	(52.250,01)	(100,00)
Jumlah		123.450.378.028,00	88.188.216.074,91	35.262.161.953,09	39,99

Adapun penjelasan dari Penyisihan Piutang Pajak adalah:

1. Penyisihan Piutang Pajak Hotel
Saldo per 31 Desember 2024 senilai Rp469.154.397,18 mengalami penurunan sebesar Rp1.565.456.371,40 atau 76,94% dari saldo per 31 Desember 2023 yaitu Rp2.034.610.768,58.
2. Penyisihan Piutang Pajak Restoran
Saldo per 31 Desember 2024 senilai Rp3.052.437.433,20 mengalami kenaikan sebesar Rp991.587.075,65 atau 48,12% dari saldo per 31 Desember 2023 yaitu Rp2.060.850.357,55.
3. Penyisihan Piutang Pajak Hiburan
Saldo per 31 Desember 2024 senilai Rp259.971.791,06 mengalami kenaikan sebesar Rp94.514.889,59 atau 57,12% dari saldo per 31 Desember 2023 yaitu Rp165.456.901,47.



4. Penyisihan Piutang Pajak Reklame
 Saldo per 31 Desember 2024 senilai Rp1.248.140.063,43 mengalami kenaikan sebesar Rp300.026.026,15 atau 31,64% dari saldo per 31 Desember 2023 yaitu Rp948.114.037,28.
5. Penyisihan Piutang Pajak Penerangan Jalan
 Saldo per 31 Desember 2024 senilai Rp210.309.029,80 mengalami kenaikan sebesar Rp92.001.995,51 atau 77,77% dari saldo per 31 Desember 2023 yaitu Rp118.307.034,29.
6. Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah
 Saldo per 31 Desember 2024 senilai Rp1.074.259,80 mengalami kenaikan sebesar Rp958.261,57 atau 826,10% dari saldo per 31 Desember 2023 yaitu Rp115.998,23.
7. Penyisihan Piutang Pajak Bumi Bangunan
 Saldo per 31 Desember 2024 senilai Rp118.175.251.475,32 mengalami penurunan sebesar Rp35.339.976.843,90 atau 42,66% dari saldo per 31 Desember 2023 yaitu Rp82.835.274.631,42.
8. Penyisihan Piutang Pajak Parkir
 Saldo per 31 Desember 2024 senilai Rp13.279.643,20 mengalami penurunan sebesar Rp8.545.547,12 atau 180,51% dari saldo per 31 Desember 2023 yaitu Rp4.734.096,08.
9. Penyisihan Piutang Pajak Mineral Bukan Logam
 Saldo per 31 Desember 2024 senilai Rp19.559.935,00 mengalami kenaikan sebesar Rp59.935,00 atau 0,31% dari saldo per 31 Desember 2023 yaitu Rp19.500.000,00.
10. Penyisihan Piutang Pajak Sarang Burung Walet
 Saldo per 31 Desember 2024 senilai Rp1.200.000,00 tidak mengalami perubahan dari Saldo tahun 2023.
11. Penyisihan Piutang Pajak BPHTB
 Saldo per 31 Desember 2024 senilai Rp0,00 mengalami penurunan sebesar Rp52.250,01 atau 100,00% dari saldo per 31 Desember 2023 yaitu Rp52.250,01.

Penyisihan Piutang Pajak Daerah per jenis pajak berdasarkan klasifikasi *aging schedule* atau kriteria kualitas Piutangnya disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5.3. 28 Tabel Penyisihan Piutang Pajak Daerah Berdasarkan Kriteria Kualitas

(dalam satuan Rupiah)

No.	Jenis Pajak	Kualitas	Nilai Piutang	Penyisihan	Nilai Penyisihan
				%	Per 31 Des 2024
1	Pajak Hotel	Lancar	656.208.269,78	0,5	3.281.041,35
		Kurang Lancar	114.403.986,00	10	11.440.398,60
		Diragukan	414.260.379,00	50	207.130.189,50
		Macet	247.302.767,73	100	247.302.767,73
		Jumlah			469.154.397,18
2	Pajak Restoran	Lancar	6.832.789.110,97	0,5	34.163.945,56
		Kurang Lancar	2.618.454.196,71	10	261.845.419,67
		Diragukan	3.915.088.331,17	50	1.957.544.165,59
		Macet	798.883.902,38	100	798.883.902,38
		Jumlah			3.052.437.433,20
3	Pajak Hiburan	Lancar	2.164.903.397,57	0,5	10.824.516,99
		Kurang Lancar	837.925.275,68	10	83.792.527,57
		Diragukan	55.814.713,00	50	27.907.356,50
		Macet	137.447.390,00	100	137.447.390,00
		Jumlah			259.971.791,06
4	Pajak Reklame	Lancar	541.762.207,00	0,5	2.708.811,03



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
CATATAN UNTUK LAPORAN KEUANGAN
 UNTUK YANG TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2024



No.	Jenis Pajak	Kualitas	Nilai Piutang	Penyisihan	Nilai Penyisihan
				%	Per 31 Des 2024
		Kurang Lancar	542.358.879,00	10	54.235.887,90
		Diragukan	921.381.898,00	50	460.690.949,00
		Macet	730.504.415,50	100	730.504.415,50
		Jumlah			1.248.140.063,43
5	Pajak Penerangan Jalan	Lancar	285.300,00	0,5	1.426,50
		Kurang Lancar	635.202.018,00	10	63.520.201,80
		Diragukan	276.705.617,00	50	138.352.808,50
		Macet	8.434.593,00	100	8.434.593,00
		Jumlah			210.309.029,80
6	Pajak Air Tanah	Lancar	5.901.860,00	0,5	29.509,30
		Kurang Lancar	9.854.705,00	10	985.470,50
		Diragukan	118.560,00	50	59.280,00
		Macet	0	100	0
		Jumlah			1.074.259,80
7	PBBP2	Lancar	73.308.126.148,20	0,5	366.540.630,74
		Kurang Lancar	61.820.549.570,78	10	6.182.054.957,08
		Diragukan	120.831.468.341,00	50	60.415.734.170,50
		Macet	51.210.921.717,00	100	51.210.921.717,00
		Jumlah			118.175.251.475,32
8	Pajak Parkir	Lancar	579.282.640,00	0,5	2.896.413,20
		Kurang Lancar	64.103.300,00	10	6.410.330,00
		Diragukan	7.945.800,00	50	3.972.900,00
		Macet	0	100	0
		Jumlah			13.279.643,20
9	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya	Lancar	11.987.000,00	0,5	59.935,00
		Kurang Lancar	0	10	0
		Diragukan	0	50	0
		Macet	19.500.000,00	100	19.500.000,00
		Jumlah			19.559.935,00
10	Pajak Sarang Burung Walet	Lancar	0	0,5	0
		Kurang Lancar	0	10	0
		Diragukan	0	50	0
		Macet	1.200.000,00	100	1.200.000,00
		Jumlah			1.200.000,00
11	BPHTB	Lancar	0	0,5	0
		Kurang Lancar	0	10	0
		Diragukan	0	50	0
		Macet	0	100	0
		Jumlah			0
Jumlah					123.450.378.028,00

f.



5.3.1.1.3.2 PENYISIHAN PIUTANG RETRIBUSI DAERAH

31-12-2024

31-12-2023

Rp25.643.615.229,50

Rp22.736.043.908,50

Penyisihan Piutang Retribusi Daerah adalah saldo Piutang Retribusi yang tidak tertagih dalam waktu tertentu. Jumlah Penyisihan Piutang Retribusi per 31 Desember 2024 sebesar Rp25.643.615.229,50, adapun rincian Penyisihan Piutang Retribusi Daerah tahun 2024 dan tahun 2023 disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5.3. 29 Rincian Penyisihan Piutang Retribusi Daerah

(dalam satuan Rupiah)

No.	SKPD	Uraian	2024	2023	Kenaikan/Penurunan	%
1	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Retribusi – SITU (100%)	28.678.000,00	28.678.000,00	0,00	0,00
		Retribusi - IMB (100%)	557.806.135,00	557.806.135,00	0,00	0,00
		Jumlah Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	586.484.135,00	586.484.135,00	0,00	0,00
2	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda	Retribusi HGB (100%)	4.717.475.356,00	5.609.135.356,00	(891.660.000,00)	(15,90)
		Retribusi - Sewa Tanah/Lahan (100%)	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
		Jumlah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda	4.727.475.356,00	5.619.135.356,00	(891.660.000,00)	(15,87)
3	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	Pemakaian Kekayaan Daerah	7.005.899.000,00	6.325.399.000,00	680.500.000,00	10,76
		Sewa Lapangan Sepak Bola 2023 (50%)	0,00	135.000.000,00	(135.000.000,00)	(100,00)
		Sewa Lapangan Sepak Bola 2023 (10%)	0,00	9.000.000,00	(9.000.000,00)	(100,00)
		Sewa Lapangan Sepak Bola 2023 (0,50%)	0,00	300.000,00	(300.000,00)	(100,00)
		Sewa Lapangan Uji Coba Sepak Bola 2023 (0,50%)	0,00	150.000,00	(150.000,00)	(100,00)
		Sewa Kantor 2023 (50%)	0,00	18.000.000,00	(18.000.000,00)	(100,00)
		Sewa Ruko Depan 2023 (50%)	0,00	79.000.000,00	(79.000.000,00)	(100,00)
		Sewa Ruko Depan 2023 (50%)	0,00	50.000.000,00	(50.000.000,00)	(100,00)
		Sewa Ruko Belakang 2023 (50%)	0,00	35.000.000,00	(35.000.000,00)	(100,00)
		Sewa Ruko Belakang 2023 (50%)	0,00	61.250.000,00	(61.250.000,00)	(100,00)
		Jumlah Penyisihan Piutang Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	7.005.899.000,00	6.713.099.000,00	292.800.000,00	4,36
4	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	Retribusi APAR (100%)	446.913.000,00	440.093.000,00	6.820.000,00	1,55
		Retribusi APAR (50%)	0,00	3.030.000,00	(3.030.000,00)	(100,00)
		Retribusi APAR (10%)	0,00	228.000,00	(228.000,00)	(100,00)
		Retribusi APAR (0,50%)	0,00	9.750,00	(9.750,00)	(100,00)



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
CATATAN UNTUK LAPORAN KEUANGAN
UNTUK YANG TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2024



No.	SKPD	Uraian	2024	2023	Kenaikan/Penurunan	%
Jumlah Penyisihan Piutang Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan			446.913.000,00	443.360.750,00	3.552.250,00	0,80
5	Dinas Lingkungan Hidup	Retribusi Persampahan (100%)	12.491.133.000,00	7.847.905.500,00	4.643.227.500,00	59,17
		Retribusi Persampahan (50%)	0,00	698.081.250,00	(698.081.250,00)	(100,00)
		Retribusi Persampahan (10%)	0,00	63.505.500,00	(63.505.500,00)	(100,00)
		Retribusi Persampahan (0,50%)	0,00	13.060.050,00	(13.060.050,00)	(100,00)
Jumlah Penyisihan Piutang Dinas Lingkungan Hidup			12.491.133.000,00	8.622.552.300,00	3.868.580.700,00	44,87
6	Dinas Perdagangan	Retribusi Pemakaian Ruangan Kios/Los/Pelataran (100%)	385.150.163,50	751.412.367,50	(366.262.204,00)	(48,74)
		Retribusi Pemakaian Ruangan Kios/Los/Pelataran (50%)	0,00	0,00	0,00	100,00
		Retribusi Pemakaian Ruangan Kios/Los/Pelataran (10%)	0,00	0,00	0,00	100,00
Jumlah Penyisihan Piutang Dinas Perdagangan			385.150.163,50	751.412.367,50	(366.262.204,00)	(48,74)
7	Dinas Perhubungan	Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum(100%)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum (50%)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum (10%)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum (0,50%)	560.575,00	0,00	560.575,00	100,00
Jumlah Penyisihan Piutang Dinas Perhubungan			560.575,00	0,00	560.575,00	100,00
Jumlah Penyisihan Piutang Retribusi			25.643.615.229,50	22.736.043.908,50	2.907.571.321,00	12,79

f.



Tabel 5.3. 30 Rincian Penyisihan Piutang Retribusi Daerah Berdasarkan Kriteria kualitas

(dalam satuan Rupiah)

No.	SKPD	Jenis Retribusi	Kualitas	Nilai Piutang	Penyisihan (%)	Nilai Penyisihan per 31 Desember 2024
1	Dinas Penanam Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Retribusi IMB	Lancar (0,50%) <1 Bulan	0,00	0,5	0,00
			Kurang Lancar (10%) >1 S/D 3 Bulan	0,00	10	0,00
			Diragukan (50%) >3 S/D 12 Bulan	0,00	50	0,00
			Macet (100%) >12 Bulan	557.806.135,00	100	557.806.135,00
		Retribusi SITU	Lancar (0,50%) <1 Bulan	0,00	0,5	0,00
			Kurang Lancar (10%) >1 S/D 3 Bulan	0,00	10	0,00
			Diragukan (50%) >3 S/D 12 Bulan	0,00	50	0,00
			Macet (100%) >12 Bulan	28.678.000,00	100	28.678.000,00
Jumlah			586.484.135,00		586.484.135,00	
2	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	Lancar (0,50%) 1 Bulan	0,00	0,5	0,00
			Kurang Lancar (10%) >1 S/D 3 Bulan	0,00	10	0,00
			Diragukan (50%) >3 S/D 12 Bulan	0,00	50	0,00
			Macet (100%) >12 Bulan	4.727.475.356,00	100	4.727.475.356,00
Jumlah			4.727.475.356,00		4.727.475.356,00	
3	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	Lancar (0,50%) <1 Bulan	0,00	0,5	0,00
			Kurang Lancar (10%) >1 S/D 3 Bulan	0,00	10	0,00
			Diragukan (50%) >3 S/D 12 Bulan	0,00	50	0,00
			Macet (100%) >12 Bulan	7.005.899.000,00	100	7.005.899.000,00
Jumlah			7.005.899.000,00		7.005.899.000,00	
4	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Retribusi Alat Pemadam Api Ringan (Apar)	Lancar (0,50%) <1 Bulan	0,00	0,5	0,00
			Kurang Lancar (10%) >1 S/D 3 Bulan	0,00	10	0,00



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
CATATAN UNTUK LAPORAN KEUANGAN
UNTUK YANG TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2024



No.	SKPD	Jenis Retribusi	Kualitas	Nilai Piutang	Penyisihan (%)	Nilai Penyisihan per 31 Desember 2024
			Diragukan (50%) >3 S/D 12 Bulan	0,00	50	0,00
			Macet (100%) >12 Bulan	446.913.000,00	100	446.913.000,00
			Jumlah			446.913.000,00
5	Dinas Lingkungan Hidup	Retribusi Persampahan	Lancar (0,50%) <1 Bulan	0,00	0,5	0,00
			Kurang Lancar (10%) >1 S/D 3 Bulan	0,00	10	0,00
			Diragukan (50%) >3 S/D 12 Bulan	0,00	50	0,00
			Macet (100%) >12 Bulan	12.491.133.000,00	100	12.491.133.000,00
6	Jumlah			12.491.133.000,00		12.491.133.000,00
	Dinas Perdagangan	Retribusi Pemakaian Ruangan Kios/Los/Pelataran	Lancar (0,50%) <1 Bulan	0,00	0,5	0,00
			Kurang Lancar (10%) >1 S/D 3 Bulan	0,00	10	0,00
			Diragukan (50%) >3 S/D 12 Bulan	0,00	50	0,00
			Macet (100%) >12 Bulan	385.150.163,50	100	385.150.163,50
	Jumlah			385.150.163,50		385.150.163,50
7	Dinas Perhubungan	Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum	Lancar (0,50%) <1 Bulan	112.115.000,00	0,5	560.575,00
			Kurang Lancar (10%) >1 S/D 3 Bulan	0,00	10	0,00
			Diragukan (50%) >3 S/D 12 Bulan	0,00	50	0,00
			Macet (100%) >12 Bulan	0,00	100	0,00
		Jumlah			112.115.000,00	
Jumlah Keseluruhan				25.755.169.654,50	25.643.615.229,50	

P.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN ADALAH BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI LAPORAN KEUANGAN

181



magnificent
SAMARINDA



5.3.1.1.3.3 PENYISIHAN PIUTANG LAIN-LAIN PAD YANG SAH

31-12-2024

31-12-2023

(Rp3.279.210.454,01)

(Rp2.866.565.839,10)

Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah adalah saldo Piutang Lain – Lain PAD Tidak Tertagih dalam waktu tertentu yang dibentuk berdasarkan kualitas atau umur Piutang. Jumlah Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2024 sebesar Rp3.279.210.454,01 mengalami kenaikan sebesar Rp412.644.614,91 atau 14,40% dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp2.866.565.839,10 adapun rincian Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah per jenis tahun 2024 dan tahun 2023 disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5.3. 31 Tabel Penyisihan Piutang Lain- lain PAD yang Sah

(dalam satuan Rupiah)

No.	Jenis Piutang	2024	2023	Kenaikan / (Penurunan)	%
1	Piutang Denda Retribusi - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	74.953.134,00	74.953.134,00	0,00	0,00
2	Piutang Denda Keterlambatan Pemakaian Kekayaan Daerah - Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	29.700.000,00	29.700.000,00	0,00	0,00
3	Piutang PT SAMACO/Lampion garden - Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	238.254.655,55	0,00	238.254.655,55	100,00
4	Piutang Tunjangan Komunikasi Insentif - DPRD	948.250.000,00	948.250.000,00	0,00	0,00
5	Piutang Belanja Operasional Pimpinan - DPRD	128.520.000,00	128.520.000,00	0,00	0,00
6	Piutang Upah Kerja - DPRD	269.606.055,00	269.606.055,00	0,00	0,00
7	Piutang Dinas Kesehatan	1.155.402.320,96	961.340.627,47	194.061.693,49	20,19
8	Pelayanan Pasar pada Dinas Perdagangan	428.527.789,54	448.416.343,79	(19.888.554,25)	(4,44)
9	Piutang atas Pendapatan Hasil Kerjasama Pelabuhan Samudera Palaran pada BPKAD-PPKD	0,00	5.779.678,84	(5.779.678,84)	(100,00)
10	Terminal Peti Kemas Palaran - BAPENDA	5.996.498,97	0,00	5.996.498,97	100,00
Jumlah		3.279.210.454,01	2.866.565.839,10	412.644.614,91	14,40

Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah:

1. Penyisihan Piutang Denda Retribusi – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Saldo per 31 Desember 2024 senilai Rp74.953.134,00 sama dengan saldo per 31 Desember 2023 yaitu Rp74.953.134,00 atau 0,00%.
2. Penyisihan Piutang Denda Keterlambatan Pemakaian Kekayaan Daerah – Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata.



- Saldo per 31 Desember 2024 senilai Rp29.700.000,00 sama dengan tahun 2023 sebesar Rp29.700.000,00 atau 0,00%.
3. Penyisihan Piutang PT SAMACO/Lampion garden - Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata.
 Saldo per 31 Desember 2024 senilai Rp238.254.655,55 mengalami kenaikan 100% dari saldo per 31 Desember 2023.
 4. Penyisihan Piutang Tunjangan Komunikasi Insentif – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 Saldo per 31 Desember 2024 senilai Rp948.250.000,00 sama dengan tahun 2023 sebesar Rp948.250.000,00 atau 0,00%.
 5. Penyisihan Piutang Belanja Operasional Pimpinan - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 Saldo per 31 Desember 2024 senilai Rp128.520.000,00 sama dengan tahun 2023 sebesar Rp128.520.000,00 atau 0,00%.
 6. Penyisihan Piutang Upah Kerja - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 Saldo per 31 Desember 2024 senilai Rp269.606.055,00 sama dengan tahun 2023 sebesar Rp269.606.055,00 atau 0,00%.
 7. Penyisihan Piutang Dinas Kesehatan
 Saldo per 31 Desember 2024 senilai Rp1.318.361.165,96 mengalami kenaikan sebesar Rp357.020.538,49 atau 37,14% dari saldo per 31 Desember 2023 yaitu Rp961.340.627,47.
 8. Penyisihan Piutang Retribusi Pasar – Dinas Perdagangan
 Saldo per 31 Desember 2024 senilai Rp416.027.789,54 mengalami penurunan sebesar Rp32.388.554,25 atau 7,22% dari saldo per 31 Desember 2023 yaitu Rp448.416.343,79.
 9. Penyisihan Piutang atas Pendapatan Hasil Kerjasama Pelabuhan Samudera Palaran - BPKAD-PPKD
 Saldo per 31 Desember 2024 senilai Rp0,00 mengalami penurunan sebesar Rp5.779.678,84 atau 100% dari saldo per 31 Desember 2023 yaitu Rp5.779.678,84.
 10. Penyisihan Piutang Terminal Peti Kemas Palaran – BAPENDA.
 Saldo per 31 Desember 2024 senilai Rp5.996.498,97 mengalami kenaikan 100% dari saldo per 31 Desember 2023.

Penyisihan piutang Lain-Lain PAD yang Sah berdasarkan klasifikasi *aging schedule* atau kriteria kualitas piutang disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5.3. 32 Tabel Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah berdasarkan Kriteria Kualitas

(dalam satuan Rupiah)

No.	Jenis Piutang	Kualitas	Nilai Piutang	Penyisihan %	Nilai Penyisihan per 31 Desember 2024
1	Piutang Denda Retribusi - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Lancar	0,00	0,5	0,00
		Kurang Lancar	0,00	10	0,00
		Diragukan	0,00	50	0,00
		Macet	74.953.134,00	100	74.953.134,00
	Jumlah		74.953.134,00		74.953.134,00
2	Piutang Denda Keterlambatan Pemakaian Kekayaan Daerah - Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	Lancar	0,00	0,5	0,00
		Kurang Lancar	0,00	10	0,00



No.	Jenis Piutang	Kualitas	Nilai Piutang	Penyisihan %	Nilai Penyisihan per 31 Desember 2024
3		Diragukan	0,00	50	0,00
		Macet	29.700.000,00	100	29.700.000,00
	Jumlah		29.700.000,00		29.700.000,00
	Piutang Lampion Garden PT. SAMACO - Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata		825.238.583,64		238.254.655,55
	Jumlah		825.238.583,64		238.254.655,55
4	Piutang Tunjangan Komunikasi Insentif - DPRD	Lancar	0,00	0,5	0,00
		Kurang Lancar	0,00	10	0,00
		Diragukan	0,00	50	0,00
		Macet	948.250.000,00	100	948.250.000,00
	Jumlah		948.250.000,00		948.250.000,00
5	Piutang Belanja Operasional Pimpinan - DPRD	Lancar	0,00	0,5	0,00
		Kurang Lancar	0,00	10	0,00
		Diragukan	0,00	50	0,00
		Macet	128.520.000,00	100	128.520.000,00
	Jumlah		128.520.000,00		128.520.000,00
6	Piutang Upah Kerja - DPRD	Lancar	0,00	0,5	0,00
		Kurang Lancar	0,00	10	0,00
		Diragukan	0,00	50	0,00
		Macet	269.606.055,00	100	269.606.055,00
	Jumlah		269.606.055,00		269.606.055,00
7	Piutang Dinas Kesehatan	BLUD	6.731.528.929,07		1.155.402.320,96
	Jumlah		6.731.528.929,07		1.155.402.320,96
8	Piutang Retribusi Pasar - Perdagangan	Lancar	0,00	0,5	0,00
		Kurang Lancar	125.000.000,00	10	12.500.000,00
		Diragukan	0,00	50	0,00
		Macet	416.027.789,54	100	416.027.789,54
	Jumlah		541.027.789,54		428.527.789,54
9	Terminal Peti Kemas Palaran - BAPENDA	Lancar	1.199.299.793,00	0,5	5.996.498,97
		Kurang Lancar	0,00	10	0,00
		Diragukan	0,00	50	0,00
		Macet	0,00	100	0,00
	Jumlah		1.199.299.793,00		5.996.498,97
	Jumlah Keseluruhan		10.748.124.284,25		3.279.210.454,01

F.



5.3.1.1.3.4 PENYISIHAN PIUTANG LAINNYA

31-12-2024

31-12-2023

(Rp4.124.337.656,93)

(Rp51.958.076.168,68)

Penyisihan Piutang Lainnya adalah saldo Piutang Lainnya Tidak Tertagih dalam waktu tertentu yang dibentuk berdasarkan kualitas atau umur Piutang. Jumlah Penyisihan Piutang Lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp4.124.337.656,93 mengalami penurunan sebesar Rp47.833.738.511,75 atau 92,06% dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp51.958.076.168,68 adapun rincian Penyisihan Piutang Lainnya tahun 2024 dan tahun 2023 disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5.3. 33 Tabel Penyisihan Piutang Lainnya

(dalam satuan Rupiah)

No.	Jenis Piutang	2024	2023	Kenaikan / (Penurunan)	%
1	Retribusi Pencucian Kendaraan Bermotor	2.757.890,00	2.757.890,00	0,00	0,00
2	Piutang IUPK PT. KPC	0,00	47.577.982.320,00	(47.577.982.320,00)	(100,00)
3	Piutang Retribusi IMB RSUD AWS	2.760.207.005,96	2.760.207.005,96	0,00	0,00
4	Piutang Kemitraan Lampion Garden PT. Samaco	351.099.965,64	528.901.965,39	(177.801.999,75)	(33,62)
5	Dana Pensiun Pegawai PPKD	9.444.289,00	12.444.289,00	(3.000.000,00)	(24,11)
6	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	474.514.805,01	549.468.997,01	(74.954.192,00)	(13,64)
7	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	76.313.701,32	76.313.701,32	0,00	0,00
8	Uang Muka Pengadaan Barang/Jasa CV. Puja Kontruksi	450.000.000,00	450.000.000,00	0,00	0,00
Jumlah		4.124.337.656,93	51.958.076.168,68	(47.833.738.511,75)	(92,06)

Penyisihan Piutang Lainnya:

1. Penyisihan Piutang Retribusi Pencucian Kendaraan Bermotor
Saldo per 31 Desember 2024 senilai Rp2.757.890,00 sama dengan tahun 2023 sebesar Rp2.757.890,00.
2. Penyisihan Piutang IUPK PT. KPC
Saldo per 31 Desember 2024 senilai Rp0,00 mengalami penurunan sebesar Rp47.577.982.320,00 atau 100% dari saldo per 31 Desember 2023 yaitu Rp47.577.982.320,00.
3. Penyisihan Piutang Retribusi IMB RSUD AWS
Saldo per 31 Desember 2024 senilai Rp2.760.207.005,96 sama dengan tahun 2023 lalu sebesar Rp2.760.207.005,96.
4. Penyisihan Piutang Kemitraan Lampion Garden PT. Samaco
Saldo per 31 Desember 2024 senilai Rp351.099.965,64 mengalami penurunan sebesar Rp177.801.999,75 atau 33,62% dari saldo per 31 Desember 2023 yaitu Rp528.901.965,39.

f.



5. Penyisihan Piutang Dana Pensiun Pegawai PPKD
 Saldo per 31 Desember 2024 senilai Rp9.444.289,00 mengalami penurunan sebesar Rp3.000.000 atau 24,11% dari saldo per 31 Desember 2023 yaitu Rp12.444.289,00.
6. Penyisihan Piutang Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran
 Saldo per 31 Desember 2024 senilai Rp474.514.805,01 mengalami penurunan sebesar Rp74.954.192,00 atau 13,64% dari saldo per 31 Desember 2023 yaitu Rp549.468.997,01.
7. Penyisihan Piutang Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
 Saldo per 31 Desember 2024 senilai Rp76.313.701,32 sama dengan tahun 2023 sebesar Rp76.313.701,32.
8. Penyisihan Piutang Uang Muka Pengadaan Barang/Jasa CV. Puja Kontruksi Saldo per 31 Desember 2024 senilai Rp450.000.000,00 sama dengan tahun 2023 sebesar Rp450.000.000,00.

Penyisihan piutang lainnya berdasarkan klasifikasi *aging schedule* atau kriteria kualitas Piutangnya disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5.3. 34 Tabel Penyisihan Piutang Lainnya berdasarkan Kriteria Kualitas

(dalam satuan Rupiah)

No.	Jenis Piutang	Kualitas	Nilai Piutang	Penyisihan %	Nilai Penyisihan per 31 Desember 2024
1	Retribusi Pencucian Kendaraan Bermotor	Lancar	0,00	0,50	0,00
		Kurang Lancar	0,00	10,00	0,00
		Diragukan	0,00	50,00	0,00
		Macet	2.757.890,00	100,00	2.757.890,00
	Jumlah		2.757.890,00		2.757.890,00
2	Piutang IUPK PT. KPC	Lancar	0,00	0,50	0,00
		Kurang Lancar	0,00	10,00	0,00
		Diragukan	0,00	50,00	0,00
		Macet	0,00	100,00	0,00
	Jumlah		0,00		0,00
3	Piutang Retribusi IMB RSUD AWS - Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Lancar	0,00	0,50	0,00
		Kurang Lancar	0,00	10,00	0,00
		Diragukan	0,00	50,00	0,00
		Macet	2.760.207.005,96	100,00	2.760.207.005,96
	Jumlah		2.760.207.005,96		2.760.207.005,96
4	Piutang Kemitraan Lampion Garden PT. Samaco - Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata	Lancar	0,00	0,50	0,00
		Kurang Lancar	0,00	10,00	0,00
		Diragukan	0,00	50,00	0,00
		Macet	351.099.965,64	100,00	351.099.965,64
	Jumlah		351.099.965,64		351.099.965,64
5	Dana Pensiun Pegawai PPKD- Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Lancar	0,00	0,50	0,00
		Kurang Lancar	0,00	10,00	0,00



No.	Jenis Piutang	Kualitas	Nilai Piutang	Penyisihan %	Nilai Penyisihan per 31 Desember 2024
6		Diragukan	0,00	50,00	0,00
		Macet	9.444.289,00	100,00	9.444.289,00
	Jumlah		9.444.289,00		9.444.289,00
	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran - Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Lancar	0,00	0,50	0,00
		Kurang Lancar	0,00	10,00	0,00
		Diragukan	0,00	50,00	0,00
		Macet	474.514.805,01	100,00	474.514.805,01
	Jumlah		474.514.805,01		474.514.805,01
7	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah - Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Lancar	0,00	0,50	0,00
		Kurang Lancar	0,00	10,00	0,00
		Diragukan	0,00	50,00	0,00
		Macet	76.313.701,32	100,00	76.313.701,32
	Jumlah		76.313.701,32		76.313.701,32
8	Uang Muka Pengadaan Barang/Jasa CV. Puja Kontruksi - Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Lancar	0,00	0,50	0,00
		Kurang Lancar	0,00	10,00	0,00
		Diragukan	0,00	50,00	0,00
		Macet	450.000.000,00	100,00	450.000.000,00
	Jumlah		450.000.000,00		450.000.000,00
Jumlah Keseluruhan			4.124.337.656,93		4.124.337.656,93

5.3.1.1.4 BEBAN DIBAYAR DIMUKA

31-12-2024

31-12-2023

Rp7.493.603.953,67

Rp34.102.495.895,06

Beban Dibayar Dimuka adalah pengeluaran yang dibayar terlebih dahulu untuk suatu periode yang melebihi periode akuntansi sehingga beban yang dibayar dimuka bukanlah merupakan beban seluruhnya pada periode tersebut tetapi masih ada sisa manfaat yang akan diterima dari pembayaran tersebut.

Beban Dibayar Dimuka Pemerintah Kota Samarinda tahun 2024 terdiri dari Beban Jasa konversi Aplikasi/Sistem Informasi, Beban Telepon *Hotline*, Beban Premi Asuransi, Beban Sewa Kendaraan Dinas ,Beban Sewa Gedung kantor, Beban Sewa Asrama dan Beban Dibayar Dimuka lainnya. Saldo Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2024 sebesar Rp7.493.603.953,67 dan mengalami penurunan sebesar Rp26.608.891.941,39 atau sebesar 78,03% jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp34.102.495.895,06 dengan rincian sebagai berikut:

P.



Tabel 5.3. 35 Rekap Beban Dibayar Dimuka

(dalam satuan Rupiah)

No.	SKPD	2024	2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1.	Beban Jasa Konversi Aplikasi / Sistem Informasi	1.014.966,00	1.691.610,00	(676.644,00)	(40,00)
2.	Beban Telepon <i>Hotline</i>	2.076.250,00	2.076.250,00	0,00	0,00
3.	Beban Premi Asuransi	671.045.904,34	606.438.579,86	64.607.324,48	10,65
4.	Beban Sewa Kendaraan Dinas	6.152.221.000,00	6.864.222.792,21	(712.001.792,21)	(10,37)
5.	Beban Sewa Gedung Kantor	622.245.833,33	755.094.999,99	(132.849.166,66)	(17,59)
6.	Beban Sewa Asrama	45.000.000,00	55.000.000,00	(10.000.000,00)	(18,18)
7.	Beban Dibayar Dimuka Lainnya	0,00	25.817.971.663,00	(25.817.971.663,00)	(100,00)
Jumlah		7.493.603.953,67	34.102.495.895,06	(26.608.891.941,39)	(78,03)

Tabel 5.3. 36 Rincian Beban Dibayar Dimuka Jasa Konversi Aplikasi / Sistem Informasi

(dalam satuan Rupiah)

No.	SKPD	2024	2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.014.966,00	1.691.610,00	(676.644,00)	(40,00)
Jumlah		1.014.966,00	1.691.610,00	(676.644,00)	(40,00)

Tabel 5.3. 37 Rincian Beban Dibayar Dimuka Telepon *Hotline*

(dalam satuan Rupiah)

No.	SKPD	2024	2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	2.076.250,00	2.076.250,00	0,00	0,00
Jumlah		2.076.250,00	2.076.250,00	0,00	0,00

Tabel 5.3. 38 Rincian Beban Dibayar Dimuka Premi Asuransi

(dalam satuan Rupiah)

No.	SKPD	2024	2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1.	Dinas Lingkungan Hidup	183.391.666,67	177.848.889,16	5.542.777,51	3,12
2.	Dinas pemadam kebakaran dan Penyelamatan	6.514.500,00	3.315.833,33	3.198.666,67	96,47
3.	Satuan Polisi Pamong Praja	89.129.394,17	80.132.791,66	8.996.602,51	11,23
4.	Sekretariat Daerah	204.045.443,50	164.971.163,21	39.074.280,29	23,69
5.	Sekretariat DPRD	187.964.900,00	180.169.902,50	7.794.997,50	4,33
Jumlah		671.045.904,34	606.438.579,86	64.607.324,48	10,65

Tabel 5.3. 39 Rincian Beban Dibayar Dimuka Sewa Kendaraan Dinas

(dalam satuan Rupiah)

No	SKPD	2024	2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	4.012.191.000,00	1.805.500.000,00	2.206.691.000,00	122,22
2.	Badan Perencanaan pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	97.800.000,00	0,00	97.800.000,00	100,00
3.	Dinas Kesehatan	21.000.000,00	0,00	21.000.000,00	100,00
4.	Kecamatan Samarinda Ilir	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	100,00
5.	Sekretariat Daerah	1.971.230.000,00	5.058.722.792,21	(3.087.492.792,21)	(61,03)
Jumlah		6.152.221.000,00	6.864.222.792,21	(712.001.792,21)	(10,37)



Tabel 5.3. 40 Rincian Beban Dibayar Dimuka Sewa Gedung Kantor

(dalam satuan Rupiah)

No.	SKPD	2024	2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1.	Badan Pendapatan Daerah	0,00	68.933.333,33	(68.933.333,33)	(100,00)
2.	Dinas Kesehatan	2.600.000,00	33.333.333,33	(30.733.333,33)	(92,20)
3.	Dinas Perikanan	457.645.833,33	456.995.000,00	650.833,33	0,14
4.	Kecamatan Loa Janan Ilir	49.500.000,00	49.500.000,00	0,00	0,00
5.	Kecamatan Samarinda Ilir	0,00	28.000.000,00	(28.000.000,00)	(100,00)
6.	Kecamatan Samarinda Utara	0,00	5.833.333,33	(5.833.333,33)	(100,00)
7.	Kecamatan Sungai Pinang	112.500.000,00	112.500.000,00	0,00	0,00
Jumlah		622.245.833,33	755.094.999,99	(132.849.166,66)	(17,59)

Tabel 5.3. 41 Rincian Beban Dibayar Dimuka Sewa Asrama

(dalam satuan Rupiah)

No.	SKPD	2024	2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Sekretariat Daerah	45.000.000,00	55.000.000,00	(10.000.000,00)	(18,18)
Jumlah		45.000.000,00	55.000.000,00	(10.000.000,00)	(18,18)

Tabel 5.3. 42 Rincian Beban Dibayar Dimuka Lainnya

(dalam satuan Rupiah)

No.	SKPD	2024	2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	25.817.971.663,00	(25.817.971.663,00)	(100,00)
Jumlah		0,00	25.817.971.663,00	(25.817.971.663,00)	(100,00)

5.3.1.1.5 PERSEDIAAN

31-12-2024

31-12-2023

62.391.337.803,02

Rp56.000.566.791,29

Persediaan adalah aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*Supplies*). Barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam waktu 12 (dua belas) bulan dari tanggal pelaporan. Persediaan disajikan berdasarkan hasil inventarisasi fisik per tanggal 31 Desember 2024. Terdapat saldo persediaan per 31 Desember 2024 sebesar Rp62.391.337.803,02 dan mengalami penurunan sebesar Rp6.390.771.011,73 atau 11,41%, jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp56.000.566.791,29 dengan rincian persediaan per SKPD sebagai berikut:

f.



Tabel 5.3. 43 Rincian Persediaan per SKPD Per 31 Desember 2023

(dalam satuan Rupiah)

No	SKPD	Saldo Akhir 2024	Saldo Akhir 2023	Kenaikan / (penurunan)	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	126.653.598,00	202.315.110,00	(75.661.512,00)	(37,40)
2	Dinas Kesehatan	34.901.600.245,52	34.358.147.187,96	543.453.057,56	1,58
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	22.105.155.300,00	15.767.952.500,00	6.337.202.800,00	40,19
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	576.982.700,00	1.125.609.708,00	(548.627.008,00)	(48,74)
5	Satuan Polisi Pamong Praja	50.000.000,00	16.912.231,00	33.087.769,00	195,64
6	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	6.220.000,00	15.985.240,00	(9.765.240,00)	(61,09)
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	315.855.700,00	155.362.200,00	160.493.500,00	103,30
8	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	7.434.150,00	11.443.300,00	(4.009.150,00)	(35,03)
9	Dinas Tenaga Kerja	8.919.250,00	12.292.950,00	(3.373.700,00)	(27,44)
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	6.923.600,00	3.926.200,00	2.997.400,00	76,34
11	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	9.922.900,00	7.734.375,00	2.188.525,00	28,30
12	Dinas Lingkungan Hidup	823.820.400,00	815.000.275,00	8.820.125,00	1,08
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.287.924.882,50	1.438.674.315,33	(150.749.432,83)	(10,48)
14	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	14.781.365,00	48.632.360,00	(33.850.995,00)	(69,61)
15	Dinas Perhubungan	716.763.280,00	720.080.880,00	(3.317.600,00)	(0,46)
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.391.775,00	2.382.500,00	(990.725,00)	(41,58)
17	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	6.229.700,00	2.213.000,00	4.016.700,00	181,50
18	Badan Penanaman Modal dan Perijinan Satu Pintu	409.744.480,00	305.730.350,00	104.014.130,00	34,02
19	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	64.953.000,00	161.842.000,00	(96.889.000,00)	(59,87)
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	2.565.000,00	(2.565.000,00)	(100,00)
21	Dinas Perikanan	299.000,00	0,00	299.000,00	100,00
22	Dinas Perdagangan	32.518.500,00	144.750.000,00	(112.231.500,00)	(77,53)
23	Sekretariat Daerah	247.936.200,00	201.355.090,00	46.581.110,00	23,13
24	Sekretariat DPRD	28.911.500,00	20.126.075,00	8.785.425,00	43,65
25	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	77.898.575,00	58.985.250,00	18.913.325,00	32,06
27	Badan Pendapatan Daerah	420.829.734,00	268.037.684,00	152.792.050,00	57,00
28	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	45.561.500,00	5.520.400,00	40.041.100,00	725,33
29	Inspektorat Daerah	18.968.700,00	18.293.600,00	675.100,00	3,69
30	Kecamatan Palaran	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Kecamatan Samarinda Ilir	2.230.000,00	15.254.000,00	(13.024.000,00)	(85,38)



No	SKPD	Saldo Akhir 2024	Saldo Akhir 2023	Kenaikan / (penurunan)	%
32	Kecamatan Samarinda Seberang	9.799.400,00	9.236.000,00	563.400,00	6,10
33	Kecamatan Samarinda Utara	0,00	31.885.000,00	(31.885.000,00)	(100,00)
34	Kecamatan Samarinda Ulu	26.866.125,00	28.102.785,00	(1.236.660,00)	(4,40)
35	Kecamatan Sungai Kunjang	4.842.500,00	7.491.800,00	(2.649.300,00)	(35,36)
36	Kecamatan Sambutan	3.934.500,00	3.034.000,00	900.500,00	29,68
37	Kecamatan Sungai Pinang	15.476.993,00	1.284.300,00	14.192.693,00	1.105,09
38	Kecamatan Samarinda Kota	992.500,00	2.239.375,00	(1.246.875,00)	(55,68)
39	Kecamatan Loa Janan Ilir	12.995.750,00	10.169.750,00	2.826.000,00	27,79
40	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		62.391.337.803,02	56.000.566.791,29	6.390.771.011,73	11,41

Rincian Persediaan berdasarkan jenis persediaan per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.3. 44 Rincian Persediaan APBD dan Non APBD Menurut Jenis Per 31 Desember 2024

(dalam satuan Rupiah)

No.	Jenis Persediaan	Saldo 2024	Saldo 2023	Kenaikan / (penurunan)	%
Persediaan Bahan Habis Pakai-APBD					
1	Bahan Bangunan dan Kontruksi	505.695.380,00	427.813.080,00	77.882.300,00	18,20
2	Bahan Kimia	109.124.375,00	281.569.175,00	(172.444.800,00)	(61,24)
3	Bahan Bakar dan Pelumas	313.085.203,00	249.841.770,00	63.243.433,00	25,31
4	Bahan Bibit Tanaman	21.000.000,00	145.282.000,00	(124.282.000,00)	(85,55)
5	Isi Tabung Gas	238.500,00	0,00	238.500,00	100,00
6	Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	100,00
7	Suku Cadang Alat Kedokteran	47.517.000,00	1.736.122.149,37	(1.688.605.149,37)	(97,26)
8	Suku Cadang Alat Labotarium	10.339.517.951,54	6.709.918.683,27	3.629.599.268,27	54,09
9	Suku Cadang Alat Bengkel	206.250,00	5.806.250,00	(5.600.000,00)	(96,45)
10	Suku Cadang Alat Angkutan	107.580.660,00	1.276.500,00	106.304.160,00	8.327,78
11	Suku Cadang Alat Pertanian	102.303.500,00	27.912.000,00	74.391.500,00	266,52
12	Suku Cadang Alat Lainnya	35.160.000,00	31.795.000,00	3.365.000,00	10,58
13	Alat tulis Kantor	844.677.791,00	640.222.737,50	204.455.053,50	31,93
14	Kertas & Cover	115.383.908,00	79.894.400,00	35.489.508,00	44,42
15	Cetak	1.315.676.961,50	1.875.912.931,83	(560.235.970,33)	(29,86)
16	Benda Pos	1.260.000,00	9.600.000,00	(8.340.000,00)	(86,88)
17	Bahan Komputer	174.426.990,00	52.739.200,00	121.687.790,00	230,73
18	Bahan Perabot Kantor	161.319.515,00	74.989.775,00	86.329.740,00	115,12
19	Bahan Alat Listrik	798.001.480,00	1.371.171.613,00	(573.170.133,00)	(41,80)



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
CATATAN UNTUK LAPORAN KEUANGAN
 UNTUK YANG TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2024



No.	Jenis Persediaan	Saldo 2024	Saldo 2023	Kenaikan / (penurunan)	%
20	Bahan Souvenir/ Cendera mata	90.227.500,00	53.547.500,00	36.680.000,00	68,50
21	Bahan Kegiatan Kantor Lainnya	75.551.500,00	0,00	75.551.500,00	100,00
22	Bahan Obat	4.142.595.913,04	3.804.077.151,50	338.518.761,54	8,90
23	Bahan Obat-obatan Lainnya	73.700.077,00	0,00	73.700.077,00	100,00
24	Barang Diserahkan kepada Masyarakat	22.146.655.300,00	15.780.046.500,00	6.366.608.800,00	40,35
25	Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga Lainnya	24.311.500,00	0,00	24.311.500,00	100,00
26	Bahan Natura	42.288.580,00	59.746.000,00	(17.457.420,00)	(29,22)
27	Bahan Pakan	11.163.500,00	28.380.000,00	(17.216.500,00)	(60,66)
28	Bahan Natura dan Pakan Lainnya	14.082.000,00	4.129.200,00	9.952.800,00	241,03
29	Komponen Rambu-rambu	166.152.400,00	175.576.300,00	(9.423.900,00)	(5,37)
	Jumlah Belanja Barang Habis Pakai APBD	41.781.303.735,08	33.627.369.916,47	8.153.933.818,61	24,25
Reklas dari Belanja Tak Terduga					
1	Bahan Obat - Obatan Lainnya	0,00	529.148.048,26	(529.148.048,26)	(100,00)
	Jumlah Reklas dari Belanja Tak Terduga	0,00	529.148.048,26	(529.148.048,26)	(100,00)
Reklas dari Belanja Pemeliharaan					
1	Bahan Perabot Kantor	97.788.375,00	439.838.055,00	(342.049.680,00)	(77,77)
2	Alat tulis Kantor	228.000,00	0,00	228.000,00	100,00
3	Bahan Alat Listrik	2.206.325,00	0,00	2.206.325,00	100,00
4	Bahan Bangunan dan Konstruksi	3.900.000,00	318.200,00	3.581.800,00	1.125,64
5	Suku Cadang Alat Angkutan	122.664.340,00	0,00	122.664.340,00	100,00
6	Suku Cadang Alat Kedokteran	0,00	1.464.000,00	(1.464.000,00)	(100,00)
7	Suku Cadang Alat Pertanian	0,00	5.570.000,00	(5.570.000,00)	(100,00)
8	Suvenir/Cendera Mata	0,00	207.000,00	(207.000,00)	(100,00)
9	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.040.000,00	775.000,00	265.000,00	34,19
10	Bahan Kimia	0,00	1.332.000,00	(1.332.000,00)	(100,00)
11	Barang Diserahkan kepada Masyarakat	78.000,00	0,00	78.000,00	100,00
	Jumlah Reklas dari Belanja Pemeliharaan	227.905.040,00	449.504.255,00	(221.599.215,00)	(49,30)
Reklas dari Belanja Modal					
1	Bahan Alat Listrik	44.895.000,00	0,00	44.895.000,00	100,00
2	Bahan Komputer	0,00	1.212.000,00	(1.212.000,00)	(100,00)
3	Bahan Perabot Kantor	17.349.000,00	7.545.400,00	9.803.600,00	129,93
	Jumlah Reklas Dari Belanja Modal	62.244.000,00	8.757.400,00	53.486.600,00	610,76
Jumlah Persediaan-APBD		42.071.452.775,08	34.614.779.619,73	7.456.673.155,35	21,54
Persediaan Non APBD					

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN ADALAH BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI LAPORAN KEUANGAN



SAMARINDA
 magnificat



No.	Jenis Persediaan	Saldo 2024	Saldo 2023	Kenaikan / (penurunan)	%
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)					
1	Bahan Alat Tulis Kantor	0,00	368.525,00	(368.525,00)	(100,00)
2	Bahan Alat Listrik	0,00	756.600,00	(756.600,00)	(100,00)
3	Bahan Cetak	75.000,00	0,00	75.000,00	100,00
4	Bahan Perabot Kantor	0,00	1.378.780,00	(1.378.780,00)	(100,00)
5	Bahan Obat - Obat Lainnya	0,00	135.000,00	(135.000,00)	(100,00)
6	Suku Cadang Alat Kedokteran	194.250,00	0,00	194.250,00	100,00
Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)					
1	Bahan Alat Tulis Kantor	220.338.303,40	156.692.932,40	63.645.371,00	40,62
2	Kertas dan Cover	2.971.800,00	0,00	2.971.800,00	100,00
3	Bahan Cetak	690.000,00	0,00	690.000,00	100,00
4	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	0,00	1.623.318,97	(1.623.318,97)	(100,00)
5	Bahan Benda Listrik	907.000,00	788.400,00	118.600,00	15,04
6	Bahan Perabot Kantor	49.702.110,10	59.747.052,96	(10.044.942,86)	(16,81)
7	Bahan Bakar dan Pelumas	29.527.096,00	29.782.938,00	(255.842,00)	(0,86)
8	Isi Tabung Gas	30.433.300,34	19.184.600,34	11.248.700,00	58,63
9	Bahan Kimia	11.363.070,00	97.710.000,00	(86.346.930,00)	(88,37)
10	Natura	0,00	19.446.000,00	(19.446.000,00)	(100,00)
11	Natura dan Pakan Lainnya	17.676.000,00	0,00	17.676.000,00	100,00
12	Bahan Obat	4.673.814.995,70	4.103.287.997,07	570.526.998,63	13,90
13	Bahan Obat - Obat Lainnya	2.176.268.226,18	2.870.257.817,00	(693.989.590,82)	(24,18)
14	Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.100.000,00	1.500.000,00	(400.000,00)	(26,67)
15	Bahan Lainnya	3.645.103,00	0,00	3.645.103,00	100,00
16	Suku Cadang Alat Kedokteran	7.289.940,00	1.198.800,00	6.091.140,00	508,10
17	Suku Cadang Lainnya	149.812.204,48	0,00	149.812.204,48	100,00
Donasi					
1	Bahan Cetak (HIBAH PUSAT)	306.478.200,00	0,00	306.478.200,00	100,00
2	Bahan Obat (Donasi/IFK)	12.624.018.618,74	0,00	12.624.018.618,74	100,00
3	Bahan Obat (Hibah Provinsi)	7.814.455,00	11.480.601.107,82	(11.472.786.652,82)	(99,93)
4	Bahan Obat (Alat Kontrasepsi)	0,00	33.175.535,00	(33.175.535,00)	(100,00)
5	Bahan Obat - Obat Lainnya (Donasi/IFK)	0,00	2.324.357.157,00	(2.324.357.157,00)	(100,00)
Jumlah Persediaan Non APBD		20.314.119.672,94	21.201.992.561,56	(887.872.888,62)	(4,19)
Biaya Operasional Sekolah (BOS)					
1	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	0,00	183.794.610,00	(183.794.610,00)	(100,00)



No.	Jenis Persediaan	Saldo 2024	Saldo 2023	Kenaikan / (penurunan)	%
2	Perabot Kantor (BOS)	5.765.355,00	0,00	5.765.355,00	100,00
Jumlah Persediaan BOS		5.765.355,00	183.794.610,00	(178.029.255,00)	(96,86)
Jumlah Persediaan Keseluruhan		62.391.337.803,02	56.000.566.791,29	6.390.771.011,73	11,41

5.3.1.2 INVESTASI JANGKA PANJANG

31-12-2024

31-12-2023

Rp652.436.557.819,19

Rp614.557.680.115,22

Investasi Jangka Panjang merupakan investasi yang diadakan dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomis dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi. Saldo Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2024 sebesar Rp652.436.557.819,19 dan mengalami kenaikan sebesar Rp37.878.877.703,97 atau 6,16% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp614.557.680.115,22. Saldo tersebut berupa Investasi Non Permanen dan Investasi Permanen dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3. 45 Rincian Investasi Jangka Panjang

(dalam satuan Rupiah)

No.	Investasi Jangka Panjang	2024	2023	Kenaikan / (Penurunan)	%
1	Investasi Jangka Panjang Non Permanen - Dana Bergulir	1.943.787.728,79	1.927.643.928,79	16.143.800,00	0,84
2	Investasi Jangka Panjang Permanen - Penyertaan Modal	650.492.770.090,40	612.630.036.186,43	37.862.733.903,97	6,18
Jumlah		652.436.557.819,19	614.557.680.115,22	37.878.877.703,97	6,16

5.3.1.2.1 INVESTASI JANGKA PANJANG NON PERMANEN-DANA BERGULIR

31-12-2024

31-12-2023

Rp1.943.787,728,79

Rp1.927.643.928,79

Saldo Investasi Jangka Panjang Non Permanen-Dana Bergulir terdiri dari bantuan pinjaman dana bergulir koperasi dan pengembangan usaha ekonomi kecil menengah serta pinjaman kepada kelompok petani plasma sawit yang disalurkan melalui Bank Kaltimara Cabang Samarinda dan BPR Bank Samarinda (Perseroda). Nilai dana bergulir per 31 Desember 2024 disajikan *net realizable value* sesuai dengan kebijakan akuntansi yang mengatur hal tersebut yaitu sebesar nilai kas yang dipegang ditambah saldo yang dapat tertagih. Untuk guliran dana yang dianggap tidak bisa tertagih dan memenuhi syarat untuk dihapus buku dan hapus tagih akan dilakukan proses penghapusan sesuai kebijakan akuntansi Pemerintah Kota Samarinda.



Rincian penyaluran Dana Bergulir bantuan pinjaman Dana Bergulir Koperasi dan Pengembangan Usaha Ekonomi Kecil Menengah adalah sebagai berikut:

(dalam satuan Rupiah)

No	Tahun	Penyaluran Ke Masyarakat	Angsuran	Denda	Sisa
1	2001	1.151.966.628,00	520.290.639,00	0,00	631.675.989,00
2	2001	176.166.664,00	112.401.108,00	0,00	63.765.556,00
3	2002	3.572.034.975,00	2.578.027.707,00	0,00	994.007.268,00
4	2003	1.122.064.450,00	789.699.416,00	0,00	332.365.034,00
5	2004	550.000.000,00	497.750.000,00	0,00	52.250.000,00
6	2005	605.000.000,00	508.500.000,00	0,00	96.500.000,00
7	2006	682.000.000,00	674.000.000,00	0,00	8.000.000,00
8	2007	472.000.000,00	472.000.000,00	0,00	0,00
9	2008	1.109.200.000,00	1.059.960.600,00	2.191.195,00	51.430.595,00
Jumlah		9.440.432.717,00	7.212.629.470,00	2.191.195,00	2.229.994.442,00

Adapun Saldo Dana Bergulir per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.943.787.728,79 dan mengalami kenaikan sebesar Rp16.143.800,00,00 atau sebesar 0,84% dibanding saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.927.643.928,79 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3. 46 Rincian Saldo Dana Bergulir

(dalam satuan Rupiah)

No.	Dana Bergulir	2024	2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Saldo di PT. Bank Pembangunan Daerah Kaltimara (Rek. 0011414302)	1.423.624.044,79	1.407.480.244,79	16.143.800,00	1,15
2	Dana Sawit di PT. BPR Bank Samarinda (Perseroda) (Rek.01.11.004068.01)	520.163.684,00	520.163.684,00	0,00	0,00
Jumlah		1.943.787.728,79	1.927.643.928,79	16.143.800,00	0,84

5.3.1.2.2 INVESTASI JANGKA PANJANG PERMANEN-PENYERTAAN MODAL

31-12-2024

31-12-2023

Rp650.492.770.090,40

Rp612.630.036.186,43

Merupakan saldo Penyertaan Modal Pemerintah Kota Samarinda pada Lembaga Keuangan Daerah dan Perusahaan Daerah, Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Daerah dapat dijelaskan pada Lampiran 3 saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp650.492.770.090,40 dan mengalami kenaikan sebesar Rp37.862.733.903,97 atau sebesar 6,18% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp612.630.036.186,43 dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 5.3. 47 Rincian Investasi Jangka Panjang Permanen-Penyertaan Modal

(dalam satuan Rupiah)

No	Uraian	2024	2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Perumdam Tirta Kencana	545.513.931.514,00	516.996.953.561,00	28.516.977.953,00	5,52
2	PT. BPR Bank Samarinda (Perseroda)	22.858.270.672,40	24.019.306.129,43	(1.161.035.457,03)	(4,83)
3	Perumda Varia Niaga Samarinda	17.195.567.904,00	6.688.776.496,00	10.506.791.408,00	157,08
4	PT. Bank Pembangunan Daerah Kaltimara	64.925.000.000,00	64.925.000.000,00	0,00	0,00
Jumlah		650.492.770.090,40	612.630.036.186,43	37.862.733.903,97	6,18

Penjelasan atas Penyertaan Modal adalah sebagai berikut:

- a. Penyertaan Modal pada Perumdam Tirta Kencana Kota Samarinda disajikan dengan menggunakan *equity method*. Nilai penyertaan modal pada Perumdam Tirta Kencana per 31 Desember 2024 sebesar Rp545.513.931.514,00. Nilai Ekuitas yang tercantum pada Laporan Keuangan *Audited* Perumdam Tirta Kencana adalah sebesar Rp605.679.217.514,00 dengan rincian:
- Penyertaan Pemerintah yang Belum Ditentukan Statusnya:Rp158.988.849.550,00
 - Penyertaan Pemerintah Kota Samarinda :Rp110.804.256.612,00
 - Penyertaan dari Hibah Aset :Rp137.521.482.342,00
 - Saldo laba (rugi) :Rp198.364.629.010,00
 - Jumlah Ekuitas :Rp605.679.217.514,00

Terdapat perbedaan antara nilai Ekuitas yang tercatat di neraca Perumdam Tirta Kencana dengan nilai Penyertaan Modal Kota Samarinda sebesar Rp60.165.286.001,00 berupa Instalasi Pengolahan Air (IPA) Loa Bakung yang masih tercatat sebagai aset tetap dan belum dilakukan reklasifikasi ke penyertaan modal.

Rincian Penyertaan Modal Pemerintah Kota Samarinda pada Perumdam Tirta Kencana sebagai berikut:

(dalam satuan Rupiah)

Nomor	Tahun	Dasar Hukum	Nominal
1	2002	Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008	2.392.826,00
2	2004	Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008	5.000.000.000,00
3	2006	Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008	5.000.000.000,00
4	2008	Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008	5.000.000.000,00
5	2014	Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2009	15.000.000.000,00
6	2015	Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2009	17.607.173.820,00
7	2016	Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016	62.402.689.966,00
8	2018	Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016	792.000.000,00
Jumlah			110.804.256.612,00

- b. Saldo Penyertaan Modal pada PT. BPR Bank Samarinda (Perseroda) Kota Samarinda disajikan sebesar saldo ekuitas dan diperhitungkan dengan menggunakan *equity method*. Laporan Keuangan *Audited* per 31 Desember 2024 sebesar Rp22.858.270.672,40. Nilai Ekuitas pada Laporan Keuangan Audited PD. Bank Perkreditan Rakyat Kota Samarinda Tahun Anggaran 2024 adalah Rp. 22.858.270.672,40 dengan rincian:



- Modal Dasar	: Rp25.000.000.000,00
- Cadangan Umum	: Rp2.424.325.953,58
- Cadangan Khusus	: Rp2.290.863.003,67
- Rugi Tahun Lalu	: (Rp5.695.882.827,82)
- Rugi Tahun Berjalan	: <u>(Rp1.161.035.457,03)</u>
Jumlah Ekuitas	: Rp22.858.270.672,40

Rincian Penyertaan Modal Pemerintah Kota Samarinda pada PT. BPR Bank Samarinda (Perseroda) sebagai berikut:

(dalam satuan Rupiah)

Nomor	Tahun	Dasar Hukum	Nominal
1	2004	Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004	2.000.000.000,00
2	2006	Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004	3.000.000.000,00
3	2008	Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008	3.000.000.000,00
4	2009	Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008	2.000.000.000,00
5	2012	Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012	5.000.000.000,00
6	2013	Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012	3.000.000.000,00
7	2015	Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012	7.000.000.000,00
Jumlah			25.000.000.000,00

- c. Saldo Penyertaan Modal pada Perumda Varia Niaga Samarinda disajikan sebesar saldo ekuitas dan diperhitungkan dengan menggunakan *equity method*. Pada tahun 2024 terdapat keuntungan atas pelepasan tanah sambutan sebesar Rp26.822.523.113,00. Ekuitas pada Laporan Keuangan *Audited* Perumda Varia Niaga Samarinda adalah sebesar Rp17.195.567.904,00 dengan rincian:

- Tambahan Penyertaan Modal	: Rp0,00
- Modal Pemkot Samarinda	: Rp41.972.036.830,00
- Laba Rugi Tahun Berjalan	: Rp10.506.791.408,00
- Saldo Laba	: <u>(Rp35.283.260.334,00)</u>
Jumlah Ekuitas	: Rp17.195.567.904,00

Rincian Penyertaan Modal Pemerintah Kota Samarinda pada Perumda Varia Niaga sebagai berikut:

(dalam satuan Rupiah)

Nomor	Tahun	Dasar Hukum	Nominal
1	2002	Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2002	910.368.830,00
2	2003	Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2002	320.000.000,00
3	2008	Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2008	2.000.000.000,00
4	2023	Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2008	10.000.000.000,00
Jumlah			13.230.368.830,00

Berdasarkan Laporan Kantor Akuntan Publik atas Laporan Keuangan Perumda Varia Niaga tahun 2024 dinyatakan memperoleh Opini Wajar Dengan Pengecualian. Pengecualian oleh Kantor Akuntan Publik pada akun persediaan dan cadangan kewajiban imbalan pasca kerja yang telah terutang. Penyajian persediaan pada neraca belum menghitung nilai yang dapat direalisasi (*net realizable value*). Persediaan disajikan di neraca tidak dilakukan pengujian penurunan nilai persediaan. Perumda Varia Niaga belum mematuhi SAK ETAP BAB 23 tentang Imbalan Kerja. Dampak belum dihitungnya kewajiban imbalan pasca kerja yang telah terutang dapat menurunkan laba berjalan dan saldo ekuitas.

- d. Saldo Penyertaan Modal pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kaltimara disajikan dengan menggunakan *cost method* sesuai dengan jumlah dana yang disetorkan ke Bank Kaltimara sebagai Penyertaan Modal. Pada tahun 2024 saldo Penyertaan



Modal masih sama dengan saldo ditahun 2023 senilai Rp64.925.000.000,00 tidak ada penambahan dari Penyertaan Modal.

5.3.1.3 ASET TETAP

31-12-2024

31-12-2023

Rp18.250.901.905.883,98

Rp16.638.462.114.744,70

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset yang menunjukkan jumlah dan nilai perolehan aset tetap yang dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah per 31 Desember 2024. Nilai perolehan aset tetap Pemerintah Kota Samarinda per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp18.250.901.905.883,98 mengalami kenaikan sebesar Rp1.612.439.791.139,28 atau 9,69% dari tahun 2023 sebesar Rp16.638.462.114.744,70 dengan komposisi dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 5.3. 48 Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

(dalam satuan Rupiah)

Aset tetap	2024	2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Tanah	10.086.912.455.500,90	10.022.387.805.117,90	64.524.650.383,00	0,64
Peralatan dan Mesin	1.686.135.664.037,10	1.516.776.078.131,79	169.359.585.905,31	11,17
Gedung dan Bangunan	3.484.312.293.400,36	2.973.052.624.992,72	511.259.668.407,64	17,20
Jalan, Jaringan dan Irigasi	10.249.283.438.359,30	9.110.001.006.732,17	1.139.282.431.627,12	12,51
Aset Tetap Lainnya	10.792.054.573,49	10.492.774.077,49	299.280.496,00	2,85
Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.382.467.909.191,63	594.534.075.202,80	787.933.833.988,83	132,53
Akumulasi Penyusutan	(8.649.001.909.178,80)	(7.588.782.249.510,17)	(1.060.219.659.668,63)	13,97
Jumlah	18.250.901.905.883,98	16.638.462.114.744,70	1.612.439.791.139,28	9,69

f.



Tabel 5.3. 49 Rincian Mutasi Aset

(dalam satuan Rupiah)

Keterangan	Tanah	Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan, Jaringan dan Irigasi	Aset Tetap Lainnya	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Jumlah
Saldo Awal	10.022.387.805.117,90	1.516.776.078.131,79	2.973.052.624.992,72	9.110.001.006.732,17	10.492.774.077,49	594.534.075.202,80	24.227.244.364.254,87
Penambahan							
LRA / Realisasi Belanja Modal	68.288.983.726,00	179.766.693.810,00	912.425.268.299,00	1.415.682.927.225,00	19.363.811.286,00	0,00	2.595.527.684.346,00
Hibah	13.937.000.000,00	2.238.187.000,00	76.068.291.250,00	0,00	0,00	0,00	92.243.478.250,00
Reklas Dari Anggaran Barang dan Jasa	0,00	9.352.207.361,00	18.679.891.914,00	33.437.946.366,00	107.241.436,00	3.798.196.145,00	65.375.483.222,00
Utang	165.200.000,00	797.600.951,00	176.545.500,00	9.478.650,00	0,00	44.010.530.939,55	45.159.356.040,55
Inventarisasi	7.939.763.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.939.763.000,00
Mutasi Antar SKPD	0,00	8.071.835.263,00	6.434.626.300,00	0,00	0,00	0,00	14.506.461.563,00
Reklasifikasi + Koreksi	0,00	2.451.819.688,31	46.068.927.500,00	30.806.210.900,03	0,00	756.274.624.452,00	835.601.582.540,34
Jumlah Mutasi Tambah	90.330.946.726,00	202.678.344.073,31	1.059.853.550.763,00	1.479.936.563.141,03	19.471.052.722,00	804.083.351.536,55	3.656.353.808.961,89
Pengurangan							
SK Penghapusan	948.000.000,00	15.678.235.865,00	43.323.435.844,00	0,00	293.464.140,00	0,00	60.243.135.849,00
Pembayaran Utang	0,00	79.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.650.000,00
Belanja Barang Yang Dianggarkan Di Belanja Modal	4.468.795.800,00	8.140.775.354,00	11.807.482.013,00	174.456.105,00	296.579.512,00	0,00	24.888.088.784,00
Hibah	0,00	0,00	9.378.501.300,00	0,00	213.880.830,00	0,00	9.592.382.130,00
Aset Dibawah Nilai Kapitalisasi	0,00	730.661.586,00	2.390.712.786,00	3.874.730.038,00	17.384.590.124,00	0,00	24.380.694.534,00
Mutasi Antar SKPD	0,00	8.071.835.263,00	6.434.626.300,00	0,00	0,00	0,00	14.506.461.563,00
Reklasifikasi + Koreksi	20.389.500.543,00	617.600.100,00	475.259.124.112,36	336.604.945.370,91	983.257.620,00	16.149.517.547,72	850.003.945.293,99
Jumlah Mutasi Kurang	25.806.296.343,00	33.318.758.168,00	548.593.882.355,36	340.654.131.513,91	19.171.772.226,00	16.149.517.547,72	983.694.358.153,99
Saldo Akhir	10.086.912.455.500,90	1.686.135.664.037,10	3.484.312.293.400,36	10.249.283.438.359,30	10.792.054.573,49	1.382.467.909.191,63	26.899.903.815.062,78

f.



5.3.1.3.1 TANAH

Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp10.086.912.455.500,90 mengalami kenaikan sebesar Rp64.524.650.383,00 atau 0,64% dari tahun 2023 sebesar Rp10.022.387.805.117,90.

Tabel 5.3. 50 Tanah

(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Per 31 Desember 2024	Per 31 Desember 2023	Kenaikan/ (penurunan)	%
Tanah	10.086.912.455.500,90	10.022.387.805.117,90	64.524.650.383,00	0,64
Jumlah	10.086.912.455.500,90	10.022.387.805.117,90	64.524.650.383,00	0,64

Mutasi nilai tanah dapat dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai (Rp)
Saldo Per 31 Desember 2023	10.022.387.805.117,90
Mutasi Tambah	90.330.946.726,00
Mutasi Kurang	(25.806.296.343,00)
Saldo akhir per 31 Desember 2024	10.086.912.455.500,90

Adapun mutasi tambah dapat dirincikan sebagai berikut:

Uraian	Nilai (Rp)
Realisasi Belanja Modal Tanah Sekretariat Daerah	28.519.000.000,00
Realisasi Belanja Modal Tanah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	33.019.983.726,00
Realisasi Belanja Modal Tanah Badan Pengelolaan dan Aset Daerah	6.750.000.000,00
Hibah dari masyarakat	13.937.000.000,00
Inventarisasi aset di Badan Pengelolaan dan Aset Daerah	7.939.763.000,00
Hutang penilaian tanah di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	165.200.000,00
Jumlah Mutasi Tambah	90.330.946.726,00

Adapun mutasi kurang dapat dirincikan sebagai berikut:

Uraian	Nilai (Rp)
Reklasifikasi dari Belanja Modal Tanah Ke Barang dan Jasa di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	4.468.795.800,00
Penghapusan Aset Tetap dengan SK Penghapusan	21.337.500.543,00
Jumlah Mutasi Kurang	25.806.296.343,00

5.3.1.3.2 PERALATAN DAN MESIN

Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp1.686.135.664.037,10 dan Rp1.516.776.078.131,79. Terjadi peningkatan nilai



Aset Tetap Peralatan dan Mesin dibandingkan tahun lalu sebesar Rp169.359.585.905,31 atau sebesar 11,17%. Adapun rincian perubahan adalah sebagai berikut:

Tabel 5.3. 51 Rincian Peralatan dan Mesin

(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	2024	2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Alat Besar	152.907.450.352,00	145.821.787.982,00	7.085.662.370,00	4,86
2	Alat Angkutan	304.356.031.881,00	267.180.228.369,00	37.175.803.512,00	13,91
3	Alat Bengkel dan Alat Ukur	27.751.095.843,00	26.536.921.493,00	1.214.174.350,00	4,58
4	Alat Pertanian	20.347.888.838,00	19.726.147.333,00	621.741.505,00	3,15
5	Alat Kantor dan Rumah Tangga	452.959.518.681,44	401.103.914.144,44	51.855.604.537,00	12,93
6	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	71.463.169.720,50	63.973.654.331,50	7.489.515.389,00	11,71
7	Alat Kedokteran dan Kesehatan	221.903.222.778,16	216.498.121.604,85	5.405.101.173,31	2,50
8	Alat Laboratorium	121.746.104.296,00	112.036.740.153,00	9.709.364.143,00	8,67
9	Alat Persenjataan	7.145.230.421,00	4.638.232.245,00	2.506.998.176,00	54,05
10	Komputer	263.549.338.805,00	224.561.122.151,00	38.988.216.654,00	17,36
11	Alat Eksplorasi	647.900.000,00	493.500.000,00	154.400.000,00	31,29
12	Alat Pengeboran	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian	1.498.500,00	0,00	1.498.500,00	100,00
14	Alat Bantu Eksplorasi	437.605.700,00	416.105.700,00	21.500.000,00	5,17
15	Alat Keselamatan Kerja	7.832.411.412,00	5.959.763.125,00	1.872.648.287,00	31,42
16	Alat Peraga	815.550.000,00	802.548.000,00	13.002.000,00	1,62
17	Peralatan Proses/Produksi	352.595.230,00	349.098.838,00	3.496.392,00	1,00
18	Rambu - Rambu	22.421.605.018,00	20.033.477.210,00	2.388.127.808,00	11,92
19	Peralatan Olah Raga	9.497.446.561,00	6.644.715.452,00	2.852.731.109,00	42,93
Jumlah		1.686.135.664.037,10	1.516.776.078.131,79	169.359.585.905,31	11,17

Mutasi nilai peralatan dan mesin dapat dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai (Rp)
Saldo Per 31 Desember 2023	1.516.776.078.131,79
Mutasi tambah	202.678.344.073,31
Mutasi kurang	(33.318.758.168,00)
Saldo akhir per 31 Desember 2024	1.686.135.664.037,10

Adapun mutasi tambah dapat dirincikan sebagai berikut:

Uraian	Nilai (Rp)
Realisasi belanja modal	179.766.693.810,00
Hibah	2.238.187.000,00
Reklasifikasi dari Anggaran Barang dan Jasa	9.352.207.361,00
Utang	797.600.951,00
Mutasi Antar SKPD	8.071.835.263,00
Reklasifikasi + Koreksi	2.451.819.688,31
Jumlah Mutasi tambah	202.678.344.073,31

f.



Penjelasan mutasi tambah diatas adalah sebagai berikut:

1) Hibah sebesar Rp2.238.187.000,00 dengan rincian:

No.	SKPD	Nilai (Rp)
1	Dinas Kesehatan	1.603.487.000,00
2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	92.500.000,00
3	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	83.900.000,00
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	181.000.000,00
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	277.300.000,00
Jumlah		2.238.187.000,00

2) Reklasifikasi dari Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp9.352.207.361,00 dengan rincian:

No.	SKPD	Nilai (Rp)
1	Dinas Permukiman dan Kawasan Permukiman	63.450.000,00
2	Dinas Kesehatan	67.123.551,00
3	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	4.564.674.350,00
4	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	4.529.356.550,00
5	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	53.702.910,00
6	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	73.900.000,00
Jumlah		9.352.207.361,00

3) Utang sebesar Rp797.600.951,00 dengan rincian:

No.	SKPD	Nilai (Rp)
1	Dinas Kesehatan	797.600.951,00
Jumlah		797.600.951,00

4) Mutasi Antar SKPD merupakan pemindahan aset tetap peralatan dan mesin di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda sebesar Rp8.071.835.263,00 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1	Sekretariat DPRD	214.000.000,00
2	Sekretariat Daerah	31.631.606,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	580.193.964,00
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	210.467.500,00
5	Dinas Perhubungan	144.457.500,00
6	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	456.840.000,00
7	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	508.930.000,00
8	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	14.000.000,00
9	Dinas Lingkungan Hidup	4.900.000.000,00
10	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	598.748.000,00
11	Dinas Komunikasi dan Informatika	201.511.500,00
12	Kecamatan Samarinda Ilir	16.820.000,00
13	Kecamatan Samarinda Seberang	56.650.607,00
14	Kecamatan Palaran	96.674.586,00
15	Kecamatan Sungai Pinang	40.910.000,00
Jumlah		8.071.835.263,00



5) Reklasifikasi + koreksi sebesar Rp2.451.819.688,31 dengan rincian:

No.	SKPD	Nilai (Rp)	Keterangan
1	Dinas Pendidikan	45.474.999,00	Koreksi Pencatatan
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	18.950.000,00	Reklas dari Anggaran Gedung ke Peralatan dan Mesin
3	Dinas Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	87.560.000,00	Reklas dari Anggaran Gedung ke Peralatan dan Mesin
4	Dinas Komunikasi dan Informatika	141.250.000,00	Reklas dari Anggaran Gedung ke Peralatan dan Mesin
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	36.231.094,00	Reklas dari Anggaran Jaringan ke Peralatan dan Mesin
6	Dinas Komunikasi dan Informatika	5.400.000,00	Reklas dari Anggaran Gedung ke Peralatan dan Mesin
7	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	983.257.620,00	Reklas dari Anggaran Aset Tetap Lainnya ke Peralatan dan Mesin
8	Dinas Kesehatan	1.133.695.975,31	Reklas dari Belanja JKN ke Peralatan dan Mesin
JUMLAH		2.451.819.688,31	

Mutasi kurang peralatan dan mesin dapat dirincikan sebagai berikut:

Uraian	Nilai (Rp)
1) Penghapusan	15.678.235.865,00
2) Pembayaran Utang	79.650.000,00
3) Aset di bawah nilai kapitaliasi	730.661.586,00
4) Mutasi Antar SKPD	8.071.835.263,00
5) Belanja barang yang dianggarkan di belanja modal	8.140.775.354,00
6) Reklasifikasi	617.600.100,00
Jumlah	33.318.758.168,00

Rincian penjelasan atas mutasi kurang tersebut adalah:

1. Penghapusan sebesar Rp15.678.235.865,00 dengan rincian:

No.	SKPD	Nilai (Rp)
1	Sekretariat DPRD	2.634.885.800,00
2	Sekretariat Daerah	75.102.500,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.959.515.000,00
4	Dinas Kesehatan	2.090.573.726,00
5	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	4.009.315.708,00
6	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	62.250.000,00
7	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	156.944.000,00
8	Badan Pendapatan Daerah	1.142.791.806,00
9	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	152.546.244,00
10	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	331.009.830,00
11	Inspektorat Daerah	330.042.200,00
12	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	819.000.000,00
13	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	89.240.000,00
14	Kecamatan Samarinda Ulu	107.890.000,00
15	Kecamatan Samarinda Ilir	312.811.568,00
16	Kecamatan Palaran	153.948.000,00
17	Kecamatan Sungai Pinang	107.881.000,00
18	Kecamatan Samarinda Kota	48.346.483,00
19	Kecamatan Sambutan	94.142.000,00
Jumlah		15.678.235.865,00



2. Pembayaran Utang sebesar Rp79.650.000,00 pada Sekretariat Daerah yang merupakan pembayaran atas utang sampai dengan tahun 2024, transaksi tersebut masuk ke mutasi kurang karena Belanja Modal tersebut tidak menjadi penambah aset tahun 2024, aset sudah tercatat saat di tahun terjadinya perikatan tersebut yaitu 2023.
3. Aset dibawah nilai kapitalisasi Rp730.661.586,00 dengan rincian:

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1	Sekretariat Daerah	12.100.000,00
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.650.000,00
3	Dinas Perhubungan	10.806.800,00
4	Dinas Kesehatan	94.740.525,00
5	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	3.915.000,00
6	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	378.183.761,00
7	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.240.000,00
8	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6.635.000,00
9	Dinas Tenaga Kerja	3.150.000,00
10	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	5.330.000,00
11	Dinas Perdagangan	92.570.000,00
12	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Dan Perindustrian	4.950.000,00
13	Badan Pendapatan Daerah	4.785.000,00
14	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	41.627.500,00
15	Inspektorat Daerah	7.074.800,00
16	Dinas Lingkungan Hidup	22.742.400,00
17	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	650.000,00
18	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	20.551.000,00
19	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	3.000.000,00
20	Satuan Polisi Pamong Praja	950.000,00
21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	309.800,00
22	Kecamatan Sungai Kunjang	1.035.000,00
23	Kecamatan Sungai Pinang	285.000,00
24	Kecamatan Samarinda Kota	780.000,00
25	Kecamatan Sambutan	10.600.000,00
Jumlah		730.661.586,00

4. Mutasi antar SKPD merupakan pemindahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda sebesar Rp8.071.835.263,00 dengan rincian:

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1	Sekretariat DPRD	16.264.100,00
2	Sekretariat Daerah	1.270.685.464,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5.498.748.000,00
4	Dinas Perhubungan	210.467.500,00
5	Dinas Kesehatan	29.367.506,00
6	Dinas Perikanan	33.950.607,00
7	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Dan Perindustrian	13.500.000,00
8	Badan Pendapatan Daerah	148.767.500,00
9	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	133.274.586,00
10	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	16.820.000,00
11	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	204.000.000,00
12	Satuan Polisi Pamong Praja	239.340.000,00
13	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	19.950.000,00
14	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	214.000.000,00
15	Kecamatan Sungai Kunjang	22.700.000,00
Jumlah		8.071.835.263,00



5. Belanja barang yang dianggarkan di belanja modal sebesar Rp8.140.775.354,00.

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1	Sekretariat DPRD	158.247.700,00
2	Sekretariat Daerah	527.599.440,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	392.486.000,00
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	115.135.000,00
5	Dinas Perhubungan	3.611.007.000,00
6	Dinas Kesehatan	36.265.999,00
7	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	56.944.000,00
8	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	28.400.000,00
9	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	508.683.425,00
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	350.000,00
11	Dinas Tenaga Kerja	11.800.000,00
12	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	90.000.000,00
13	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	81.419.400,00
14	Dinas Perdagangan	208.735.000,00
15	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Dan Perindustrian	39.616.000,00
16	Badan Pendapatan Daerah	50.200.000,00
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	23.611.300,00
18	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	2.442.000,00
19	Inspektorat Daerah	789.000,00
20	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	140.202.500,00
21	Dinas Lingkungan Hidup	55.268.000,00
22	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	806.970.000,00
23	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	559.756.490,00
24	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	30.000.000,00
25	Satuan Polisi Pamong Praja	65.990.000,00
26	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	33.500.000,00
27	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	46.690.000,00
28	Dinas Komunikasi dan Informatika	30.098.000,00
29	Kecamatan Samarinda Ulu	58.296.000,00
30	Kecamatan Samarinda Utara	74.850.000,00
31	Kecamatan Samarinda Ilir	48.800.000,00
32	Kecamatan Samarinda Seberang	19.200.000,00
33	Kecamatan Sungai Kunjang	30.000.000,00
34	Kecamatan Palaran	41.620.000,00
35	Kecamatan Sungai Pinang	74.175.000,00
36	Kecamatan Loa Janan Ilir	45.850.000,00
37	Kecamatan Sambutan	35.778.100,00
Jumlah		8.140.775.354,00

6. Terdapat reklasifikasi sebesar Rp617.600.100,00 merupakan gabungan dari transaksi kesalahan penganggaran, koreksi pencatatan dan lain-lain di tahun 2024 dengan rincian:

No.	SKPD	Nilai (Rp)	Keterangan
1	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	16.820.000,00	Koreksi
2	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	50.000.000,00	Reklasifikasi dari Belanja Modal Peralatan Mesin ke Software
3	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	33.640.000,00	Dobel Catat aset tetap-Kendaraan
4	Dinas Kesehatan	16.440.000,00	Dobel Catat aset tetap-Kendaraan
5	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	486.465.400,00	Koreksi atas Aset tetap peralatan mesin yang merupakan barang diserahkan ke masyarakat berupa alat peraga BKB Kit
6	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	14.234.700,00	Dobel Catat aset tetap-Kendaraan
Jumlah		617.600.100,00	



5.3.1.3.3 GEDUNG DAN BANGUNAN

Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 sebesar Rp3.484.312.293.400,36 dan Rp2.973.052.624.992,72 terjadi kenaikan sebesar Rp511.259.668.407,64 atau 17,20%. Mutasi penambahan dan pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan adalah sebagai berikut:

Tabel 5.3. 52 Rincian Gedung dan Bangunan

(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	2024	2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Bangunan Gedung	3.373.156.967.776,36	2.868.875.386.191,72	504.281.581.584,64	17,58
2	Monumen	45.494.072.846,00	43.407.328.918,00	2.086.743.928,00	4,81
3	Bangunan Menara	13.733.221.250,00	13.733.221.250,00	0	0
4	Tugu Titik Kontrol/Pasti	51.928.031.528,00	47.036.688.633,00	4.891.342.895,00	10,4
Jumlah		3.484.312.293.400,36	2.973.052.624.992,72	511.259.668.407,64	17,20

Mutasi nilai Gedung dan Bangunan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Per 31 Desember 2023	2.973.052.624.992,72
Mutasi Tambah	1.059.853.550.763,00
Mutasi Kurang	(548.593.882.355,36)
Saldo Akhir Per 31 Desember 2024	3.484.312.293.400,36

Adapun mutasi penambahan senilai 1.059.853.550.763,00 dapat dirincikan sebagai berikut:

Realisasi belanja modal	912.425.268.299,00
Reklasifikasi dari Belanja Barang dan Jasa	18.679.891.914,00
Utang	176.545.500,00
Hibah	76.068.291.250,00
Mutasi Antar SKPD	6.434.626.300,00
Reklasifikasi	46.068.927.500,00
Jumlah	1.059.853.550.763,00

Penjelasan atas mutasi tambah tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Reklasifikasi dari Belanja Barang dan Jasa ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp18.679.891.914,00 dengan rincian:

No.	SKPD	Nilai (Rp)
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	998.000.000,00
2	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	241.855.100,00
3	Dinas Perhubungan	717.498.000,00
4	Dinas Kesehatan	4.286.121.150,00
5	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	673.631.150,00
6	Dinas Perdagangan	377.268.000,00
7	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	6.434.626.300,00
8	Kecamatan Samarinda Ulu	1.088.884.016,00
9	Kecamatan Samarinda Utara	141.000.000,00
10	Kecamatan Samarinda Ilir	648.761.600,00
11	Kecamatan Samarinda Seberang	443.282.577,00
12	Kecamatan Sungai Kunjang	1.542.170.500,00



No.	SKPD	Nilai (Rp)
13	Kecamatan Palaran	324.061.009,00
14	Kecamatan Sungai Pinang	360.238.762,00
15	Kecamatan Loa Janan Ilir	57.249.500,00
16	Kecamatan Samarinda Kota	320.244.250,00
17	Kecamatan Sambutan	25.000.000,00
Jumlah		18.679.891.914,00

- 2) Terdapat tambahan aset yang berasal dari penambahan utang atas kegiatan Tahun Anggaran 2024 yang menambah Aset Gedung dan Bangunan dengan rincian:

No.	SKPD	Nilai (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	176.545.500,00
Jumlah		176.545.500,00

- 3) Terdapat tambahan aset yang berasal dari Hibah dari Kementerian Perhubungan dengan rincian:

No.	SKPD	Nilai (Rp)
1	Dinas Perhubungan	76.068.291.250,00
Jumlah		76.068.291.250,00

- 4) Mutasi antar SKPD merupakan pemindahan aset tetap gedung dan bangunan ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp6.434.626.300,00.
 5) Reklasifikasi sebesar Rp46.068.927.500,00 dengan rincian:

No.	SKPD	Nilai (Rp)	Keterangan
1	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	31.234.000000,00	Koreksi pencatatan
2	Dinas Kesehatan	127.852.000,00	Reklas dari aset kondisi rusak ke kondisi baik
3	Dinas Kesehatan	14.707.075.500,00	Reklasifikasi dari KDP ke Gedung dan bangunan
Jumlah		46.068.927.500,00	

Mutasi kurang Aset Tetap Gedung dan Bangunan dapat dirincikan sebagai berikut:

Uraian	Nilai (Rp)
Penghapusan	43.323.435.844,00
Aset dibawah nilai kapitalisasi	2.390.712.786,00
Hibah	9.378.501.300,00
Mutasi Antar SKPD	6.434.626.300,00
Belanja barang yang dianggarkan di belanja modal	11.807.482.013,00
Reklasifikasi + Koreksi	475.259.124.112,36
Jumlah	548.593.882.355,36

f.



Rincian atas mutasi kurang tersebut adalah:

- 1) Penghapusan atas Aset Tetap Gedung Bangunan sebesar Rp43.323.435.844,00.

No.	SKPD	Nilai (Rp)
1	Sekretariat Daerah	34.558.000,00
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.294.968.000,00
3	Dinas Perhubungan	310.901.000,00
4	Dinas Kesehatan	3.226.728.000,00
5	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	114.772.200,00
6	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	3.736.428.000,00
7	Dinas Perdagangan	33.005.396.644,00
8	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	104.748.000,00
9	Kecamatan Palaran	494.936.000,00
Jumlah		43.323.435.844,00

- 2) Aset dibawah nilai kapitalisasi Rp2.390.712.786,00.

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	492.560.000,00
2	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	66.000.000,00
3	Kecamatan Samarinda Ulu	474.355.697,00
4	Kecamatan Samarinda Utara	16.000.000,00
5	Kecamatan Samarinda Ilir	345.435.500,00
6	Kecamatan Samarinda Seberang	326.602.577,00
7	Kecamatan Sungai Kunjang	374.127.500,00
8	Kecamatan Sungai Pinang	100.738.762,00
9	Kecamatan Loa Janan Ilir	57.249.500,00
10	Kecamatan Samarinda Kota	137.643.250,00
Jumlah		2.390.712.786,00

- 3) Terdapat Hibah sebesar Rp9.378.501.300,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terdapat belanja Gedung dan Bangunan untuk sekolah non negeri.
- 4) Mutasi antar SKPD merupakan pemindahan pencatatan belanja Gedung dan Bangunan dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp6.434.626.300,00.
- 5) Belanja barang yang dianggarkan di belanja modal sebesar Rp11.807.482.013,00.

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1	Sekretariat Daerah	343.865.875,00
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.755.976.000,00
3	Dinas Kesehatan	951.682.000,00
4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	8.715.270.638,00
5	Dinas Lingkungan Hidup	40.687.500,00
Jumlah		11.807.482.013,00

- 6) Reklasifikasi dan koreksi sebesar Rp475.259.124.112,36 dengan rincian:

No.	SKPD	Nilai (Rp)	Keterangan
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	18.950.000,00	Reklas dari anggaran Gedung dan Bangunan ke Peralatan dan Mesin
2	Dinas Lingkungan Hidup	87.560.000,00	Reklas dari anggaran Gedung dan Bangunan ke Peralatan dan Mesin
3	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	141.250.000,00	Reklas dari anggaran Gedung dan Bangunan ke Peralatan dan Mesin



No.	SKPD	Nilai (Rp)	Keterangan
4	Dinas Komunikasi dan Informatika	5.400.000,00	Reklas dari anggaran Gedung dan Bangunan ke Peralatan dan Mesin
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	14.197.035.100,00	Reklasifikasi dari belanja Gedung ke Jalan Irigasi Jaringan
6	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	14.146.754.800,00	Reklasifikasi dari belanja Gedung ke Jalan Irigasi Jaringan
7	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	409.597.715.946,00	Reklasifikasi dari belanja Gedung ke Konstruksi Dalam Pengerjaan
8	Dinas Kesehatan	12.913.550.000,00	Reklasifikasi dari belanja Gedung ke Konstruksi Dalam Pengerjaan
9	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	17.252.966.000,00	Reklasifikasi ke Properti Investasi
10	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	4.673.289.000,00	Reklasifikasi ke Properti Investasi
11	Dinas Kesehatan	219.850.030,12	Koreksi atas kurang volume pada Belanja Modal Gedung Bangunan
12	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.165.358.407,35	Koreksi atas kurang volume pada Belanja Modal Gedung Bangunan
13	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	839.444.828,89	Koreksi atas kurang volume pada Belanja Modal Gedung Bangunan
Jumlah		475.259.124.112,36	

5.3.1.3.4 JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI

Nilai perolehan Jalan, Jaringan dan Irigasi per 31 Desember 2024 sebesar Rp10.249.283.438.359,30 dan pada tahun 2023 sebesar Rp9.110.001.006.732,17. Terjadi peningkatan nilai Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp1.139.282.431.627,12 atau sebesar 12,51% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3 1 Rincian Jalan, Jaringan dan Irigasi

(dalam satuan Rupiah)					
No.	Uraian	2024	2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Jalan dan Jembatan	6.268.189.960.865,55	5.785.865.403.927,43	482.324.556.938,12	8,34
2	Bangunan Air	3.477.639.606.333,74	2.942.212.826.905,74	535.426.779.428,00	18,20
3	Instalasi	260.958.736.193,00	241.310.342.785,00	19.648.393.408,00	8,14
4	Jaringan	242.495.134.967,00	140.612.433.114,00	101.882.701.853,00	72,46
Jumlah		10.249.283.438.359,30	9.110.001.006.732,17	1.139.282.431.627,12	12,51

Mutasi nilai Jalan, Jaringan dan Irigasi dapat dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai (Rp)
Saldo Per 31 Desember 2023	9.110.001.006.732,17
Mutasi Tambah	1.479.936.563.141,03
Mutasi Kurang	(340.654.131.513,91)
Saldo Akhir Per 31 Desember 2024	10.249.283.438.359,30



Mutasi tambah dapat dirincikan sebagai berikut:

Uraian	Nilai (Rp)
Realisasi belanja modal	1.415.682.927.225,00
Atribusi belanja barang dan jasa	33.437.946.366,00
Utang	9.478.650,00
Reklasifikasi	30.806.210.900,03
Jumlah	1.479.936.563.141,03

Rincian mutasi tambah adalah sebagai berikut:

- 1) Rincian penambahan Jalan, Jaringan dan Irigasi tahun 2024 yang bersumber dari Atribusi belanja barang dan jasa

No.	SKPD	Nilai (Rp)
1	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	615.073.413,00
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	94.483.000,00
3	Kecamatan Samarinda Ulu	4.497.062.714,00
4	Kecamatan Samarinda Utara	4.080.007.400,00
5	Kecamatan Samarinda Ilir	3.383.973.270,00
6	Kecamatan Samarinda Seberang	2.112.381.050,00
7	Kecamatan Sungai Kunjang	6.634.707.500,00
8	Kecamatan Palaran	4.264.928.355,00
9	Kecamatan Sungai Pinang	1.516.266.000,00
10	Kecamatan Samarinda Kota	761.163.500,00
11	Kecamatan Loa Janan Ilir	3.333.843.164,00
12	Kecamatan Sambutan	2.144.057.000,00
Jumlah		33.437.946.366,00

- 2) Rincian penambahan Jalan, Jaringan dan Irigasi tahun 2024 yang bersumber dari utang belanja.

No.	SKPD	Nilai (Rp)
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	9.478.650,00
Jumlah		9.478.650,00

- 3) Terdapat reklasifikasi dan koreksi sebesar Rp30.806.210.900,03 dengan rincian.

No.	SKPD	Nilai (Rp)	Keterangan
1	Dinas Lingkungan Hidup	2.462.421.000,00	Koreksi Pencatatan
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	14,197,035,100.03	Reklasifikasi dari belanja Gedung ke Jalan Irigasi Jaringan
3	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	14,146,754,800.00	Reklasifikasi dari belanja Gedung ke Jalan Irigasi Jaringan
Jumlah		30.806.210.900,03	

Adapun mutasi kurang dapat dirincikan sebagai berikut:

Uraian	Nilai (Rp)
Belanja barang yang dianggarkan di belanja modal	174.456.105,00
Aset dibawah nilai kapitalisasi	3.874.730.038,00
Reklasifikasi	336.604.945.370,91
Jumlah	340.654.131.513,91

Penjelasan atas mutasi kurang tersebut adalah:



- 1) Pencatatan Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi dari belanja barang Rp174.456.105,00.

No.	SKPD	Nilai (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	174.456.105,00
Jumlah		174.456.105,00

- 2) Terdapat aset Jalan, Jaringan dan Irigasi dengan nilai dibawah nilai kapitalisasi pada semua Kecamatan senilai Rp3.874.730.038,00.

No.	SKPD	Nilai (Rp)
1	Kecamatan Samarinda Ulu	759,805,318.00
2	Kecamatan Samarinda Utara	286,712,070.00
3	Kecamatan Samarinda Ilir	28,700,000.00
4	Kecamatan Samarinda Seberang	177,942,550.00
5	Kecamatan Sungai Kunjang	1,112,614,600.00
6	Kecamatan Palaran	129,350,500.00
7	Kecamatan Sungai Pinang	338,390,000.00
8	Kecamatan Loa Janan Ilir	621,714,000.00
9	Kecamatan Samarinda Kota	76,505,000.00
10	Kecamatan Sambutan	342,996,000.00
Jumlah		3.874.730.038,00

- 3) Terdapat reklasifikasi dan koreksi sebesar Rp336.604.945.370,91 dengan rincian sebagai berikut:

No.	SKPD	Nilai (rp)	Keterangan
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	36.231.094,00	Reklasifikasi belanja Jalan Jaringan dan Irigasi ke aset Peralatan dan Mesin
2	Dinas Perhubungan	333.763.358.506,00	Reklasifikasi belanja Jalan Jaringan dan Irigasi ke aset KDP
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.805.355.770,91	Koreksi atas kurang volume pada Belanja Jalan Irigasi Jaringan
Jumlah		336.604.945.370,91	

5.3.1.3.5 ASET TETAP LAINNYA

Nilai Aset Tetap lainnya per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp10.792.054.573,49 dan Rp10.492.774.077,49 terdapat kenaikan sebesar Rp299.280.496,00 atau 2,85%. Mutasi nilai saldo Aset Tetap Lainnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.3 2 Rincian Aset Tetap Lainnya

(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	2024	2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
1	Bahan Perpustakaan	7.254.653.937,49	7.044.818.777,49	209.835.160,00	2,98
2	Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/ Olahraga	2.664.818.636,00	2.456.760.300,00	208.058.336,00	8,47
3	Hewan	870.373.000,00	870.373.000,00	0,00	0,00
4	Biota Perairan	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Tanaman	2.209.000,00	2.209.000,00	0,00	0,00



No.	Uraian	2024	2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
6	Barang Koleksi Non Budaya	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Aset Tetap Dalam Renovasi	0,00	118.613.000,00	(118.613.000,00)	(100,00)
Jumlah		10.792.054.573,49	10.492.774.077,49	299.280.496,00	2,85

Mutasi nilai Aset Tetap Lainnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai (Rp)
Saldo Per 31 Desember 2023	10.492.774.077,49
Mutasi Tambah	19.471.052.722,00
Mutasi Kurang	(19.171.772.226,00)
Saldo Akhir Per 31 Desember 2023	10.792.054.573,49

Adapun mutasi tambah dapat dirincikan sebagai berikut:

Penjelasan mutasi tambah:

Uraian	Nilai (Rp)
Realisasi belanja modal	19.363.811.286,00
Reklasifikasi dari Anggaran Barang dan Jasa	107.241.436,00
Jumlah	19.471.052.722,00

Adapun mutasi kurang dapat dirincikan sebagai berikut:

Uraian	Nilai (Rp)
Belanja Barang dan Jasa yang dianggarkan di Belanja Modal	296.579.512,00
Hibah	213.880.830,00
Penghapusan	293.464.140,00
Aset dibawah nilai kapitalisasi	17.384.590.124,00
Reklasifikasi	983.257.620,00
Jumlah	19.171.772.226,00

Rincian mutasi kurang karena Belanja Barang dan Jasa yang dianggarkan di Belanja Modal:

No.	SKPD	Nilai (Rp)	Keterangan
1	Sekretariat Daerah	30,000,000.00	barang dan jasa yang dianggarkan di belanja modal
2	Dinas Perhubungan	17,200,000.00	barang dan jasa yang dianggarkan di belanja modal
3	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	45,270,000.00	barang dan jasa yang dianggarkan di belanja modal
4	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	17,960,000.00	barang dan jasa yang dianggarkan di belanja modal
5	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	163,099,512.00	barang dan jasa yang dianggarkan di belanja modal
6	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	12,840,000.00	barang dan jasa yang dianggarkan di belanja modal
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2,400,000.00	barang dan jasa yang dianggarkan di belanja modal
8	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	7,810,000.00	barang dan jasa yang dianggarkan di belanja modal
Jumlah		296.579.512,00	



Rincian mutasi kurang Aset dihibahkan atau diserahkan ke masyarakat:

No.	SKPD	Nilai (Rp)	Keterangan
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	213,880,830.00	Hibah ke Pihak Lain
Jumlah		213.880.830,00	

Aset Tetap Lainnya merupakan mutasi kurang karena penghapusan senilai Rp293.464.140,00.

No.	SKPD	Nilai (Rp)	Keterangan
1	Sekretariat DPRD	133,099,640.00	Penghapusan
2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	159,584,500.00	Penghapusan
3	Inspektorat Daerah	780,000.00	Penghapusan
Jumlah		293.464.140,00	

Rincian aset dibawah kapitalisasi

No.	SKPD	Nilai (Rp)	Keterangan
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	17,255,960,924.00	Reklasifikasi dari belanja aset tetap lainnya ke Aset dibawah kapitalisasi
2	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	128,629,200.00	Reklasifikasi dari belanja aset tetap lainnya ke Aset dibawah kapitalisasi
Jumlah		17.384.590.124,00	

Rincian mutasi kurang karena reklasifikasi:

No.	SKPD	Nilai (Rp)	Keterangan
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	983.257.620,00	Reklasifikasi dari belanja aset tetap lainnya ke Peralatan dan Mesin
Jumlah		983.257.620,00	

5.3.1.3.6 KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan

Nilai Konstruksi Dalam Pekerjaan per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.383.910.351.239,35 dan Rp594.534.075.202,80 terdapat kenaikan sebesar Rp789.376.276.036,55 atau sebesar 132,77%. Mutasi nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.3. 53 Rincian Konstruksi dalam Pengerjaan

<i>(dalam satuan Rupiah)</i>					
No.	Uraian	2024	2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
1	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah	339.629.153.712,93	338.998.076.427,93	631.077.285,00	0,19
2	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin	16.910.085.050,00	16.910.085.050,00	0,00	0,00
4	Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan	579.903.872.173,28	170.375.004.915,00	409.528.867.258,28	240,37
5	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	434.542.249.305,42	56.768.359.859,87	377.773.889.445,55	665,47
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya	11.482.548.950,00	11.482.548.950,00	0,00	0,00
Jumlah		1.382.467.909.191,63	594.534.075.202,80	787.933.833.988,83	132,53



Mutasi nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai (Rp)
Saldo Per 31 Desember 2023	594.534.075.202,80
Mutasi Tambah	804.083.351.536,55
Koreksi Kurang	(Rp16.149.517.547,72)
Saldo Akhir Per 31 Desember 2024	1.382.467.909.191,63

Adapun mutasi tambah dapat dirincikan sebagai berikut:

Uraian	Nilai (Rp)
Reklasifikasi ke belanja barang dan jasa	3.798.196.145,00
Utang Pihak Ketiga	44.010.530.939,55
Reklasifikasi	756.274.624.452,00
Jumlah	804.083.351.536,55

Penjelasan mutasi tambah:

1. Reklasifikasi dari Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp3.798.196.145,00 dengan rincian:

No.	SKPD	Nilai (Rp)	Keterangan
1	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	2.424.602.785,00	Reklas dari belanja barang dan jasa ke Konstruksi Dalam Pengerjaan
2	Dinas Kesehatan	780.896.100,00	Reklas dari belanja barang dan jasa ke Konstruksi Dalam Pengerjaan
3	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	592.697.260,00	Reklas dari belanja barang dan jasa ke Konstruksi Dalam Pengerjaan
Jumlah		3.798.196.145,00	

2. Utang Pihak ketiga merupakan pencatatan atas tambahan utang tahun 2024 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp44.010.530.939,55.
3. Reklasifikasi aset sebesar Rp756.274.624.452,00 dengan rincian:

No.	SKPD	Nilai (Rp)	Keterangan
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	409.597.715.946,00	Reklas dari belanja gedung ke Konstruksi Dalam Pengerjaan
2	Dinas Kesehatan	12.913.550.000,00	Reklas dari belanja gedung ke Konstruksi Dalam Pengerjaan
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	333.763.358.506,00	Reklas dari belanja jalan ke Konstruksi Dalam Pengerjaan
Jumlah		756.274.624.452,00	

Adapun mutasi kurang dapat dirincikan sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Reklasifikasi ke Gedung - Dinas Kesehatan	14.707.075.500,00
2	Koreksi atas kurang volume pada Belanja Jalan Irigasi Jaringan	1.442.442.047,72
Jumlah		16.149.517.547,72

5.3.1.3.7 AKUMULASI PENYUSUTAN

Nilai Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp8.649.001.909.178,80 dan Rp7.588.782.249.510,17 mengalami kenaikan sebesar Rp1.060.219.659.668,63 atau sebesar 13,97%. Adapun Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
CATATAN UNTUK LAPORAN KEUANGAN
 UNTUK YANG TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2024



Tabel 5.3. 54 Daftar Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024

(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Nilai (Rp)	Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan, Jaringan dan Irigasi	Aset Tetap Lainnya
1	Sekretariat DPRD	38.525.731.983,00	34.668.629.483,00	3.857.102.500,00	0,00	0,00
2	Sekretariat Daerah	105.043.089.285,00	71.204.193.039,00	33.838.896.246,00	0,00	0,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5.668.349.248.604,47	109.204.738.823,00	869.766.854.307,56	4.689.377.655.473,91	0,00
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.064.179.928.866,00	18.677.580.119,00	28.554.743.397,00	1.016.947.605.350,00	0,00
5	Dinas Perhubungan	164.889.965.742,00	83.578.384.052,00	42.250.285.742,00	39.061.295.948,00	0,00
6	Dinas Kesehatan	488.281.430.315,49	330.958.144.607,70	151.158.564.240,79	6.164.721.467,00	0,00
7	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	8.917.360.638,00	5.057.029.360,00	3.622.881.278,00	88.500.000,00	148.950.000,00
8	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	23.913.792.823,00	17.691.964.766,00	5.840.356.857,00	306.066.200,00	75.405.000,00
9	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	430.858.023.296,58	209.751.630.235,45	218.696.480.067,13	2.026.976.726,00	382.936.268,00
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	4.077.639.344,00	4.077.639.344,00	0,00	0,00	0,00
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	10.606.237.751,00	8.531.320.234,00	2.074.917.517,00	0,00	0,00
12	Dinas Tenaga Kerja	3.507.378.200,00	3.507.378.200,00	0,00	0,00	0,00
13	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	9.050.069.193,00	7.954.420.294,00	1.089.744.099,00	5.904.800,00	0,00
14	Dinas Perikanan	23.051.418.234,00	7.825.967.353,00	10.706.852.536,00	4.518.598.345,00	0,00
15	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	22.193.691.073,00	19.068.777.604,00	2.575.376.373,00	549.537.096,00	0,00
16	Dinas Perdagangan	62.639.599.767,00	17.868.260.830,00	44.743.523.337,00	27.815.600,00	0,00
17	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Dan Perindustrian	37.667.839.363,00	7.527.138.888,00	29.559.774.675,00	580.925.800,00	0,00
18	Badan Pendapatan Daerah	21.034.538.018,00	18.043.359.478,00	2.991.178.540,00	0,00	0,00
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	14.102.453.886,00	13.045.377.636,00	1.057.076.250,00	0,00	0,00
20	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	82.149.751.032,00	61.487.239.251,00	20.626.594.181,00	35.917.600,00	0,00
21	Inspektorat Daerah	8.117.448.259,00	8.117.448.259,00	0,00	0,00	0,00
22	Badan Perencanaan	24.234.799.400,00	20.290.066.850,00	3.944.732.550,00	0,00	0,00

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN ADALAH BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI LAPORAN KEUANGAN



magnificent
SAMARINDA



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
CATATAN UNTUK LAPORAN KEUANGAN
UNTUK YANG TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2024



No.	Uraian	Nilai (Rp)	Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan, Jaringan dan Irigasi	Aset Tetap Lainnya
	Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah					
23	Dinas Lingkungan Hidup	100.846.852.760,50	90.132.105.429,50	7.834.780.221,00	2.879.967.110,00	0,00
24	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	52.257.725.606,76	38.271.503.698,99	13.233.828.573,00	752.393.334,77	0,00
25	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	10.753.192.193,00	9.627.529.243,00	0,00	1.125.662.950,00	0,00
26	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	10.880.442.546,00	9.100.430.796,00	1.780.011.750,00	0,00	0,00
27	Satuan Polisi Pamong Praja	14.531.751.193,00	8.710.338.925,00	5.116.145.418,00	279.816.850,00	425.450.000,00
28	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	9.422.217.102,00	9.401.970.702,00	20.246.400,00	0,00	0,00
29	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	7.410.290.432,00	5.330.229.032,00	2.080.061.400,00	0,00	0,00
30	Dinas Komunikasi dan Informatika	14.122.810.629,00	13.975.496.902,00	147.313.727,00	0,00	0,00
31	Kecamatan Samarinda Ulu	7.197.152.144,00	4.679.875.062,00	715.547.909,00	1.801.729.173,00	0,00
32	Kecamatan Samarinda Utara	14.967.157.010,00	4.971.552.346,00	8.043.162.294,00	1.952.442.370,00	0,00
33	Kecamatan Samarinda Ilir	12.009.229.649,00	3.992.195.936,00	6.660.535.021,00	1.356.498.692,00	0,00
34	Kecamatan Samarinda Seberang	7.929.596.898,00	4.179.284.927,00	2.315.871.739,00	1.434.440.232,00	0,00
35	Kecamatan Sungai Kunjang	16.737.496.032,00	4.347.290.824,00	9.925.278.375,00	2.464.926.833,00	0,00
36	Kecamatan Palaran	23.785.951.955,00	3.410.742.119,00	17.892.759.151,00	2.482.450.685,00	0,00
37	Kecamatan Sungai Pinang	5.357.294.896,00	3.735.986.720,00	869.247.150,00	752.061.026,00	0,00
38	Kecamatan Loa Janan Ilir	12.680.813.770,00	3.228.741.390,00	8.583.706.738,00	868.365.642,00	0,00
39	Kecamatan Samarinda Kota	4.323.679.186,00	3.227.841.921,00	668.505.986,00	427.331.279,00	0,00
40	Kecamatan Sambutan	8.396.820.103,00	3.832.377.330,00	3.910.408.400,00	654.034.373,00	0,00
Jumlah		8.649.001.909.178,80	1.302.292.182.009,64	1.566.753.344.945,48	5.778.923.640.955,68	1.032.741.268,00

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN ADALAH BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI LAPORAN KEUANGAN



magnificent
SAMARINDA



5.3.1.4 PROPERTI INVESTASI

31-12-2024

31-12-2023

Rp539.600.794.717,81

Rp522.205.886.500,00

Properti Investasi Pemerintah Kota Samarinda, yang dikuasai dalam jangka panjang untuk kenaikan nilai dan bukan untuk dijual dalam waktu jangka pendek. Nilai Properti Investasi Pemerintah Kota Samarinda per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp539.600.794.717,81 mengalami kenaikan sebesar Rp17.394.908.217,81 atau 3,33% dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp522.205.886.500,00.

Tabel 5.3. 55 Properti Investasi

(dalam satuan Rupiah)

No.	Properti Investasi	2024	2023	Kenaikan /(Penurunan)	%
1	Properti Investasi	543.978.356.466,12	522.205.886.500,00	21.772.469.966,12	4,17
2	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	(4.377.561.748,31)	0,00	(4.377.561.748,31)	100,00
Jumlah		539.600.794.717,81	522.205.886.500,00	17.394.908.217,81	3,33

5.3.1.4.1 PROPERTI INVESTASI

31-12-2024

31-12-2023

Rp543.978.356.466,12

Rp522.205.886.500,00

Properti Investasi adalah aset berupa tanah dan gedung yang dikuasai oleh Pemerintah Kota Samarinda, yang dikuasai dalam jangka panjang untuk kenaikan nilai dan bukan untuk dijual dalam waktu jangka pendek. Nilai Properti Investasi Pemerintah Kota Samarinda per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp543.978.356.466,12 mengalami kenaikan sebesar Rp21.772.469.966,12 atau 4,17% dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp522.205.886.500,00 dengan komposisi dapat disajikan sebagai berikut:



Tabel 5.3. 56 Daftar Lahan dan Gedung Milik Pemerintah Kota Samarinda yang dapat dimanfaatkan sebagai Proverti Investasi

No	Letak/Jalan	Nilai Perolehan (Rp)	Luas M ²	Dokumen / Alas Hak	Perencanaan / Pemanfaatan	Keterangan
1	Plaza 21 Jl. Niaga Timur Kel. Pelabuhan Kec. Samarinda Kota	4.920.000.000,00	1.640	Sertifikat HPL 03	Kerjasama Perhotelan	Dalam proses antara Pemerintah Kota Samarinda dan Pihak ketiga
2	Citra Niaga Jl. Niaga Selatan Kel. Pelabuhan Kec. Samarinda Kota	78.846.000.000,00	27.922	Sertifikat HPL 01	Telah dimanfaatkan oleh pihak ketiga dalam bentuk HGB	Sudah berjalan dan sudah ada kontribusi ke PAD Pemerintah Kota Samarinda
3	Citra Niaga Jl. Niaga Selatan Kel. Pelabuhan Kec. Samarinda Kota	309.600.000.000,00	19.545	Sertifikat HPL 02	Telah dimanfaatkan oleh pihak ketiga dalam bentuk HGB	Sudah berjalan dan sudah ada kontribusi ke PAD Pemerintah Kota Samarinda
4	Citra Niaga Jl. Niaga Selatan Kel. Pelabuhan Kec. Samarinda Kota	12.534.400.000,00	3.917	Sertifikat HPL 04	Telah dimanfaatkan oleh pihak ketiga dalam bentuk HGB	Sudah berjalan dan sudah ada kontribusi ke PAD Pemerintah Kota Samarinda
5	Pergudangan Jl. Ir. Sutami Kel. Karang Asam Ulu Kec. Sungai Kunjang	17.100.000.000,00	20.000	Sertifikat HPL 05	Telah dimanfaatkan oleh pihak ketiga dalam bentuk HGB	Sudah berjalan dan sudah ada kontribusi ke PAD Pemerintah Kota Samarinda
6	Pergudangan Jl. Ir. Sutami Kel. Karang Asam Ulu Kec. Sungai Kunjang	59.864.684.000,00	80.033	Sertifikat HPL 06	Telah dimanfaatkan oleh pihak ketiga dalam bentuk HGB	Sudah berjalan dan sudah ada kontribusi ke PAD Pemerintah Kota Samarinda
7	Pergudangan Jl. Ir. Sutami Kel. Karang Asam Ulu Kec. Sungai Kunjang	4.734.135.000,00	5.537	Sertifikat HPL 07	Telah dimanfaatkan oleh pihak ketiga dalam bentuk HGB	Sudah berjalan dan sudah ada kontribusi ke PAD Pemerintah Kota Samarinda
8	Jl. Poros Palaran - Sanga Sanga Kel. Bukuan/Bantuas Kec. Palaran	12.978.447.500,00	300.000	SPPT	Lahan Merupakan Kawasan pertambangan	Belum ada kerjasama dengan pihak ketiga
9	Jl. Poros Samarinda - Bontang Kel. Tanah Merah Kec. Samarinda Utara	15.879.220.000,00	280.000	SPPT	Pembangunan kawasan ekonomi terpadu	Tahun 2023 Pemerintah Kota Samarinda telah membuat Site Plan RPH dan Pasar Hewan Terpadu
10	Jl. Mulawaran (Kantor Sekretariat golkar Tk. I) Kel. Karang Mumus Kec. Samarinda Kota	1.900.000.000,00	950	Sertifikat HP. 122	Belum ada perencanaan penggunaan	Saat ini masih digunakan Kantor Sekretariat Golkar

f.



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
CATATAN UNTUK LAPORAN KEUANGAN
UNTUK YANG TAHUN BERAKIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2024



No	Letak/Jalan	Nilai Perolehan (Rp)	Luas M ²	Dokumen / Alas Hak	Perencanaan / Pemanfaatan	Keterangan
11	Jl. Perjuangan Kel. Sempaja Selatan Kec. Samarinda Utara	3.300.000.000,00	3.065	Sertifikat HPL. 359	Kost Syariah dan Bebaya Mart	dalam tahap revitalisasi bangunan tahun 2023 - 2024
12	Jl. Pangeran Antasari Kel. Air Putih Kec. Samarinda Ulu	549.000.000,00	366	Sertifikat HP. 231	UMKM Bebaya Mart	Rencana kerjasama dengan Varia Niaga Samarinda
	Jumlah Properti Investasi Tanah	522.205.886.500,00				
13	Jl. Pangeran Antasari	4.673.289.000,00			UMKM Bebaya Mart	Bangunan Gedung/Pertokoan/Koperasi/ Pasar Pembangunan Bebaya Mart
14	Jl. Perjuangan	17.099.180.966,12	1.721		Bebaya Mart dan Kost Syariah	Eks Gedung Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Jumlah Properti Investasi Gedung	21.772.469.966,12				
Jumlah Properti Investasi Tanah dan Gedung		543.978.356.466,12				

f.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN ADALAH BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI LAPORAN KEUANGAN



magnificent
SAMARINDA



5.3.1.4.2 AKUMULASI PENYUSUTAN PROPERTI INVESTASI

31-12-2024

31-12-2023

(Rp4.377.561.748,31)

Rp0,00

Nilai akumulasi penyusutan Properti Investasi per 31 Desember 2024 sebesar Rp4.377.561.748,31 mengalami kenaikan 100% dibandingkan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00. Akumulasi penyusutan terdiri atas Gedung UMKM Bebaya Mart sebesar Rp934.657.800,00 dan Gedung Bebaya Mart dan Kost Syariah sebesar Rp3.442.903.948,31.

5.3.1.5 ASET LAINNYA

31-12-2024

31-12-2023

Rp860.334.353.819,80

Rp1.433.663.656.163,95

Aset Lainnya adalah Aset Non Lancar lainnya yang bersifat jangka panjang dan Aset Tidak Berwujud, yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum. Nilai Aset Lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp860.334.353.819,80 dan mengalami penurunan sebesar Rp573.329.302.344,15 atau sebesar 39,99% dibandingkan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.433.663.656.163,95. Rincian Aset Lainnya adalah sebagai berikut:

Tabel 5.3. 57 Rincian Aset Lainnya

(dalam satuan Rupiah)

No.	Aset Lainnya	2024	2023	Kenaikan /(Penurunan)	%
1	Tagihan Jangka Panjang	13.260.000,00	21.420.000,00	(8.160.000,00)	(38,10)
2	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	41.501.845.130,35	41.501.845.130,35	0,00	0,00
3	Aset Tidak Berwujud	31.461.328.304,00	31.037.478.304,00	423.850.000,00	1,37
4	Aset Lain Lain	965.844.345.397,85	1.539.431.475.181,00	(573.587.129.783,12)	(37,26)
5	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(18.981.030.076,00)	(17.770.910.009,00)	(1.210.120.067,00)	6,81
6	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(159.505.394.936,40)	(160.557.652.442,40)	(1.052.257.506,00)	(0,66)
Jumlah		860.334.353.819,80	1.433.663.656.163,95	(573.329.302.344,15)	(39,99)

5.3.1.5.1 TAGIHAN JANGKA PANJANG

31-12-2024

31-12-2023

Rp13.260.000,00

Rp21.420.000,00



Tagihan Penjualan Angsuran merupakan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah. Terdiri atas Tagihan Penjualan Angsuran atas rumah dinas dan Tagihan Penjualan Angsuran atas kendaraan bermotor sesuai dengan SK Wali Kota. Saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp13.260.000,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp8.160.000,00 atau sebesar 38,10% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp21.420.000,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3. 58 Rincian Tagihan Jangka Panjang

(dalam satuan Rupiah)

No.	Jenis Angsuran	2024	2023	Kenaikan / (Penurunan)	%
1	Rumah Susun/H. Supardi	2.040.000,00	10.200.000,00	(8.160.000,00)	(80,00)
2	Rumah Susun/Hj. Salmah	11.220.000,00	11.220.000,00	0,00	0,00
Jumlah		13.260.000,00	21.420.000,00	(8.160.000,00)	(38,10)

5.3.1.5.2 KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA

31-12-2024

31-12-2023

Rp41.501.845.130,35

Rp41.501.845.130,35

Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan atau hak usaha yang dimiliki. Pemerintah Kota Samarinda menjalin kerjasama Pembangunan Pasar Segiri dengan PT. Yudha Putera Kaltim, dan Kerjasama Pengelolaan Mahakam Lampion Garden (MLG) dengan PT. SAMACO.

Saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp41.501.845.130,35 tidak mengalami kenaikan/penurunan atau sama dengan tahun sebelumnya jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp41.501.845.130,35. Adapun rincian Kemitraan dengan Pihak Ketiga sebagai berikut:

f.



Tabel 5.3. 59 Rincian Saldo Kemitraan dengan Pihak Ketiga

No	Nama	Tentang	Nomor SPKS	Saldo 2024 (Rp)	Saldo 2023 (Rp)	Tanggal Kerjasama	Masa Kerjasama	Hak Pemkot
1	PT. YUDHA PUTERA KALTIM	Pembangunan Pasar Segiri Samarinda	119/05/KJS-KS/III/2010	21.138.441.874,35	21.138.441.874,35	18 Mei 2010	20 tahun sejak selesainya pekerjaan fisik Pasar Segiri	1. Memungut Retribusi Pasar Sesuai dengan Perda yang berlaku terhadap petak/kios/toko yang digunakan oleh pedagang melalui Dinas Perdagangan. 2. Menerima setoran dari PT.YUDHA PUTERA KALTIM sebesar Rp.125.000.000,00 per tahun melalui Kas Daerah selama masa kerjasama. 3. Mendapatkan pembagian hasil sebesar 40% dari keuntungan bersih pengelolaan Pasar Segiri Samarinda. 4. Mendapatkan 200 buah petak Kaki Lima senilai Rp600.000.000,00.
2	PT.SAMACO	Pengelolaan Mahakam Lampion Garden (MLG)	028/SKB-SMC/IV/2016	20.363.403.256,00	20.363.403.256,00	22 April 2016	25 tahun sejak ditandatangani Perjanjian Kerjasama	1. Memperoleh Kontribusi Rp237.069.309,00 setiap tahun paling lambat 31 Maret tahun berikutnya. 2. Memperoleh Pajak Parkir dari Pendapatan Parkir sesuai Perda. 3. Memperoleh Pajak Hiburan dari tiket masuk pengunjung sesuai Perda.
		Tanah Rp16.219.666.000,00						
		Bangunan Rp3.566.000.302,00						
		Jaringan Rp577.736.954,00						
Jumlah				41.501.845.130,35	41.501.845.130,35			



5.3.1.5.3 ASET TIDAK BERWUJUD

31-12-2024

31-12-2023

Rp31.461.328.304,00

Rp31.037.478.304,00

Aset Tidak Berwujud adalah aset yang tidak bersifat fisik, seperti paten, merek, merek dagang, atau hak cipta. Per 31 Desember 2024 Saldo Aset Tidak Berwujud sebesar Rp31.461.328.304,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp423.850.000,00 atau 1,37% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp31.037.478.304,00. Adapun Rincian Aset Tidak Berwujud sebagai berikut:

Tabel 5.3. 60 Rincian Kepemilikan Aset Tidak Berwujud per SKPD

(dalam satuan Rupiah)

No.	Nama SKPD	2024	2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	836.530.078,00	836.530.078,00	0,00	0,00
2	Dinas Kesehatan	3.072.372.356,00	3.072.372.356,00	0,00	0,00
3	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	7.592.010.000,00	7.592.010.000,00	0,00	0,00
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	316.954.500,00	316.954.500,00	0,00	0,00
5	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	168.825.000,00	168.825.000,00	0,00	0,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	128.730.000,00	128.730.000,00	0,00	0,00
7	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	266.830.000,00	266.830.000,00	0,00	0,00
8	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	109.480.000,00	109.480.000,00	0,00	0,00
9	Dinas Tenaga Kerja	366.093.000,00	366.093.000,00	0,00	0,00
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	205.925.660,00	205.925.660,00	0,00	0,00
11	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	318.900.000,00	318.900.000,00	0,00	0,00
12	Dinas Lingkungan Hidup	263.500.000,00	263.500.000,00	0,00	0,00
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	568.500.000,00	518.500.000,00	50.000.000,00	9,64
14	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	49.000.000,00	49.000.000,00	0,00	0,00
15	Dinas Perhubungan	1.211.123.400,00	1.211.123.400,00	0,00	0,00
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.757.554.900,00	1.757.554.900,00	0,00	0,00
17	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	269.975.000,00	269.975.000,00	0,00	0,00
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.965.840.050,00	1.965.840.050,00	0,00	0,00
19	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	960.670.000,00	960.670.000,00	0,00	0,00
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	532.000.000,00	337.000.000,00	195.000.000,00	57,86



No.	Nama SKPD	2024	2023	Kenaikan/ Penurunan	%
21	Dinas Perikanan	98.500.000,00	98.500.000,00	0,00	0,00
22	Dinas Perdagangan	76.900.000,00	76.900.000,00	0,00	0,00
23	Sekretariat Daerah	2.094.353.600,00	2.094.353.600,00	0,00	0,00
24	Sekretariat DPRD	339.340.000,00	339.340.000,00	0,00	0,00
25	Kecamatan Palaran	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00
26	Kecamatan Samarinda Seberang	5.450.000,00	5.450.000,00	0,00	0,00
27	Kecamatan Samarinda Ulu	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00
28	Kecamatan Samarinda Ilir	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00
29	Kecamatan Sungai Kunjang	41.684.000,00	41.684.000,00	0,00	0,00
30	Kecamatan Sambutan	49.086.000,00	49.086.000,00	0,00	0,00
31	Kecamatan Samarinda Kota	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00
32	Kecamatan Sungai Pinang	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
33	Inspektorat Daerah	35.900.000,00	35.900.000,00	0,00	0,00
34	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	2.214.672.000,00	2.214.672.000,00	0,00	0,00
35	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1.429.521.760,00	1.300.671.760,00	128.850.000,00	9,91
36	Badan Pendapatan Daerah	2.005.358.000,00	2.005.358.000,00	0,00	0,00
37	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.049.749.000,00	1.999.749.000,00	50.000.000,00	2,50
Jumlah		31.461.328.304,00	31.037.478.304,00	423.850.000,00	1,37

Berikut ini SKPD yang mengalami penambahan Aset Tidak Berwujud:

No.	SKPD	No. SP2D/TGL SP2D	Jumlah (Rp)
1	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	64.72/11.0/000012/JUR-BLJ/SP2D-LS/5.02.0.00.0.00.02.0000/09/2024	64.500.000,00
		64.72/11.0/000189/JUR-BLJ/SP2D-LS/5.02.0.00.0.00.02.0000/12/2024	500.000,00
		64.72/11.0/000189/JUR-BLJ/SP2D-LS/5.02.0.00.0.00.02.0000/12/2024	63.850.000,00
Jumlah			128.850.000,00
2	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	64.72/09.0/000011/JU/JURNAL-UMUM/5.03.5.04.0.00.01.0000/02/2025	50.000.000,00
Jumlah			50.000.000,00
3	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda	64.72/09.0/000007/JU/JURNAL-UMUM/2.12.0.00.0.00.01.0000/02/2025	50.000.000,00
Jumlah			50.000.000,00
4	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda	64.72/11.0/000002/JUR-BLJ/SP2D-LS/2.23.2.24.0.00.01.0000/01/2025	195.000.000,00
Jumlah			195.000.000,00
Jumlah			423.850.000,00



5.3.1.5.4 ASET LAIN-LAIN

31-12-2024

31-12-2023

Rp965.844.345.397,85

1.539.431.475.181,00

Adapun saldo per 31 Desember 2024 Rp965.844.345.397,85 dan mengalami penurunan sebesar Rp573.587.129.783,15 atau 37,26% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2023 Rp1.539.431.475.181,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3. 61 Rincian Aset lain-lain

(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	2024	2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Koreksi BPK atas LK PD PAU TA 2007	1.150.000.000,00	1.150.000.000,00	0,00	0,00
2	Daftar Piutang yg Tutup WP nya	689.791.606,00	689.791.606,00	0,00	0,00
3	Dana Bergulir Tertunggak	2.709.830.758,00	2.726.773.425,00	(16.942.667,00)	(0,62)
4	Aset Rusak	176.111.854.112,48	177.935.708.347,47	(1.823.854.234,99)	(1,03)
5	Aset P3D	643.892.610.802,53	643.892.610.802,53	0,00	0,00
6	Aset Lain-lain	141.290.258.118,84	713.036.591.000,00	(571.746.332.881,13)	(80,18)
Jumlah		965.844.345.397,85	1.539.431.475.181,00	(573.587.129.783,12)	(37,26)

Saldo Aset Lain-lain merupakan:

1. Reklasifikasi bagian lancar pinjaman kepada Perumda Varia Niaga Samarinda pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (PPKD) sebesar Rp1.150.000.000,00 yang telah jatuh tempo seluruhnya pada tahun 2017 dan 2016, dan sampai dengan per 31 Desember 2024 belum ada pengembalian.
2. Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang tutup Wajib Pajaknya sampai dengan 31 Desember 2024 pada Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp689.791.606,00 namun belum terdapat SK Wali Kota untuk penghapusan piutang tersebut.
3. Reklasifikasi saldo Investasi Dana Bergulir tertunggak yang telah jatuh tempo lebih dari 3 tahun sesuai Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Samarinda pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian dan Dana Bergulir Sawit sebesar Rp2.709.830.758,00 dengan rincian:

No.	Tahun Pengguguran	Saldo Tunggakan 2024 (Rp)	Saldo Tunggakan 2023 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	%	Keterangan	Jatuh Tempo
1	2001	631.675.989,00	631.675.989,00	0,00	0,00	Dana Bergulir Koperasi	2004
2	2001	63.765.556,00	63.765.556,00	0,00	0,00	Dana Bergulir Koperasi	2004
3	2002	994.007.268,00	997.066.935,00	(3.059.667,00)	(0,31)	Dana Bergulir Koperasi	2005
4	2003	332.365.034,00	346.248.034,00	(13.883.000,00)	(4,01)	Dana Bergulir	2006



No.	Tahun Pengguliran	Saldo Tunggakan 2024 (Rp)	Saldo Tunggakan 2023 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	%	Keterangan	Jatuh Tempo
						Koperasi	
5	2004	52.250.000,00	52.250.000,00	0,00	0,00	Dana Bergulir Koperasi	2007
6	2005	96.500.000,00	96.500.000,00	0,00	0,00	Dana Bergulir Koperasi	2008
7	2006	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	Dana Bergulir Koperasi	2009
8	2008	51.430.595,00	51.430.595,00	0,00	0,00	Dana Bergulir Koperasi	2011
9	2009 dan 2010	479.836.316,00	479.836.316,00	0,00	0,00	Dana Bergulir Sawit	2019
Jumlah		2.709.830.758,00	2.726.773.425,00	(16.942.667,00)	(0,62)		

4. Reklasifikasi Aset Tetap yang rusak berat dan tidak dapat dipergunakan lagi sebelum dihapus bukukan sebesar Rp176.111.854.112,48 terdiri atas aset rusak berat sebesar Rp168.150.986.957,48 dan aset tanaman yang dicatat di aset rusak berat sebesar Rp7.960.867.155,00.

Rincian aset rusak berat sebesar Rp168.150.986.957,48 adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Nilai 2024 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	49.769.647.093,48
2	Dinas Kesehatan	6.416.368.772,00
3	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	64.658.523.090,00
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.355.066.100,00
5	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	11.464.705.791,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	327.452.400,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	58.050.000,00
8	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	103.721.100,00
9	Dinas Tenaga Kerja	341.515.000,00
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	916.964.438,00
11	Dinas Lingkungan Hidup	9.671.475.699,00
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	145.000.000,00
13	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	585.977.050,00
14	Dinas Perhubungan	1.390.030.439,00
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	28.996.900,00
16	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	532.993.916,00
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	506.290.000,00
18	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	827.632.820,00
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	303.786.100,00
20	Dinas Perikanan	1.307.415.000,00



No.	Uraian	Nilai 2024 (Rp)
21	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	2.414.752.200,00
22	Dinas Perdagangan	2.002.985.906,00
23	Sekretariat Daerah	0,00
24	Sekretariat DPRD	176.637.046,00
25	Kecamatan Palaran	270.737.500,00
26	Kecamatan Samarinda Seberang	408.861.500,00
27	Kecamatan Samarinda Ulu	276.392.000,00
28	Kecamatan Samarinda Ilir	121.973.000,00
29	Kecamatan Samarinda Utara	169.503.000,00
30	Kecamatan Sungai Kunjang	791.466.000,00
31	Kecamatan Sambutan	580.068.583,00
32	Kecamatan Samarinda Kota	46.420.000,00
33	Kecamatan Sungai Pinang	160.971.000,00
34	Kecamatan Loa Janan Ilir	70.769.000,00
35	Inspektorat Daerah	34.850.000,00
36	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	1.724.752.667,00
37	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	2.556.000,00
38	Badan Pendapatan Daerah	7.321.352.847,00
39	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	254.947.000,00
40	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	609.380.000,00
Jumlah		168.150.986.957,48

Selain nilai tersebut terdapat juga aset tanaman yang dicatat di aset rusak berat senilai Rp7.960.867.155,00 aset tanaman ini merupakan aset dibawah kapitalisasi, rincian aset tanaman yang dicatat di aset rusak berat sebagai berikut:

No.	SKPD	Nama Barang	Nilai 2024 (Rp)
1	Sekretariat Daerah	Tanaman Hias	2.950.000,00
2	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Tanaman Hias	5.375.594.505,00
3	Dinas Perhubungan	Tanaman Hortikultura	354.552.000,00
4	Dinas Kesehatan	Tanaman Hortikultura	10.000.000,00
5	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Tanaman Hortikultura	2.343.100,00
6	Dinas Pertanian	Tanaman Hias	1.523.715.000,00
7	Badan Pendapatan Daerah	Tanaman Hortikultura	165.618.000,00
9	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Tanaman Hias	23.600.000,00
10	Sekretariat DPRD	Tanaman Hias	49.900.000,00
11	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	Tanaman Hias	7.400.000,00
12	Dinas Lingkungan Hidup	Tanaman Hortikultura	342.825.000,00
13	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	Tanaman Hias	40.000.000,00
14	Satuan Polisi Pamong Praja	Tanaman Hortikultura	20.500.000,00



No.	SKPD	Nama Barang	Nilai 2024 (Rp)
15	Kecamatan Samarinda Utara	Tanaman Hortikultura	15.000.000,00
16	Kecamatan Samarinda Kota	Tanaman Hias	5.000.000,00
17	Kecamatan Samarinda Ilir/ Kelurahan Selili	Tanaman Hortikultura	1.369.550,00
18	Kelurahan Sambutan	Tanaman Hias	9.500.000,00
19	Kecamatan Palaran/ Kelurahan Simpang Pasir	Tanaman Hias	11.000.000,00
Jumlah			7.960.867.155,00

5. Aset P3D yang sebelumnya telah dilakukan reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya terhadap Aset Pemerintah Kota Samarinda yang diserahkan kepada Kementerian Perhubungan Darat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana amanat Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Personil, Sarana dan Prasarana dan Dokumen Dari Pemerintah Kota Samarinda Kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 137.1/3573/Pem - Nomor 127/5624/B.PPOS.III Tanggal 18 Desember 2018. Berikut ini rincian Aset P3D:

No.	Uraian	Aset P3D 2018	Tambahan P3D 2019	Nilai 2024 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	245.364.526.803,53	402.839.300,00	245.767.366.103,53
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	97.367.644.061,00	97.367.644.061,00
3	Dinas Perhubungan	0,00	267.307.600.638,00	267.307.600.638,00
4	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	0,00	33.450.000.000,00	33.450.000.000,00
Jumlah		245.364.526.803,53	398.528.083.999,00	643.892.610.802,53

6. Aset Lain-lain terdiri dari penerimaan TDF-TKD Kota Samarinda dan koreksi atas kurang volume pekerjaan berdasarkan hasil audit BPK RI TA 2024. Saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp134.664.022.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp578.372.569.000,00 atau 81,11% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp713.036.591.000,00. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 159 Tahun 2023 Tentang Perubahan Rincian Dana Bagi Hasil Tahun 2023 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 38/KM.7/2023 Tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2023. Dan Aset Lain-lain atas Koreksi kurang volume Tahun 2024 sebesar Rp6.626.236.118,84. Berikut ini rincian aset lain-lain TDF-TKD dan Koreksi atas kurang volume berdasarkan audited BPK Tahun 2024:

f.



(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	2024	2023	Kenaikan /(Penurunan)	%
1	Badan Pendapatan Daerah – TDF TKD	134.664.022.000,00	713.036.591.000,00	(578.372.569.000,00)	(81,11)
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang – Gedung dan Bangunan	2.281.886.876,61	0,00	2.281.886.876,61	100,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang – Jalan Irigasi dan jaringan	2.805.355.770,91	0,00	2.805.355.770,91	100,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang – Properti Investasi	153.785.033,88	0,00	153.785.033,88	100,00
5	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan – Gedung dan Bangunan	1.165.358.407,32	0,00	1.165.358.407,32	100,00
6	Dinas Kesehatan – Gedung dan Bangunan	219.850.030,12	0,00	219.850.030,12	100,00
Jumlah		141.290.258.118,84	713.036.591.000,00	(571.746.332.881,16)	(80,18)

5.3.1.5.5 AKUMULASI AMORTISASI ASET TIDAK BERWUJUD

31-12-2024

31-12-2023

(Rp18.981.030.076,00) (Rp17.770.910.009,00)

Perhitungan Amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus dengan masa manfaat selama 10 (sepuluh) tahun. Saldo Amortisasi Aset Tidak Berwujud di dapatkan dari penyusutan nilai Aset Tidak Berwujud. Saldo Amortisasi Aset Tidak Berwujud Per 31 Desember 2024 sebesar Rp18.981.030.076,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp1.210.120.067,00 atau 6,81%. Jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp17.770.910.009,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3. 62 Rincian Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

(dalam satuan Rupiah)

No.	Nama SKPD	Amortisasi Aset Tak Berwujud 2023	Mutasi Tambah 2024	Mutasi Kurang 2024	Amortisasi Aset Tak Berwujud 2024	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	779.981.478,00	20.451.800,00	0,00	800.433.278,00	2,62
2	Dinas Kesehatan	2.619.980.099,00	226.292.936,00	0,00	2.846.273.035,00	8,64
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	444.725.500,00	63.579.000,00	0,00	508.304.500,00	14,30
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	316.954.500,00	0,00	0,00	316.954.500,00	0,00
5	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	161.924.500,00	6.900.500,00	0,00	168.825.000,00	4,26
6	Satuan Polisi	95.015.000,00	9.383.000,00	0,00	104.398.000,00	9,88



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
CATATAN UNTUK LAPORAN KEUANGAN
 UNTUK YANG TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2024



No.	Nama SKPD	Amortisasi Aset Tak Berwujud 2023	Mutasi Tambah 2024	Mutasi Kurang 2024	Amortisasi Aset Tak Berwujud 2024	%
	Pamong Praja					
7	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	246.830.000,00	4.000.000,00	0,00	250.830.000,00	1,62
8	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	93.508.000,00	3.993.000,00	0,00	97.501.000,00	4,27
9	Dinas Tenaga Kerja	289.916.500,00	13.071.300,00	0,00	302.987.800,00	4,51
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	186.125.660,00	4.950.000,00	0,00	191.075.660,00	2,66
11	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	316.800.000,00	700.000,00	0,00	317.500.000,00	0,22
12	Dinas Lingkungan Hidup	226.205.000,00	9.950.000,00	0,00	236.155.000,00	4,40
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	464.300.000,00	26.200.000,00	0,00	490.500.000,00	5,64
14	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	48.000.000,00	1.000.000,00	0,00	49.000.000,00	2,08
15	Dinas Perhubungan	788.823.500,00	79.382.100,00	0,00	868.205.600,00	10,06
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	598.267.580,00	175.755.490,00	0,00	774.023.070,00	29,38
17	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	202.537.500,00	15.047.500,00	0,00	217.585.000,00	7,43
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.869.592.760,00	15.342.705,00	0,00	1.884.935.465,00	0,82
19	Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata	967.270.000,00	0,00	6.600.000,00	960.670.000,00	(0,68)
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	303.500.000,00	29.000.000,00	0,00	332.500.000,00	9,56
21	Dinas Perikanan	98.500.000,00	0,00	0,00	98.500.000,00	0,00
22	Dinas Perdagangan	76.900.000,00	0,00	0,00	76.900.000,00	0,00
23	Sekretariat Daerah	1.578.356.800,00	101.995.360,00	0,00	1.680.352.160,00	6,46
24	Sekretariat DPRD	283.427.000,00	11.979.000,00	0,00	295.406.000,00	4,23
25	Kecamatan Palaran	11.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00	0,00
26	Kecamatan Samarinda Seberang	5.450.000,00	0,00	0,00	5.450.000,00	0,00
27	Kecamatan Samarinda Ulu	6.300.000,00	700.000,00	0,00	7.000.000,00	11,11
28	Kecamatan Samarinda Ilir	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00
29	Kecamatan Sungai Kunjang	37.515.600,00	4.168.400,00	0,00	41.684.000,00	11,11
30	Kecamatan Sambutan	44.917.600,00	4.168.400,00	0,00	49.086.000,00	9,28
31	Kecamatan Samarinda Kota	10.800.000,00	1.200.000,00	0,00	12.000.000,00	11,11
32	Kecamatan Sungai Pinang	2.500.000,00	500.000,00	0,00	3.000.000,00	20,00
33	Inspektorat Daerah	35.900.000,00	0,00	0,00	35.900.000,00	0,00

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN ADALAH BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI LAPORAN KEUANGAN



magnificent
SAMARINDA



No.	Nama SKPD	Amortisasi Aset Tak Berwujud 2023	Mutasi Tambah 2024	Mutasi Kurang 2024	Amortisasi Aset Tak Berwujud 2024	%
34	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	1.001.245.000,00	65.350.000,00	0,00	1.066.595.000,00	6,53
35	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	667.552.732,00	97.739.676,00	0,00	765.292.408,00	14,64
36	Badan Pendapatan Daerah	1.474.758.000,00	115.500.000,00	0,00	1.590.258.000,00	7,83
37	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.390.529.700,00	108.419.900,00	0,00	1.498.949.600,00	7,80
Jumlah		17.770.910.009,00	1.216.720.067,00	6.600.000,00	18.981.030.076,00	6,81

5.3.1.5.6 AKUMULASI PENYUSUTAN ASET LAINNYA

31-12-2024

31-12-2023

Terdapat saldo Akumulasi **(Rp159.505.394.936,40)** **(Rp160.557.652.442,40)** Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp159.505.394.936,40 mengalami penurunan sebesar Rp1.052.257.506,00 atau 0,66% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp160.557.652.442,40, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	2024	2023	Kenaikan / (Penurunan)	%
1	Penyusutan Aset Rusak	(80.696.559.189,50)	(81.748.816.695,50)	1.052.257.506,00	(1,29)
2	Penyusutan Aset P3D	(78.808.835.746,90)	(78.808.835.746,90)	0,00	0,00
Jumlah		(159.505.394.936,40)	(160.557.652.442,40)	1.052.257.506,00	(0,66)

1. Akumulasi Penyusutan aset rusak berat per 31 Desember 2024 sebesar Rp80.696.559.189,50 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Nilai 2024 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	(40.787.415.353,50)
2	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	(247.012.000,00)
3	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	(608.410.000,00)
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	(8.050.000,00)
5	Badan Pendapatan Daerah	(7.155.518.697,00)
6	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	(1.669.528.667,00)
7	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	(139.500.000,00)
8	Dinas Kesehatan	(2.230.981.541,00)
9	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	(1.732.999.400,00)
10	Dinas Komunikasi dan Informatika	(28.996.900,00)
11	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	(412.450.916,00)



No.	Uraian	Nilai 2024 (Rp)
12	Dinas Lingkungan Hidup	(4.769.504.949,00)
13	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	(2.282.353.100,00)
14	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	(11.051.297.220,00)
15	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	(588.734.438,00)
16	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	(646.343.160,00)
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	(253.020.000,00)
18	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	(487.956.350,00)
19	Dinas Perdagangan	(1.912.584.706,00)
20	Dinas Perhubungan	(925.863.509,00)
21	Dinas Perikanan	(341.761.000,00)
22	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	(221.017.100,00)
23	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	(214.445.100,00)
24	Dinas Sosial an Pemberdayaan Masyarakat	(83.231.100,00)
25	Dinas Tenaga Kerja	(327.785.000,00)
26	Inspektorat Daerah	(34.850.000,00)
27	Kecamatan Loa Janan Ilir	(50.115.000,00)
28	Kecamatan Palaran	(31.560.000,00)
29	Kecamatan Samarinda Ilir	(96.841.000,00)
30	Kecamatan Samarinda Kota	(46.420.000,00)
31	Kecamatan Samarinda Seberang	(336.998.300,00)
32	Kecamatan Samarinda Ulu	(229.734.600,00)
33	Kecamatan Samarinda Utara	(153.176.000,00)
34	Kecamatan Sambutan	(109.795.583,00)
35	Kecamatan Sungai Kunjang	(65.191.000,00)
36	Kecamatan Sungai Pinang	(140.169.000,00)
37	Satuan Polisi Pamong Praja	(125.416.000,00)
38	Sekretariat DPRD	(149.532.500,00)
Jumlah		80.696.559.189,50

2. Akumulasi Penyusutan aset P3D per 31 Desember 2024 sebesar Rp78.808.835.746,90 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Nilai 2024 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	(22.641.789.166,00)
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	(42.801.666.549,00)
3	Dinas Perhubungan	(13,365,380,031.90)
Jumlah		(78.808.835.746,90)

f.



5.3.2 KEWAJIBAN

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Daerah. Kewajiban Pemerintah Kota Samarinda terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek yang merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan dan Kewajiban Jangka Panjang yang merupakan Kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Saldo Kewajiban Pemerintah Kota Samarinda per 31 Desember 2024 sebesar Rp266.209.944.612,52 dan mengalami kenaikan sebesar Rp46.827.457.395,64 atau sebesar 21,35% dibandingkan per 31 Desember 2023 sebesar Rp219.382.487.216,88. Rincian saldo kewajiban tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 5.3. 63 Rincian Saldo Kewajiban

(dalam satuan Rupiah)

Kewajiban	2024	2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Dierima Dimuka	793.762.866,25	5.109.384.428,93	(4.315.621.562,68)	(84,46)
Utang Belanja	168.847.527.198,27	117.705.864.326,95	51.141.662.871,32	43,45
Utang Jangka Pendek Lainnya	1.956.189,00	540.102,00	1.416.087,00	262,19
Utang Kepada Masyarakat	96.566.698.359,00	96.566.698.359,00	0,00	0,00
Jumlah	266.209.944.612,52	219.382.487.216,88	46.827.457.395,64	21,35

5.3.2.1 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Kewajiban Jangka Pendek yang merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan. Kewajiban Jangka Pendek tahun 2024 dirincikan sebagai berikut:

Tabel 5.3. 64 Rincian Kewajiban Jangka Pendek

(dalam satuan Rupiah)

Kewajiban Jangka Pendek	2024	2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	793.762.866,25	5.109.384.428,93	(4.315.621.562,68)	(84,46)
Utang Belanja	168.847.527.198,27	117.705.864.326,95	51.141.662.871,32	43,45
Utang Jangka Pendek Lainnya	1.956.189,00	540.102,00	1.416.087,00	262,19
Jumlah	169.643.246.253,52	122.815.788.857,88	46.808.428.873,27	38,11



5.3.2.1.1 UTANG PERHITUNGAN PIHAK KETIGA (PFK)

31-12-2024

31-12-2023

Rp0,00

Rp0,00

Pada tahun 2024 tidak terdapat saldo pungutan/potongan PFK, adapun saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00 sama dengan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00.

5.3.2.1.2 PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA

31-12-2024

31-12-2023

Rp793.762.866,25

Rp5.109.384.428,93

Saldo ini merupakan pendapatan yang diterima dimuka tetapi belum menjadi hak Pemerintah karena masih terdapat kewajiban Pemerintah sebagai konsekuensi penerimaan pendapatan tersebut. Saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp793.762.866,25 dan mengalami penurunan sebesar Rp4.315.621.562,68 atau sebesar 84,46% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp5.109.384.428,93. Rincian Pendapatan Diterima Dimuka sebagai berikut:

Tabel 5.3. 65 Rincian Pendapatan Diterima dimuka

(dalam satuan Rupiah)

No.	SKPD	2024	2023	Kenaikan /(Penurunan)	%
1	Badan Pendapatan Daerah				
	Reklame Papan	591.433.486,58	3.939.616.593,09	(3.348.183.106,51)	(84,99)
	Reklame Berjalan	4.062.500,00	41.083.333,33	(37.020.833,33)	(90,11)
	Jumlah	595.495.986,58	3.980.699.926,42	(3.385.203.939,84)	(85,04)
2	Dinas Perhubungan				
	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	0,00	328.122.500,00	(328.122.500,00)	(100,00)
	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	17.954.513,00	6.229.281,67	11.725.231,33	188,23
	Retribusi Ijin Trayek	0,00	883.333,33	(883.333,33)	(100,00)
	Reklame Papan/ Billboard/Videotron/Megatron	0,00	37.666.666,67	(37.666.666,67)	(100,00)
	Jumlah	17.954.513,00	372.901.781,67	(354.947.268,67)	(95,19)
3	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu				
	Ijin Tempat Minuman Beralkohol	0,00	578.166.666,67	(578.166.666,67)	(100,00)
	Jumlah	0,00	578.166.666,67	(578.166.666,67)	(100,00)
4	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah				
	Sewa Lahan	27.735.387,50	77.554.137,50	(49.818.750,00)	(64,24)
	Sewa Kantin dan Bangunan	146.576.979,17	7.145.250,00	139.431.729,17	1.951,39
	Jumlah	174.312.366,67	84.699.387,50	89.612.979,17	105,8



No.	SKPD	2024	2023	Kenaikan /(Penurunan)	%
5	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata				
	Sewa Ruko, Tanah dan Lahan/Gazebo	0,00	92.916.666,67	(92.916.666,67)	(100,00)
	Sewa Lapangan Parkir GOR Segiri	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	100,00
	Jumlah	6.000.000,00	92.916.666,67	(86.916.666,67)	(93,54)
Jumlah Pendapatan Diterima Dimuka		793.762.866,25	5.109.384.428,93	(4.315.621.562,68)	(84,46)

5.3.2.1.3 UTANG BELANJA

31-12-2024

31-12-2023

Rp168.847.527.198,27

Rp117.705.864.326,95

Utang Belanja adalah biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan. Terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, serta Belanja Modal. Utang Belanja pada tahun 2024 sebesar Rp168.847.527.198,27 mengalami kenaikan sebesar Rp51.141.662.871,32 atau sebesar 43,45% dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp117.705.864.326,95. Rincian Utang belanja tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 5.3. 66 Rincian Utang Belanja

(dalam satuan Rupiah)

Kewajiban	2024	2023	Kenaikan /(Penurunan)	%
Utang Belanja Pegawai	6.603.053.396,00	5.168.223.215,00	1.434.830.181,00	27,76
Utang Belanja Barang dan Jasa, Utang Belanja Modal	162.244.473.802,27	112.537.641.111,95	49.706.832.690,32	44,17
Jumlah	168.847.527.198,27	117.705.864.326,95	51.141.662.871,32	43,45

5.3.2.1.3.1 UTANG BELANJA PEGAWAI

31-12-2024

31-12-2023

Rp6.603.053.396,00

Rp5.168.223.215,00

Utang Belanja Pegawai adalah biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan. Utang Belanja Pegawai dinilai atas jasa yang telah diserahkan oleh pegawai. Utang belanja pegawai pada tahun 2024 sebesar Rp6.603.053.396,00 mengalami kenaikan sebesar Rp1.434.830.181,00 atau sebesar 27,76% dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp5.168.223.215,00. Rincian Utang Belanja Pegawai tahun 2024 dirincikan sebagai berikut:



Tabel 5.3. 67 Rincian Utang Pegawai

(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Gaji dan Tunjangan ASN	Tunjangan Tambahan Penghasilan	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	Jumlah Utang Belanja Pegawai
1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	10.381.678,00	20.281.991,00	0,00	30.663.669,00
2	Sekretariat Daerah	0,00	0,00	3.375.000,00	3.375.000,00
3	Dinas komunikasi dan Informatika	0,00	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00
4	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	847.271,00	134.300.000,00	135.147.271,00
5	Dinas Perhubungan	0,00	0,00	125.351.968,00	125.351.968,00
6	Dinas Kesehatan	0,00	799.680.791,00	0,00	799.680.791,00
7	Badan Pendapatan Daerah	0,00	0,00	5.201.370.000,00	5.201.370.000,00
8	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	183.026.250,00	24.799.150,00	0,00	207.825.400,00
9	Kecamatan Sungai Kunjang	0,00	62.062.497,00	0,00	62.062.497,00
10	Dinas Perikanan	0,00	0,00	35.326.800,00	35.326.800,00
Jumlah		193.407.928,00	909.921.700,00	5.499.723.768,00	6.603.053.396,00

5.3.2.1.3.2 UTANG BELANJA BARANG DAN JASA, UTANG BELANJA MODAL

31-12-2024

31-12-2023

Rp162.244.473.802,27

Rp112.537.641.111,95

Saldo Utang Belanja Barang dan Jasa, Belanja Modal merupakan utang kepada pihak ketiga sampai dengan 31 Desember 2024. Utang Belanja Barang dan Jasa, Utang Belanja Modal yang belum dilakukan pembayaran sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp162.244.473.802,27. Mengalami kenaikan sebesar Rp49.706.832.690,32 atau sebesar 44,17% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp112.537.641.111,95. Berikut rincian Utang Belanja Barang dan Jasa, Utang Belanja Modal berdasarkan Satuan Kerja Perangkat Daerah:

Tabel 5.3. 68 Rincian Utang Belanja Barang dan Jasa, Utang Belanja Modal berdasarkan SKPD

(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	2024	2023	Kenaikan / (Penurunan)	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	621.252.437,00	104.782.834,00	516.469.603,00	492,90
2	Dinas Kesehatan	36.708.226.375,62	32.875.211.426,95	3.833.014.948,67	11,66
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	101.200.966.246,70	55.784.959.204,05	45.416.007.042,65	81,41
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	15.950.408.630,95	15.950.408.630,95	0,00	0,00



No.	Uraian	2024	2023	Kenaikan /(Penurunan)	%
5	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	0,00	4.343.091,00	(4.343.091,00)	(100,00)
6	Dinas Lingkungan Hidup	4.873.476.976,00	5.248.784.394,00	(375.307.418,00)	(7,15)
7	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	1.085.243,00	(1.085.243,00)	(100,00)
8	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	1.348.573,00	819.996,00	528.577,00	64,46
9	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	0,00	6.308.946,00	(6.308.946,00)	(100,00)
10	Dinas Komunikasi dan Informatika	188.781,00	291.252,00	(102.471,00)	(35,18)
11	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	547.610,00	(547.610,00)	(100,00)
12	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	21.000,00	(21.000,00)	(100,00)
13	Sekretariat Daerah	273.232.119,00	356.260.424,00	(83.028.305,00)	(23,31)
14	Sekretariat DPRD	363.335.691,00	239.750.286,00	123.585.405,00	51,55
15	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	123.358.180,00	68.326.455,00	55.031.725,00	80,54
16	Badan Pendapatan Daerah	2.001.930.000,00	1.843.695.000,00	158.235.000,00	8,58
17	Kecamatan Palaran	0,00	1.101.789,00	(1.101.789,00)	(100,00)
18	Kecamatan Samarinda Ulu	2.173.481,00	2.163.443,00	10.038,00	0,46
19	Kecamatan Samarinda Utara	1.955.462,00	13.484.990,00	(11.529.528,00)	(85,50)
20	Kecamatan Sungai Kunjang	12.740.000,00	0,00	12.740.000,00	100,00
21	Kecamatan Sungai Pinang	1.179.148,00	2.517.234,00	(1.338.086,00)	(53,16)
22	Kecamatan Loa Janan Ilir	0,00	27.549.900,00	(27.549.900,00)	(100,00)
23	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	3.576.225,00	5.227.963,00	(1.651.738,00)	(31,59)
24	Dinas Perdagangan	105.125.476,00	0,00	105.125.476,00	100,00
25	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		162.244.473.802,27	112.537.641.111,95	49.706.832.690,32	44,17

Tabel 5.3. 69 Rincian Utang Belanja Barang dan Jasa, Utang Belanja Modal berdasarkan Kelompok

No.	Uraian	2024	Utang Belanja Barang dan Jasa	Utang Belanja Modal
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	621.252.437,00	8.358.187,00	612.894.250,00
2	Dinas Kesehatan	36.708.226.375,62	34.885.112.624,62	1.823.113.751,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	101.200.966.246,70	0,00	101.200.966.246,70
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	15.950.408.630,95	0,00	15.950.408.630,95
5	Dinas Lingkungan Hidup	4.873.476.976,00	9.809.432,00	4.863.667.544,00
6	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	1.348.573,00	1.348.573,00	0,00
7	Dinas Komunikasi dan Informatika	188.781,00	188.781,00	0,00



No.	Uraian	2024	Utang Belanja Barang dan Jasa	Utang Belanja Modal
8	Sekretariat Daerah	273.232.119,00	273.232.119,00	0,00
9	Sekretariat DPRD	363.335.691,00	363.335.691,00	0,00
10	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	123.358.180,00	123.358.180,00	0,00
11	Badan Pendapatan Daerah	2.001.930.000,00	2.001.930.000,00	0,00
12	Kecamatan Samarinda Ulu	2.173.481,00	2.173.481,00	0,00
13	Kecamatan Samarinda Utara	1.955.462,00	1.955.462,00	0,00
14	Kecamatan Sungai Kunjang	12.740.000,00	12.740.000,00	0,00
15	Kecamatan Sungai Pinang	1.179.148,00	1.179.148,00	0,00
16	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	3.576.225,00	3.576.225,00	0,00
17	Dinas Perdagangan	105.125.476,00	105.125.476,00	0,00
Jumlah		162.244.473.802,27	37.793.423.379,62	124.451.050.422,65

5.3.2.1.4 UTANG JANGKA PENDEK LAINNYA

31-12-2024

31-12-2023

Rp1.956.189,00

Rp540.102,00

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya merupakan utang atas Kas Lainnya yang terdapat di Bendahara Pengeluaran yang belum dilakukan pembayaran sampai dengan 31 Desember 2024. Utang Jangka Pendek Lainnya yang belum dilakukan pembayarannya sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp1.956.189,00 mengalami kenaikan sebesar Rp1.416.087,00 atau sebesar 262,19% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp540.102,00. Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya sebagai berikut:

Tabel 5.3. 70 Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya

(dalam satuan Rupiah)

No	Nama SKPD	2024	2023	Kenaikan /(Penurunan)	%
1	Dinas Kesehatan	0,00	43.200,00	(43.000,00)	(100,00)
2	Kecamatan Palaran	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
3	Kecamatan Samarinda Ulu	50.007,00	125.000,00	(74.993,00)	(59,99)
4	Kecamatan Samarinda Utara	906.182,00	0,00	906.182,00	100,00
5	Kecamatan Loa Janan Ilir	0,00	371.902,00	(371.902,00)	(100,00)
Jumlah		1.956.189,00	540.102,00	1.416.087,00	262,19



5.3.2.2 KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

Utang Jangka Panjang Lainnya adalah Kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban Jangka Panjang merupakan Utang Kepada Masyarakat terdapat pada Satuan Kerja Perangkat Daerah. Rincian Utang Jangka Panjang sebagai berikut:

Tabel 5.3. 71 Rincian Utang Jangka Panjang

(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	2024	2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	93.944.440.259,00	93.944.440.259,00	0,00	0,00
2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	927.533.800,00	927.533.800,00	0,00	0,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.694.724.300,00	1.694.724.300,00	0,00	0,00
Jumlah		96.566.698.359,00	96.566.698.359,00	0,00	0,00

5.3.2.2.1 UTANG KEPADA MASYARAKAT

31-12-2024

31-12-2023

Rp96.566.698.359,00

Rp96.566.698.359,00

Saldo Utang Kepada Masyarakat per 31 Desember 2024 sebesar Rp96.566.698.359,00 sama dengan saldo tahun 2023 sebesar Rp96.566.698.359,00. Rincian Utang Kepada Masyarakat per SKPD sebagai berikut:

Tabel 5.3. 72 Utang Kepada Masyarakat Kota Samarinda Per 31 Desember 2024

No.	Uraian	Saldo 2024 (Rp)
A.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	93.944.440.259,00
	Tanah	
	- Tanah untuk SMKN 18 Jl. Poros Samarinda Bontang	3.825.000.000,00
	- Tanah untuk Puskesmas di Jl. Poros Samarinda Bontang	5.900.000.000,00
	- Tanah untuk SMKN 11 Jl. Swastika Palaran	3.133.660.000,00
	- Tanah di Perum BPK Samarinda Seberang	6.111.337.500,00
	- Tanah di Jl. Poros Palaran Bantuas	516.800.000,00
	- Tanah untuk Polder Gunung Lingai	16.529.533.000,00
	- Tanah untuk Unmul II di Jl. Bukit Seribu	26.844.100.000,00
	- Tanah untuk Bangunan Aspol Loa Janan	523.450.000,00
	- Tanah untuk Fasilitas Olah Raga di Kelurahan Selili	6.702.100.000,00
	- PT. ASKES	23.858.459.759,00
B.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	927.533.800,00



No.	Uraian	Saldo 2024 (Rp)
	Bidang Pendidikan Menengah	
	(Bantuan SMPN 17 Samarinda) Perencanaan Pembangunan Rehab SMPN 17 Samarinda	10.500.000,00
	Dana Pendamping DAK	
	- Kec. Sungai Kunjang	26.300.000,00
	- Kec. Samarinda Seberang	35.200.000,00
	- Kec. Samarinda Ulu	8.800.000,00
	- Kec. Samarinda Ilir	39.500.000,00
		39.600.000,00
	- Kec. Samarinda Seberang	7.850.000,00
	- Kec. Samarinda Ulu	35.750.000,00
	PPTK: MAKSI RISAT	
	Pembangunan RKB	
	Rehabilitasi Sedang/ Berat SMP/MTs (2008 - 2009)	
	- Pengadaan printer	3.000.000,00
	- SMPN 3 Jl. La Madu Keleng, Samarinda Seberang	6.000.000,00
	- SMPN 4 Jl. Ir. Juanda Samarinda	5.000.000,00
	- SMPN 7 Jl. Kadrie Oening Samarinda	4.425.000,00
	- SMPN 8 Samarinda Seberang	900.000,00
	- SMPN 9 Jl. Sulaiman (Samarinda Ilir)	5.570.000,00
	- SMPN 11 Samarinda Jl. Perjuangan Samarinda utara	1.300.000,00
	- SMPN 12 Samarinda Utara Jl.Samarinda-Bontang	2.000.000,00
	- SMPN 13 Samarinda Jl. Kartini No. 37 Lempake	6.140.000,00
	- SMPN 10 Jl. Untung Suropati Karang Asam Samarinda	600.000,00
	- SMPN 15 Jl. Taman Siswa Samarinda Seberang (KM 1)	606.000,00
	- SMPN 16 Jl. Jakarta Blok AD. Samarinda	850.000,00
	- SMPN 17 Samarinda Jl. Tatako Kel. Sungai Kapih, Samarinda	1.000.000,00
	- SMPN 19 Jl. Samarinda Bontang KM. 37	1.000.000,00
	- SMPN 20 Jl. Nahkoda, Palaran-Bukuan-Samarinda	1.400.000,00
	- SMPN 22 Samarinda Jl. Pahlawan-Samarinda	500.000,00
	- SMPN 25 Jl. Pusaka Loa Bahu Samarinda	400.000,00
	- SMP 27 Samarinda Jl. Solong Kutai Sempaja-Samarinda	860.000,00
	- SMPN 28 Jl. Ekonomi Gg. Mahakam III Loa Buah Samarinda	1.004.000,00
	- SMPN 29 Jl. Pakis Hijau 7. Komplek Bengkuring Samarinda	700.000,00
	- SMPN 36 Jl. Harun Nafsi Samarinda Seberang	5.000.000,00
	- SMPN 41 Jl. Sambutan Samarinda	820.000,00
	- SMP Yapendik (Jl. Angklung) (MTs Al-Kautsar) Samarinda	550.000,00

f.



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
CATATAN UNTUK LAPORAN KEUANGAN
UNTUK YANG TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2024



No.	Uraian	Saldo 2024 (Rp)
	- SMP/MTs Mujahidin Lempake Samarinda Utara Jl. Panglima Untung Surapati Samarinda	4.957.000,00
	- MTs Al-Jawahir Lempake Smd. Utara Jl. Purwoda	5.807.500,00
	- MTs Labaika Samarinda Seberang	750.000,00
	- MTs AT-Taqwa Samarinda Harapan Baru Smd Seberang	600.000,00
	Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Ruang Kelas (Lanjutan 2008-2009)	
	- Pengawasan SMAN 8	915.000,00
	- Pengawasan SMAN 3	915.000,00
	- Pengawasan SMKN 6	915.000,00
	- Pengawasan SMAN 4	915.000,00
	- Pengawasan SMAN 11	915.000,00
	- Pengawasan Pesantren Syachona Cholil	915.000,00
	- Pengawasan SMAN 9	915.000,00
	Revitalisasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah	
	- Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	29.270.000,00
	- Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	17.162.500,00
	- Belanja Modal Konstruksi Bangunan	
	- TK Salsabila Jl. Perum.Bengkuring Blok E RT. 93	1.962.500,00
	- TK AR Raudah Jl. RE. Martadinata	1.812.500,00
	- TK Jabal Ilmi Jl. Pelita Samarinda	1.335.000,00
	Pengurugan dan Paving Halaman (Lanjutan Tahun 2008 - 2009)	
	- Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	13.500.000,00
	- Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	11.000.000,00
	- Pengadaan Printer	3.000.000,00
	- Pengadaan Kamera	4.000.000,00
	- SMPN 10 Samarinda Jl. Ir. Sutami Kec. Sungai Kunjang Samarinda	5.760.000,00
	- SMPN 12 Jl. Samarinda-Bontang, Samarinda Utara	2.750.000,00
	- SMPN 36 Jl. Harun Nafsi Samarinda Seberang	2.975.000,00
	- IKIP PGRI Jl. H. Suwandi Kec. Samarinda Ulu	1.392.500,00
	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Kasek/Penjaga Sekolah	
	- Belanja Konsultasi Perencanaan	18.000.000,00
	- Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Kasek SDN 002 Jl. Sawi Kec. Samarinda Utara	1.222.500,00
	- Rehabilitasi Sedang Berat Rumah Kasek SDN 014 Jl. Lempake Kec. Samarinda Utara	1.222.500,00
	- Rehabilitasi Sedang Berat Rumah Kasek SDN 030 Jl. Jl. Tatako Sei Kapih Kec. Samarinda Ilir	1.525.000,00
	Pemagaran Sekolah	

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN ADALAH BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI LAPORAN KEUANGAN



magnificent
SAMARINDA

241



No.	Uraian	Saldo 2024 (Rp)
	- Pemagaran SMPN 9 Samarinda	2.047.500,00
	- Pemagaran SMPN 27 Jl. Batu Cermin Kec. Smd. Utara	1.190.000,00
	SHARING DANA (Lanjutan Th 2008-2009)	
	- Pengadaan RKB SMK7	1.655.000,00
	- Pengadaan RKB	80.000.000,00
	- Rehabilitasi Ruang Perpustakaan	72.000.000,00
	- Rehabilitasi Ruang Laboratorium	50.000.000,00
	Sharing Dana (PengembanganSSN-SD) 2008-2009	
	- SDN 007 Kec. Samarinda Ulu	2.492.500,00
	- SDN 034 Kec. Samarinda Ulu	2.487.500,00
	- SDN-001 S. Kunjang	2.485.000,00
	- SDN-016 S. Kunjang	2.485.000,00
	- SDN-004 S. Kunjang	2.492.500,00
	- SDN-005 Samarinda Ilir	2.492.500,00
	- SDN-013 Samarinda Ilir	2.497.000,00
	- SDN-002 Samarinda Ilir	2.484.000,00
	- SDN-011 Samarinda Utara	2.485.000,00
	- SD Muhammadiyah 4 Samarinda Utara	2.485.000,00
	Bidang Pendidikan Dasar	
	Perencanaan Rehab/Pembangunan Ruang Kelas SDN 001	25.400.000,00
	Perencanaan Rehab/Pembangunan Ruang Kelas SDN 017	33.500.000,00
	Perencanaan Rehab/Pembangunan Ruang Kelas SDN 042	19.360.000,00
	Perencanaan Rehab/Pembangunan Ruang Kelas SDN 007	30.679.000,00
	Perencanaan Rehab/Pembangunan Ruang Kelas SMPN.8	38.335.000,00
	Pengawasan Rehab/Pembangunan Ruang Kelas SDN.001	17.890.000,00
	Pengawasan Rehab/Pembangunan Ruang Kelas SDN.017	23.650.000,00
	Pengawasan Rehab/Pembangunan Ruang Kelas SDN.042	26.950.000,00
	Pengawasan Rehab/Pembangunan Ruang Kelas SDN.007	20.500.000,00
	Pengawasan Rehab/Pembangunan Ruang Kelas SMPN. 8	25.750.000,00
	Utang tahun 2013	
	Kegiatan Seksi Sardikmen	
	Pembuatan pagar SMP dan SMK YPS Jl. Merdeka Smd	8.600.550,00
	Perencanaan pagar SMP dan SMK YPS Samarinda	11.212.500,00
	Pengawassan pagar SMP dan SMK YPS Samarinda	8.193.750,00

f.



No.	Uraian	Saldo 2024 (Rp)
	Perencanaan Rehab SMPN 17 Jl. Tatako (2012)	10.800.000,00
	Pengawasan Rehab SMPN 17 Jl. Tatako (2012)	5.400.000,00
C.	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	1.694.724.300,00
1	Rehab jl.AW. Syahrani Gg.6	4.880.300,00
2	Rehab jl. Labu Hijau II	4.968.000,00
4	Rehab jl. Samping pasar rahmat	99.785.000,00
5	Rehab Jl. Sawi III Perum Bengkuring	7.897.500,00
6	Rehab Jl. Kelapa Gading	34.700.000,00
7	Pengawasan teknis kec. Palaran	49.670.000,00
	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Jalan	
8	Penanggulangan Longsoran jalan H.Adam Malik	70.147.550,00
9	Penanggulangan Longsoran Jalan Wiraguna	11.898.700,00
10	Penanggulangan longsoran kompleks Ratindo	4.978.400,00
11	Tanggap Darurat	443.821.800,00
12	Penunjang Bangun Praja & Adipura Jalan Sentosa	295.860.350,00
13	Jalan Sentosa	23.758.650,00
14	Jalan Pusaka Bendang	19.016.300,00
15	Jalan Manunggal Dalam Mesjid Belanja bulanan dinas luar	14.240.450,00
16	Belanja Note book Rehabilitasi jalan (tersebar)	19.965.000,00
17	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	14.400.000,00
18	Belanja transportasi dan akomodasi	10.500.000,00
19	Pengaspalan jl.muang-bugis STA 0 + 316 - 0 + 500	31.500.000,00
20	Rehab /pemel jl.Suryanata jalur cempaka RT .29	2.453.300,00
21	Jasa konsultan perencana penggantian jembatan 1.03.02.04.15.87.5.2.2.21.02	40.400.000,00
22	Pemb. Box Culvert jl.tri dharma 1.03.02.04.15.87.5.2.2.22.04	35.665.000,00
23	Penggantian jembatan Gg.PLN 1.03.02.04.15.86.5.2.3.22.04	31.919.000,00
24	Rehabilitasi bangunan bagi / sadap tanah merah	12.343.500,00
25	Rehab pintu air ,D.I sambutan ,luas lahan fungsional	2.866.500,00
26	Rehab pintu air ,D.I bukuan ,luas lahan fungsional 500	2.866.500,00
27	Rehabilitasi bangunan bagi / sadap & saluran pembawa	2.866.500,00
28	Pemeliharaan saluran primer bendungan sambutan	4.250.000,00
29	Pemeliharaan saluran pembuang tanah merah	4.250.000,00
30	Pemeliharaan bangunan bagi/sadap & saluran pembawa	2.550.000,00
31	Peningkatan saluran primer bendungan sambutan D.I.S Pengembangan Sumber Daya Air Tersebar; Belanja Modal Pengadaan Konstruksi jaringan air; Pengadaan konstruksi pintu air	12.207.000,00
32	D.I Bayur	2.392.500,00
33	D.I Tani aman	2.384.000,00

f.



No.	Uraian	Saldo 2024 (Rp)
34	D.I Sungai siring	2.330.000,00
35	D.I Lempake	2.495.000,00
36	Rehabilitasi Jalan Wira Tama RT.27 Kec.Samarinda Ulu	4.953.200,00
37	Program: Rehabilitasi /Pemeliharaan Jalan & Jembatan Pekerjaan Jalan Suroboyo	290.721.200,00
38	Pembangunan Jalan dan Jembatan Kegiatan Jalan H.Adam Malik Pekerjaan Konsultan Perencanaan	44.418.000,00
39	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kegiatan Rehab/Pemeliharaan Jalan Dalam Kota Samarinda Jalan Mulawarman	17.065.600,00
40	Pemeliharaan Simpang Tiga Jalan Remaja, Jalan Kemakmuran dan Jalan B Katamso	2.908.900,00
41	Pemeliharaan Jalan Sentosa Kec. Smd Utara	3.955.750,00
42	Pemeliharaan Jalan Dalam Kota Simpang Tiga Jalan Remaja - Jl. Ahmad Yani	1.953.800,00
43	Rehabilitasi/Pemeliharaan Normalisasi Saluran Sungai (Tersebar) DI Simpang Arang, Kel. Handil Bakti Kec. Palaran	2.521.050,00
Jumlah Utang Jangka Panjang		96.566.698.359,00

5.3.3 EKUITAS

Ekuitas merupakan gambaran kekayaan bersih Pemerintah Kota Samarinda dengan cara menghitung selisih antara Aset dengan Kewajiban. Nilai Ekuitas Pemerintah Kota Samarinda per 31 Desember 2024 sebesar Rp20.748.433.270.358,59 mengalami kenaikan sebesar Rp838.043.022.342,81 atau sebesar 4,21%, jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp19.910.390.248.015,78.

Tabel 5.3. 73 Tabel Perbandingan Ekuitas

(dalam satuan Rupiah)

Uraian	2024	2023	Kenaikan / (Penurunan)	%
Ekuitas	20.748.433.270.358,59	19.910.390.248.015,78	838.043.022.342,81	4.21
Jumlah	20.748.433.270.358,59	19.910.390.248.015,78	838.043.022.342,81	4.21



5.4 PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL (LO)

Laporan Operasional (LO) merupakan bagian dari Laporan Keuangan Tahun 2024 yang didalamnya menyajikan informasi tentang seluruh Kegiatan Operasional Keuangan Pemerintah Kota Samarinda yang menggambarkan tentang Pendapatan LO, Beban dan Surplus/Defisit Operasional yang penyajiannya disandingkan dengan Laporan Operasional (LO) tahun sebelumnya.

5.4.1 PENDAPATAN

31-12-2024

31-12-2023

Rp4.902.799.986.421,05

Rp4.565.159.228.872,87

Pendapatan merupakan hak Pemerintah Kota Samarinda yang diakui sebagai penambah Ekuitas dalam periode tahun bersangkutan. Pendapatan telah diklasifikasikan menurut jenis pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Realisasi periode 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp4.902.799.986.421,05 mengalami kenaikan sebesar Rp337.640.757.548,18 atau sebesar 7,40% jika dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp4.565.159.228.872,87 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4 1 Pendapatan

(dalam satuan Rupiah)

No	Uraian	2024	2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Pendapatan Asli Daerah	1.115.335.664.206,36	978.860.543.498,62	136.475.120.707,74	13,94
2	Pendapatan Transfer	3.656.652.754.326,00	3.518.692.563.120,00	137.960.191.206,00	3,92
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	130.811.567.888,69	67.606.122.254,25	63.205.445.634,44	93,49
Jumlah		4.902.799.986.421,05	4.565.159.228.872,87	337.640.757.548,18	7,40

Masing-masing Pendapatan dapat diuraikan sebagai berikut:

5.4.1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH

31-12-2024

31-12-2023

Rp1.115.335.664.206,36

Rp978.860.543.498,62

Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Samarinda adalah Pendapatan yang bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Realisasi periode 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp1.115.335.664.206,36, mengalami kenaikan sebesar Rp136.475.120.707,74 atau 13,94% jika dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp978.860.543.498,62 dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 5.4 2 Pendapatan Asli Daerah

(dalam satuan Rupiah)

No	Uraian	2024	2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Pendapatan Pajak Daerah	737.722.712.002,25	659.229.584.391,88	78.493.127.610,37	11,91
2	Pendapatan Retribusi Daerah	53.099.708.805,84	52.692.401.714,15	407.307.091,69	0,77
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	103.882.807.564,03	87.235.027.953,25	16.647.779.610,78	19,08
4	Lain-lain PAD yang Sah	220.630.435.834,24	179.703.529.439,34	40.926.906.394,90	22,77
Jumlah		1.115.335.664.206,36	978.860.543.498,62	136.475.120.707,74	13,94

Masing-masing realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.4.1.1.1 PENDAPATAN PAJAK DAERAH

31-12-2024

31-12-2023

Rp737.722.712.002,25

Rp659.229.584.391,88

Pajak Daerah merupakan Pendapatan Asli Daerah yang dipungut dan dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Sistem dan Prosedur Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah. Pengakuan pendapatan terjadi pada saat timbulnya hak atas pendapatan tahun 2024. Pendapatan Pajak Daerah pada tahun 2024 terealisasi sebesar Rp737.722.712.002,25 mengalami kenaikan sebesar Rp78.493.127.610,37 atau 11,91% jika dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp659.229.584.391,88 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4 3 Pendapatan Pajak Daerah

(dalam satuan Rupiah)

No	Uraian	2024	2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Pajak Hotel	81.415.016.980,51	62.150.668.631,23	19.264.348.349,28	31,00
2	Pajak Restoran	143.273.557.243,30	121.538.914.535,58	21.734.642.707,72	17,88
3	Pajak Hiburan	41.182.902.005,60	36.299.582.920,00	4.883.319.085,60	13,45
4	Pajak Reklame	8.497.725.131,84	10.884.221.978,67	(2.386.496.846,83)	(21,93)
5	Pajak Penerangan Jalan	147.901.602.508,00	134.436.820.788,00	13.464.781.720,00	10,02
6	Pajak Parkir	6.691.277.991,00	13.939.499.628,00	(7.248.221.637,00)	(52,00)
7	Pajak Air Tanah	307.702.560,00	268.549.625,00	39.152.935,00	14,58
8	Pajak Sarang Burung Walet	0,00	24.174.900,00	(24.174.900,00)	(100,00)
9	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	30.068.617,00	7.452.050,00	22.616.567,00	303,49
10	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	153.748.979.558,00	146.469.973.309,00	7.279.006.249,00	4,97
11	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	154.673.879.407,00	133.209.726.026,40	21.464.153.380,60	16,11
Jumlah		737.722.712.002,25	659.229.584.391,88	78.493.127.610,37	11,91



Pengakuan Pendapatan Pajak Daerah dalam LO tahun 2024 ini lebih besar dari saldo Pendapatan Pajak Daerah dalam LRA tahun 2024 sebesar Rp54.681.376.626,31. (Rp737.722.712.002,25-Rp683.041.335.375,94). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Pendapatan Pajak Daerah dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

**Pendapatan Pajak Daerah
LRA**

Rp 683.041.335.375,94

Mutasi Tambah:

a Penambahan Piutang tahun
2024 pada Badan
Pendapatan Daerah

- Pajak Hotel	Rp	656.208.269,78
- Pajak Restoran	Rp	6.832.789.110,97
- Pajak Hiburan	Rp	2.164.903.397,57
- Pajak Reklame	Rp	541.762.207,00
- Pajak Penerangan Jalan	Rp	285.300,00
- Pajak Parkir	Rp	579.282.640,00
- Pajak Air Tanah	Rp	5.901.860,00
- Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	Rp	11.987.000,00
- Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	Rp	73.308.126.148,20

Rp 84.101.245.933,52

b Jurnal Balik Pendapatan
Diterima Dimuka tahun 2023
pada Badan Pendapatan
Daerah:

- Pajak Reklame	Rp	3.980.699.926,42

Rp 3.980.699.926,42

c Mutasi PBB tahun 2024 pada
Badan Pendapatan Daerah:
Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan
(PBBP2)

- Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	Rp	4.291.172,00

Rp 4.291.172,00

Jumlah Mutasi Tambah

Rp 88.086.237.031,94



Mutasi Kurang:

a	Pembayaran Piutang (Mutasi Piutang) pada Badan			
·	Pendapatan Daerah			
-	Pajak Hotel	Rp	1.882.188.318,00	
-	Pajak Restoran	Rp	2.917.327.397,71	
-	Pajak Hiburan	Rp	2.118.538.506,12	
-	Pajak Reklame	Rp	919.568.472,00	
-	Pajak Parkir	Rp	647.063.915,00	
-	Pajak Air Tanah	Rp	2.905.280,00	
-	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	Rp	24.311.322.529,22	
-	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Rp	10.450.001,00	
		Rp	32.809.364.419,05	
b	Pendapatan Diterima Dimuka tahun 2024 pada	Rp	595.495.986,58	
·	Badan Pendapatan Daerah			
	Jumlah Mutasi Kurang	Rp	33.404.860.405,63	
	Jumlah Pendapatan Pajak Daerah	Rp	737.722.712.002,25	

Berikut adalah Tabel Rincian Mutasi Pendapatan Pajak Daerah tahun 2024:

Tabel 5.4 4 Mutasi Pendapatan Pajak Daerah

(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	LRA	Mutasi (+)	Mutasi (-)	Saldo
1	Pajak Hotel	82.640.997.028,73	656.208.269,78	1.882.188.318,00	81.415.016.980,51
2	Pajak Restoran	139.358.095.530,04	6.864.590.465,97	2.949.128.752,71	143.273.557.243,30
3	Pajak Hiburan	41.071.390.614,15	2.164.903.397,57	2.118.538.506,12	41.117.755.505,60
4	Pajak Reklame	5.490.327.457,00	4.522.462.133,42	1.515.064.458,58	8.497.725.131,84
5	Pajak Penerangan Jalan	147.901.317.208,00	285.300,00	0,00	147.901.602.508,00
6	Pajak Parkir	6.759.059.266,00	579.282.640,00	647.063.915,00	6.691.277.991,00
7	Pajak Air Tanah	304.705.980,00	5.901.860,00	2.905.280,00	307.702.560,00
8	Pajak Sarang Burung Walet	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	18.081.617,00	11.987.000,00	0,00	30.068.617,00

f.



No.	Uraian	LRA	Mutasi (+)	Mutasi (-)	Saldo
10	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	104.747.884.767,02	73.312.417.320,20	24.311.322.529,22	153.748.979.558,00
11	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	154.684.329.408,00	0,00	10.450.001,00	154.673.879.407,00
12	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	65.146.500,00	0,00	0,00	65.146.500,00
Jumlah		683.041.335.375,94	88.118.038.386,94	33.436.661.760,63	737.722.712.002,25

5.4.1.1.2 PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH

31-12-2024

31-12-2023

Rp53.099.708.805,84

Rp52.692.401.714,15

Pendapatan Retribusi Daerah pada Pemerintah Kota Samarinda dipungut oleh SKPD Pemungut yaitu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Kesehatan, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Perdagangan, Dinas Perhubungan, Dinas Perikanan, Dinas Tenaga Kerja, dan Sekretariat Daerah Kota Samarinda. Pendapatan Retribusi Daerah terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang diberikan oleh Pemerintah Kota Samarinda.

Pendapatan Retribusi Daerah Kota Samarinda pada tahun 2024 terealisasi sebesar Rp53.099.708.805,84 mengalami kenaikan sebesar Rp407.307.091,69 atau 0,77% jika dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp52.692.401.714,15 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4 5 Pendapatan Retribusi Daerah

(dalam satuan Rupiah)

No	Uraian	2024	2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	471.526.500,00	615.740.800,00	(144.214.300,00)	(23,42)
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	31.676.822.000,00	31.314.520.550,00	362.301.450,00	1,16
3	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	2.531.695.963,67	1.735.108.005,33	796.587.958,34	45,91
4	Retribusi Pelayanan Pasar	4.038.239.465,00	5.148.753.201,00	(1.110.513.736,00)	(21,57)
5	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	328.122.500,00	1.809.968.333,33	(1.481.845.833,33)	(81,87)



No	Uraian	2024	2023	Kenaikan/ Penurunan	%
6	Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran	0,00	402.990.000,00	(402.990.000,00)	(100,00)
7	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta	0,00	415.360.110,00	(415.360.110,00)	(100,00)
8	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	161.975.000,00	122.725.000,00	39.250.000,00	31,98
9	Retribusi Pelayanan Tera/tera Ulang	8.445.600,00	1.026.816.000,00	(1.018.370.400,00)	(99,18)
10	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	0,00	747.306.000,00	(747.306.000,00)	(100,00)
11	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.376.979.546,17	3.631.721.305,82	(2.254.741.759,65)	(62,08)
12	Retribusi Tempat Pelelangan	830.196.515,00	514.827.000,00	315.369.515,00	61,26
13	Retribusi Terminal	0,00	2.100.000,00	(2.100.000,00)	(100,00)
14	Retribusi Tempat Khusus Parkir	1.939.595.841,00	1.349.677.814,00	589.918.027,00	43,71
15	Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	11.750.000,00	0,00	11.750.000,00	100,00
16	Retribusi Rumah Potong Hewan	501.980.880,00	225.683.340,00	276.297.540,00	122,43
17	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	1.277.817.000,00	974.544.700,00	303.272.300,00	31,12
18	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	235.290.309,00	271.190.785,00	(35.900.476,00)	(13,24)
19	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	1.317.207.463,00	0,00	1.317.207.463,00	100,00
20	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	0,00	1.950.241.503,00	(1.950.241.503,00)	(100,00)
21	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	640.166.666,67	246.083.333,33	394.083.333,34	160,14
22	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	1.233.333,33	4.958.333,34	(3.725.000,01)	(75,13)
23	Retribusi Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing	0,00	182.085.600,00	(182.085.600,00)	(100,00)



No	Uraian	2024	2023	Kenaikan/ Penurunan	%
24	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	5.271.797.623,00	0,00	5.271.797.623,00	100,00
25	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	478.866.600,00	0,00	478.866.600,00	100,00
Jumlah		53.099.708.805,84	52.692.401.714,15	407.307.091,69	0,77

Tabel Pendapatan Retribusi berdasarkan jenisnya sebagai berikut:

Tabel 5.4 6 Pendapatan Retribusi Daerah per Jenis

(dalam satuan Rupiah)

No	Uraian	2024	2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Retribusi Jasa Umum	39.216.827.028,67	43.339.287.999,66	(4.122.460.970,99)	(9,51)
2	Retribusi Jasa Usaha	7.490.817.554,17	6.969.744.944,82	521.072.609,35	7,48
3	Retribusi Perizinan Tertentu	6.392.064.223,00	2.383.368.769,67	4.008.695.453,33	168,19
Jumlah		53.099.708.805,84	52.692.401.714,15	407.307.091,69	0,77

Adapun Pendapatan Retribusi pada tabel tersebut di atas merupakan pendapatan yang dipungut oleh masing-masing SKPD Pemungut dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4 7 Pendapatan Retribusi Jasa Umum

(dalam satuan Rupiah)

No	Uraian	2024	2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Dinas Kesehatan	366.721.500,00	517.604.800,00	(150.883.300,00)	(29,15)
2	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	104.805.000,00	98.136.000,00	6.669.000,00	6,80
3	Dinas Lingkungan Hidup	31.676.822.000,00	31.314.520.550,00	362.301.450,00	1,16
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	161.975.000,00	1.162.666.110,00	(1.000.691.110,00)	(86,07)
5	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	0,00	525.715.000,00	(525.715.000,00)	(100,00)
6	Dinas Perdagangan	4.046.685.065,00	6.175.569.201,00	(2.128.884.136,00)	(34,47)
7	Dinas Perhubungan	2.859.818.463,67	3.545.076.338,66	(685.257.874,99)	(19,33)
Jumlah		39.216.827.028,67	43.339.287.999,66	(4.122.460.970,99)	(9,51)

Tabel 5.4 8 Pendapatan Retribusi Jasa Usaha

(dalam satuan Rupiah)

No	Uraian	2024	2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kota Samarinda	579.396.847,83	759.323.281,83	(179.926.434,00)	(23,70)
2	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	501.980.880,00	225.683.340,00	276.297.540,00	122,43
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	28.428.000,00	27.384.000,00	1.044.000,00	3,81
4	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	1.045.206.975,67	2.224.089.551,66	(1.178.882.575,99)	(53,01)
5	Dinas Perdagangan	1.712.714.498,00	1.468.384.005,00	244.330.493,00	16,64
6	Dinas Perhubungan	2.708.893.837,67	1.627.803.766,33	1.081.090.071,34	66,41



No	Uraian	2024	2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
7	Dinas Perikanan	830.196.515,00	514.827.000,00	315.369.515,00	61,26
8	Sekretariat Daerah	84.000.000,00	122.250.000,00	(38.250.000,00)	(31,29)
Jumlah		7.490.817.554,17	6.969.744.944,82	521.072.609,35	7,48

Tabel 5.4 9 Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu

(dalam satuan Rupiah)

No	Uraian	2024	2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5.911.964.289,67	2.196.324.836,33	3.715.639.453,34	169,18
2	Dinas Perhubungan	1.233.333,33	4.958.333,34	(3.725.000,01)	(75,13)
3	Dinas Tenaga Kerja	478.866.600,00	182.085.600,00	296.781.000,00	162,99
Jumlah		6.392.064.223,00	2.383.368.769,67	4.008.695.453,33	168,19

Pengakuan Pendapatan Retribusi Daerah dalam LO tahun 2024 ini lebih besar dari saldo Pendapatan Retribusi Daerah dalam LRA tahun 2024 sebesar Rp206.800.418,84 (Rp53.099.708.805,84-Rp52.892.908.387,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Pendapatan Retribusi Daerah dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

**Pendapatan Retribusi Daerah
LRA**

Rp 52.892.908.387,00

Mutasi Tambah:

- a. Jurnal Balik Pendapatan Diterima Dimuka tahun 2023:
 - Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Rp 578.166.666,67
 - Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum pada Dinas Perhubungan Rp 149.781.666,67
 - Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Rp 328.122.500,00
 - Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Rp 84.699.387,50
 - Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Rp 92.916.666,67
 - Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Dinas Perhubungan Rp 6.229.281,67

f.



-	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum pada Dinas Perhubungan	Rp	883.333,33	
	Jumlah Mutasi Tambah			Rp 1.240.799.502,51
	Mutasi Kurang:			
a.	Pembayaran Piutang tahun 2023			
-	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	Rp	256.000.000,00	
-	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Rp	3.470.000,00	
				Rp 259.470.000,00
b.	Penyesuaian Pembayaran Piutang tahun 2024			
-	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Rp	210.000.000,00	
-	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya pada Dinas Perdagangan	Rp	366.262.204,00	
				Rp 576.262.204,00
c.	Penyesuaian Pendapatan Diterima Dimuka tahun 2024			
-	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Rp	174.312.366,67	
-	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	Rp	6.000.000,00	
-	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Dinas Perhubungan	Rp	17.954.513,00	
				Rp 198.266.879,67
	Jumlah Mutasi Kurang			Rp 1.033.999.083,67
	Jumlah Pendapatan Retribusi Daerah			Rp 53.099.708.805,84

f.



Rincian mutasi Pendapatan Retribusi Daerah berdasarkan jenisnya adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4 10 Mutasi Pendapatan Retribusi Daerah

(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	LRA	Mutasi (+)	Mutasi (-)	Saldo
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	471.526.500,00	0,00	0,00	471.526.500,00
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	31.676.822.000,00	0,00	0,00	31.676.822.000,00
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	2.381.914.297,00	149.781.666,67	0,00	2.531.695.963,67
4	Retribusi Pelayanan Pasar	4.038.239.465,00	0,00	0,00	4.038.239.465,00
5	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	0,00	328.122.500,00	0,00	328.122.500,00
6	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	3.470.000,00	0,00	3.470.000,00	0,00
7	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	161.975.000,00	0,00	0,00	161.975.000,00
9	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	8.445.600,00	0,00	0,00	8.445.600,00
10	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	2.223.663.294,00	183.845.335,84	664.266.879,67	1.743.241.750,17
12	Retribusi Tempat Pelelangan	830.196.515,00	0,00	0,00	830.196.515,00
13	Retribusi Terminal	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Retribusi Tempat Khusus Parkir	1.939.595.841,00	0,00	0,00	1.939.595.841,00
15	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesangrahan/Vila	11.750.000,00	0,00	0,00	11.750.000,00
16	Retribusi Rumah Potong Hewan	501.980.880,00	0,00	0,00	501.980.880,00
17	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	1.277.817.000,00	0,00	0,00	1.277.817.000,00
18	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	235.290.309,00	0,00	0,00	235.290.309,00
19	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	1.317.207.463,00	0,00	366.262.204,00	950.945.259,00
20	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	62.000.000,00	578.166.666,67	0,00	640.166.666,67
22	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	350.000,00	883.333,33	0,00	1.233.333,33
23	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	5.271.797.623,00	0,00	0,00	5.271.797.623,00
25	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	478.866.600,00	0,00	0,00	478.866.600,00
Jumlah		52.892.908.387,00	1.240.799.502,51	1.033.999.083,67	53.099.708.805,84



Pendapatan Retribusi Daerah digolongkan menjadi Pendapatan Retribusi Jasa Umum, Pendapatan Retribusi Jasa Usaha dan Pendapatan Retribusi Jasa Usaha Tertentu. Penjelasan mengenai masing-masing jenis adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Retribusi Jasa Umum

Retribusi Jasa Umum yang dipungut oleh Pemerintah kota Samarinda berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 59 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah.

Adapun realisasi Retribusi Jasa Umum tahun 2024 sebesar Rp39.216.827.028,67 mengalami penurunan sebesar Rp4.122.460.970,99 atau 9,51% jika dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp43.339.287.999,66 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4 11 Pendapatan Retribusi Jasa Umum

(dalam satuan Rupiah)

No	Uraian	2024	2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	471.526.500,00	615.740.800,00	(144.214.300,00)	(23,42)
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	31.676.822.000,00	31.314.520.550,00	362.301.450,00	1,16
3	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	2.531.695.963,67	1.735.108.005,33	796.587.958,34	45,91
4	Retribusi Pelayanan Pasar	4.038.239.465,00	5.148.753.201,00	(1.110.513.736,00)	(21,57)
5	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	328.122.500,00	1.809.968.333,33	(1.481.845.833,33)	(81,87)
6	Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran	0,00	402.990.000,00	(402.990.000,00)	(100,00)
7	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta	0,00	415.360.110,00	(415.360.110,00)	(100,00)
8	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	161.975.000,00	122.725.000,00	39.250.000,00	31,98
9	Retribusi Pelayanan Tera/tera Ulang	8.445.600,00	1.026.816.000,00	(1.018.370.400,00)	(99,18)
10	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	0,00	747.306.000,00	(747.306.000,00)	(100,00)
Jumlah		39.216.827.028,67	43.339.287.999,66	(4.122.460.970,99)	(9,51)

Pengakuan Pendapatan Retribusi Jasa Umum dalam LO tahun 2024 ini lebih besar dari saldo Pendapatan Retribusi Jasa Umum dalam LRA tahun 2024 sebesar Rp474.434.166,67 (Rp39.216.827.028,67-Rp38.742.392.862,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Pendapatan Retribusi Jasa Umum dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

f.



a. Retribusi Pelayanan Kesehatan		
Pendapatan-LRA	Rp	471.526.500,00
Jumlah	Rp	471.526.500,00
b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan		
Pendapatan-LRA	Rp	31.676.822.000,00
Jumlah	Rp	31.676.822.000,00
c. Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum		
Pendapatan-LRA	Rp	2.381.914.297,00
+ Saldo Awal Pendapatan Dibayar Dimuka tahun 2023	Rp	37.666.666,67
+ Piutang Retribusi parkir tepi jalan umum	Rp	112.115.000,00
Jumlah	Rp	2.531.695.963,67
d. Retribusi Pelayanan Pasar		
Pendapatan-LRA	Rp	4.038.239.465,00
Jumlah	Rp	4.038.239.465,00
e. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor		
Pendapatan-LRA	Rp	0,00
+ Saldo Awal Pendapatan Dibayar Dimuka tahun 2023	Rp	328.122.500,00
Jumlah	Rp	328.122.500,00
f. Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran		
Pendapatan-LRA	Rp	3.470.000,00
- Pembayaran Piutang tahun 2023	Rp	3.470.000,00
Jumlah	Rp	0,00
g. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus		
Pendapatan-LRA	Rp	161.975.000,00
Jumlah	Rp	161.975.000,00
h. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang		
Pendapatan-LRA	Rp	8.445.600,00
Jumlah	Rp	8.445.600,00
Jumlah Retribusi Jasa Umum	Rp	39.216.827.028,67

2. Pendapatan Retribusi Jasa Usaha

Pemerintah Kota Samarinda memungut Retribusi Jasa Usaha berdasarkan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Wali Kota Nomor 59 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah.

Realisasi Retribusi Jasa Usaha tahun 2024 sebesar Rp7.490.817.554,17 mengalami kenaikan sebesar Rp521.072.609,35 atau 7,48% jika dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp6.969.744.944,82 dengan rincian sebagai berikut:

f.



Tabel 5.4 12 Pendapatan Retribusi Jasa Usaha

(dalam satuan Rupiah)

No	Uraian	2024	2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.743.241.750,17	3.631.721.305,82	(1.888.479.555,65)	(52,00)
2	Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan	830.196.515,00	514.827.000,00	315.369.515,00	61,26
3	Retribusi Terminal	0,00	2.100.000,00	(2.100.000,00)	(100,00)
4	Retribusi Tempat Khusus Parkir	1.939.595.841,00	1.349.677.814,00	589.918.027,00	43,71
5	Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	11.750.000,00	0,00	11.750.000,00	100,00
6	Retribusi Rumah Potong Hewan	501.980.880,00	225.683.340,00	276.297.540,00	122,43
7	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	1.277.817.000,00	974.544.700,00	303.272.300,00	31,12
8	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	235.290.309,00	271.190.785,00	(35.900.476,00)	(13,24)
9	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	950.945.259,00	0,00	950.945.259,00	100,00
Jumlah		7.490.817.554,17	6.969.744.944,82	521.072.609,35	7,48

Pengakuan Pendapatan Retribusi Jasa Usaha dalam LO tahun 2024 ini lebih kecil dari saldo Pendapatan Retribusi Jasa Umum dalam LRA tahun 2024 sebesar Rp846.683.747,83 (Rp7.490.817.554,17-Rp8.337.501.302,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Pendapatan Retribusi Jasa Usaha dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Pendapatan-LRA	Rp	2.223.663.294,00
+ Saldo Awal Pendapatan DDM tahun 2023	Rp	183.845.335,84
- Pembayaran piutang tahun 2023	Rp	256.000.000,00
- Pendapatan DDM tahun 2024	Rp	198.266.879,67
- Penyisihan pembayaran piutang tahun 2024	Rp	210.000.000,00
Jumlah	Rp	1.743.241.750,17

b. Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan

Pendapatan-LRA	Rp	830.196.515,00
Jumlah	Rp	830.196.515,00

c. Retribusi Tempat Khusus Parkir

Pendapatan-LRA	Rp	1.939.595.841,00
Jumlah	Rp	1.939.595.841,00

d. Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila

Pendapatan-LRA	Rp	11.750.000,00



	Jumlah	Rp	11.750.000,00
e.	Retribusi Rumah Potong Hewan		
	Pendapatan-LRA	Rp	501.980.880,00
	Jumlah	Rp	501.980.880,00
f.	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan		
	Pendapatan-LRA	Rp	1.277.817.000,00
	Jumlah	Rp	1.277.817.000,00
g.	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga		
	Pendapatan-LRA	Rp	235.290.309,00
	Jumlah	Rp	235.290.309,00
h.	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya		
	Pendapatan-LRA	Rp	1.317.207.463,00
-	Penyisihan pembayaran piutang tahun 2024	Rp	366.262.204,00
	Jumlah	Rp	950.945.259,00
	Jumlah Retribusi Jasa Usaha	Rp	7.490.817.554,17

3. Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu

Pemerintah Kota Samarinda memungut Retribusi Perizinan Tertentu berdasarkan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Wali Kota Nomor 59 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah.

Realisasi Retribusi Perizinan Tertentu tahun 2024 sebesar Rp6.392.064.223,00 mengalami kenaikan sebesar Rp4.008.695.453,33 atau 168,19% jika dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp2.383.368.769,67 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4 13 Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu

(dalam satuan Rupiah)

No	Uraian	2024	2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	0,00	1.950.241.503,00	(1.950.241.503,00)	(100,00)
2	Retribusi Pemberian Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	640.166.666,67	246.083.333,33	394.083.333,34	160,14
3	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	1.233.333,33	4.958.333,34	(3.725.000,01)	(75,13)
4	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	0,00	182.085.600,00	(182.085.600,00)	(100,00)
5	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	5.271.797.623,00	0,00	5.271.797.623,00	100,00
6	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	478.866.600,00	0,00	478.866.600,00	100,00
	Jumlah	6.392.064.223,00	2.383.368.769,67	4.008.695.453,33	168,19



Pengakuan Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu dalam LO tahun 2024 ini lebih besar dari saldo Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu dalam LRA tahun 2024 sebesar Rp579.050.000,00 (Rp6.392.064.223,00-Rp5.813.014.223,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

a. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol

Pendapatan-LRA	Rp	62.000.000,00
+ Pendapatan Diterima Dimuka tahun 2024	Rp	578.166.666,67
Jumlah	Rp	640.166.666,67

b. Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum

Pendapatan-LRA	Rp	350.000,00
+ Saldo Awal Pendapatan Diterima Dimuka tahun 2023	Rp	883.333,33
Jumlah	Rp	1.233.333,33

c. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung

Pendapatan-LRA	Rp	5.271.797.623,00
Jumlah	Rp	5.271.797.623,00

d. Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)

Pendapatan-LRA	Rp	478.866.600,00
Jumlah	Rp	478.866.600,00

Jumlah Retribusi Perizinan Tertentu	Rp	6.392.064.223,00

5.4.1.1.3 PENDAPATAN HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN

31-12-2024

31-12-2023

Rp103.882.807.564,03

Rp87.235.027.953,25

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah Pendapatan Asli Daerah dari Pembagian Laba dan Deviden atas Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Samarinda pada Badan Usaha Milik Daerah. Pendapatan ini dipungut dan dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda dengan Realisasi pada tahun 2024 sebesar Rp103.882.807.564,03 mengalami kenaikan sebesar Rp16.647.779.610,78 atau 19,08% jika dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp87.235.027.953,25 dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 5.4 14 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

(dalam satuan Rupiah)

No	Uraian	2024	2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Laba Perumda Varia Niaga Samarinda	10.916.791.408,00	0,00	10.916.791.408,00	100,00
2	Dividen Bank Kaltimarta	3.197.750.628,03	2.538.461.845,25	659.288.782,78	25,97
3	Laba Dan Dividen Perumdam Tirta Kencana Kota Samarinda	89.768.265.528,00	84.696.566.108,00	5.071.699.420,00	5,99
Jumlah		103.882.807.564,03	87.235.027.953,25	16.647.779.610,78	19,08

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan per SKPD adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4 15 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan per SKPD

(dalam satuan Rupiah)

No	Uraian	2024	2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	81.800.789.090,00	73.897.071.385,00	7.903.717.705,00	10,70
2	Badan Pendapatan Daerah	22.082.018.474,03	13.337.956.568,25	8.744.061.905,78	65,56
Jumlah		103.882.807.564,03	87.235.027.953,25	16.647.779.610,78	19,08

Pengakuan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dalam LO tahun 2024 ini lebih besar dari saldo Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dalam LRA tahun 2024 sebesar Rp81.800.789.090,00 (Rp103.882.807.564,03-Rp22.082.018.474,03). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.4 1 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan LRA

Rp 22.082.018.474,03

Mutasi Tambah:

- a. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD Perumda (Aneka Usaha)-Varia Niaga Rp 21.592.425.368,03
- b. Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD Perundam Tirta Kencana Rp 71.381.253.487,00

Jumlah Mutasi Tambah

Rp 92.973.678.855,03



Mutasi Kurang:

- Laba Tahun 2023 Varia Niaga berdasarkan audited KAP 2024 - Bagian Laba yang
- Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD Perumda (Aneka Usaha)-Varia Niaga
 Laba atas penyertaan modal Perumdam Tirta Kencana berdasarkan Audied KAP TA 2024 -
 - Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD Perundam Tirta Kencana

Jumlah Mutasi Kurang Rp 11.172.889.765,03

Jumlah Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Rp 103.882.807.564,03

Tabel 5.4 16 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

(dalam satuan Rupiah)

No	Uraian	LRA	Mutasi (+)	Mutasi (-)	Saldo
1	Laba Perumda Varia Niaga Samarinda	410.000.000,00	21.592.425.368,03	11.085.633.960,03	10.916.791.408,00
2	Dividen Bank Kaltimara	3.197.750.628,03	0,00	0,00	3.197.750.628,03
3	Laba Dan Dividen Perumdam Tirta Kencana Kota Samarinda	18.474.267.846,00	71.381.253.487,00	87.255.805,00	89.768.265.528,00
	Jumlah	22.082.018.474,03	92.973.678.855,03	11.172.889.765,03	103.882.807.564,03

5.4.1.1.4 LAIN-LAIN PAD YANG SAH

31-12-2024

31-12-2023

Rp220.630.435.834,24

Rp179.703.529.439,34

Pendapatan tersebut merupakan Pendapatan Asli Daerah di luar Pendapatan Pajak, Pendapatan Retribusi dan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, yang direalisasikan untuk periode tahun 2024 sebesar Rp220.630.435.834,24 mengalami kenaikan sebesar Rp40.926.906.394,90 atau 22,77% jika dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp179.703.529.439,34 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4 17 Lain-lain PAD yang Sah

(dalam satuan Rupiah)

No	Uraian	2024	2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	1.793.196.000,00	494.508.200,00	1.298.687.800,00	262,62
2	Hasil Pemanfaatan BMD yang tidak terpisahkan	0,00	125.000.000,00	(125.000.000,00)	(100,00)
3	Hasil Kerjasama Daerah	25.021.585.187,00	21.540.297.027,24	3.481.288.159,76	16,16



No	Uraian	2024	2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
4	Jasa Giro	10.643.835.354,44	21.816.026.280,59	(11.172.190.926,15)	(51,21)
5	Pendapatan Bunga	41.125.100.075,27	14.312.406.345,38	26.812.693.729,89	187,34
6	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	6.962.341.288,86	10.447.776.807,56	(3.485.435.518,70)	(33,36)
7	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	481.762.693,50	989.028.991,52	(507.266.298,02)	(51,29)
8	Pendapatan Denda Pajak Daerah	10.454.636.355,57	3.693.893.723,01	6.760.742.632,56	183,02
9	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	64.816.671,75	631.793.520,00	(566.976.848,25)	(89,74)
10	Pendapatan Dari Pengembalian	356.569.275,40	464.471.923,19	(107.902.647,79)	(23,23)
11	Pendapatan BLUD	116.568.322.966,45	94.519.382.976,85	22.048.939.989,60	23,33
12	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	7.125.419.966,00	10.655.693.644,00	(3.530.273.678,00)	(33,13)
13	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	32.850.000,00	13.250.000,00	19.600.000,00	147,92
Jumlah		220.630.435.834,24	179.703.529.439,34	40.926.906.394,90	22,77

Lain-lain PAD yang sah per SKPD adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4 18 Lain-lain PAD yang sah Lainnya per SKPD

(dalam satuan Rupiah)

No	Uraian	2024	2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Badan Pendapatan Daerah	96.308.162.273,04	52.096.296.798,85	44.211.865.474,19	84,87
2	Badan pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	0,00	21.684.889.296,06	(21.684.889.296,06)	(100,00)
3	Dinas kesehatan	123.732.866.632,45	105.192.363.720,85	18.540.502.911,60	17,63
4	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	6.072,00	0,00	6.072,00	100,00
5	Dinas Lingkungan Hidup	7.700.000,00	0,00	7.700.000,00	100,00
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	7.049.120,00	(7.049.120,00)	(100,00)
7.	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	237.069.309,00	0,00	237.069.309,00	100,00
8	Dinas pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	0,00	49.170.900,00	(49.170.900,00)	(100,00)
9	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	(3.900.000,00)	(10.651.324,00)	6.751.324,00	(63,38)
10	Dinas Perdagangan	323.291.499,75	94.179.480,58	229.112.019,17	243,27
11	Dinas Perhubungan	25.240.048,00	590.231.447,00	(564.991.399,00)	(95,72)
Jumlah		220.630.435.834,24	179.703.529.439,34	40.926.906.394,90	22,77

f.



Pengakuan Lain-lain PAD yang Sah dalam LO tahun 2024 ini lebih besar dari saldo Lain-lain PAD yang Sah dalam LRA tahun 2024 sebesar Rp5.415.085.303,00 (Rp220.630.435.834,24-Rp215.215.350.531,24). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Lain-lain PAD yang sah dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Lain-lain PAD yang Sah-LRA

Rp 215.215.350.531,24

Mutasi Tambah:

- a. Penambahan Piutang Lain-lain dari Jasa Layanan BLUD IA. Moeis tahun 2024 pada Dinas Kesehatan
Rp 5.818.059.064,00
- b. Pendapatan Hasil Kerja Sama Daerah atas terminal Peti Kemas Palaran pada Badan Pendapatan Daerah
Rp 1.199.299.793,00
- c. Pendapatan Hasil kerja sama Daerah atas pengelolaan pasar Segiri dengan PT Yudha Putra Kaltim tahun 2025 pada Dinas Perdagangan
Rp 125.000.000,00
- d. Penambahan Piutang Hasil Kerja Sama Daerah atas PT.SAMACO pada Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata
Rp 237.069.309,00

Jumlah Mutasi Tambah

Rp 7.379.428.166,00

Mutasi Kurang:

- a. Piutang Lain-lain PAD yang Sah tahun 2024:
 - Pembayaran Piutang atas Hasil Kerja Sama Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Rp 1.155.935.767,00
 - Pendapatan atas Denda Retribusi Daerah atas Pasar Grosir dan/atau Pertokoan-Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan pada Dinas Perdagangan
Rp 32.388.554,25
 - Piutang atas Pendapatan BLUD IA.Moeis tahun 2024 pada Dinas Kesehatan
Rp 578.305.102,00

Rp 1.766.629.423,25

- b. Penyesuaian Piutang Lainnya

f.



- Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan BL TPA dan Reklas dari TP Ke BL TPA tahun 2024 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Rp 16.911.440,00

- Mahakam Lampion Garden tahun 2024 atas Hasil Kerja Sama Daerah pada Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Rp 177.801.999,75

- Dana Pensiun (PT. TASPEN) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Rp 3.000.000,00

Rp 197.713.439,75

Jumlah Mutasi Kurang Rp 1.964.342.863,00

Jumlah Lain-lain PAD yang Sah Rp 220.630.435.834,24

Tabel 5.4 19 Mutasi Lain-lain PAD yang Sah

(dalam satuan Rupiah)

No	Uraian	LRA	Mutasi (+)	Mutasi (-)	Saldo
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	1.810.107.440,00	0,00	16.911.440,00	1.793.196.000,00
2	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Hasil Kerja Sama Daerah	24.793.953.851,75	1.561.369.102,00	1.333.737.766,75	25.021.585.187,00
4	Jasa Giro	10.643.835.354,44	0,00	0,00	10.643.835.354,44
5	Pendapatan Bunga	41.125.100.075,27	0,00	0,00	41.125.100.075,27
6	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	6.965.341.288,86	0,00	3.000.000,00	6.962.341.288,86
7	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	481.762.693,50	0,00	0,00	481.762.693,50
8	Pendapatan Denda Pajak Daerah	10.454.636.355,57	0,00	0,00	10.454.636.355,57
9	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	97.205.226,00	0,00	32.388.554,25	64.816.671,75
10	Pendapatan dari Pengembalian	356.569.275,40	0,00	0,00	356.569.275,40
11	Pendapatan dari BLUD	111.328.569.004,45	5.818.059.064,00	578.305.102,00	116.568.322.966,45
12	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	7.125.419.966,00	0,00	0,00	7.125.419.966,00
13	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	32.850.000,00	0,00	0,00	32.850.000,00
	Jumlah	215.215.350.531,24	7.379.428.166,00	1.964.342.863,00	220.630.435.834,24



5.4.1.2 PENDAPATAN TRANSFER

31-12-2024

31-12-2023

Rp3.656.652.754.326,00

Rp3.518.692.563.120,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Kota Samarinda adalah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang bersumber dari Dana Perimbangan, Transfer Pemerintah Pusat Lainnya berupa Dana Insentif Fiskal dan Transfer Pemerintah Provinsi yang bersumber dari Pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan Provinsi, untuk periode 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 terealisasi sebesar Rp3.656.652.754.326,00 mengalami kenaikan sebesar Rp137.960.191.206,00 atau 3,92% jika dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp3.518.692.563.120,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4 20 Pendapatan Transfer

(dalam satuan Rupiah)

No	Uraian	2024	2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	2.393.475.501.765,00	2.566.617.050.376,00	(173.141.548.611,00)	(6,75)
2	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	20.758.998.000,00	16.333.666.000,00	4.425.332.000,00	27,09
3	Transfer Pemerintah Provinsi	1.242.418.254.561,00	935.741.846.744,00	306.676.407.817,00	32,77
Jumlah		3.656.652.754.326,00	3.518.692.563.120,00	137.960.191.206,00	3,92

5.4.1.2.1 TRANSFER PEMERINTAH PUSAT – DANA PERIMBANGAN

31-12-2024

31-12-2023

Rp2.393.475.501.765,00

Rp2.566.617.050.376,00

Realisasi Transfer Pemerintah Pusat–Dana Perimbangan Pemerintah Kota Samarinda untuk periode 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp2.393.475.501.765,00 mengalami penurunan sebesar Rp173.141.548.611,00 atau 6,75% jika dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp2.566.617.050.376,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4 21 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan

(dalam satuan Rupiah)

No	Uraian	2024	2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Dana Bagi Hasil Pajak	127.021.766.000	123.295.974.715,00	3.725.791.285,00	3,02
2	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	1.138.822.617.000,00	1.435.834.321.200,00	(297.011.704.200,00)	(20,69)
3	Dana Alokasi Umum	841.775.200.055,00	677.722.969.133,00	164.052.230.922,00	24,21
4	Dana Alokasi Khusus	285.855.918.710,00	329.763.785.328,00	(43.907.866.618,00)	(13,31)
Jumlah		2.393.475.501.765,00	2.566.617.050.376,00	(173.141.548.611,00)	(6,75)



Pengakuan Transfer Pemerintah Pusat-Dana perimbangan dalam LO tahun 2024 ini lebih kecil dari saldo Transfer Pemerintah Pusat – Dana perimbangan dalam LRA tahun 2024 sebesar Rp578.372.789.000,00 (Rp2.393.475.501.765,00-Rp2.971.848.290.765,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Transfer Pemerintah Pusat-Dana perimbangan dalam LO. Terdapat pembayaran Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan ditetapkan dalam KMK 41/KM.7/2023 tentang adanya penghentian Penyaluran DBH Cukai Hasil Tembakau TA 2024 yang lebih rinci dijelaskan sebagai berikut:

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat- Dana Perimbangan LRA

Rp 2.971.848.290.765,00

Mutasi Tambah:

- a. Pencatatan kurang salur dan penyaluran tambahan alokasi DBH tahun 2024 melalui mekanisme TDF
- Rp 134.664.022.000,00

Jumlah Mutasi Tambah

Rp 134.664.022.000,00

Mutasi Kurang:

- a. Pembayaran Piutang CHT tahun 2023
- Rp 220.000,00
- b. Penerimaan tahun 2024 atas kurang salur dan penyaluran tambahan alokasi Dana Bagi Hasil Pajak tahun 2023 melalui mekanisme TDF
- Rp 17.100.446.000,00
- c. Penerimaan tahun 2024 atas kurang salur dan penyaluran tambahan alokasi Dana Bagi Hasil SDA tahun 2023 melalui mekanisme TDF
- Rp 695.936.145.000,00

Jumlah Mutasi Kurang

Rp 713.036.811.000,00

Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan

Rp 2.393.475.501.765,00

Rincian mutasi Transfer Pemerintah Pusat–Dana Perimbangan adalah sebagai berikut:

f.



Tabel 5.4 22 Mutasi Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan

(dalam satuan Rupiah)

No	Uraian	LRA	Mutasi (+)	Mutasi (-)	Saldo
1	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Pajak (DBH)	144.122.432.000,00	0,00	17.100.666.000,00	127.021.766.000,00
2	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil SDA (DBH)	1.700.094.740.000,00	134.664.022.000,00	695.936.145.000,00	1.138.822.617.000,00
3	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	841.775.200.055,00	0,00	0,00	841.775.200.055,00
4	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	19.158.878.212,00	0,00	0,00	19.158.878.212,00
5	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	266.697.040.498,00	0,00	0,00	266.697.040.498,00
	Jumlah	2.971.848.290.765,00	134.664.022.000,00	713.036.811.000,00	2.393.475.501.765,00

5.4.1.2.1.1 DANA BAGI HASIL PAJAK

31-12-2024

31-12-2023

Rp127.021.766.000,00

Rp123.295.974.715,00

Dana Bagi Hasil Pajak merupakan Dana Bagi Hasil Pajak Pemerintah Pusat yaitu Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB), Pajak Penghasilan pasal 21 (DBH PPh Pasal 21), Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 (DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29), serta Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) untuk periode 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 terealisasi sebesar Rp127.021.766.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp3.725.791.285,00 atau 3,02% jika dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp123.295.974.715,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4 23 Dana bagi Hasil Pajak

(dalam satuan Rupiah)

No	Uraian	2024	2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	DBH PBB	54.219.127.999,00	112.261.407.575,00	(58.042.279.576,00)	(51,70)
2	DBH PPh Pasal 21	69.314.631.000,00	10.853.379.000,00	58.461.252.000,00	538,65
3	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29	3.488.007.001,00	180.451.000,00	3.307.556.001,00	1.832,94
4	DBH CHT	0,00	737.140,00	(737.140,00)	(100,00)
	Jumlah	127.021.766.000,00	123.295.974.715,00	3.725.791.285,00	3,02

Pendapatan tersebut merupakan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Bagi Hasil Pajak LRA sebesar Rp144.122.432.000,00 dikurang pembayaran piutang Cukai Hasil Tembakau sebesar Rp220.000,00 dan penerimaan di tahun 2024 atas kurang salur dan penyaluran tambahan alokasi DBH tahun 2023 melalui mekanisme TDF sebesar Rp17.100.446.000,00. Rincian Dana Bagi Hasil tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 5.4 24 Mutasi Dana Bagi Hasil Pajak

(dalam satuan Rupiah)

No	Uraian	LRA	Mutasi (+)	Mutasi (-)	Saldo
1	DBH PBB	71.319.573.999,00	0,00	17.100.446.000,00	54.219.127.999,00
2	DBH PPh Pasal 21	69.314.631.000,00	0,00	0,00	69.314.631.000,00
3	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	3.488.007.001,00	0,00	0,00	3.488.007.001,00
4	DBH CHT	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00
Jumlah		144.122.432.000,00	0,00	17.100.666.000,00	127.021.766.000,00

5.4.1.2.1.2 DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM

31-12-2024

31-12-2023

Rp1.138.822.617.000,00

Rp1.435.834.321.200,00

Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam merupakan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam dari Pemerintah Pusat yaitu Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak Bumi (DBH SDA Minyak Bumi), Sumber Daya Alam Gas Bumi (DBH SDA Gas Bumi), Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara (DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent), Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara (DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty), Sumber Daya Alam Kehutanan (DBH SDA Kehutanan-PSDH), Sumber Daya Alam Kehutanan (DBH SDA Kehutanan-IIUPH), Sumber Daya Alam Perikanan (DBH SDA Perikanan), dan DBH Sawit untuk periode 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 terealisasi sebesar Rp1.138.822.617.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp297.011.704.200,00 atau 20,69% jika dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp1.435.834.321.200,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4 25 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

(dalam satuan Rupiah)

No	Uraian	2024	2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	DBH SDA Minyak Bumi	154.331.471.001,00	36.671.137.000,00	117.660.334.001,00	320,85
2	DBH SDA Gas Bumi	48.241.959.000,00	62.416.048.150,00	(14.174.089.150,00)	(22,71)
3	DBH SDA Mineral dan Batubara - Landrent	1.070.924.999,00	874.397.000,00	196.527.999,00	22,48
4	DBH SDA Mineral dan Batubara - Royalty	921.379.350.000,00	1.332.313.514.000,00	(410.934.164.000,00)	(30,84)
5	DBH SDA Kehutanan-PSDH	2.244.604.000,00	2.325.380.850,00	(80.776.850,00)	(3,47)
6	DBH SDA Kehutanan-IIUPH	0,00	109.200,00	(109.200,00)	(100,00)
7	DBH SDA Perikanan	1.074.331.000,00	1.233.735.000,00	(159.404.000,00)	(12,92)
8	DBH Sawit	10.479.977.000,00	0,00	10.479.977.000,00	100,00
Jumlah		1.138.822.617.000,00	1.435.834.321.200,00	(297.011.704.200,00)	(20,69)



Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam dalam LO tahun 2024 ini lebih kecil dari saldo Transfer Pemerintah Pusat – Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam LRA tahun 2024 sebesar Rp561.272.123.000,00 (Rp1.138.822.617.000,00-Rp1.700.094.740.000,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam dalam LO, yang dirincikan sebagai berikut:

Tabel 5.4 26 Mutasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

(dalam satuan Rupiah)

No	Uraian	LRA	Mutasi (+)	Mutasi (-)	Saldo
1	DBH SDA Minyak Bumi	19.667.449.001,00	134.664.022.000,00	0,00	154.331.471.001,00
2	DBH SDA Gas Bumi	48.241.959.000,00	0,00	0,00	48.241.959.000,00
3	DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent	1.070.924.999,00	0,00	0,00	1.070.924.999,00
4	DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty	1.617.315.495.000,00	0,00	695.936.145.000,00	921.379.350.000,00
5	DBH SDA Kehutanan-PSDH	2.244.604.000,00	0,00	0,00	2.244.604.000,00
6	DBH SDA Kehutanan-IIUPH	0,00	0,00	0,00	0,00
7	DBH SDA Perikanan	1.074.331.000,00	0,00	0,00	1.074.331.000,00
8	DBH Sawit	10.479.977.000,00	0,00	0,00	10.479.977.000,00
Jumlah		1.700.094.740.000,00	134.664.022.000,00	695.936.145.000,00	1.138.822.617.000,00

5.4.1.2.1.3 DANA ALOKASI UMUM

31-12-2024

31-12-2023

Rp841.775.200.055,00

Rp677.722.969.133,00

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan Transfer Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kota Samarinda yang terdiri dari Dana Alokasi Umum yang tidak ditentukan penggunaannya dan Dana Alokasi Umum yang ditentukan penggunaannya. Periode 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 terealisasi sebesar Rp841.775.200.055,00 mengalami kenaikan sebesar Rp164.052.230.922,00 atau 24,21% jika dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp677.722.969.133,00, dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 5.4 27 Dana Alokasi Umum

(dalam satuan Rupiah)

No	Uraian	2024	2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Dana Alokasi Umum (DAU)	841.775.200.055,00	677.722.969.133,00	164.052.230.922,00	24,21
Jumlah		841.775.200.055,00	677.722.969.133,00	164.052.230.922,00	24,21

Pendapatan Dana Alokasi Umum - LO sama nominalnya dengan Pendapatan Dana Alokasi Umum - LRA yaitu sebesar Rp841.775.200.055,00.

Tabel 5.4 28 Mutasi Dana Alokasi Umum

(dalam satuan Rupiah)

No	Uraian	LRA	Mutasi (+)	Mutasi (-)	Saldo
1	Dana Alokasi Umum (DAU)	841.775.200.055,00	0,00	0,00	841.775.200.055,00
Jumlah		841.775.200.055,00	0,00	0,00	841.775.200.055,00

5.4.1.2.1.4 DANA ALOKASI KHUSUS

31-12-2024

31-12-2023

Rp285.855.918.710,00

Rp329.763.785.328,00

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan Transfer Pemerintah Pusat berupa Dana Alokasi Khusus untuk membantu mendanai kegiatan khusus berupa kegiatan fisik (DAK Fisik) dan non fisik (DAK Non Fisik) kepada Pemerintah Kota Samarinda, untuk periode 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 terealisasi sebesar Rp285.855.918.710,00 mengalami penurunan sebesar Rp43.907.866.618,00 atau 13,31% jika dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp329.763.785.328,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4 29 Dana Alokasi Khusus

(dalam satuan Rupiah)

No	Uraian	2024	2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	319.931.712,00	4.978.050.374,00	(4.658.118.662,00)	(93,57)
2	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	3.155.865.000,00	1.706.922.900,00	1.448.942.100,00	84,89
3	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	7.647.389.000,00	3.241.272.200,00	4.406.116.800,00	135,94
4	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	0,00	474.576.751,00	(474.576.751,00)	(100,00)
5	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB	0,00	740.930.000,00	(740.930.000,00)	(100,00)
6	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting	103.000.000,00	0,00	103.000.000,00	100,00



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
CATATAN UNTUK LAPORAN KEUANGAN
 UNTUK YANG TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2024



No	Uraian	2024	2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
7	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Reguler-Penyediaan Rumah Swadaya	0,00	2.950.702.300,00	(2.950.702.300,00)	(100,00)
8	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	0,00	544.399.000,00	(544.399.000,00)	(100,00)
9	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	0,00	837.900.000,00	(837.900.000,00)	(100,00)
10	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Keluarga Berencana	111.866.000,00	2.915.553.500,00	(2.803.687.500,00)	(96,16)
11	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengendalian Penyakit	0,00	957.376.620,00	(957.376.620,00)	(100,00)
12	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	7.820.826.500,00	1.843.228.690,00	5.977.597.810,00	324,30
13	DAK Fisik-Bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah-Penugasan	0,00	0,00	0,00	100,00
14	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesenjangan	0,00	6.087.193.800,00	(6.087.193.800,00)	(100,00)
15	DAK Non Fisik-BOS Reguler	114.621.078.783,00	125.413.839.564,00	(10.792.760.781,00)	(8,61)
16	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	3.105.000.000,00	0,00	3.105.000.000,00	100,00
17	DAK Non Fisik-TPG PNSD	100.122.748.084,00	103.749.938.355,00	(3.627.190.271,00)	(3,50)
18	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	2.676.282.000,00	1.585.750.304,00	1.090.531.696,00	68,77
19	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	0,00	70.540.605.070,00	(70.540.605.070,00)	(100,00)
20	DAK Non Fisik-PK2UKM	0,00	348.625.900,00	(348.625.900,00)	(100,00)
21	DAK Non Fisik-Fasilitas Penanaman Modal	132.836.000,00	294.820.000,00	(161.984.000,00)	(54,94)
22	DAK Non Fisik-BOKB-KB	5.585.814.748,00	0,00	5.585.814.748,00	100,00
23	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	406.000.000,00	0,00	406.000.000,00	100,00
24	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	0,00	552.100.000,00	(552.100.000,00)	(100,00)
25	Dak non fisik -OK2UMK	385.331.100,00	0,00	385.331.100,00	100,00
26	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler	7.116.169.066,00	0,00	7.116.169.066,00	100,00
27	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja-LO	360.000.000,00	0,00	360.000.000,00	100,00

f.



No	Uraian	2024	2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
28	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesenjangan Reguler-LO	5.932.200.000,00	0,00	5.932.200.000,00	100,00
29	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesenjangan Kinerja-LO	180.000.000,00	0,00	180.000.000,00	100,00
30	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota-LO	7.468.784.072,00	0,00	7.468.784.072,00	100,00
31	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas-LO	18.604.796.645,00	0,00	18.604.796.645,00	100,00
Jumlah		285.855.918.710,00	329.763.785.328,00	(43.907.866.618,00)	(13,31)

Realisasi Pendapatan Dana Alokasi Khusus - LO sama nominalnya dengan realisasi Pendapatan Dana Alokasi Khusus - LRA yaitu sebesar Rp285.855.918.710,00.

Tabel 5.4 30 Mutasi Dana Alokasi Khusus

(dalam satuan Rupiah)

No	Uraian	LRA	Mutasi (+)	Mutasi (-)	Saldo
1	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler- PAUD	319.931.712,00	0,00	0,00	319.931.712,00
2	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	3.155.865.000,00	0,00	0,00	3.155.865.000,00
3	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler- SMP	7.647.389.000,00	0,00	0,00	7.647.389.000,00
4	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler- Perpustakaan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
5	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan-Penurunan AKI dan AKB	0,00	0,00	0,00	0,00
6	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting	103.000.000,00	0,00	0,00	103.000.000,00
7	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Reguler- Penyediaan Rumah Swadaya	0,00	0,00	0,00	0,00
8	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	0,00	0,00	0,00	0,00
9	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	0,00	0,00	0,00	0,00
10	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan-Keluarga Berencana	111.866.000,00	0,00	0,00	111.866.000,00
11	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-Pengendalian Penyakit	0,00	0,00	0,00	0,00
12	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	7.820.826.500,00	0,00	0,00	7.820.826.500,00

f.



No	Uraian	LRA	Mutasi (+)	Mutasi (-)	Saldo
13	DAK Fisik-Bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah-Penugasan	0,00	0,00	0,00	0,00
14	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesenjangan	0,00	0,00	0,00	0,00
15	DAK Non Fisik-BOS Reguler	114.621.078.783,00	0,00	0,00	114.621.078.783,00
16	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	3.105.000.000,00	0,00	0,00	3.105.000.000,00
17	DAK Non Fisik-TPG PNSD	100.122.748.084,00	0,00	0,00	100.122.748.084,00
18	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	2.676.282.000,00	0,00	0,00	2.676.282.000,00
19	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	0,00	0,00	0,00	0,00
20	DAK Non Fisik-PK2UKM	0,00	0,00	0,00	0,00
21	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	132.836.000,00	0,00	0,00	132.836.000,00
22	DAK Non Fisik-BOKB-KB	5.585.814.748,00	0,00	0,00	5.585.814.748,00
23	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	406.000.000,00	0,00	0,00	406.000.000,00
24	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Dak non fisik -OK2UMK	385.331.100,00	0,00	0,00	385.331.100,00
26	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler	7.116.169.066,00	0,00	0,00	7.116.169.066,00
27	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja-LO	360.000.000,00	0,00	0,00	360.000.000,00
28	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesenjangan Reguler-LO	5.932.200.000,00	0,00	0,00	5.932.200.000,00
29	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesenjangan Kinerja-LO	180.000.000,00	0,00	0,00	180.000.000,00
30	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota-LO	7.468.784.072,00	0,00	0,00	7.468.784.072,00
31	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas-LO	18.604.796.645,00	0,00	0,00	18.604.796.645,00
Jumlah		285.855.918.710,00	0,00	0,00	285.855.918.710,00

5.4.1.2.2 TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA

31-12-2024

31-12-2023

Rp20.758.998.000,00

Rp16.333.666.000,00

Transfer Pemerintah Pusat Lainnya Pemerintah Kota Samarinda berupa Insentif Fiskal untuk periode 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 terealisasi sebesar Rp20.758.998.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp4.425.332.000,00 atau

f.



27,09% jika dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp16.333.666.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4 31 Transfer Pemerintah Pusat Lainnya

(dalam satuan Rupiah)

No	Uraian	2024	2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Dana Insentif Daerah	0,00	16.333.666.000,00	(16.333.666.000,00)	(100,00)
2	Insentif Fiskal	20.758.998.000,00	0,00	20.758.998.000,00	100,00
	Jumlah	20.758.998.000,00	16.333.666.000,00	4.425.332.000,00	27,09

5.4.1.2.2.1 DANA INSENTIF DAERAH

31-12-2024

31-12-2023

Rp0,00

Rp16.333.666.000,00

Dana Insentif Daerah (DID) merupakan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya berdasarkan kriteria atau kategori tertentu dengan tujuan memberikan penghargaan atas perbaikan dan pencapaian kinerja, untuk periode 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 terealisasi sebesar Rp0,00 mengalami penurunan sebesar Rp16.333.666.000,00 atau 100,00% jika dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp16.333.666.000,00.

Tabel 5.4 32 Tabel Dana Insentif Daerah

(dalam satuan Rupiah)

No	Uraian	2024	2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Dana Insentif Daerah	0,00	16.333.666.000,00	(16.333.666.000,00)	(100,00)
	Jumlah	0,00	16.333.666.000,00	(16.333.666.000,00)	(100,00)

Dana Insentif Daerah LO untuk tahun 2024 tidak terdapat realisasi sama dengan Dana Insentif Daerah LRA.

5.4.1.2.2.2 INSENTIF FISKAL

31-12-2024

31-12-2023

Rp20.758.998.000,00

Rp0,00

Insentif Fiskal adalah dana yang bersumber dari APBN yang diberikan kepada Daerah berdasarkan kriteria tertentu berupa perbaikan dan/atau pencapaian kinerja di bidang dapat berupa tata Kelola keuangan Daerah, pelayanan umum pemerintahan, dan pelayanan dasar yang mendukung kebijakan strategis nasional dan/atau pelaksanaan kebijakan fiskal nasional, untuk periode 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 terealisasi sebesar Rp20.758.998.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp20.758.998.000,00 atau 100,00% jika dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp0,00.



Tabel 5.4 33 Tabel Insentif Fiskal

(dalam satuan Rupiah)

No	Uraian	2024	2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Insentif Fiskal	20.758.998.000,00	0,00	20.758.998.000,00	100,00
	Jumlah	20.758.998.000,00	0,00	20.758.998.000,00	100,00

Realisasi Insentif Fiskal -LO memiliki nominal yang sama dengan realisasi Insentif Fiskal LRA yaitu sebesar Rp20.758.998.000,00.

5.4.1.2.3 TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI

31-12-2024

31-12-2023

Rp1.242.418.254.561,00

Rp935.741.846.744,00

Transfer Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kota Samarinda periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 merupakan Pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan sebesar Rp1.242.418.254.561,00 mengalami kenaikan sebesar Rp306.676.407.817,00 atau 32,77%. Jika dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp935.741.846.744,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4 34 Transfer Pemerintah Provinsi

(dalam satuan Rupiah)

No	Uraian	2024	2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	654.049.622.235,00	581.291.846.744,00	72.757.775.491,00	12,52
2	Bantuan Keuangan	588.368.632.326,00	354.450.000.000,00	233.918.632.326,00	65,99
	Jumlah	1.242.418.254.561,00	935.741.846.744,00	306.676.407.817,00	32,77

Rincian mutasi Pendapatan Transfer Provinsi adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4 35 Mutasi Transfer Pemerintah Provinsi

(dalam satuan Rupiah)

No	Uraian	LRA	Mutasi (+)	Mutasi (-)	Saldo
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	557.097.679.235,00	119.215.112.000,00	22.263.169.000,00	654.049.622.235,00
2	Bantuan Keuangan	588.368.632.326,00	0,00	0,00	588.368.632.326,00
	Jumlah	1.145.466.311.561,00	119.215.112.000,00	22.263.169.000,00	1.242.418.254.561,00

Pengakuan Transfer Pemerintah Provinsi dalam LO tahun 2024 ini lebih besar dari saldo Transfer Pemerintah Provinsi dalam LRA tahun 2024 sebesar Rp96.951.943.000,00 (Rp1.242.418.254.561,00-Rp1.145.466.311.561,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Transfer Pemerintah Provinsi dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

f.



**Transfer Pemerintah Provinsi -
LRA**

Rp 1.145.466.311.561,00

Mutasi Tambah:

a. Kurang Salur Pendapatan Bagi
Hasil Pajak Provinsi atas:

- Pajak Kendaraan Bermotor	Rp	8.698.344.000,00
- Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	Rp	7.943.710.000,00
- Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	Rp	102.501.423.000,00
- Pajak Air Permukaan	Rp	71.635.000,00

Jumlah Mutasi Tambah

Rp 119.215.112.000,00

Mutasi Kurang:

a. Pembayaran Piutang Bagi
Hasil Provinsi atas:

- Pajak Kendaraan Bermotor	Rp	8.640.624.000,00
- Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	Rp	7.052.322.000,00
- Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	Rp	6.505.887.000,00
- Pajak Air Permukaan	Rp	64.336.000,00

Jumlah Mutasi kurang

Rp 22.263.169.000,00

Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi

Rp 1.242.418.254.561,00

5.4.1.2.3.1 PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK

31-12-2024

31-12-2023

Rp654.049.622.235,00

Rp581.291.846.744,00

Pendapatan Bagi Hasil Pajak Pemerintah Kota Samarinda merupakan pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur nomor 100.3.3.1/K.34/2024 Tanggal 23 Februari 2024. Sedangkan alokasi kurang salur ditetapkan berdasarkan surat keputusan Sekretaris Daerah Nomor 900.1.14.3/15882/BPKAD-III tanggal 11 September tahun 2024 yang terdiri atas Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Bagi Hasil Pajak Air Permukaan, Bagi Hasil Pajak Rokok, serta berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/0419-V/BPKAD Tanggal 31 Januari 2025 atas tambahan kurang salur, untuk periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp654.049.622.235,00 mengalami kenaikan sebesar Rp72.757.775.491,00 atau 12,52% jika dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp581.291.846.744,00 dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 5.4 36 Pendapatan Bagi Hasil Pajak

(dalam satuan Rupiah)

No	Uraian	2024	2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	85.150.207.000,00	112.474.908.000,00	(27.324.701.000,00)	(24,29)
2	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	79.300.767.000,00	79.296.433.000,00	4.334.000,00	0,01
3	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	449.768.935.000,00	350.840.573.000,00	98.928.362.000,00	28,20
4	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	802.821.000,00	712.728.000,00	90.093.000,00	12,64
5	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	39.026.892.235,00	37.967.204.744,00	1.059.687.491,00	2,79
Jumlah		654.049.622.235,00	581.291.846.744,00	72.757.775.491,00	12,52

Rincian mutasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4 37 Mutasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak

(dalam satuan Rupiah)

No	Uraian	LRA	Mutasi (+)	Mutasi (-)	Saldo
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	85.092.487.000,00	8.698.344.000,00	8.640.624.000,00	85.150.207.000,00
2	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	78.409.379.000,00	7.943.710.000,00	7.052.322.000,00	79.300.767.000,00
3	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	353.773.399.000,00	102.501.423.000,00	6.505.887.000,00	449.768.935.000,00
4	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	795.522.000,00	71.635.000,00	64.336.000,00	802.821.000,00
5	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	39.026.892.235,00	0,00	0,00	39.026.892.235,00
Jumlah		557.097.679.235,00	119.215.112.000,00	22.263.169.000,00	654.049.622.235,00

5.4.1.2.3.2 BANTUAN KEUANGAN

31-12-2024

31-12-2023

Rp588.368.632.326,00

Rp354.450.000.000,00

f.



Bantuan Keuangan merupakan bantuan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kepada Pemerintah Kota Samarinda untuk periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp588.368.632.326,00 mengalami kenaikan sebesar Rp233.918.632.326,00 atau 65,99% jika dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp354.450.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4 38 Bantuan Keuangan

(dalam satuan Rupiah)

No	Uraian	2024	2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Bantuan Keuangan	588.368.632.326,00	354.450.000.000,00	233.918.632.326,00	65,99
	Jumlah	588.368.632.326,00	354.450.000.000,00	233.918.632.326,00	65,99

Saldo Bantuan Keuangan dalam LO tahun 2024 sama dengan saldo Bantuan Keuangan dalam LRA tahun 2024 yaitu sebesar Rp588.368.632.326,00.

Tabel 5.4 39 Mutasi Bantuan Keuangan

(dalam satuan Rupiah)

No	Uraian	LRA	Mutasi (+)	Mutasi (-)	Saldo
1	Bantuan Keuangan	588.368.632.326,00	0,00	0,00	588.368.632.326,00
	Jumlah	588.368.632.326,00	0,00	0,00	588.368.632.326,00

5.4.1.2.4 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

31-12-2024

31-12-2023

Rp130.811.567.888,69

Rp67.606.122.254,25

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Pemerintah Kota Samarinda tahun 2024 terealisasi sebesar Rp130.811.567.888,69 mengalami kenaikan sebesar Rp63.205.445.634,44 atau 93,49% jika dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp67.606.122.254,25 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4 40 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

(dalam satuan Rupiah)

No	Uraian	2024	2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	77.447.360.980,00	266.002.450,00	77.181.358.530,00	29.015,28
2	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya	35.148.789.359,00	19.335.846.640,25	15.812.942.718,75	81,78
3	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri	9.965.000,00	0,00	9.965.000,00	100,00
4	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	18.205.452.549,69	48.004.273.164,00	(29.798.820.614,31)	(62,08)
	Jumlah	130.811.567.888,69	67.606.122.254,25	63.205.445.634,44	93,49



Adapun Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada tabel tersebut di atas merupakan pendapatan yang diberikan kepada masing-masing SKPD dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4 41 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah per SKPD

(dalam satuan Rupiah)

No	SKPD	2024	2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Badan Pendapatan Daerah	18.205.452.549,69	48.004.273.164,00	(29.798.820.614,31)	(62,08)
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda	277.300.000,00	0,00	277.300.000,00	100,00
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda	181.000.000,00	0,00	181.000.000,00	100,00
4	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda	13.937.000.000,00	0,00	13.937.000.000,00	100,00
5	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	409.829.710,00	0,00	409.829.710,00	100,00
6	Dinas Kesehatan	21.401.030.359,00	19.472.307.392,25	1.928.722.966,75	9,90
7	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	331.664.020,00	42.815.248,00	288.848.772,00	674,64
8	Dinas Perhubungan Kota Samarinda	76.068.291.250,00	0,00	76.068.291.250,00	100,00
9	Kecamatan Sungai Kunjang	0,00	86.726.450,00	(86.726.450,00)	(100,00)
Jumlah		130.811.567.888,69	67.606.122.254,25	63.205.445.634,44	93,49

Pengakuan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dalam LO tahun 2024 ini lebih besar dari saldo Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah LRA tahun 2024 sebesar Rp65.028.133.019,00 (Rp130.811.567.888,69-Rp65.783.434.869,69). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah LRA

Rp 65.783.434.869,69

Mutasi Tambah:

a. Hibah dari pemerintah Pusat:

- Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (bahan obat-obatan) Rp 331.664.020,00
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Persediaan Barang Habis pakai) Rp 325.929.710,00



- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Peralatan dan Mesin)	Rp	83.900.000,00	
- Dinas Kesehatan (Peralatan dan Mesin)	Rp	179.276.000,00	
- Dinas Perhubungan (Bangunan Gedung Kantor)	Rp	76.068.291.250,00	
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah (peralatan dan Mesin)	Rp	181.000.000,00	
- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (peralatan dan Mesin)	Rp	277.300.000,00	
	Rp	77.447.360.980,00	

b. Hibah dari Provinsi:

- Dinas Kesehatan (bahan obat-obatan)	Rp	19.716.747.154,00	
- Dinas Kesehatan (Peralatan dan Mesin)	Rp	1.415.846.000,00	
- Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Aset Tetap Tanah Persil lainnya)	Rp	13.937.000.000,00	
- Dinas Kesehatan (BHP Laboratorium)	Rp	79.196.205,00	
	Rp	35.148.789.359,00	

c. Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri:

- Dinas Kesehatan (Peralatan dan Mesin)	Rp	9.965.000,00	
	Rp	9.965.000,00	

Jumlah Mutasi Tambah **Rp 112.606.115.339,00**

Mutasi Kurang:

a. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan:

- Badan Pendapatan Daerah (Pembayaran piutang Lainnya IUPK PT. KPC Tahun 2024)	Rp	47.577.982.320,00	

Jumlah Mutasi Kurang **Rp 47.577.982.320,00**

Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah **Rp 130.811.567.888,69**



Rincian mutasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagai berikut:

Tabel 5.4 42 Mutasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

(dalam satuan Rupiah)

No	Uraian	LRA	Mutasi (+)	Mutasi (-)	Saldo
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	0,00	77.447.360.980,00	0,00	77.447.360.980,00
2	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	35.148.789.359,00	0,00	35.148.789.359,00
3	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri	0,00	9.965.000,00	0,00	9.965.000,00
4	Lain-lain Pendapatan	65.783.434.869,69	0,00	47.577.982.320,00	18.205.452.549,69
Jumlah		65.783.434.869,69	112.606.115.339,00	47.577.982.320,00	130.811.567.888,69

5.4.1.2.4.2 PENDAPATAN HIBAH

31-12-2024

31-12-2023

Rp112.606.115.339,00

Rp19.601.849.090,25

Pendapatan Hibah Pemerintah Kota Samarinda merupakan Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat, Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya dan Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri periode 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 terealisasi sebesar Rp112.606.115.339,00 mengalami kenaikan sebesar Rp93.004.266.248,75 atau 474,47% jika dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp19.601.849.090,25 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4 43 Pendapatan Hibah

(dalam satuan Rupiah)

No	Uraian	2024	2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	77.447.360.980,00	266.002.450,00	77.181.358.530,00	29.015,28
2	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya	35.137.514.359,00	19.335.846.640,25	15.801.667.718,75	81,72
3	Pendapatan Hibah dari Badan/Lemba ga/Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri	21.240.000,00	0,00	21.240.000,00	100,00
Jumlah		112.606.115.339,00	19.601.849.090,25	93.004.266.248,75	474,47



5.4.1.2.4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

31-12-2024

31-12-2023

Rp18.205.452.549,69

Rp48.004.273.164,00

Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan-undangan Pemerintah Kota Samarinda periode 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 terealisasi sebesar Rp18.205.452.549,69 mengalami penurunan sebesar Rp29.798.820.614,31 atau 62,08% jika dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp48.004.273.164,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4 44 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
 (dalam satuan Rupiah)

No	Uraian	2024	2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Pendapatan atas Dana Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation Results Based Payment	0,00	48.004.273.164,00	(48.004.273.164,00)	(100,00)
2	Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara	18.205.452.549,69	0,00	18.205.452.549,69	100,00
Jumlah		18.205.452.549,69	48.004.273.164,00	(29.798.820.614,31)	(62,08)

5.4.2 BEBAN

31-12-2024

31-12-2023

Rp4.089.123.019.235,58

Rp3.687.129.836.444,09

Beban merupakan konsumsi barang dan jasa yang benar-benar sudah dimanfaatkan dalam rangka menunjang operasional pemerintah selama setahun, baik yang telah berupa kas atau tunai maupun yang masih berupa kewajiban membayar.

Realisasi Beban Daerah Pemerintah Kota Samarinda untuk periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp4.089.123.019.235,58 mengalami kenaikan sebesar Rp401.993.182.791,50 atau 10,90% jika dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp3.687.129.836.444,09 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4 45 Beban

(dalam satuan Rupiah)

NO.	URAIAN	2024	2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Beban Pegawai	1.135.940.049.777,57	972.972.448.129,33	162.967.601.648,24	16,75
2	Beban Persediaan	468.269.639.828,32	428.243.904.259,09	40.025.735.569,23	9,35
3	Beban Jasa	639.664.553.090,74	577.243.670.988,40	62.420.882.102,34	10,81
4	Beban Pemeliharaan	77.044.319.309,49	120.061.225.228,69	(43.016.905.919,20)	(35,83)
5	Beban Perjalanan Dinas	121.585.070.561,00	96.326.396.616,00	25.258.673.945,00	26,22



NO.	URAIAN	2024	2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
6	Beban Barang dan Jasa Lainnya	210.715.002.922,94	217.952.241.319,01	(7.237.238.396,07)	(3,32)
7	Beban Hibah	263.780.509.636,00	169.745.785.700,00	94.034.723.936,00	55,40
8	Beban Bantuan Sosial	5.260.947.258,00	368.750.000,00	4.892.197.258,00	1.326,70
9	Beban Penyisihan Piutang	41.422.107.285,58	48.981.355.717,49	(7.559.248.431,91)	(15,43)
10	Beban Penyusutan dan Amortisasi	1.125.440.819.565,94	1.055.234.058.486,08	70.206.761.079,86	6,65
JUMLAH		4.089.123.019.235,58	3.687.129.836.444,09	401.993.182.791,49	10,90

5.4.2.2 BEBAN PEGAWAI

31-12-2024

31-12-2023

Rp1.135.940.049.777,57

Rp972.972.448.129,33

Beban Pegawai adalah Beban atas kompensasi baik dalam bentuk uang atau barang yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang diberikan kepada Pejabat Negara, Aparatur Sipil Negara (ASN), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS, sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Beban Pegawai terealisasi sebesar Rp1.135.940.049.777,57 dan mengalami kenaikan sebesar Rp162.967.601.648,24 atau 16,75% jika dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp972.972.448.129,33 dengan rincian sebagai berikut:

Beban Pegawai pada setiap SKPD adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4 46 Tabel Beban Pegawai per SKPD

(dalam satuan Rupiah)

No	Uraian	2024	2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	447.141.233.160,40	374.504.627.041,61	72.636.606.118,79	19,40
2	Dinas Kesehatan	171.063.442.332,17	138.443.142.576,34	32.620.299.755,83	23,56
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan	19.519.648.508,00	17.222.363.006,00	2.297.285.502,00	13,34
4	Dinas Perumahan dan Permukiman	8.302.515.868,00	7.400.027.245,00	902.488.623,00	12,20
5	Dinas Pemadam Kebakaran	17.180.912.544,00	14.600.379.923,00	2.580.532.621,00	17,67
6	Satuan Polisi Pamong Praja(SATPOL PP)	10.517.235.331,00	9.180.508.500,00	1.336.726.831,00	14,56
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6.055.348.967,00	5.197.327.389,00	858.021.578,00	16,51
8	Badan Kesatuan Bangsa, Politik	6.170.384.976,00	5.755.748.729,00	414.636.247,00	7,20
9	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	6.183.143.432,00	6.297.664.459,00	(114.521.027,00)	(1,82)
10	Dinas Tenaga Kerja	6.405.441.716,00	5.606.795.228,00	798.646.488,00	14,24
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	5.570.535.019,00	4.593.152.479,38	977.382.539,62	21,28
12	Dinas Lingkungan Hidup	13.089.580.727,00	11.438.426.015,00	1.651.154.712,00	14,44



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
CATATAN UNTUK LAPORAN KEUANGAN
 UNTUK YANG TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2024



No	Uraian	2024	2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	8.792.579.355,00	8.362.883.559,00	429.695.796,00	5,14
14	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	5.158.334.988,00	4.916.382.620,00	241.952.368,00	4,92
15	Dinas Perhubungan	13.584.341.787,00	11.981.176.542,00	1.603.165.245,00	13,38
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	7.849.181.636,00	7.142.950.488,00	706.231.148,00	9,89
17	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	10.240.057.249,00	8.869.939.241,00	1.370.118.008,00	15,45
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	10.177.095.527,00	10.681.250.005,00	(504.154.478,00)	(4,72)
19	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Pariwisata	11.474.518.444,00	10.222.732.408,00	1.251.786.036,00	12,25
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	7.216.216.620,00	6.640.214.134,00	576.002.486,00	8,67
21	Dinas Perikanan	5.690.801.998,00	4.705.902.520,00	984.899.478,00	20,93
22	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	20.574.847.453,00	18.718.832.244,00	1.856.015.209,00	9,92
23	Dinas Perdagangan	11.655.788.303,00	10.692.239.483,00	963.548.820,00	9,01
24	Sekretariat Daerah	33.025.360.713,00	29.931.118.747,00	3.094.241.966,00	10,34
25	Sekretariat DPRD	42.649.998.872,00	41.142.465.748,00	1.507.533.124,00	3,66
26	Kecamatan Palaran	8.937.659.201,00	7.581.928.924,00	1.355.730.277,00	17,88
27	Kecamatan Samarinda Seberang	11.030.719.553,00	9.304.053.495,00	1.726.666.058,00	18,56
28	Kecamatan Samarinda Ulu	16.809.147.478,00	13.815.917.984,00	2.993.229.494,00	21,67
29	Kecamatan Samarinda Ilir	9.948.238.879,00	8.182.730.922,00	1.765.507.957,00	21,58
30	Kecamatan Samarinda Utara	15.782.872.242,00	13.254.209.142,00	2.528.663.100,00	19,08
31	Kecamatan Sungai Kunjang	14.245.142.920,00	12.227.125.191,00	2.018.017.729,00	16,50
32	Kecamatan Sambutan	10.812.816.339,00	9.222.074.893,00	1.590.741.446,00	17,25
33	Kecamatan Samarinda Kota	10.117.734.309,00	8.908.361.394,00	1.209.372.915,00	13,58
34	Kecamatan Sungai Pinang	11.237.200.833,00	9.310.040.868,00	1.927.159.965,00	20,70
35	Kecamatan Loa Janan Ilir	10.669.680.897,00	8.937.102.971,00	1.732.577.926,00	19,39
36	Inspektorat Daerah	11.917.110.327,00	10.472.679.239,00	1.444.431.088,00	13,79
37	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan	13.138.738.990,00	11.110.281.828,00	2.028.457.162,00	18,26
38	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	36.501.719.411,00	35.790.341.040,00	711.378.371,00	1,99
39	Badan Pendapatan Daerah	37.755.616.265,00	30.849.726.118,00	6.905.890.147,00	22,39
40	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	11.747.106.608,00	9.757.623.790,00	1.989.482.818,00	20,39
JUMLAH		1.135.940.049.777,57	972.972.448.129,33	162.967.601.648,24	16,75

f.



Pengakuan Beban Pegawai dalam LO tahun 2024 ini lebih besar dari saldo Belanja Pegawai dalam LRA tahun 2024 sebesar Rp1.588.478.172,00 (Rp1.135.940.049.777,57-Rp1.134.351.571.605,57). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Beban Pegawai dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Belanja Pegawai **Rp 1.134.351.571.605,57**

Mutasi Tambah:

a. Utang Gaji dan Tunjangan ASN:

- Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Rp 10.381.678,00

- Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Rp 183.026.250,00

Rp 193.407.928,00

b. Utang Tambahan Penghasilan ASN:

- Kecamatan Sungai Kunjang Rp 62.062.497,00

- Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Rp 20.281.991,00

- Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda Rp 24.799.150,00

- Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda Rp 2.250.000,00

- Dinas Kesehatan Rp 799.680.791,00

- Dinas Perhubungan Rp 125.351.968,00

Rp 1.034.426.397,00

c. Utang Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan

- Pertimbangan Objektif Lainnya:

- Insentif Pemungutan Retribusi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Rp 50.000.000,00

- Insentif Pemungutan Retribusi Sekretariat Daerah Kota Samarinda Rp 3.375.000,00

- Insentif Pemungutan Retribusi Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda Rp 5.201.370.000,00

- Insentif Pemungutan Retribusi Dinas Perikanan Kota Samarinda Rp 35.326.800,00

Rp 5.290.071.800,00

Jumlah Mutasi Tambah Rp 6.517.906.125,00

Mutasi Kurang:

a. Pembayaran Utang Gaji dan Tunjangan ASN:



-	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Rp	24.265.800,00		
-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda	Rp	4.812.184,00		
				Rp	29.077.984,00
	Pembayaran Utang Tambahan Penghasilan ASN:				
-	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda	Rp	2.678.654,00		
-	Kecamatan Sungai Kunjang	Rp	6.306.422,00		
-	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Rp	25.107.226,00		
				Rp	34.092.302,00
b.	Pembayaran Utang Beban Tambahan				
	Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya:				
-	Pembayaran Utang Insentif Pemungutan Retribusi -Dinas Perdagangan	Rp	71.988.125,00		
-	Pembayaran Utang Insentif Pemungutan Retribusi - Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda	Rp	4.676.932.417,00		
-	Pembayaran Utang Insentif Pemungutan Retribusi - Dinas Perhubungan	Rp	50.675.000,00		
				Rp	4.799.595.542,00
c.	Pembayaran Utang Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH				
-	Pembayaran Utang Insentif Pemungutan Retribusi Jasa Usaha - Dinas Perhubungan	Rp	57.500.000,00		
-	Pembayaran Utang Insentif Pemungutan Retribusi Jasa Usaha - Dinas Perdagangan	Rp	9.162.125,00		
				Rp	66.662.125,00
	Jumlah Mutasi Kurang	Rp		Rp	4.929.427.953,00
	Jumlah Beban Pegawai	Rp		Rp	1.135.940.049.777,57

f.



Tabel 5.4 47 Mutasi Beban Pegawai

(dalam satuan Rupiah)

No	Uraian	LRA	Mutasi (+)	Mutasi (-)	Saldo
1	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	539.988.868.138,40	193.407.928,00	29.077.984,00	540.153.198.082,40
2	Beban Tambahan Penghasilan ASN	377.823.871.728,00	1.034.426.397,00	34.092.302,00	378.824.205.823,00
3	Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	168.391.349.010,00	5.290.071.800,00	4.799.595.542,00	168.881.825.268,00
4	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	33.994.788.137,00	0,00	0,00	33.994.788.137,00
5	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	244.523.624,00	0,00	66.662.125,00	177.861.499,00
6	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	1.747.976.000,00	0,00	0,00	1.747.976.000,00
7	Beban Pegawai BLUD	12.160.194.968,17	0,00	0,00	12.160.194.968,17
Jumlah		1.134.351.571.605,57	6.517.906.125,00	4.929.427.953,00	1.135.940.049.777,57

5.4.2.3 BEBAN PERSEDIAAN

31-12-2024

31-12-2023

Rp468.269.639.828,32

Rp428.243.904.259,09

Beban Persediaan merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau pun timbulnya kewajiban akibat transaksi Belanja Barang. Selama periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 terdapat saldo sebesar Rp468.269.639.828,32 mengalami kenaikan sebesar Rp40.025.735.569,23 atau 9,35% jika dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp428.243.904.259,09.

Beban Persediaan tahun 2024 berdasarkan Sub rincian objek rekening nya terdiri dari Beban Persediaan Barang Pakai Habis dan Beban Persediaan Barang Tidak Habis Pakai dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4 48 Tabel Beban Persediaan

(dalam satuan Rupiah)

No	Uraian	2024	2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	3.320.456.839,00	8.853.419.193,00	(5.532.962.354,00)	(62,50)
2	Beban Bahan-Bahan Kimia	1.485.095.158,00	1.924.083.200,00	(438.988.042,00)	(22,82)
3	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	29.812.824.608,00	27.765.062.940,71	2.047.761.667,29	7,38
4	Beban Bahan-Bahan Baku	16.200.000,00	58.800.000,00	(42.600.000,00)	(72,45)
5	Beban Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	1.405.751.825,00	860.408.200,00	545.343.625,00	65,38



No	Uraian	2024	2023	Kenaikan/ Penurunan	%
6	Beban Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	65.819.670,00	68.605.116,00	(2.785.446,00)	(4,06)
7	Beban Bahan-Isi Tabung Gas	1.449.762.751,00	930.750.091,66	519.012.659,34	55,76
8	Beban Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	383.505.000,00	590.070.000,00	(206.565.000,00)	(35,01)
9	Beban Bahan-Bahan Lainnya	56.980.390,00	103.562.740,00	(46.582.350,00)	(44,98)
10	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	5.592.305.750,32	6.455.191.611,00	(862.885.860,68)	(13,37)
11	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	64.008.200,00	378.247.500,00	(314.239.300,00)	(83,08)
12	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	7.900.627.753,77	2.611.176.988,27	5.289.450.765,50	202,57
13	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	11.182.452.005,00	10.225.045.169,73	957.406.835,27	9,36
14	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	224.606.500,00	369.900.250,00	(145.293.750,00)	(39,28)
15	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	650.013.836,00	717.252.182,40	(67.238.346,40)	(9,37)
16	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	1.919.728.955,62	2.028.198.863,00	(108.469.907,38)	(5,35)
17	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	19.720.380.637,50	16.369.847.090,01	3.350.533.547,49	20,47
18	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	72.931.750,00	51.257.320,00	21.674.430,00	42,29
19	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	20.598.318.920,33	18.641.488.449,37	1.956.830.470,96	10,50
20	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	9.600.000,00	0,00	9.600.000,00	100,00
21	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	140.690.550,00	646.046.715,00	(505.356.165,00)	(78,22)
22	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	3.716.226.173,72	7.731.542.580,08	(4.015.316.406,36)	(51,93)
23	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	4.785.617.964,00	6.209.492.420,74	(1.423.874.456,74)	(22,93)
24	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	60.982.000,00	0,00	60.982.000,00	100,00



No	Uraian	2024	2023	Kenaikan/ Penurunan	%
25	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga	49.360.000,00	600.000,00	48.760.000,00	8.126,67
26	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	2.457.342.975,00	1.756.639.312,00	700.703.663,00	39,89
27	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	8.476.215.209,41	2.566.059.290,28	5.910.155.919,13	230,32
28	Beban Obat-Obatan-Obat	32.731.569.907,25	32.427.248.678,11	304.321.229,14	0,94
29	Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	22.877.604.239,40	26.982.306.413,73	(4.104.702.174,33)	(15,21)
30	Beban Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	180.103.274.872,00	162.535.872.171,00	17.567.402.701,00	10,81
31	Beban Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	4.765.500.000,00	274.661.600,00	4.490.838.400,00	1.635,04
32	Beban Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga Lainnya	19.306.500,00	0,00	19.306.500,00	100,00
33	Beban Natura dan Pakan-Natura	3.583.260.135,00	1.727.399.200,00	1.855.860.935,00	107,44
34	Beban Natura dan Pakan-Pakan	8.014.061.203,00	4.952.483.950,00	3.061.577.253,00	61,82
35	Beban Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	1.188.646.511,00	1.277.287.200,00	(88.640.689,00)	(6,94)
36	Beban Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Lainnya	0,00	1.752.500,00	(1.752.500,00)	(100,00)
37	Beban Makanan dan Minuman Rapat	67.563.116.841,00	55.004.958.334,00	12.558.158.507,00	22,83
38	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	619.207.800,00	548.239.250,00	70.968.550,00	12,94
39	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	5.310.823.823,00	4.523.239.750,00	787.584.073,00	17,41
40	Beban Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	884.519.750,00	429.985.000,00	454.534.750,00	105,71



No	Uraian	2024	2023	Kenaikan/ Penurunan	%
41	Beban Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	581.725.000,00	443.550.000,00	138.175.000,00	31,15
42	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	616.722.000,00	830.572.000,00	(213.850.000,00)	(25,75)
43	Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	3.672.287.200,00	6.245.405.100,00	(2.573.117.900,00)	(41,20)
44	Beban Pakaian Sipil Resmi (PSR)	8.500.000,00	10.200.000,00	(1.700.000,00)	(16,67)
45	Beban Pakaian Dinas Upacara (PDU)	0,00	290.120.000,00	(290.120.000,00)	(100,00)
46	Beban Pakaian Penyelamatan	323.446.200,00	274.449.450,00	48.996.750,00	17,85
47	Beban Pakaian Siaga	88.032.000,00	94.870.000,00	(6.838.000,00)	(7,21)
48	Beban Pakaian Pelatihan Kerja	2.450.000,00	39.980.000,00	(37.530.000,00)	(93,87)
49	Beban Pakaian Kerja Bengkel	0,00	3.540.000,00	(3.540.000,00)	(100,00)
50	Beban Pakaian KORPRI	0,00	51.770.000,00	(51.770.000,00)	(100,00)
51	Beban Pakaian Adat Daerah	2.641.678.400,00	4.121.187.000,00	(1.479.508.600,00)	(35,90)
52	Beban Pakaian Batik Tradisional	2.562.721.625,00	3.539.574.039,00	(976.852.414,00)	(27,60)
53	Beban Pakaian Olahraga	3.539.992.500,00	2.894.137.000,00	645.855.500,00	22,32
54	Beban Pakaian Paskibraka	287.000.000,00	0,00	287.000.000,00	100,00
55	Beban Pakaian Jas/Safari	37.500.000,00	2.200.000,00	35.300.000,00	1.604,55
56	Beban Komponen-Komponen Peralatan	0,00	10.000.000,00	(10.000.000,00)	(100,00)
57	Beban Komponen-Komponen Rambu-Rambu	429.137.900,00	658.468.400,00	(229.330.500,00)	(34,83)
58	Beban Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	199.750.000,00	135.700.000,00	64.050.000,00	47,20
Jumlah		468.269.639.828,32	428.243.904.259,09	40.025.735.569,23	9,35

Beban Persediaan pada setiap SKPD adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4 49 Tabel Beban Persediaan per SKPD

(dalam satuan Rupiah)

No	Uraian	2024	2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	5.362.385.278,00	4.429.973.133,00	932.412.145,00	21,05
2	Dinas Kesehatan	100.852.713.456,49	88.377.288.673,85	12.475.424.782,64	14,12
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	21.634.788.481,00	8.620.058.450,00	13.014.730.031,00	150,98
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	7.669.023.928,00	2.894.425.980,59	4.774.597.947,41	164,96
5	Dinas Pemadam Kebakaran dan	3.691.297.740,00	3.182.694.070,00	508.603.670,00	15,98



No	Uraian	2024	2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
	Penyelamatan				
6	Satuan Polisi Pamong Praja(SATPOL PP)	2.208.328.745,00	3.373.845.935,00	(1.165.517.190,00)	(34,55)
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.862.153.007,00	2.166.396.339,00	695.756.668,00	32,12
8	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	6.367.844.989,00	4.410.731.556,00	1.957.113.433,00	44,37
9	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	4.789.855.056,00	3.668.502.670,00	1.121.352.386,00	30,57
10	Dinas Tenaga Kerja	1.180.142.793,00	936.061.714,00	244.081.079,00	26,08
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.882.465.725,00	1.756.046.600,00	126.419.125,00	7,20
12	Dinas Lingkungan Hidup	22.399.936.525,00	20.843.363.776,00	1.556.572.749,00	7,47
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3.692.446.442,83	2.746.392.412,20	946.054.030,63	34,45
14	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	5.490.981.940,00	3.433.974.531,00	2.057.007.409,00	59,90
15	Dinas Perhubungan	8.843.982.545,00	8.770.504.262,00	73.478.283,00	0,84
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.635.957.075,00	3.275.999.845,00	(1.640.042.770,00)	(50,06)
17	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	2.690.363.760,00	2.257.689.577,00	432.674.183,00	19,16
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.708.641.770,00	1.817.121.170,00	(108.479.400,00)	(5,97)
19	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	12.162.598.382,00	9.449.961.595,45	2.712.636.786,55	28,71
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.234.040.800,00	2.292.302.450,00	(58.261.650,00)	(2,54)
21	Dinas Perikanan	2.252.256.350,00	2.497.148.215,00	(244.891.865,00)	(9,81)
22	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	6.539.995.121,00	7.413.506.180,00	(873.511.059,00)	(11,78)
23	Dinas Perdagangan	4.536.299.135,00	3.743.047.430,00	793.251.705,00	21,19
24	Sekretariat Daerah	22.010.989.196,00	24.396.788.125,00	(2.385.798.929,00)	(9,78)
25	Sekretariat DPRD	11.576.071.725,00	10.904.455.555,00	671.616.170,00	6,16
26	Kecamatan Palaran	14.548.591.119,00	12.629.340.600,00	1.919.250.519,00	15,20
27	Kecamatan Samarinda Seberang	11.465.816.943,00	11.396.359.875,00	69.457.068,00	0,61
28	Kecamatan Samarinda Ulu	29.047.061.200,00	28.925.817.512,00	121.243.688,00	0,42



No	Uraian	2024	2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
29	Kecamatan Samarinda Ilir	16.640.568.780,00	16.151.294.190,00	489.274.590,00	3,03
30	Kecamatan Samarinda Utara	22.843.530.038,00	22.271.196.978,00	572.333.060,00	2,57
31	Kecamatan Sungai Kunjang	24.987.078.110,00	26.742.913.024,00	(1.755.834.914,00)	(6,57)
32	Kecamatan Sambutan	10.636.858.550,00	9.883.052.879,00	753.805.671,00	7,63
33	Kecamatan Samarinda Kota	12.760.007.509,00	11.519.534.992,00	1.240.472.517,00	10,77
34	Kecamatan Sungai Pinang	25.197.024.347,00	23.271.785.854,00	1.925.238.493,00	8,27
35	Kecamatan Loa Janan Ilir	12.366.512.019,00	12.657.560.741,00	(291.048.722,00)	(2,30)
36	Inspektorat Daerah	1.199.343.997,00	782.414.521,00	416.929.476,00	53,29
37	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	4.321.126.719,00	3.774.872.406,00	546.254.313,00	14,47
38	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	9.436.669.959,00	15.481.643.722,00	(6.044.973.763,00)	(39,05)
39	Badan Pendapatan Daerah	2.441.525.598,00	1.876.801.880,00	564.723.718,00	30,09
40	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	4.102.364.975,00	3.221.034.840,00	881.330.135,00	27,36
JUMLAH		468.269.639.828,32	428.243.904.259,09	40.025.735.569,23	9,35

Pengakuan Beban Persediaan dalam LO tahun 2024 ini lebih besar dari saldo Belanja Persediaan dalam LRA tahun 2024 sebesar Rp46.445.576.235,32 (Rp468.269.639.828,32-Rp421.824.063.593,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Beban Persediaan dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Belanja Persediaan **Rp 421.824.063.593,00**

Mutasi Tambah:

- a. Pemakaian Persediaan Saldo tahun 2023 **Rp 56.000.566.791,29**
- b. Penyesuaian persediaan Hibah:
 - Penyesuaian persediaan Hibah Provinsi Obat-obatan - Dinas Kesehatan **Rp 15.203.272.058,50**
 - Penyesuaian persediaan Hibah Pusat Alat Tulis Kantor dan Bahan **Rp 528.551.510,00**



Cetak pada Dinas
Kependudukan dan
Pencatatan Sipil

Persediaan Bahan Obat-
obatan pada Dinas

- Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Rp 331.664.020,00

Rp 16.063.487.588,50

c. Persediaan yang berasal dari:

- Utang beban persediaan pada Kecamatan Sungai Kunjang Rp 12.740.000,00
- Belanja Barang dan Jasa JKN pada Dinas Kesehatan Rp 90.475.437,00
- Belanja Barang dan Jasa BLUD pada Dinas Kesehatan Rp 36.548.697.002,15
- Belanja Pemeliharaan & Jasa Rp 4.117.493.138,00
- Belanja Modal Rp 7.604.022.090,00

Rp 48.373.427.667,15

Jumlah Mutasi Tambah

Rp 120.437.482.046,94

Mutasi Kurang:

Beban Barang yang diserahkan ke

- a. Masyarakat di Kecamatan yang merupakan Aset Tetap

Rp 37.679.282.167,00

- b. Saldo Akhir Persediaan:

Penyesuaian Saldo

- Akhir Persediaan tahun 2024 Rp 20.967.923.101,42

Penyesuaian Saldo

- Akhir Hibah Pusat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Rp 306.478.200,00

Penyesuaian Saldo

- Akhir Hibah Provinsi pada Dinas Rp 7.814.455,00

- Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Penyesuaian Saldo

- Akhir BLUD pada Dinas Kesehatan Rp 6.833.528.406,30



Penyesuaian Saldo			
- Akhir JKN pada Dinas Kesehatan	Rp	269.250,00	
Penyesuaian Saldo			
- Akhir Hibah Provinsi pada Dinas Kesehatan	Rp	8.196.610.231,90	
			Rp 36.312.623.644,62
Jumlah Mutasi Kurang	Rp		73.991.905.811,62
Jumlah Beban Persediaan	Rp		468.269.639.828,32

Tabel 5.4 50 Tabel Mutasi Beban Persediaan

(dalam satuan rupiah)

No	Uraian	LRA	Mutasi (+)	Mutasi (-)	Saldo
1	Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	3.110.176.069,00	680.943.650,00	470.662.880,00	3.320.456.839,00
2	Beban Bahan-Bahan Kimia	904.463.130,00	757.033.473,00	176.401.445,00	1.485.095.158,00
3	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	29.563.462.620,00	614.176.744,00	364.814.756,00	29.812.824.608,00
4	Beban Bahan-Bahan Baku	16.200.000,00	0,00	0,00	16.200.000,00
5	Beban Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	1.341.419.825,00	145.282.000,00	80.950.000,00	1.405.751.825,00
6	Beban Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	60.615.000,00	5.204.670,00	0,00	65.819.670,00
7	Beban Bahan-Isi Tabung Gas	101.484.500,00	1.378.711.551,34	30.433.300,34	1.449.762.751,00
8	Beban Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	383.505.000,00	0,00	0,00	383.505.000,00
9	Beban Bahan-Bahan Lainnya	11.250.000,00	49.375.493,00	3.645.103,00	56.980.390,00
10	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	5.751.009.308,00	68.986.442,32	227.690.000,00	5.592.305.750,32
11	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	64.008.200,00	0,00	0,00	64.008.200,00
12	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	6.098.642.058,00	1.856.459.885,77	54.474.190,00	7.900.627.753,77
13	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	9.796.486.347,00	11.724.021.609,54	10.338.055.951,54	11.182.452.005,00
14	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	179.627.000,00	55.788.000,00	10.808.500,00	224.606.500,00
15	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	602.574.443,00	50.943.393,00	3.504.000,00	650.013.836,00
16	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	1.198.124.808,00	906.782.602,10	185.178.454,48	1.919.728.955,62



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
CATATAN UNTUK LAPORAN KEUANGAN
 UNTUK YANG TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2024



No	Uraian	LRA	Mutasi (+)	Mutasi (-)	Saldo
17	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	19.284.775.485,00	1.621.193.154,90	1.185.588.002,40	19.720.380.637,50
18	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.700.000,00	93.351.400,00	23.119.650,00	72.931.750,00
19	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	19.424.617.165,00	2.545.909.036,83	1.372.207.281,50	20.598.318.920,33
20	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	0,00	9.600.000,00	0,00	9.600.000,00
21	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	0,00	152.548.950,00	11.858.400,00	140.690.550,00
22	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	35.300.000,00	3.803.173.958,82	122.247.785,10	3.716.226.173,72
23	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	4.103.243.765,00	1.479.152.699,00	796.778.500,00	4.785.617.964,00
24	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	60.982.000,00	0,00	0,00	60.982.000,00
25	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga	23.760.000,00	25.600.000,00	0,00	49.360.000,00
26	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	2.027.838.975,00	519.731.500,00	90.227.500,00	2.457.342.975,00
27	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	975.536.000,00	7.565.725.709,41	65.046.500,00	8.476.215.209,41
28	Beban Obat-Obatan-Obat	6.442.897.801,00	42.600.167.045,33	16.311.494.939,08	32.731.569.907,25
29	Beban Obat-Obatan-Obat-Obat Lainnya	2.016.911.729,00	23.036.960.736,58	2.176.268.226,18	22.877.604.239,40
30	Beban Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	203.422.703.008,00	16.295.816.331,00	39.615.244.467,00	180.103.274.872,00
31	Beban Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	4.765.500.000,00	0,00	0,00	4.765.500.000,00
32	Beban Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan	43.618.000,00	0,00	24.311.500,00	19.306.500,00

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN ADALAH BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI LAPORAN KEUANGAN



magnificent
SAMARINDA



No	Uraian	LRA	Mutasi (+)	Mutasi (-)	Saldo
	Strategis/Berjaga-jaga Lainnya				
33	Beban Natura dan Pakan-Natura	3.523.803.515,00	59.746.000,00	289.380,00	3.583.260.135,00
34	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	8.052.457.903,00	28.380.000,00	66.776.700,00	8.014.061.203,00
35	Beban Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	0,00	1.206.322.511,00	17.676.000,00	1.188.646.511,00
36	Beban Makanan dan Minuman Rapat	67.563.116.841,00	0,00	0,00	67.563.116.841,00
37	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	619.207.800,00	0,00	0,00	619.207.800,00
38	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	5.302.073.823,00	8.750.000,00	0,00	5.310.823.823,00
39	Beban Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	884.519.750,00	0,00	0,00	884.519.750,00
40	Beban Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	581.725.000,00	0,00	0,00	581.725.000,00
41	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	555.107.000,00	61.615.000,00	0,00	616.722.000,00
42	Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	3.117.013.200,00	555.274.000,00	0,00	3.672.287.200,00
43	Beban Pakaian Sipil Resmi (PSR)	8.500.000,00	0,00	0,00	8.500.000,00
44	Beban Pakaian Penyelamatan	32.000.000,00	291.446.200,00	0,00	323.446.200,00
45	Beban Pakaian Siaga	88.032.000,00	0,00	0,00	88.032.000,00
46	Beban Pakaian Pelatihan Kerja	2.450.000,00	0,00	0,00	2.450.000,00
47	Beban Pakaian Adat Daerah	2.641.261.400,00	417.000,00	0,00	2.641.678.400,00
48	Beban Pakaian Batik Tradisional	2.562.721.625,00	0,00	0,00	2.562.721.625,00
49	Beban Pakaian Olahraga	3.532.677.500,00	7.315.000,00	0,00	3.539.992.500,00
50	Beban Pakaian Paskibraka	287.000.000,00	0,00	0,00	287.000.000,00
51	Beban Pakaian Jas/Safari	37.500.000,00	0,00	0,00	37.500.000,00
52	Beban Komponen-Komponen Rambu-Rambu	419.714.000,00	175.576.300,00	166.152.400,00	429.137.900,00
53	Beban Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	199.750.000,00	0,00	0,00	199.750.000,00
JUMLAH		421.824.063.593,00	120.437.482.046,94	73.991.905.811,62	468.269.639.828,32

f.



5.4.2.3 BEBAN JASA

31-12-2024

31-12-2023

Rp639.664.553.090,74

Rp577.243.670.988,40

Beban Jasa merupakan penurunan manfaat ekonomi, pengeluaran kas ataupun timbulnya utang atas jasa, yang sudah terealisasi selama periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp639.664.553.090,74 mengalami kenaikan sebesar Rp62.420.882.102,34 atau 10,81% jika dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp577.243.670.988,40.

Berikut adalah rincian Beban Jasa adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4 51 Tabel Beban Jasa

(dalam satuan Rupiah)

No	Uraian	2024	2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Beban Jasa Kantor	464.430.609.689,33	437.260.183.266,36	27.170.426.422,97	6,21
2	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	69.726.505.473,54	58.483.538.119,08	11.242.967.354,46	19,22
3	Beban Sewa Tanah	0,00	30.355.000,00	(30.355.000,00)	(100,00)
4	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	31.761.624.002,21	23.635.338.583,79	8.126.285.418,42	34,38
5	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	12.774.049.525,66	6.014.625.935,68	6.759.423.589,98	112,38
6	Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	2.382.578.496,00	1.000.454.900,00	1.382.123.596,00	138,15
7	Beban Sewa Aset Tidak Berwujud	983.063.387,00	477.720.000,00	505.343.387,00	105,78
8	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	28.482.171.917,00	28.293.462.710,49	188.709.206,51	0,67
9	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	6.654.462.031,00	6.926.635.140,00	(272.173.109,00)	(3,93)
10	Beban Beasiswa Pendidikan PNS	1.062.435.000,00	204.500.000,00	857.935.000,00	419,53
11	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	12.356.173.475,00	7.816.161.515,00	4.540.011.960,00	58,08
12	Beban Jasa Insentif Pemungutan Pajak Daerah bagi Pegawai Non ASN	8.195.500.389,00	6.450.054.749,00	1.745.445.640,00	27,06
13	Beban Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi	855.379.705,00	650.641.069,00	204.738.636,00	31,47
JUMLAH		639.664.553.090,74	577.243.670.988,40	62.420.882.102,34	10,81

Beban Jasa pada setiap SKPD adalah sebagai berikut:

f.



Tabel 5.4 52 Tabel Beban Jasa per SKPD

(dalam satuan Rupiah)

No	Uraian	2024	2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	75.652.410.565,00	75.086.566.816,49	565.843.748,51	0,75
2	Dinas Kesehatan	94.771.902.519,17	80.955.376.143,27	13.816.526.375,90	17,07
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	30.158.295.455,00	30.844.782.881,00	(686.487.426,00)	(2,23)
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	8.883.343.845,00	9.033.752.477,33	(150.408.632,33)	(1,66)
5	Dinas Pemadam Kebakaran	4.948.985.130,33	5.071.980.001,67	(122.994.871,34)	(2,42)
6	Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP)	13.436.096.377,49	16.051.867.627,84	(2.615.771.250,35)	(16,30)
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.856.584.921,00	2.194.423.294,00	662.161.627,00	30,17
8	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.157.611.764,00	5.496.843.933,00	2.660.767.831,00	48,41
9	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	4.718.393.912,00	2.920.874.537,00	1.797.519.375,00	61,54
10	Dinas Tenaga Kerja	3.807.701.433,00	2.333.836.442,00	1.473.864.991,00	63,15
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.018.343.031,00	1.359.980.267,00	658.362.764,00	48,41
12	Dinas Lingkungan Hidup	51.232.626.431,00	48.570.003.949,00	2.662.622.482,00	5,48
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4.212.292.258,00	3.009.306.049,00	1.202.986.209,00	39,98
14	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	3.088.857.156,00	1.804.429.670,00	1.284.427.486,00	71,18
15	Dinas Perhubungan	39.343.919.311,00	40.257.496.091,00	(913.576.780,00)	(2,27)
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	20.704.410.661,00	21.910.261.997,00	(1.205.851.336,00)	(5,50)
17	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	4.062.183.241,00	3.058.857.342,00	1.003.325.899,00	32,80
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5.051.722.423,00	5.273.721.408,00	(221.998.985,00)	(4,21)
19	Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata	13.734.074.844,00	13.550.129.601,36	183.945.242,64	1,36
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.765.718.472,00	2.718.230.789,00	47.487.683,00	1,75
21	Dinas Perikanan	2.799.847.182,67	3.094.704.062,33	(294.856.879,66)	(9,53)
22	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	5.275.180.331,00	4.562.939.923,00	712.240.408,00	15,61
23	Dinas Perdagangan	16.519.663.383,00	8.875.160.806,00	7.644.502.577,00	86,13
24	Sekretariat Daerah	44.774.721.748,92	36.956.402.243,60	7.818.319.505,32	21,16



No	Uraian	2024	2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
25	Sekretariat DPRD	41.901.996.449,50	46.839.555.663,50	(4.937.559.214,00)	(10,54)
26	Kecamatan Palaran	5.962.989.412,00	3.747.354.443,00	2.215.634.969,00	59,13
27	Kecamatan Samarinda Seberang	5.481.314.502,00	3.755.787.318,00	1.725.527.184,00	45,94
28	Kecamatan Samarinda Ulu	9.658.364.247,00	6.655.291.538,00	3.003.072.709,00	45,12
29	Kecamatan Samarinda Ilir	5.787.567.840,00	4.569.486.639,00	1.218.081.201,00	26,66
30	Kecamatan Samarinda Utara	7.829.963.920,33	5.639.454.280,00	2.190.509.640,33	38,84
31	Kecamatan Sungai Kunjang	8.893.976.688,00	6.711.419.945,00	2.182.556.743,00	32,52
32	Kecamatan Sambutan	4.540.567.455,00	3.255.839.666,00	1.284.727.789,00	39,46
33	Kecamatan Samarinda Kota	4.409.925.414,00	3.081.067.523,00	1.328.857.891,00	43,13
34	Kecamatan Sungai Pinang	6.965.648.590,00	5.465.447.886,34	1.500.200.703,66	27,45
35	Kecamatan Loa Janan Ilir	5.184.013.456,00	3.583.473.657,00	1.600.539.799,00	44,66
36	Inspektorat Daerah	3.558.302.677,00	2.782.297.150,00	776.005.527,00	27,89
37	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	12.130.276.480,00	10.181.221.718,00	1.949.054.762,00	19,14
38	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	22.495.227.270,00	22.324.274.677,00	170.952.593,00	0,77
39	Badan Pendapatan Daerah	24.409.211.710,33	13.494.329.116,67	10.914.882.593,66	80,88
40	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	7.480.320.584,00	10.165.441.416,00	(2.685.120.832,00)	(26,41)
JUMLAH		639.664.553.090,74	577.243.670.988,40	62.420.882.102,34	10,81

Pengakuan Beban Jasa dalam LO tahun 2024 ini lebih besar dari saldo Belanja Jasa dalam LRA tahun 2024 sebesar Rp3.338.434.600,84(Rp639.664.553.090,74-Rp636.326.118.489,90). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Beban Jasa dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Belanja Jasa

Rp 636.326.118.489,90

Mutasi Tambah:

a. Penambahan Utang:

- Beban Jasa Kantor Rp 769.392.409,00
- Beban Jasa Iuran Jaminan/Asuransi Rp 15.998.175.371,94
- Beban Jasa Insentif Pemungutan Pajak Non ASN Rp 2.001.930.000,00

Rp 18.769.497.780,94

f.



b.	Pemakaian Beban Dibayar Dimuka tahun 2023 di tahun 2024 yang terdiri		
-	Beban Jasa Kantor	Rp	7.083.693,33
-	Beban Jasa Iuran Jaminan/Asuransi	Rp	425.273.857,37
-	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	Rp	6.864.222.792,21
-	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	Rp	810.094.999,99
		Rp	8.106.675.342,90
c.	Reklas dari Belanja Modal Beban Sewa Peralatan dan Mesin:		
-	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	Rp	5.230.000,00
d.	Jasa Transaksi Keuangan atas Dana Bergulir beban jasa kantor		
-	Beban Jasa Kantor	Rp	799.200,00
	Jumlah Mutasi Tambah	Rp	26.882.202.323,84

Mutasi Kurang:

a.	Pembayaran Utang :		
-	Beban Jasa Kantor	Rp	702.470.071,00
-	Beban Jasa Iuran Jaminan/Asuransi	Rp	6.466.106.590,00
-	Beban Jasa Insentif Pemungutan Pajak Non ASN	Rp	1.838.347.465,00
-	Beban Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi	Rp	50.972.250,00
		Rp	9.057.896.376,00
b.	Reklas dari Beban Jasa Ke Aset Tetap:		
-	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	Rp	5.286.414.235,00
-	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	Rp	615.073.413,00
		Rp	5.901.487.648,00
c.	Penyesuaian Persediaan Beban dibayar di muka:		



-	Beban Jasa Kantor	Rp	9.605.716,00	
-	Beban Jasa Iuran Jaminan/Asuransi	Rp	481.139.737,67	
-	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	Rp	6.152.221.000,00	
-	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	Rp	667.245.833,33	
		Rp	7.310.212.287,00	
d.	Beban Kapitasi JKN :			
-	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	Rp	1.224.171.412,00	
e.	Reklas aset tidak berwujud			
-	Beban Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	Rp	50.000.000,00	
		Rp	50.000.000,00	
	Jumlah Mutasi Kurang	Rp	23.543.767.723,00	
	Jumlah Beban Jasa	Rp	639.664.553.090,74	

Tabel 5.4 53 Tabel Mutasi Beban Jasa

(dalam satuan rupiah)

No	Uraian	LRA	Mutasi (+)	Mutasi (-)	Saldo
1	Beban Jasa Kantor	464.415.410.174,00	777.275.302,33	762.075.787,00	464.430.609.689,33
2	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	61.474.473.983,90	16.423.449.229,31	8.171.417.739,67	69.726.505.929,54
3	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	31.044.392.210,00	6.869.452.792,21	6.152.221.000,00	31.761.624.002,21
4	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	12.631.200.359,00	810.094.999,99	667.245.833,33	12.774.049.525,66
5	Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	2.382.578.496,00	0,00	0,00	2.382.578.496,00
6	Beban Sewa Aset Tidak Berwujud	983.063.387,00	0,00	0,00	983.063.387,00
7	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	33.768.586.152,00	0,00	5.286.414.235,00	28.482.171.917,00
8	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	7.269.535.444,00	0,00	615.073.413,00	6.654.462.031,00
9	Beban Beasiswa Pendidikan PNS	1.062.435.000,00	0,00	0,00	1.062.435.000,00
10	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	12.356.173.475,00	0,00	0,00	12.356.173.475,00

f.



No	Uraian	LRA	Mutasi (+)	Mutasi (-)	Saldo
11	Beban Jasa Insentif Pemungutan Pajak Daerah bagi Pegawai Non ASN	8.031.917.854,00	2.001.930.000,00	1.838.347.465,00	8.195.500.389,00
12	Beban Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi	906.351.955,00	,00	50.972.250,00	855.379.705,00
JUMLAH		636.326.118.489,90	26.882.202.323,84	23.543.767.723,00	639.664.553.090,74

5.4.2.4 BEBAN PEMELIHARAAN

31-12-2024

31-12-2023

Rp77.044.319.309,49

Rp120.061.225.228,69

Beban Pemeliharaan untuk periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 yang terealisasi sebesar Rp77.044.319.309,49 mengalami penurunan sebesar Rp43.016.905.919,20 atau 35,83% jika dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp120.061.225.228,69 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4 54 Tabel Beban Pemeliharaan

(dalam satuan Rupiah)

No	Uraian	2024	2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Beban Pemeliharaan Tanah	0,00	8.753.305.454,00	(8.753.305.454,00)	(100,00)
2	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	14.228.714.033,49	21.293.395.833,50	(7.064.681.800,01)	(33,18)
3	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	27.732.057.501,00	86.258.289.856,19	(58.526.232.355,19)	(67,85)
4	Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan irigasi	34.883.797.775,00	3.723.701.163,00	31.160.096.612,00	836,80
5	Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	199.750.000,00	32.532.922,00	167.217.078,00	513,99
Jumlah		77.044.319.309,49	120.061.225.228,69	(43.016.905.919,20)	(35,83)

Beban Pemeliharaan pada setiap SKPD adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4 55 Tabel Beban Pemeliharaan per SKPD

(dalam satuan Rupiah)

No	Uraian	2024	2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.566.001.845,00	6.439.544.751,00	(4.873.542.906,00)	(75,68)
2	Dinas Kesehatan	5.826.245.602,00	4.796.791.732,00	1.029.453.870,00	21,46
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.321.327.624,00	58.944.609.134,00	(57.623.281.510,00)	(97,76)



No	Uraian	2024	2023	Kenaikan/ Penurunan	%
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	221.357.900,00	673.289.000,00	(451.931.100,00)	(67,12)
5	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	660.062.348,00	875.876.059,00	(215.813.711,00)	(24,64)
6	Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP)	435.647.246,00	218.712.167,00	216.935.079,00	99,19
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	139.751.750,00	230.319.600,00	(90.567.850,00)	(39,32)
8	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	269.336.022,00	124.567.296,00	144.768.726,00	116,22
9	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	115.658.000,00	43.165.500,00	72.492.500,00	167,94
10	Dinas Tenaga Kerja	1.062.367.000,00	940.178.054,00	122.188.946,00	13,00
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	41.185.000,00	61.070.000,00	(19.885.000,00)	(32,56)
12	Dinas Lingkungan Hidup	2.576.977.165,49	4.083.358.384,50	(1.506.381.219,01)	(36,89)
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	690.915.159,00	608.643.000,00	82.272.159,00	13,52
14	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	686.308.770,00	742.071.509,00	(55.762.739,00)	(7,51)
15	Dinas Perhubungan	35.173.224.805,00	11.186.506.122,00	23.986.718.683,00	214,43
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	122.006.500,00	2.187.035.450,00	(2.065.028.950,00)	(94,42)
17	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	1.084.284.496,00	804.811.100,00	279.473.396,00	34,73
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	776.691.150,00	1.865.327.730,00	(1.088.636.580,00)	(58,36)
19	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	5.240.519.228,00	1.066.818.345,19	4.173.700.882,81	391,23
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	139.493.900,00	173.866.900,00	(34.373.000,00)	(19,77)
21	Dinas Perikanan	403.688.900,00	272.729.000,00	130.959.900,00	48,02
22	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1.179.998.320,00	773.314.060,00	406.684.260,00	52,59
23	Dinas Perdagangan	931.008.076,00	2.732.591.900,00	(1.801.583.824,00)	(65,93)
24	Sekretariat Daerah	3.976.244.551,00	13.363.360.857,00	(9.387.116.306,00)	(70,25)
25	Sekretariat DPRD	1.594.989.881,00	2.626.866.835,00	(1.031.876.954,00)	(39,28)
26	Kecamatan Palaran	167.763.000,00	72.870.000,00	94.893.000,00	130,22
27	Kecamatan Samarinda Seberang	259.417.500,00	487.450.140,00	(228.032.640,00)	(46,78)
28	Kecamatan Samarinda Ulu	24.405.000,00	19.628.000,00	4.777.000,00	24,34
29	Kecamatan Samarinda Ilir	126.105.850,00	206.635.300,00	(80.529.450,00)	(38,97)
30	Kecamatan Samarinda Utara	136.333.780,00	53.645.000,00	82.688.780,00	154,14
31	Kecamatan Sungai Kunjang	135.182.556,00	182.361.726,00	(47.179.170,00)	(25,87)

f.



No	Uraian	2024	2023	Kenaikan/ Penurunan	%
32	Kecamatan Sambutan	176.571.670,00	113.019.567,00	63.552.103,00	56,23
33	Kecamatan Samarinda Kota	441.319.125,00	359.217.072,00	82.102.053,00	22,86
34	Kecamatan Sungai Pinang	255.999.975,00	199.310.231,00	56.689.744,00	28,44
35	Kecamatan Loa Janan Ilir	121.095.250,00	163.180.550,00	(42.085.300,00)	(25,79)
36	Inspektorat Daerah	461.162.238,00	383.796.569,00	77.365.669,00	20,16
37	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	796.123.110,00	793.841.723,00	2.281.387,00	0,29
38	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	6.891.651.317,00	600.294.315,00	6.291.357.002,00	1.048,05
39	Badan Pendapatan Daerah	739.907.700,00	450.520.550,00	289.387.150,00	64,23
40	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	75.990.000,00	140.030.000,00	(64.040.000,00)	(45,73)
Jumlah		77.044.319.309,49	120.061.225.228,69	(43.016.905.919,20)	(35,83)

Pengakuan Beban Pemeliharaan dalam LO tahun 2024 ini lebih kecil dari saldo Belanja Pemeliharaan dalam LRA tahun 2024 sebesar Rp17.881.133.476,51 (Rp77.044.319.309,49-Rp94.925.452.786,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Beban Pemeliharaan dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Belanja Pemeliharaan **Rp 94.925.452.786,00**

Mutasi Tambah:

a. Pemakaian Beban Dibayar di Muka **Rp 177.848.889,16**

Jumlah Mutasi Tambah **Rp 177.848.889,16**

Mutasi Kurang:

a. Reklas ke Beban Persediaan:

- Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin **Rp. 1.515.791.516,00**

- Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan **Rp. 40.190.572,00**

Rp 1.555.982.088,00

b. Reklas Barang milik Daerah

- Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin **Rp. 4.663.706.550,00**



Beban Pemeliharaan		
- Gedung dan Bangunan	Rp.	11.655.902.061,00
		16.319.608.611,00
Reklas ke Premi Asuransi – Beban		
c. Pemeliharaan Alat Angkutan pada Dinas Lingkungan Hidup	Rp	183.391.666,67
Jumlah Mutasi Kurang	Rp	18.058.982.365,67
Jumlah Beban Pemeliharaan	Rp	77.044.319.309,49

Tabel 5.4 56 Tabel Mutasi Beban Pemeliharaan

(dalam satuan Rupiah)

No	Uraian	LRA	Mutasi(+)	Mutasi (-)	Saldo
1	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	20.413.754.877,00	177.848.889,16	6.362.889.732,67	14.228.714.033,49
2	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	39.428.150.134,00	0,00	11.696.092.633,00	27.732.057.501,00
3	Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan irigasi	34.883.797.775,00	0,00	0,00	34.883.797.775,00
4	Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	199.750.000,00	0,00	0,00	199.750.000,00
JUMLAH		94.925.452.786,00	177.848.889,16	18.058.982.365,67	77.044.319.309,49

5.4.2.5 BEBAN PERJALANAN DINAS

31-12-2024

31-12-2023

Rp121.585.070.561,00

Rp 96.326.396.616,00

Beban Perjalanan Dinas periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 yang terealisasi sebesar Rp121.585.070.561,00 mengalami kenaikan sebesar Rp25.258.673.945,00 atau 26,22% jika dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp96.326.396.616,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4 57 Tabel Beban Perjalanan Dinas

(dalam satuan Rupiah)

No	Uraian	2024	2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Beban Perjalanan Dinas Biasa	84.958.926.274,00	74.728.495.772,00	10.230.430.502,00	13,69
2	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	19.551.316.085,00	11.975.084.423,00	7.576.231.662,00	63,27
3	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	15.008.633.787,00	7.974.868.000,00	7.033.765.787,00	88,20
4	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	588.870.000,00	394.840.000,00	194.030.000,00	49,14
5	Beban Perjalanan Dinas Biasa–Luar Negeri	1.477.324.415,00	1.253.108.421,00	224.215.994,00	17,89
JUMLAH		121.585.070.561,00	96.326.396.616,00	25.258.673.945,00	26,22



Beban Perjalanan Dinas pada setiap SKPD adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4 58 Tabel Beban Perjalanan Dinas per SKPD

(dalam satuan Rupiah)

No	Uraian	2024	2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	3.402.172.854,00	1.140.562.057,00	2.261.610.797,00	198,29
2	Dinas Kesehatan	13.471.759.384,00	9.300.372.590,00	4.171.386.794,00	44,85
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.922.763.010,00	2.096.379.233,00	826.383.777,00	39,42
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	839.502.947,00	393.382.746,00	446.120.201,00	113,41
5	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	506.613.859,00	527.946.437,00	(21.332.578,00)	(4,04)
6	Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP)	872.075.487,00	569.126.016,00	302.949.471,00	53,23
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.526.347.131,00	906.075.596,00	620.271.535,00	68,46
8	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	7.732.229.523,00	5.146.226.246,00	2.586.003.277,00	50,25
9	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	2.080.062.639,00	1.310.082.017,00	769.980.622,00	58,77
10	Dinas Tenaga Kerja	1.666.281.354,00	511.429.989,00	1.154.851.365,00	225,81
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.830.942.119,00	762.270.843,00	1.068.671.276,00	140,20
12	Dinas Lingkungan Hidup	2.061.240.368,00	1.692.498.600,00	368.741.768,00	21,79
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.016.737.445,00	912.914.994,00	103.822.451,00	11,37
14	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.149.424.456,00	399.037.943,00	1.750.386.513,00	438,65
15	Dinas Perhubungan	1.094.987.683,00	1.532.289.817,00	(437.302.134,00)	(28,54)
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.733.482.489,00	1.498.075.624,00	235.406.865,00	15,71
17	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	2.651.486.935,00	1.678.386.035,00	973.100.900,00	57,98
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.473.151.227,00	1.415.077.404,00	58.073.823,00	4,10
19	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	9.331.532.427,00	5.943.694.211,00	3.387.838.216,00	57,00

P.



No	Uraian	2024	2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	783.095.690,00	733.910.542,00	49.185.148,00	6,70
21	Dinas Perikanan	696.866.494,00	727.061.279,00	(30.194.785,00)	(4,15)
22	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	2.265.766.266,00	2.620.559.510,00	(354.793.244,00)	(13,54)
23	Dinas Perdagangan	1.827.630.207,00	1.462.768.831,00	364.861.376,00	24,94
24	Sekretariat Daerah	9.765.917.883,00	10.679.547.314,00	(913.629.431,00)	(8,55)
25	Sekretariat DPRD	21.749.805.526,00	20.218.143.050,00	1.531.662.476,00	7,58
26	Kecamatan Palaran	547.554.475,00	498.198.529,00	49.355.946,00	9,91
27	Kecamatan Samarinda Seberang	486.617.427,00	385.944.776,00	100.672.651,00	26,08
28	Kecamatan Samarinda Ulu	805.247.493,00	564.128.860,00	241.118.633,00	42,74
29	Kecamatan Samarinda Ilir	487.358.824,00	446.799.057,00	40.559.767,00	9,08
30	Kecamatan Samarinda Utara	655.829.048,00	500.089.021,00	155.740.027,00	31,14
31	Kecamatan Sungai Kunjang	657.105.740,00	546.946.230,00	110.159.510,00	20,14
32	Kecamatan Sambutan	533.184.142,00	742.706.666,00	(209.522.524,00)	(28,21)
33	Kecamatan Samarinda Kota	414.595.507,00	568.617.748,00	(154.022.241,00)	(27,09)
34	Kecamatan Sungai Pinang	707.168.619,00	485.169.672,00	221.998.947,00	45,76
35	Kecamatan Loa Janan Ilir	529.837.151,00	502.589.577,00	27.247.574,00	5,42
36	Inspektorat Daerah	4.851.624.979,00	3.305.067.689,00	1.546.557.290,00	46,79
37	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	5.642.350.947,00	4.760.870.335,00	881.480.612,00	18,52
38	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	3.558.879.231,00	3.764.858.033,00	(205.978.802,00)	(5,47)
39	Badan Pendapatan Daerah	1.084.839.385,00	754.788.848,00	330.050.537,00	43,73
40	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.171.002.190,00	4.321.802.651,00	849.199.539,00	19,65
JUMLAH		121.585.070.561,00	96.326.396.616,00	25.258.673.945,00	26,22

Pengakuan Beban Perjalanan Dinas dalam LO tahun 2024 ini lebih kecil dari saldo Belanja Perjalanan Dinas dalam LRA tahun 2024 sebesar Rp24.900.000,00 (Rp121.585.070.561,00-Rp121.609.970.561,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Beban Perjalanan Dinas dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:



Belanja Perjalanan Dinas **Rp** **121.609.970.561,00**

Mutasi Kurang :

a. Pembayaran Utang Perjalanan Dinas Biasa - Kecamatan Loa Janan Ilir **Rp** **24.900.000,00**

Jumlah Mutasi Kurang **Rp** **24.900.000,00**

Jumlah Beban Perjalanan Dinas **Rp** **121.585.070.561,00**

Tabel 5.4 59 Tabel Mutasi Beban Perjalanan Dinas

(dalam satuan Rupiah)

No	Uraian	LRA	Mutasi (+)	Mutasi (-)	Saldo
1	Beban Perjalanan Dinas Biasa	84.983.826.274,00	0,00	24.900.000,00	84.958.926.274,00
2	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	19.551.316.085,00	0,00	0,00	19.551.316.085,00
3	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	15.008.633.787,00	0,00	0,00	15.008.633.787,00
4	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	588.870.000,00	0,00	0,00	588.870.000,00
5	Beban Perjalanan Dinas Biasa-Luar Negeri	1.477.324.415,00	0,00	0,00	1.477.324.415,00
JUMLAH		121.609.970.561,00	0,00	24.900.000,00	121.585.070.561,00

5.4.2.6 BEBAN BARANG DAN JASA LAINNYA

31-12-2024

31-12-2023

Rp210.715.002.922,94

Rp217.952.241.319,01

Beban Barang dan Jasa Lainnya terdiri dari Beban Uang yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat, Beban Jasa yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat, Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi, Beban Barang dan Jasa BOS dan Beban Barang dan Jasa BLUD. Selama periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 terealisasi sebesar Rp210.715.002.922,94 mengalami penurunan sebesar Rp7.237.238.396,07 atau 3,32% jika dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp217.952.241.319,01, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4 60 Tabel Beban Barang dan Jasa Lainnya

(dalam satuan Rupiah)

No	Uraian	2024	2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Beban Uang yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	27.344.529.800,00	50.627.347.480,00	(23.282.817.680,00)	(45,99)
2	Beban Jasa yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	6.505.337.877,00	11.982.682.493,80	(5.477.344.616,80)	(45,71)
3	Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	65.561.471.871,10	24.032.106.921,00	41.529.364.950,10	172,81



No	Uraian	2024	2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
4	Beban Barang dan Jasa BOS	58.192.685.803,00	66.214.789.947,00	(8.022.104.144,00)	(12,12)
5	Beban Barang dan Jasa BLUD	53.110.977.571,84	65.095.314.477,21	(11.984.336.905,37)	(18,41)
	JUMLAH	210.715.002.922,94	217.952.241.319,01	(7.237.238.396,07)	(3,32)

Beban Barang dan Jasa Lainnya pada setiap SKPD adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4 61 Tabel Beban Barang dan Jasa Lainnya per SKPD

(dalam satuan Rupiah)

No	Uraian	2024	2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	86.256.401.732,00	83.399.294.614,00	2.857.107.118,00	3,43
2	Dinas Kesehatan	54.907.611.270,84	71.346.670.738,01	(16.439.059.467,17)	(23,04)
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	33.495.373.104,10	834.169.055,00	32.661.204.049,10	3.915,42
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	17.611.775.000,00	7.086.900.000,00	10.524.875.000,00	148,51
5	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	74.550.000,00	32.790.000,00	41.760.000,00	127,36
6	Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP)	7.300.000,00	3.975.000,00	3.325.000,00	83,65
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	20.551.000,00	76.125.000,00	(55.574.000,00)	(73,00)
8	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	88.000.000,00	45.000.000,00	43.000.000,00	95,56
9	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	178.975.000,00	145.250.000,00	33.725.000,00	23,22
10	Dinas Tenaga Kerja	3.150.000,00	11.301.000,00	(8.151.000,00)	(72,13)
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	20.240.000,00	20.825.000,00	(585.000,00)	(2,81)
12	Dinas Lingkungan Hidup	350.028.400,00	363.817.275,00	(13.788.875,00)	(3,79)
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6.635.000,00	-	6.635.000,00	100,00
14	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	5.753.104.277,00	5.618.098.748,00	135.005.529,00	2,40
15	Dinas Perhubungan	32.806.800,00	49.114.000,00	(16.307.200,00)	(33,20)
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	30.098.000,00	106.375.000,00	(76.277.000,00)	(71,71)
17	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	30.200.000,00	70.000.000,00	(39.800.000,00)	(56,86)
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6.327.000,00	20.790.000,00	(14.463.000,00)	(69,57)
19	Dinas Pemuda dan Olah Raga dan Pariwisata	3.115.660.000,00	34.811.710.000,00	(31.696.050.000,00)	(91,05)
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	177.199.000,00	508.820.784,00	(331.621.784,00)	(65,17)
21	Dinas Perikanan	0,00	0,00	0,00	0,00



No	Uraian	2024	2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
22	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	5.330.000,00	0,00	5.330.000,00	100,00
23	Dinas Perdagangan	92.570.000,00	22.500.000,00	70.070.000,00	311,42
24	Sekretariat Daerah	1.285.743.715,00	6.171.918.000,00	(4.886.174.285,00)	(79,17)
25	Sekretariat DPRD	-	4.000.000,00	(4.000.000,00)	(100,00)
26	Kecamatan Palaran	151.850.500,00	101.040.000,00	50.810.500,00	50,29
27	Kecamatan Samarinda Seberang	504.545.127,00	442.925.780,00	61.619.347,00	13,91
28	Kecamatan Samarinda Ulu	1.263.661.015,00	1.179.071.874,00	84.589.141,00	7,17
29	Kecamatan Samarinda Ilir	431.635.500,00	743.680.000,00	(312.044.500,00)	(41,96)
30	Kecamatan Samarinda Utara	322.712.070,00	295.722.404,00	26.989.666,00	9,13
31	Kecamatan Sungai Kunjang	1.487.777.100,00	535.647.771,00	952.129.329,00	177,75
32	Kecamatan Sambutan	571.692.000,00	511.519.829,00	60.172.171,00	11,76
33	Kecamatan Samarinda Kota	214.928.250,00	666.055.050,00	(451.126.800,00)	(67,73)
34	Kecamatan Sungai Pinang	439.413.762,00	1.087.723.330,00	(648.309.568,00)	(59,60)
35	Kecamatan Loa Janan Ilir	712.863.500,00	677.423.127,00	35.440.373,00	5,23
36	Inspektorat Daerah	7.074.800,00	18.000.000,00	(10.925.200,00)	(60,70)
37	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	105.672.500,00	55.000.000,00	50.672.500,00	92,13
38	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	707.627.500,00	456.692.940,00	250.934.560,00	54,95
39	Badan Pendapatan Daerah	76.420.000,00	71.285.000,00	5.135.000,00	7,20
40	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	167.500.000,00	361.010.000,00	(193.510.000,00)	(53,60)
JUMLAH		210.715.002.922,94	217.952.241.319,01	(7.237.238.396,07)	(3,32)

Pengakuan Beban Barang dan Jasa Lainnya dalam LO tahun 2024 ini lebih besar dari saldo Belanja Barang dan Jasa Lainnya dalam LRA tahun 2024 sebesar Rp17.563.482.419,49 (Rp210.715.002.922,94-Rp193.151.520.503,45). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Beban Barang dan Jasa Lainnya dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Belanja Barang dan Jasa Lainnya

Rp 193.151.520.503,45

Mutasi Tambah:

a. Penambahan Utang:

- Utang BLUD

Rp 15.921.861.477,88

b. Reklas Dari Beban Barang dan Jasa:

- Beban Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan

Rp 4.468.795.800,00

c. Beban Aset Tetap yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi:



-	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	Rp	502.137.900,00
-	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-Tractor	Rp	1.347.440.850,00
-	Beban Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Rp	14.157.507.299,00
-	Beban Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Nasional	Rp	2.780.669.538,00
-	Beban Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kota	Rp	1.094.060.500,00
-	Beban Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak		
-	Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Tanda Penghargaan-Tanda Penghargaan Bidang Lainnya	Rp	17.384.590.124,00
		Rp	37.266.406.211,00
d.	Belanja Barang dan Jasa yang dianggarkan dalam Belanja Modal:		
-	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	Rp	5.235.000,00
-	Beban Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Nasional	Rp	174.456.105,00
-	Beban Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak		
-	Kesenian/Kebudayaan/Olahraga - Tanda Penghargaan - Tanda Penghargaan Bidang Lainnya	Rp	168.859.512,00
		Rp	348.550.617,00
e.	Utang tahun berjalan :		
-	Beban Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Nasional	Rp	2.134.526.700,00
f.	Jurnal Balik Beban Dibayar Di Muka		
-	Beban Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Nasional	Rp	25.817.971.663,00
	Jumlah Mutasi Tambah	Rp	85.958.112.468,88
	Mutasi Kurang:		
a.	Reklas Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi		
-	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	Rp	7.000.000,00



-	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Baju Pengaman	Rp	75.673.500,00	
-	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Topi Kerja	Rp	17.500.000,00	
-	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Sepatu Lapangan	Rp	64.871.140,00	
-	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Alat Pelindung Lainnya	Rp	6.240.000,00	
-	Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	Rp	903.729.246,90	
				Rp 1.075.013.886,90
b.	Pembayaran Utang			
-	Pembayaran Utang BLUD			Rp 21.946.440.296,44
c.	Jurnal Penyesuaian Persediaan dari Pemeliharaan :			
-	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Masker	Rp	1.770.000,00	
-	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Topi Kerja	Rp	4.400.000,00	
				Rp 6.170.000,00
d.	Reklas Ke Beban Persediaan :			
-	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan	Rp	1.279.432.450,00	
-	Beban Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	Rp	63.819.600,00	
-	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	Rp	3.500.000,00	
-	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	Rp	816.961.500,00	
-	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya	Rp	341.255.600,00	
-	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Baju Pengaman	Rp	20.550.000,00	

f.



	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Topi Kerja	Rp	20.000.000,00	
	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Sepatu Lapangan	Rp	11.400.000,00	
		Rp		2.556.919.150,00
e.	Pengadaan Aset yang Dianggarkan dalam Belanja Barang dan Jasa :			
	Beban Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mini Komputer	Rp	53.702.910,00	
	Beban Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Tanda Penghargaan-Tanda	Rp	107.241.436,00	
	Beban Barang dan Jasa BOS	Rp	4.564.674.350,00	
	Beban Barang dan Jasa BLUD	Rp	746.486.100,00	
		Rp		5.472.104.796,00
f.	Penyesuaian Persediaan tahun 2024:			
	Persediaan BLUD 2024	Rp	37.164.407.822,05	
	Persediaan BOS 2024	Rp	111.309.098,00	
		Rp		37.275.716.920,05
g.	Mutasi Beban Aset Tetap Lainnya			Rp 62.265.000,00
	Jumlah Mutasi Kurang			Rp 68.394.630.049,39
	Jumlah Saldo Beban Barang dan Jasa Lainnya			Rp 210.715.002.922,94

Tabel 5.4 62 Tabel Mutasi Beban Barang dan Jasa Lainnya

(dalam satuan Rupiah)

No	Uraian	LRA	Mutasi (+)	Mutasi (-)	Saldo
1	Beban Uang yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	24.218.986.050,00	4.468.795.800,00	1.343.252.050,00	27.344.529.800,00
2	Beban Jasa yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	6.505.337.877,00	1.347.440.850,00	0,00	7.852.778.727,00
3	Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	2.512.077.013,00	64.220.014.341,00	2.518.060.332,90	64.214.031.021,10
4	Beban Barang dan Jasa BOS	62.868.669.251,00	0,00	4.675.983.448,00	58.192.685.803,00
5	Beban Barang dan Jasa BLUD	97.046.450.312,45	15.921.861.578,51	59.857.334.319,12	53.110.977.571,84
JUMLAH		193.151.520.503,45	85.958.112.569,51	68.394.630.150,02	210.715.002.922,94



5.4.2.7 BEBAN HIBAH

31-12-2024

31-12-2023

Rp263.780.509.636,00

Rp169.745.785.700,00

Beban Hibah untuk periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 yang terealisasi sebesar Rp263.780.509.636,00 mengalami kenaikan sebesar Rp94.034.723.936,00 atau 55,40% jika dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp169.745.785.700,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4 63 Tabel Beban Hibah

(dalam satuan Rupiah)

No	Uraian	2024	2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat	170.066.942.571,00	95.378.296.982,00	74.688.645.589,00	78,31
2	Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum	18.986.111.830,00	4.646.800.904,00	14.339.310.926,00	308,58
3	Beban Hibah Dana BOS	65.898.529.142,00	67.622.042.479,00	(1.723.513.337,00)	(2,55)
4	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	6.649.328.568,00	2.098.645.335,00	4.550.683.233,00	216,84
5	Beban Hibah Dana BOSP	2.179.597.525,00	0,00	2.179.597.525,00	100,00
JUMLAH		263.780.509.636,00	169.745.785.700,00	94.034.723.936,00	55,40

Beban Hibah pada setiap SKPD adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4 64 Tabel Beban Hibah per SKPD

(dalam satuan Rupiah)

No	Uraian	2024	2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda	82.477.726.540,00	70.570.473.383,00	11.907.253.157,00	16,87
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda	93.056.073.642,00	54.838.299.372,00	38.217.774.270,00	69,69
3	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Samarinda	7.210.393.000,00	1.698.370.000,00	5.512.023.000,00	324,55
4	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	0,00	11.829.920.000,00	(11.829.920.000,00)	(100,00)
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda	76.360.192.454,00	30.808.722.945,00	45.551.469.509,00	147,85
6	Sekretariat Daerah Kota Samarinda	4.676.124.000,00	0,00	4.676.124.000,00	100,00
JUMLAH		263.780.509.636,00	169.745.785.700,00	94.034.723.936,00	55,40

Pengakuan Beban Hibah dalam LO tahun 2024 ini lebih kecil dari saldo Belanja Hibah dalam LRA tahun 2024 sebesar Rp10.789.924.170,00 (Rp263.780.509.636,00-



Rp274.570.433.806,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Beban Hibah dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Belanja Hibah	Rp	274.570.433.806,00
Mutasi Tambah:		
Penyesuaian Beban Hibah kepada Organisasi		
a. Kemasyarakatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rp	9.929.868.830,00
Jumlah Mutasi Tambah	Rp	9.929.868.830,00
Mutasi Kurang :		
Penyesuaian Hibah kepada Pemerintah Pusat pada		
a. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda	Rp	509.100.000,00
Penyesuaian Hibah kepada Pemerintah Pusat pada		
b. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda	Rp	20.210.693.000,00
Jumlah Mutasi Kurang	Rp	20.719.793.000,00
Jumlah Beban Hibah	Rp	263.780.509.636,00

Tabel 5.4 65 Tabel Mutasi Beban Hibah

(dalam satuan Rupiah)

No	Uraian	LRA	Mutasi (+)	Mutasi (-)	Saldo
1	Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat	190.786.735.571,00	0,00	20.719.793.000,00	170.066.942.571,00
2	Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum	9.056.243.000,00	9.929.868.830,00	0,00	18.986.111.830,00
3	Beban Hibah Dana BOS	65.898.529.142,00	0,00	0,00	65.898.529.142,00
4	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	6.649.328.568,00	0,00	0,00	6.649.328.568,00
5	Beban Hibah Dana BOSP	2.179.597.525,00	0,00	0,00	2.179.597.525,00
JUMLAH		274.570.433.806,00	9.929.868.830,00	20.719.793.000,00	263.780.509.636,00

5.4.2.8 BEBAN BANTUAN SOSIAL

31-12-2024

31-12-2023

Rp5.260.947.258,00

Rp368.750.000,00

Beban Bantuan Sosial pada periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 yang terealisasi sebesar Rp5.260.947.258,00 mengalami kenaikan sebesar Rp4.892.197.258,00 atau 1.326,70% jika dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp368.750.000,00 dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 5.4 66 Tabel Beban Bantuan Sosial

(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	2024	2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Individu	1.515.550.250,00	323.000.000,00	1.192.550.250,00	369,21
2	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Keluarga	3.701.397.008,00	0,00	3.701.397.008,00	100,00
3	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Kelompok Masyarakat	44.000.000,00	45.750.000,00	(1.750.000,00)	(3,83)
JUMLAH		5.260.947.258,00	368.750.000,00	4.892.197.258,00	1.326,70

Beban Bantuan Sosial pada setiap SKPD adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4 67 Tabel Beban Bantuan Sosial per SKPD

(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	2024	2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda	3.745.397.008,00	368.750.000,00	3.376.647.008,00	915,70
2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda	1.515.550.250,00	0,00	1.515.550.250,00	100,00
JUMLAH		5.260.947.258,00	368.750.000,00	4.892.197.258,00	1.326,70

5.4.2.9 BEBAN PENYISIHAN PIUTANG

31-12-2024

31-12-2023

Rp41.422.107.285,58

Rp48.981.355.717,49

Beban Penyisihan Piutang terdiri dari Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah, Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah, Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Asli Daerah Lainnya dan Beban Penyisihan Piutang Lainnya yang dihitung berdasarkan tarif sesuai Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 55 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 69 Tahun 2022 Tentang Kebijakan Akuntansi. Beban Penyisihan Piutang yang terjadi pada periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 dan terealisasi sebesar Rp41.422.107.285,58 mengalami penurunan sebesar Rp7.559.248.431,91 atau 15,43% jika dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp48.981.355.717,49.

Tabel 5.4 68 Tabel Beban Penyisihan Piutang

(dalam satuan rupiah)

No.	Uraian	2024	2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah	37.039.400.221,58	326.526.859,35	36.712.873.362,23	11.243,45
2	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	4.168.963.525,00	1.018.447.035,25	3.150.516.489,75	309,35
3	Beban Penyisihan Piutang PAD Lainnya	213.743.539,00	6.525.903,84	207.217.635,16	3.175,31
4	Beban Penyisihan Piutang Lainnya	0,00	47.629.855.919,05	(47.629.855.919,05)	(100,00)
JUMLAH		41.422.107.285,58	48.981.355.717,49	(7.559.248.431,91)	(15,43)



Beban Penyisihan Piutang pada setiap SKPD adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4 69 Tabel Beban Penyisihan Piutang per SKPD

(dalam satuan rupiah)

No	Uraian	2024	2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
1	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	7.022.250,00	9.132.225,00	(2.109.975,00)	(23,10)
2	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	293.985.346,55	163.461.531,50	130.523.815,05	79,85
3	Dinas Perdagangan	12.500.000,00	110.718.010,25	(98.218.010,25)	(88,71)
4	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	0,00	18.141.746,39	(18.141.746,39)	(100,00)
5	Badan Pendapatan Daerah	37.045.396.720,54	47.904.509.179,35	(10.859.112.458,81)	(22,67)
6	Dinas Kesehatan Kota Samarinda	194.061.693,49	746.225,00	193.315.468,49	25.905,79
7	Dinas Lingkungan Hidup	3.868.580.700,00	774.646.800,00	3.093.933.900,00	399,40
8	Dinas Perhubungan	560.575,00	0,00	560.575,00	100,00
JUMLAH		41.422.107.285,58	48.981.355.717,49	(7.559.248.431,91)	(15,43)

Pengakuan Beban Penyisihan Piutang dalam LO tahun 2024 dapat diuraikan lebih rinci sebagai berikut:

1. Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah pada BAPENDA Tahun 2024 :

a. Beban Penyisihan Piutang Pajak Hotel	Rp	103.558,48
b. Beban Penyisihan Piutang Pajak Restoran	Rp	1.203.213.164,26
c. Beban Penyisihan Piutang Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	Rp	94.514.889,59
d. Beban Penyisihan Piutang PBBP2	Rp	35.339.976.843,90
e. Beban Penyisihan Piutang Pajak Reklame	Rp	300.026.026,15
f. Beban Penyisihan Piutang Pajak Penerangan Jalan	Rp	92.001.995,51
g. Beban Penyisihan Piutang Pajak Parkir	Rp	8.545.547,12
h. Beban Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah	Rp	958.261,57
i. Beban Penyisihan Piutang Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	Rp	59.935,00
Jumlah	Rp	37.039.400.221,58

2. Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah tahun 2024:

a. Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Rp	7.022.250,00
b. Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	Rp	292.800.000,00
c. Beban Penyisihan Piutang Retribusi Persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup	Rp	3.868.580.700,00
d. Beban Penyisihan Piutang Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum pada Dinas Perhubungan	Rp	560.575,00
Jumlah	Rp	4.168.963.525,00

f.



3. Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2024:

a. Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah pada Dinas Kesehatan, Badan Pendapatan Daerah dan Dinas Perdagangan	Rp	194.061.693,49
b. Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah pada Badan Pendapatan Daerah	Rp	5.996.498,96
c. Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah pada Dinas Perdagangan	Rp	12.500.000,00
d. Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah pada Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	Rp	1.185.346,55
Jumlah	Rp	213.743.539,00
Jumlah Beban Penyisihan Piutang	Rp	41.422.107.285,58

5.4.2.10 BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI

31-12-2024

31-12-2023

Rp1.125.440.819.565,94

Rp1.055.234.058.486,08

Beban Penyusutan dan Amortisasi adalah Beban yang timbul dari pemakaian manfaat Aset Tetap, Aset Lainnya, dan Aset Tidak Berwujud milik Pemerintah Kota Samarinda yang terjadi pada periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 yang terealisasi sebesar Rp1.125.440.819.565,94 mengalami kenaikan sebesar Rp70.206.761.079,86 atau 6,65% jika dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp1.055.234.058.486,08 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4 70 Tabel Beban Penyusutan dan Amortisasi

(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	2024	2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	167.822.439.157,24	161.172.614.970,00	6.649.824.187,24	4,13
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	171.395.069.403,79	166.628.467.932,31	4.766.601.471,48	2,86
3	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	784.998.841.069,91	725.990.551.756,77	59.008.289.313,14	8,13
4	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	15.924.868,00	21.082.060,00	(5.157.192,00)	(24,46)
5	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	1.208.545.067,00	1.421.341.767,00	(212.796.700,00)	(14,97)
JUMLAH		1.125.440.819.565,94	1.055.234.058.486,08	70.206.761.079,86	6,65



Beban Penyusutan dan Amortisasi pada setiap SKPD adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4 71 Tabel Beban Penyusutan dan Amortisasi per SKPD

(dalam satuan Rupiah)

No	Uraian	2024	2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	46.422.590.268,24	36.781.512.736,00	9.641.077.532,24	26,21
2	Dinas Kesehatan	44.203.766.797,79	47.746.236.416,00	(3.542.469.618,21)	(7,42)
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	825.681.569.757,91	776.192.846.135,31	49.488.723.622,60	6,38
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	68.821.329.505,00	81.840.603.670,00	(13.019.274.165,00)	(15,91)
5	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	4.480.850.027,00	4.894.700.575,77	(413.850.548,77)	(8,46)
6	Satuan Polisi Pamong Praja(SATPOL PP)	1.678.802.269,00	1.261.217.030,00	417.585.239,00	33,11
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.629.828.935,00	1.890.681.706,00	739.147.229,00	39,09
8	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.540.413.613,00	1.468.852.627,00	71.560.986,00	4,87
9	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	717.382.602,00	505.663.794,00	211.718.808,00	41,87
10	Dinas Tenaga Kerja	473.379.340,00	276.387.012,00	196.992.328,00	71,27
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	395.189.567,00	445.793.083,00	(50.603.516,00)	(11,35)
12	Dinas Lingkungan Hidup	11.254.920.585,00	11.844.981.932,00	(590.061.347,00)	(4,98)
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.475.525.634,00	1.278.256.287,00	197.269.347,00	15,43
14	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.551.102.341,00	1.148.493.701,00	402.608.640,00	35,06
15	Dinas Perhubungan	28.935.691.261,00	17.876.004.488,00	11.059.686.773,00	61,87
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.931.216.842,00	3.266.855.851,00	(335.639.009,00)	(10,27)
17	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	3.404.543.710,00	3.372.036.034,00	32.507.676,00	0,96
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.093.244.131,00	2.068.695.067,00	24.549.064,00	1,19
19	Dinas pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	3.988.017.785,00	3.596.448.932,00	391.568.853,00	10,89



No	Uraian	2024	2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.407.692.043,00	1.275.510.223,00	132.181.820,00	10,36
21	Dinas Perikanan	1.683.637.233,00	1.109.325.558,00	574.311.675,00	51,77
22	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1.428.165.775,00	1.666.039.647,00	(237.873.872,00)	(14,28)
23	Dinas Perdagangan	9.462.424.997,00	8.903.137.689,00	559.287.308,00	6,28
24	Sekretariat Daerah	10.222.666.648,00	11.815.908.630,00	(1.593.241.982,00)	(13,48)
25	Sekretariat DPRD	4.126.122.674,00	4.501.139.410,00	(375.016.736,00)	(8,33)
26	Kecamatan Palaran	2.177.541.420,00	1.636.613.060,00	540.928.360,00	33,05
27	Kecamatan Samarinda Seberang	1.279.166.578,00	894.198.806,00	384.967.772,00	43,05
28	Kecamatan Samarinda Ulu	1.664.492.481,00	1.110.164.578,00	554.327.903,00	49,93
29	Kecamatan Samarinda Ilir	2.029.031.387,00	1.523.438.755,00	505.592.632,00	33,19
30	Kecamatan Samarinda Utara	2.134.512.412,00	1.620.922.208,00	513.590.204,00	31,69
31	Kecamatan Sungai Kunjang	2.391.173.204,00	1.723.782.623,00	667.390.581,00	38,72
32	Kecamatan Sambutan	974.122.091,00	735.515.654,00	238.606.437,00	32,44
33	Kecamatan Samarinda Kota	906.962.766,00	666.637.025,00	240.325.741,00	36,05
34	Kecamatan Sungai Pinang	1.162.310.035,00	867.116.030,00	295.194.005,00	34,04
35	Kecamatan Loa Janan Ilir	1.681.523.332,00	1.254.188.978,00	427.334.354,00	34,07
36	Inspektorat Daerah	1.635.043.245,00	1.449.001.693,00	186.041.552,00	12,84
37	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	2.195.544.760,00	2.250.085.165,00	(54.540.405,00)	(2,42)
38	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	20.763.609.697,00	9.370.428.587,00	11.393.181.110,00	121,59
39	Badan Pendapatan Daerah	1.775.799.547,00	1.456.576.172,00	319.223.375,00	21,92
40	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.659.912.270,00	1.648.060.918,00	11.851.352,00	0,72
JUMLAH		1.125.440.819.565,94	1.055.234.058.486,08	70.206.761.079,86	6,65

5.4.3 SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI

31-12-2024

Rp 813.676.967.185,47

31-12-2023

Rp 878.029.392.428,78

f.



Surplus/Defisit dari Operasi adalah selisih antara Pendapatan dan Beban selama satu periode pelaporan dari Kegiatan Operasi. Periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 menghasilkan surplus sebesar Rp813.676.967.185,47 mengalami penurunan sebesar Rp64.352.425.243,31 atau 7,33% dari tahun 2023 surplus sebesar Rp878.029.392.428,78.

5.4.4 SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

31-12-2024

31-12-2023

Rp17.638.210.511,01

Rp34.287.105.457,12

Surplus/Defisit dari kegiatan Non Operasional selama periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 surplus sebesar Rp17.638.210.511,01, mengalami penurunan sebesar Rp16.648.894.946,11 atau 48,56% dari tahun 2023 surplus sebesar Rp34.287.105.457,12.

Pendapatan dan Beban yang sifatnya tidak rutin dikelompokkan tersendiri dalam Kegiatan Non Operasional, antara lain Surplus/Defisit Penjualan Aset Non Lancar, Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang, dan Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Pemerintah Kota Samarinda tahun 2024 dapat dirincikan pada table berikut:

Tabel 5.4 72 Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

No	Uraian	2024	2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Surplus Penjualan Aset Non Lancar	50.162.674.465,34	70.720.309.083,68	(20.557.634.618,34)	(29,07)
2	Defisit Penjualan Aset Non Lancar	31.350.708.497,30	0,00	31.350.708.497,30	100,00
3	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	1.173.755.457,03	36.433.203.626,56	(35.259.448.169,53)	(96,78)
JUMLAH		17.638.210.511,01	34.287.105.457,12	(16.648.894.946,11)	(48,56)

5.4.4.1 SURPLUS PENJUALAN ASET NON LANCAR

31-12-2024

31-12-2023

Rp50.162.674.465,34

Rp70.720.309.083,68

Surplus Penjualan Aset Non Lancar dari Kegiatan Non Operasional selama periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp50.162.674.465,34 mengalami penurunan sebesar Rp20.557.634.618,34 atau 29,07% jika dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp70.720.309.083,68.

5.4.4.2 DEFISIT PENJUALAN ASET NON LANCAR

31-12-2024

31-12-2023

Rp31.350.708.497,30

Rp0,00



Defisit Penjualan Aset Non Lancar selama periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp31.350.708.497,30 mengalami kenaikan sebesar Rp31.350.708.497,30 atau 100,00% jika dibandingkan Tahun 2023 sebesar Rp0,00.

5.4.4.3 DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA

31-12-2024

31-12-2023

Rp1.173.755.457,03

Rp36.433.203.626,56

Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya terdiri dari mutasi Aset Tetap dan penyesuaian penyertaan modal atas rugi PT. BPR Bank Samarinda (Perseroda). Periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp1.173.755.457,03 mengalami penurunan sebesar Rp35.259.448.169,53 atau 96,78% jika dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp36.433.203.626,56.

5.4.5 SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA

31-12-2024

31-12-2023

Rp831.315.177.696,48

Rp912.316.497.885,90

Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa selama periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 surplus sebesar Rp831.315.177.696,48 mengalami penurunan sebesar Rp81.001.320.189,42 atau 8,88% dari tahun 2023 sebesar Rp912.316.497.885,90.

5.4.6 POS LUAR BIASA

31-12-2023

31-12-2023

(Rp609.253.467,00)

(Rp1.182.636.207,98)

Pos Luar Biasa adalah Pendapatan atau Beban Operasional yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi dan berada di luar kendali atau pengaruh Pemerintah Kota Samarinda.

Pos Luar Biasa Pemerintah Kota Samarinda tahun 2024 adalah Beban Luar Biasa selama periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 defisit sebesar Rp609.253.467,00 mengalami penurunan sebesar Rp573.382.740,98 atau 48,48% jika dibandingkan tahun 2023 defisit sebesar Rp1.182.636.207,98.

f.



5.4.6.1 BEBAN LUAR BIASA

31-12-2024

31-12-2023

Rp609.253.467,00

Rp1.182.636.207,98

Beban Luar Biasa dari Pos Luar Biasa selama periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp609.253.467,00 mengalami penurunan sebesar Rp573.382.740,98 atau 48,48% jika dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp1.182.636.207,98.

5.4.7 SURPLUS/DEFISIT-LO

31-12-2024

31-12-2023

Rp 830.705.924.229,48

Rp 911.133.861.677,92

Surplus/Defisit LO merupakan selisih antara Pendapatan dan Beban selama satu periode pelaporan setelah diperhitungkan Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional dan Pos Luar Biasa. Surplus/Defisit pada Laporan Operasional Pemerintah Kota Samarinda per 31 Desember 2024 menghasilkan surplus sebesar Rp830.705.924.229,48 mengalami penurunan sebesar Rp80.427.937.448,44 atau 8,83% dari tahun 2023 yaitu surplus sebesar Rp911.133.861.677,92.

f.



5.4 PENJELASAN ATAS POS – POS LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas adalah Laporan yang menyajikan informasi arus kas masuk dan arus kas keluar kas dan setara kas pada Pemerintah Kota Samarinda serta saldo kas pada awal maupun akhir periode anggaran. Arus kas dalam laporan arus kas diklasifikasikan berdasarkan Arus Kas dari Aktivitas Operasi, Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Nonkeuangan, Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan dan dari Aktivitas Nonanggaran. Tujuan Pelaporan arus kas adalah memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas serta setara kas selama Tahun Anggaran 2024 dan saldo kas pada tanggal 31 Desember 2024. Arus kas bersih Pemerintah Kota Samarinda TA 2024 dan 2023 terdiri atas:

5.5.1 ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

Arus Kas dari Aktivitas Operasi adalah Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu periode akuntansi. Aktivitas operasi juga merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah daerah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasional Pemerintah Kota Samarinda selama satu tahun anggaran. Realisasi Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi dapat dirincikan sebagai berikut:

Arus Kas dari Aktivitas Operasi adalah Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu periode akuntansi. Aktivitas operasi juga merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah daerah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasional Pemerintah Kota Samarinda selama satu tahun anggaran. Realisasi Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi dapat dirincikan sebagai berikut:

5.5.1.1 ARUS MASUK KAS

Arus masuk kas dari aktivitas operasi selama TA 2024 sebesar Rp5.175.278.540.523,90 dan tahun 2023 sebesar Rp4.026.448.505.899,93, jika dibandingkan dengan tahun 2023 maka arus masuk kas bersih dari aktivitas operasi mengalami kenaikan sebesar Rp1.148.830.034.623,97 atau 28,53% dengan rincian sebagai berikut:

5.5. 1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi TA 2024 dan 2023

(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Pendapatan Pajak Daerah	683.041.335.375,94	608.761.181.359,98	74.280.154.015,96	12,20
Pendapatan Retribusi Daerah	52.892.908.387,00	51.489.693.765,00	1.403.214.622,00	2,73
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	22.082.018.474,03	13.337.956.568,25	8.744.061.905,78	65,56
Lain-lain PAD yang Sah	213.405.243.091,24	183.730.302.003,70	29.674.941.087,54	16,15
Dana Bagi Hasil Pajak	144.122.432.000,00	121.089.658.309,00	23.032.773.691,00	19,02
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	1.700.094.740.000,00	1.043.825.330.845,00	656.269.409.155,00	62,87
Dana Alokasi Umum	841.775.200.055,00	677.722.969.133,00	164.052.230.922,00	24,21
Dana Alokasi Khusus	285.855.918.710,00	329.763.785.328,00	(43.907.866.618,00)	(13,31)
Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00



Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Dana Penyesuaian	20.758.998.000,00	16.333.666.000,00	4.425.332.000,00	27,09
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	557.097.679.235,00	625.517.671.744,00	(68.419.992.509,00)	(10,94)
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	588.368.632.326,00	354.450.000.000,00	233.918.632.326,00	65,99
Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Lainnya	65.783.434.869,69	426.290.844,00	65.357.144.025,69	15.331,59
Arus Kas dari Aktivitas Operasi	5.175.278.540.523,90	4.026.448.505.899,93	1.148.830.034.623,97	28,53

A. Pendapatan Pajak Daerah

Saldo realisasi Pajak Daerah TA 2024 sebesar Rp683.041.335.375,94 dan TA 2023 sebesar Rp608.761.181.359,98, jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya, Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp74.280.154.015,96 atau 12,20%, dengan rincian sebagai berikut:

5.5. 2 Realisasi Pendapatan Pajak Daerah

(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Pajak Hotel	82.640.997.028,73	69.054.616.118,43	13.586.380.910,30	19,67
Pajak Restoran	139.358.095.530,04	119.629.781.799,17	19.728.313.730,87	16,49
Pajak Hiburan	41.136.537.114,15	33.851.445.961,98	7.285.091.152,17	21,52
Pajak Reklame	5.490.327.457,00	10.631.194.621,00	(5.140.867.164,00)	(48,36)
Pajak Penerangan Jalan	147.901.317.208,00	133.801.836.162,00	14.099.481.046,00	10,54
Pajak Parkir	6.759.059.266,00	13.522.723.135,00	(6.763.663.869,00)	(50,02)
Pajak Air Bawah Tanah	304.705.980,00	258.159.775,00	46.546.205,00	18,03
Pajak Sarang Burung Walet	0,00	24.174.900,00	(24.174.900,00)	(100,00)
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	18.081.617,00	7.452.050,00	10.629.567,00	142,64
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	104.747.884.767,02	94.780.520.812,00	9.967.363.955,02	10,52
Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	154.684.329.408,00	133.199.276.025,40	21.485.053.382,60	16,13
Pendapatan Pajak daerah	683.041.335.375,94	608.761.181.359,98	74.280.154.015,96	12,20

B. Pendapatan Retribusi Daerah

Saldo realisasi Pendapatan Retribusi Daerah TA 2024 sebesar Rp52.892.908.387,00 dan TA 2023 sebesar Rp51.489.693.765, jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya, penerimaan retribusi daerah tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp1.403.214.622,00 atau 2,73%, dengan rincian sebagai berikut:

f.



5.5. 3 Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah

(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Retribusi Jasa Umum	38.742.392.862,00	40.995.918.833,00	(2.253.525.971,00)	(5,50)
Retribusi Jasa Usaha	8.337.501.302,00	7.641.097.829,00	696.403.473,00	9,11
Retribusi Perizinan Tertentu	5.813.014.223,00	2.852.677.103,00	2.960.337.120,00	103,77
Pendapatan Retribusi Daerah	52.892.908.387,00	51.489.693.765,00	1.403.214.622,00	2,73

C. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Saldo realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2024 sebesar Rp22.082.018.474,03 dan TA 2023 sebesar Rp13.337.956.568,25, jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya, realisasi tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp8.744.061.905,78 atau 65,56%, dengan rincian sebagai berikut:

5.5. 4 Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	22.082.018.474,03	13.337.956.568,25	8.744.061.905,78	65,56
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	22.082.018.474,03	13.337.956.568,25	8.744.061.905,78	65,56

D. Lain-lain PAD yang Sah

Saldo realisasi Lain-lain PAD yang Sah TA 2024 sebesar Rp213.405.243.091,24 dan TA 2023 sebesar Rp183.730.302.003,70. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya, realisasi tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp29.674.941.087,54 atau 16,15 %, dengan rincian sebagai berikut:

5.5. 5 Realisasi Lain-lain PAD yang Sah

(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	0,00	125.000.000,00	(125.000.000,00)	(100,00)
Penerimaan Hasil Kerja Sama Daerah	24.793.953.851,75	20.670.273.803,74	4.123.680.048,01	19,95
Penerimaan Jasa Giro	10.643.835.354,44	21.816.026.280,59	(11.172.190.926,15)	(51,21)
Penerimaan Bunga	41.125.100.075,27	14.389.730.255,82	26.735.369.819,45	185,79
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	6.930.118.588,86	10.404.893.884,98	(3.474.775.296,12)	(33,40)
Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan	481.762.693,50	989.028.991,52	(507.266.298,02)	(51,29)



Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Pendapatan Denda Pajak Daerah	10.454.636.355,57	3.693.893.723,01	6.760.742.632,56	183,02
Pendapatan Denda Retribusi	97.205.226,00	1.927.331.250,00	(1.830.126.024,00)	(94,96)
Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	32.850.000,00	13.250.000,00	19.600.000,00	147,92
Pendapatan dari Pengembalian	352.669.275,40	464.471.923,19	(111.802.647,79)	(24,07)
Pendapatan BLUD	111.328.569.004,45	98.580.708.246,85	12.747.860.757,60	12,93
Pendapatan Dana Kapitasi JKN	7.164.542.666,00	10.655.693.644,00	(3.491.150.978,00)	(32,76)
Lain-lain PAD yang Sah	213.405.243.091,24	183.730.302.003,70	29.674.941.087,54	16,15

Lain-lain PAD yang Sah tersebut di atas tidak termasuk hasil penjualan atas tanah sebesar Rp1.810.107.440,00. Nilai Rp1.810.107.440,00 terdapat di arus kas masuk dari aktivitas investasi aset nonkeuangan pada Hasil Penjualan atas Tanah.

E. Dana Bagi Hasil Pajak

Saldo Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak (DBH Pajak) TA 2024 sebesar Rp144.122.432.000,00 dan tahun 2023 sebesar Rp121.089.658.309,00 jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya realisasi tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp23.032.773.691,00 atau 19,02%, dengan rincian sebagai berikut:

5.5. 6 Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak 2024

(Dalam satuan Rupiah)

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
DBH Pajak Bumi dan Bangunan	71.319.573.999,00	113.994.675.983,00	(42.675.101.984,00)	(37,44)
DBH PPh Pasal 21	69.314.631.000,00	6.443.231.133,00	62.871.399.867,00	975,77
DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	3.488.007.001,00	650.874.458,00	2.837.132.543,00	435,90
DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	220.000,00	876.735,00	(656.735,00)	(74,91)
Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak	144.122.432.000,00	121.089.658.309,00	23.032.773.691,00	19,02

F. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

Saldo Realisasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA) TA 2024 sebesar Rp1.700.094.740.000,00 dan tahun 2023 sebesar Rp1.043.825.330.845,00, jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya realisasi tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp656.269.409.155,00 atau 62,87%, dengan rincian sebagai berikut:

f.



5.5. 7 Realisasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	19.667.449.001,00	38.154.813.954,00	(18.487.364.953,00)	(48,45)
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	48.241.959.000,00	66.599.571.519,00	(18.357.612.519,00)	(27,56)
DBH Sumber Daya DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	1.070.924.999,00	2.184.437.851,00	(1.113.512.852,00)	(50,97)
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	1.617.315.495.000,00	932.476.512.524,00	684.838.982.476,00	73,44
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Provinsi Sumber Daya Hutan (PSDH)	2.244.604.000,00	2.964.506.786,00	(719.902.786,00)	(24,28)
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.074.331.000,00	1.445.488.211,00	(371.157.211,00)	(25,68)
DBH Sawit	10.479.977.000,00	0,00	10.479.977.000,00	100,00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	1.700.094.740.000,00	1.043.825.330.845,00	656.269.409.155,00	62,87

G. Dana Alokasi Umum

Saldo realisasi Dana Alokasi Umum Pemerintah Kota Samarinda untuk periode TA 2024 dan 2023 sebesar Rp841.775.200.055,00 dan Rp677.722.969.133,00, jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya penerimaan Dana Alokasi Umum tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp164.052.230.922,00 atau 24,21%, dengan rincian sebagai berikut:

5.5. 8 Realisasi Dana Alokasi Umum

(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Dana Alokasi Umum (DAU)	841.775.200.055,00	677.722.969.133,00	164.052.230.922,00	24,21
Dana Alokasi Umum (DAU)	841.775.200.055,00	677.722.969.133,00	164.052.230.922,00	24,21

H. Dana Alokasi Khusus

Saldo Realisasi Dana Alokasi Khusus TA 2024 sebesar Rp285.855.918.710,00 dan tahun 2023 sebesar Rp329.763.785.328,00, jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya realisasi tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp43.907.866.618,00 atau 13,31%, dengan rincian sebagai berikut:

5.5. 9 Realisasi Dana Alokasi Khusus

(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Dana Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	19.158.878.212,00	21.190.912.335,00	(2.032.034.123,00)	(9,59)
Dana Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	266.697.040.498,00	308.572.872.993,00	(41.875.832.495,00)	(13,57)
Dana Alokasi Khusus (DAK)	285.855.918.710,00	329.763.785.328,00	(43.907.866.618,00)	(13,31)



1) Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik

Saldo realisasi Dana Alokasi Khusus Fisik Pemerintah Kota Samarinda untuk periode TA 2024 dan 2023 sebesar Rp19.158.878.212,00 dan Rp21.190.912.335,00, jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya penerimaan Dana Alokasi Khusus Fisik tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp2.032.034.123,00 atau 9,59%.

2) Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik

Saldo realisasi Dana Alokasi Khusus Non Fisik Pemerintah Kota Samarinda untuk periode TA 2024 sebesar Rp266.697.040.498,00 dan tahun 2023 sebesar Rp308.572.872.993,00 jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya penerimaan Dana Alokasi Khusus tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp41.875.832.495,00 atau 13,57%.

I. Dana Otonomi Khusus

Saldo realisasi Dana Otonomi Khusus untuk periode TA 2024 sebesar Rp0,00 sedangkan untuk realisasi tahun 2023 sebesar Rp0,00.

J. Dana Penyesuaian

Saldo realisasi Dana Penyesuaian Pemerintah Kota Samarinda untuk periode TA 2024 sebesar Rp20.758.998.000,00 adalah dana yang bersumber dari Insentif Fiskal dan tahun 2023 sebesar Rp16.333.666.000,00 adalah dana yang bersumber dari Dana Insentif Daerah (DID), jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya Dana Penyesuaian tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp4.425.332.000,00 atau 27,09%.

K. Pendapatan Bagi Hasil Pajak

Saldo realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Pemerintah Kota Samarinda untuk periode TA 2024 sebesar Rp557.097.679.235,00 dan tahun 2023 sebesar Rp625.517.671.744,00, jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya, Pendapatan Bagi Hasil Pajak tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp68.419.992.509,00 atau 10,94%, dengan rincian sebagai berikut:

5.5. 10 Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Pemerintah TA 2024 s.d 2023

(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Bagi hasil dari pajak kendaraan bermotor	85.092.487.000,00	111.339.386.000,00	(26.246.899.000,00)	(23,57)
Bagi hasil dari bea balik nama kendaraan bermotor	78.409.379.000,00	82.704.283.000,00	(4.294.904.000,00)	(5,19)
Bagi hasil dari pajak bahan bakar kendaraan bermotor	353.773.399.000,00	392.777.768.000,00	(39.004.369.000,00)	(9,93)
Bagi Hasil dari pajak pengambilan dan pemanfaatan air Permukaan	795.522.000,00	729.030.000,00	66.492.000,00	9,12
Dana bagi hasil dari pajak rokok	39.026.892.235,00	37.967.204.744,00	1.059.687.491,00	2,79
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	557.097.679.235,00	625.517.671.744,00	(68.419.992.509,00)	(10,94)



L. Pendapatan Bagi Hasil Lainnya

Saldo realisasi Pendapatan Bagi Hasil Lainnya Pemerintah Kota Samarinda untuk periode TA 2024 sebesar Rp588.368.632.326,00 dan tahun 2023 sebesar Rp354.450.000.000,00, jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya, Pendapatan Bagi Hasil Lainnya tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp233.918.632.326,00 atau 65,99%.

M. Pendapatan Hibah

Saldo realisasi Pendapatan Hibah untuk periode TA 2024 sebesar Rp0,00 sedangkan untuk realisasi tahun 2023 sebesar Rp0,00.

N. Pendapatan Dana Darurat

Saldo realisasi Pendapatan Dana Darurat untuk periode TA 2024 sebesar Rp0,00 sedangkan untuk realisasi tahun 2023 sebesar Rp0,00.

O. Pendapatan Lainnya

Saldo realisasi Pendapatan Lainnya untuk periode TA 2024 sebesar Rp65.783.434.869,69 dan TA 2023 sebesar Rp426.290.844,00, jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya Pendapatan Lainnya TA 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp65.357.144.025,69 atau 15.331,59%. Pendapatan Lainnya berasal dari Pemegang Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara

5.5.1.2 ARUS KELUAR KAS

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi selama TA 2024 dan 2023 sebesar Rp2.882.629.332.069,92 dan Rp2.493.321.202.596,47, jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya Arus Keluar Kas Operasi mengalami kenaikan sebesar Rp389.308.129.473,45 atau 15,61%. Adapun rincian dari Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi sebagai berikut:

5.5. 11 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi TA 2024 dan 2023

(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Belanja Pegawai	1.134.351.571.605,57	974.299.843.648,33	160.051.727.957,24	16,43
Belanja Barang dan Jasa	1.467.837.125.933,35	1.358.181.894.105,16	109.655.231.828,19	8,07
Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
Hibah	274.570.433.806,00	159.288.078.635,00	115.282.355.171,00	72,37
Bantuan Sosial	5.260.947.258,00	368.750.000,00	4.892.197.258,00	1.326,70
Belanja Tak Terduga	609.253.467,00	1.182.636.207,98	(573.382.740,98)	(48,48)
Jumlah Arus Keluar Kas	2.882.629.332.069,92	2.493.321.202.596,47	389.308.129.473,45	15,61

A. Belanja Pegawai

Saldo realisasi Belanja Pegawai TA 2024 sebesar Rp1.134.351.571.605,57 dan TA 2023 sebesar Rp974.299.843.648,33. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya Belanja Pegawai mengalami kenaikan sebesar Rp160.051.727.957,24 atau 16,43%.



B. Belanja Barang dan Jasa

Saldo realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2024 sebesar Rp1.467.837.125.933,35 dan TA 2023 sebesar Rp1.358.181.894.105,16. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya Belanja Barang dan Jasa mengalami kenaikan sebesar Rp109.655.231.828,19 atau 8,07%.

C. Belanja Subsidi

Saldo realisasi Belanja Subsidi TA 2024 sebesar Rp0,00 dan TA 2023 sebesar Rp0,00.

D. Belanja Hibah

Saldo realisasi Belanja Hibah TA 2024 sebesar Rp274.570.433.806,00 dan TA 2023 sebesar Rp159.288.078.635,00, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya Belanja Hibah mengalami kenaikan sebesar Rp115.282.355.171,00 atau 72,37%.

E. Belanja Bantuan Sosial

Saldo realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2024 sebesar Rp5.260.947.258,00 dan TA 2023 sebesar Rp368.750.000,00, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya belanja bantuan sosial mengalami kenaikan sebesar Rp4.892.197.258,00 atau 1.326,70%.

F. Belanja Tak Terduga

Saldo realisasi Belanja Tak Terduga TA 2024 sebesar Rp609.253.467,00 dan TA 2023 sebesar Rp1.182.636.207,98, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, Belanja Tak Terduga mengalami penurunan sebesar Rp573.382.740,98 atau 48,48%.

5.5.1.3 ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi per 31 Desember tahun 2024 dan 2023 adalah surplus sebesar Rp2.292.649.208.453,98 dan Rp1.533.127.303.303,46 yang merupakan selisih surplus antara arus masuk kas dikurangi arus keluar kas, dengan uraian sebagai berikut:

5.5. 12 Aktivitas Operasi

(dalam satuan Rupiah)

Aktivitas Operasi	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Arus Masuk Kas	5.175.278.540.523,90	4.026.448.505.899,93	1.148.830.034.623,97	28,53
Arus Keluar Kas	2.882.629.332.069,92	2.493.321.202.596,47	389.308.129.473,45	15,61
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	2.292.649.208.453,98	1.533.127.303.303,46	759.521.905.150,52	49,54

Realisasi Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi TA 2024 adalah sebesar Rp2.292.649.208.453,98 yang merupakan selisih antara arus masuk kas dengan arus keluar kas, dan realisasi aktivitas operasi tahun 2023 sebesar Rp1.533.127.303.303,46 dibandingkan dengan tahun 2023 maka arus kas bersih dari aktivitas operasi tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp759.521.905.150,52 atau 49,54%.



5.5.2 ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI ASET NONKEUANGAN

Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Nonkeuangan, mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang.

Arus kas bersih dari Aktivitas Investasi Aset Nonkeuangan merupakan selisih antara Arus Masuk Kas dikurangi Arus Keluar Kas, dengan uraian sebagai berikut:

5.5.2.1 ARUS MASUK KAS

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi Aset Nonkeuangan selama TA 2024 dan 2023 sebesar Rp1.810.107.440,00 dan Rp520.785.371,00, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya Arus Masuk Kas mengalami kenaikan sebesar Rp1.289.322.069,00 atau 247,57%, dengan dirincikan sebagai berikut:

5.5. 13 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi Aset Nonkeuangan TA 2024 dan 2023

(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Penjualan Atas Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
Penjualan Atas Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00
Penjualan Atas Gedung & Bangunan	1.810.107.440,00	520.785.371,00	1.289.322.069,00	249,57
Jumlah Arus Masuk Kas	1.810.107.440,00	520.785.371,00	1.289.322.069,00	247,57

- Realisasi Pendapatan Penjualan Atas Tanah TA 2024 sebesar Rp0,00 dan TA 2023 sebesar Rp0,00.
- Realisasi Pendapatan Penjualan Atas Peralatan dan Mesin TA 2024 sebesar Rp0,00 dan TA 2023 sebesar Rp0,00.
- Realisasi Pendapatan Penjualan Atas Gedung dan Bangunan TA 2024 sebesar Rp1.810.107.440,00 dan TA 2023 sebesar Rp520.785.371,00, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya Penjualan Atas Gedung dan Bangunan mengalami kenaikan sebesar Rp1.289.322.069,00 atau 247,57%. Realisasi TA 2024 bersumber dari Penjualan/Cicilan Penjualan Rumah Dinas dan Penjualan Barang Bekas/Bongkahan.

5.5.2.2 ARUS KELUAR KAS

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi Aset Nonkeuangan selama TA 2024 dan 2023 sebesar Rp2.595.851.534.346 dan Rp1.946.638.601.701,21, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya Arus Keluar Kas mengalami kenaikan sebesar Rp649.212.932.644,79 atau 33,35% dengan rincian sebagai berikut:



5.5. 14 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi Aset Nonkeuangan TA 2024 dan 2023

(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Belanja Tanah	68.288.983.726,00	96.919.196.734,00	(28.630.213.008,00)	(29,54)
Belanja Peralatan dan Mesin	179.766.693.810,00	216.628.835.493,00	(36.862.141.683,00)	(17,02)
Belanja Gedung dan Bangunan	912.425.268.299,00	492.678.445.844,06	419.746.822.454,94	85,20
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.415.682.927.225,00	1.111.790.641.599,15	303.892.285.625,85	27,33
Belanja Aset Tetap Lainnya	19.363.811.286,00	18.471.632.031,00	892.179.255,00	4,83
Belanja Aset Lainnya	323.850.000,00	149.850.000,00	174.000.000,00	116,12
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,00	10.000.000.000,00	(10.000.000.000,00)	(100,00)
Jumlah Arus Keluar Kas	2.595.851.534.346,00	1.946.638.601.701,21	649.212.932.644,79	33,35

- Saldo realisasi Belanja Tanah TA 2024 sebesar Rp68.288.983.726,00 dan TA 2023 sebesar Rp96.919.196.734,00, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya Belanja Tanah mengalami penurunan sebesar Rp28.630.213.008,00 atau 29,54%.
- Saldo realisasi Belanja Peralatan dan Mesin TA 2024 sebesar Rp179.766.693.810,00 dan TA 2023 sebesar Rp216.628.835.493,00, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya Belanja Peralatan dan Mesin mengalami penurunan sebesar Rp36.862.141.683,00 atau 17,02%.
- Saldo realisasi Belanja Gedung dan Bangunan TA 2024 sebesar Rp912.425.268.299,00 dan TA 2023 sebesar Rp492.678.445.844,06, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya Belanja Gedung dan Bangunan mengalami kenaikan sebesar Rp419.746.822.454,94 atau 85,20%.
- Saldo realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2024 sebesar Rp1.415.682.927.225,00 dan TA 2023 sebesar Rp1.111.790.641.599,15, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan mengalami kenaikan sebesar Rp303.892.285.625,85 atau 27,33%.
- Realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya TA 2024 sebesar Rp19.363.811.286,00 dan TA 2023 sebesar Rp18.471.632.031,00, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya Belanja Aset Tetap Lainnya mengalami kenaikan sebesar Rp892.179.255,00 atau 4,83%.
- Realisasi Belanja Aset Lainnya TA 2024 sebesar Rp323.850.000,00 dan TA 2023 sebesar Rp149.850.000,00, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya Belanja Aset Lainnya mengalami kenaikan sebesar Rp174.000.000,00 atau 116,12%.
- Realisasi Penyertaan Modal Pemerintah Daerah TA 2024 sebesar Rp0,00 dan TA 2023 sebesar Rp10.000.000.000,00. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah mengalami penurunan sebesar Rp10.000.000.000,00 atau 100,00%.

5.5.2.3 ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS INVESTASI NONKEUANGAN

Arus kas bersih dari Aktivitas Investasi Aset Nonkeuangan meliputi Arus Masuk Kas dan Arus Keluar Kas yang dirinci sebagai berikut:



5.5. 15 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Nonkeuangan

(dalam satuan Rupiah)

Aktivitas Investasi	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Arus Masuk Kas	1.810.107.440,00	520.785.371,00	1.289.322.069,00	247,57
Arus Keluar Kas	2.595.851.534.346,00	1.946.638.601.701,21	649.212.932.644,79	33,35
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Nonkeuangan	(2.594.041.426.906,00)	(1.946.117.816.330,21)	(647.923.610.575,79)	33,29

Realisasi Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Nonkeuangan selama TA 2024 dan 2023 defisit sebesar Rp2.594.041.426.906,00 dan Rp1.946.117.816.330,21 jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp647.923.610.575,79 atau 33,29%.

5.5.3 ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN

Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan perubahan dalam jumlah dan komposisi utang dan piutang jangka panjang. Saldo Arus Kas bersih dari Aktivitas Pembiayaan TA 2024 dan TA 2023 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

5.5.4 ARUS KAS DARI AKTIVITAS NONANGGARAN

Aktivitas Nonanggaran adalah Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Kas yang tidak termasuk dalam Aktivitas Operasi, Investasi, dan Pembiayaan. Arus Kas dari Aktivitas Nonanggaran mencerminkan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Bruto yang tidak mempengaruhi Pendapatan, Beban, dan Pembiayaan Pemerintah. Penerimaan dan Pengeluaran Kas ini terjadi sehubungan dengan adanya potongan atau pungutan oleh Pemerintah Daerah atas Pembayaran yang dilakukannya. Uang yang dipungut atau dipotong dari pembayaran yang dilakukan Pemerintah ini bukan hak Pemerintah Daerah tetapi merupakan milik Pihak Ketiga. Arus Kas bersih dari Aktivitas Nonanggaran TA 2024 surplus sebesar Rp1.416.087,00 dan TA 2023 defisit sebesar Rp50.774.274,30, jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp52.190.361,30 atau 102,79%. Uraian arus masuk kas dan arus keluar kas sebagai berikut:

5.5. 16 Arus Kas dari Aktivitas Nonanggaran

(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Arus Masuk Kas	459.319.501.407,01	364.987.964.995,00	94.331.536.412,01	25,85
Arus Keluar Kas	459.318.085.320,01	365.038.739.269,30	94.279.346.050,71	25,83
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Nonanggaran	1.416.087,00	(50.774.274,30)	52.190.361,30	(102,79)

Realisasi Arus Masuk Kas bersih dari Aktivitas Nonanggaran TA 2024 dijelaskan sebagai berikut:

5.5.4.1 ARUS MASUK KAS

Saldo Arus Masuk Kas dari Aktivitas Nonanggaran TA 2024 sebesar Rp459.319.501.407,01 dan TA 2023 sebesar Rp364.987.964.995,00, jika dibandingkan



dengan tahun sebelumnya Arus Masuk Kas dari Aktivitas Nonanggaran mengalami kenaikan sebesar Rp94.331.536.412,01 atau 25,85% terdiri dari:

5.5. 17 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Nonanggaran TA 2024 dan 2023

(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	459.319.501.407,01	364.987.964.995,00	94.331.536.412,01	25,85
Jumlah Arus Masuk Kas	459.319.501.407,01	364.987.964.995,00	94.331.536.412,01	25,85

Arus Masuk Kas Tahun 2024 sebesar Rp459.319.501.407,01 merupakan penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) oleh BUD yang dipotong dari SP2D atau diterima secara tunai serta Saldo Rekening Bank Bendahara Pengeluaran SKPD atas transaksi yang belum di salurkan kepada penerima, terdiri dari:

5.5. 18 Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga

(dalam satuan Rupiah)

No	Uraian	Penerimaan PFK
1	Iuran Wajib Pegawai 8%	13.974.106.210,00
2	Iuran Jaminan Kesehatan PNS	3.250.519.979,00
3	Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	523.506.487,00
4	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	2.568.288,00
5	Iuran Jaminan Kematian PPPK	3.210.360,00
6	Iuran Jaminan Kesehatan 4%	1.972.233.978,00
7	Iuran Wajib Pegawai 1%	6.452.249.062,00
8	Taspen	13.796.301.177,00
9	Lainnya	85.569.734,00
10	Zakat	7.105.481,00
11	Pajak Pertambahan Nilai	301.679.822.307,07
12	Pajak Penghasilan Ps 22	5.261.833.018,90
13	PPH 21	55.904.547.740,72
14	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	28.599.842,00
15	Pajak Penghasilan Ps 23	5.371.787.373,32
16	Pajak Penghasilan Ps 25	85.000,00
17	Pajak Penghasilan Ps 4 (2)	51.003.499.180,00
18	Kas di Kas Lainnya Kec. Palaran (Kel. Handil Bhakti)	1.000.000,00
19	Kas di Kas Lainnya Kec. Samarinda Utara (Kel. Sempaja Utara & Kel. Sempaja Timur)	906.182,00
20	Kas di Kas Lainnya Kec. Samarinda Ulu	50.007,00
Jumlah Arus Masuk Kas		459.319.501.407,01

5.5.4.2 ARUS KELUAR KAS

Saldo Arus Keluar Kas dari Aktivitas Nonanggaran TA 2024 sebesar Rp459.318.085.320,01 dan TA 2023 sebesar Rp365.038.739.269,30, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya Arus Masuk Kas dari Aktivitas Nonanggaran mengalami kenaikan sebesar Rp94.279.346.050,71 atau 25,83%.



5.5. 19 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Nonanggaran

(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	459.318.085.320,01	365.038.739.269,30	94.279.346.050,71	25,83
Jumlah Arus Keluar Kas	459.318.085.320,01	365.038.739.269,30	94.279.346.050,71	25,83

Arus Keluar Kas dari aktivitas Nonanggaran berupa Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga sebesar Rp459.318.085.320,01.

5.5. 20 Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga

(dalam satuan Rupiah)

No	Uraian	Penerimaan PFK
1	Iuran Wajib Pegawai 8%	13.974.106.210,00
2	Iuran Jaminan Kesehatan PNS	3.250.519.979,00
3	Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	523.506.487,00
4	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	2.568.288,00
5	Iuran Jaminan Kematian PPPK	3.210.360,00
6	Iuran Jaminan Kesehatan 4%	1.972.233.978,00
7	Iuran Wajib Pegawai 1%	6.452.249.062,00
8	Taspen	13.796.301.177,00
9	Lainnya	85.569.734,00
10	Zakat	7.105.481,00
11	Pajak Pertambahan Nilai	301.679.822.307,07
12	Pajak Penghasilan Ps 22	5.261.833.018,90
13	PPH 21	55.904.547.740,72
14	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	28.599.842,00
15	Pajak Penghasilan Ps 23	5.371.787.373,32
16	Pajak Penghasilan Ps 25	85.000,00
17	Pajak Penghasilan Ps 4 (2)	51.003.499.180,00
18	Kas di Kas Lainnya Kel. Teluk Lerong Ilir	125.000,00
19	Kas di Kas Lainnya Kelurahan Simpang Tiga	371.902,00
20	Utang PFK BLUD	43.200,00
Jumlah Arus Keluar Kas		459.318.085.320,01

5.5.5 KENAIKAN/PENURUNAN KAS

Penurunan kas pada TA 2024 sebesar Rp301.390.802.365,02 dan realisasi 2023 terjadi kenaikan kas sebesar Rp413.041.287.301,05 bersumber dari:

f.



5.5. 21 Kenaikan dan Penurunan Kas

(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	2.292.649.208.453,98	1.533.127.303.303,46	759.521.905.150,52	49,54
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(2.594.041.426.906,00)	(1.946.117.816.330,21)	(647.923.610.575,79)	33,29
Arus Kas bersih dari Aktivitas Pendanaan	0,00	0,00	0,00	0,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	1.416.087,00	(50.774.274,30)	52.190.361,30	(102,79)
Kenaikan/Penurunan Kas	(301.390.802.365,02)	(413.041.287.301,05)	111.650.484.936,03	(27,03)

5.5.6 SALDO AWAL KAS

Saldo awal kas Pemerintah Kota Samarinda TA 2024 dan TA 2023 adalah sebesar Rp585.645.218.851,58 dan Rp998.648.523.355,63 jika dibandingkan realisasi tahun sebelumnya terjadi penurunan sebesar Rp413.003.304.504,05 atau 41,36%.

Saldo awal kas merupakan saldo Kas di Kas Daerah dan Kas yang berada di lingkup Pemerintah Daerah Kota Samarinda per 31 Desember 2024, dengan rincian sebagai berikut:

5.5. 22 Saldo Awal Kas

(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Saldo Akhir Kas di BUD	323.019.812.517,12	968.565.793.892,26	(645.545.981.375,14)	(66,65)
Setara Kas	250.000.000.000,00	0,00	250.000.000.000,00	100,00
Saldo Akhir Kas di BLUD	11.642.858.164,86	29.539.507.495,90	(17.896.649.331,04)	(60,59)
Saldo Akhir Kas di FKTP	895.840.628,60	420.792.826,17	475.047.802,43	112,89
Saldo Akhir Kas Bosnas	79.000.439,00	71.114.765,00	7.885.674,00	11,09
Kas di Kas Lainnya	540.102,00	51.314.376,30	(50.774.274,30)	(98,95)
Kas di bendahara Penerimaan	7.167.000,00	0,00	7.167.000,00	100,00
Saldo Awal Kas	585.645.218.851,58	998.648.523.355,63	(413.003.304.504,05)	(41,36)

5.5.7 KOREKSI SILPA

Saldo Koreksi Silpa di Pemerintah Kota Samarinda TA 2024 adalah sebesar Rp95.388.936,00 dan TA 2023 sebesar Rp37.982.797,00, jika dibandingkan realisasi tahun sebelumnya terjadi kenaikan sebesar Rp57.406.139 atau 151,14%.



5.5. 23 Koreksi Silpa

(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Koreksi Silpa	95.388.936,00	37.982.797,00	57.406.139,00	151,14
Jumlah	95.388.936,00	37.982.797,00	57.406.139,00	151,14

Jumlah Koreksi Silpa di Pemerintah Kota Samarinda Per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp95.388.936,00 yang terdiri dari:

1. Koreksi tambah Kas BOK tahun 2024 di Dinas Kesehatan Rp6.008.920,00.
2. Koreksi tambah Kas BOSNAS Swasta tahun 2024 di Dinas Pendidikan sebesar Rp89.380.016,00.

5.5.8 SALDO AKHIR KAS

Saldo akhir kas di Pemerintah Kota Samarinda TA 2024 adalah sebesar Rp284.349.805.422,56 dan TA 2023 sebesar Rp585.645.218.851,58, jika dibandingkan realisasi tahun sebelumnya terjadi penurunan sebesar Rp301.295.413.429,02 atau 51,45%.

Saldo Akhir Kas tersebut adalah jumlah kenaikan/penurunan Kas ditambah Saldo Awal Kas di Pemerintah Kota Samarinda dengan rincian sebagai berikut:

5.5. 24 Saldo Akhir Kas

(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Kenaikan/(Penurunan) Kas	(301.390.802.365,02)	(413.041.287.301,05)	111.650.484.936,03	(27,03)
Saldo Awal Kas	585.645.218.851,58	998.648.523.355,63	(413.003.304.504,05)	(41,36)
Koreksi Silpa	95.388.936,00	37.982.797,00	57.406.139,00	151,14
Saldo Akhir Kas	284.349.805.422,56	585.645.218.851,58	(301.295.413.429,02)	(51,45)

5.5. 25 Rincian Saldo Akhir Kas 2024 dan 2023

(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Saldo Akhir Kas di BUD	269.101.732.918,17	323.019.812.517,12	(53.918.079.598,95)	(16,69)
Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	3.990.000,00	7.167.000,00	(3.177.000,00)	(44,33)
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	22.790.530,00	0,00	22.790.530,00	100,00
Saldo Akhir Kas di BLUD	13.872.667.628,14	11.642.858.164,86	2.229.809.463,28	19,15
Saldo Akhir Kas di BOSNAS	355.149.379,00	79.000.439,00	276.148.940,00	349,55
Saldo Akhir Kas di FKTP	991.518.778,25	895.840.628,60	95.678.149,65	10,68
Saldo Akhir Kas di Kas Lainnya	1.956.189,00	540.102,00	1.416.087,00	262,19
Saldo Kas Setara Kas	0,00	250.000.000.000,00	(250.000.000.000,00)	(100,00)
Saldo Akhir Kas	284.349.805.422,56	585.645.218.851,58	(301.295.413.429,02)	(51,45)



Jumlah Saldo Akhir Kas di Pemerintah Kota Samarinda Per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp284.349.805.422,56 yang terdiri dari:

1. Saldo Kas di Kas Daerah sebesar Rp269.101.732.918,17;
2. Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan Rp3.990.000,00;
3. Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran Rp22.790.530,00;
4. Saldo Kas di BLUD sebesar Rp13.872.667.628,14;
5. Saldo Kas di BOSNAS sebesar Rp355.149.379,00;
6. Saldo Kas di FKTP sebesar Rp991.518.778,25;
7. Saldo Akhir Kas di Kas Lainnya sebesar Rp1.956.189,00, terdiri dari:
 - a) Saldo Kas di Kas Lainnya Kecamatan Samarinda Ulu sebesar Rp50.007,00;
 - b) Saldo Kas Lainnya Kelurahan Handil Bhakti sebesar Rp1.000.000,00;
 - c) Saldo Kas Lainnya Kelurahan Sempaja Utara sebesar Rp806.182,00;
 - d) Saldo Kas Lainnya Kelurahan Sempaja Timur sebesar Rp100.000,00.

f.



5.5 PENJELASAN POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas adalah laporan yang terdiri dari saldo akhir tahun lalu yang menjadi saldo awal Ekuitas, Surplus atau Defisit yang berasal dari operasional tahun berjalan serta Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar. Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan yang dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Adapun penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas tahun 2024 dapat diuraikan sebagai berikut:

5.6.1 EKUITAS AWAL

Ekuitas Awal merupakan kekayaan bersih pemerintah yang berasal dari selisih antara Aset dan Kewajiban Pemerintah yang berasal dari tahun sebelumnya. Ekuitas awal tahun 2024 sebesar Rp19.910.390.248.015,78 mengalami penurunan sebesar Rp1.197.723.498.606,62 atau 5,67% jika dibandingkan dengan ekuitas awal tahun 2023 sebesar Rp21.108.113.746.622,40. Saldo Ekuitas Awal Pemerintah Kota Samarinda yang merupakan nilai akhir tahun sebelumnya sebesar Rp19.910.390.248.015,78 yang terdiri dari:

5.6. 1 Saldo Ekuitas Awal

No.	Uraian	Realisasi 2023
1.	Ekuitas Awal 2023	21.108.113.746.622,40
2.	Surplus/Defisit 2023 - LO	911.133.861.677,92
3.	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar 2023	(2.108.857.360.284,54)
Jumlah		19.910.390.248.015,78

5.6.2 SURPLUS/DEFISIT

Surplus/Defisit merupakan saldo yang berasal dari selisih antara Pendapatan-LO dan Beban selama tahun berjalan. Surplus/Defisit tahun 2024 sebesar Rp830.705.924.229,48 mengalami penurunan sebesar Rp80.427.937.448,44 atau 8,83% jika dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp911.133.861.677,92. Saldo Surplus/Defisit Pemerintah Kota Samarinda tahun 2024 sebesar Rp830.705.924.229,48 dengan rincian sebagai berikut:

5.6. 2 Saldo Surplus/Defisit – LO

No.	Uraian	Realisasi 2024	
1	Pendapatan		4.902.799.986.421,05
	PAD	1.115.335.664.206,36	
	Pendapatan Transfer	3.656.652.754.326,00	
	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	130.811.567.888,69	
2	Beban		4.089.123.019.235,58
	Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasi		813.676.967.185,47



No.	Uraian	Realisasi 2024	
3	Surplus /Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		17.638.210.511,01
	Suplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa		831.315.177.696,48
4	POS LUAR BIASA		(609.253.467,00)
	Pendapatan Luar Biasa		
	Beban Luar Biasa	(609.253.467,00)	
5	SURPLUS/DEFISIT		830.705.924.229,48

5.6.3 DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar tahun 2024 sebesar Rp7.337.098.113,33 mengalami penurunan sebesar Rp2.116.194.458.397,87 atau 100,35% jika dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar (Rp2.108.857.360.284,54). Dampak kumulatif karena koreksi yang disebabkan oleh perubahan kebijakan atau kesalahan mendasar yang terjadi pada tahun sebelumnya dapat dirinci sebagai berikut:

5.6. 3 Saldo Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

No	Uraian	Nilai nominal
1	Koreksi Ekuitas - Aset Lancar	41.268.936,00
2	Koreksi Ekuitas - Piutang	(2.110.369.265,00)
3	Koreksi Ekuitas - Investasi	(42.777.019.729,00)
4	Koreksi Ekuitas - Aset Tetap	51.415.124.757,62
5	Koreksi Ekuitas - Aset Lainnya	(1.574.667,00)
6	Koreksi Ekuitas - Kewajiban	769.668.080,71
Jumlah		7.337.098.113,33

1. Koreksi Ekuitas Lainnya - Aset Lancar Sebesar Rp41.268.936,00 dengan rincian:
Kas BOSNAS yang merupakan koreksi sisa Kas BOSNAS Sekolah Swasta - Reguler tahun 2023 pada Dinas Pendidikan sebesar Rp89.380.016,00 dan Kas BLUD Rp6.008.920,00 pada Dinas Kesehatan. Terdapat koreksi kurang Persediaan pada Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata sebesar Rp54.120.000,00.
2. Koreksi Ekuitas Lainnya – Piutang Sebesar Rp 2.110.369.265,00 merupakan koreksi kurang atas Piutang Pajak Daerah pada Badan Pendapatan Daerah.
3. Koreksi Ekuitas - Investasi merupakan Penyertaan Modal Kepada BUMD terdapat koreksi kurang sebesar Rp42.777.019.729,00.
4. Koreksi Ekuitas - Aset Tetap Rp51.415.124.757,62 dengan rincian:
Koreksi kurang Aset Tetap sebesar Rp16.861.854.200,03 dan koreksi tambah sebesar Rp68.276.978.957,65.
5. Koreksi Ekuitas - Aset Lainnya Sebesar Rp1.574.667,00 dengan rincian:
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud terdapat koreksi kurang sebesar Rp80.000,00 pada Sekretariat Daerah dan sebesar Rp8.095.000,00 pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.

P.



Terdapat koreksi tambah Aset Lainnya sebesar Rp333,00 pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian, serta pada Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata sebesar Rp6.600.000,00.

6. Koreksi Ekuitas - Kewajiban Sebesar Rp769.668.080,71 dengan rincian:
- Koreksi Utang Belanja sebesar Rp98.989.800,00 yang merupakan penambahan atas utang tahun sebelumnya pada Dinas Perdagangan.
- Koreksi kurang utang sebesar Rp868.657.880,71 berdasarkan surat pernyataan dengan rincian:
- Koreksi kurang Utang pada Dinas Kesehatan sesuai surat pernyataan sebesar Rp757.582.612,71.
 - Koreksi kurang Utang sesuai surat pernyataan pada Kecamatan Samarinda Ulu sebesar Rp1.051.992,00.
 - Koreksi kurang Utang sesuai surat pernyataan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Rp4.366.500,00,00.
 - Koreksi kurang Utang sesuai surat pernyataan pada Dinas Perdagangan Rp34.202.500,00.
 - Koreksi kurang Utang sesuai surat pernyataan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Rp109.158,00.
 - Koreksi kurang Utang sesuai surat pernyataan pada Sekretariat DPRD Rp2.000.000,00.
 - Koreksi kurang Utang sesuai surat pernyataan pada Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp69.345.118,00.

5.6.4 EKUITAS AKHIR

Ekuitas Akhir tahun 2024 sebesar Rp20.748.433.270.358,59 mengalami kenaikan sebesar Rp838.043.022.342,80 atau 4,21% jika dibandingkan dengan Ekuitas Akhir tahun 2023 sebesar Rp19.910.390.248.015,78. Nilai Pada Ekuitas Akhir merupakan saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp20.748.433.270.358,59 dengan rincian sebagai berikut:

5.6. 4 Ekuitas Akhir

No.	Uraian	Realisasi 2024
1.	Ekuitas Awal 2024	19.910.390.248.015,78
2.	Surplus/Defisit 2024 - LO	830.705.924.229,48
3.	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar 2024	7.337.098.113,33
Jumlah		20.748.433.270.358,59



BAB 6

PENGUNGKAPAN

LAINNYA

LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2024



BAB VI PENGUNGKAPAN LAINNYA

6.1. INFORMASI KASUS HUKUM PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

Pemerintah Kota Samarinda menghadapi beberapa kasus hukum atas Aset yang dimiliki oleh pemerintah Kota Samarinda yang memungkinkan terjadinya utang terhadap pihak ketiga dengan rincian sebagai berikut:

No	Perkara	Penggugat	Tergugat	Obyek gugatan	Status/Posisi Saat ini	tuntutan	Keterangan	Tanggal pendaftaran
1.	19/Pdt. G.2024/ PN.Smr	La Ura	1. Metaria Tjokro Dkk. (Para Tergugat) 2. Bambang Sudarsono Dkk. (Para Turut Tergugat) Kalima ntan Timur 3. Camat Samarinda Ulu (Turut Tergugat VI) 4. Lurah Air Putih (Turut Tergugat VII)	Sengketa terkait Kepemilikan Lahan seluas ± 5.711 M ² yang terletak di Jalan Ring Road antara Penggugat dengan Para Pihak Tergugat	Putusan 14 November 2024	Meminta Para Pihak Tergugat untuk menyerahkan Pjek Sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong tanpa adanya barang apapun didalamnya serta membayar ganti kerugian materil sebesar Rp. 1.048.000.000,- (Satu Milyar Empat Puluh Delapan Juta Rupiah)		Senin, 29 Januari 2024
2.	29/Pdt. G.2024/ PN.Smr	Herry Wiyono	1. Asni Ramli (Tergugat I) 2. Camat Sungai Kunjang (Turut Tergugat)	Sengketa terkait Kepemilikan Lahan dan Bangunan yang terletak di Jalan Revolusi Rt. 031 Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda Prov. Kaltim antara Penggugat dan Pihak Tergugat	Putusan 13 November 2024	Meminta Para Pihak Tergugat untuk menyerahkan Pjek Sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong tanpa adanya barang apapun didalamnya serta membayar ganti kerugian materil sebesar Rp. 1.048.000.000,- (Satu Milyar Empat Puluh Delapan Juta Rupiah)	Pengadilan Negeri Samarinda	Rabu, 27 Februari 2024
3.	44/Pdt. G.2024/ PN.Smr	M. Yourdan Zainal	1 Walikota Samarinda	Sengketa terkait kepemilikan sebidang tanah seluas 7.200 M ² yang dahulu terletak di Jalan Rapak Bamban RT. 21 Kec. Samarinda Ilir dan sekarang Jalan Kapten Soedjono RT. 21 Gang Atta Kelurahan Sungai Kapih Kec. Sambutan yang diklaim kepemilikannya baik oleh Pihak Penggugat maupun oleh Pihak Tergugat	Putusan Tanggal 28 Agustus 2024	Meminta agar tanah yang menjadi Objek Sengketa dengan luas 7.200 M ² dinyatakan sebagai Sah milik Penggugat berikut dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas tanah tersebut	Pengadilan Negeri Samarinda	Senin, 04 Maret 2024
4.	43/Pdt. G/2024/ PN.Smr	Baktir	1 PT. Inti Cakrawala Citra 2. Andy Kurniawan 3. Lurah Teluk Lerong Ilir 3. Pemerintah Kota Samarinda (T.T VIII)	Sebidang Tanah dengan Luas 1.702 m2, terletak di jl A.W. Syahrani, Rt. 23, Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara	Minutasi	Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar kerugian kepada PENGUGAT sekaligus, tunai dan seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Inkracht Van Gewijsjde)	Pengadilan Negeri Samarinda	Senin, 04 Maret 2025



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

CATATAN UNTUK LAPORAN KEUANGAN

UNTUK YANG TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2024



No	Perkara	Penggugat	Tergugat	Obyek gugatan	Status/Posisi Saat ini	tuntutan	Keterangan	Tanggal pendaftaran
5.	58/Pdt. G/2024/ PN.Smr	Hilda selaku perwakilan Ahli Waris Alm. Djamsyah	1. Sukransyah (Tergugat) Kalimantan Timur 2. Sulaiman (Turut Tergugat I) 3. Ketua RT. 16 Kel. Loa Bakung (Turut Tergugat III)	Sengketa terkait Kepemilikan Lahan seluas ± 200 M ² yang terletak di Jalan Jakarta Rt. 81 Kelurahan Loa Bakung Kecamatan Sungai Kunjang yang terjadi antara Penggugat dengan Pihak Tergugat	Menunggu Sidang Penetapan Perdamaian	Meminta agar tanah yang menjadi Objek Sengketa dengan seluas ± 200 M ² dinyatakan sebagai Sah milik Penggugat berikut dengan Surat-Surat Tanahnya, dan meminta	Pengadilan Negeri Samarinda	Selasa, 02 April 2024
			4.Camat Sungai Kunjang (Turut Tergugat IV)					
6.	75/Pdt. G/2024/ PN.Smr	Soejono Sulistio	1. Ahmad Faisal (T.I) 2. Asnawiyah Dkk. (T II) 3. Elisabeth Wahyuni (T. III) 4. Andreas (T. IV) 5. Walikota Samarinda (T. V)	Menyatakan Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action) dari Pihak Penggugat tidak memenuhi syarat sehingga tidak dapat diterima	Putusan Sela	Meminta agar tanah yang menjadi Objek Sengketa berdasarkan SHM No 439 Kel. Bukuan dinyatakan sebagai Sah milik Penggugat berikut menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi dengan nilai sebesar ± Rp. 11.000.000.000,- (Sebelas milyar rupiah)	Pengadilan Negeri Samarinda	Jumat, 26 April 2024
7.	84/Pdt. G/2024/ PN Smr	Tommy Menwengkag	1. Camat Samarinda Utara (TT) 2. Camat Samarinda Ulu (TT) 3. Lurah Sempaja Utara (TT) 4. Lurah Air Hitam (TT)	tanah, beralamat di Jalan H.M. Ardans (Ring Road III) RT. 28 (secara fisik terletak atau berada didepan Kantor Pengacara Sudung Sinaga, S.H) semula beralamat di Kelurahan Sempaja Utara, Kecamatan Samarinda Utara, dan sekarang berubah menjadi Kelurahan Air Hitam. Kecamatan Samarinda Ulu. Kota Samarinda. Provinsi Kalimantan Timur, seluas 5.800 M2	Putusan	Meminta agar menyerahkan Tanah Objek sengketa kepada Penggugat sesuai Sertifikat Hak Milik nomor. 4694, dengan luas tanah 5.800 M2 atas nama Penggugat (Tommy Menwengkag)dan membayar Ganti Rugi baik Materiil maupun Immateriil kepada Penggugat	Pengadilan Negeri Samarinda	Rabu, 08 Mei 2024
8.	85/Pdt. G/2024/ PN Smr	Agus Priyono,Dkk	1. RINDA RIANA NUR binti DARWIS 2. Darwis bin GUSTI SOHOR	1. Lurah Sempaja Barat 2. Camat Samarinda Utara 3. Kepala Kantor Pertanahan Kota Samarinda	Sengketa sebidang tanah -+ 250 meter 2	Minutasi	Tergugat membayar kerugian materiil kepada penggugat I dan Penggugat II sebesar Rp. 600.000.000,- dan kerugian immaterial sebesar Rp. 850.000.000,-	
	95/Pdt. G/2024/ PN Smr	H. SUTARNO	1. Lurah Handil Bakti (Turut Tergugat I) 2. Camat Palaran (Turut		Putusan Sela		Pengadilan Negeri Samarinda	Rabu, 22 Mei 2024

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN ADALAH BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI LAPORAN KEUANGAN



magnificat
SAMARINDA

344



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
CATATAN UNTUK LAPORAN KEUANGAN
UNTUK YANG TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2024



No	Perkara	Penggugat	Tergugat	Obyek gugatan	Status/Posisi Saat ini	tuntutan	Keterangan	Tanggal pendaftaran
			Tergugat II)					
10.	108/Pdt. G/2024/ PN Smr	Didik Purna Irawan	1. Kecamatan Sambutan (T.T I) 2. Kelurahan Sambutan (T.T. II) 3. Kantor Pertanahan Samarinda (T.T. VI)		Persidangan	mengembalikan uang pembelian dan mengganti biaya renovasi objek sengketa dengan total seluruhnya sejumlah Rp207.150.000,00 (dua ratus tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah) secara tanggung renteng kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus;	Pengadilan Negeri Samarinda	Kamis, 6 Juni 2024
11.	119/Pdt. G/2024/ PN Smr	Arjudin	1. EDOARDO Lolang 2. Louise Indira Ian Rachman 3. Kelurahan Lok Bahu (T.I) 4. Camat Sungai Kunjang (T. II)	Sebidang tanah seluas 2.050 M2 (Dua Ratus Lima Puluh Meter Persegi) yang terletak di Jalan Baru, RT. XV/ Jl. Nusyirwan Ismail (Ringroad II Samarinda), Kelurahan Lok Bahu, Kecamatan Samarinda Ulu	Minutasi/ Persidangan	Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara	Pengadilan Negeri Samarinda	Senin, 10 Juni 2024
12.	119/Pdt. G/2024/ PN Smr	Bakri	1. PT. Inti Cakrawala Citra 2. Andy Kurniawan 3. Pemerintah Kota Samarinda (T.T. VIII)	Tanah seluas + 1.702 m2 (seribu tujuh ratus dua meter persegi), tercatat atas nama PENGUGAT, yang terletak di Jl. A.W. Syahrani RT 23 Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda utara, Kota Samarinda	Minutasi	Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar kerugian kepada PENGUGAT sekaligus, tunai dan seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Inkracht Van Gewisjde) Kerugian Material Rp. 23.185.000.000,-	Pengadilan Negeri Samarinda	Senin, 24 Juni 2024
13.	165/Pdt. G/2024/ PN.Smr	PT INDO PERKASA	1. PT Etam Manunggal Jaya (T) 2. Camat Loa Janan (T.T.I)	Tanah milik Penggugat yang terletak di Dusun Tani Jaya RT. 27, Desa Batuah, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur berdasarkan	Minutasi	Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi atas kerugian materiil Penggugat sebesar Rp5.413.830.043,- (lima miliar empat ratus tiga belas juta delapan ratus tiga puluh ribu empat puluh tiga Rupiah). Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi atas kerugian immateriil Penggugat sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah).	Pengadilan Negeri Samarinda	Rabu, 14 Agustus 2024

f.



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
CATATAN UNTUK LAPORAN KEUANGAN
UNTUK YANG TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2024



No	Perkara	Penggugat	Tergugat	Obyek gugatan	Status/Posisi Saat ini	tuntutan	Keterangan	Tanggal pendaftaran
14.	174/Pdt. G/2024/ PN.Smr	1.SRI DARIYAH 2. DARIYANI 3. JUMILAH 4.SUPRIYAN TO 5.RIRIH BARIYAH 6.YUSFIN ISDAYANA 7.FAJRIYAN SAH NUR ROHMAN	1. FRANSISCO HAM (T.I) 2. INDRAWATY JUNITA HAM (T.II) 3. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. PEMERINTAH KOTA SAMARINDA Cq. CAMAT KECAMATAN PALARAN (TT)	PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. PEMERINTAH KOTA SAMARINDA Cq. CAMAT KECAMATAN PALARAN (TT)	-	-	Sengketa Wanprestasi atas Pembelian Tanah Kavling Pergudangan yang terletak di Jalan Ir. Sutami yang dikelola dan diperjualbelikan oleh Perumda Varia Niaga atas dasar penunjukan dari Pemerintah Prov. Kaltim dan Pemerintah Kota Samarinda	
15.	188/Pdt. G/2024/ PN.Smr	SAIMAH	1. LURAH MUGIREJO 2. CAMAT SUNGAI PINANG	Sebidang Tanah dengan Luasan 5.500 M2 (Panjang 50 M2 - 100 M2 dan Lebar 50 M2) yang terletak di Gang. Imam, Jl. Perjuangan, No.07 Rt.37 , Kelurahan Mugirejo,Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda., Provinsi Kalimantan Timu	Minutasi	Menghukum Para Tergugat membayar ganti rugi secara tanggung renteng kepada Penggugat kerugian material Rp. 2.700.000.000,- dan Immaterial Rp. 2.000.000,- setiap perhari keterlambatan sejak diputuskannya perkara	Pengadilan Negeri Samarinda)	Lamis, 19 September 2024
16.	204/Pdt. G/2024/ PN.Smr	1. PT. Davindo Jaya Mandiri, yang diwakili oleh Direktur Utamanya David Effend Kansil, S.H., M.Kn	Walikota Samarinda	-	Persidangan	Tergugat yang belum membayar sisa harga kavling tanah matang hak Penggugat dari Perjanjian Kerjasama Pemesanan Kavling Tanah Matang tahap IV antara Penggugat dengan Tergugat seluas ± 30 Ha yang nilai kontraknya sebesar Rp. 43.500.000.000,- (empat puluh tiga miliar lima ratus juta rupiah) yaitu seluas ± 17,64 Ha dengan harga sebesar Rp. 25.250.000.000,- (dua puluh lima miliar dua ratus lima puluh juta rupiah)	Pengadilan Negeri Samarinda	Kamis, 3 Oktober 2024

P.



No	Perkara	Penggugat	Tergugat	Obyek gugatan	Status/Posisi Saat ini	tuntutan	Keterangan	Tanggal pendaftaran
17.	216/Pdt. G/2024/ PN.Smr	1. Muhammad Noor 2. Siti Noor Hasanah 3. M.Rizali Noor HAW 4. M.Syarifudin Noor 5. M.Riduansyah 6. Muhammad Supiansyah	1. Wali Kota Samarinda 2. Kepala Kantor Pertanahan Kota Samarinda 3. Camat Sungai Pinang	Sebidang Tanah beralamat aPasar Segiri dengan Luas54.090 M2	Persidangan	Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi dengan rincian sebagai berikut Ganti rugi secara materiil : Harga tanah permeter persegi saat ini X luas tanah terpakai = 10.000.000 x 54.000 M2 = Rp.540.000.000.000 (lima ratus empat puluh milyar rupiah); Ganti rugi Moril sebesar Rp.5.000.000.000, Sehingga total keseluruhan yang harus dibayar yaitu kerugian Materiil sebesar Rp.540.000.000.000(lima ratus empat puluh milyar rupiah) jika ditambah kerugian Moril sebesar Rp.5.000.000.000, maka menjadi Rp.545.000.000.000(lima ratus empat puluh lima milyar rupiah) harus dibayar seketika dan lun		Kamis, 24 Oktober 2024
18.	225/Pdt. G/2024/ PN.Smr	Saimah	1.AGUS PERDANA MULIA 2.MUHAMMAD HAFIDZ KETAREN 3.SUNARTO 4.PUJIONO 5.TRI WAHYUNI 6.SAWERDI 7.YASMINTO 8.ARIF SAIFUL ANWAR 9.RUSMIATI (AHLI WARIS ARAS ROMANSYA) 10.RAHMI (AHLI WARIS ARAS ROMANSYA) 11.RAHMA (AHLI WARIS ARAS ROMANSYA) 12.MARYONO 13.SUPRAFTO 14.ZULKIPLI 15.WITO 16.DINA RUSMINA 17.NANIK AKHMADI	Sebidang Tanah dengan Luasan 5.500 M?2; (Panjang 50 M?2; - 100 M?2; dan Lebar 50 M?2;) yang terletak di Gang Imam, Jl. Perjuangan, Rt.38 Kelurahan Mugirejo,Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda., Provinsi Kalimantan Timur	Persidangan	Tergugat membayarkan ganti rugi kepada Penggugat secara materiil dan immateriil Materi : Rp. 2.600.000.000,- (Dua Milyar Enam Ratus Juta Rupiah) dan Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) senilai Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) setiap 1 (Satu) hari keterlambatan pembayaran sejak diputusnya perkara in		

P.



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
CATATAN UNTUK LAPORAN KEUANGAN
UNTUK YANG TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2024



No	Perkara	Penggugat	Tergugat	Obyek gugatan	Status/Posisi Saat ini	tuntutan	Keterangan	Tanggal pendaftaran
19.	228/Pdt. G/2024/ PN.Smr	NETHENUS AJAN	1. Walikota Samarinda 2.SMP NEGERI 30 PAMPANG 3.DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 4.BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.KEPALA ADAT BUDAYA PAMPANG	Tanah sengketa yang terletak dahulu RT. 03, Kelurahan Sungai Siring, Sekarang RT.03 Pampang Kelurahan Budaya Pampang, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda-Kalimantan Timur yang berukuran Luas:	Persidangan	Jumlah Kerugian terhadap Materiil dan Immateriil adalah sebagai berikut : (NGR =Materiil Rp. 3.266.550.000;+immateri al Rp.4.648.500.000 yaitu Total menjadi: Rp. 7.915.050.000 ; (tujuh milliard sembilan ratus lima belas juta lima puluh ribu rupiah).	Pengadilan Negeri Samarinda	Jumat, 01 November 2024
20.	231/Pdt. G/2024/ PN.Smr	1.RUSLIANS YAH 2.FARIDAH AMIR 4.MISNAWATI 5.SITI NASAROH	1.PT. MENUMBAR KALTIM 2.KELURAHAN SUNGAI KAPIH	sebidang tanah yang terletak dahulu di Jalan H.M.Saleh Arsyad RT.08, Kelurahan Sungai Kapih, Kecamatan Samarinda Ilir, Daerah Tingkat II Kodya Samarinda, sekarang Jalan Peternakan RT.08, Kelurahan Sungai Kapih, Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda	Persidangan	enghukum Tergugat I untuk membayar total kerugian materiil secara keseluruhan, yakni sebesar Rp. 20.428.500.000,- + Rp. 6.600.000.000,- = Rp. 27.028.500.000,- (dua puluh tuju milyar dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) kepada Para Penggugat dan Immateriil Rp. 10.000.000.000	Pengadilan Negeri Samarinda	Kamis, 7 November 2024
21.	239/Pdt. G/2024/ PN.Smr	G. Dyah Lestari Wahyuningty as KSPA, SH., MH	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SAMARINDA		Minutasi	Para Tergugat untuk membayar kerugian Materiil maupun imateriil kepada Penggugat sebesar Rp. 450.000.000,-, yang harus dibayarkan oleh Tergugat secara tunai seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Inkracht Van Gewisjde) ;	Pengadilan Negeri Samarinda	Senin, 18 November 2024
22.	242/Pdt. G/2024/ PN.Smr	1. NETTY FAJRIYAH binti H. Majeri 2. EVI NORMAYANTI binti H. Majeri 3. NANDA EFRIAN NOOR bin H. Majeri	1. MUHAMMAD SYAFRUDIN Bin H. MUHAMMAD SYAFRIL 2. HARIANI 3. HELDA FITRIANA binti yuliansyah 4. HELMANIA PUTRI RAMADINA binti yuliansyah 5. NOR HIDAYATI Binti H. MUHAMMAD STAFRIL 6.NOR ARISMA Binti H. Muhammad Syafril 7. H. MUHAMMAD AGUS MELIANSYAH Bin H. MUHAMMAD		Persidangan	-	Pengadilan Negeri Samarinda	Rabu, 22 November 2024

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN ADALAH BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI LAPORAN KEUANGAN



magnificent
SAMARINDA

348



No	Perkara	Penggugat	Tergugat	Obyek gugatan	Status/Posisi Saat ini	tuntutan	Keterangan	Tanggal pendaftaran
			SYAFRIL 8. H. AMIR Bin MAMAD 9. H. DARLAN IBRAHIM bin Ibrahim 10. HADI bin Andi Kasan					
23.	256/Pdt. G/2024/ PN.Smr	FATIMAH	1. HERI SUSANTO. G 2. Ketua Kelompok Tani Tunas Harapan KM.8 Loa Janan 3. Camat Palaran 4. Lurah Kelurahan Simpang Pasir 5. Ketua RT. 02, Kel. Simpang Pasir	Tanah yang terletak di Kampung Tani Tunas Harapan, KM. 8, Desa Loa Janan Ulu, Kec. Loa Janan (dahulu) sekarang Jalan Tanjung Sari, RT. 02, Kel. Simpang Pasir, Kec. Palaran, Kota Samarinda, Prov. Kalimantan Timur, dengan Luas ± 4,4 Ha (kurang lebih empat koma empat hektar) atau ± 44921.90 M ² ; (kurang lebih empat puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh satu koma sembilan puluh meter persegi) dengan ukuran Panjang ± 440,55 M (kurang lebih empat ratus empat puluh koma lima puluh lima meter) dan Lebar ± 100 M (kurang lebih seratus meter)	Persidangan	Tergugat ataupun pihak lain yang mengklaim sebagian atau seluruhnya atas tanah milik Penggugat tersebut untuk menyerahkan/ mengembalikan kepada Penggugat tanpa syarat apapun, apabila Tergugat atau pihak lain tersebut tidak mau menyerahkannya, dapat menggunakan alat Negara dalam proses penyerahannya walaupun ada upaya Hukum verzet, banding, kasasi atau upaya Hukum lainnya dari Tergugat atau pun pihak lain	Pengadilan Negeri Samarinda	Selasa, 10 Desember 2024

P.



BAB 7

PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

**LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**



BAB VII PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

1. Domisili Entitas

Pemerintah Kota Samarinda dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan, Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820 sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820). Ibukota dan kedudukan Pemerintah Kota di Samarinda.

2. Penjelasan mengenai sifat operasi entitas dan kegiatan pokoknya

Pemerintah Kota Samarinda merupakan organisasi Pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di daerah, sebagai bagian dari pemerintah pusat. Selain menyelenggarakan kewenangannya sendiri Pemerintah Kota Samarinda juga menyelenggarakan kewenangan pemerintah pusat yang dilimpahkan ke daerah baik yang melalui desentralisasi maupun tugas pembantuan.

Sesuai dengan karakteristik utama/dasar pemerintahan daerah, Pemerintah Kota Samarinda menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mensejahterakan rakyat melalui serangkaian kebijakan, program dan kegiatan.

3. Pemerintah Kota Samarinda melakukan perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 dalam rangka oprimalisasi, efektivitas, dan efisiensi dalam pelaksanaan urusan pemerintahan di Kota Samarinda. Peraturan mengenai susunan perangkat daerah diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah diselenggarakan dengan berasaskan:

- a. Intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi daerah;
- b. Efisiensi;
- c. Efektivitas;
- d. Pembagian habis tugas;
- e. Rentang kendali;
- f. Tata kerja yang jelas; dan
- g. Fleksibilitas.

Perangkat daerah pada Pemerintah Kota Samarinda terdiri dari:

- 1) Sekretariat Daerah;
- 2) Sekretariat DPRD;
- 3) Inspektorat;
- 4) Dinas Daerah
 - a) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 - b) Dinas Kesehatan
 - c) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - d) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
 - e) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
 - f) Satuan Polisi Pamong Praja



- g) Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
- h) Dinas Tenaga Kerja
- i) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- j) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- k) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
- l) Dinas Lingkungan Hidup
- m) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- n) Dinas Perhubungan
- o) Dinas Komunikasi dan Informatika
- p) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian
- q) Dinas Perdagangan
- r) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- s) Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
- t) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
- u) Dinas Perikanan
- 5) Badan Daerah
 - a) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Riset dan Inovasi Daerah
 - b) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
 - c) Badan Pendapatan Daerah
 - d) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 - e) Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 - f) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- 6) Kecamatan
 - (1) Kecamatan Palaran
 - (2) Kecamatan Samarinda Seberang
 - (3) Kecamatan Samarinda Ulu
 - (4) Kecamatan Samarinda Ilir
 - (5) Kecamatan Samarinda Utara
 - (6) Kecamatan Sungai Kunjang
 - (7) Kecamatan Sambutan
 - (8) Kecamatan Sungai Pinang
 - (9) Kecamatan Samarinda Kota
 - (10) Kecamatan Loa Janan Ilir.

f.



BAB 8

PENUTUP

LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2024



BAB VIII PENUTUP

bentuk pertanggungjawaban atas penyelenggaraan pemerintahan selama satu tahun periode pelaporan. Informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan bertujuan umum untuk memenuhi kebutuhan informasi seluruh pihak pengguna, baik untuk perencanaan, pengendalian maupun pengambilan keputusan. Selain itu laporan keuangan ini disusun untuk memenuhi beberapa peran antara lain akuntabilitas, manajemen, transparansi, keseimbangan antar generasi dan evaluasi kinerja.

Salah satu upaya konkrit yang dilakukan Pemerintah Kota Samarinda dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalah dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip keterbukaan, professional dan bertanggung jawab. Laporan Keuangan Pemerintah Kota Samarinda disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berterima umum dalam lingkungan sistem pengendalian intern yang terus diperkuat untuk menjamin keandalan laporan keuangan yang dihasilkan. Pemerintah Kota Samarinda telah berupaya untuk mewujudkan hal tersebut dengan melaksanakan berbagai pentahapan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan serta memperhatikan situasi, kondisi dan sumberdaya yang dimiliki. Sesuai dengan regulasi yang mendasarinya, Laporan Keuangan Pemerintah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2024 telah disajikan dengan bepedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2024 ini diharapkan dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas Pemerintah Kota Samarinda dalam penyampaian maksud dan penjelasan isi laporan keuangan. Kami berharap pengungkapan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2024 berbasis akrual ini dapat berguna bagi seluruh pihak yang berkepentingan. Seluruh hasil pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan yang dituangkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 disajikan sesuai dengan kondisi objektif dan diharapkan menjadi umpan balik terhadap penetapan kebijakan umum selanjutnya. Dengan segala kekurangannya, kami meyakini bahwa secara umum pengelolaan keuangan Tahun Anggaran 2024 telah memenuhi target dan sasaran pengelolaan serta pengungkapan yang disajikan dapat memberikan gambaran utuh pengelolaan guna pengambilan keputusan.

Kami menyadari bahwa penyajian laporan keuangan ini masih jauh dari sempurna, meskipun upaya pengendalian terkait dengan hasil penyusunan laporan keuangan ini telah kami lakukan dan antisipasi sebelumnya, tidak menutup kemungkinan masih banyak hal yang harus kami perbaiki dalam penyusunan laporan keuangan periode berikutnya. Masukan dan saran kami harapkan demi perbaikan penyajian dan peningkatan kualitas pengelolaan serta akuntabilitas Pemerintah Kota Samarinda di masa yang akan datang.

Semoga Tuhan yang Maha Esa meridhoi dan terus melimpahkan rahmat atas segala upaya yang telah kita lakukan, dalam rangka mewujudkan tertib akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan khususnya untuk Pemerintah Kota Samarinda yang lebih baik.

WALI KOTA SAMARINDA

ANDI HARUN



LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN DAERAH TAHUN 2024

No	Perusahaan Daerah	Sumber	Status	Aktiva Lancar	Aktiva Tidak Lancar	Aktiva Lainnya	Total Aktiva	Kewajiban Jangka Pendak	Kewajiban Jangka Panjang	Total Kewajiban	Modal Saham	Tambahan Modal Disetor	BPYDS (Bagian Pemerintah Daerah yang Disetor)	Ekuitas Lainnya	Laba Ditahan	Total Ekuitas	% Saham Daerah
	Tahun																
1	2	3	4	5	6	7	8 = 5+6+7	9	10	11 = 9+10	12	13	14=12+13	15	16	17=14+15+16	18
1	PT. BPR BANK SAMARINDA (PERSERODA)																
	2024	Audited	Sehat	48.662.012.868,37	4.623.942.360,06	150.303.997,76	53.436.259.226,19	30.577.988.553,79	0,00	30.577.988.553,79	0,00	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00	4.715.188.957,25	(6.856.918.284,85)	22.858.270.672,40	100,00
2	PERUMDAM VARIA NIAGA																
	2024	Audited	Sehat	14.029.085.070,00	24.839.586.347,00	2.108.787.250,00	40.977.458.667,00	23.781.890.762,00	0,00	23.781.890.762,00	0,00	13.230.368.830,00	13.230.368.830,00	28.741.668.000,00	(24.776.468.926,00)	17.195.567.903,00	100,00
3	PERUMDAM TIRTA KENCANA KOTA SAMARINDA																
	2024	Audited	Sehat	277.271.944.364,00	371.631.344.179,00	0,00	648.903.288.543,00	30.297.807.268,00	12.926.263.762,00	43.224.071.030,00	0,00	110.804.256.612,00	110.804.256.612,00	296.510.331.892,00	198.364.629.010,00	605.679.217.513,00	100,00

f.